









RPJMD

KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2019-2024



BUPATI LEBAK

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 69 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2019-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Bupati adalah Bupati Lebak.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
18. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
19. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
20. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

21. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

BAB II

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

Uraian RPJMD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dengan sistematika terdiri dari :

a. BAB I PENDAHULUAN;
b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
c. BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
d. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH;
e. BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;
f. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;
g. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
h. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; dan
i. BAB IX PENUTUP.

Pasal 4

RPJMD dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

Pasal 5

(1) RPJMD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah.

(2) Tujuan, sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan pembangunan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah harus sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

(3) Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 6

Untuk menjaga konsistensi RPJMD, Perangkat Daerah harus melakukan konsultasi dan koordinasi dalam penyusunan Renstra-Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

BAB III

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses permusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substasi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau

d. merugikan kepentingan Daerah dan nasional.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya :

a. bencana alam;
b. guncangan politik;
c. krisis ekonomi;
d. konflik sosial;
e. gangguan keamanan;
f. pemekaran daerah; atau
g. perubahan kebijakan nasional.

Pasal 8

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebijakan perencanaan RPJMD;
b. pelaksanaan RPJMD.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. kebijakan perencanaan RPJMD;
b. pelaksanaan RPJMD; dan
c. hasil RPJMD.

(4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala BAPPEDA.

(5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat RPJMD Tahun 2019-2024 yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah ini telah habis masa periodenya dan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2024-2029 belum ditetapkan, maka penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada RPJPD, RPJMD Tahun 2019-2024 serta berpedoman pada RPJMN.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 19 Agustus 2019
BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 19 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

DEDE JAELANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2019 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, PROVINSI BANTEN : (3, 32/2019)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2019-2024

I. UMUM

Perencanaan Pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahtraan sosial dalam suatu wilayah/daerah dan dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan, serta melalui 5 (lima) pendekatan, yaitu pendekatan teknokratif, partisipatif, politik atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up).

Dokumen perencanaan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahunn 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, meliputi dokumen perencanaan jangka panjang (RPJP), perencanaan jangka menengah (RPJM), dan perencanaan tahunan (RKP). Dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain untuk menjamin kesinambungan pembangunan di daerah.

Seiring dengan berakhirnya masa bakti Bupati dan Wakil Bupati Lebak pada tahun 2019 dan telah terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Lebak yang baru, dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahan dan aturan pelaksanaannya, maka pasca pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Pemerintah Kabupaten Lebak berkewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024.

Perda RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 pada dasarnya merupakan penjabaran visi, misi dan program-program Bupati terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi. Selain itu, penyusunan Perda RPJMD tersebut dilakukan melalui berbagai tahapan analisis data dan informasi hasil pembangunan, perumusan permasalahan dan isu strategis, perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta penetapan indikator daerah.

Untuk selanjutnya, Perda RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan landasan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selama tahun 2019 sampai dengan 2024

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 20195

Daftar Isi

Hal.

Daftar Isi i
Daftar Tabel iv

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-3
1.3. Hubungan antar Dokumen I-5
1.4. Maksud dan Tujuan I-8
1.5. Sistematika Penulisan I-8

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1. Aspek Geografi Demografi II-1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah II-1
2.1.2. Wilayah Rawan Bencana II-15
2.1.3. Demografi II-19
2.1.4. Pembangunan Wilayah Terpadu II-25
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-26
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II-26
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat II-45
2.3. Aspek Pelayanan Umum II-53
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib (Dipilah antara pelayanan dasar dan non pelayanan dasar) II-53
2.3.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar II-53
2.3.1.2 Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar II-79
2.3.1.3 Urusan Pilihan II-112
2.3.1.4 Urusan Penunjang Pemerintahan II-124
2.4. Aspek Daya Saing Daerah II-131
2.5. SPM II-141
2.6. Badan Usaha Milik Daerah II-147

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu III-1
3.1.1. Pelaksanaan APBD III-1
3.1.1.1. Realisasi Pendapatan Daerah III-1
3.1.1.2. Realisasi Belanja Daerah III-7
3.1.1.3. Realisasi Pembiayaan Daerah III-8
3.1.2. Neraca Daerah III-11
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III-15
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran III-15
3.2.2. Analisis Pembiayaan III-15
3.3. Kerangka Pendanaan III-17
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja III-197
3.3.2. Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2019-2024 ..... III-17
3.3.2.1. Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2019-2024 ..... III-17

3.3.2.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan III-24

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS IV-1
4.1. Permasalahan IV-1
4.2. Isu Strategis Daerah IV-20

BAB V VISI, MISI , TUJUAN, DAN SASARAN V-1
5.1. Visi V-1
5.2 Misi V-4
5.3 Tujan dan Sasaran V-10

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI-1
6.1. Strategi VI-1
6.2 Arah Kebijakan VI-4
6.3 Arah Kebijakan Tata Ruang..... VI-66

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII-1

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VIII-1

BAB IX PENUTUP IX-1

LAMPIRAN

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Periode 2019-2024

Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Periode 2019-2024

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Periode 2019-2024

Daftar Tabel

Hal.

Tabel 2.1 Luas Wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Lebak II-2
Tabel 2.2 Jumlah Desa/Kelurahan, RT, dan RW Berdasarkan II-2
Kecamatan, serta Jarak dari Ibukota Kecamatan
ke Ibukota Kabupaten II-3
Tabel 2.3 Ketinggian Wilayah Menurut Kecamatan..... II-5
Tabel 2.4 Kelerengan Wilayah Kabupaten Lebak Menurut
Kecamatan II-7
Tabel 2.5 Morfologi Wilayah Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan II-9
Tabel 2.6 Hidrogeologi Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan II-11
Tabel 2.7 Curah Hujan Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan ....
..... II-13
Tabel 2.8 Rencana Pola Ruang Kabupaten Lebak
Tahun 2014-2034..... II-15

Tabel 2.9 Jumlah Kondisi Rumah Akibat Bencana Banjir
Tahun 2017-2019..... II-18
Table 2.10 Jumlah Kondisi Rumah Akibat Bencana Longsor
Tahun 2017-2019 ..... II-18
Tabel 2.11 Jumlah Kondisi Rumah Akibat Bencana Puting Beliung
Tahun 2017-2019..... II-19
Tabel 2.12 Jumlah Kondisi Rumah Akibat Bencana Kebakaran
Tahun 2017-2019..... II-19
Tabel 2.13 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lebak
Tahun 2014-2017 menurut kecamatan (persen) II-20
Tabel 2.14 Kepadatan Penduduk Kabupaten Lebak Menurut
Kecamatan Tahun 2012-2017..... II-21
Tabel 2.15 Jumlah dan Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan
Tahun 2012-2017..... II-23
Tabel 2.16 Nilai PDRB Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Lebak Berdasarkan Sektor Ekonomi (Juta Rp) II-30
Tabel 2.17 Nilai PDRB Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Lebak Berdasarkan Sektor Ekonomi (Juta Rp) II-31
Tabel 2.18 Perkembangan Kontribusi Sektor pada PDRB Kabupaten
Lebak Tahun 2013-2017..... II-32
Tabel 2.19 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Lebak Tahun 2013-2017..... II-33
Tabel 2.20 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Pengeluaran Di Kabupaten Lebak 2013-2017 ..... II-35
Tabel 2.21 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut
Pengeluaran Di Kabupaten Lebak 2013-2017 ..... II-35
Tabel 2.22 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lebak
Atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran
(Juta Rupiah) Tahun 2013 – 2017 ..... II-36
Tabel 2.23 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (dalam Milyar Rupiah)
Tahun 2013-2017..... II-36
Tabel 2.24 Jumlah Rumah Tangga Menurut Status Kesejahteraan
Di Kabupaten Lebak II-41
Tabel 2.25 Indeks Gini Ratio Kabuapten Lebak Tahun 2014-2018 . II-45
Tabel 2.26 Perkembangan Angka Melek Huruf dan Rata-Rata

	lama Sekolah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2018	II-46
Tabel 2.27	Perkembangan APK dan APM SD/MI Kabupaten Lebak Tahun 2014-2018.....	II-47
Tabel 2.28	Perkembangan APK dan APM SMA/SMK/MA Kabupaten Lebak Tahun 2014– 2016	II-48
Tabel 2.29	Perkembangan APK PAUD Kabupaten Lebak Tahun 2014– 2018	II-49
Tabel 2.30	Perbandingan Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Lebak Terhadap Provinsi Banten Tahun 2016 – 2018	II-49
Tabel 2.31	Angka Kematian Ibu dan Bayi Di Kabupaten Lebak Tahun 2014-2018.....	II-52
Tabel 2.32	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2018.....	II-54
Tabel 2.33	Rasio Ruang Kelas terhadap Rombongan Belajar Kabupaten Lebak Tahun 2017.....	II-54
Tabel 2.34	Distribusi Kondisi Ruang Kelas Menurut Jenis Pendidikan	II-35
Tabel 2.35	Ketersediaan Ruang Perpustakaan Sekolah Kabupaten Lebak Tahun 2018	II-36
Tabel 2.36	Jumlah Sekolah SD dan SMP di Kabupaten Lebak Sampai Dengan Tahun 2018.....	II-36
Tabel 2.37	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan di Kabupaten Lebak Tahun 2014-2018.....	II-60
Tabel 2.38	Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2014-2018 di Kabupaten Lebak.....	II-63
Tabel 2.39	Daerah Irigasi di Kabupaten Lebak Sampai Dengan Tahun 2018	II-64
Tabel 2.40	Jenis, Jumlah, dan Luas Daerah Irigasi Tahun 2017.....	II-64
Tabel 2.41	Jumlah Pelanggan PDAM Tirta Multatuli.....	II-66
Tabel 2.42	Jenis Kegiatan Yang Memiliki IPAL di Kabupaten Lebak	II-66
Tabel 2.43	Perkembangan Angka Kriminalitas Paling Tinggi di Kabupaten Lebak Tahun 2014-2018.....	II-76
Tabel 2.44	Jumlah Penyandang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Lebak Tahun 2014-2018.....	II-78
Tabel 2.45	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Lebak Tahun 2014-2018.....	II-79
Tabel 2.46	Jumlah Penduduk Usia Kerja 15 Tahun Ke Atas Berdasarkan Jenis Kegiatan di Kabupaten Lebak Tahun 2017-2018.....	II-80
Tabel 2.47	Perkembangan Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Lebak Tahun 2014-2018.....	II-81
Tabel 2.48	Persentase Perkembangan Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2013-2017 (%)	II-80
Tabel 2.49	Perkembangan Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Lebak Tahun 2013-2017	II-82
Tabel 2.50	Jumlah Upah Minimum Kabupaten Lebak	II-83
Tabel 2.51	Jumlah Serikat Pekerja (SP)/ Seriakat Buruh (SB) di Kabupaten Lebak.....	II-84
Tabel 2.52	Kasus Perselisihan Industrial (PHI) dan PHK di Kabupaten Lebak.....	II-85
Tabel 2.53	Perkembangan Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Lebak Tahun 2012-2017.....	II-85
Tabel 2.54	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK-P) Kabupaten Lebak Tahun 2010-2017	II-87
Tabel 2.55	Rasio Ketersediaan Beras Kabupaten Lebak	

	Tahun 2015-2018	II-88
Tabel 2.56	Status Tanah Milik pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018	II-90
Tabel 2.57	Jumlah Timbulan Sampah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2017	II-93
Tabel 2.58	Jumlah Penduduk Kabupaten Lebak Berdasarkan Wajib KTP Tahun 2018	II-93
Tabel 2.59	Jumlah Penduduk Kabupaten Lebak Berdasarkan Kepala Keluarga (KK) Tahun 2018	II-95
Tabel 2.60	Rata-rata Jumlah Anak dan Rata-rata Jumlah Jiwa Per Keluarga Tahun 2014-2018	II-98
Tabel 2.61	Tahapan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Lebak Tahun 2014-2018	II-100
Tabel 2.62	Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Lebak Tahun 2010-2017	II-103
Tabel 2.63	Jumlah UMKM di Kabupaten Lebak Tahun 2014 – 2018	II-103
Tabel 2.64	Data UMKM Per-Kecamatan di Kabupaten Lebak Jumlah UMKM Berdasarkan Kelas	II-104
Tabel 2.65	Jenis Kesenian di Kabupaten Lebak	II-108
Tabel 2.66	Komunitas Adat di Kabupaten Lebak	II-109
Tabel 2.67	Pelaku Seni di Kabupaten Lebak	II-110
Tabel 2.68	Capaian dan target PKPK Kabupaten Lebak periode 2017 s.d 2023	II-111
Tabel 2.69	Tenaga fungsional Arsiparis maupun tenaga administratif arsip Kabupaten Lebak Tahun 2018	II-112
Tabel 2.70	Capaian dan target PMBM periode 2017 s.d 2023	II-112
Tabel 2.71	Keberadaan koleksi Perpustakaan Saidjah-Adinda periode 2014 s.d 2018	II-115
Tabel 2.72	Perkembangan Produksi Komoditas Buah-buahan di Kabupaten Lebak Tahun 2015-2018 (dalam kwintal)	II-113
Tabel 2.73	Perkembangan Produksi Komoditas Sayuran di Kabupaten Lebak Tahun 2013 – 2018 (dalam kwintal)	II-117
Tabel 2.74	Perkembangan Produksi Komoditas Biofarmaka di Kabupaten Lebak Tahun 2013-2018 (dalam kilogram)	II-118
Tabel 2.75	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat Dan Terbina…	II-126
Tabel 2.76	Pendokumentasian kegiatan inovasi Dalam kurun waktu 2017-2018	II-128
Tabel 2.77	Kinerja Pelayanan Publik per Unsur dan Unit Pelayanan Tahun 2014 – 2018	II-130
Tabel 2.78	Kondisi Jalan di Kabupaten Lebak Tahun 2018	II-133
Tabel 2.79	Jenis Pelayanan Perijinan di DPMPTSP Kabupaten Lebak	II-134
Tabel 2.80	Jenis Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Lebak .	II-137
Tabel 2.81	Jumlah Penduduk & Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Lebak Tahun 2017	II-141
Tabel 2.82	Kondisi Capaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Lebak Tahun 2018	II-141
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten …. Lebak Tahun Anggaran 2014 – 2018	III-2
Tabel 3.2	Rincian Aset Kabupaten Lebak	III-11
Tabel 3.3	Rincian Aset Lancar Kabupaten Lebak	III-12
Tabel 3.4	Nilai Buku Aset Tetap Per 31 Desember 2017	III-14
Tabel 3.5	Rincian Aset Lainnya Per 31 Desember 2017	III-14
Tabel 3.6	Tabel Defisit Riil Anggaran Tahun 2014-2017 (Dalam Milyar Rupiah)	III-15
Tabel 3.7	Tabel Analisis Sumber Penutup Defisit Riil Tahun 2014-2017 (Dalam Milyar Rupiah)	III-16

Tabel 3.8	Tabel Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2014-2017 (Dalam Milyar Rupiah)	III-17
Tabel 3.9	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019-2024 Kabupaten Lebak	III-20
Tabel 3.10	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024 Kabupaten Lebak.....	III-26
Tabel 3.11	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan	III-28
Tabel 4.1	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah	IV-17
Tabel 4.2	Identifikasi Akar Masalah Berdasar Urusan	IV-18
Tabel 4.3	Identifikasi Isu Strategis Daerah	IV-27
Tabel 5.1	Keterkaitan Visi Antar Dokumen Perencanaan	V-4
Tabel 5.2	Keterkaitan Tujuan Sasaran dan Indikator Target dalam Pencapaian Misi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024	V-11
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Kabupaten Lebak	VI-2
Tabel 6.2	Indikasi Kegiatan pada Arah Kebijakan Pariwisata Unggulan Nasional	VI-12
Tabel 6.3	Indikasi Kegiatan pada Arah Kebijakan Ketahanan Pangan	VI-17
Tabel 6.4	Indikasi Kegiatan pada Arah Kebijakan Daya Saing Daerah	VI-21
Tabel 6.5	Indikasi Kegiatan pada Arah Kebijakan Kota Publik Maja	VI-27
Tabel 6.6	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lebak	VI-28
Tabel 6.7	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indiktif Kabupaten Lebak	VI-40
Tabel 6.8	Rencana Pola Ruangan Kabupaten Lebak, Tahun 2014-2034.....	VI-68
Tabel 6.9	Penggunaan Kawasan Budidaya di Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan.....	VI-71
Tabel 6.10	Wilayah Rawan Bencana Menurut Kecamatan	VI-76
Tabel 6.11	Pola Ruang Kabupaten Lebak	VI-78
Tabel 6.12	Rencana Kawasan Peruntukan Pertanian Pangan di Kabupaten Lebak 2014-2034	VI-82
Tabel 6.13	Rencana Kawasan Pertambangan di Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034.....	VI-85
Tabel 6.14	Rencana Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034.....	VI-87
Tabel 6.15	Sebaran Obyek Wisata di Kabupaten Lebak	VI-87
Tabel 6.16	Rencana Peruntukan Permukiman di Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034.....	VI-89
Tabel 6.17	Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034	VI-91
Tabel 6.18	Sinkronisasi Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kabupaten Lebak	VI-115
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Periode : 2019-2024 Kabupaten Lebak.....	VII-2
Tabel 8.1	Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024.....	VIII-2
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lebak.....	VIII-3



Daftar Grafik

Hal.

Grafik 2.1	Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Lebak	II-17
Grafik 2.2	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Lebak Tahun 2014-2017	II-20
Grafik 2.3	Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017	II-25
Grafik 2.4	Piramida Penduduk Kabupaten Lebak Tahun 2017	II-26
Grafik 2.5	Perkembangan LPE Kabupaten Lebak Tahun 2014-2018	II-28
Grafik 2.6	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) .	II-29
Grafik 2.7	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (pdrb) atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014 – 2018	II-29
Grafik 2.8	PDRB ADHB Kabupaten Lebak Berdasarkan Sektor Primer Sekunder dan Premier Tahun 2017	II-30
Grafik 2.9	PDRB ADHK Kabupaten Lebak Berdasarkan Sektor Primer Sekunder dan Premier Tahun 2017	II-30
Grafik 2.10	PDRB Perkapita Tahun 2013-2018.....	II-35
Grafik 2.11	PDRB per Kapita, Pengeluaran per Kapita, dan Angka Kemiskinan Tahun 2013-2017.....	II-39
Grafik 2.12	Perbandingan Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2017-2018	II-40
Grafik 2.13	Presentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Tahun 2017	II-40
Grafik 2.14	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2018	II-41
Grafik 2.15	Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Lebak.....	II-42
Grafik 2.16	Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2014-2017	II-44
Grafik 2.17	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten Tahun 2017	II-44
Grafik 2.18	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Lebak Periode 2013 – 2018	II-46
Grafik 2.19	Capaian AMH, RLS, APS pada kurun waktu 2014-2018.	II-47
Grafik 2.20	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD/MI Kabupaten Lebak Tahun 2014-2018	II-49
Grafik 2.21	Perkembangan APK PAUD (%) Kabupaten Lebak Tahun 2014-2018	II-50
Grafik 2.22	Perkembangan Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Lebak Tahun 2014-2017	II-52
Grafik 2.23	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	II-53
Grafik 2.24	Angka Kematian Bayi.....	II-53
Grafik 2.25	Angka Kematian Ibu Tahun 2014-2018	II-54
Grafik 2.26	Jumlah Balita Penderita Gizi Buruk di Kabupaten LebakTahun 2014 – 2018.....	II-55
Grafik 2.27	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	II-57
Grafik 2.28	Rasio Guru dan Murid Kabupaten Lebak Tahun 2014-2017	II-60
Grafik 2.29	Jumlah Guru per Jenjang Pendidikandi Kabupaten Lebak Tahun 2017	II-60
Grafik 2.30	Angka Putus Sekolah di Kabupaten Lebak Tahun 2017/2018	II-61

Grafik 2.31 Angka Mengulang di Kabupaten Lebak Tahun 2017/2018 ..... II-61
Grafik 2.32 Angka Kelulusan di Kabupaten Lebak Tahun 2018 ..... II-62
Grafik 2.33 Cakupan UCI di Kabupaten Lebak Tahun 2014-2018 .... II-63
Grafik 2.34 Akses Jaga Berdasarkan Jumlah Jiwa II-69
Grafik 2.35 Jumlah IMB Yang Telah Diterbitkan Tahun 2014 – 2018 ..... II-70
Grafik 2.36 Persentase Rumah Layak Huni..... II-71
Grafik 2.37 Jumlah Izin Perumahan Per Tahun 2007-2015 ..... II-71
Grafik 2.38 Perbandingan Persentase Rumah tangga yang Memiliki Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Layak Huni Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten II-72
Grafik 2.39 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Lebak Periode 2014- 2018..... II-78
Grafik 2.40 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(TPAK) Kabupaten Lebak Periode Agustus 2014-Agustus 2018.. II-81
Grafik 2.41 Perkembangan Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Lebak tahun 2014 – 2018 ..... II-85
Grafik 2.42 Perkembangan Produksi Komoditas Pangan Utama Kabupaten Lebak Tahun 2014-2018 (dalam ton) II-86
Grafik 2.43 Produksi Pangan Hewani di Kabupaten Lebak Tahun 2014-2018 (dalam kilogram)..... II-87
Grafik 2.44 Produksi Daging Ayam dan Produksi Telur Tahun 2014-2017 ..... II-88
Grafik 2.45 Produksi Telur Tahun 2014 – 2017 ..... II-88
Grafik 2.46 Jumlah Perusahaan Yang Memiliki dan Mematuhi AMDAL II-90
Grafik 2.47 Target dan Realisasi Persentase Pengurangan Sampah Kabupaten Lebak..... II-91
Grafik 2.48 Target dan Realisasi Tingkat Cemaran Sungai, Udara dan Air Tanah Kabupaten Lebak II-92
Grafik 2.49 Kondisi Kantor Desa/Kelurahan Sampai Dengan Tahun 2018 ..... II-95
Grafik 2.50 Jumlah Posyandu di Kabupaten Lebak Tahun 2004-2018 ..... II-96
Grafik 2.51 Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (65%) Tahun 2014-2018 ..... II-98
Grafik 2.52 Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin berKB tidak terpenuhi (unmet need) 5% Tahun 2014-2018 ..... II-98
Grafik 2.53 Perkembangan Jumlah Ijin Trayek Angkutan Umum Tahun 2014-2018 ..... II-99
Grafik 2.54 Jenis Rambu Terpasang Tahun 2014 – 2018 ..... II-100
Grafik 2.55 Pemasangan dan Pemeliharaan PJU Tahun 2014 – 2018 ..... II-100
Grafik 2.56 Jumlah Investor dan Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional di Kabupaten Lebak Tahun 2014-2018..... II-103
Grafik 2.57 Jumlah Pemuda yang Mendapatkan Pembinaan..... II-103
Grafik 2.58 Jumlah Penyelenggaraan Event Olahraga..... II-104
Grafik 2.59 Pembinaan Atlet Berprestasi II-105
Grafik 2.60 Produksi Ikan Kabupaten Lebak Tahun 2014-2018 (dalam kilogram) II-111
Grafik 2.61 Perkembangan Konsumsi Ikan di Kabupaten Lebak Tahun 2014 – 2018..... II-111
Grafik 2.62 Perkembangan Jumlah Wisatawan

	Nusantara & Wisatawan Mancanegara Tahun 2014-2018	II-112
Grafik 2.63	Perkembangan Produktivitas Tanaman Padi dan Palawija di Kabupaten Lebak Tahun 2014-2018 (dalam ton/ha)..	II-112
Grafik 2.64	Perkembangan Produksi Sub Sektor Pertanian Kabupaten Lebak Tahun 2016 – 2018	II-116
Grafik 2.65	Populasi Sub Sektor Peternakan di Kabupaten Lebak Tahun 2014-2018 (dalam ekor)	II-117
Grafik 2.67	Jumlah Jenis Usaha Dan Jumlah Unit Usaha Menengah Kabupaten Lebak Tahun 2014 – 2018	II-120
Grafik 2.68	Jumlah Jenis Usaha Dan Jumlah Unit Usaha Kecil Kabupaten Lebak Tahun 2014 – 2018	II-21
Grafik 2.69	Perkembangan Jenis dan Jumlah Industri Kecil dan Menengah Tahun 2013-2017	II-21
Grafik 2.70	Kondisi Sarana Jembatan di Kabupaten Lebak Tahun 2018	II-132
Grafik 2.71	Jumlah Penduduk Kab. Lebak Menurut Kelompok Umur Tahun 2017	II-138
Grafik 3.1	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2014 – 2018.....	III-4
Grafik 3.2	Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2014 – 2018	III-5
Grafik 3.3	Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2014 – 2018	III-6
Grafik 3.4	Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2014 – 2018	III-8
Grafik 3.5	Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2014 – 2018	III-11
Grafik 3.6	Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak	III-14
Grafik 3.7	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019-2023	III-19
Grafik 6.1	Persentase Rencana Pola Ruang Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 untuk Kawasan Lindung	VI-70
Grafik 6.2	Persentase Rencana Pola Ruang Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 untuk Kawasan Budidaya.....	VI-71

Daftar Gambar

Hal.

Gambar 1.1 Hubungan Antardokumen dalam Kerangka Kerja Logis Penyusunan RPJMD Tahun 2019-2024 1-7
Gambar 1.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Lebak dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1-7
Gambar 2.1 Administratif Kabupaten Lebak II-4
Gambar 2.2 Peta Kondisi Topografi Kabupaten Lebak II-6
Gambar 2.3 Peta Kondisi Kelerengan di Kabupaten Lebak II-8
Gambar 2.4 Peta Morfologi Kabupaten Lebak II-10
Gambar 2.5 Peta DAS Kabupaten Lebak II-11
Gambar 2.6 Peta Hidrogeologi Kabupaten Lebak II-13
Gambar 2.7 Peta Curah Hujan Kabupaten Lebak II-15
Gambar 2.8 Peta Rawan Bencana Kabupaten Lebak II-17
Gambar 2.9 Peta Sebaran Kepadatan Penduduk Kabupaten Lebak II-23
Gambar 2.10 Peta Sebaran Desa/Kelurahan UCI II-64
Gambar 5.1 Keterkaitan Misi RPJPD Kabupaten Lebak Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 ..... V-7
Gambar 5.2 Keterkaitan Misi RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 ..... V-8
Gambar 5.3 Keterkaitan Misi Agenda Pembangunan Nasional Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 ..... V-8
Gambar 5.4 Keterkaitan Misi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 dan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 ..... V-9

Gambar 6.1 Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 IV-7
Gambar 6.2 Tematik-Holistik, Integratif, Spasial Penataan dari masing masing tematik- holistik integrasi spasial sebagai barikut VI-9
Gambar 6.3 Peta Rencana Kawasan Lindung Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 ..... VI-71
Gambar 6.4 Peta Rencana Kawasan Budidaya Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 ..... VI-72
Gambar 6.5 Peta Rencana Kawasan Hutan Lindung VI-73
Gambar 6.6 Peta Rencana Perlindungan Terhadap Kawasan Dibawahnya VI-74
Gambar 6.7 Peta Rencana Perlindungan Setempat VI-75
Gambar 6.8 Peta Rencana Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya VI-76
Gambar 6.9 Peta Rencana Kawasan Lindung Rawan Bencana Alam.. VI-79
Gambar 6.10 Peta Rencana Lindung Geologi VI-81
Gambar 6.11 Peta Kawasan Hutan Produksi VI-81
Gambar 6.12 Peta Kawasan Perkebunan VI-82
Gambar 6.13 Peta Rencana Kawasan Pertanian Pangan VI-84
Gambar 6.14 Peta Rencana Kawasan Perikanan VI-85
Gambar 6.15 Peta Rencana Kawasan Pertambangan VI-86
Gambar 6.16 Peta Rencana Kawasan Pariwisata VI-90
Gambar 6.17 Peta Rencana Kawasan Permukiman VI-91



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Lebak akan memasuki babak akhir dari berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, yang mengusung visi "*Menjadi Daerah Maju dan Religius Berbasis Perdesaan*". Babak akhir ini akan dijembatani oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024, yang tentu eksistensi serta efektifitas implementasinya tidak hanya akan menentukan babak akhir RPJPD dimaksud, namun juga akan sangat menentukan wajah dan arah masa depan Kabupaten Lebak pada periode rencana pembangunan jangka panjang 20 tahun berikutnya. Itu sebabnya eksistensi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 dapat disebut sebagai periode transisional yang akan menghantarkan Kabupaten Lebak ke periode RPJPD 2025-2045, sekaligus menentukan arah dan wajah pembangunan daerah 20 tahun yang akan datang, yang diyakini akan menjadi babak baru bagi Kabupaten Lebak dan kehidupan seluruh masyarakatnya.

Karenanya, Kabupaten Lebak akan memasuki babak baru dalam sejarah panjang perjalanannya sebagai sebuah entitas sosial, politik, maupun budaya. Babak baru dimaksud ditandai oleh sejumlah fakta dan kecenderungan yang menjadi indikasi gejala dimaksud, antara lain: *pertama*, Kabupaten Lebak akan genap berusia dwi abad pada tahun 2028. Pada usia ini, Kabupaten Lebak diyakini akan memasuki era baru baik secara politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Era baru secara politik ditandai dengan kebutuhan akan adanya penataan daerah maupun wilayah dalam bentuk pemekaran daerah dan/ wilayah dalam rangka meningkatkan efektifitas pembangunan dan pelayanan publik. Era baru secara politik juga akan ditandai dengan makin meluasnya arus deras demokratisasi yang bersendikan keterbukaan dan transparansi, dimana kontrol dan partisipasi publik akan makin kuat dan intensif baik dalam ruang nyata terlebih dalam ruang maya seiring dengan meluasnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di kalangan *netizen.*

Era baru secara ekonomi ditandai oleh gejala transformasi perekonomian daerah yang mulai beragam dan bergeser ke sektor sekunder. Hingga tahun 2010, kontribusi sektor pertanian dalam PDRB masih mencapai sebesar 37%. Dalam kurun waktu 8 tahun saja kontribusinya terkoreksi menjadi sekira 27% (2018), disertai dengan peningkatan kapasitas sektor sekunder terhadap peningkatan PDRB yang pada tahun 2018 meningkat sangat signifikan menjadi sebesar Rp.27,63 trilyun; meningkat lebih dari 3 kali lipat dibandingkan 8 tahun sebelumnya yang hanya sekira Rp.8,46 trilyun. Besarnya potensi sumber daya alam di sektor kelautan, pertambangan, dan pariwisata, serta potensi sektor perdagangan dan jasa di sejumlah wilayah

perkotaan, diprediksi akan mengubah basis ekonomi wilayah di masa yang akan datang.

Sedangkan era baru secara sosial budaya ditandai dengan tumbuhnya masyarakat perkotaan yang mulai berciri sebagai *urban society* di sejumlah wilayah, seperti: Rangkasbitung, Warung Gunung, dan Maja; serta menguatnya eksistensi masyarakat adat di wilayah perdesaan sebagai implikasi positif dari implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Karenanya Kabupaten Lebak akan memiliki dwirupa yang merepresentasi dua "dunia" yang berbeda, wajah modernitas yang diwakili oleh masyarakat perkotaan pada satu sisi, serta wajah tradisionalitas yang diwakili oleh eksistensi masyarakat adat yang masih sangat kuat merawat dan melaksanakan nilai-nilai tradisi dan kearifan lokalnya. Era baru secara sosial budaya juga akan ditandai dengan penetrasi arus deras informasi sebagai implikasi dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang akan mendorong perubahan sosial masyarakat Kabupaten Lebak. Perubahan sosial dimaksud berkaitan dengan perubahan perilaku sosial pada sebagian masyarakat Kabupaten Lebak yang mulai bergeser dari perilaku kolektif menjadi perilaku individualistik, dan dari perilaku konvensional di dunia nyata menjadi perilaku *digital* di dunia maya.

Kedua, hadirnya sejumlah proyek / agenda strategis nasional di bidang infrastruktur, seperti: jalan tol Serang-Panimbang yang melintasi wilayah Kabupaten Lebak dengan 3 (tiga) pintu keluar di wilayah Kabupaten Lebak, serta terkoneksi dengan ruas jalan tol yang menuju Tangerang dan DKI Jakarta; juga pembangunan jalur ganda rel kereta api Jakarta-Rangkasbitung yang akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi distribusi barang / mobilitas antardaerah dan akan berdampak positif bagi kemajuan perekonomian daerah; serta pembangunan Waduk Karian dengan luas genangan mencapai 2170 hektar dan akan mampu menampung ± 314,7 juta m^3 air yang akan menjadi sumber air baku bagi wilayah DKI Jakarta dan Tangerang Raya, sumber potensial perikanan budidaya, serta obyek pariwisata potensial di masa depan.

Dan *ketiga,* pesatnya perkembangan Kota Publik Maja yang diprediksi akan menjadi *"episentrum"* pertumbuhan ekonomi daerah dengan basis ekonomi di bidang perdagangan, jasa, *real estate*, serta sektor-sektor pendukung yang terkait. Kecamatan Maja yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor di sebelah Timurnya, dan dengan Kabupaten Tangerang di sebelah Utaranya, diprediksi akan mendapatkan "berkah" dari luberan pertumbuhan ekonomi di kawasan Jabodetabek sebagaimana juga telah dinikmati oleh kawasan sekitarnya lima hingga sepuluh tahun yang lalu.

Untuk mengantisipasi sejumlah kecenderungan dimaksud, serta memenuhi kebutuhan dan tantangan kewilayahan tersebut, diperlukan segenap ikhtiar yang optimal guna memastikan bahwa RPJMD Tahun 2019-2024 mampu menjadi dokumen perencanaan yang memiliki peran historis karena nilai strategisnya tersebut. Bukan hanya dokumen yang menjadi kelengkapan formal, namun benar-benar implementatif serta mencerminkan produk perencanaan teknokratis yang ilmiah, obyektif, dan rasional, sekaligus merupakan produk perencanaan partisipatif yang mengakomodasi keseluruhan kebutuhan, ekspektasi, dan masalah yang dihadapi seluruh masyarakat, serta mampu mengantisipasi beragam tantangan yang akan

dihadapi sepanjang lima tahun mendatang, dengan spirit visi Kepala Daerah terpilih yang akan mewujudkan Kabupaten Lebak sebagai destinasi wisata unggulan nasional berbasis potensi lokal. Untuk kebutuhan inilah RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 ini dirumuskan, guna dapat menjadi peta jalan bagi upaya bersama mencapai visi pembangunan daerah jangka menengah.

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, RPJMD berlaku efektif baik secara hukum maupun politik selama 5 (lima) tahun, sesuai masa jabatan Kepala Daerah. Karenanya dokumen RPJMD memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Dengan demikian maka secara fungsional RPJMD selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana tahunan pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, maupun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah selama periode tersebut.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224) ;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Presiden Republik Indoesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Mininimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
26. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten No. 32);
28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 9 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebak Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 19);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8).

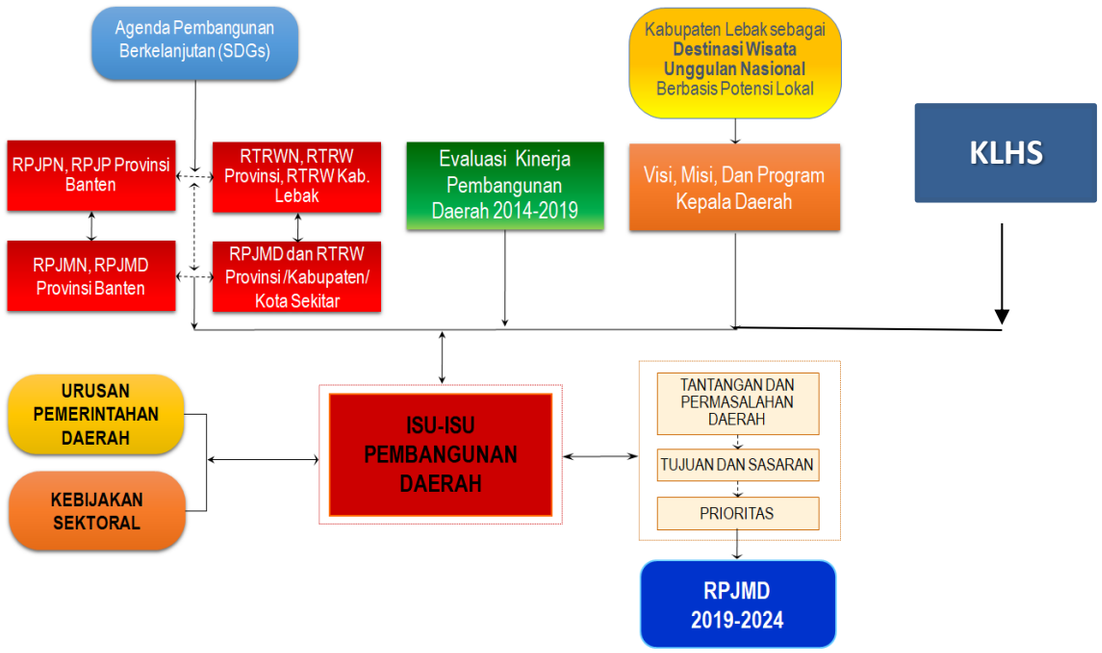
1.3 Hubungan Antardokumen

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD pada hakikatnya merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam menjalankan agenda pembangunan yang tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Karenanya dipersyaratkan adanya integralitas, harmoni, dan sinergi antardokumen perencanaan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota,

serta beragam dokumen perencanaan sektoral. Terkait dengan hal ini, maka penyusunan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024, telah menjadikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025; RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025; RPJPD Kabupaten Lebak Tahun 2005-2025; Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional; RTRW Provinsi Banten Tahun 2010-2030; RTRW Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034; dan RPJMN Tahun 2015-2019; serta RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, sebagai pedoman dan/ atau rujukan dalam penyusunan RPJMD ini.

Di samping itu, penyusunan RPJMD ini telah pula memperhatikan sejumlah dokumen perencanaan dan kebijakan terkait lainnya, antara lain: (1) target capaian *Sustainable Development Goals* (SDG's); (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, yang merupakan kebijakan nasional pada daerah sekitar yang dapat dimanfaatkan dampaknya bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Lebak; (3) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang relevan dengan salah satu permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Lebak; (4) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, yang relevan dengan salah satu permasalahan dalam tata kelola pemerintahan daerah; (5) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, yang masih relevan dengan isu keadilan sosial dalam agenda Nawacita; (6) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), yang sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan; (7) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai dokumen kebijakan yang terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan; serta (8) RPJMD dan RTRW Kabupaten/Kota sekitar, yaitu Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Pandeglang, serta Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat yang beririsan kepentingan dengan Kabupaten Lebak khususnya di wilayah perbatasan.

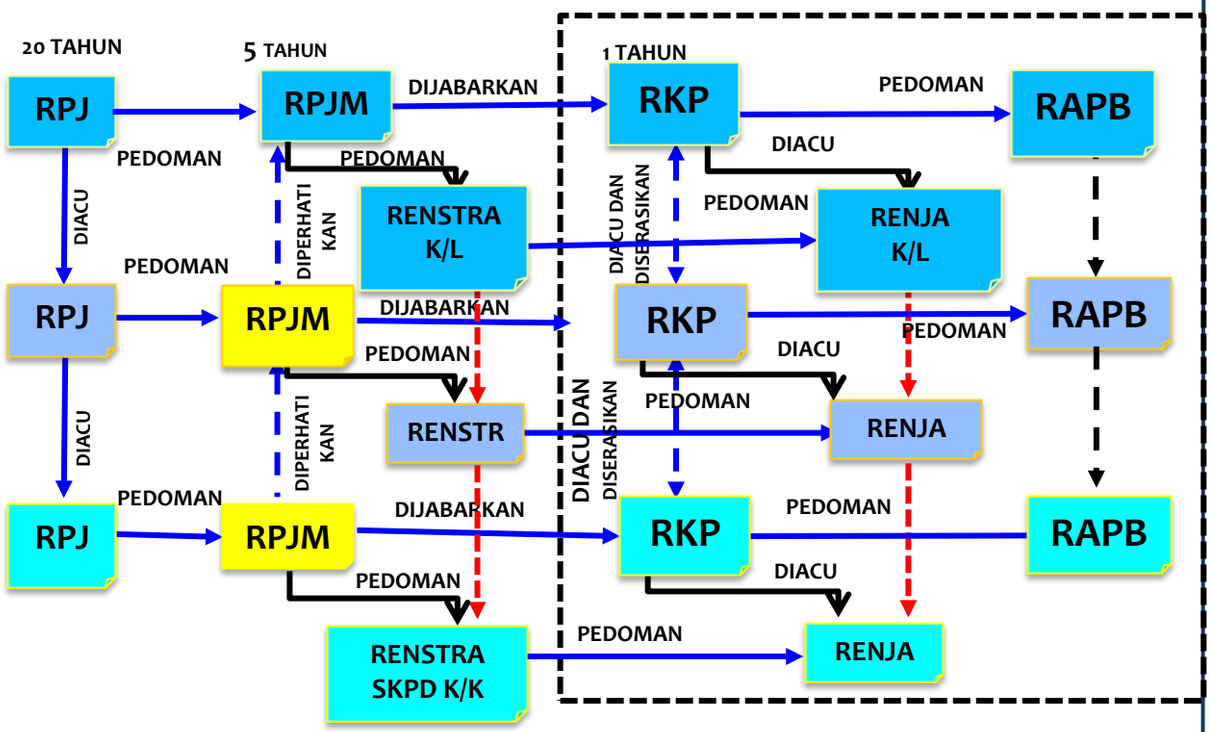
Penelaahan sejumlah dokumen perencanaan dan dokumen kebijakan dimaksud diatas dilakukan dalam rangka membangun sinkronisasi dan harmonisasi sehingga diharapkan dapat tercapai keselarasan dan sinergi antardaerah, antarwaktu, antarruang dan antarfungsi pemerintahan, serta antarpemangku kepentingan. Dengan demikian akan lebih menjamin sinergi, konsistensi, dan efektifitas antara dokumen perencanaan dengan kebijakan penganggaran, implementasi program dan kegiatan tahunan, serta pelaksanaan fungsi pengawasan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Adapun hubungan antardokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam kerangka kerja logis penyusunan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1.1 Hubungan Antardokumen dalam Kerangka Kerja Logis Penyusunan RPJMD Tahun 2019-2024

Namun jika ditinjau secara yuridis, hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagamana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut.

Gambar 1.2
Hubungan RPJMD Kabupaten Lebak
dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019–2024 ini disusun dengan maksud dalam rangka menyediakan sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah lima tahunan yang komprehensif dan integral sebagaimana diatur dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan penyusunannya dapat dijabarkan dalam beberapa perspektif sebagai berikut:

1. Menyelaraskan arah dan kebijakan pembangunan daerah dengan arah dan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi sehingga tujuan pembangunan dapat dicapai secara sinergis;
2. Menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang dapat menjadi acuan bagi seluruh jajaran perangkat daerah di Kabupaten Lebak dalam menjabarkan prioritas program dan kegiatan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. Menetapkan target dan indikator kinerja yang digunakan sebagai standar dalam melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah;
4. Memelihara kesinambungan proses dan hasil-hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan dari waktu ke waktu.
5. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah serta pemahaman mengenai arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lebak pada periode tahun 2019-2024 sehingga terbangun efektifitas koordinasi, integrasi, dan sinergi antarpemangku kepentingan pembangunan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 ini memuat 9 (sembilan) bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan antar Dokumen
1.4. Maksud dan Tujuan
1.5. Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1. Aspek Geografi Demografi
  2.1.1. Geografis
  2.1.2. Demografi
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
  2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
  2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
  2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga
2.3. Aspek Pelayanan Umum
  2.3.1. Fokus Pelayanan Urusan Wajib yang tidak Terkait Pelayanan Dasar

2.3.2. Fokus Pelayanan Urusan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar
2.3.3 Fokus Pelayanan Urusan Pilihan
2.4. Aspek Daya Saing Daerah
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah /Infrastruktur
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia
2.5. Standar Pelayanan Minimal
2.6. Badan Usaha Milik Daerah
Bab III Gambaran Keuangan Daerah
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
3.1.1. Pelaksanaan APBD
3.1.1.1. Realisasi Pendapatan Daerah
3.1.1.2. Realisasi Belanja Daerah
3.1.1.3. Realisasi Pembiayaan Daerah
3.1.2. Neraca Daerah
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran
3.2.2. Analisis Pembiayaan
3.3. Kerangka Pendanaan
3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama
3.3.2. Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2019-2023
3.3.2.1. Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2019-2023
3.3.2.2. Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2019-2023
3.3.2.3. Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2019-2023
3.3.2.4. Perhitungan Kerangka Pendanaan
Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
4.1. Permasalahan
4.2. Isu Strategis Daerah
Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
5.1. Visi
5.2. Misi
5.3. Tujan dan Sasaran
Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
6.1. Strategi
6.2 Arah Kebijakan
6.3 Arah Kebijakan Tata Ruang
Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini memuat penjelasan mengenai kerangka pendanaan dan program perangkat daerah.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini memuat uraian mengenai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bab IX Penutup

Bab ini memuat epilog yang memuat penguatan dan penegasan komitmen dalam mencapai tujuan pembangunan daerah sebagaimana telah dicanangkan dalam RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024.



BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Lebak secara geografis terletak di antara 105°25'-106°30' Bujur Timur dan 6°18'-7°00' Lintang Selatan. Dengan bentang alam yang cukup luas tersebut Kabupaten Lebak memiliki luas wilayah mencapai 330.507,2 hektar atau sekitar 3.305,07 km². Luas wilayah Kabupaten Lebak ini mencapai kurang lebih 34,20% dari luas Provinsi Banten.

Kabupaten Lebak terletak di bagian Selatan Provinsi Banten, yang bersebelahan dengan Kabupaten Pandeglang di batas bagian Baratnya. Bentuk wilayah yang membujur dari Utara ke Selatan, menghubungkan Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Serang dan sebagian dengan Kabupaten Tangerang di batas bagian Utaranya. Di bagian Timurnya berbatasan dengan dua kabupaten paling barat Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bogor dan Sukabumi. Sementara pada bagian Selatannya, Kabupaten Lebak terkoneksi langsung dengan Samudera Indonesia sehingga memiliki wilayah laut sekitar 73,3 km² dengan panjang pantai mencapai 91,42 km².

Secara administratif dibagi dalam 28 kecamatan, terdiri dari 340 desa dan 5 kelurahan. Kelima kelurahan yang ada hanya terdapat di Kecamatan Rangkasbitung yang merupakan Ibukota Kabupaten Lebak. Di samping itu, terdapat pula sekira 5.995 Rukun Tetangga (RT) dan 1.680 Rukun Warga (RW) yang merupakan perangkat masyarakat yang membantu memfasilitasi sebagian fungsi pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat RT maupun RW sehingga mampu mereduksi problem aksesibilitas secara geografis. Kecamatan Cibeber merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu sekitar 40.096,41 Ha atau sekitar 12,13% dari luas wilayah Kabupaten Lebak. Cibeber juga merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak, yaitu 22 desa. Sementara kecamatan dengan luas wilayah paling terkecil adalah Kecamatan Kalanganyar yang hanya sekitar 0,87% dari luas wilayah Kabupaten Lebak, atau sekitar 2.859,34 Ha. Kalanganyar juga termasuk kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit (7 desa), setelah Kecamatan Lebakgedong.

Tabel 2.1 memberikan gambaran tentang rincian jumlah desa/kelurahan dan luas wilayah serta persentase luas wilayah masing-masing kecamatan dimaksud di atas.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lebak

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Cibeber	22	40.096,41	12,13
2	Cimarga	17	18.752,65	5,67
3	Panggarangan	11	17.715,51	5,36
4	Banjarsari	20	15.955,50	4,83
5	Cileles	12	15.338,76	4,64
6	Cigemblong	9	15.304,93	4,63
7	Bayah	11	14.377,21	4,35
8	Leuwidamar	12	14.305,09	4,33
9	Gunungkencana	12	13.801,50	4,18
10	Cihara	9	12.469,86	3,77
11	Cirinten	10	12.254,92	3,71
12	Cijaku	10	11.468,42	3,47
13	Wanasalam	13	11.419,02	3,45
14	Sobang	10	11.149,34	3,37
15	Sajira	15	10.466,64	3,17
16	Malingping	14	10.201,47	3,09
17	Cilograng	10	9.601,71	2,91
18	Bojongmanik	9	9.591,83	2,9
19	Curugbitung	10	9.317,33	2,82
20	Lebakgedong	6	9.159,98	2,77
21	Muncang	12	8.695,38	2,63
22	Maja	14	7.817,14	2,37
23	Rangkasbitung	16	7.309,70	2,21
24	Cipanas	14	6.525,30	1,97
25	Cikulur	13	6.182,97	1,87
26	Warunggunung	12	4.736,53	1,43
27	Cibadak	15	3.632,71	1,1
28	Kalanganyar	7	2.859,34	0,87
	Kabupaten Lebak	345	330.507,2	100

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

Tabel 2.2 memberikan gambaran tentang rincian jumlah desa/kelurahan dan luas wilayah serta persentase luas wilayah masing-masing kecamatan dimaksud di atas.

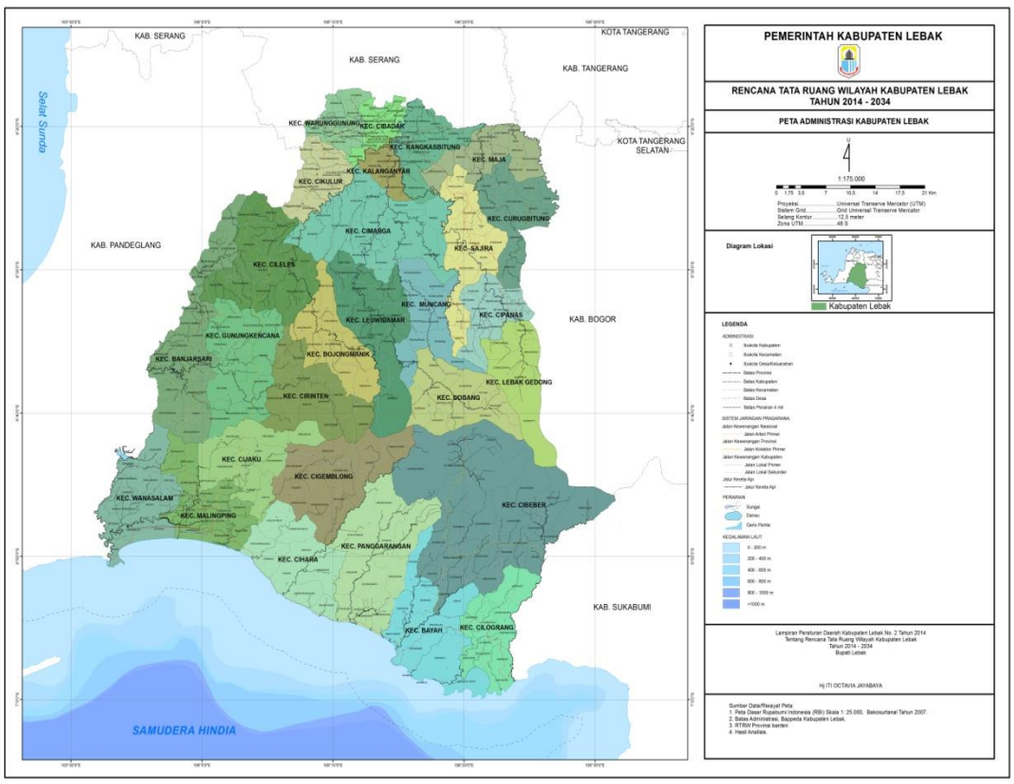
Tabel 2.2
Jumlah Desa/Kelurahan, RT, dan RW Berdasarkan Kecamatan, serta Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jarak ke Ibukota (km)	Jumlah RT	Jumlah RW
1	Malingping	14	100	207	49
2	Wanasalam	13	99	196	49
3	Panggarangan	11	127	208	67
4	Cihara	9	105	139	49
5	Bayah	11	135	255	88
6	Cilograng	10	160	166	85
7	Cibeber	22	152	291	134
8	Cijaku	10	80	119	32
9	Cigemblong	9	77	108	30
10	Banjarsari	20	70	301	75
11	Cileles	12	50	214	60
12	Gunung Kencana	12	58	155	51
13	Bojongmanik	9	36	141	38
14	Cirinten	10	45	170	53
15	Leuwidamar	12	20	300	73
16	Muncang	12	42	163	40
17	Sobang	10	62	205	39
18	Cipanas	14	38	270	54
19	Lebak Gedong	6	47	84	17
20	Sajira	15	27	243	64
21	Cimarga	17	9	306	93
22	Cikulur	13	17	207	49
23	Warung Gunung	12	10	246	58
24	Cibadak	15	5	275	67

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jarak ke Ibukota (km)	Jumlah RT	Jumlah RW
25	Rangkasbitung	16	1	539	136
26	Kalanganyar	7	1	129	39
27	Maja	14	21	225	54
28	Curugbitung	10	34	133	37
	Jumlah	**345**	**-**	**5.995**	**1.680**

Sumber: Kabupaten Lebak Dalam Angka, 2018

Gambar 2.1
Peta Administratif Kabupaten Lebak



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

B. Kondisi Topografi

Secara topografi cukup bervariasi, mulai dari dataran tinggi hingga dataran yang relatif rendah di bagian utara dan selatan, dengan ketinggian berkisar antara 100 meter hingga di atas 1.000 meter dari permukaan laut. Daerah dengan ketinggian antara 100 sampai 500 meter diatas permukaan laut meliputi sekitar 80%, kawasan yang berada pada ketinggian 500 sampai 1.000 meter meliputi 16 % dan kawasan yang berada pada ketinggian lebih dari 1.000 meter sekitar 4% dari luas keseluruhan. Ketinggian wilayah dapat diklasifikasikan kedalam tiga kelas ketinggian, yaitu :

1. Ketinggian antara 100-500 meter diatas permukaan air laut, tersebar di Kecamatan Banjarsari, Bayah, Bojongmanik, Cibadak, Cibeber, Cigemblong, Cihara, Cijaku, Cikulur, Cileles, Cilograng, Cimarga, Cipanas, Cirinten, Curugbitung, Gunungkencana, Kalanganyar, Lebakgedong, Malingping, Muncang, Panggarangan, Rangkasbitung, Maja, Wanasalam, Warunggunung, dan Kalanganyar.
2. Ketinggian antara 500-1.000 meter diatas permukaan air laut, tersebar di sebagian Kecamatan Bayah, Bojongmanik, Cibeber, Cigemblong, Cijaku, Cileles, Cilograng, Cipanas, Cirinten, Gunungkencana, Lebakgedong, Leuwidamar, Panggarangan, Muncang, Sajira dan Sobang.
3. Ketinggian lebih dari 1.000 meter diatas permukaan air laut, tersebar di sebagian kecil Kecamatan Cibeber, Cipanas, Lebakgedong, Muncang dan Sobang.

Keadaan topografi berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini:

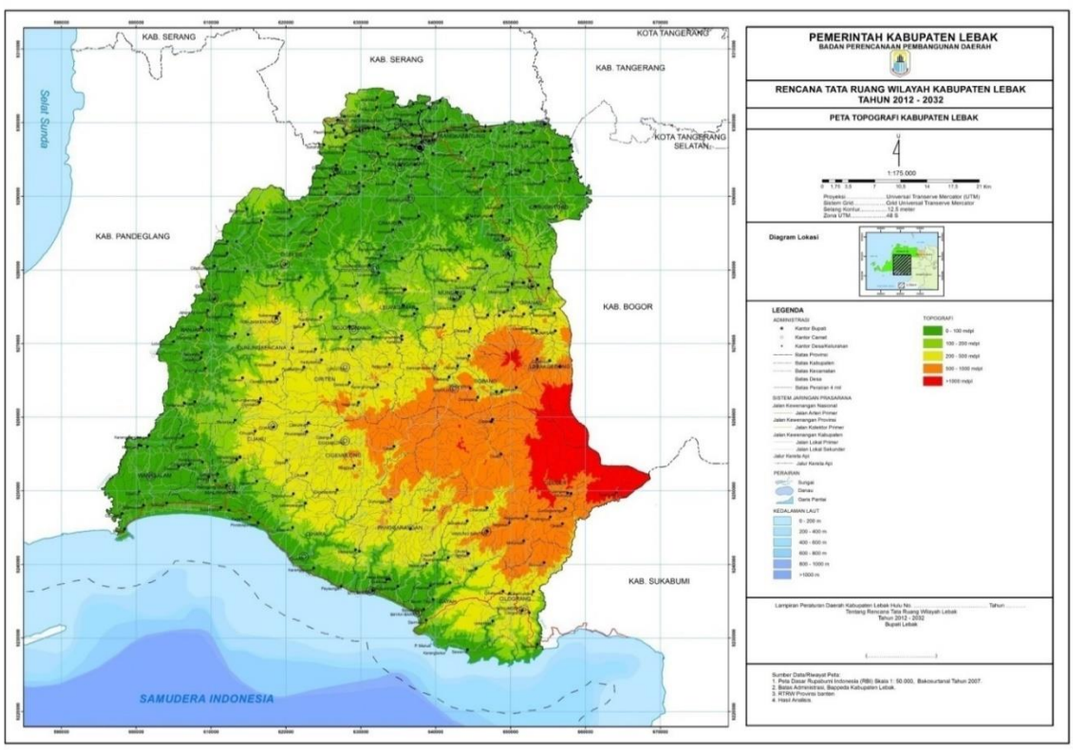
Tabel 2.3
Ketinggian Wilayah Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Topografi (Ketinggian Wilayah) (mdpl)					Luas (Ha)
		0-100	100-200	200-500	500-1000	>1000	
1.	Malingping	8.447,82	1.636,43	117,22			10.201,47
2.	Wanasalam	11.408,40	10,62				11.419,02
3.	Panggarangan	2.934,25	1.780,78	9.833,92	3.166,57		17.715,51
4.	Bayah	5.117,26	3.505,48	5.415,04	339,43		14.377,21
5.	Banjarsari	13.803,26	2.152,24				15.955,50
6.	Bojongmanik	552,81	5.194,13	3.720,09	124,81		9.591,83
7.	Cibadak	3.632,71					3.632,71
8.	Cibeber	16,30	249,71	4.926,78	26.021,80	8.881,82	40,096,41
9.	Cigemblong		87,54	9.973,54	5.243,85		15.304,93
10.	Cihara	4.319,76	3.941,22	4.208,88			12.469,86
11.	Cijaku	406,48	2.776,55	8.178,88	106,50		11.468,42
12.	Cikulur	5.575,09	607,88				6.182,97
13.	Cileles	10.701,09	4.531,52	105,83	0,32		15.338,76
14.	Cilograng	701,11	1.498,86	5.156,48	2.245,27		9.601,72
15.	Cimarga	15.794,41	2.786,21	172,03			18,752,65
16.	Cipanas	41,18	3.827,86	1.691,63	909,00	55,64	6.525,30
17.	Cirinten		403,06	10.512,94	1.338,96		12.254,96

No.	Kecamatan	Topografi (Ketinggian Wilayah) (mdpl)					Luas (Ha)
		0-100	100-200	200-500	500-1000	>1000	
18.	Curugbitung	7.141,83	2.167,20	8,30			9.317,33
19.	Gunungkencana	1.810,40	4.980,38	7.008,88	1,85		13.801,50
20.	Kalanganyar	2.859,34					2.859,34
21.	Lebakgedong		126,46	2.761,35	3.579,16	2.693,02	9.159,98
22.	Leuwidamar	2.199,13	6.384,99	4.165,87	1.555,10		14.305,09
23.	Maja	7.817,14					7.817,14
24.	Muncang	384,54	3.664,69	4.078,26	509,87	58,02	8.695,38
25.	Rangkasbitung	7.309,67	0,004				7.309,71
26.	Sajira	5.379,68	4.049,49	1.020,92	16,55		10.466,64
27.	Sobang			3.730,04	6,731,65	687,65	11.149,34
28.	Warunggunung	3.048,09	1.688,44				4.736,53
	Jumlah	121.401,73	58.051,76	86.786,85	51.890,69	12.376,14	330.507,2

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

Gambar 2.2
Peta Kondisi Topografi Kabupaten Lebak



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

Kabupaten Lebak berdasarkan lerengnya terbagi menjadi beberapa kelas, yaitu :

1. 0 – 2%, tersebar di bagian selatan, barat dan utara
2. 2 – 5%, tersebar di bagian selatan, barat dan utara
3. 5 – 15%, terletak di bagian tengah dan selatan kearah timur

4. 15 – 25%, terletak di bagian tengah dan selatan kearah timur
5. 25 – 40%, terletak di bagian timur
6. >40%, terletak di bagian timur

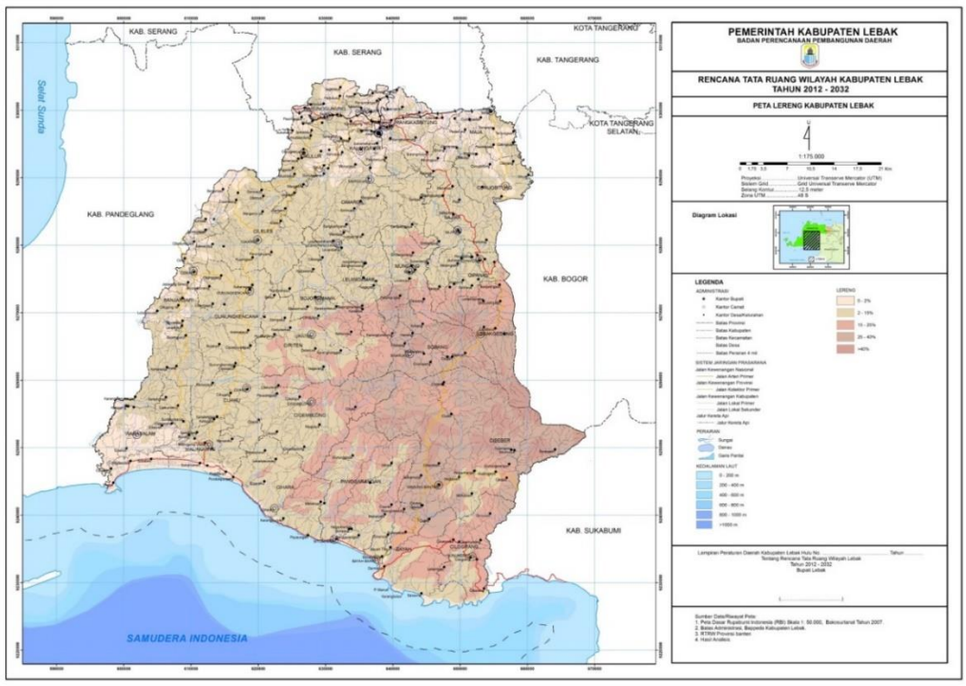
Tabel 2.4
Kelerengan Wilayah Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Lereng (Kemiringan Lahan)					Total
		0-2%	2-15%	15-25%	25-40%	>40%	
1	Malingping	3.501,62	6.699,84				10.201,47
2	Wanasalam	7.933,32	3.485,70				11.419,02
3	Panggarangan	604,33	7.677,02	8.320,45	1.075,05	38,67	17.715,51
4	Bayah	996,36	5.453,14	6.415,99	1.511,72		14.377,21
5	Cilograng	177,61	2.693,58	6.034,87	695,66		9.601,72
6	Cibeber		2,672,42	6.235,67	23.887,95	7.300,37	40,096,41
7	Cijaku		10.382,92	1.085,49			11.468,42
8	Banjarsari	5.625,57	10.329,93				15.955,50
9	Cileles	1.168,34	14.170,41				15.338,76
10	Gunungkencana	144,93	13.656,57				13.801,50
11	Bojongmanik		7.464,43	2.127,41			9.591,83
12	Leuwidamar		9.989,00	3.378,52	921,99	15,59	14.305,09
13	Muncang		3.709,38	2.795,32	1.453,04	737,64	8.695,38
14	Sobang			1.852,88	7.452,98	1.843,48	11.149,34
15	Cipanas		4.703,95	1.065,33	509,94	246,08	6.525,30
16	Sajira	637,24	9.229,80	599,60			10.466,64
17	Cimarga	1.686,40	16.663,10	403,15			18,752,65
18	Cikulur	2.351,74	3.831,23				6.182,97
19	Warunggunung	2.994,66	1.741,87				4.736,53
20	Cibadak	3.134,19	498,53				3.632,71
21	Rangkasbitung	4.573,24	2.736,47				7.309,71
22	Maja	5.199,86	2.617,28				7.817,14

No.	Kecamatan	Lereng (Kemiringan Lahan)					Total
		0-2%	2-15%	15-25%	25-40%	>40%	
23	Curugbitung	1.892,77	7.424,56				9.317,33
24	Cihara	689,76	9.256,39	2.523,71			12.469,86
25	Cigemblong		7.416,31	5.511,57	2.377,06		15.304,93
26	Cirinten		9.237,10	2.907,03	110,83		12.254,96
27	Lebakgedong		56,69	3.510,67	3.614,18	1.978,43	9.159,98
28	Kalanganyar	1.817,11	1.042,23				2.859,34
	Jumlah	45.129,04	174.839,83	54.767,64	43.610,41	12.160,25	330.507,2

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

Gambar 2.3
Peta Kondisi Kelerengan di Kabupaten Lebak



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

C. *Kondisi Morfologi*

Morfologi dapat dibagi menjadi dataran, perbukitan (landai, bergelombang, terjal) dan gunung/pegunungan.

1. Dataran, tersebar di bagian, utara, barat dan selatan ,
2. Perbukitan landai, tersebar di bagian selatan dan utara kearah timur ,
3. Perbukitan bergelombang, terletak di bagian tengah dan selatan kearah timur,
4. Perbukitan terjal, terletak di bagian tengah ke arah timur
5. Gunung/Pegunungan, 40%, terletak di bagian timur .

Tabel 2.5
Morfologi Wilayah Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan

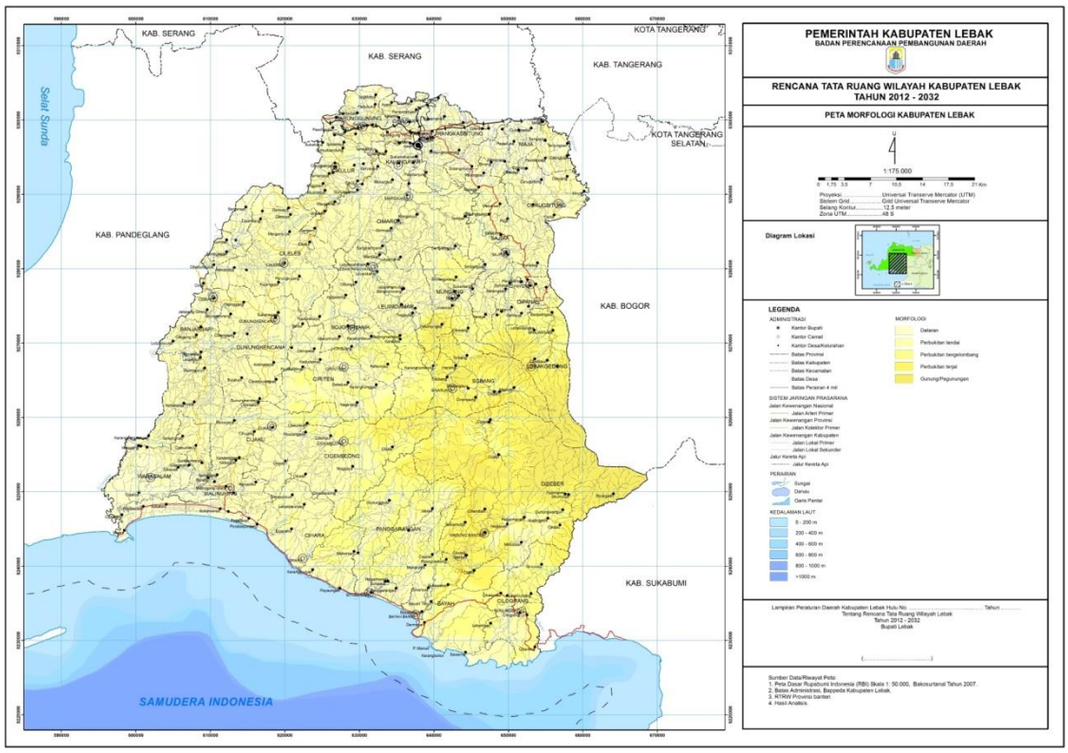
No.	Kecamatan	Morfologi					Total
		Dataran	Perbukitan Landai	Perbukitan Bergelombang	Perbukitan Terjal	Gunung / Pegunungan	
1	Malingping	8.701,25	1.500,22				10.201,47
2	Wanasalam	11.419,02					11.419,02
3	Panggarangan	1.679,7	6.603,64	8.676,97	685,80	69,40	17.715,51
4	Bayah	2.476,88	4.080,35	6.327,09	1.492,89		14,.377,21
5	Cilograng	287,05	2.491,95	6.115,35	554,53	152,83	9.601,71
6	Cibeber		6.672,81	6.937,13	23.146,62	3.339,85	40.096,41
7	Cijaku	6.529	3.864,06	1.075,36			11.468,42
8	Banjarsari	12.991,70	2.963,80				15.955,50
9	Cileles	9.654,26	5.684,50				15.338,76
10	Gunungkencana	5.959,78	7.711,72	130,00			13.801,50
11	Bojongmanik	919,7	8.672,13	2.129,68			9.591,83
12	Leuwidamar	2.191,89	7.808,94	4.113,38	141,60	49,28	14.305,09
13	Muncang	1.443,60	3.001,81	1.965,70	1.484,24	800,03	8.695,38
14	Sobang		533,74	2.559,46	6.749,82	1.306,32	11.149,34
15	Cipanas	1.958,40	3.171,84	1.316,37	78,69		6.525,30
16	Sajira	6.661,87	3.252,66	547,99	4,12		10.466,64
17	Cimarga	12.204,30	6.303,76	144,55	100,04		18.752,65
18	Cikulur	5.348,01	834,96				6.182,97
19	Warunggunung	4.548,36	188,17				4.736,53
20	Cibadak	3.632,71					3.632,71
21	Rangkasbitung	6.870,18	439,53				7.309,70
22	Maja	7.806.53	10,61				7.817,14
23	Curugbitung	8.501,69	815,64				9.317,33
24	Cihara	4.109,21	6.139,71	2.220,94			12.469,86
25	Cigemblong	1.402,49	6.135,77	7.405,49	361,18		15.304,93
26	Cirinten	1.873,62	7.331,17	3.050,16			12.254,95
27	Lebakgedong		755,61	3.565,86	4.494,47	344,04	9.159,98

No.	Kecamatan	Morfologi					Total
		Dataran	Perbukitan Landai	Perbukitan Bergelombang	Perbukitan Terjal	Gunung / Pegunungan	
28	Kalanganyar	2.838,78	20,56				2.859,34
	Jumlah	132.009,98	96.989,65	56.151,80	39.294,00	6.061,75	330.507,2

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

Gambar 2.4

Peta Morfologi Kabupaten Lebak



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

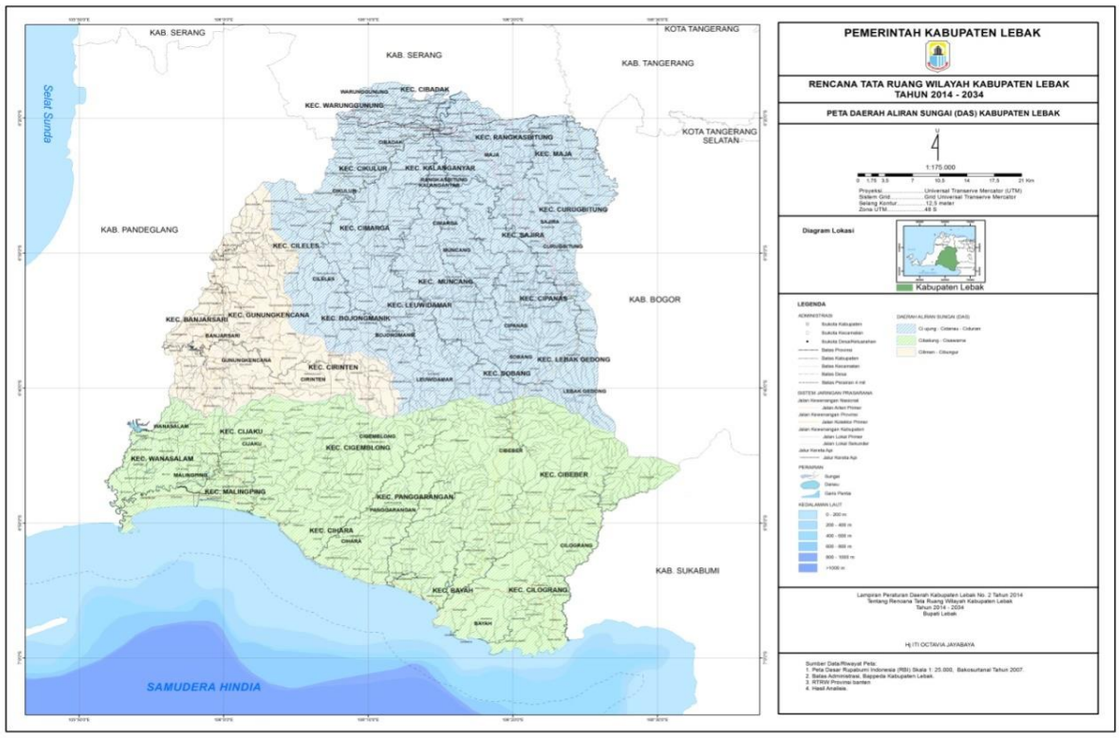
D. Kondisi Hidrologi

Secara hidrologi memiliki dua Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Ciujung yang meliputi Sungai Ciujung, Sungai Cilaki, Sungai Ciberang, dan Sungai Cisimeut; serta DAS Ciliman - Cimadur yang meliputi Sungai Ciliman dengan anak sungainya, Sungai Cimadur, Sungai Cibareno, Sungai Cisiih, Sungai Cihara, Sungai Cipager, dan Sungai Cibaliung.

Sungai Ciujung merupakan sungai terbesar di Provinsi Banten, yang melewati 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang. Mata air Sungai Ciujung sangat dilindungi oleh Masyarakat Adat Kanekes karena berada di kawasan hutan Sasaka Buana atau Pada Ageung di bagian selatan kampung Cikeusik dan hutan sakral Sasaka Domas di kawasan hulu Sungai Ciparahiang anak Sungai Ciujung, bagian selatan Kampung Cibeo, Baduy dalam. Luas Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Ciujung mencapai kurang lebih 1850 km^2 dan panjang mencapai 142 km hingga bermuara di Teluk Pontang Kabupaten

Serang, Pantai Utara Laut Jawa. DAS Ciujung terdiri dari tiga anak sungai utama yaitu : Sungai Cisimeut dengan luas Sub DAS mencapai 458 km^2, Sungai Ciberang dengan luas Sub DAS 304 km^2, Sungai Ciujung Hulu dengan luas Sub DAS 594 km^2 dan anak sungai lainnya yang lebih kecil berada disebelah hilir kota Rangkasbitung yaitu Sungai Cikambuy, Sungai Cisangu, Sungai Ciasem, Sungai Cibongor dan Sungai Ciyapah.

Gambar 2.5
Peta DAS Kabupaten Lebak



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

Secara hidrogeologi, Kabupaten Lebak terbagi menjadi :

1. Air tanah dangkal yang berada di bagian barat daya dan timur ;
2. Air tanah terletak di seluruh wilayah ;
3. Air tanah yang memancar terletak di bagian timur ;
4. Wilayah air bendungan karian yang terletak di utara (Kecamatan Cimarga, Maja, Rangkasbitung dan Sajira).

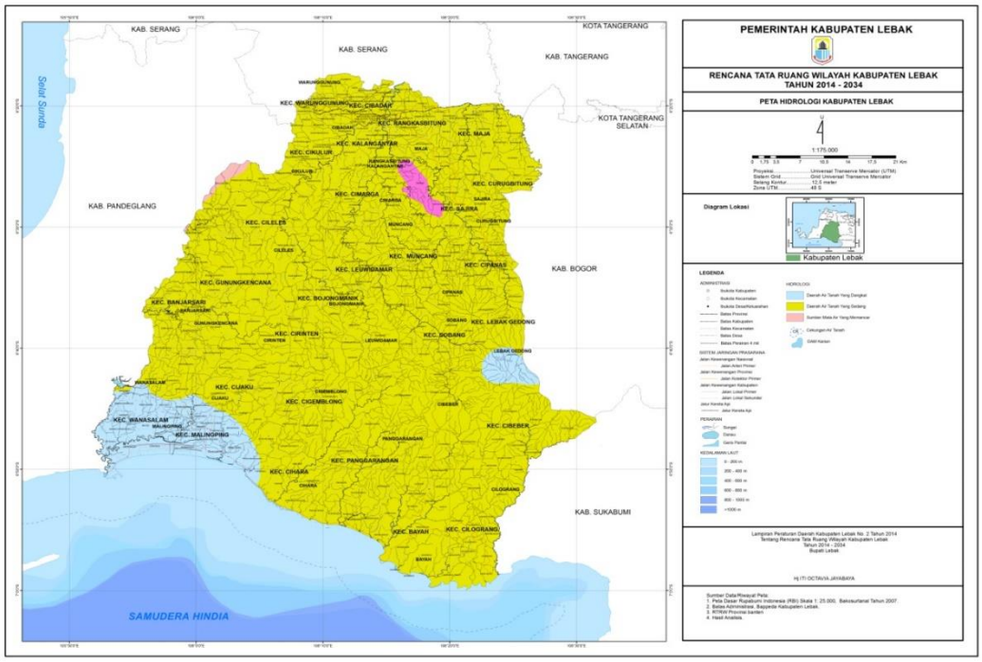
Tabel 2.6
Hidrogeologi Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Daerah Air Tanah yang Dangkal	Daerah Air Tanah yang Sedang	Rencana DAM Karian	Sumber Mata Air yang Memancar	Total (Ha)
1	Malingping	7.949,77	2.251,70			10.201,47
2	Wanasalam	9.899,71	1.519,31			11.419,02
3	Panggarangan		17.715,51			17.715,51
4	Bayah		14.377,21			14.377,21

No.	Kecamatan	Daerah Air Tanah yang Dangkal	Daerah Air Tanah yang Sedang	Rencana DAM Karian	Sumber Mata Air yang Memancar	Total (Ha)
5	Cilograng		9.601,72			9.601,72
6	Cibeber	1.495,63	39.026,58			40.096,41
7	Cijaku	710,96	10.757,46			11.468,42
8	Banjarsari		15.175,77		779,73	15.955,50
9	Cileles		15.114,13		223,63	15.338,76
10	Gunungkencana		13.801,50			13.801,50
11	Bojongmanik		9.591,83			9.591,83
12	Leuwidamar		14.305,09			14.305,09
13	Muncang		8.695,38			8.695,38
14	Sobang	684,52	10.464,82			11.149,34
15	Cipanas		6.525,30			6.525,30
16	Sajira		10.067,03	399,61		10.466,64
17	Cimarga		16.958,55	1.794,10		18.752,65
18	Cikulur		6.182,97			6.182,97
19	Warunggunung		4.736,53			4.736,53
20	Cibadak		3.632,71			3.632,71
21	Rangkasbitung		6.994,54	315,16		7.309,71
22	Maja		7.806,53	10,61		7.817,14
23	Curugbitung		9.317,33			9.317,33
24	Cihara	1.495,63	10.974,23			12.469,86
25	Cigemblong		15.304,93			15.304,93
26	Cirinten		12.254,96			12.254,96
27	Lebakgedong	1.575,29	7.584,69			9.159,98
28	Kalanganyar		2.859,34			2.859,34
	Kab. Lebak	23.385,70	303.598,63	2.519,48	1.003,35	330,507,2

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

Gambar 2.6
Peta Hidrogeologi Kabupaten Lebak



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

E. Kondisi Klimatologi

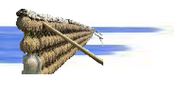
Berdasarkan klimatologi memiliki curah hujan yang tinggi yaitu berkisar antara 2000 - >5000 mm/tahun. Curah hujan terbesar berada di bagian timur sedangkan terkecil berada di bagian utara. Komposisi luasan curah hujan per kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7
Curah Hujan Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan

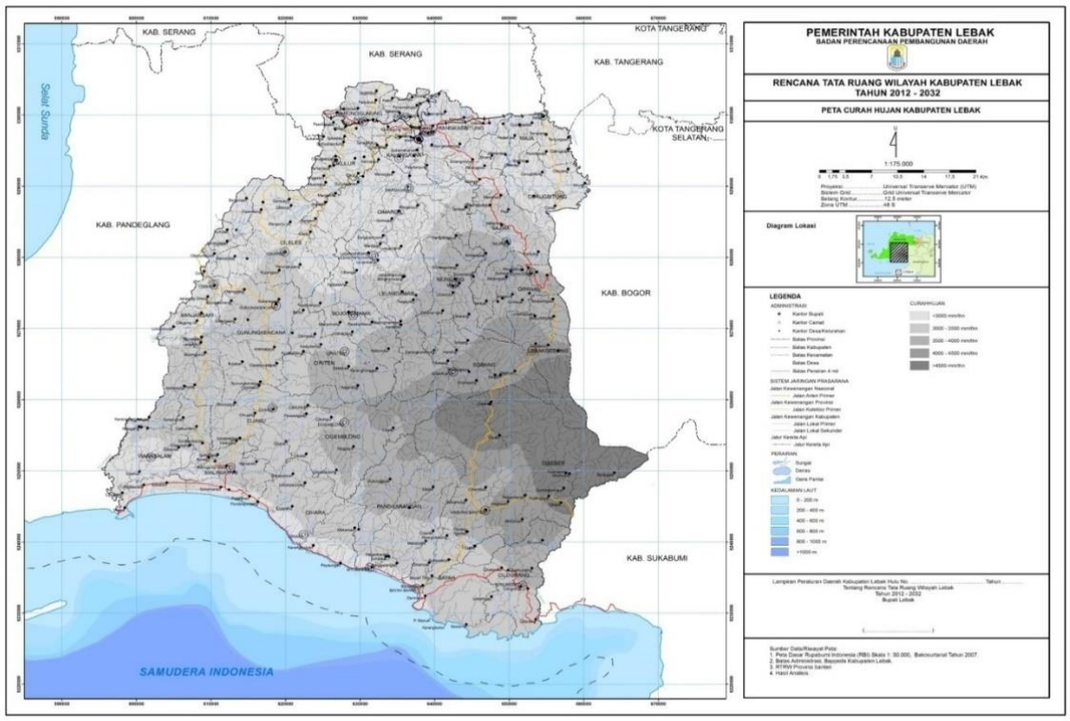
No.	Kecamatan	Curah Hujan					Total
		<3000 mm/thn	3000-3500 mm/thn	3500-4000 mm/thn	4000-4500 mm/thn	>4500 mm/thn	
1	Malingping	3.441,11	6.760,36				10.201,47
2	Wanasalam	7.894,92	3.524,10				11.419,02
3	Panggarangan	1.234,87	6.452,89	8.794,67	1.233,09		17.715,51
4	Bayah	785,13	12.225,23	1.356,53	10,32		14,.377,21
5	Cilograng		4.826,32	3.372,11	1.403,28		9.601,71
6	Cibeber		805,91	5.205,61	11.685,72	22.399,17	40.096,41
7	Cijaku		10.373,16	1.095,25			11.468,42
8	Banjarsari	8.865,94	7.089,57				15.955,50

No.	Kecamatan	Curah Hujan					Total
		<3000 mm/thn	3000-3500 mm/thn	3500-4000 mm/thn	4000-4500 mm/thn	>4500 mm/thn	
9	Cileles	12.531,75	2.807,01				15.338,76
10	Gunungkencana	770,79	13.030,71				13.801,50
11	Bojongmanik	1.845,33	5.293,18	2.453,32			9.591,83
12	Leuwidamar	3.375,11	5.454,19	4.424,08	1.051,71		14.305,09
13	Muncang	23,33	1.147,15	7.126,99	397,91		8.695,38
14	Sobang			2.368,49	7.192,33	1.588,53	11.149,34
15	Cipanas		346,96	5.384,33	794,01		6.525,30
16	Sajira	2.095,56	4.884,02	3.487,06			10.466,64
17	Cimarga	15.344,13	2.539,06	869,47			18.752,65
18	Cikulur	6.182,97					6.182,97
19	Warunggunung	4.736,53					4.736,53
20	Cibadak	3.632,71					3.632,71
21	Rangkasbitung	7.309,70					7.309,70
22	Maja	7.817,14					7.817,14
23	Curugbitung	7.773,78	1.543,55				9.317,33
24	Cihara	3.606,75	8.859,12	3,99			12.469,86
25	Cigemblong		5.050,35	6.644,39	3.610,20		15.304,93
26	Cirinten		6.145,69	5.830,76	278,51		12.254,95
27	Lebakgedong			2.997,51	2.735,16	3.427,31	9.159,98
28	Kalanganyar	2.859,34					2.859,34
	Jumlah	**102.126,88**	**109,158,50**	**61.414,54**	**30.392,23**	**27.415,00**	**330.507,2**

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034



Gambar 2.7
Peta Curah Hujan Kabupaten Lebak



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

2.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana yang ada meliputi :

1. wilayah rawan bencana tsunami, terletak di bagian selatan (berbatasan dengan Samudera Indonesia);
2. Daerah rawan tergenang (banjir), terletak di bagian barat daya dan utara;
3. daerah rawan longsor, berada di bagian tengah; dan
4. wilayah yang relatif aman dari bencana alam berada di bagian barat dan utara .

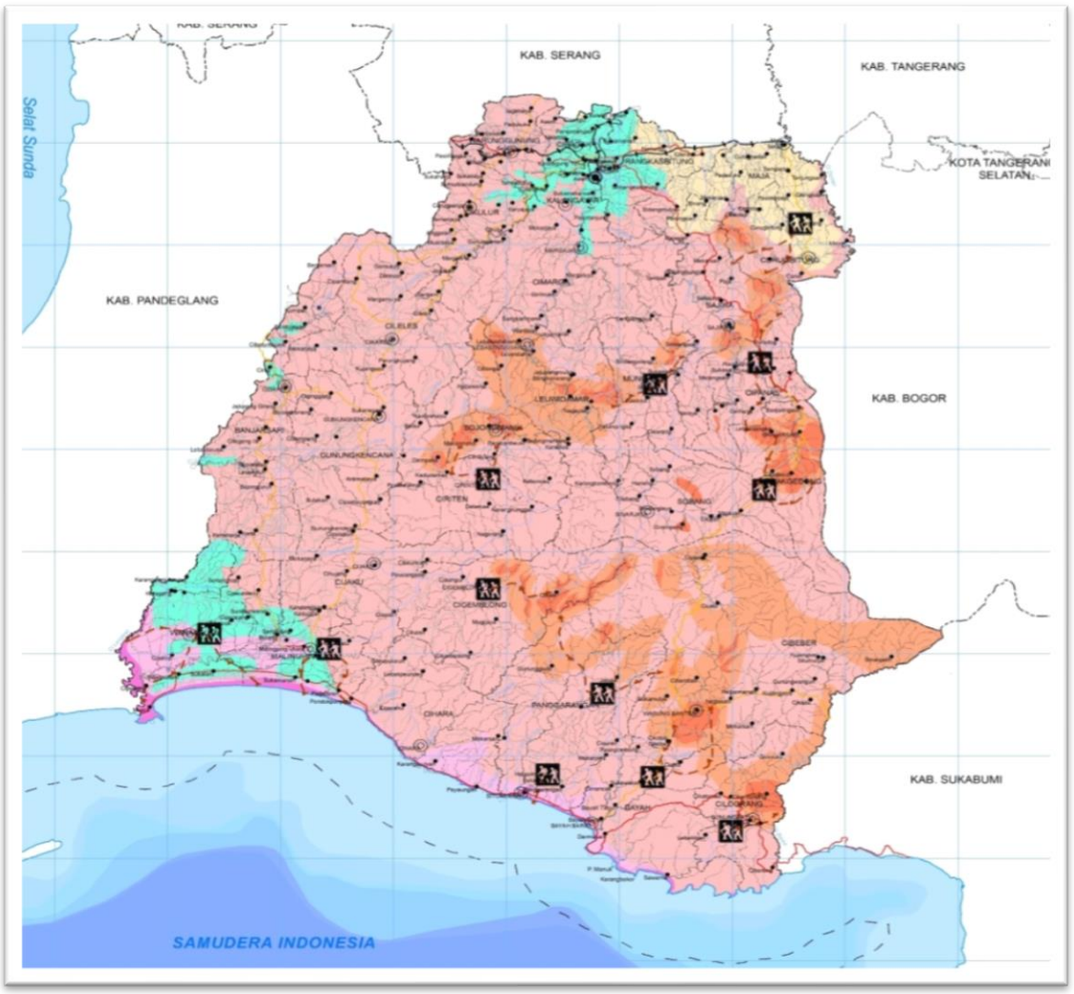
Tabel 2.8
Daerah Rawan Bencana Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Rawan Bencana				Total
		Daerah Aman	Rawan Longsor	Rawan Tergenang	Rawan Tsunami	
1	Malingping	42,41	4.521,89	3.089,22	2.547,95	10.201,47
2	Wanasalam		156,93	6.590,98	4.671,10	11.419,02
3	Panggarangan		16.663,91		1.051,61	17.715,51
4	Bayah		13.004,72		1.372,49	14,.377,21
5	Cilograng		9.570,30		31,41	9.601,71
6	Cibeber	1.444,67	38.651,74			40.096,41

No.	Kecamatan	Rawan Bencana				Total
		Daerah Aman	Rawan Longsor	Rawan Tergenang	Rawan Tsunami	
7	Cijaku	6.044,74	5.257,37	166,31		11.468,42
8	Banjarsari	3.126,51	12.023,09	805,90		15.955,50
9	Cileles	14.197,27	1.141,49			15.338,76
10	Gunungkencana	11.189,12	2.612,38			13.801,50
11	Bojongmanik	6.874,68	2.717,16			9.591,83
12	Leuwidamar	7.301,23	7.003,86			14.305,09
13	Muncang	2.711,83	5.983,54			8.695,38
14	Sobang	1.533,06	9.616,28			11.149,34
15	Cipanas	3.609,16	2.916,14			6.525,30
16	Sajira	4.228,34	6.238,29			10.466,64
17	Cimarga	5.208,41	13.183,32	360,92		18.752,65
18	Cikulur	5.852,11		330,87		6.182,97
19	Warunggunung	4.667,18		69,35		4.736,53
20	Cibadak	958,00		2.674,72		3.632,71
21	Rangkasbitung	2.573,16	1.497,29	3.239,25		7.309,70
22	Maja	5.951,07	1.862,60	3,46		7.817,14
23	Curugbitung	3.317,93	5.999,40			9.317,33
24	Cihara	3.861,49	6.102,64		2.505,72	12.469,86
25	Cigemblong	5.806,94	9.497,99			15.304,93
26	Cirinten	5.235,19	7.019,77			12.254,95
27	Lebakgedong	122,86	9.037,11			9.159,98
28	Kalanganyar	907,47	504,10	1.447,78		2.859,34
	Jumlah	106.764,83	192.783,31	18.778,74	12.180,28	330.507,2

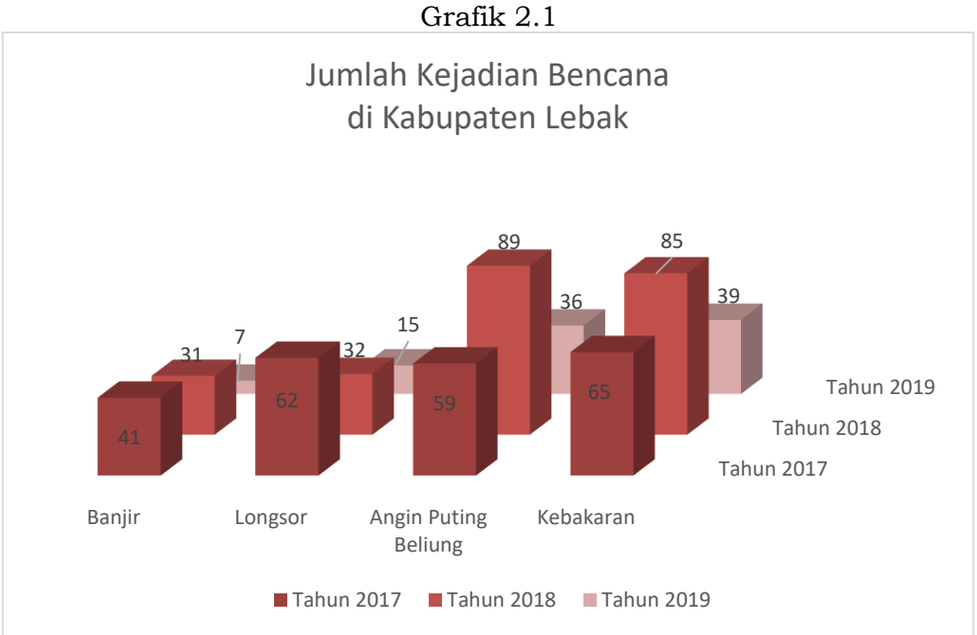
Sumber : RTRW Kab. Lebak 2013-2034

Gambar 2.8
Peta Rawan Bencana Kabupaten Lebak



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

Grafik 2.1



Sumber data : BPBD Kabupaten Lebak, 2019

Secara hidrologi memiliki dua Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Ciujung yang meliputi Sungai Ciujung, Sungai Cilaki, Sungai Ciberang, dan Sungai Cisimeut; serta DAS Ciliman - Cimadur yang meliputi Sungai Ciliman dengan anak sungainya, Sungai Cimadur, Sungai Cibareno, Sungai Cisiih, Sungai Cihara, Sungai Cipager, dan Sungai Cibaliung. Sungai Ciujung merupakan sungai terbesar di Provinsi Banten, yang melewati 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang.

Jumlah kejadian banjir yang tersebar di Kabupaten Lebak pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 berkurang dari data 41 kali kejadian pada tahun 2019 menjadi 7 kali kejadian pada tahun 2019. Namun jumlah kondisi rumah akibat bencana banjir berbanding terbalim dengan jumlah kejadian bencana banjir. Pada tahun 2019 jumlah kondisi rumah akibat bencana banjir dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.9
Jumlah Kondisi Rumah Akibat Bencana Banjir Tahun 2017-2019

Kondisi Rumah (Unit)			
Tahun	2017	2018	2019
Rusak Berat	-	9	29
Rusak Ringan	4442	2683	906
Jumlah	4442	2692	935

Sumber data : BPBD Kabupaten Lebak, 2019

Hal ini dikarenakan terjadinya banjir bandang yang melanda empat kecamatan karena dilintasi sejumlah daerah aliran sungai yang sumber airnya dari kawasan taman nasional gunung halimun salak (TNGHS). Empat kecamatan itu adalah Sajira, Muncang, Sobang, dan Cimarga. Diduga banjir bandang itu akibat kerusakan ekosistem alam, sehingga perlu dilakukan pelestarian dengan melakukan reboisasi penghijauan.

Longsor yang terjadi di Kabupaten Lebak diakibatkan adanya pergesaran tanah. Kabupaten Lebak memiliki daerah rawan longsor seluas 5.581,81 Ha. Kondisi rumah akibat bencana longsor dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10
Jumlah Kondisi Rumah Akibat Bencana Longsor Tahun 2017-2019

Kondisi Rumah (Unit)			
Tahun	2017	2018	2019
Rusak Berat	42	9	6

Rusak Ringan	279	88	44
Jumlah	321	97	50

Sumber data : BPBD Kabupaten Lebak, 2019

Bencana angin puting beliung di Kabupaten Lebak disebabkan oleh pergantian cuaca yang ekstrem. Bencana angin puting beling tersebar di Kabupaten Lebak menyebabkan kondisi rumah warga rusak berat dan rusak ringan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.11
Jumlah Kondisi Rumah Akibat Bencana Puting Beliung
Tahun 2017-2019

Kondisi Rumah (Unit)			
Tahun	2017	2018	2019
Rusak Berat	28	60	11
Rusak Ringan	112	456	124
Jumlah	140	516	135

Sumber data : BPBD Kabupaten Lebak, 2019

Bencana kebakaran yang terjadi di Kabupaten Lebak diakibatkan oleh musim kemarau dan human error seperti arus pendek listrik sehingga memicu percikan api selain itu juga kompor gas dan minyak tanah serta tungku memasak kayu bakar. Pada tahun 2017 terjadi kebakaran di daerah wisata Baduy yaitu di Desa Kanekes. Kobaran api tersebut diduga berasal dari tungku masak salah satu rumah warga. Karena bangunan rumah yang terbuat dari bahan mudah terbakar, api cepat menjalar ke rumah lainnya. Kondisi rumah akibat bencana kebakaran dapat dilihat pada table bertikut :

Tabel 2.12
Jumlah Kondisi Rumah Akibat Bencana Kebakaran Tahun 2017-2019

Kondisi Rumah (Unit)			
Tahun	2017	2018	2019
Rusak Berat	186	110	43
Rusak Ringan	4	-	1
Jumlah	190	110	44

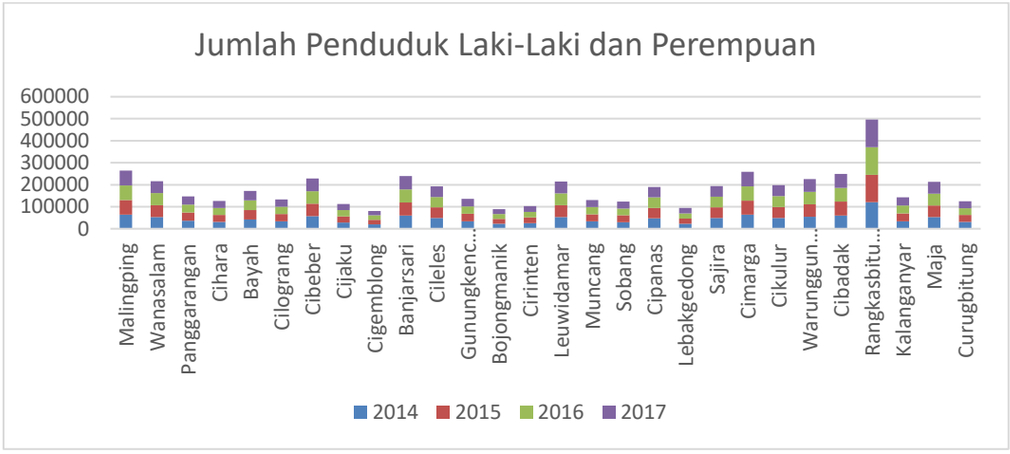
Sumber data : BPBD Kabupaten Lebak, 2019

2.1.3 Demografi

Secara demografis, berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Lebak mencapai 1.204.095 jiwa dengan rasio

ketergantungan (*sex ratio*) sebesar 105,81%. Angka ini bertambah setiap tahunnya menjadi 1.221.067 jiwa dengan *sex ratio* sebesar 105,83% pada tahun 2011, pada tahun 2012 menjadi 1.239.660 jiwa dengan *sex ratio* sebesar 109,15%, pada tahun 2013 menjadi 1.247.906 jiwa dengan *sex ratio* sebesar 105,28%, dan pada tahun 2014 jumlah penduduk menjadi 1.259.315 jiwa dengan *sex ratio*105,23% serta sebesar 1.269.812 jiwa pada Tahun 2015 dengan sex ratio sebesar 105,17%. Berikut ini digambarkan fluktuasi perkembangan jumlah penduduk dalam kurun waktu empat tahun terakhir, sejak tahun 2014-2017 pada grafik 2.3 berikut ini.

Grafik 2.2
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Lebak
Tahun 2014-2017



Sumber : BPS Kab. Lebak 2018

Dilihat dari distribusi penduduk per kecamatan, dapat dilihat bahwa kecamatan dengan penduduk paling banyak yaitu Kecamatan Rangkasbitung, selanjutnya Kecamatan Malingping dan Kecamatan Cimarga. Perkembangan jumlah penduduk per kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.19 berikut.

Tabel 2.13
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lebak
Tahun 2014-2017 menurut kecamatan (persen)

Kecamatan	2014	2015	2016	2017
Malingping	0.68	2.83	1.09	1.01
Wanasalam	0.61	0.87	0.73	0.65
Panggarangan	1.02	-	0.33	0.25
Cihara	1.28	1.45	0.95	0.88
Bayah	0.87	0.78	0.75	0.67
Cilograng	1.16	-	0.53	0.45
Cibeber	0.63	0.32	0.62	0.54
Cijaku	1.42	-	0.57	0.5
Cigemblong	1.84	-	0.25	0.17
Banjarsari	0.67	-	0.42	0.34

Cileles	0.82	-	0.24	0.16
Gunungkencana	1.18	-	0.4	0.32
Bojongmanik	1.75	-	0.42	0.34
Cirinten	1.51	-	0.25	0.17
Leuwidamar	0.83	1.8	0.92	0.84
Muncang	1.26	-	0.19	0.12
Sobang	1.32	3.9	1.43	1.35
Cipanas	0.86	-	0.55	0.47
Lebakgedong	1.95	3.89	1.52	1.44
Sajira	0.84	-	0.57	0.49
Cimarga	0.7	1.36	0.81	0.73
Cikulur	0.89	1.19	0.81	0.73
Warunggunung	0.79	3.06	1.15	1.08
Cibadak	0.76	2.95	1.12	1.04
Rangkasbitung	0.46	2.04	0.88	0.81
Kalanganyar	1.29	6.38	1.88	1.8
Maja	0.81	0.32	0.63	0.55
Curugbitung	1.29	-	0.34	0.26

Sumber : BPS Kab. Lebak 2018

Terkait dengan jumlah penduduk di atas, luasnya wilayah Kabupaten Lebak masih memiliki *carrying capacity* yang sangat tinggi, terutama dilihat dari kepadatan penduduk tiap kilometer persegi. Kepadatan penduduk secara umum bahkan terbilang masih sangat memadai meski di Kecamatan Rangkasbitung kepadatannya telah cukup tinggi, mencapai 2.451 jiwa/km^2. Gambaran tentang jumlah dan kepadatan penduduk di tiap kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.20 berikut ini.

Tabel 2.14
Kepadatan Penduduk Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan
Tahun 2012-2017

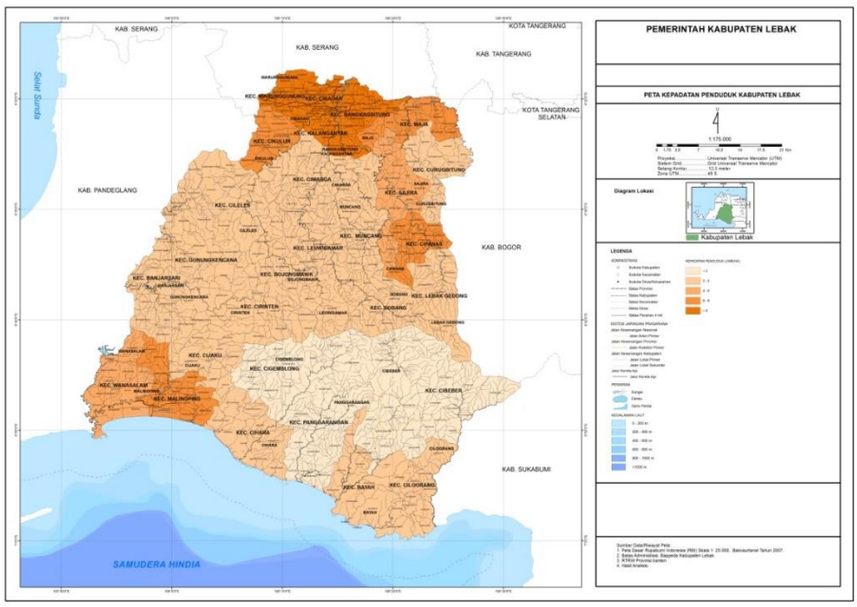
No.	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km)					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Malingping	687	691	696	700	705.45	710
2	Wanasalam	393	396	398	401	404.27	407
3	Panggarangan	222	224	226	228	230.07	232
4	Cihara	191	192	194	197	198.11	199
5	Bayah	273	275	277	280	281.68	284
6	Cilograng	305	307	310	314	315.98	318
7	Cibeber	146	147	148	149	149.87	151

No.	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km)					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
8	Cijaku	372	375	380	385	387.88	391
9	Cigemblong	267	269	274	279	281.14	283
10	Banjarsari	407	409	412	415	417.85	421
11	Cileles	385	387	390	393	396.39	399
12	Gunungkencana	231	232	235	238	239.33	241
13	Bojongmanik	375	378	384	391	393.83	396
14	Cirinten	280	282	286	290	292.39	294
15	Leuwidamar	353	356	359	361	363.81	366
16	Muncang	383	385	390	395	397.66	400
17	Sobang	272	274	278	281	283.49	285
18	Cipanas	620	624	629	634	639.25	644
19	Lebakgedong	354	356	363	369	371.97	375
20	Sajira	430	433	437	440	443.38	446
21	Cimarga	342	344	347	349	351.42	354
22	Cikulur	726	731	738	743	748.99	754
23	Warunggunung	1.087	1.094	1.103	1.110	1,118.68	1.126
24	Cibadak	1.445	1.455	1.466	1.475	1,485.73	1.496
25	Rangkasbitung	2.426	2.440	2.451	2.459	2,477.20	2.494
26	Kalanganyar	1.270	1.278	1.295	1.309	1,318.99	1.328
27	Maja	869	874	882	888	894.50	901
28	Curugbitung	426	429	435	440	443.07	446
Kabupaten Lebak			**407**	**410**	**414**	**420.21**	**423**

Sumber : BPS Kab. Lebak Tahun 2018

Tabel 2.17 di atas menggambarkan distribusi jumlah penduduk per kecamatan, persebaran dan kepadatannya, diketahui bahwa kecamatan di wilayah perkotaan selain Kecamatan Rangkasbitung seperti Kecamatan Cibadak, Kecamatan Warunggunung dan Kecamatan Kalanganyar sudah mulai dilirik sebagai tujuan utama penduduk untuk tinggal dan berusaha.

Gambar 2.9
Peta Sebaran Kepadatan Penduduk Kabupaten Lebak



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

Tabel 2.15
Jumlah dan Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan
Tahun 2012-2017

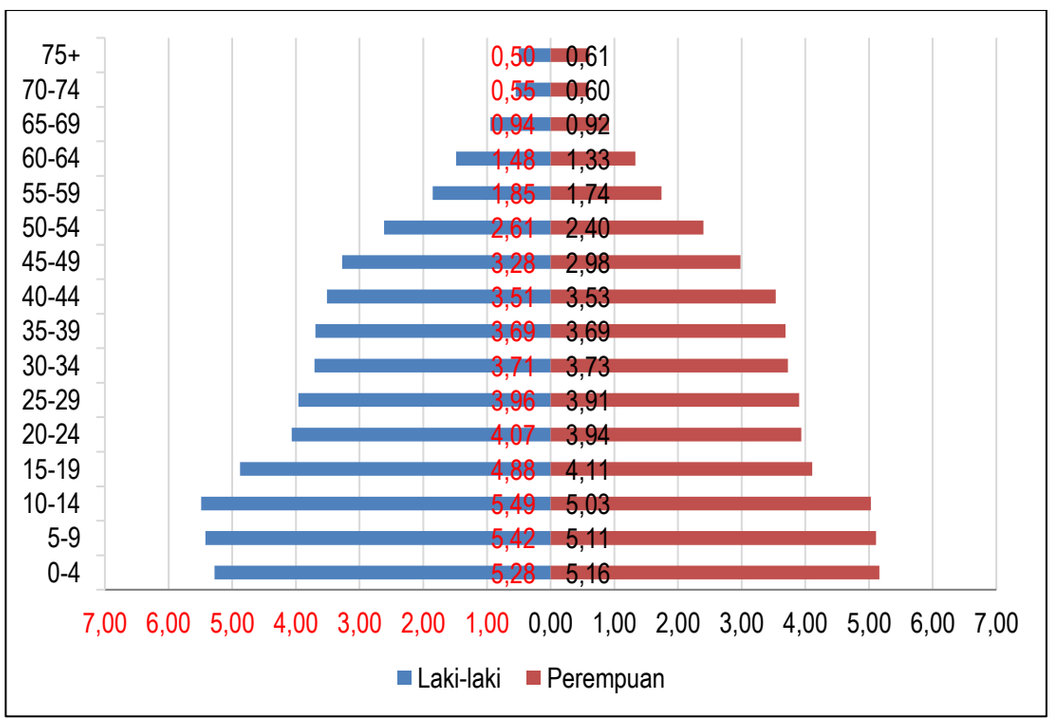
No	Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Malingping	63.300	63.721	64.157	65.975	66.695	67.370
2	Wanasalam	52.727	53.184	53.510	53.977	54.373	54.729
3	Panggarangan	36.312	36.553	36.927	36.378	36.498	36.589
4	Cihara	30.409	30.610	31.003	31.454	31.753	32.031
5	Bayah	41.957	42.237	42.603	42.936	43.257	43.548
6	Cilograng	32.645	32.861	33.242	33.035	33.209	33.357
7	Cibeber	55.891	56.263	56.615	56.796	57.146	57.453
8	Cijaku	27.670	27.854	28.250	28.086	28.246	28.386
9	Cigemblong	20.124	20.257	20.630	20.081	20.132	20.167
10	Banjarsari	59.094	59.488	59.888	59.505	59.755	59.958
11	Cileles	48.076	48.396	48.793	47.971	48.086	48.162
12	Gunungkencana	33.629	33.852	34.250	33.836	33.971	34.080
13	Bojongmanik	21.840	21.986	22.371	21.983	22.075	22.149
14	Cirinten	25.503	25.673	26.061	25.462	25.525	25.569
15	Leuwidamar	51.899	52.244	52.677	53.626	54.117	54.572
16	Muncang	32.535	32.751	33.165	32.414	32.477	32.515
17	Sobang	29.207	29.402	29.790	30.951	31.395	31.820
18	Cipanas	46.733	47.044	47.448	47.374	47.633	47.857
19	Lebakgedong	22.131	22.280	22.714	23.597	23.955	24.299

20	Sajira	47.739	48.056	48.462	48.442	48.717	48.955
21	Cimarga	62.746	63.164	63.605	64.471	64.991	65.463
22	Cikulur	47.984	48.303	48.733	49.311	49.708	50.070
23	Warunggunung	53.834	54.192	54.618	56.290	56.940	57.553
24	Cibadak	59.732	60.130	60.587	62.374	63.072	63.730
25	Rangkasbitung	120.116	120.808	121.359	123.836	124.925	125.933
26	Kalanganyar	32.900	33.119	33.546	35.687	36.358	37.012
27	Maja	52.006	52.352	52.777	52.948	53.281	53.574
28	Curugbitung	30.921	31.126	31.528	31.016	31.122	31.202
	Kabupaten Lebak	1.239.660	1.247.906	1.259.309	1.269.812	1.279.412	1.288.103

Sumber: Kabupaten Lebak Dalam Angka, 2013-2018

Sebagian besar penduduk Kabupaten Lebak merupakan penduduk usia produktif, yaitu penduduk usia 15-55 tahun, yang mencapai sekira 67,27%. Sisanya merupakan penduduk usia tidak produktif (*not economically active*), yaitu penduduk usia anak-anak (0-14 tahun) sekira 31,48%; dan lanjut usia sekira 1,24%. Dari total penduduk usia produktif tersebut 59,47%-nya merupakan penduduk yang benar-benar bekerja, atau sekira 41,13% dari total penduduk. Sisanya merupakan penduduk yang menganggur dan bukan angkatan kerja yang mencapai 40,53% dari total penduduk usia kerja, atau sekira 58,87% dari total penduduk di Kabupaten Lebak

Grafik 2.3
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2017



Sumber: Kabupaten Lebak Dalam Angka, 2018

Dengan komposisi penduduk yang sebagian besar merupakan anak-anak usia sekolah usia 0-18 tahun, maka dalam waktu lima tahun mendatang Kabupaten Lebak masih akan dihadapkan pada tantangan dan permasalahan guna memenuhi beragam jenis pelayanan dasar yang secara spesifik menjadi kebutuhan masyarakat pada kelompok usia anak-anak, khususnya di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, serta sosial.

Sementara bila dilihat dari struktur usianya tahun 2017 didominasi oleh penduduk usia produktif yakni usia 15 – 64 tahun sebanyak 809.106 jiwa atau 64,25%, usia non produktif yakni usia 0 – 14 tahun dan usia diatas 65 tahun masing-masing sebesar 399.795 jiwa (31,75%) dan 50.408 (4%) Gambaran lengkap tentang hal ini dapat dilihat dari piramida penduduk pada grafik 2.5 sebagai berikut :

Grafik 2.4



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2017

2.1.4 Pembangunan Wilayah Terpadu

Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT) adalah pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih berdasarkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu dengan memperhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Pembangunan Wilayah Terpadu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam perumusan arah kebijakan dan sasaran RPJMD berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur secara makro dari beberapa indikator makro ekonomi, antara lain : capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Produk Domestik Regional Brutto (PDRB), PDRB per kapita, Laju Inflasi, dan Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan. Meski indikator-indikator di atas tidak memotret secara detail kondisi kesejahteraan rakyat pada level mikro, namun indikator-indikator tersebut umumnya digunakan guna mengukur aspek kesejahteraan rakyat secara umum Pengukuran PDRB dan Indikator Makro lainnya seperti LPE pada Tahun 2017 mengalami perubahan. Perubahan tersebut terdapat pada perhitungan Tahun Dasar yang dipergunakan yaitu dari Tahun Dasar 2000 menjadi Tahun Dasar 2010. Perubahan ini sejalan dengan adanya asumsi perekonomian yang relatif stabil pada tahun 2010; adanya perubahan struktur ekonomi selama 10 Tahun terakhir, terutama di bidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru; adanya Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun sekali; Teridentifikasinya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008; Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP2010) dan Indeks Harga Produsen (Producers Price Indexes /PPI); serta Tersedianya kerangka kerja SUT yang digunakan untuk benchmarking/menetapkan PDRB

1) Pertumbuhan PDRB

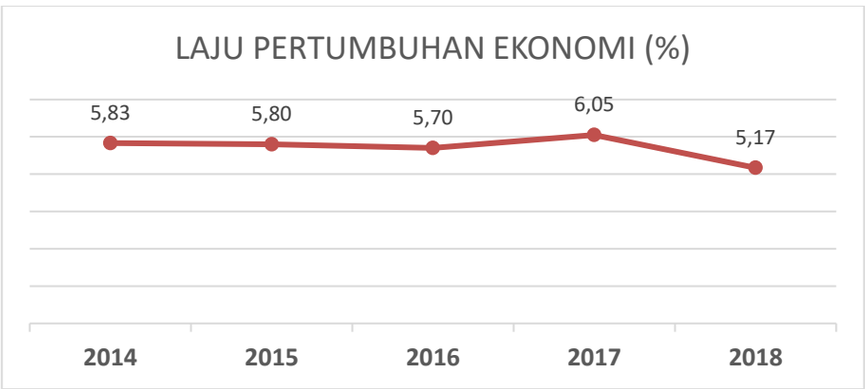
Salah satu indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data produk regional bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain : (1) Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi; (2) Untuk mengetahui tingkat struktur perekonomian; (3) Untuk mengetahui besarnya PDRB per Kapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan; (4) Untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi berdasarkan pertumbuhan harga produsen.

Laju Pertumbuhan Ekonomi merepresentasi kenaikan kapasitas produksi suatu daerah dari tahun ke tahun, yang diperoleh dari hasil perbandingan pertambahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun berjalan dengan PDRB tahun sebelumnya. Sedangkan PDRB itu sendiri merupakan jumlah

nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah pada tahun tertentu atau periode tertentu.

Pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014-2018 seiring perubahan metode perhitungan yang dilakukan oleh BPS pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi tersebut terutama di kontribusikan oleh sektor tersier (perdagangan dan jasa) dan sekunder (industri pengolahan dan kontruksi) yang mulai menggeser sektor primer (pertanian) sebagai sektor dominan pada kurun waktu sebelumnya. Hal ini menunjukan dominasi produk yang dihasilkan perekonomian mulai bergeser dari sektor primer yang sudah mulai jenuh pertumbuhannya ke sektor sekunder dan tersier. Hal ini juga menunjukan terjadinya pola perubahan budaya bertani menjadi budaya industri.

Grafik 2.5
Perkembangan LPE Kabupaten Lebak
Tahun 2014 – 2018



Sumber : BPS Kabupaten Lebak 2018

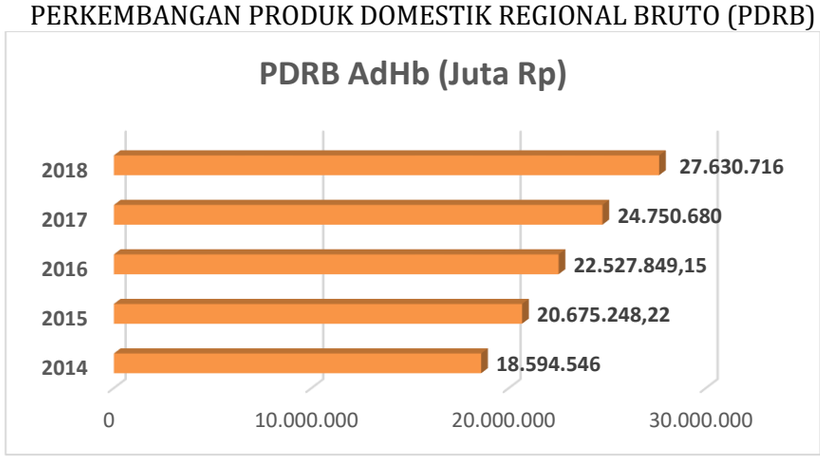
Grafik di atas, menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) selama periode tahun 2014-2018, dapat dilihat bahwa dari tahun 2014 (5,83%) sampai tahun 2016 (5,70%) mengalami penurunan dan naik kembali pada tahun 2017 sebesar 6,05%, namun pada tahun 2018 yang masih merupakan angka sementara mengalami penurunan yang sangat tajam menjadi 5,17%.

Secara makro ekonomi Kabupaten Lebak terus bertumbuh dalam lima tahun terakhir, dan pertumbuhan ini akan terus berlanjut mengingat kecenderungan perekonomian yang diperkirakan tidak lagi bergantung pada sektor primer karena berkembangnya sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa. Iklim usaha yang kian kondusif diyakini akan mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor riil di masyarakat sehingga mampu meningkatkan nilai total PDRB di masa depan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik besaran nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 adalah Rp. 27.630, 716 (dalam Juta) dan Rp. 19.437.509 (dalam Juta) untuk nilai PDRB Atas Dasar Harga

Konstan, maka periode tahun 2017 - 2018 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 11,64% dan 3,46%.

Gambaran tentang perkembangan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku serta Atas Dasar Harga Konstan dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 2.7 dan 2.8 berikut.

Grafik 2.6
PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)



Sumber : Diskominfo Kabupaten Lebak 2019

GRAFIK 2.7
PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)
ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2014 – 2018



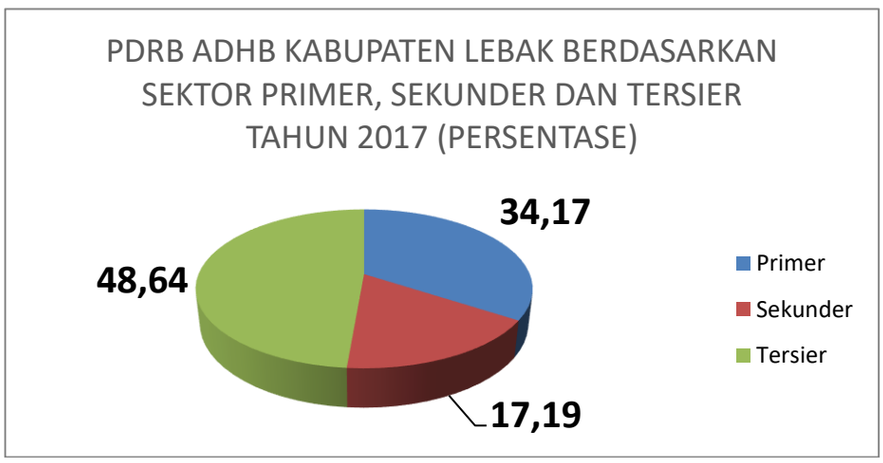
Sumber : BPS Provinsi Banten 2019

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lebak banyak dikontribusi oleh sektor tersier, Kenaikan output kategori tersier ini mungkin disebabkan oleh meningkatnya volume perdagangan barang dan jasa, makin maraknya jumlah perusahaan akomodasi, adanya fasilitas dua jalur (double track) kereta api dari stasiun Maja ke Jakarta juga otomatis meningkatkan pengguna kereta api. Selain itu seiring dengan perkembangan teknologi informasi juga berpengaruh terhadap output kategori komunikasi dan informasi, disamping kegiatan jasa lainnya dan tentu saja peningkatan nilai anggaran pemerintah baik itu yang bersumber dari APBD maupun APBN juga memberikan kontribusi yang besar terhadap

pertumbuhan ekonomi pada kategori tersier. Seluruh kategori pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan positif, walaupun ada beberapa kategori yang mengalami perlambatan. Diantaranya adalah Kategori Pertanian, kehutanan dan perikanan, kategori Industri Pengolahan, Perdagangan dan Jasa Keuangan. Sedangkan yang mengalami percepatan tertinggi terdapat pada kategori Konstruksi yang merupakan akibat adanya pembangunan perumahan di Kecamatan Maja dan Rangkasbitung serta pembangunan pabrik semen di daerah Kecamatan Bayah.

Kontribusi PDRB tahun 2017 atas dasar harga berlaku menurut sektor primer sebesar 34,17%, sekunder 17,19% dan tersier 48,64%, sedangkan atas dasar harga konstan menurut sektor primer sebesar 32,66%, sekunder 18,*01% dan tersier 49,32%, lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik 2.9 dan 2.10.*

GRAFIK 2.8



Sumber : BPS Kabupaten Lebak Tahun 2019

GRAFIK 2.9



Sumber :BPS Kabupaten Lebak Tahun 2017

Kondusifitas iklim usaha di daerah juga dapat dilihat dari perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku. Berdasarkan nilai PDRB pada tahun 2017 sebesar Rp. 24.750.680,68 (dalam juta) dan nilai tertinggi pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp.6.800.440,92 (dalam juta). Untuk lebih

jelasnya mengenai nilai-nilai kontribusi persektor dapat dilihat pada Tabel 2.22 berikut.

Tabel 2.16
Nilai PDRB Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Lebak Berdasarkan Sektor Ekonomi (Juta Rp)

NO	KATEGORI	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,691,921.03	5,058,455.65	5,849,596.42	6,433,733.36	6,800,440.92
2	Pertambangan dan Penggalian	1,395,050.31	1,509,148.05	1,512,298.18	1,605,885.00	1,656,718.31
3	Industri Pengolahan	1,885,399.80	1,938,915.79	1,944,981.68	2,040,025.86	2,233,308.71
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9,810.39	14,100.31	20,376.09	23,528.03	26,009.98
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,443.84	9,846.67	10,928.66	11,555.34	12,876.94
6	Konstruksi	826,040.51	1,086,452.63	1,394,592.10	1,598,131.72	1,981,640.08
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,234,947.01	2,439,829.56	2,589,113.47	2,739,110.66	3,069,613.14
8	Transportasi dan Pergudangan	974,311.49	1,174,673.54	1,301,603.44	1,383,124.45	1,490,770.85
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	756,905.47	890,393.69	1,012,665.03	1,119,952.77	1,229,910.53
10	Informasi dan Komunikasi	98,760.08	113,372.94	115,847.50	121,262.93	135,200.24
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	286,908.46	310,191.35	346,397.02	395,139.35	427,596.41
12	Real Estate	1,063,724.64	1,149,549.58	1,282,439.48	1,399,922.55	1,607,802.76
13	Jasa Perusahaan	51,913.87	57,887.58	65,522.34	71,476.61	77,997.33
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	863,957.52	999,450.20	1,168,944.96	1,317,303.09	1,446,588.61
15	Jasa Pendidikan	1,016,579.32	1,162,285.90	1,284,032.89	1,419,078.19	1,609,081.42
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	169,971.80	193,873.76	221,393.73	248,384.52	284,272.31
17	Jasa lainnya	406,401.26	486,118.80	554,515.23	600,234.71	660,854.14
PDRB		**16,742,046.80**	**18,594,546.00**	**20,675,248.22**	**22,527,849.14**	**24,750,682.68**

Sumber : BPS Kabupaten Lebak, Tahun 2019

Untuk nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan berdasarkan sektor ekonomi, pada tahun 2017 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mempunyai nilai kontribusi tertinggi yaitu sebesar Rp.4.922.384,38 (dalam juta) sedangkan yang terendah pada sektor Pengelolaan Air dan Pengelolaan Sampah yaitu sebesar 10.761,71 (dalam juta). Untuk lebih terinci nilai-nilai persektor selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.23 berikut.

Tabel 2.17
Nilai PDRB Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Lebak Berdasarkan Sektor Ekonomi (Juta Rp)

NO	KATEGORI	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,058,413.26	4,097,374.25	4,437,938.21	4,719,797.78	4,922,384.38
2	Pertambangan dan Penggalian	1,102,410.65	1,126,054.80	1,157,541.02	1,197,699.72	1,214,500.08
3	Industri Pengolahan	1,825,499.08	1,848,228.13	1,791,418.42	1,823,352.79	1,917,355.21
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,991.04	10,786.85	11,370.45	13,642.60	14,078.93
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	9,101.39	9,278.61	9,794.33	10,057.31	10,761.71
6	Konstruksi	744,666.34	924,617.91	1,115,739.44	1,228,444.07	1,442,442.81
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	2,101,171.88	2,222,629.48	2,284,125.35	2,360,805.68	2,544,554.76
8	Transportasi dan Pergudangan	908,455.15	1,001,444.37	1,036,141.73	1,082,733.09	1,156,477.84
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	675,197.19	743,898.25	798,582.61	858,557.30	931,141.76
10	Informasi dan Komunikasi	110,460.12	131,108.44	136,645.87	142,173.64	153,647.06
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	252,302.65	268,550.82	289,132.58	320,885.97	332,604.26
12	Real Estate	1,051,564.96	1,127,303.61	1,183,799.93	1,261,106.54	1,370,287.22
13	Jasa Perusahaan	46,622.11	50,112.89	52,435.20	55,193.17	58,789.26
14	Administrasi Pemerintahan,	687,243.75	755,020.70	825,389.04	895,969.11	946,213.82
15	Jasa Pendidikan	799,623.20	876,156.75	937,454.65	1,003,524.60	1,074,511.08
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	149,679.18	162,827.47	177,475.95	193,431.04	214,482.08
17	Jasa lainnya	356,582.26	400,853.64	425,904.59	453,193.45	484,036.08
PDRB		14,887,984.21	15,756,246.97	16,670,889.37	17,620,567.86	18,788,268.35

Sumber : BPS Kabupaten Lebak, Tahun 2019

Sementara itu, dari sisi perkembangan distribusi dan kontribusi sektor pada PDRB selama kurun waktu 2013-2017 dapat diketahui bahwa sektor dengan kontribusi terbesar adalah sektor pertanian meskipun mengalami penurunan dari tahun 2016 (26,79%) ke tahun 2017 (26,20%). Hal ini menunjukkan bahwa sektor lain sudah mulai mengalami perkembangan terutama sektor jasa (jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta jasa lainnya) yang selama kurun waktu 2013-2017 mengalami peningkatan positif. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.24.

Tabel 2.18
Perkembangan Kontribusi Sektor pada PDRB Kabupaten Lebak
Tahun 2013-2017

NO	KATEGORI	ATAS DASAR HARGA BERLAKU (%)					ATAS DASAR HARGA KONSTAN (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28.02	27.20	28.29	28.56	27.48	27.26	26.00	26.62	26.79	26.20
2	Pertambangan dan Penggalian	8.33	8.12	7.31	7.13	6.69	7.40	7.15	6.94	6.80	6.46
3	Industri Pengolahan	11.26	10.43	9.41	9.06	9.02	12.26	11.73	10.75	10.35	10.21
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.06	0.08	0.10	0.10	0.11	0.06	0.07	0.07	0.08	0.07
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
6	Konstruksi	4.93	5.84	6.75	7.09	8.01	5.00	5.87	6.69	6.97	7.68
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.35	13.12	12.52	12.16	12.40	14.11	14.11	13.70	13.40	13.54
8	Transportasi dan Pergudangan	5.82	6.32	6.30	6.14	6.02	6.10	6.36	6.22	6.14	6.16
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.52	4.79	4.90	4.97	4.97	4.54	4.72	4.79	4.87	4.96
10	Informasi dan Komunikasi	0.59	0.61	0.56	0.54	0.55	0.74	0.83	0.82	0.81	0.82
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.71	1.67	1.68	1.75	1.73	1.69	1.70	1.73	1.82	1.77
12	Real Estate	6.35	6.18	6.20	6.21	6.50	7.06	7.15	7.10	7.16	7.29
13	Jasa Perusahaan	0.31	0.31	0.32	0.32	0.32	0.31	0.32	0.31	0.31	0.31
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	5.16	5.37	5.65	5.85	5.84	4.62	4.79	4.95	5.08	5.04
15	Jasa Pendidikan	6.07	6.25	6.21	6.30	6.50	5.37	5.56	5.62	5.70	5.72
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.02	1.04	1.07	1.10	1.15	1.01	1.03	1.06	1.10	1.14
17	Jasa lainnya	2.43	2.61	2.68	2.66	2.67	2.40	2.54	2.55	2.57	2.58
PDRB		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Lebak, 2019

Distribusi persentase per kategori dalam PDRB dapat menggambarkan struktur perekonomian hasil pembangunan ekonomi suatu wilayah. Hingga saat ini perekonomian didominasi oleh kategori pertanian hingga sekarang dengan share lebih besar dari 1/4 total PDRB tahun bersangkutan. Namun jika kita kelompokkan terlihat bahwa kelompok kategori tersier (perdagangan dan jasa-jasa) mendominasi struktur perekonomian dan semakin membesar dari tahun ke tahun. Pergeseran peranan tiap-tiap kelompok kategori terhadap PDRB setiap tahun terjadi terutama pada kelompok kategori primer dan tersier. Sedangkan kategori sekunder perubahannya tidak terlalu signifikan.

Kategori-kategori yang memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja menjadi semakin kecil peranannya terhadap perekonomian,

sedangkan kategori-kategori yang lebih sedikit menyerap tenaga kerja memiliki peran yang semakin besar. Kekhawatiran yang mungkin terjadi adalah pada tahun-tahun mendatang angka pengangguran akan semakin tinggi, karena makin kecilnya peran kategori-kategori yang banyak menyerap tenaga kerja.

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Lebak pada tahun 2017 yang tertinggi pada sektor konstruksi yaitu sebesar 15,33% sedangkan yang terendah pada sektor pertambangan dan galian yaitu sebessar 0,3%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.25.

Tabel 2.19
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Lebak Tahun 2013-2017

NO	KATEGORI	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.9	0.96	8.31	6.35	4.18
2	Pertambangan dan Penggalian	-4.95	2.14	2.8	3.47	0.3
3	Industri Pengolahan	6.55	1.25	-3.07	1.78	4.58
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10.34	19.97	5.41	19.98	3,40
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.05	1.95	5.56	2.69	4,39
6	Konstruksi	9.99	24.17	20.67	10.1	15,33
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.33	5.78	2.77	3.36	6,21
8	Transportasi dan Pergudangan	7.04	10.24	3.46	4.5	5,79
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.27	10.17	7.35	7.51	8,17
10	Informasi dan Komunikasi	9.39	18.69	4.22	4.05	8,07
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	9.72	6.44	7.66	10.98	5,09
12	Real Estate	7.21	7.2	5.01	6.53	8,89
13	Jasa Perusahaan	5.02	7.49	4.63	5.26	6,52
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.25	9.86	9.32	8.55	5,12
15	Jasa Pendidikan	5.9	9.57	7	7.05	7,35
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.35	8.78	9	8.99	9,97
17	Jasa lainnya	7.32	12.42	6.25	6.41	6,61
PDRB		6.3	5.83	5.8	5.7	6,05

Sumber: BPS Kabupaten Lebak, 2019

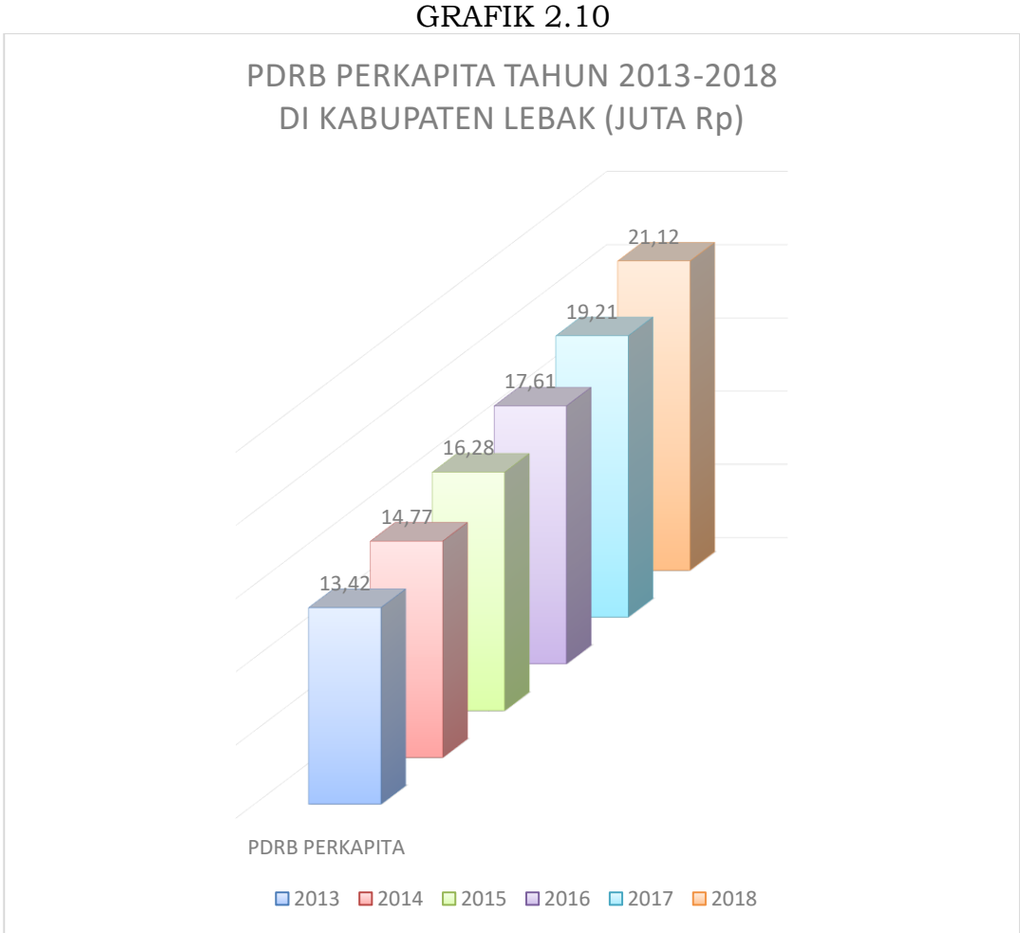
2) PDRB Per Kapita

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi

pendapatan, maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan kepengeluaran untuk bukan makanan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga di sini mencakup pembelian untuk makanan dan bukan makanan (barang dan jasa) di dalam negeri maupun luar negeri. Termasuk pula di sini pengeluaran lembaga nirlaba yang tujuan usahanya adalah untuk melayani keperluan rumah tangga.

PDRB perkapita di Kabupaten Lebak 5 (lima) tahun berturut-turut mengalami kenaikan secara signifikan yaitu dari tahun 2014 sebesar Rp. 14,77 Juta ke tahun 2018 sebesar Rp. 21,12 Juta. Secara teori hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat namun harus dibuktikan dengan membandingkan peningkatan perkapita dengan tingkat kenaikan harga atau inflasi. Untuk lebih jelasnya pendapatan perkapita tahun 2013-2018 di Kabupaten Lebak dapat dilihat pada Grafik 2.11.

GRAFIK 2.10



Sumber : BPS Kabupaten Lebak 2019

Tabel 2.20
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Di Kabupaten Lebak 2013-2017

NO	KOMPONEN	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)
1	Konsumsi Rumah Tangga	79.63	75.78	73.51	72.19	71.43
2	Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	1.94	1.99	1.86	1.81	1.76
3	Konsumsi Pemerintah	8.89	8.38	8.38	8.03	7.87
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.50	4.55	4.77	4.97	5.32
5	Perubahan Inventori	1.86	0.26	0.00	0.00	0.00
6	Ekspor	30.42	30.07	31.19	32.71	31.89
7	Impor	27.24	21.03	19.72	19.70	18.27
PDRB		100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Lebak Tahun 2019

Tabel diatas menggambarkan distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran pada konsumsi rumah tangga mengalami penurunan selama 5 (lima) Tahun, yaitu dari 79,63% pada tahun 2013 menjadi 71,43% pada tahun 2017. Walaupun pada tahun tersebut tetap merupakan komponen yang tertinggi dibanding komponen lainnya, sedangkan yang terendah pada tahun 2017 terdapat pada komponen perubahan inventori sebesar 0,00%." Komponen konsumsi rumah tangga pada PDRB Atas Dasar harga Berlaku menurut pengeluaran mengalami kenaikan selama 5 (lima tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2013 sebesar Rp.13.331.840 tahun 2014 sebesar Rp.14.091.690 tahun 2015 sebesar Rp. 15.196.960 tahun 2016 sebesar Rp. 16.325.540 dan tahun 2017 sebesar Rp. 17.679.860 Lebih rincinya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.21
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran
Di Kabupaten Lebak 2013-2017

Komponen	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Konsumsi Rumah Tangga	13.331.840	14.091.690	15.196.960	16.325.540	17.679.860
Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	325.340	369.260	384.810	410.050	434.660
Konsumsi Pemerintah	1.488.620	1.557.800	1.732.180	1.815.170	1.947.670
Pembentukan Modal Tetap Bruto	753.250	846.930	986.320	1.124.360	1.317.780
Perubahan Inventori	311.700	48.960	0.05	0.003	0.003
Ekspor	5.092.240	5.590.840	6.447.770	7.397.010	7.892.200
Impor	4.560.930	3.910.093	4.075.880	4.456.070	4.521.490
PDRB	16.742.050	18.594.550	20.672.210	22.616.060	24.750.680

Sumber: BPS Kabupaten Lebak Tahun 2018

Sedangkan pada PDRB atas dasar harga konstan konsumsi rumah tangga tetap menunjukkan angka yang tertinggi dibanding komponen lainnya yaitu

sebesar Rp. 14.259.990 dan yang terendah pada komponen perubahan inventori yaitu sebesar Rp. 0,01. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.22
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lebak
Atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)
Tahun 2013 - 2017

Komponen	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Konsumsi Rumah Tangga	11.656.351	12.216.477	12.870.584	13.437.042	14.256.990
Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	285.295	319.143	327.665	345.475	355.070
Konsumsi Pemerintah	1.118.986	1.118.767	1.194.860	1.196.140	1.261.720
Pembentukan Modal Tetap Bruto	682.699	696.338	761.366	817.292	938.710
Perubahan Inventori	261.493	235.226	39.778	20.458	0,01
Ekspor	4.395.213	4.786.455	5.752.993	6.437.537	6.318.410
Impor	3.512.054	3.616.161	4.276.357	4.633.377	4.342.640
PDRB	14.887.984	15.756.247	16.670.889	17.620.568	18.788.270

Sumber : BPS Kabupaten Lebak Tahun 2018

Tabel 2.23
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (dalam Milyar Rupiah)
Tahun 2013-2017

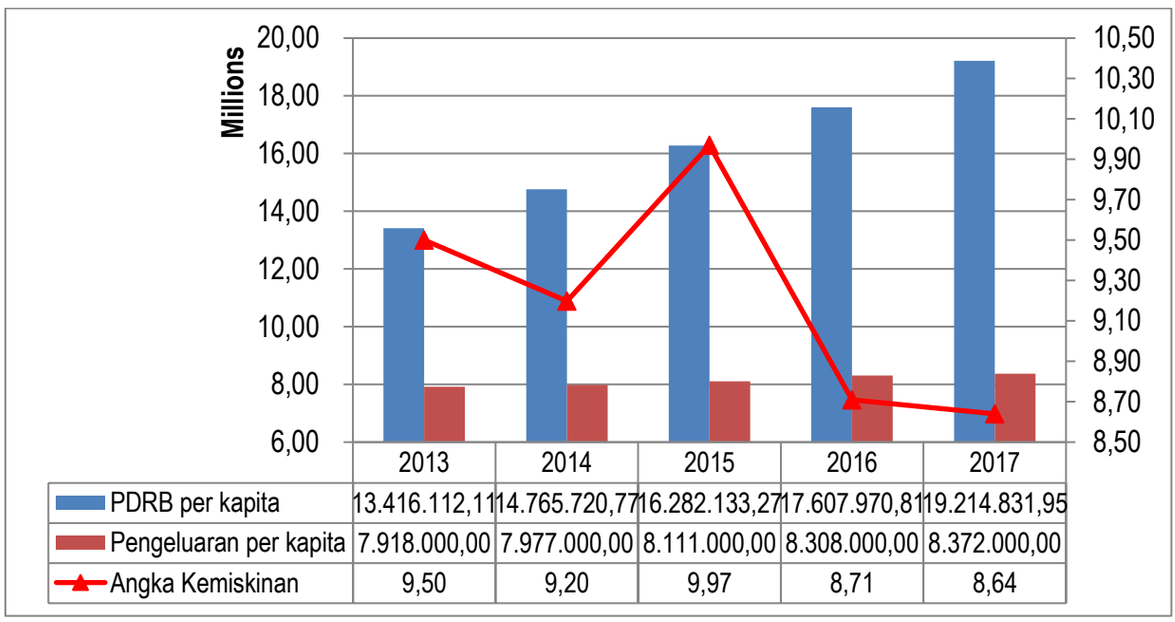
Lapangan Usaha	2013		2014		2015		2016		2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pertanian	4,691.92	28.02	5,058.46	27.20	5,849.60	28.29	6,433.73	28.56	6,800.44	27.48
Pertambangan	1,395.05	8.33	1,509.15	8.12	1,512.30	7.31	1,605.89	7.13	1,656.72	6.69
Industri Pengolahan	1,885.40	11.26	1,938.92	10.43	1,944.98	9.41	2,040.03	9.06	2,233.31	9.02
Listrik dan Gas	9.81	0.06	14.10	0.08	20.38	0.10	23.53	0.10	26.01	0.11
Air, Pengelolaan Sampah	9.44	0.06	9.85	0.05	10.93	0.05	11.56	0.05	12.88	0.05
Konstruksi	826.04	4.93	1,086.45	5.84	1,394.59	6.75	1,598.13	7.09	1,981.64	8.01
Perdagangan, dan Reparasi Kendaraan	2,234.95	13.35	2,439.83	13.12	2,589.11	12.52	2,739.11	12.16	3,069.61	12.40
Transportasi dan Pergudangan	974.31	5.82	1,174.67	6.32	1,301.60	6.30	1,383.12	6.14	1,490.77	6.02
Akomodasi dan Makan Minum	756.91	4.52	890.39	4.79	1,012.67	4.90	1,119.95	4.97	1,229.91	4.97
Informasi dan Komunikasi	98.76	0.59	113.37	0.61	115.85	0.56	121.26	0.54	135.20	0.55

Jasa Keuangan dan Asuransi	286.91	1.71	310.19	1.67	346.40	1.68	395.14	1.75	427.60	1.73
Real Estate	1,063.72	6.35	1,149.55	6.18	1,282.44	6.20	1,399.92	6.21	1,607.80	6.50
Jasa Perusahaan	51.91	0.31	57.89	0.31	65.52	0.32	71.48	0.32	78.00	0.32
Adm. Pemerintah Pertahanan dan Jaminan Sosial	863.96	5.16	999.45	5.37	1,168.94	5.65	1,317.30	5.85	1,446.59	5.84
Jasa Pendidikan	1,016.58	6.07	1,162.29	6.25	1,284.03	6.21	1,419.08	6.30	1,609.08	6.50
Jasa Kesehatan dan Keg.Sosial	169.97	1.02	193.87	1.04	221.39	1.07	248.38	1.10	284.27	1.15
Jasa lainnya	406.40	2.43	486.12	2.61	554.52	2.68	600.23	2.66	660.85	2.67
PDRB	**16,742.05**	**100**	**18,594.55**	**100**	**20,675.25**	**100**	**22,527.85**	**100**	**24,750.68**	**100**

Sumber: Kabupaten Lebak Dalam Angka, 2018

Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan juga tercermin dari makin meningkatnya PDRB per kapita dan pengeluaran per kapita yang terus meningkat, serta berkorelasi dengan makin menurunnya jumlah dan persentase penduduk miskin. Berdasarkan data BPS, PDRB per kapita Kabupaten Lebak pada tahun 2013 adalah sebesar Rp.13,42 juta meningkat menjadi sebesar Rp.19,21 juta. Demikian pula dengan pengeluaran per kapita yang meningkat dari sebesar Rp.7,92 juta pada tahun 2013 menjadi Rp.8,37 juta. Peningkatan ini diiringi dengan menurunnya angka kemiskinan yang pada tahun 2013 tercatat mencapai 9,50% turun menjadi 8,64% pada tahun 2018.

Grafik 2.11
PDRB per Kapita, Pengeluaran per Kapita, dan Angka Kemiskinan
Tahun 2013-2017



Sumber: Kabupaten Lebak Dalam Angka, 2014-2018

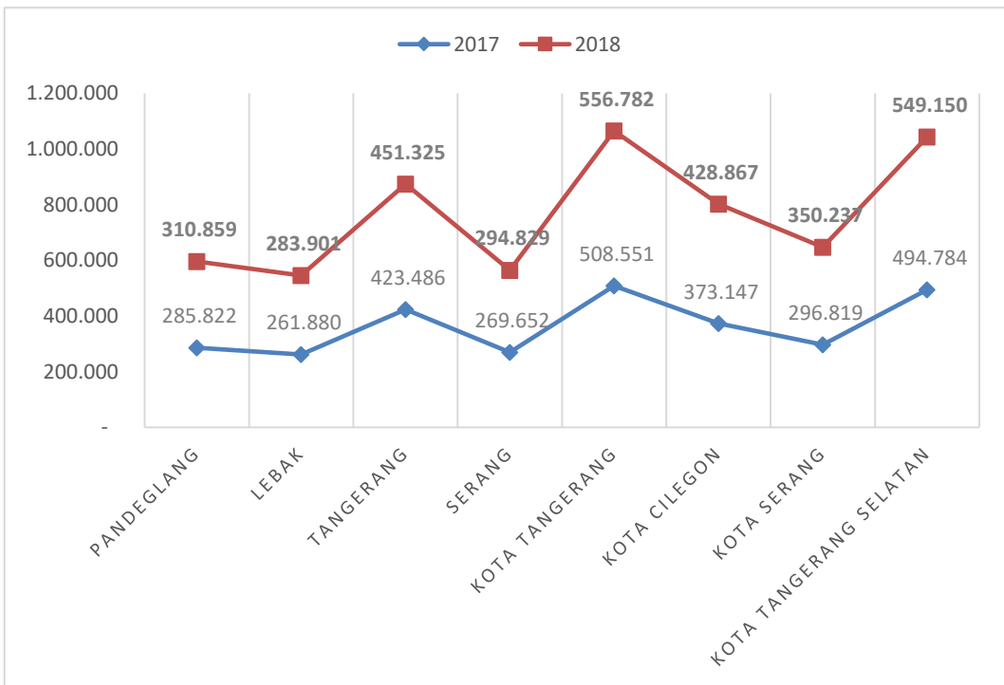
3) Penduduk Miskin

Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan (GK) dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. GK terdiri dari dua komponen yaitu GKM (Garis Kemiskinan Makanan) dan GKNM (Garis Kemiskinan Non Makanan). GKM setara dengan pemenuhan kebutuhan kalori 2100 kkal per kapita per hari, sedangkan GKNM setara dengan kebutuhan dasar bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Perubahan garis kemiskinan sangat ditentukan oleh harga barang-barang makanan dan non makanan yang beredar di masyarakat. Seiring dengan peningkatan harga, GK pun terus mengalami peningkatan setiap tahun. Pada Maret 2018, GK Lebak masih sebesar Rp 283.901,,- per kapita per bulan. GK ini terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

Perkembangan garis kemiskinan pada periode tahun 2017–2018 berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, tampak bahwa dalam dua tahun terakhir yang terbentuk memiliki pola garis kemiskinan yang cenderung sama, yaitu terjadi peningkatan garis kemiskinan pada tahun 2018

Grafik 2.12
Perbandingan Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Tahun 2017-2018



Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2019

Grafik 2.13



Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2019

Tingkat kemiskinan Lebak cukup rendah apabila dibandingkan dengan Kabupaten Pandeglang. Pada tahun 2018, tingkat kemiskinan di Kabupaten Lebak tercatat sebesar 8,41 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 108.815 ribu jiwa. Secara provinsi, tingkat kemiskinan Lebak berada pada posisi tertinggi kedua setelah Pandeglang sebesar 9,6%. Tingginya tingkat kemiskinan di Lebak berarti masalah kemiskinan harus menjadi prioritas utama. Pengentasan kemiskinan tetap menjadi program prioritas, karena hidup yang layak menjadi hak semua orang dan hal ini yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak.

Secara umum, perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Lebak menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun . Penurunan penduduk miskin terjadi pada dua periode pengukuran yaitu pada Maret 2017 dan Maret 2018.

Pada Maret 2017 angka kemiskinan tercatat sebesar 8,64 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 111.080 ribu jiwa. Dan pada Maret 2018, mengalalami penurunan menjadi sebesar 8,41 persen dengan jumlah penduduk miskin 108.815 ribu jiwa.

Berdasarkan persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan, pada tahun 2018 Kabupaten Lebak menduduki urutan kedua setelah Kabupaten Pandeglang. Hal ini menunjukkan bahwa 8,41% penduduk berada di bawah garis kemiskinan.

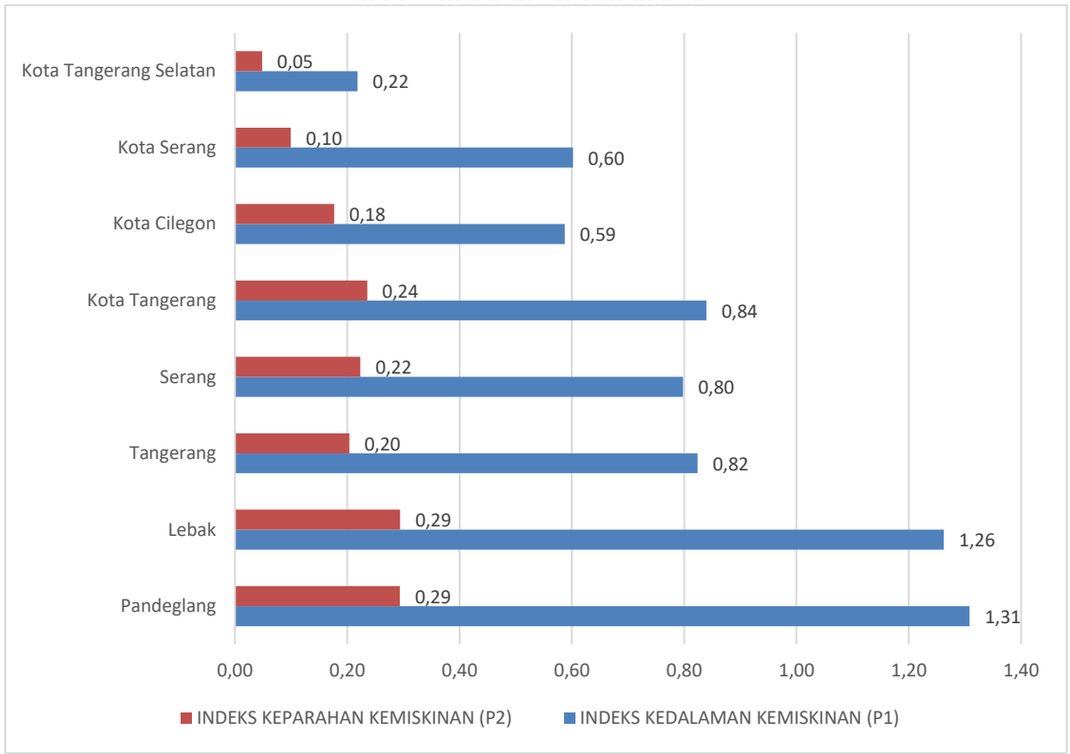
Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Berdasarkan headcount indeks Kabupaten Lebak menunjukkan urutan kedua tertinggi dalam angka kemiskinan. Headcount indeks ini adalah indeks

yang biasanya dikenal dengan angka kemiskinan atau persentase penduduk miskin pada suatu wilayah.

Sedangkan poverty gap menunjukkan rata-rata jarak pendapatan pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan, semakin besar berarti semakin jauh jaraknya. Besarnya indeks poverty gap menunjukkan pula bahwa walaupun harga-harga bahan pokok turun drastis namun penduduk miskin masih tetap di bawah garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (*Proverty Gap Index*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Perbandingan ukuran kemiskinan disajikan dalam Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 2.15

Grafik 2. 14
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
di Provinsi Banten Tahun 2018

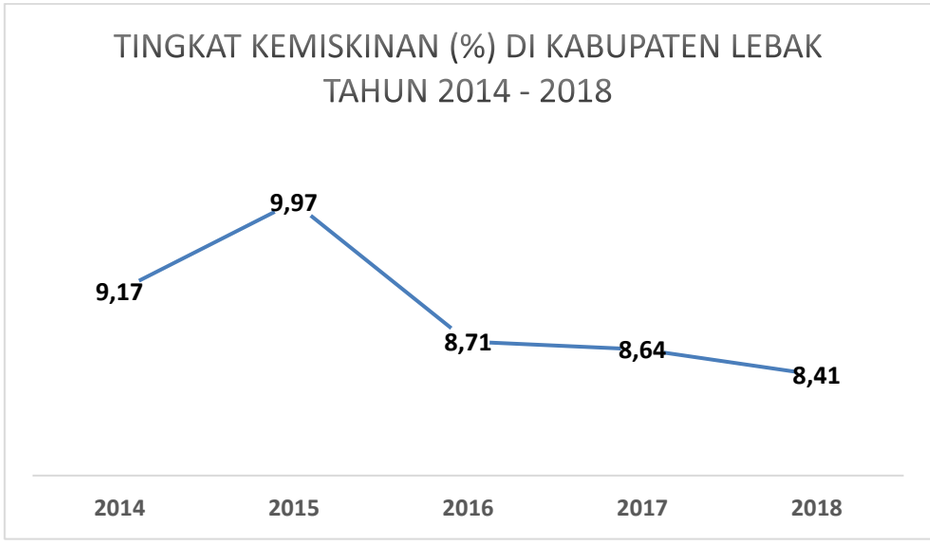


Sumber: BPS Kab.Lebak 2019

Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 126.420 ribu jiwa (9,97%) jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebanyak 115.830 ribu jiwa (9.17%) kemudian pada Tahun 2016 kembali turun menjadi 111.210 ribu jiwa (8.71%) dan trend menurun ini terus terjadi di tahun 2017 menjadi 111.080 ribu jiwa (8,64%) dan tahun 2018 menjadi 108.815 ribu jiwa (8,41%). Untuk selanjutnya perkembangan dan perbandingan jumlah penduduk miskin di disajikan dalam grafik 2.16.

Grafik 2.15



Sumber : BPS Kabupaten Lebak Tahun 2019

Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015

Pada saat ini pemerintah melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Badan Pusat Statistik melakukan perbaikan data rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan untuk perencanaan program perlindungan sosial yaitu Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT). Menurut PBDT Tahun 2015 rumah tangga miskin di Kabupaten Lebak sebesar 105.202 KK, dengan jumlah individu sebesar 433.797 jiwa. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.24

Jumlah Rumah Tangga Menurut Status Kesejahteraan Di Kabupaten Lebak

No	Nama Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga					Jumlah Individu				
		Desil 1 *)	Desil 2 *)	Desil 3 *)	Desil 4 *)	TOTAL	Desil 1 *)	Desil 2 *)	Desil 3 *)	Desil 4 *)	TOTAL
1	MALINGPING	139	466	1,951	3,367	5,923	979	2,704	8,916	12,440	25,039
2	WANASALAM	184	551	2,196	3,497	6,428	1,285	3,000	9,358	11,353	24,996
3	PANGGARANGAN	65	234	1,390	2,185	3,874	391	1,108	5,083	6,717	13,299
4	CIHARA	60	274	1,511	2,016	3,861	377	1,349	5,729	6,236	13,691
5	BAYAH	17	78	577	1,243	1,915	116	425	2,640	4,620	7,801
6	CILOGRANG	21	90	557	1,198	1,866	141	483	2,362	4,031	7,017
7	CIBEBER	75	240	1,594	2,801	4,710	457	1,162	5,855	8,672	16,146
8	CIJAKU	143	385	1,379	1,790	3,697	915	2,034	5,630	5,900	14,479
9	CIGEMBLONG	56	241	1,115	1,806	3,218	337	1,108	4,002	5,077	10,524
10	BANJARSARI	158	534	1,977	3,201	5,870	1,082	2,910	8,526	10,899	23,417
11	CILELES	75	242	1,057	1,847	3,221	547	1,386	4,871	6,767	13,571
12	GUNUNG KENCANA	76	289	1,285	1,994	3,644	522	1,629	5,720	7,254	15,125
13	BOJONGMANIK	17	132	1,058	1,607	2,814	109	708	4,101	5,018	9,936
14	CIRINTEN	58	193	1,342	1,849	3,442	385	979	5,291	5,880	12,535
15	LEUWIDAMAR	707	623	1,501	1,842	4,673	3,613	2,791	6,215	6,875	19,494
16	MUNCANG	89	403	1,533	2,054	4,079	622	2,329	6,838	7,501	17,290
17	SOBANG	124	447	1,741	2,148	4,460	769	2,118	6,350	6,255	15,492
18	CIPANAS	101	296	1,135	2,062	3,594	755	1,741	5,308	7,824	15,628
19	LEBAKGEDONG	59	206	781	1,037	2,083	394	1,116	3,267	3,339	8,116
20	SAJIRA	133	351	1,301	2,272	4,057	1,005	2,184	6,458	9,027	18,674
21	CIMARGA	158	551	2,038	3,147	5,894	1,178	3,267	9,671	12,213	26,329
22	CIKULUR	83	274	1,209	2,141	3,707	632	1,676	5,995	8,863	17,166
23	WARUNGGUNUNG	70	222	892	1,642	2,826	532	1,403	4,496	6,740	13,171
24	CIBADAK	63	261	1,145	2,262	3,731	479	1,667	5,950	9,654	17,750
25	RANGKASBITUNG	61	232	1,131	2,486	3,910	491	1,567	6,147	10,974	19,179
26	KALANGANYAR	66	237	705	1,007	2,015	519	1,590	3,801	4,751	10,661
27	MAJA	84	291	1,012	1,710	3,097	649	1,887	5,498	7,575	15,609
28	CURUGBITUNG	48	189	827	1,529	2,593	356	1,139	3,942	6,225	11,662
	TOTAL :	**2,990**	**8,532**	**35,940**	**57,740**	**105,202**	**19,637**	**47,460**	**158,020**	**208,680**	**433,797**

Sumber : BPS dan TNP2K (PBDT 2015)

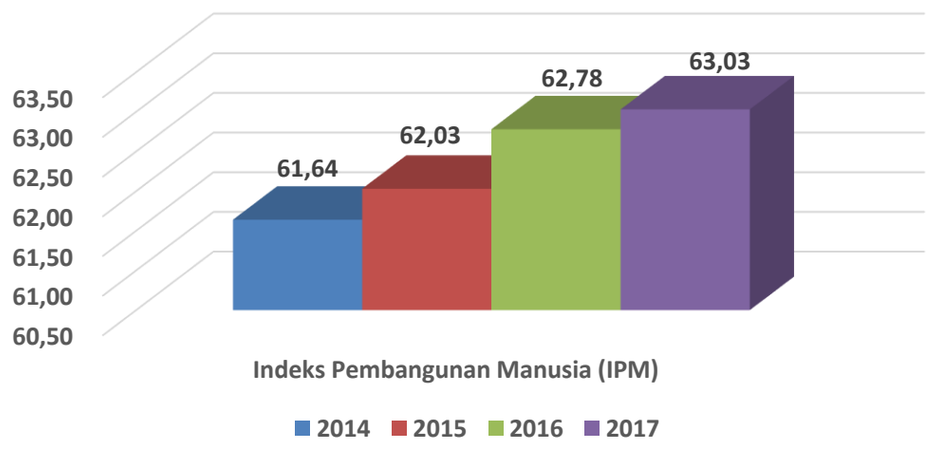
4) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok yang masing-masing mewakili dimensi pembangunan manusia yang mencerminkan kebutuhan dasar yaitu indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks standar hidup.

Seiring dengan pergantian tahun dasar dalam perhitungan PDRB atas dasar harga konstan yang semula tahun 2000 menjadi tahun 2010, maka perhitungan IPM juga mengacu kepada tahun dasar 2010. Metode tersebut mengadopsi teknik perhitungan IPM yang telah dipergunakan oleh UNDP dalam penyusunan laporan tahunan pembangunan manusia (human Development Report) sejak tahun 2010. Perubahan mendasar dalam perhitungan IPM metode baru mencakup penggunaan indikator harapan lama sekolah (HLS) menggantikan indikator angka melek huruf (AMH) dan penggunaan indikator pendapatan nasional bruto per kapita menggantikan produk domestik bruto dalam perhitungan indeks standar hidup, agregasi indeks juga mengalami perubahan dimana semula agregasi indeks menggunakan rata-rata hitung, maka dalam perhitungan IPM metode baru ini perhitungan indeks menggunakan rata-rata geometrik.

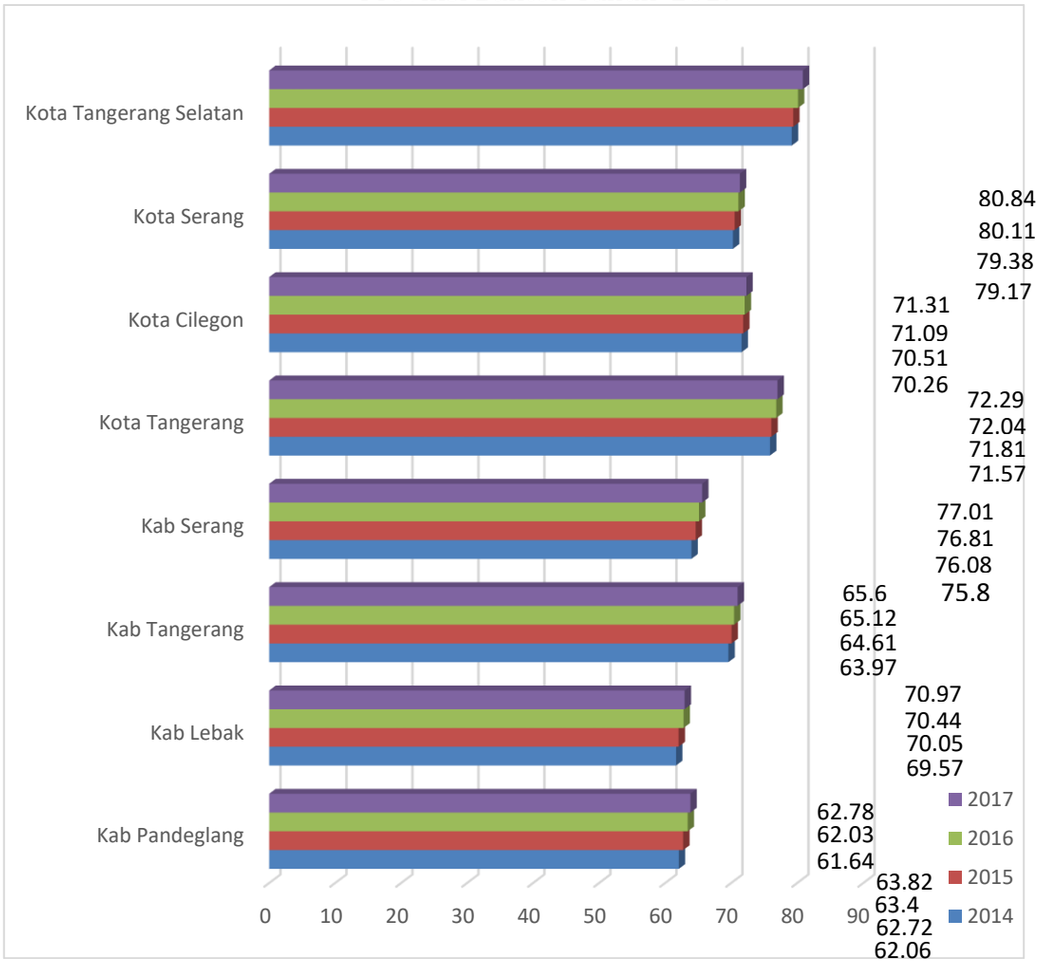
Secara umum level IPM dengan menggunakan perhitungan metode baru menjadi lebih rendah, perubahan peringkat IPM ini tidak bisa diperbandingkan akibat adanya perbedaan indikator dan metodologi.

Grafik 2.16
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2014-2017



Sumber : Diskominfo Kabupaten Lebak 2018

Grafik 2.17
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Provinsi Banten Tahun 2017



Pertumbuhan IPM Provinsi Banten dari tahun ke tahun tentu saja hasil dari peningkatan IPM yang terjadi di wilayah Kabupaten/kota di Propinsi Banten. Pertumbuhan yang terjadi berkisar antara 0,42 persen (Kabupaten Tangerang) hingga 1,15 persen (Kabupaten Pandeglang). Kota Tangerang Selatan masih tetap merupakan wilayah yang memiliki IPM tertinggi di Propinsi Banten, dengan pencapaian 77,01 persen dari kondisi ideal. Sedangkan posisi terendah ditempati oleh Kabupaten Lebak, dengan selisih nilai beda tipis (0.42 poin) dengan Kabupaten Pandeglang. Pada tahun 2014 mempunyai nilai IPM sebesar 61,64, atau meningkat sebesar 0,82 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan IPM tahun 2014 lebih kecil dibandingkan peningkatan pada tahun 2013 (1,52 persen).

Berdasarkan kategori yang diberikan oleh UNDP, maka, capaian pembangunan manusia di Kabupaten Lebak Banten pada periode 2012-2014 termasuk dalam kategori sedang. Guna mengejar ketertinggalan pencapaian pembangunan manusia dibutuhkan program pembangunan yang konkrit dan berkelanjutan. Diantaranya program pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan (untuk kemudahan akses) dan kelengkapan fasilitas sosial ekonomi (pasar, fasilitas kesehatan dan sebagainya). Selain itu

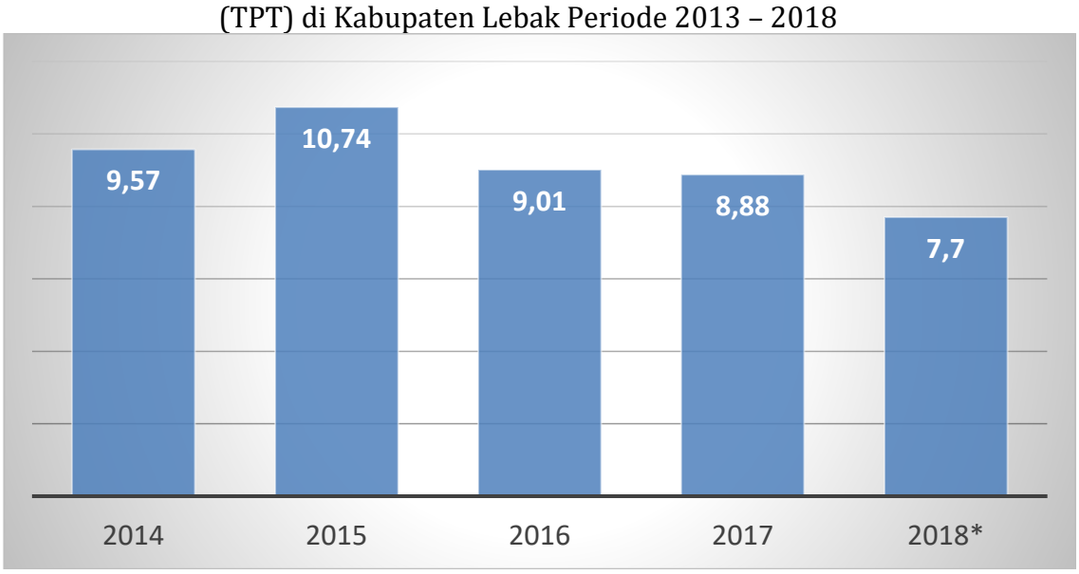
diperlukan pula sinergi antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta dalam melakukan pelaksanaan pembangunan.

5) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terbuka dengan jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah penduduk usia produktif yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Ketiadaan pekerjaan itu menurut BPS bisa karena sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (*discouraged worker*), serta telah diterima bekerja namun belum mulai bekerja.

TPT bisa dipergunakan untuk memantau serta mengevaluasi perkembangan angka pengangguran. Perkembangan angka pengangguran terbuka pada periode Agustus 2010 sampai dengan Agustus 2013 menunjukkan tren penurunan dan mengalami kenaikan kembali di tahun 2014 seperti tersaji pada grafik 2.51.

Grafik 2.18
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) di Kabupaten Lebak Periode 2013 – 2018



Sumber : BPS Kab. Lebak 2018

6) Indeks Gini Ratio

Koefisien gini dibagi menjadi tiga indikator, yakni kurang dari 0,3 persen menunjukkan ketimpangan rendah, antara 0,3 sampai 0,5 persen menunjukan ketimpangan tingkat menengah, dan lebih dari 0,5 persen menunjukkan ketimpangan tinggi. Statistik menunjukkan, untuk tahun 2014 agregat sebesar 0,27-0,45 kemudian tahun 2015 sebesar 0,28-0,44 sedangkan penurunan gini ratio terbesar terjadi di tahun 2017 dengan agregat sebesar 0,27-0,36, dan untuk tahun 2018 sebesar 0,34.

Tabel 2.19

Indeks Gini Ratio Kabuapten Lebak Tahun 2014-2018

Kabupaten	Indeks Gini				
	2014	2015	2016	2017	2018*
Lebak	0,27-0,45	0,28-0,44	0,29-0,41	0,27-0,36	0,34

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Implikasi dari makin meningkatnya kinerja perekonomian daerah adalah meningkatnya kesejahteraan sosial, yang tercermin pada sejumlah indikator makro pembangunan manusia, antara lain : Angka Melek Huruf (AMH), Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), angka kelangsungan hidup bayi, Angka Usia Harapan Hidup (AHH), persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja, dan lain-lain.

1) Pendidikan

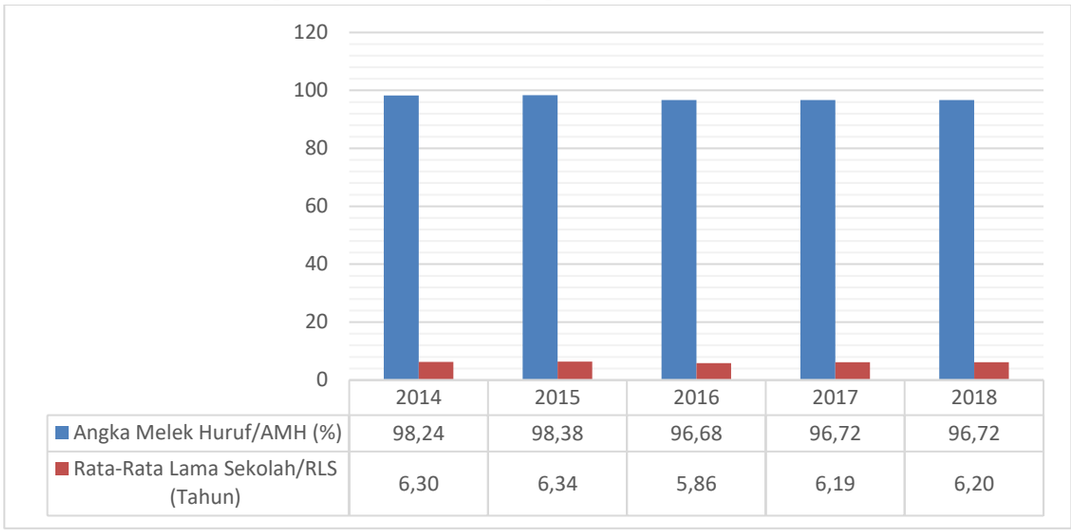
Angka Melek Huruf menggambarkan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis (latin atau huruf lainnya) terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Data pada dinas terkait menunjukkan peningkatan AMH dari tahun ke tahun. Angka Melek Huruf pada tahun 2018 telah mencapai **96,72%**, bertambah atau naik sebesar 0,04% dibandingkan capaian pada tahun 2016 yakni sebesar 96,68%.

Rata-rata Lama Sekolah mulai tahun 2014 mengalami perubahan angka capaian dikarenakan adanya perubahan metode perhitungan dimana sebelum tahun 2014 menggunakan basis penduduk usia 15 tahun ke atas, sedangkan tahun 2014 dan seterusnya menggunakan basis penduduk usia 25 tahun ke atas. Dengan menggunakan perhitungan metode lama capaian RLS tahun 2014 sebesar 6,30 tahun, sedangkan dengan menggunakan perhitungan metode baru, capaian RLS tahun 2014 sebesar 5,84 tahun. Angka ini jauh di bawah angka RLS Provinsi Banten yakni sebesar 8,19 tahun dan menempati posisi terbawah di Provinsi Banten.

Dalam perhitungan dengan metode baru, komponen penyusun IPM mengalami perubahan, yakni Angka Melek Huruf (AMH) diganti dengan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) atau *Expected Years of Schooling (EYS).* Tahun 2017 capaian HLS Kabupaten Lebak sebesar 11,92 tahun sedangkan capaian Provinsi Banten sebasar 12,78 tahun. Posisi Kabupaten Lebak menempati urutan terakhir dari 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa butuh usaha yang lebih sungguh-sungguh lagi untuk dapat mengejar ketertinggalan terhadap kabupaten/kota lain di Provinsi Banten. Grafik 2.19 berikut mendeskripsikan capaian AMH, RLS, APS pada kurun waktu 2014-2018.

Grafik 2.19
Capaian AMH, RLS, APS pada kurun waktu 2014-2018



Sumber : Capaian RPJMD Kabupaten Lebak, Tahun 2018

Tabel 2.26
Perkembangan Angka Melek Huruf
dan Rata-Rata lama Sekolah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2018

NO	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Angka Melek Huruf / AMH (%))	98,24	98,38	96,68	96,72	96,72
2.	Rata-rata Lama Sekolah/RLS (tahun)	6,30	6,34	5,86	6,19	6,20
3.	Angka Partisipasi Kasar (APK) (%)					
	- APK PAUD	22.88	29.72	38.44	33.42	33.43
	- APK SMP	98.94	97.02	105.65	105.53	101.47
	- APK SMA	62.33	64,19	71.41	-	-

Sumber: Capaian RPJMD Kabupaten Lebak, 2018

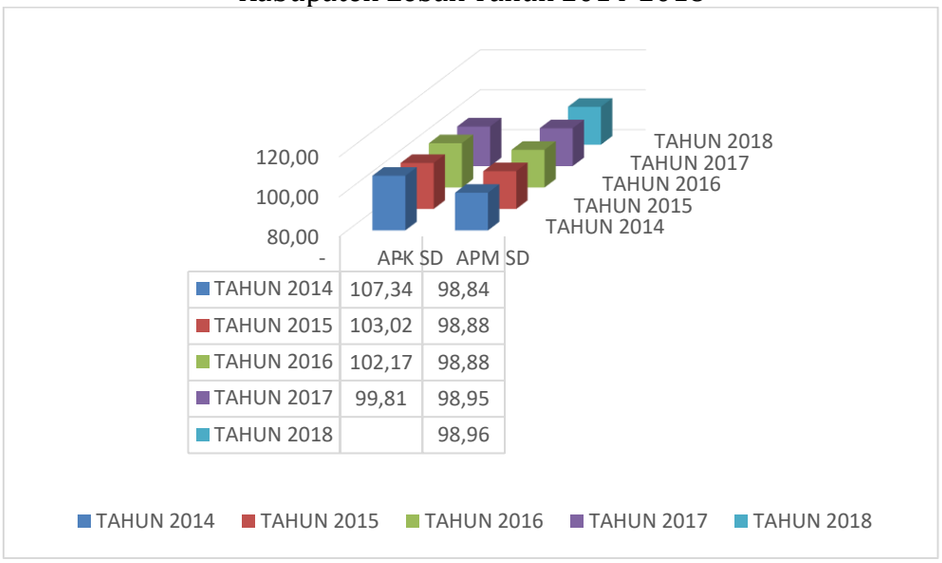
Pendidikan dasar dan menengah merupakan salah satu pelayanan publik yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Upaya untuk memperluas cakupan layanan pendidikan dasar dan menengah ini dilakukan tidak hanya melalui program pendidikan formal namun juga melalui program pendidikan non formal melalui penyelenggaraan Program Paket A, B dan C. Di samping itu, penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat (TBM), penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional, serta Kelompok Belajar Masyarakat juga dilakukan dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat dan memberantas buta huruf di kalangan masyarakat.

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) dari semua jenjang pendidikan merupakan indikator yang lazim digunakan guna

mengukur efektivitas cakupan dan kualitas layanan pendidikan yang telah diselenggarakan oleh pemerintah daerah, yang diukur pada tiap-tiap jenjang pendidikan.

Sedangkan APM-nya meningkat rata-rata sebesar 98,84% pada kurun waktu yang sama. Gambaran tentang perkembangan APK dan APM pada jenjang SD dan sederajat sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel 2.32. dan grafik 2.20.

Grafik 2.20
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD/MI
Kabupaten Lebak Tahun 2014-2018



Sumber : Capaian IKK 2018

Tabel 2.27
Perkembangan APK dan APM SD/MI Kabupaten Lebak
Tahun 2014-2018

NO	Angka Partisipasi	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	APK SD/MI	107.34	103,02	102,17	99,81	-
2.	APM SD/MI	98.84	98,88	98,88	98,95	98,96

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, 2018

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SMP/MTs juga meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat pada kurun waktu tahun 2014 hingga tahun 2018, APK SMP/MTs meningkat dari 98,94% menjadi 101,47%, Sedangkan APM rata-rata meningkat sebesar 1,50%. Capaian APK dan APM pada jenjang SMP/MTs khususnya tahun 2015 masih sedikit di bawah target RPJMD 2014-2018. Hal ini dikarenakan masih rendahnya animo masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya pada jenjang ini. Tabel berikut menggambarkan trend perkembangan APK dan APM untuk jenjang SMP/MTs dimaksud.

Sementara pada jenjang SMA/SMK/MA, APK dan APM juga mengalami peningkatan meski masih menggambarkan kesenjangan yang cukup lebar pada aspek aksesibilitas pendidikan pada jenjang ini. Tercatat pada kurun waktu tahun 2014 hingga tahun 2016, APK SMA/SMK/MA meningkat rata-rata dari 62,33% menjadi 71,41%. Sedangkan APM rata-rata meningkat sebesar 3,06% pada kurun waktu tahun 2014 hingga tahun 2016. Capaian APK pada jenjang ini sudah melebihi target RPJMD 2014-2018 namun capaian APM masih sedikit di bawah target sehingga dibutuhkan usaha yang lebih keras lagi untuk dapat mencapai target. Tabel berikut menggambarkan trend perkembangan APK dan APM untuk jenjang SMA/SMK/MA dimaksud.

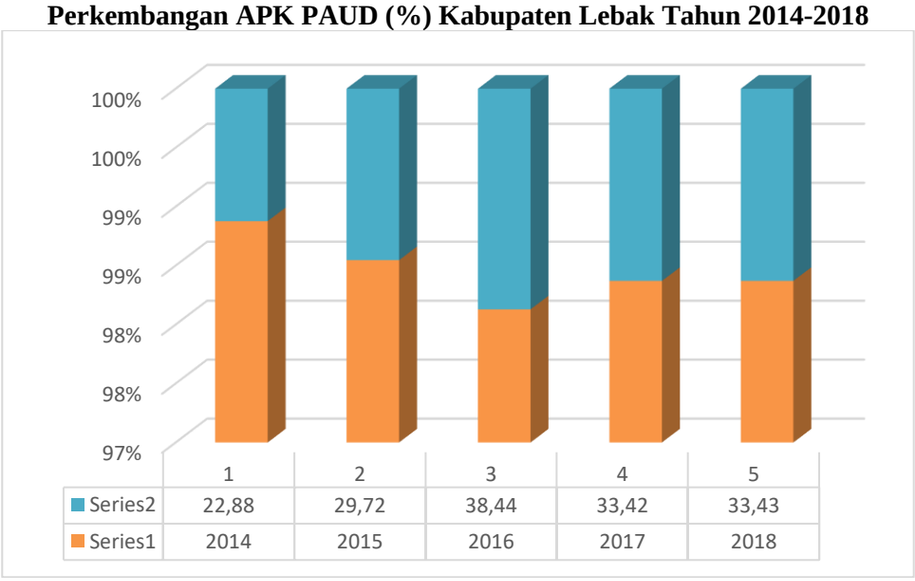
Tabel 2.28
Perkembangan APK dan APM SMA/SMK/MA Kabupaten Lebak
Tahun 2014– 2016

NO	Angka Partisipasi	Tahun		
		2014	2015	2016
1.	APK SMA/SMK/MA	62.33	64.19	71.41
2.	APM SMA/SMK/MA	47.14	47.98	54,04

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, 2017

Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diperlukan sebagai pendukung mutu pendidikan. Mutu pendidikan secara signifikan dipengaruhi oleh kualitas masukan pendidikan yaitu kesiapan mental dan emosional anak untuk memasuki sekolah dasar. Capaian APK PAUD mengalami peningkatan yang signifikan, yakni sebesar 15,47% dari tahun 2014 – 2018, selengkapnya terlihat pada tabel berikut:

Grafik 2.21
Perkembangan APK PAUD (%) Kabupaten Lebak Tahun 2014-2018



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, 2018

Tabel 2.29
Perkembangan APK PAUD Kabupaten Lebak Tahun 2014– 2018

Angka Partisipasi	TAHUN				
	2014	2015	2016	2017	2018
Angka Partisipasi Kasar (APK) (%)					
- APK PAUD	22,88	29,72	38,44	33,42	33,43

Sumber : Capaian RPJMD Kabupaten Lebak 2018

Sejalan dengan capaian angka rata-rata lama sekolah, angka pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator untuk mengukur kualitas SDM pada suatu wilayah. Selama kurun waktu 2014-2018, jumlah penduduk yang tidak/belum tamat SD proporsinya mengalami penurunan dari 32,54% menjadi 30,22%. Jumlah penduduk yang lulus SD/Sederajat masih relatif tinggi yakni 43,34%, walaupun kecenderungannya menurun. Interval capaian Angka Pendidikan yang Ditamatkan dengan Provinsi Banten cukup jauh dan jaraknya semakin jauh pada jenjang yang lebih tinggi sehingga tantangan ke depan adalah menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 tahun.

Perbandingan angka pendidikan yang ditamatkan Kabupaten Lebak terhadap Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.30
Perbandingan Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Lebak
Terhadap Provinsi Banten Tahun 2016 - 2018

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2016		2017		2018	
	Lebak	Banten	Lebak	Banten	Lebak	Banten
Tidak/Belum Tamat SD	22,58	13,82	20,55	14,71	26,19	15,7
SD/MI/SDLB/Paket A	47,31	31,48	47,08	26,58	42,38	25,23
SMP/MTs/SMPLB/Paket B	15,5	17,49	20,47	22,37	17,92	20,59
SMA/MA/SMLB/Paket C	9,19	22,24	7,53	20,93	7,87	22,46
SMK/MAK	2,03	6,18	1,63	5,99	2,3	6,59
Diploma 1/2	0,38	0,42	0,14	0,46	0,25	0,48
Diploma 3	0,29	1,64	0,49	1,87	0,48	1,62
Diploma 4/S1	2,42	6,25	2	6,43	2,56	6,6
S2	0,29	0,43	0,11	0,61	0,05	0,65
S3	0	0,06	0	0,05	0	0,08
TOTAL	100	100	100	100	100	100

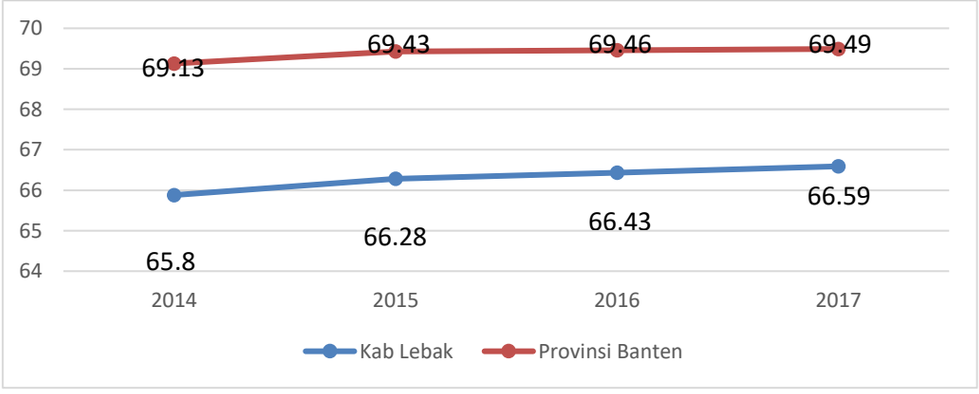
Sumber : BPS Provinsi Banten, 2018

2) Kesehatan

Di samping aspek pendidikan, kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari indikator pembangunan manusia lainnya, yaitu Usia Harapan Hidup yang merepresentasikan derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Gambaran UHH selama kurun waktu lima tahun menunjukkan tren perkembangan yang positif dari 65,88 tahun pada tahun 2014 menjadi 66,59 tahun pada tahun 2017. Dari 8 kabupaten/kota di Provinsi Banten, Kabupaten Lebak menempati posisi ke 7 dan Kabupaten Pandeglang pada posisi ke 8. Gambaran tentang kemajuan UHH dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 2.22.

Keadaan yang ditunjukkan pada grafik 2.22 memperlihatkan bahwa Usia Harapan Hidup masih lebih rendah dibandingkan rata-rata Usia Harapan Hidup di Provinsi Banten dengan tingkat kesenjangan yang semakin turun setiap tahunnya, yakni 3,25 tahun di tahun 2014 menjadi 2,90 tahun di tahun 2017.

Grafik 2.22
Perkembangan Usia Harapan Hidup (UHH)
Kabupaten Lebak Tahun 2014-2017



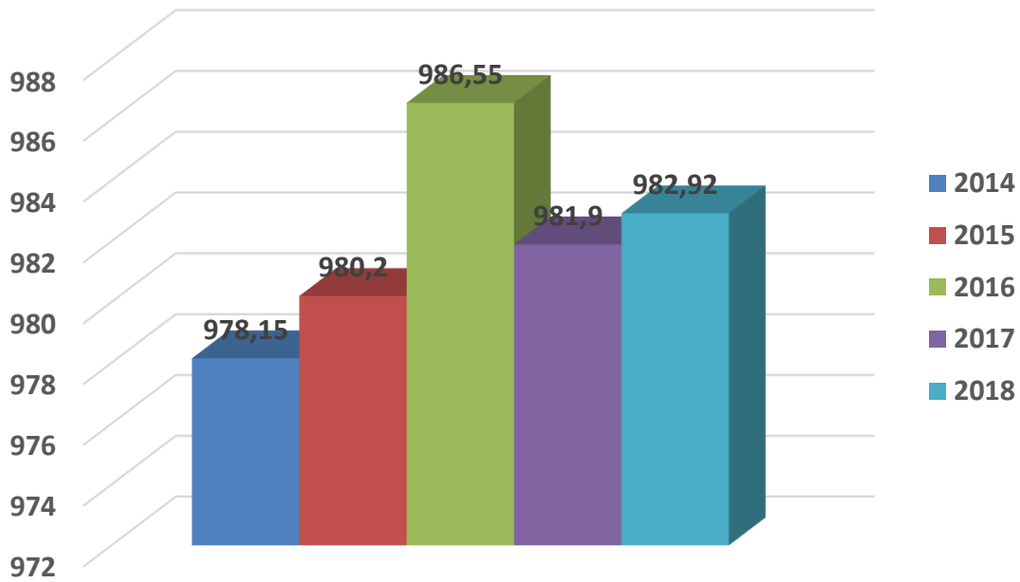
Sumber : BPS Provinsi Banten 2018

Keadaan tersebut mengindikasikan bahwa kinerja kesehatan secara umum masih tertinggal dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten. Walaupun Usia Harapan Hidup dapat menggambarkan derajat kesehatan penduduk, namun angka ini pula dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel yang diidentifikasikan sangat erat kaitannya dengan masalah kesehatan, diantaranya persentase penolong persalinan medis, jumlah dokter, persentase angka kesakitan, keadaan lingkungan perumahan dan tersedianya air bersih. Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan yang lebih baik, maka variabel-variabel tersebut harus menjadi perhatian yang serius.

Meski secara makro derajat kesehatan masyarakat telah terrepresentasi dari Usia Harapan Hidup waktu lahir (UHH) di atas, namun cakupan layanan bidang kesehatan pada level indikator makro dapat dilihat pada Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Sepanjang tahun 2014-2018 AKI mengalami penurunan sebesar 29,75% dari 209,54 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2014 menjadi sebesar 179,79 pada tahun 2018. Sedangkan AKB mengalami penurunan sebesar 6,57% dari sebesar 21,85 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2014 menjadi 15,28 pada tahun 2018. Gambaran rinci trend penurunan AKI dan AKB pada kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.23 berikut.

Grafik 2.23
Angka Kelangsungan Hidup Bayi



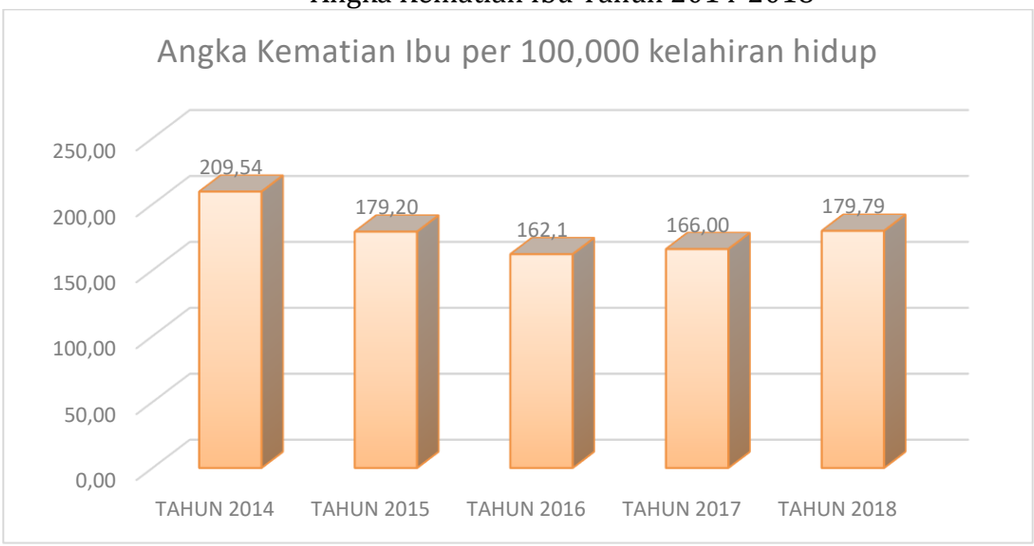
Sumber : *Capaian IKK 2018*

Grafik 2.24
Angka Kematian Bayi



Sumber : *Capaian IKK 2018*

Grafik 2.25
Angka Kematian Ibu Tahun 2014-2018



Sumber : *Capaian IKK 2018*

Tabel 2.31
Angka Kematian Ibu dan Bayi Di Kabupaten Lebak
Tahun 2014-2018

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	21.85	19.8	17.3	18.1	15.28
2	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	209.54	179.2	162.1	166	179.79

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, 2018

Meski sejumlah indikator menggambarkan kecenderungan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, namun beberapa indikator lainnya menunjukkan masih adanya sejumlah permasalahan yang patut mendapat perhatian di masa yang akan datang. Jumlah anak penderita gizi buruk misalnya, meski jumlahnya fluktuatif namun menggambarkan trend naik dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2014 tercatat sebanyak 164 balita menderita gizi buruk. Capaian penuntasan gizi buruk tidak terlaksana dengan baik yang ditandai dengan peningkatan jumlah balita gizi buruk. Pada tahun 2018 menjadi sebanyak 306 balita, sebagaimana tampak pada grafik 2.26.

Grafik 2.26

Jumlah Balita Penderita Gizi Buruk di Kabupaten LebakTahun 2014 – 2018



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, 2018

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

Angka partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dihasilkan dari keikutsertaan penduduk dalam pendidikan dan merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Indikator ini dapat dibedakan sesuai usia sekolah yaitu penduduk pada usia 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun yang bisa dikategorikan berada pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA.

Berdasarkan tabel di bawah terlihat bahwa Angka Partisipasi Sekolah pada usia sekolah lanjutan atas rata-rata berada pada angka 56 persen. Besaran angka tersebut menunjukkan bahwa partisipasi bersekolah pada usia sekolah lanjutan atas dilakukan oleh lebih dari setengah jumlah penduduk usia 16-18 tahun.

Bila kita bandingkan dengan APS tahun sebelumnya walaupun program WAJAR DIKDAS 12 tahun belum sepenuhnya terealisir namun telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Pemerintah Daerah harus dapat mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap rendahnya APS pada usia sekolah lanjutan tanpa memperhatikan apakah itu anak laki-laki atau perempuan. Para pemangku kebijakan harus memberikan perhatian pada masih rendahnya partisipasi sekolah pada tingkat pendidikan lanjut, terutama lanjutan tingkat atas

Tabel 2.32
Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2018

No.	Sekolah	2014	2015	2016	2017	2018
1	SD	99,46%	98,96%	100,52	90,32	105,33
2	SLTP	94,14	97,02	89,82	95,95	95,96

Sumber : BPS Kabupaten Lebak,2016

Angka Partisipasi Sekolah terbesar ada pada kelompok umur 7-12 tahun (SD) yang menandakan bahwa baiknya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan dasar. Terlihat pula bahwa semakin tinggi kelompok usia sekolah semakin berkurang capaian partisipasi masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Ketersediaan fasilitas pendidikan yang mudah dan terjangkau baik dari segi jarak maupun biaya berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan sangat dibutuhkan sebagai penunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar. Sebagai gambaran kondisi fasilitas pendidikan sampai dengan tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.33
Rasio Ruang Kelas terhadap Rombongan Belajar
Kabupaten Lebak Tahun 2017

Jenis Sekolah	Jumlah Ruang Kelas	Jumlah Rombongan Belajar	Rasio
SD	5,229	5,574	0.94
MI	1,625	1,294	1.26
SMP	1,766	3,300	0.54
MTs	1,582	995	1.59
Total	**10,202**	**11,163**	**4,33**

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak, 2018

Grafik 2.27



Berdasarkan tabel di atas, untuk fasilitas pendidikan Sekolah Dasar masih terdapat kekurangan ruang kelas terhadap rombongan belajar sebanyak 345 ruang kelas. Pada jenjang SMP jumlah rombongan belajar sebanyak 3.300 rombongan belajar sedangkan jumlah ruang kelas sebanyak 1.766 sehingga masih kekurangan 1,534 ruang kelas. Hal ini mengindikasikan terjadinya penurunan angka melanjutkan dari SD ke SMP.

Secara umum nampak terdapat kelebihan ruang kelas sebanyak 918 ruang. Hal ini dikarenakan pada jenjang MI dan MTs terdapat kelebihan ruang kelas yang cukup signifikan, yakni berturut-turut 331 ruang dan 587 ruang.

Apabila dilihat dari distribusi ruang kelas berdasarkan kondisi sampai dengan tahun 2017 terlihat bahwa lebih dari 60% dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat. Hal ini butuh perhatian yang serius dalam penanganannya, dikarenakan kondisi tersebut akan semakin buruk jika tidak segera ditangani, akan berdampak kurang baik terhadap kualitas pembelajaran dan membahayakan keselamatan para peserta didik. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut

Tabel 2.34
Distribusi Kondisi Ruang Kelas Menurut Jenis Pendidikan
Kabupaten Lebak Tahun 2017

Satuan Pendidikan	Kondisi Ruang Kelas			%		
	Baik	Rusak	Rusak	Baik	Rusak	Rusak
SD	1.922	2.822	485	36,75	53,98	9,27
SMP	682	860	224	38,62	48,70	12,68
Total	**2.602**	**3.682**	**709**	**75,37**	**102,68**	**21,95**

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak, 2018

Untuk menunjang kegiatan belajar di sekolah diperlukan fasilitas perpustakaan sekolah. Ketersediaan fasilitas perpustakaan sekolah sampai dengan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.35
Ketersediaan Ruang Perpustakaan Sekolah
Kabupaten Lebak Tahun 2018

Jenjang	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
SD	329	343	343	381	381
MI	139	215	215	215	215
SMP	181	115	115	134	134
MTs	54	213	213	213	213
SMA	20	37	37		
SMK	19	23	23		
MA	45	65	65		
Total	792	1,011	1011	943	943

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak, 2018

Distribusi sekolah berdasarkan jenjang pendidikan untuk setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.36
Jumlah Sekolah SD dan SMP di Kabupaten Lebak
Sampai Dengan Tahun 2018

No.	Kecamatan	SD	SMP	SMA	SMK
1	Banjarsari	43	8	2	3
2	Bayah	36	10	3	1
3	Bojongmanik	13	3	1	0
4	Cibadak	27	5	1	1
5	Cibeber	44	11	3	2
6	Cigemblong	19	4	1	0
7	Cihara	23	7	1	0
8	Cijaku	21	5	1	1
9	Cikulur	24	9	2	3
10	Cileles	31	7	1	3
11	Cilograng	27	6	1	3

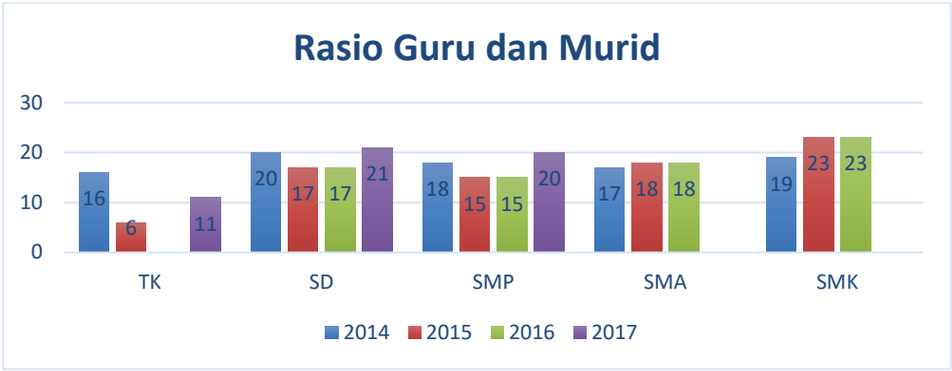
12	Cimarga	38	10	2	1
13	Cipanas	27	10	4	3
14	Cirinten	18	5	0	1
15	Curugbitung	22	5	1	1
16	Gunung Kencana	30	6	1	1
17	Kalanganyar	19	6	2	2
18	Lebakgedong	13	5	1	2
19	Leuwidamar	25	6	2	1
20	Maja	30	8	2	1
21	Malingping	36	11	3	3
22	Muncang	20	9	2	1
23	Panggarangan	34	9	1	1
24	Rangkasbitung	59	14	9	9
25	Sajira	32	7	3	0
26	Sobang	18	5	1	1
27	Wanasalam	29	7	1	1
28	Warunggunung	30	8	1	3
Jumlah		**788**	**206**	**53**	**49**

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak, 2018

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini selain mengidentifikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai kualitas pembelajaran.

Data tahun 2018 menunjukkan bahwa di seluruh jenjang pendidikan rasio guru-murid sudah amat baik, jauh dibawah rasio minimal untuk setiap jenjang pendidikan. Diharapkan dengan makin rendahnya rasio guru murid maka kwalitas pendidikan menjadi lebih baik. Yang dapat menjadi permasalahan apabila terjadi ketidakemerataan penyebaran guru, sehingga guru-guru hanya berkumpul di daerah perkotaan saja.

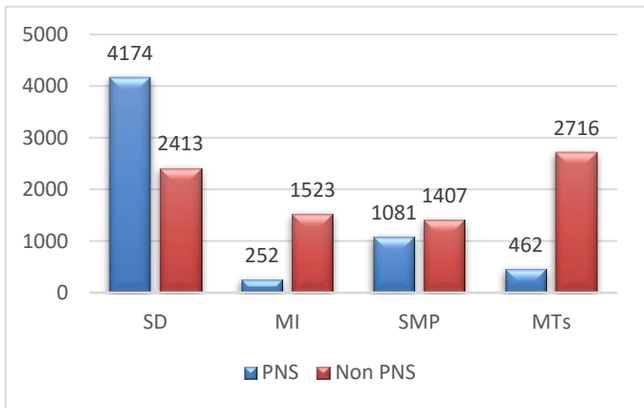
Grafik 2.28
Rasio Guru dan Murid Kabupaten Lebak
Tahun 2014-2017



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak, 2018

Dari grafik 2.28 terlihat bahwa secara umum terjadi kenaikan rasio guru/murid pada tahun 2017 untuk jenjang pendidikan SD dari 1:17 di Tahun 2016 menjadi 1:21 di tahun 2017 dan terjadi kenaikan rasio guru/murid pada tahun 2017 untuk jenjang pendidikan SMP dari 1:15 di Tahun 2016 menjadi 1:20 di tahun 2017. Namun apabila dilihat dari kompetensi dan distribusi guru, jumlah guru masih belum mencukupi. Hal ini disebabkan jumlah guru PNS masih didominasi oleh bukan PNS terutama untuk jenjang MI, SMP/MTs, sedangkan untuk jenjang SD jumlah guru non PNS lebih kecil dibandingkan dengan guru PNS. Selain itu distribusi tenaga pengajar masih belum merata dan terpusat pada daerah perkotaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

Grafik 2.29
Jumlah Guru
per Jenjang
Pendidikan
di Kabupaten
Lebak
Tahun 2017



Sumber : Dinas Pendidikan dan budayaan Kab. Lebak, 2018

Kualitas / mutu pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dalam satu sistem yang saling berpengaruh. Mutu keluaran dipengaruhi oleh mutu masukan dan mutu proses. Masukan pendidikan dapat dilihat dari kesiapan murid dalam kesempatan mendapatkan pendidikan. Ketidaksiapan murid dalam mengikuti pendidikan antara lain dimanifestasikan dalam bentuk mengulang kelas atau putus sekolah.

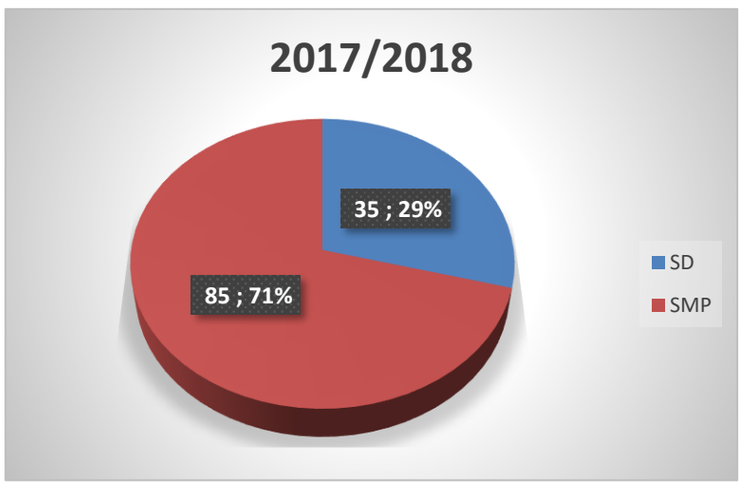
Angka Putus Sekolah menggambarkan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka Putus Sekolah ini dipergunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur (7-12 tahun/SD, 13-15 tahun/SMP, dan 16-18 tahun/SMA). Angka Putus Sekolah berdasarkan data tahun 2013 disajikan pada grafik 2.30.

Grafik 2.30
Angka Putus Sekolah
di Kabupaten Lebak
Tahun 2017/2018



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak, 2018

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa angka putus sekolah sudah antara 1%-5% hanya jenjang SD saja yang masih diatas angka 5%. Sedangkan untuk Angka Mengulang sebagaimana grafik 2.31 berikut.



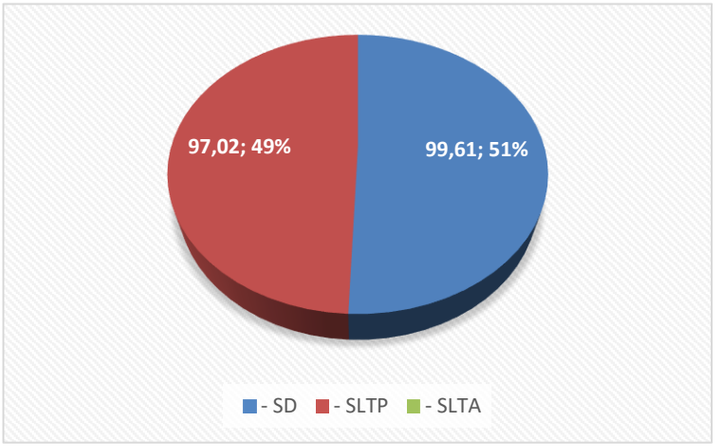
Grafik 2.31
Angka Mengulang
di Kabupaten Lebak
Tahun 2017/2018

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak, 2018

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa angka mengulang kelas paling besar berada pada jenjang SMP sebanyak 85 Siswa, ini menunjukkan masih lemahnya kesiapan murid / siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas.

Selain Angka Mengulang Mutu Pendidikan juga dilihat dari angka kelulusan siswa sebagaimana grafik 2.32.

Grafik 2.32
Angka Kelulusan
di Kabupaten Lebak
Tahun 2018



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak, 2018

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa angka kelulusan siswa sudah berada diatas 90% (sembilan puluh prosen).

2) Kesehatan

Berdasarkan capaian indikator kesehatan sebagaimana dibahas pada point sebelumnya mengalami peningkatan, indikator kapasitas dan cakupan layanan kesehatan terus mengalami peningkatan, sebagaimana tergambarkan dari meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan bagi masyarakat sebagaimana tampak pada tabel berikut ini.

Tabel 2.37
Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan di Kabupaten Lebak
Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Puskesmas	42	42	42	42	42
2	Puskesmas DTP	14	18	21	23	25
2	Jumlah Poliklinik	101	139	139	88	88
3	Jumlah Pustu	68	68	68	68	68
4	Rasio Puskesmas persatuan penduduk	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
5	Rasio Poliklinik persatuan penduduk	0,07	0,09	0,09	0,06	0,06
6	Rasio Pustu persatuan penduduk	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
7	Cakupan Puskesmas	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8	Cakupan Pustu	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71
9	Jumlah Posyandu	1.929	1.959	1.986	1997	2026

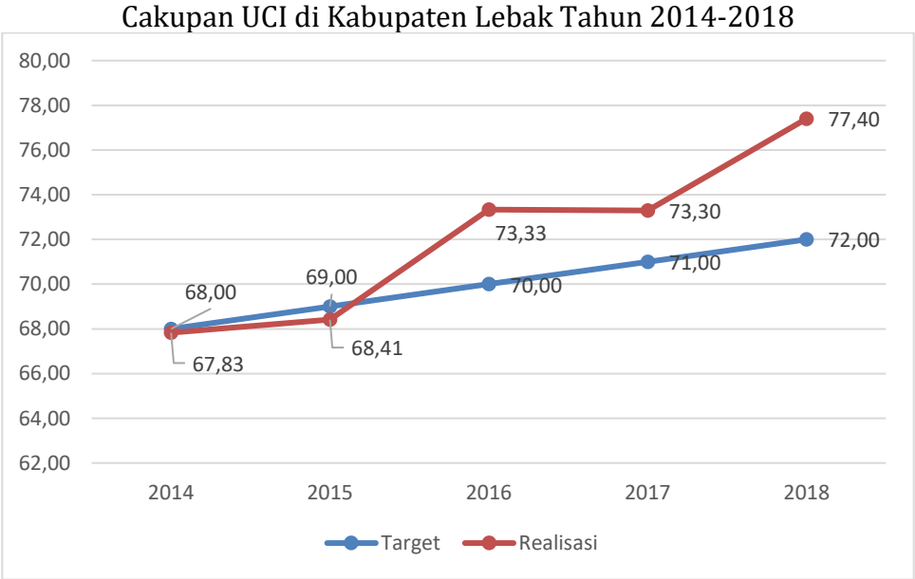
No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
10	Rasio Jumlah Posyandu Terhadap Jumlah Balita	56,59	57,28	57,25	57,44	57,62
11	Jumlah Dokter	135	105	105	89	97
12	Rasio Jumlah Dokter Terhadap Jumlah Penduduk	0,12	0,08	0,08	0,07	0,08
13	Jumlah Tenaga Medis	1.091	1.153	1.153	1.357	1.357
14	Rasio Jumlah Tenaga Medis Terhadap Jumlah Penduduk	0,94	0,94	0,95	1,08	1,08

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, 2018

Pada awal tahun 2014 jumlah Puskesmas yang merupakan UPTD Dinas Kesehatan, adalah sebanyak 42 yang dikelompokkan ke dalam 2 (dua) katagori, yaitu puskesmas dengan rawat inap sebanyak 14 puskesmas dan puskesmas non rawat inap sebanyak 28 puskesmas.

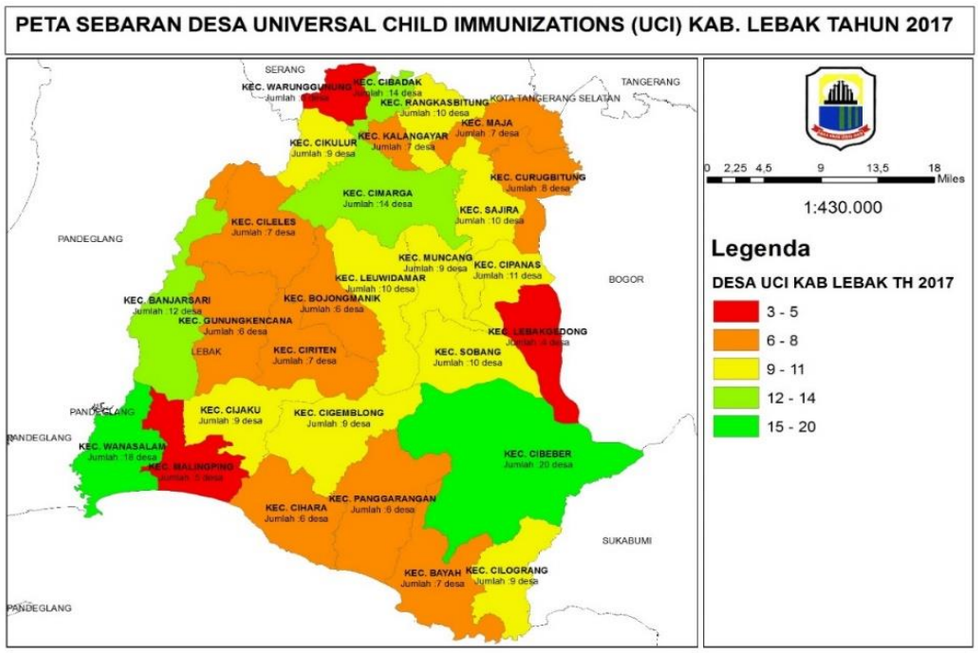
Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah desa/kelurahan dimana lebih dari 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam dalam waktu satu tahun. Capaian UCI per tahun mengalami fluktuasi dan cenderung menurun dan jika dibandingkan dengan dengan standar nasional masih jauh dari target yang sudah ditetapkan yaitu 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 2.34 berikut.

Grafik 2.33
Cakupan UCI di Kabupaten Lebak Tahun 2014-2018



Sumber : Capaian RPJMD Dinas Kesehatan Kab. Lebak, 2018

Gambar 2.10
Peta Sebaran Desa/Kelurahan UCI



Penemuan kasus TBC BTA (+) pada tahun 2014 sebanyak 575 penderita dan mengalami kenaikan menjadi 1139 penderita pada akhir tahun 2018. Jumlah penderita TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati sebanyak 775 penderita atau 38.78 % pada tahun 2014, sedangkan pada akhir tahun 2018 jumlah penderita yang ditemukan dan diobati sebanyak 1822 penderita atau 51 % dari jumlah penemuan kasua TBC BTA (+).

Cakupan penemuan kasus DBD mengalami penurunan mulai dari tahun 2014-2018. Pada tahun 2014 ditemukan kasus sejumlah 309 penderita dengan jumlah penderita yang ditangani sebanyak 309 penderita atau 100 %. Pada tahun 2018 penemuan kasus DBD sebanyak 27 penderita dan ditangani sebanyak 27 penderita atau 100 %.

Kondisi masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat adalah faktor penting yang berpengaruh terhadap status kesehatan penduduk disuatu daerah, karena selain kondisi lingkungan yang buruk, perilaku merupakan faktor yang mempunyai kontribusi besar terhadap derajat kesehatan masyarakat di suatu daerah. Dari data profil kesehatan menunjukkan bahwa PHBS tatanan rumah tangga baru mencapai 35 % persen pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 52.26 % persen pada tahun 2018. Kondisi menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan terhadap perilaku hidup bersih dan sehat. tantangan lainnya adalah masih cukup tingginya kasus penyakit menular seperti HIV/AIDS, DBD, malaria, dan TBC serta penyakit tidak menular seperti antara lain Diabetes militus, Stroke, dan jantung. Disamping itu cakupan pemberian ASI eksklusif juga masih cukup kurang, hal ini berdampak pada kondisi gizi balita.

Faktor penting lainnya yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat adalah kondisi lingkungan yang tercermin antara lain dari indikator kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar. Kondisi kesehatan lingkungan masih belum menggembirakan yang ditunjukkan dengan indikator rumah sehat baru mencapai 11.00 persen, penduduk memanfaatkan jamban keluarga 70.32 %, keluarga yang mempunyai akses terhadap air bersih baru mencapai 89.73 %. Selain indikator tersebut, pengendalian vektor dan pelayanan sanitasi tempat-tempat umum juga mempengaruhi kondisi kesehatan lingkungan. Hal ini berkaitan erat dengan berbagai masalah penyakit seperti TBC, DBD, Laptospiorosis, kusta, malaria, flu burung, diare, pneumonia, filariasis dan penyakit menular lainnya.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan untuk menyediakan dan memenuhi pelayanan dasar dan mutlak yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan. seperti sumberdaya air, jalan, jembatan, air minum dan sanitasi lingkungan (air limbah, drainase dan persampahan).

a. Kondisi Jalan dan Jembatan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, maka jalan dikelompokkan menurut fungsi, status dan kelas. Berdasarkan statusnya, jalan yang ada terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa Total panjang jalan kabupaten sepanjang 772,13 km, terdiri dari jalan luar kota sepanjang 737,91 km dengan jumlah ruas sebanyak 67 ruas dan jalan dalam kota sepanjang 34,22 km dengan jumlah ruas sebanyak 48 ruas. Sedangkan Jalan provinsi sepanjang 187,75 km yang terdiri dari 11 ruas dan jalan nasional sepanjang 141,81 km yang terdiri dari 8 ruas.

Perkembangan kondisi jalan kabupaten dari tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.38
Kondisi Jalan Kabupaten
Tahun 2014-2018 di Kabupaten Lebak

No	Tahun	Kondisi	
		Baik dan sedang (%)	Rusak (%)
1	2014	64,87	35,13
2	2015	62,24	37,76
3	2016	63,02	36,98
4	2017	67,25	32,75
5	2018	66,47	33,53

Sumber : Dinas PUPR

Jumlah jembatan sebanyak 1.216 unit, terdiri dari jembatan beton 619 unit dan jembatan gantung 597 unit.

b. Kondisi Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi yang ada sebanyak 483 Daerah Irigasi (DI), terdiri dari 9 DI yang menjadi kewenangan provinsi dan 474 DI yang menjadi kewenangan kabupaten.

Adapun perkembangan kondisi jaringan irigasi kewenangan kabupaten tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2.39
Daerah Irigasi di Kabupaten Lebak Sampai Dengan Tahun 2018

No	Daerah irigasi	Jumlah	Kondisi			
			Baik	Rusak ringan	Rusak sedang	Rusak berat
1	Kewenangan kabupaten	474	183	154	79	58

Sumber : Dinas PUPR, 2018

Demikian pula dengan penyediaan infrastruktur irigasi guna menunjang target capaian peningkatan produktifitas bagi sekitar 25.909 hektar lahan sawah beririgasi di Kabupaten Lebak, belum termasuk 41.000 hektar lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta sekira 28.037 hektar lahan sawah non irigasi yang diharapkan dapat menjadi penopang ketahanan pangan dalam waktu 20 tahun mendatang. Urgensi pemeliharaan infrastruktur pertanian ini menjadi penting mengingat hingga akhir periode RPJMD Tahun 2014-2018, persentase penyediaan air irigasi baru mencapai sekitar 68,85%. Termasuk dalam fokus ini adalah pentingnya pemeliharaan sekitar 19 situ, 3 waduk, dan 66 embung dan rawa yang berfungsi sebagai tandon air untuk irigasi maupun sumber air baku untuk kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.40
Jenis, Jumlah, dan Luas Daerah Irigasi
Tahun 2017

Kecamatan	Irigasi Permukaan		Irigasi Pompa		Jumlah Total	
	Jumlah DI	Area (ha)	Jumlah DI	Area (ha)	Jumlah DI	Area (ha)
Banjarsari	20	1.733	-	-	20	1.733
Bayah	22	2.435	-	-	22	2.435
Bojongmanik	19	1.624	-	-	19	1.624
Cibadak	3	280	2	250	5	530
Cibeber	68	7.363	-	-	68	7.363
Cigemblong	6	505	-	-	6	505
Cihara	15	1.991	-	-	15	1.991
Cijaku	11	1.026	-	-	11	1.026

Kecamatan	Irigasi Permukaan		Irigasi Pompa		Jumlah Total	
	Jumlah DI	Area (ha)	Jumlah DI	Area (ha)	Jumlah DI	Area (ha)
Cikulur	20	2.083	1	10	21	2.093
Cileles	19	1.945	-	-	19	1.945
Cilograng	23	2.884	-	-	23	2.884
Cimarga	11	685	3	335	14	1.020
Cipanas	24	3.105	-	-	24	3.105
Cirinten	11	1.075	-	-	11	1.075
Curugbitung	2	225	-	-	2	225
Gunungkencana	19	1.553	1	108	20	1.661
Kalanganyar	1	211	1	100	2	311
Lebakgedong	14	1.787	-	-	14	1.787
Leuwidamar	19	1.811	-	-	19	1.811
Maja	4	270	1	100	5	370
Malingping	10	1.885	-	-	10	1.885
Muncang	22	2.402	-	-	22	2.402
Panggarangan	23	2.730	-	-	23	2.730
Rangkasbitung	8	650	2	380	10	1.030
Sajira	19	1.740	-	-	19	1.740
Sobang	30	2.945	-	-	30	2.945
Wanasalam	3	335	-	-	3	335
Warunggunung	17	1.986	-	-	17	1.986
Total	**463**	**49.264**	**11**	**1.283**	**474**	**50.547**

Sumber: DPUPR, 2018

c. Pengelolaan Air Minum

Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum. Sedangkan air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Kebutuhan air minum di Kabupaten Lebak dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDM) Tirta Multatuli yang terbagi menjadi 6 (enam) kantor cabang pelayanan yaitu cabang Rangkasbitung, cabang Malingping, cabang Sajira, cabang Kalanganyar, cabang Leuwidamar dan cabang Cipanas. Sumber air baku yang digunakan oleh PDAM Tirta Multatuli berasal dari air permukaan yang menggunakan 5 (lima) sungai utama yaitu Sungai Ciujung, Sungai Ciberang, Sungai Cisimeut, Sungai CIlangkahan dan Sungai Cidikit.

Data cakupan air minum kabupaten Lebak sampai dengan tahun 2018 adalah 64,4% dan PDAM berkontribusi terhadap cakupan air minum sebesar 14%,

Pelanggan air minum hingga saat ini masih didominasi oleh klasifikasi rumah tangga sebesar 95,85%. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi jumlah pelanggan PDAM dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.41
Jumlah Pelanggan PDAM Tirta Multatuli

No	Jenis Konsumen	Jumlah Pelanggan		
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Rumah Tangga	16.230	16.474	20.173
2	Instansi Pemerintah	160	166	171
3	Sosial	347	343	336
4	Niaga dan Industri	353	350	345
5	Lain-lain	8	8	8
Jumlah		**17.098**	**17.341**	**21.045**

Sumber : PDAM Tirta Multatuli, 2018

d. Pengelolaan Air Limbah

Air limbah adalah air yang telah mengalami penurunan kualitas karena manusia. Air limbah perkotaan biasanya dialirkan di saluran air kombinasi atau saluran sanitasi dan diolah di fasilitas pengolahan air limbah atau *septictank*. Sumber air limbah dapat berasal dari rumah tangga, kegiatan industri, perkantoran, rumah sakit, dan lain sebagainya. Air limbah sebelum dilepas ke pembuangan akhir harus menjalani pengolahan terlebih dahulu. Metode pengolahan air limbah yang berasal dari rumah tangga dapat dilakukan dengan menggunakan bak penampung yang bersekat-sekat sebagai saringan limbah yang akan dibuang, maupun instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

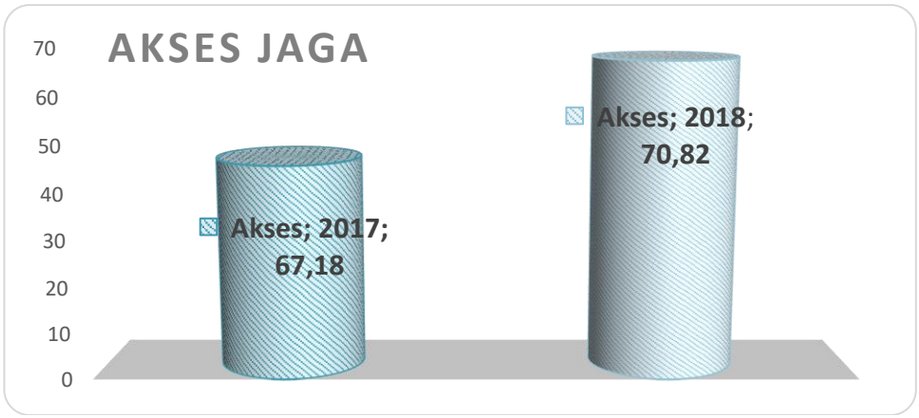
Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kegiatan yang telah memiliki IPAL dapat dilihat pada tabel 2.50 serta akses jamban keluarga (jaga) berdasarkan jumlah jiwa pada tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat pada grafik 2.48.

Tabel 2.42
Jenis Kegiatan Yang Memiliki IPAL di Kabupaten Lebak

No	Kegiatan	Jumlah IPAL
1	Rumah Sakit	4
2	Kegiatan Industri	3

Sumber : BLH, 2017

Grafik 2.34
Akses Jaga Berdasarkan Jumlah Jiwa



Sumber : Dinas Kesehatan, 2018

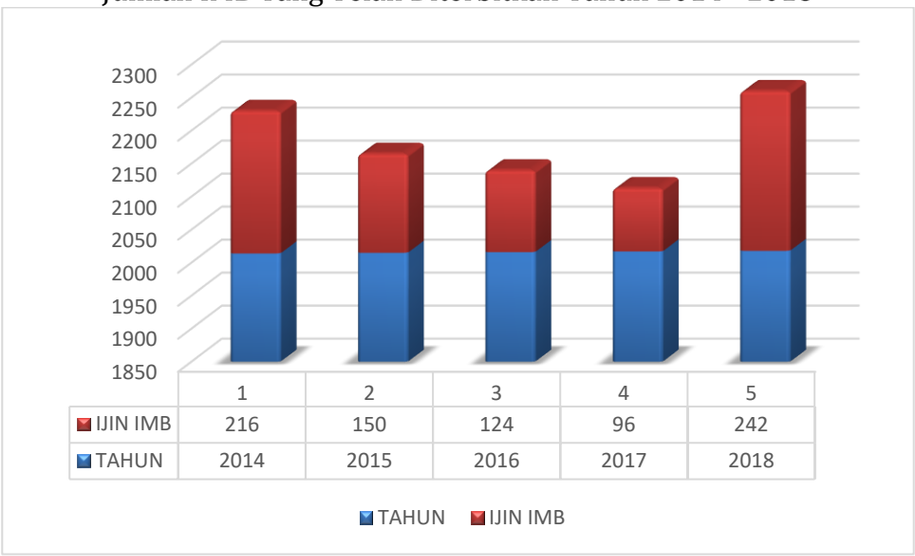
e. Pengelolaan Drainase

Banjir merupakan kata yang sangat popular di Indonesia, khususnya pada musim hujan, mengingat hampir semua kota di Indonesia mengalami bencana banjir. Drainase tidak hanya berfungsi untuk membebaskan daerah khususnya di perkotaan dari serangan banjir, tetapi juga bertugas mengatasi pencemaran air tanah. Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia. Saluran drainase permukaan biasanya berupa parit, sementara untuk bawah tanah disebut gorong-gorong. Drainase juga berperan penting untuk mengatur suplai air demi pencegahan banjir.

f. Bangunan Gedung

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Izin mendirikan bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Jumlah IMB yang telah terbit dapat dilihat pada grafik sebagai berikut.

Grafik 2.35
Jumlah IMB Yang Telah Diterbitkan Tahun 2014 - 2018



Sumber : DPMPTSP, 2018

g. Penataan Ruang

Penataan ruang adalah suatu proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. permasalahan penataan ruang saat ini adalah meningkatnya alih fungsi lahan, kurangnya ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah, belum optimalnya penjabaran rencana tata ruang dalam Rencana Detail Tata Ruang, masih rendahnya pengendalian pemanfaatan ruang.

4) Perumahan dan Kawasan Permukiman

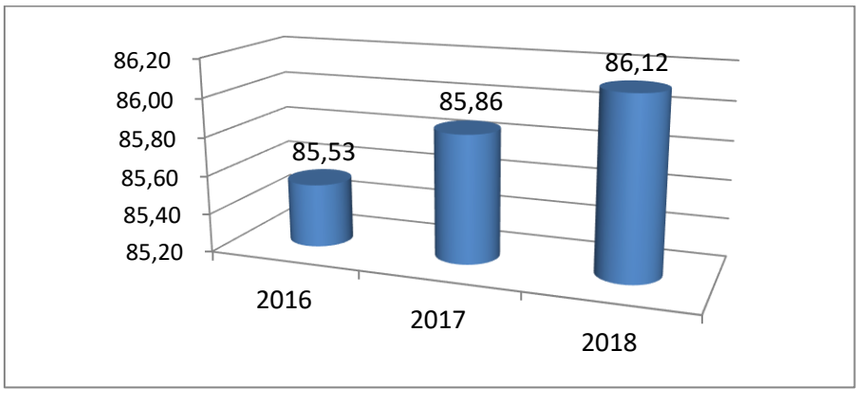
Penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau dengan kondisi yang sehat.

a. Perumahan

Perumahan merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Pembangunan perumahan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak huni dalam lingkungan yang sehat dan aman terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah tangga miskin di Kabupaten Lebak sebanyak 111.080 Rumah Tangga. Tingginya tingkat kemiskinan berkaitan erat dengan ketidakmampuan masyarakat untuk memiliki rumah layak huni serta banyak satu rumah ditempati oleh lebih dari satu kepala keluarga. Pada tahun 2018, jumlah rumah di Kabupaten Lebak sebanyak 341.603 rumah, terdiri dari rumah layak huni 294.177 rumah dan rumah tidak layak huni

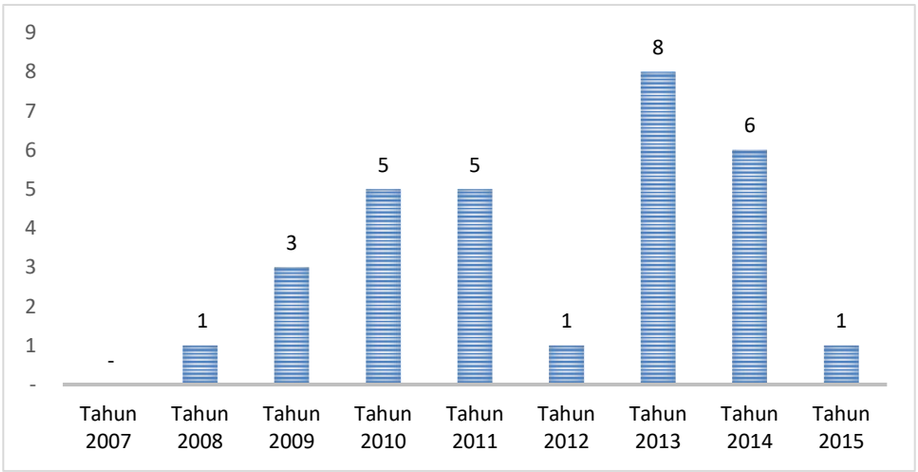
sebanyak 47.426 rumah. Persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni disajikan dalam grafik 2.37.

Grafik 2.36
Persentase Rumah Layak Huni



Adapun dalam hal perizinan perumahan, berikut dapat disajikan pada grafik 2.38 mengenai Jumlah Izin Perumahan Per Tahun.

Grafik 2.37
Jumlah Izin Perumahan Per Tahun 2007-2015



b. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

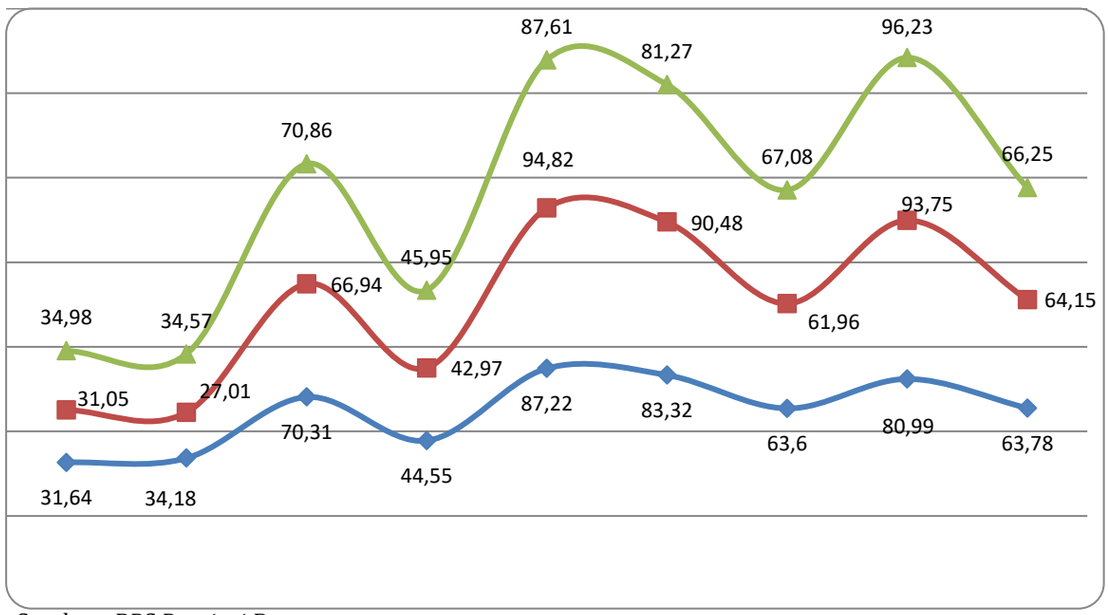
Masalah kawasan permukiman yang dihadapi adalah tingginya permukiman kumuh di kawasan permukiman perkotaan. Saat ini luas perumahan kumuh dan permukiman kumuh perkotaan di Kabupaten Lebak seluas 149,99 Ha.

c. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Sanitasi

Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, yaitu fasilitas air bersih, air limbah domestik, drainase dan persampahan. Rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi layak memiliki capaian paling rendah di Provinsi Banten. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada grafik 2.39.

Grafik 2.38
Perbandingan Persentase Rumah tangga yang Memiliki Akses
Terhadap Fasilitas Sanitasi Layak Huni
Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten



Sumber : BPS Provinsi Banten

5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pelayanan terhadap penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat dilaksanakan pemerintah bersama masyarakat melalui penyediaan aparat polisi pamong praja, linmas dan pos siskamling. Jumlah petugas keamanan dan ketertiban umum pada Tahun 2017 adalah sebanyak 6.580 orang, terdiri dari aparat Pamong Praja sebanyak 119 orang, aparat Perlindungan Masyarakat sebanyak 12 orang, petugas patroli Satpol PP sebanyak 90 orang dan anggota petugas perlindungan masyarakat sebanyak 6.359 orang, dan pada Tahun 2018 menjadi sebanyak 5.607 orang serta jumlah Pos Kamling sebanyak 5.658 unit. jumlah tersebut didukung oleh sarana keamanan dan ketertiban umum sebanyak 4.577 sarana yang tersedia yaitu pos keamanan sebanyak 2 unit dan Pos Kamling sebanyak 4.577 unit dengan Jumlah kendaraan operasional pendukung

pelayanan sebanyak 24 unit dengan rincian kendaraan operasional roda 2 sebanyak 14 unti dan kendaraan operasional roda empat sebanyak 10 unit.

Penyelenggaraan pembangunan Bidang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat selama periode 2019-2024 akan difokuskan pada terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan masing-masing melalui peningkatan mutu pelayanan dalam ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran, meningkatkan koordinasi bagi pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat, pemantapan koordinasi dan kerukunan antar berbagai kelompok masyarakat serta peningkatan kualitas penanggulangan bencana. Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) oleh masyarakat pada tahun 2017 tercatat sebanyak 36 kasus, 12 kasus pada tahun 2017 dengan rata-rata persentase penurunan pelanggaran Perda ± 3% per tahunnya. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan perda masih harus terus diupayakan pemahaman dan sosialisasi terhadap perda K3.

Capaian kinerja Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat selama periode 2014-2019 adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan jumlah anggota perlindungan masyarakat (Linmas);
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat mentaati peraturan daerah;
3. Terkendalinya dan terdeteksinya secara dini gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat;
4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain, Optimalisasi Tim gabungan penanganan gangguan Kamtibmas.

Terdapatnya informasi/data obyektif mengenai prediksi gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat pada akhir 2008, serta langkah-langkah penanggulangannya.

Selama tahun 2011, penyakit masyarakat (Pekat) yang paling menonjol adalah wanita rawan sosial ekonomi yang mencapai 39.825 kasus, diikuti eks napi sebanyak 1.021 kasus, anak jalanan sebanyak 96 kasus dan eks narkoba sebanyak 592 kasus. Penyalahgunaan narkoba, terus mengalami kenaikan dari 122 kasus eks narkoba pada tahun 2007 menjadi 592 kasus pada tahun 2011. Hal ini merupakan ancaman laten yang memerlukan penanganan berkesinambungan serta terintegrasikan antara aparat ketentraman daerah, yang bekerja sama dengan perangkat satuan polisi pamong praja, aparat perlindungan masyarakat (LINMAS) serta lingkungan keluarga masing-masing.

Tindak pidana kriminal yang paling dominan pada kurun waktu 2014-2018 adalah pencurian dengan pemberatan, diikuti oleh pencurian kendaraan bermotor serta penipuan. Perkembangan tindak pidana kriminal dapat dilihat pada tabel 2.71.

Tabel 2.43
Perkembangan Angka Kriminalitas Paling Tinggi
di Kabupaten Lebak Tahun 2014-2018

No	Kasus	Kasus 2014			Kasus 2015			Kasus 2016			Kasus 2017			Kasus 2018		
		Kejadian	Tertangani	Angka Kriminalitas yang Tertangani	Kejadian	Tertangani	Angka Kriminalitas yang Tertangani	Kejadian	Tertangani	Angka Kriminalitas yang Tertangani	Kejadian	Tertangani	Angka Kriminalitas yang Tertangani	Kejadian	Tertangani	Angka Kriminalitas yang Tertangani
1.	Pencurian dengan Pemberatan	169	71	0,42	176	57	0,32	131	48	0,36	100	60	0,6	17	12	0,70
2.	Pencurian Ranmor	124	11	0,08	122	18	0,15	138	32	0,23	164	59	0,36	150	40	0,27
3.	Penadahan	10	10	1	13	13	1	11	12	1,10	10	11	1,1	9	13	1,44
4.	Penipuan	93	63	0,68	74	34	0,46	62	55	0.88	49	60	1,22	27	22	0,81
5.	UU No. 23/2002 ttg Perlindungan Anak	18	18	1	17	17	1	25	22	0,88	13	16	1,23	28	28	1

Sumber : Kepolisian Resor Lebak, 2019

Berdasarkan data Kepolisian Resor Lebak, jumlah kejadian tindak pidana kriminal berjumlah 414 kejadian pada tahun 2014, yang tertangani sebanyak 119 kasus sehingga angka kriminalitas yang tertangani sebesar 3,18%. Pada tahun 2015 berjumlah 402 kejadian menurun dibandingkan tahun 2014, yang tertangani sebanyak 139 kasus sehingga angka kriminalitas yang tertangani sebesar 2,93%. Pada tahun 2016 berjumlah 367 kasus kejadian menurun dibandingkan tahun 2015, yang tertangani sebanyak 169 kasus sehingga angka kriminalitas yang tertangani sebesar 3,45%. Sedangkan pada tahun 2017 berjumlah 336 kasus kejadian mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016, yang tertangani sebanyak 206 kasus sehingga angka kriminalitas yang ditangani sebesar 4,51%. Dan pada tahun 2018 berjumlah 231 kasus kejadian mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017, yang tertangani sebanyak 115 kasus sehingga angka kriminalitas yang ditangani sebesar 4,22%.

Kondisi ini tidak lepas dari kondisi perekonomian masyarakat yang mengalami fluktuasi sehingga menimbulkan peningkatan pengangguran, yang mendorong tumbuhnya tindak pidana. Walaupun demikian secara umum penanganan tindak pidana kriminalitas masih dalam konstelasi terkendali oleh aparat penegak hukum kepolisian daerah dibantu oleh masyarakat.

Dalam rangka menciptakan dan memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan, fungsi pengawasan dan mekanisme kontrol dilaksanakan oleh lembaga penegak perda terutama Satuan Polisi Pamong Praja yang disiagakan di kabupaten dan kecamatan. Aparat Satuan Polisi Pamong Praja hingga akhir tahun 2014 berjumlah 68 orang, sebagian besar bertugas di kabupaten. Jumlah tersebut dirasakan masih kurang mengingat kompleksnya tugas dan fungsi yang diemban.

6) Sosial

Perbaikan dan peningkatan kesejahteraan sosial atau masyarakat pada dasarnya merupakan tujuan dan orientasi utama pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang. Keberhasilan pembangunan diberbagai bidang tidak hanya diukur berdasarkan parameter sektoral semata, melainkan pada akhirnya akan diukur berdasarkan dampak atau pengaruhnya terhadap upaya mendorong peningkatan kesejahteraan sosial/masyarakat. Hal tersebut tidak lepas dari adanya saling keterkaitan yang erat antar berbagai bidang pembangunan yang ujungnya akan bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan pembangnan di bidang sosial adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar.

Angka penyandang masalah kesejahteraan sosial mencerminkan tingkat kesejahteraan penduduk, Banyaknya keluarga penyandang kesejahteraan sosial sampai dengan tahun 2013 tersaji pada tabel 2.55.

Tabel 2.44
Jumlah Penyandang Kesejahteraan Sosial
di Kabupaten Lebak Tahun 2014-2018

NO	JENIS PMKS	JUMLAH / TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Balita Terlantar	311	261	145	105	116
2	Anak Terlantar	1.289	1.524	624	890	763
3	Anak Jalanan	47	84	84	84	72
4	Anak Korban Tindak Kekerasan	0	0	0	4	-
5	Wanita Korban Tindak Kekerasan	683	777	641	276	400
6	Wanita Tuna Susila (WTS)	24	26	9	25	13
7	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	8.659	7.870	7.236	7.215	7.200
8	Lanjut Usia Terlantar	10.422	9.262	18.112	18.478	13.925
9	Lansia Korban Tindak Kekerasan	-	-	-	-	-
10	Anak Cacat Usia 5-21 TH	1.751	1.439	1.266	1.197	1.126
11	Penyandang Cacat	5.729	5.910	5.580	5.440	5.580
12	Penyandang Cacat Eks. Kusta	-	-	-	-	-
13	Eks. Napi	223	231	152	141	118
14	Eks. Korban NAFZA	45	45	34	23	27
15	Eks. HIV/AIDS	5	5	5	5	23
16	Penyakit HIV/AIDS	-	-	-	-	-
17	Waria	2	7	4	4	3
18	Pengemis	73	53	34	45	34
19	Pemulung	243	236	128	117	112
20	Gelandangan	36	25	23	14	14
21	Korban Bencana Alam	1.922	1.773	2.003	4.261	1.213
22	Korban Bencana Sosial	93	42	56	424	45
23	Penduduk KAT	3.801	5.314	5.239	5.318	4.332
24	Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Alam	-	-	-	-	-
25	Keluarga Fakir Miskin	141.969	141.187	133.946	124.008	121.455
26	Tinggal di Rumah Tidak Layak Huni	-	-	-	-	-
27	Keluarga Rentan Sosial Ekonomi	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Sosial Kab. Lebak, 2018

Selain disebabkan oleh faktor ekonomi, penduduk Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial juga dapat disebabkan oleh faktor geografis, PMKS disebabkan oleh faktor geografis ini terdiri dari masyarakat yang tinggal diwilayah rawan bencana alam dan komunitas Adat terpencil (KAT).

Sementara itu, pemerintah dalam upaya penanganan PMKS disamping memberikan bantuan-bantuan dan pemberdayaan sosial juga sinergis serta menggalakkan dan pemberdayaan terhadap Lembaga-lembaga Sosial juga Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) lainnya, sampai dengan tahun 2013 PSKS sebagaimana tabel 2.56 berikut.

Tabel 2.45
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Lebak Tahun 2014-2018

NO	JENIS PMKS	JUMLAH / TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	2008	1.725	1.725	1.725	1.725
2	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	28	28	28	28	28
3	Organisasi Sosial	224	165	191	109	74
4	Karang Taruna	431	345	345	345	345
5	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	17	9	11	13	2
6	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	88	23	23	34	43
7	Dunia Usaha/BUMN	120	92	79	80	30

Sumber : Dinas Sosial Kab. Lebak, 2018

Organisasi kesosialan tersebut dapat menjadi pendorong perbaikan dan upaya-upaya penaggulangan masalah social yang ada di Kabupaten Lebak.

2.3.1.2 Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar

1) Ketenagakerjaan

Jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) atau penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Lebak selama kurun waktu 2017-2018, cenderung menunjukkan angka yang berfluktuatif. Berdasarkan data Sakernas, Kabupaten Lebak pada tahun 2018 mencapai 51.626 orang (Agustus 2018). Untuk lebih jelas, gambaran jumlah penduduk usia kerja 15 tahun ke atas berdasarkan kegiatan tersaji pada tabel 2.57.

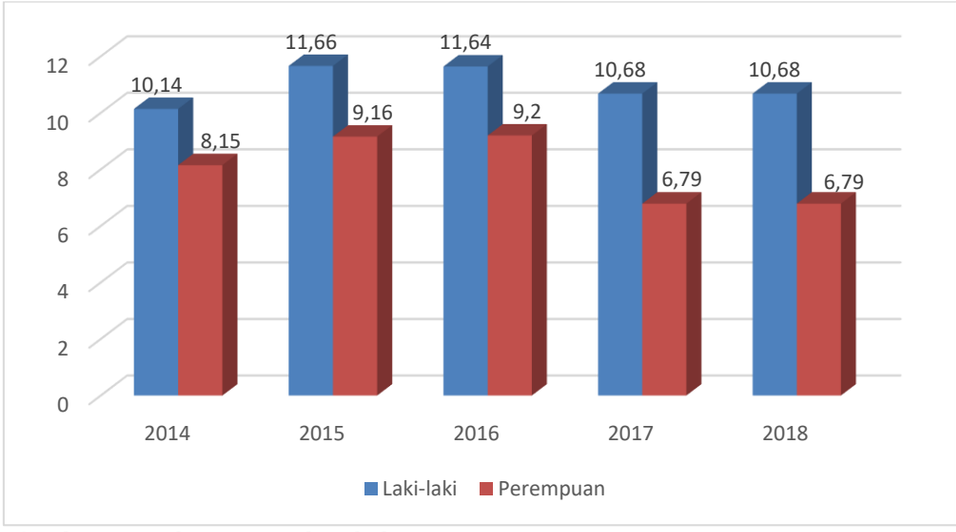
Tabel 2.46
Jumlah Penduduk Usia Kerja 15 Tahun Ke Atas Berdasarkan Jenis Kegiatan
di Kabupaten Lebak Tahun 2017-2018

No.	Uraian	Agustus 2017	Agustus 2018
1.	**ANGKATAN KERJA**		
	Bekerja	432.145	529.774
	Pengangguran	42.125	51.626
	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (i)	474.270	581. 370
2.	**BUKAN ANGKATAN KERJA**		
	Sekolah dan Mengurus Rumah Tangga	205.217	265.933
	Lainnya	40.948	43.483
	Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja (ii)	246.165	309.416
	Jumlah Penduduk Usia Kerja (i) + (ii)	720.435	890.786

Sumber : Sakernas Agustus 2017-2018.

Apabila dilihat menurut jenis kelamin, pengangguran laki-laki cenderung lebih banyak dibandingkan pengangguran perempuan. Pada Agustus 2014, TPT masing-masing sebesar 10,14% untuk laki-laki dan 8,15% untuk perempuan. Untuk lebih jelasnya, perkembangan TPT berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada grafik 2.49.

Grafik 2.39
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka
Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Lebak
Periode 2014- 2018



Sumber : Disnakertrans Kab. Lebak 2018

Penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama lebih didominasi oleh sektor pertanian, selain wilayah Kabupaten Lebak yang masih kaya akan lahan pertanian juga pertanian masih merupakan warisan pekerjaan yang

secara turun temurun dilakukan oleh masyarakat. Perkembangan penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat dilihat pada tabel 2.58.

Tabel 2.47

Perkembangan Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama
di Kabupaten Lebak Tahun 2014-2018

Lapangan Pekerjaan Utama	2014		2015		2016		2017		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pertanian	198.703	35,27	181.392	36.27	195 982	35,27	136.949	35,27	248.057	46,83
Industri	33.139	5,58	31.418	6.28	32 685	5,88	24.680	5,88	45.098	8,51
Perdagangan	123.480	21,92	111.615	22.32	121 789	21,92	121.789	21,92	91.173	17,21
Jasa-jasa	76.860	13,64	70.230	14.04	75 808	13,64	75.808	13,64	66.175	12,49
Lainnya	131.258	23,30	105.520	21.069	129 461	23,30	72.919	23,30	79.241	14,96
Jumlah	563.440	100,00	500.175	100	555 725	100	432.145	100,00	248.057	46,83

Sumber : BPS Kab. Lebak

Dari tabel 2.50 dapat dilihat bahwa sudah terjadi pergeseran lapangan pekerjaan utama. Meskipun demikian, sektor pertanian masih tetap menjadi lapangan pekerjaan utama di Kabupaten Lebak. Pada tahun 2015 sektor perdagangan menjadi sektor kedua setelah sektor pertanian. Begitu pula pada tahun 2016, 2017 dan 2018 sektor industri dan jasa sudah mulai dilirik oleh penduduk usia kerja.

Selain lapangan pekerjaan utama, Penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama pada tahun 2017 sebagian besar penduduk bekerja sebagai Buruh / Karyawan yaitu 24.1% diikuti status berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga. Hal ini sesuai dengan tradisi disebagian masyarakat Kabupaten Lebak dimana salah satu sektor yaitu pertanian apabila suami hendak pergi ke sawah/kebun maka istri/anak/anggota keluarga lainnya ikut membantu terutama menjelang dan pada saat musim panen tiba. Perkembangan penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama dapat dilihat pada tabel 2.59

Tabel 2.48
Persentase Perkembangan Jumlah Penduduk yang Bekerja
Menurut Status Pekerjaan Utama
Tahun 2013-2017 (%)

Status Lapangan Pekerjaan	2013	2014	2015	2016	2017
Berusaha Sendiri	15,31	15,09	14.89	15,09	16,9
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap / Pekerja Keluarga	24,12	23,64	3.88	4,08	2,6
Berusaha Dibantu Buruh Tetap	4,44	4,68	19.84	19,45	20,2
Buruh/Karyawan	21,27	23,28	18.88	18,49	24,1
Pekerja Bebas	31,01	29,21	26.58	26,78	21,37
Pekerja Tidak Dibayar	3,86	4,1	15.94	16,10	14,82

Sumber : BPS Kab. Lebak

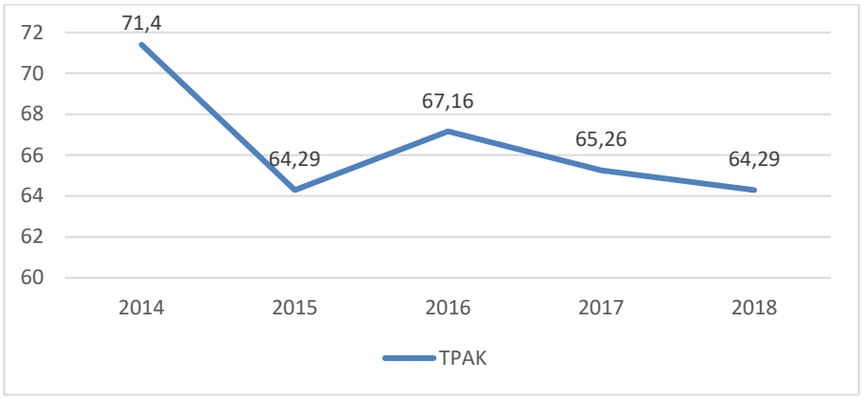
Jumlah angkatan kerja yang meningkat seringkali tidak diikuti dengan jumlah tenaga yang terserap. Hal ini mengidentifkaskan bahwa kesempatan kerja yang terbatas serta kualifikasi angkatan kerja yang tidak sesuai serta diduga karena kurang lengkapnya informasi yang ada di pasar kerja baik dari sisi penawaran maupun permintaan, maka penyerapan tenaga kerja menjadi tidak optimal.

Tabel 2.49
Perkembangan Pencari Kerja yang Ditempatkan
di Kabupaten Lebak Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Sisa Pencari Kerja Terdaftar s/d	12.474	14.458	12.295	12.318	14.526
Jumlah Pencari Kerja yang Mendaftar	3.269	9.213	9.128	7.240	6.941
Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan	764	729	Null	573	1.082
Persentase	23,37	23,37	Null	7,91	15,59

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2018

Grafik 2.40
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(TPAK)
Kabupaten Lebak Periode Agustus 2014-Agustus 2018



Sumber : Disnaker Trans 2018

Pengangguran atau ketiadaan pekerjaan serta standar upah yang rendah merupakan salah satu akar kemiskinan. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami trend penurunan, angka pengangguran terbuka masih dinilai cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa potensi wilayah yang tersedia ternyata belum mampu memberi peluang kerja bagi penduduk usia kerja.

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dari aspek ekonomi dan kesejahteraan tenaga kerja. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Disnakersos membentuk Dewan pengupahan Daerah yang mempunyai tugas membahas dan menetapkan UMK (Upah Minimum Kabupaten). Perhatian pemerintah dalam menetapkan UMK ditunjuk untuk memberikan rekomendasi (ambang batas) kepada pemilik usaha/perusahaan mengenai besaran UMK tahun berikutnya.

Untuk Upah minimum kabupaten (UMK) Lebak Perkembangannya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tersaji pada tabel 2.61.

Tabel 2.50
Jumlah Upah Minimum Kabupaten Lebak

Tahun	Jumlah UMK	Kenaikan (%)
2015	1.728.000	-
2016	1.965.000	14%
2017	2.127.112	7,63%
2018	2.312.384	9%
2019	2.498.068	8,03%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Lebak, 2018

Disamping penetapan UMK, sebagai upaya untuk memberikan perlindungan dari aspek ekonomi dan kesejahteraan bagi tenaga kerja, pemerintah juga mewajibkan dilaksanakannya program BPJS Ketenagakerjaan pada setiap perusahaan dan juga tenaga kerja sesuai dengan amanat undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial tenaga Kerja dan Permenaker no 1 Tahun 2016 . Hal ini terus di galakan melalui jejaring kesadaran menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan . Sampai dengan tahun 2018 mengalami pasang surut karena kurangnya Sosialisasi dan pemahaman tentang BPJS Ketenagakerjaan, namun tingkat kepesertaan terus mengalami peningkatan sampai dengan saat ini terdapat 269 Perusahaan yang mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dengan jumlah tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta aktif sejumlah 9047 Pekerja, *(Dapok Disnaker 2018)*

Terkait dengan upaya perlindungan tenaga kerja adalah Serikat Pekerja (SP)/Serikat buruh (SB). Menurut definisinya SP/SB adalah organisasi yang di bentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, menyuarakan, dan membela hak-hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

Tabel 2.51
Jumlah Serikat Pekerja (SP)/ Seriakat Buruh (SB)
di Kabupaten Lebak

No	Nama Serikat Pekerja	Jumlah Federasi	Jumlah Anggota	Ket.
1	Serikat Pekerja (SPSI)	9	778	
2	Serikat Buruh (SBSI)	2	850	
3	Persatuan Serikat Pekerja SPN	6	585	
4	Ikatan Keluarga Karyawan Misi	1	186	
5	Konfederasi SPSI	3	1.195	
Jumlah		**21**	**3.594**	

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Lebak, 2018

Sejak di berlakukan Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, maka sejak saat itu penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak lagi di tangani oleh panitia perselisihan Perburuhan Daerah (P4D).

Berdasarkan Undang-undang tersebut penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan terlebih dahulu konsfirasi perundangan bipartit. Jika perudangan tidak mencapai kesepakatan maka perselisihan

dapat diupayakan melalui mediasi arbitrase. Dan jika perselisihan belum juga dapat diselesaikan maka pada tahap akhir perselisihan dapat diajukan pada Pengadilan hubungan Industrial (PHI). Tabel 2.63 berikut menyajikan jumlah kasus perselisihan industrial dan PHK .

Tabel 2.52
Kasus Perselisihan Industrial (PHI) dan PHK di Kabupaten Lebak

No	Tahun	Jumlah kasus	Penyelesaian kasus	
			PHI	PHK
1	2014	6		6
2	2015	6		6
3	2016	7		7
4	2017	7		7
5	2018	2	1	1
Jumlah		**28**	**1**	**27**

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Lebak, 2018

Penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama lebih didominasi oleh sektor pertanian, selain wilayah Kabupaten Lebak yang masih kaya akan lahan pertanian juga pertanian masih merupakan warisan pekerjaan yang secara turun temurun dilakukan oleh masyarakat. Perkembangan penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat diliha pada tabel 2.64.

Tabel 2.53
Perkembangan Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Lebak Tahun 2012-2017

Lapangan Pekerjaan Utama	2012		2013		2014		2015		2016		2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pertanian	418.325	13,63	124.281	37,69	198.703	35,27	181.392	36.27	195 982	35,27	248.057	46,83
Industri	790.603	25,77	23.942	7,26	33.139	5,58	31.418	6.28	32 685	5,88	45.098	8,51
Perdagangan	630.363	20,55	35.702	10,83	123.480	21,92	111.615	22.32	121 789	21,92	91.173	17,21
Jasa-jasa	501.831	16,36	36.300	11,01	76.860	13,64	70.230	14.04	75 808	13,64	66.175	12,49
lainnya	726.987	23,69	109.548	33,22	131.258	23,30	105.520	21.069	129 461	23,30	79.241	14,96
Jumlah	3.068.109	100,00	329.773	100,00	563.440	100,00	500.175	100	555 725	100	529.744	100

Sumber : BPS Kab. Lebak

Dari tabel 2.62 dapat dilihat bahwa sudah terjadi pergeseran lapangan pekerjaan utama. Meskipun demikian, sektor pertanian masih tetap menjadi lapangan pekerjaan utama di Kabupaten Lebak. Pada tahun 2017 sektor perdagangan menjadi sektor kedua setelah sektor pertanian. Begitu pula pada tahun 2014, 2015 dan 2016 sektor industri dan jasa sudah mulai dilirik oleh penduduk usia kerja.

Selain lapangan pekerjaan utama, Penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama pada tahun 2014 sebagian besar penduduk bekerja sebagai pekerja bebas yaitu 29.21% diikuti status berusaha dibantu buruh tidak

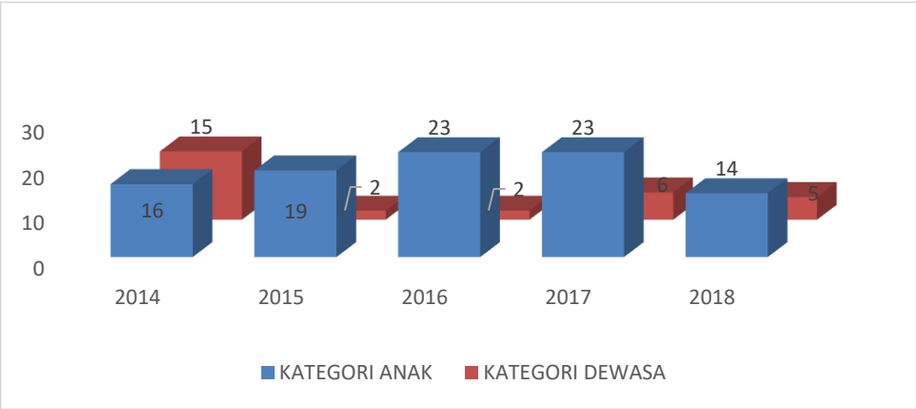
tetap/pekerja keluarga. Hal ini sesuai dengan tradisi disebagian masyarakat Kabupaten Lebak dimana salah satu sektor yaitu pertanian apabila suami hendak pergi ke sawah/kebun maka istri/anak/anggota keluarga lainnya ikut membantu terutama menjelang dan pada saat musim panen tiba. Perkembangan penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama dapat dilihat pada tabel 2.55.

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kasus KDRT belum dapat dipantau secara keseluruhan dikarenakan belum semua korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mau melaporkan kasusnya kepada pihak yang berwenang. Pada tahun 2014, ditemukan 31 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan kategori anak sebanyak 16 kasus dan kategori dewasa 15 kasus, dengan bentuk kekerasan seksual sebanyak 21 kasus. Sedangkan pada tahun 2018 ditemukan 25 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan kategori anak sebanyak 17 kasus dan kategori dewasa 8 kasus, dengan bentuk kekerasan seksual sebanyak 18 kasus. Diharapkan dengan adanya pemberian pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang bersedia melaporkan kasus dan mengalami tindakan kekerasan akan menjadi solusi yang tepat melalui penanganan secara optimal mulai dari pra peradilan sampai dengan pasca peradilan. Perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lebak dari tahun 2014 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada grafik 2.46.

Grafik 2.41
Perkembangan Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Lebak tahun 2014 - 2018



Sumber Data: DP2KBP3A tahun 2018

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Angkatan Kerja Perempuan menggambarkan jumlah penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi terhadap total penduduk perempuan usia kerja. Partisipasi perempuan tahun 2017 berdasarkan data BPS Kabupaten Lebak mengalami penurunan sebesar 6,77% dari 53,61% di Tahun 2016 menjadi 46,84% atau dari 206.941 orang di Tahun 2016 menjadi 187.298 orang di Tahun 2017.

Tabel 2.54
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK-P)
Kabupaten Lebak Tahun 2010-2017

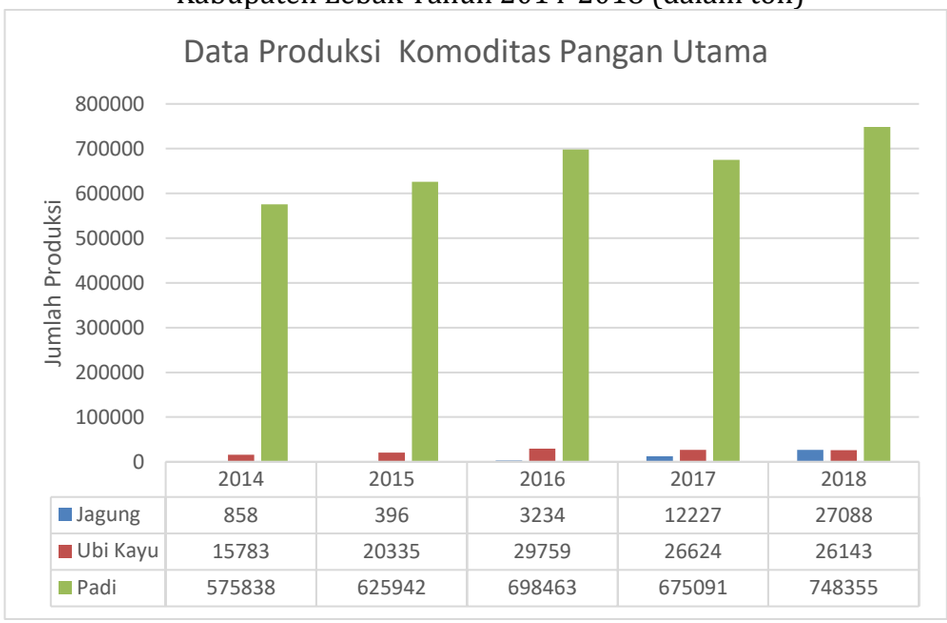
Tahun	Jumlah Penduduk Perempuan Usia Kerja	Jumlah Angkatan Kerja Perempuan	TPAK-P
2010	393.076	168.871	42,96
2011	423.880	181.975	42,93
2012	431.790	176.573	40,89
2013	391.561	194.357	49,64
2014	426.105	228.419	53,61
2015	426.405	186.225	48,09
2016	420.270	206.941	53,61
2017	435.143	187.298	46,84

Sumber : BPS Kabupaten Lebak

3) Ketahanan Pangan

Ditinjau dari perkembangan ketersediaan pangan, Kabupaten Lebak mengalami fluktuasi produksi pangan nabati untuk komoditas utama padi, sedangkan untuk komoditas utama lainnya yaitu jagung dan ubi kayu mulai tahun 2014-2018 mengalami tren fluktuatif namun mengalami peningkatan kembali pada tahun 2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 2.53.

Grafik 2.42
Perkembangan Produksi Komoditas Pangan Utama
Kabupaten Lebak Tahun 2014-2018 (dalam ton)



Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Lebak, 2018

Sebagai daerah penyangga pangan Provinsi Banten, produksi padi merupakan komoditas unggulan yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Meski belum optimal, produksi padi cenderung meningkat walaupun berfluktuasi di tahun 2017 .

Beras merupakan bahan pokok utama masyarakat pada umumnya, rasio ketersediaan produksi beras untuk konsumsi penduduk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.74.

Tabel 2.55
Rasio Ketersediaan Beras Kabupaten Lebak
Tahun 2015-2018

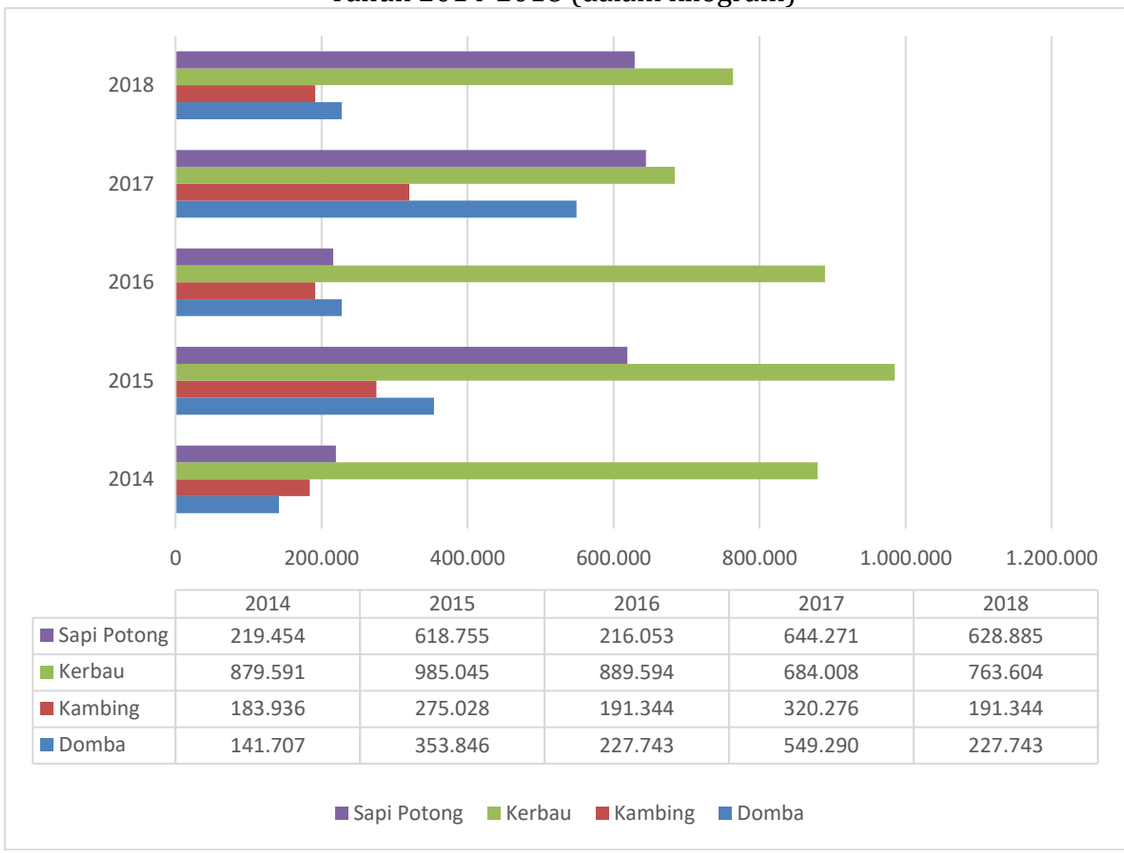
Uraian	2015	2017	2018
Produksi Beras untuk Konsumsi Penduduk (kg)	326.531.000	315.605.000	349.856.000
Jumlah Penduduk (orang)	1.279.412	1.288.103	1.353.796
Rasio Ketersediaan Beras (kg/orang)	255,22	245,02	258,43

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak ,2018

Produksi pangan hewani pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2015 untuk komoditas kerbau, kambing dan domba. Penurunan produksi ini sejalan dengan menurunnya populasi komoditas tersebut. Produksi daging sapi potong mengalami kenaikan selama kurun waktu lima tahun terakhir, hal ini disebabkan tingginya permintaan daging sapi di pasaran sehingga mendongkrang pasar produksi daging sapi potong . Untuk komoditas pangan hewani lainnya yaitu ayam buras dan ayam ras pedaging merupakan pangan hewani yang memiliki produksi paling tinggi.

Gambaran produksi pangan hewani selama kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada grafik 2.54.

Grafik 2.43
Produksi Pangan Hewani di Kabupaten Lebak
Tahun 2014-2018 (dalam kilogram)

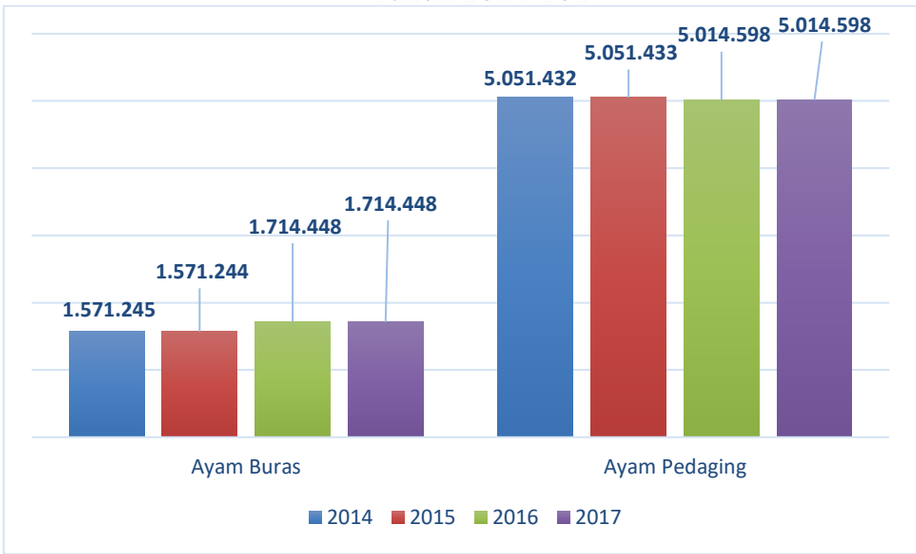


	2014	2015	2016	2017	2018
Sapi Potong	219.454	618.755	216.053	644.271	628.885
Kerbau	879.591	985.045	889.594	684.008	763.604
Kambing	183.936	275.028	191.344	320.276	191.344
Domba	141.707	353.846	227.743	549.290	227.743

Sumber : Dinas Peternakan Kab. Lebak 2018

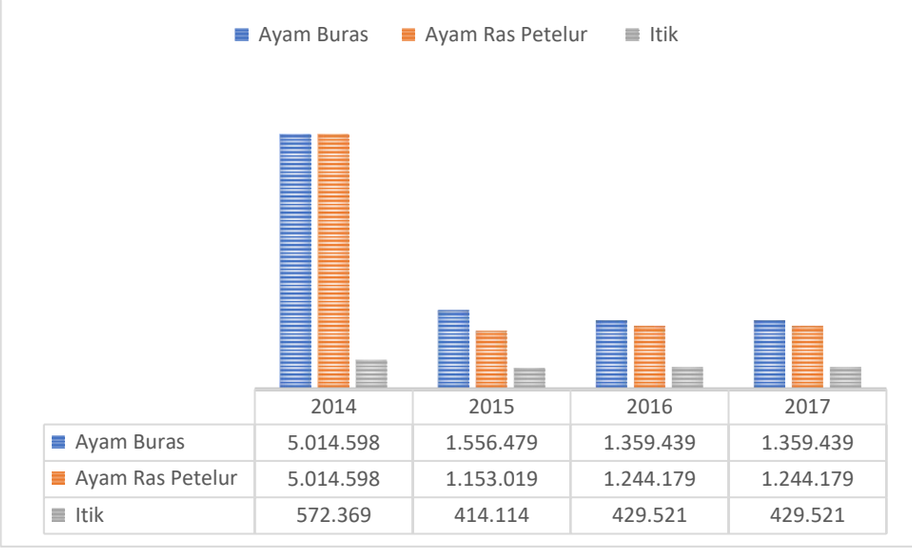
Seiring dengan peningkatan populasi unggas, produksi dari unggas baik berupa daging maupun telur juga cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seperti tergambar pada grafik 2.55.

Grafik 2.44
Produksi Daging Ayam dan Produksi Telur
Tahun 2014-2017



Seiring dengan peningkatan populasi unggas, produksi dari unggas baik berupa daging maupun telur juga cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seperti tergambar pada grafik 2.56.

Grafik 2.45
Produksi Telur Tahun 2014 - 2017



	2014	2015	2016	2017
Ayam Buras	5.014.598	1.556.479	1.359.439	1.359.439
Ayam Ras Petelur	5.014.598	1.153.019	1.244.179	1.244.179
Itik	572.369	414.114	429.521	429.521

Sumber : Dinas Peternakan Kab. Lebak

4) Pertanahan

Keabsahan kepemilikan Tanah merupakan bagian yang penting dalam tata kelola pemerintah. Tanah yang sudah tersertifikasi hak milik pemerintah memberikan jaminan penggunaan/pemanfaatannya. Saat ini paling tidak terdapat 3 permasalahan berkaitan dengan Pertanahan, yaitu :

1. Tidak semua tanah yang saat ini digunakan oleh Pemerintah daerah memiliki dokumen tanah baik berupa sertifikat atau keterangan lainnya.
2. Masih terdapat perbedaan luasan antara permohonan pensertifikatan dengan hasil ukur oleh bpn
3. Perlu dilakukan *update* data dalam aplikasi terkait dengan luasan dan informasi yang berbeda-beda dari BPN tentang kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi dalam program pensertifikatan tanah

Adapun kondisi status tanah tergambar dalam tabel dibawah ini

Tabel 2.56
Status Tanah Milik pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018

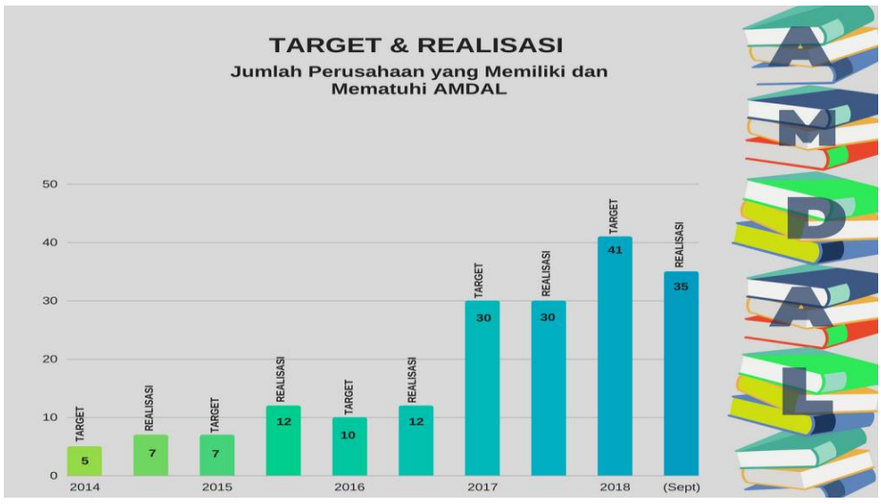
No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Tercatat Dalam Kartu Inventaris Barang	1.538	

2	Sertifikat An. Pemda Lebak	278	
3.	Belum Sertifikat An. Pemda Lebak		
	- Sertifikat Selain An. Pemda Lebak	55	
	- Sertifikat Wakaf	6	
	- Dokumen Lainnya	26	
4.	Tanah dalam Penelusuran	1.173	
5.	Tanah Telah Dipasang Plang	233	
6.	Tanah Yang Sedang Dilakukan Pemanfaatan	2	1. PT. Radja Udang Malingping. Lokasi Di Desa Sukatani, Kecamatan Wanasalam 2. PT XL Axiata Tbk. Lokasi Di Desa Cikotok, Kecamatan Cibeber

5) Lingkungan Hidup

Pembangunan berwawasan lingkungan meliputi aspek pengendalian pencemaran lingkungan yang salah satunya pengendalian terhadap izin lingkungan. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. Adapun target dan realisasi jumlah perusahaan yang memiliki dan mematuhi AMDAL dapat dilihat pada grafik 2.43.

Grafik 2.46
Jumlah Perusahaan Yang Memiliki dan Mematuhi AMDAL

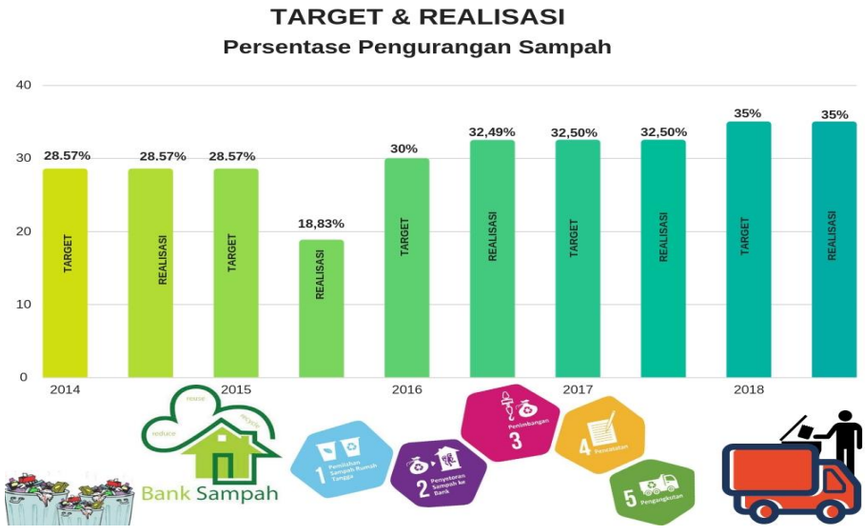


Sumber: DLH Kab. Lebak, 2018

Kegiatan dan/atau usaha tersebut diawasi dengan waktu 6 (enam) bulan sekali selama Kegiatan dan/atau usaha berjalan sesuai dengan Izin Lingkungan yang telah diterbitkan. Pengendalian pencemaran lingkungan diprioritaskan pada pengelolaan sampah dengan cara pengurangan sampah.

Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang, atau pembuangan dari material sampah. Pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir masih menjadi alternatif utama pengelolaan sampah Kabupaten Lebak, TPA yang dimiliki Kabupaten Lebak yaitu TPA Dengung yang terletak di Kecamatan Maja dan TPA Cihara yang terletak di Kecamatan Cihara.

Grafik 2.47
Target dan Realisasi Persentase Pengurangan Sampah
Kabupaten Lebak



Sumber: DLH Kab. Lebak, 2018

Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah timbulan sampah, jenis dan keberagaman karakteristik sampah. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap jenis bahan pokok dan meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang ekonomi juga memberikan kotribusi yang besar terhadap timbulan sampah. Pertumbuhan tersebut dari 5 tahun terakhir yaitu tahun 2015 telah mencapai jumlah penduduk sebesar 1.269.812 Jiwa dengan menghasilkan timbulan sampah 2.857.077 ltr/hari atau 2.857,08 M^3/hari dan di perkirakan tahun 2036 berdasarkan proyeksi penduduk yaitu 1.727.565 Jiwa akan bertambah timbulan sampah menjadi 3.887.021,25 ltr/hari atau 3.887,02 M^3. Jumlah timbulan sampah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.57
Jumlah Timbulan Sampah
Kabupaten Lebak Tahun 2014-2017

No	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Jumlah Timbulan Sampah (M^3)	960.988	1.050.548,40	1.075.502,70	1.030.482,40

Pengendalian lingkungan juga dititkberatkan pada pengawasan tingkat cemaran sungai, udara, dan air tanah. Pemantauan tingkat cemaran sungai, udara dan air tanah ini dilakukan di titik-titik yang telah ditentukan di seluruh Kabupaten Lebak. Tingkat cemaran sungai, udara dan air tanah ini bertujuan untuk mengetahui kualitas dari sungai, udara, dan air tanah yang sesuai dengan baku mutu atau peraturan perundangan yang berlaku. Sejauh ini sampai dengan tahun 2018 tingkat cemaran sungai, udara dan air tanah berada pada tingkat sesuai baku mutu dan cemar ringan. Persentase pemantauan tingkat cemaran air, udara dan air tanah dapat dilihat pada grafik 2.45.

Grafik 2.48
Target dan Realisasi Tingkat Cemaran Sungai, Udara dan Air Tanah
Kabupaten Lebak



Sumber: DLH Kab. Lebak, 2018

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kepemilikan KTP bagi penduduk wajib KTP di Kabupaten Lebak pada tahun 2018 sebanyak 886.975 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.50.

Tabel 2.58
Jumlah Penduduk Kabupaten Lebak Berdasarkan Wajib KTP
Tahun 2018

No	Nama Kecamatan	PENDUDUK WAJIB KTP			%
		Sudah	Belum	Total	
1	MALINGPING	43.997	219	44.216	99,50
2	PANGGARANGAN	25.433	495	25.928	98,09
3	BAYAH	29.503	714	30.217	97,64

No	Nama Kecamatan	PENDUDUK WAJIB KTP			%
		Sudah	Belum	Total	
4	CIPANAS	32.653	990	33.643	97,06
5	MUNCANG	22.947	458	23.405	98,04
6	LEUWIDAMAR	33.908	1.047	34.955	97,00
7	BOJONGMANIK	16.110	397	16.507	97,59
8	GUNUNG KENCANA	24.553	130	24.683	99,47
9	BANJARSARI	42.992	345	43.337	99,20
10	CILELES	35.806	111	35.917	99,69
11	CIMARGA	45.065	127	45.192	99,72
12	SAJIRA	34.692	105	34.797	99,70
13	MAJA	36.850	444	37.294	98,81
14	RANGKASBITUNG	89.084	441	89.525	99,51
15	WARUNGGUNUNG	39.000	420	39.420	98,93
16	CIJAKU	19.923	411	20.334	97,98
17	CIKULUR	35.904	110	36.014	99,69
18	CIBADAK	44.722	206	44.928	99,54
19	CIBEBER	38.913	56	38.969	99,86
20	CILOGRANG	23.160	62	23.222	99,73
21	WANASALAM	35.804	88	35.892	99,75
22	SOBANG	20.602	288	20.890	98,62
23	CURUG BITUNG	22.938	295	23.233	98,73
24	KALANGANYAR	23.697	15	23.712	99,94
25	LEBAKGEDONG	13.490	160	13.650	98,83
26	CIHARA	21.574	279	21.853	98,72
27	CIRINTEN	19.081	574	19.655	97,08
28	CIGEMBLONG	14.574	366	14.940	97,55
Jumlah		886.975	51,144	896.328	**98,96**

Sumber : Dinas Kependudukan & Capil Kab. Lebak (HasilPembersihanPusat)

Berdasarkan tabel 2.51, persentase penduduk wajib ber-KTP di Kabupaten Lebak tahun 2018 sudah mencapai 98,96 % atau 886.975 jiwa sedangkan sisanya sebesar 1,04 % atau sebanyak 9.353 jiwa belum memiliki KTP. Hal ini merupakan suatu tantangan bagi dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya memiliki dokumen kependudukan dan bagaimana lebih mendekatkan pelayanan pembuatan dokumen kependudukan bagi masyarakat.

Sedangkan untuk kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Lebak pada tahun 2018 mencapai 94,99 % atau sebanyak 388.480 KK.

Tabel 2.59
Jumlah Penduduk Kabupaten Lebak
Berdasarkan Kepala Keluarga (KK) Tahun 2018

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Wajib KK			
			Sudah Memiliki KK	Belum Memiliki KK	Total	%
1	Malingping	62.758	19.551	1.007	20.558	95,10
2	Panggarangan	35.253	11.173	909	12.082	92,48
3	BAYAH	42.064	12.621	1.167	13.788	91,54
4	Cipanas	47.224	14.388	957	15.345	93,76
5	Muncang	33.008	9.751	601	10.352	94,19
6	Leuwidamar	49.449	16.052	356	16.408	97,83
7	Bojongmanik	22.689	7.234	401	7.635	94,75
8	Gunung Kencana	34.233	10.453	653	11.106	94,12
9	Banjarsari	59.494	18.318	1.182	19.500	93,94
10	Cileles	49.776	15.247	701	15.948	95,60
11	Cimarga	64.653	19.783	492	20.275	97,57
12	Sajira	49.069	15.564	239	15.803	98,49
13	Maja	52.168	16.205	511	16.716	96,94
14	Rangkasbitung	126.463	39.598	665	40.263	98,35
15	Warunggunung	55.904	17.317	265	17.582	98,49
16	Cijaku	27.805	8.562	597	9.159	93,48
17	Cikulur	51.220	15.850	303	16.153	98,12
18	Cibadak	64.241	19.824	339	20.163	98,32
19	Cibeber	52.353	16.120	2.771	18.891	85,33
20	Cilograng	31.662	9.768	910	10.678	91,48
21	Wanasalam	50.022	15.929	912	16.841	94,58
22	Sobang	28.364	8.883	994	9.877	89,94
23	Curugbitung	32.660	9.943	483	10.426	95,37
24	Kalanganyar	34.336	10.295	122	10.417	98,83

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Wajib KK			
			Sudah Memiliki KK	Belum Memiliki KK	Total	%
25	Lebakgedong	19.371	6.100	443	6.543	93,23
26	Cihara	29.869	9.417	824	10.241	91,95
27	Cirinten	26.604	8.397	643	9.040	92,89
28	Cigemblong	19.258	6.137	1.022	7.159	85,72
Jumlah		1.251.970	388.480	20.469	408.949	94,99

Sumber : Dinas Kependudukan & Capil Kab. Lebak

Berdasarkan hasil pelayanan kependudukan yang telah diberikan kepada Masyarakat Kabupaten Lebak sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018, capaian adminidtrasi pelayanan kependudukan yang diterbitkan antara lain Akta Lahir Umum sebesar 8.120, Akta Lahir Terlambat sebesar 54.081, Akta Perkawinan sebesar 166, Akta Perceraian sebesar 17 dan Akta Kematian sebesar 1.079.

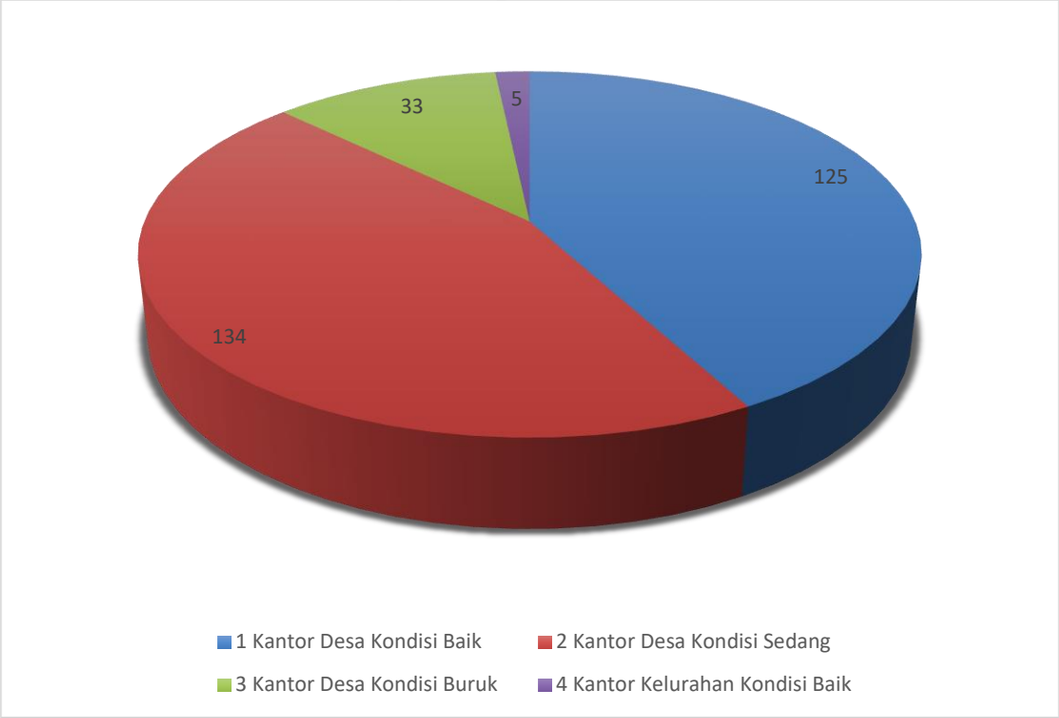
7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Fokus peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa dititikberatkan pada aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui kapasitas pengembangan lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi desa, serta pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.

Bentuk partisipasi masyarakat diantaranya diwujudkan melalui lembaga pemberdayaan masyarakat baik di bidang pemerintahan, ekonomi maupun kesejahteraan keluarga.

Guna mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa, diperlukan penyelenggara urusan pemerintahan desa yaitu Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Oleh karenanya diperlukan sarana dan prasarana pemerintahan desa. Kondisi kantor desa sampai dengan tahun 2018 tergambar pada grafik 2.57.

Grafik 2.49
Kondisi Kantor Desa/Kelurahan
Sampai Dengan Tahun 2018

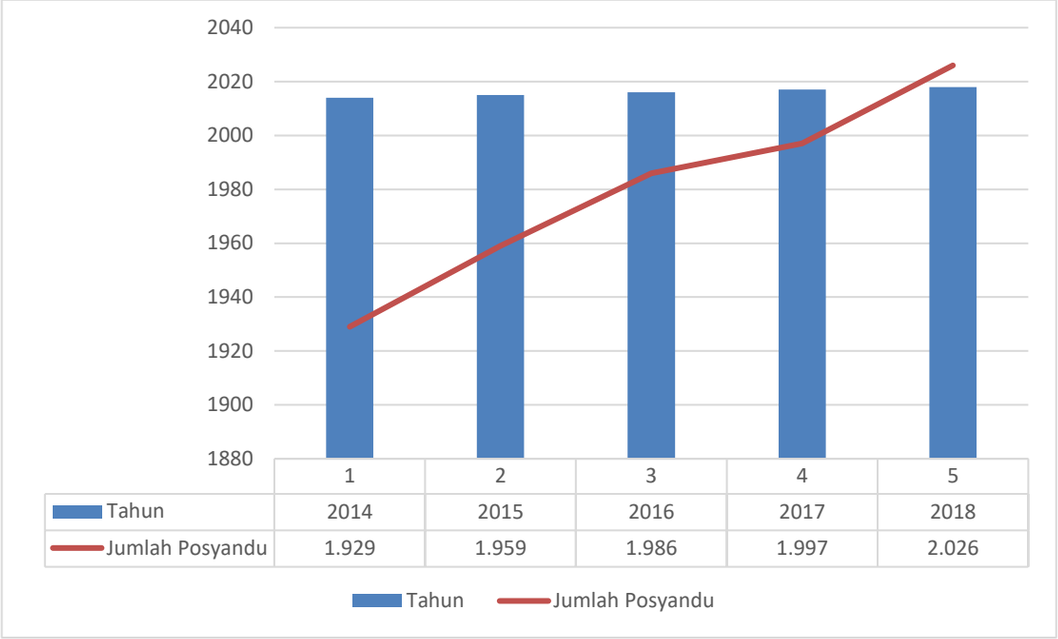


Sumber : SIPD Tahun 2018

Kelembagaan desa merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Sampai dengan tahun 2013, potensi kelembagaan pemberdayaan masyarakat yang sudah terbentuk terdiri dari UPK dengan anggota 81 orang, BKPAD dengan anggota 81 orang, BP UPK dengan anggota 81 orang, TPK dengan anggota 987 orang dan KPMD dengan anggota 897 orang. Sedangkan potensi kelembagaan masyarakat yang sudah dibentuk yaitu, PKK sebanyak 340 lembaga, KT sebanyak 345 lembaga, LPM sebanyak 345 lembaga, RW sebanyak 1.680 orang dan RT sebanyak 5.995 orang.

Posyandu merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan khususnya kesehatan bayi dan balita. Keberadaan posyandu memiliki nilai strategis dalam membangun kualitas manusia semenjak dini. Dalam pelaksanaan kegiatannya, kader posyandu memberikan layanan dan informasi kesehatan ibu dan anak sejak usia dini. Gambaran perkembangan posyandu disajikan pada grafik 2.58.

Grafik 2.50
Jumlah Posyandu di Kabupaten Lebak
Tahun 2004-2018



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Lebak, 2019

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga

Indikator kebehasilan program Keluarga Berencana adalah rata-rata jumlah anak per keluarga serta rata-rata jumlah jiwa dalam setiap keluarga. Semakin sedikit jumlah jiwa dalam keluarga dapat diindikasikan keluarga yang bersangkutan mempunyai kepedulian yang tinggi dalam perencanaan keluarga serta kesehatan reproduksi wanita. Oleh karena itu, program Keluarga Berencana bukan sekedar sebagai upaya pengendalian jumlah penduduk, akan tetapi juga harus dimaknai sebagai sebuah upaya perlindungan kesehatan reproduksi wanita dan menekan angka kematian ibu saat melahirkan.

Berikut adalah data rata-rata jumlah anak per keluarga dan rata-rata jumlah jiwa dalam setiap keluarga.

Tabel 2.60
Rata-rata Jumlah Anak dan Rata-rata Jumlah Jiwa
Per Keluarga Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Jiwa	Jumlah Anak (0-18 Thn)	Jumlah Keluarga	Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga	Rata-rata Jumlah Jiwa Per Keluarga
2014	1.166.098	645.598	341.397	1,81	3,42
2015	1.193.874	27.660	361.416	1,76	3,30
2016	1.205.125	N/A	376.233	N/A	3,20

2017	1.225.917	N/A	400.622	N/A	3,06
2018	1.277.425	N/A	421.359	N/A	3,031

Sumber : DISDUKCAPIL Kab. Lebak, Tahun 2019

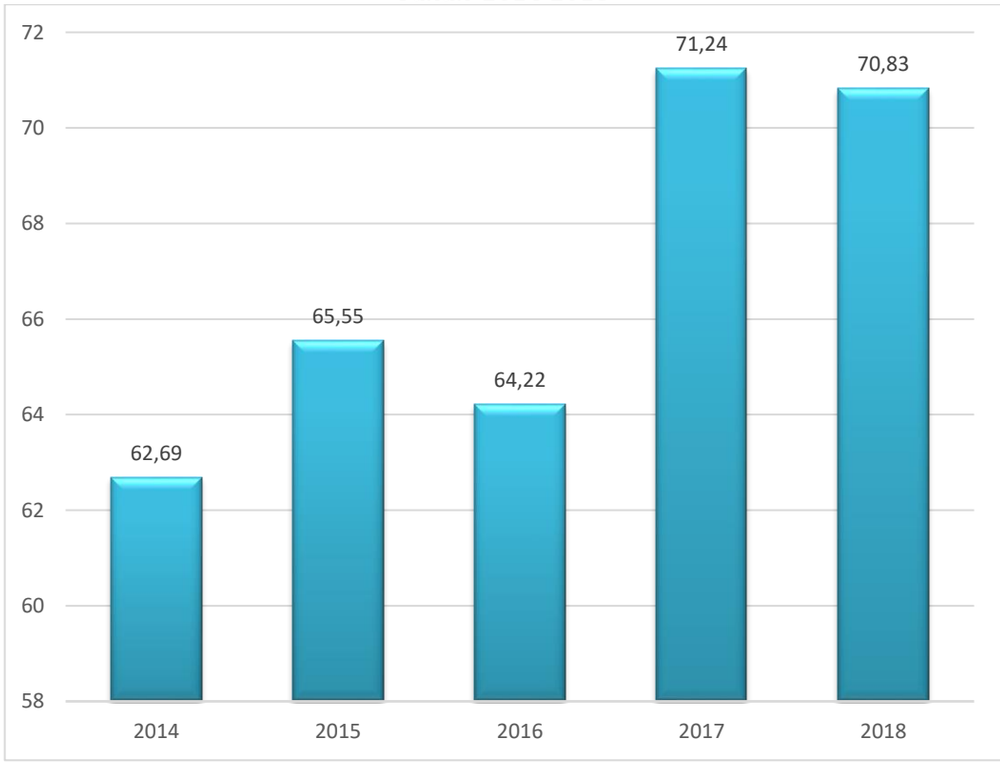
Rasio akseptor KB

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu caranya adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Rasio akseptor KB di Kabupaten Lebak pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 74,03% dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2014, sedangkan pertumbuhan rata-rata rasio aksetor KB selama 6 tahun terakhir sebesar 80,92%. Cakupan sasaran untuk pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif untuk 5 tahun terakhir dari tahun 2014-2018 yang paling tinggi pada tahun 2017 sebesar 71,24% cakupan secara keseluruhan bisa dilihat pada grafik 2.47. Sedangkan cakupan pasangan usia subur yang ingin berKB tidak terpenuhi (unmeet need) 5% bisa dilihat pada grafik 2.48.

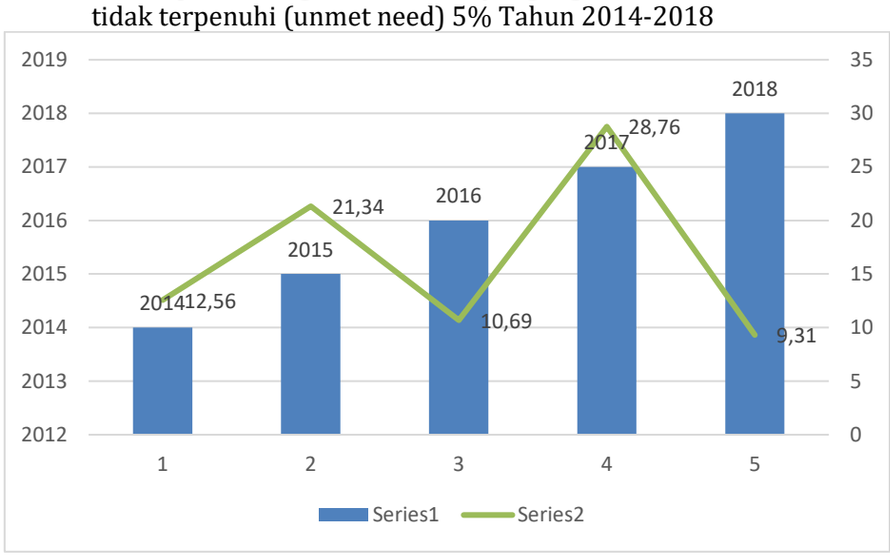
Grafik 2.51

Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (65%) Tahun 2014-2018



Sumber : Capaian RPJMD Tahun 2014-2019

Grafik 2.52
Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin berKB
tidak terpenuhi (unmet need) 5% Tahun 2014-2018



Sumber : Capaian RPJMD Tahun 2014-2019

Keberhasilan gerakan Keluarga Berencana kemudian berkembang menjadi program Keluarga Sejahtera. Keluarga dikategorisasikan kedalam 2 tahapan keluarga seperti terlihat pada tabel 2.54.

Tabel 2.61
Tahapan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Lebak
Tahun 2014-2018

Tahapan Keluarga Sejahtera	2014	2015	2016	2017	2018
Seluruh Tahapan KS	276.312	277.882	281.402	280.344	290.224
Tahapan KPS dan KS I	189.195	161.033	155.089	169.265	175.858
Jumlah KK	465.507	438.915	436.491	449609	466082

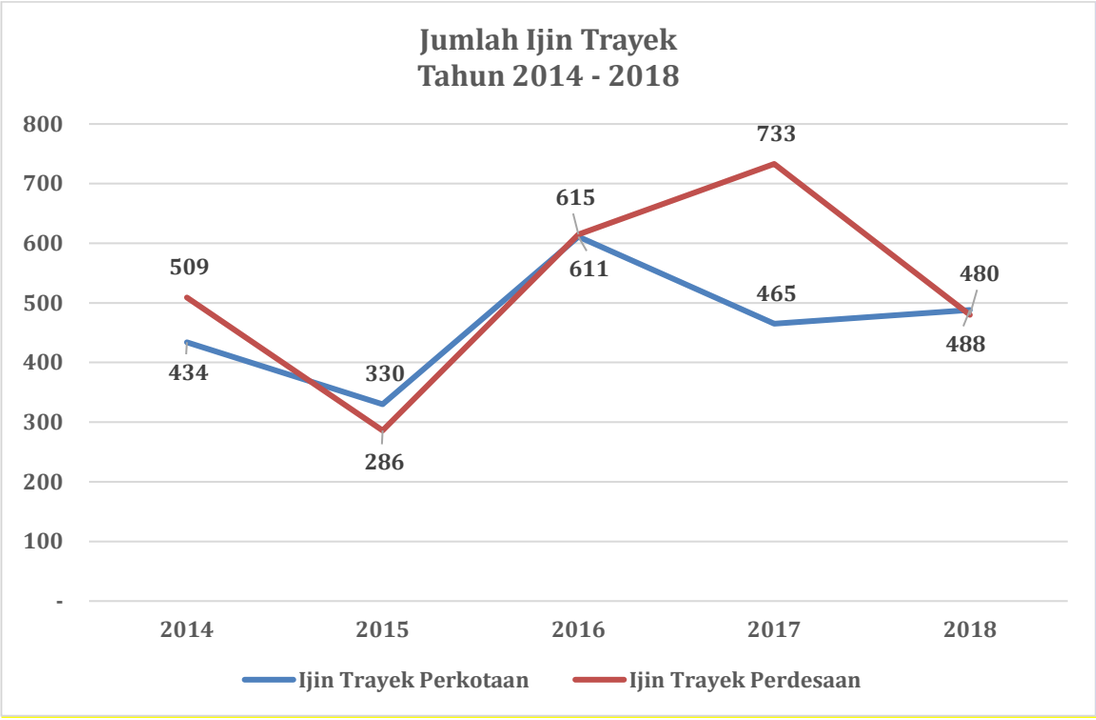
Sumber : DP2KBP3A Tahun 2019

9) Perhubungan

Sektor perhubungan memiliki peranan penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Karenanya cakupan layanan sektor perhubungan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun melalui pembangunan dan pemeliharaan terminal angkutan umum dan pelayanan ijin trayek angkutan umum.

Sejak tahun 2014-2018, jumlah ijin trayek angkutan umum tercatat mengalami fluktuasi. Ijin trayek angkutan perkotaan rata-rata mengalami penurunan sebesar 5,37%, dan angkutan perdesaan 9,07% sehingga rata-rata penurunan ijin trayek angkutan umum sepanjang periode tersebut mencapai 7,22%. Gambaran fluktuasi perijinan trayek angkutan sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilihat pada grafik 2.40.

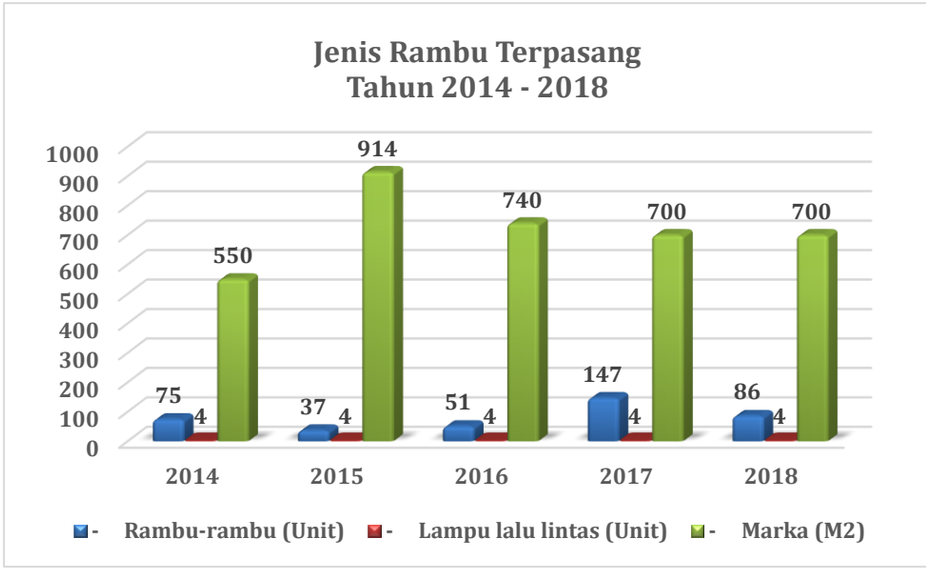
Grafik 2.53
Perkembangan Jumlah
Ijin Trayek Angkutan UmumTahun 2014-2018



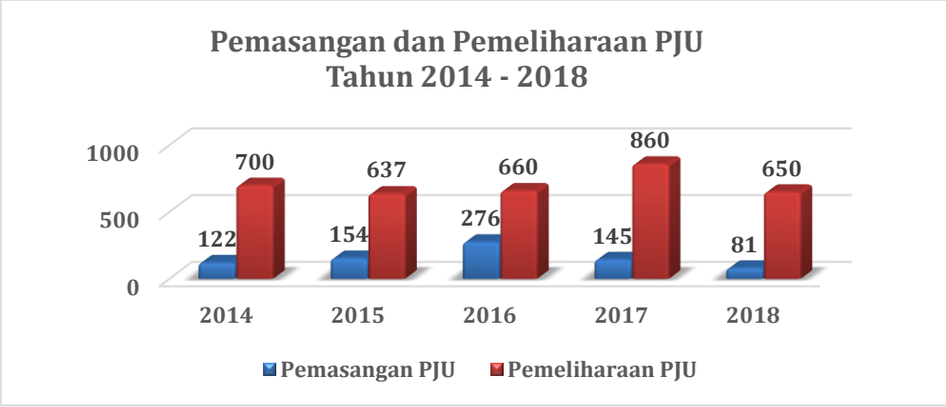
Sumber: Dishub Kab. Lebak, 2018

Dalam upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, sector perhubungan juga memiliki peran yang sangat penting. Adanya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai akan berdampak pada menurunnya angka kecelakaan. Dalam rangka tersebut, dari tahun ke tahun yaitu dari tahun 2014-2018 telah dilakukan kegiatan berupa pemasangan rambu lalu lintas, lampu lalu lintas, marka jalan serta pemasangan dan pemeliharaan PJU sebagaimana dapat di lihat pada grafik.

Grafik 2.54



Grafik 2.55



10) Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika

Di era globalisasi dewasa ini peran bidang komunikasi dan informatika, dalam bentuk kehadiran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sudah menjadi tuntutan kebutuhan baik di lingkungan pemerintahan, swasta maupun masyarakat dan individu yang pada akhirnya akan mewujudkan konsep masyarakat informasi.

Selaras dengan hal tersebut, rencana pembangunan Kabupaten Lebak juga menekankan pentingnya peran TIK dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik dalam rangka mewujudkan misi kelima Pemerintah Kabupaten Lebak yaitu Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan.

Pelaksanaan Otonomi Daerah saat ini telah memberi peluang pada Pemerintah Kabupaten Lebak untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang lebih luas dalam rangka mengurus rumah tangga daerah. Pada saat yang sama masyarakat pun diberi peluang yang lebih besar untuk mengembangkan aspirasi dan prakarsanya dalam rangka pembangunan daerah.

Situasi dan kondisi ini akan memunculkan berbagai isu-isu strategis yang berkaitan dengan pertimbangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus diantisipasi dan diatasi dengan sebaik-baiknya.

Dalam mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, Dinas Komunikasi dan Informatika berkontribusi melalui Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan berbagai kegiatan diantaranya Penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan aplikasi; Penyelenggaraan dan manajemen infrastruktur TIK; Penyelengaraan dan pengelolaan Data Center serta program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan kegiatan Pengelolaan dan penyebarluasan informasi publik; Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik dan Penyelenggaraan Hubungan Komunikasi, Kemitraan dan peningkatan kapasitas SDM.

11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyak koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran.

Jumlah koperasi aktif pada tahun 2017 sebanyak 757 koperasi, meningkat sepanjang kurun waktu 2014 – 2017 . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.65.

Tabel 2.62
Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Lebak
Tahun 2010-2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Koperasi Aktif	689	709	736	757
2.	Jumlah Koperasi	791	811	833	839
3.	Persentase Koperasi Aktif	87,10	87,42	88,36	90,23

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kab. Lebak Tahun 2017

Jumlah UMKM dari tahun 2014 - 2017 mengalami peningkatan walaupun sedikit. Untuk itu diperlukan pengembangan kewirausahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah UMKM. Perkembangan UMKM di Kabupaten Lebak dapat dilihat pada tabel 2.66.

Tabel 2.63
Jumlah UMKM di Kabupaten Lebak Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Mikro	492,05	48.892	48.906	49.489	49.499
2	Kecil	538	785	623	648	825
3	Menengah	17	9	9	12	15
Jumlah		49.760	49.686	49.538	50.149	50339

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, 2018

Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian daerah, berperan besar dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi tingkat pengangguran, menurunkan tingkat kemiskinan,

mendinamisasi sektor riil dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan koperasi dan UMKM diarahkan pada upaya meningkatkan produktivitas dan daya saingnya serta secara sistematis diarahkan pada upaya menumbuhkan usaha baru disektor-sektor yang memiliki produktivitas tinggi, berbasis pengetahuan, teknologi dan sumberdaya lokal.

Tabel 2.64
Data UMKM Per-Kecamatan di Kabupaten Lebak
Jumlah UMKM Berdasarkan Kelas

NO	KECAMATAN	MIKRO	KECIL	MENENGAH	JUMLAH UMKM	JUMLAH TENAGA KERJA
1	CIRINTEN	967	1	-	968	1.648
2	CIKULUR	1.433	6	-	1.439	2.693
3	CILELES	1.162	25	1	1.188	2.263
4	GUNUNG KENCANA	1.34	8	-	1.348	2.366
5	BANJARSARI	2.204	19	1	2.224	4.599
6	CIJAKU	752	2	-	754	1.45
7	CIGEMBLONG	1.202	1	-	1.203	1.578
8	MALINGPING	3.446	56	-	3.502	7.121
9	WANASALAM	1.674	17	1	1.692	3.559
10	CIHARA	1.68	4	-	1.684	2.64
11	PANGGARANGAN	1.557	8	-	1.565	2.566
12	BAYAH	1.844	13	1	1.858	2.043
13	CIBEBER	2.436	6	-	2.442	4.031
14	CILOGRANG	1.755	4	-	1.759	3.076
JUMLAH		**48.599**	**608**	**10**	**49.217**	**89.346**

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak 2017

12) Penanaman Modal

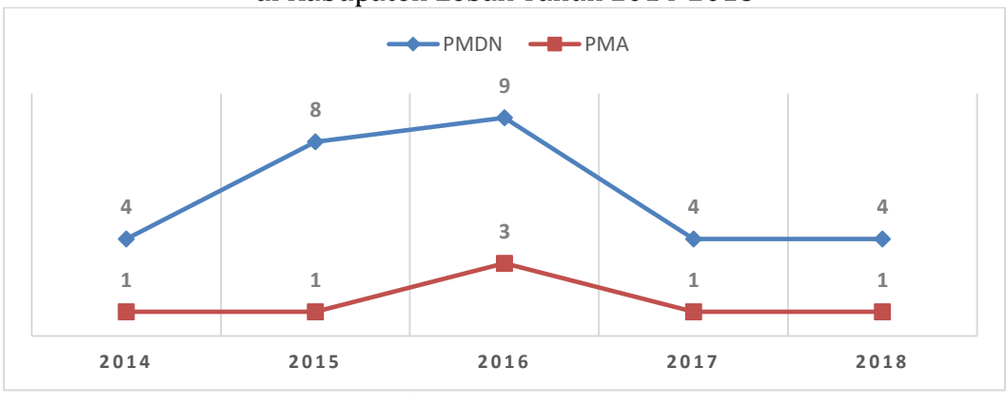
Iklim investasi dari tahun ke tahun terus membaik., Lebak selalu menjadi daerah tujuan investasi, baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDM).

Beberapa langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam upaya mendorong minat dan realisasi investasi antara lain menjaga iklim investasi yang kondusif dalam penanaman modal, melaksanakan penyederhanaan prosedur perijinan, serta pada tahun 2018 ini menintegrasikan fungsi penanaman modal dan pelayanan perijinan dengan adanya Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nilai Investasi secara kumulatif sampai dengan tahun 2018 telah mencapai Rp. 1.197.499.832.650 Realisasi investasi pada tahun 2018

berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terdiri dari 4 (empat) Perusahaan PMA, yaitu PT. Suma Heksa Sinergi, PT. Samudera Banten Jaya, PT. Sinoma Enggineering Ind, dan PT. Cemindo Gemilang. Perusahaan PMDN (skala nasional) terdiri dari 1 (satu) perusahaan, yaitu PT. Situmulya Hydropower. Jumlah investor dan nilai investasi swasta yang berskala nasional terlihat pada grafik 2.52 berikut.

Grafik 2.56
Jumlah Investor dan Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional
di Kabupaten Lebak Tahun 2014-2018

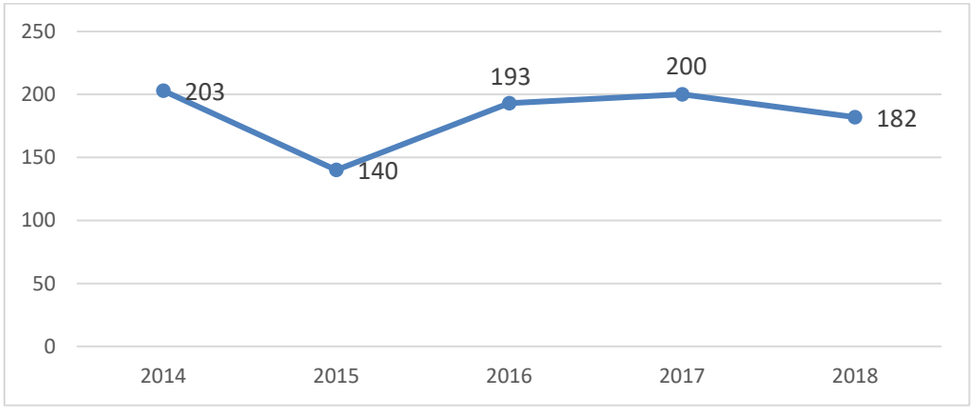


Sumber: DPMPTSP Kabupaten Lebak, 2018

13) Kepemudaan dan Olahraga

Peningkatan bidang kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Lebak secara umum diwujudkan melalui dari 3 (tiga) kegiatan yang selanjutnya dijadikan indikator kinerja pembangunan daerah yaitu (1) Jumlah pemuda yang mendapatkan pembinaan; (2) jumlah penyelenggaraan event olahraga; dan (3) Pembinaan atlet berprestasi.

Grafik 2.57
Jumlah Pemuda yang Mendapatkan Pembinaan

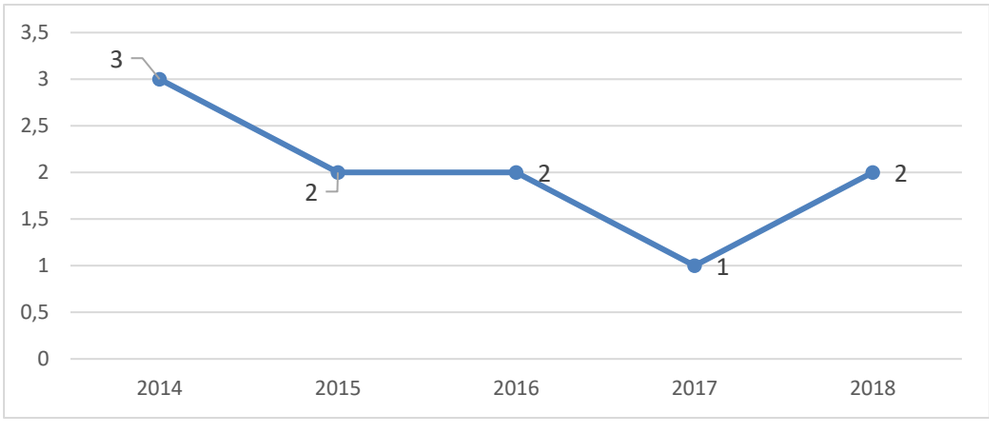


Sumber: Data Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Lebak

Dalam kurun waktu pembangunan jangka menengah Kabupaten Lebak periode 2014-2019 jumlah pemuda yang mendapatkan pembinaan

mengalami kenaikan dan penurunan, Pada tahun 2014 jumlah pemuda yang mendapatkan pembinaan sebanyak 203 pemuda, 2015 sebanyak 140 pemuda, 2016 sebanyak 193 pemuda, 2017 sebanyak 200 pemuda dan 2018 sebanyak 182 pemuda. Selain itu, diselenggarakan pula event-event olahraga, tahun 2014 sebanyak 3 event, 2015 sebanyak 2 event, 2016 sebanyak 2 event, 2017 sebanyak 1 event dan 2018 sebanyak 2 event. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

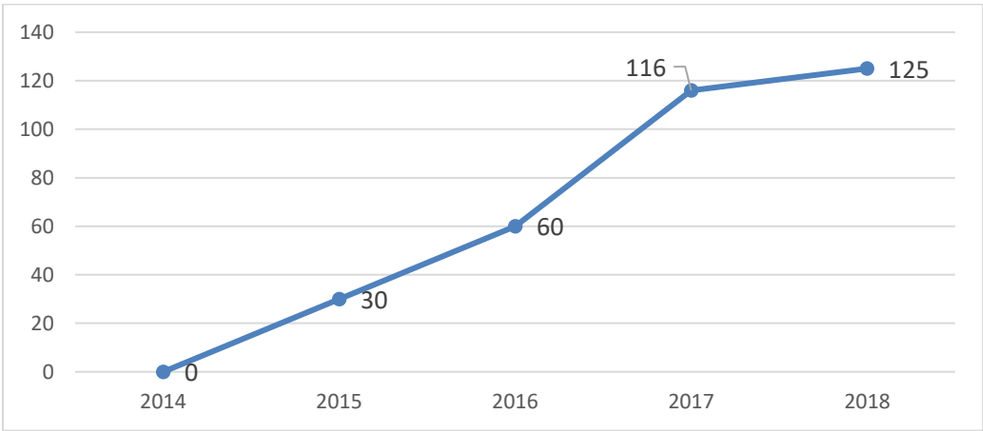
Grafik 2.58
Jumlah Penyelenggaraan Event Olahraga



Sumber: Data Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Lebak

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga juga melakukan pembinaan atlet berprestasi. Pembinaan dilakukan agar atlet-atlet dari Kabupaten Lebak memiliki prestasi baik di kancah nasional maupun dunia. Sebagai wujud nyata atas komitmen tersebut, sejak tahun 2015-2018 pembinaan atlet berprestasi terus mengalami peningkatan sebagaimana yang tersaji pada grafik berikut:

Grafik 2.59
Pembinaan Atlet Berprestasi



Sumber: Data Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Lebak

14) Statistik

Kunci pokok keberhasilan suatu perencanaan tergantung pada ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas yang diharapkan menjadi rujukan semua pihak dalam merancang kebijakan maupun dalam pemantauan dan evaluasi agar sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Program pengembangan statistik daerah dijabarkan dalam dua kegiatan, yaitu kegiatan pengolahan, analisis, monitoring dan evaluasi data statistik daerah dan kegiatan penyusunan dan pengumpulan data dan statistik dalam. Bentuk keluaran dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Lebak Dalam Angka yang diterbitkan oleh BPS, analisis PDRB Kabupaten Lebak dan Data Pokok Perencanaan pembangunan Daerah.

15) Persandian

Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi harus mendukung terciptanya penyelenggaraan sistem manajemen keamanan informasi yang holistik, Persandian tidak hanya memberikan jaminan pada keamanan informasi berklasifikasi, namun jaminan terhadap keotentikan, keutuhan, ketersediaan, dan penyangkalan. Oleh karena itu, persandian di lingkungan pemerintah daerah harus berperan dalam mendukung penyelenggaraan e – government atau penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik, dan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sesuai peraturan perundang-undangan.

Sebagai Pemerintah Daerah, keluarnya Perpres nomor 53 tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara, melalui Perpres tersebut tugas fungsi keamanan informasi pada Direktorat Keamanan Informasi Kementrian Komunikasi dan Informatika, dengan tugas fungsi persandian lembaga sandi negara diintegrasikan dan dilaksanakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara. Dengan kebijakan pemerintah pusat tersebut diharapkan akan terwujudnya tata kelola keamanan informasi yang terintegrasi dan menyeluruh di bawah pembinaaan Badan Siber dan Sandi Negara.

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman penyelenggaraan Persandian di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota, kita perlu melakukan perbaikan dalam 3 area yaitu tata kelola, operasional dan monitoring evaluasi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, urusan Persadian Daerah Kabupaten Lebak dijabarkan dalam program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dengan kegiatan pengelolaan dan pengembangan pengamanan informasi berupa pelaksanaan bimbingan teknis pengamanan informasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak yang bertujuan :

1. Mampu melaksanakan pengelolaan kebijakan, perlindungan informasi dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah daerah;
2. Mampu melakukan pengamanan informasi terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang memiliki data dan informasi yang bersifat strategis;

Meningkatkan kepercayaan *trust* (tingkat kepercayaan) masyarakat terhadap penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelayanan publik.

16) Kebudayaan

Banyaknya potensi seni dan budaya masyarakat merupakan salah satu potensi yang dapat ditingkatkan, sampai saat ini baru sebagian potensi seni yang terdata dengan baik termasuk fasilitas keseniannya. Jenis kesenian yang berpotensi untuk dikembangkan tersaji pada tabel 2.68.

Tabel 2.65
Jenis Kesenian di Kabupaten Lebak

No	Jenis Kesenian	Jumlah
1	Debus	5
2	Saman	2
3	Angklung Buhun	1
4	Angklung	3
5	Qasidah / Rebana	17
6	Calung Renteng	1
7	Calung	3
8	Wayang Golek	14
9	Dogdog Lojor	1
10	Topeng / Ubrug	35
11	Degung	14
12	Kecapi Suling	1
13	Reog	2
14	Pencak Silat	7
15	Kuda Lumping	2

No	Jenis Kesenian	Jumlah
16	Teater	1
17	Marching Band	1
18	Seni Lukis	1
19	Seni Kriya	1
20	Rudat	1
21	Jaipongan	1
22	Sanggar Seni Rupa	4
23	Sanggar Teater	37

Sumber : Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Lebak

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa jumlah kesenian sebagaimana tabel diatas, tetapi masih banyak yang belum terdata dengan baik dan ini merupakan tantangan yang harus ditindaklanjuti demi tersedianya database kebudayaan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kabupaten Lebak merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten yang masih memiliki Komunitas Adat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Komunitas Adat sebagaimana tabel 2.69.

Tabel 2.66
Komunitas Adat di Kabupaten Lebak

No	Nama	Acara seremonial / Ritual
1	Masyarakat Kaolotan Selatan	Seren taun
2	Masyarakat Tradisional Baduy	Seba Baduy, Kawalu
3	Masyarakat Adat Citorek	

Sumber : Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Lebak

Ketiga Komunitas adat tersebut sampai saat ini masih memegang teguh nilai-nilai warisan leluhur dan ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah baik Daerah maupun Pusat untuk memberikan fasilitasi dalam rangka pengembangan keanekaragaman budaya.

Belum terdatanya potensi seni juga dipengaruhi oleh belum optimalnya sumber daya manusia baik pada dinas pendidikan dan kebudayaan maupun para pelaku seni . Jumlah pelaku seni sebagaimana tersaji pada tabel 2.70.

Tabel 2.67
Pelaku Seni di Kabupaten Lebak

No	Uraian	Jumlah
1	Pelaku Seni / Seniman	10
2	Pegawai di Bidang Kebudayaan	4*

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pelaku seni/seniman masih sedikit baru berjumlah 10 orang tidak sebanding dengan luas wilayah dan banyaknya potensi seni di Kabupaten Lebak.

17) Kearsipan

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Perda No. 6/2016).

Pengelolaan secara baku arsip di Kabupaten Lebak diatur oleh Perda Nomor 6 Tahun 2016, dan dijabarkan secara khusus untuk pengelolaan Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah melalui Perbup Nomor 23 Tahun 2016. Berdasarkan hal tersebut mulai tahun 2017 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lebak selaku Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan tugas pembinaan dan pengelolaan arsip dengan indikator target capaian PKPK (Prosentase Ketertiban Pengelolaan Kearsipan). Arsip yang menjadi sasaran pengelolaan secara baku adalah Arsip Dinamis di Unit Kearsipan Tingkat II (OPD/Kecamatan/Desa/Kel), dan Arsip Statis yang berada di Unit Kearsipan Tingkat I (Depo Arsip Diskerpus).

Capaian dan target PKPK Kabupaten Lebak periode 2017 s.d 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.68
Capaian dan target PKPK Kabupaten Lebak periode 2017 s.d 2023

URAIAN	CAPAIAN PKPK		TARGET 2019 – 2023				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah OPD yang dibina	61	61	61	61	61	61	61
Jumlah yang tertib arsip	49	55	56	57	58	59	60
PKPK (%)	80,33	90,16	92	93	95	97	98

GNSTA (Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip/Perka ANRI Nomor 7 Tahun 2017) adalah salah satu upaya untuk meningkatkan PKPK yang melibatkan

seluruh pemangku kepentingan terhadap ketertiban dan kemanfaatan arsip. Dengan kegiatan diantaranya berupa sosialisasi dan pengembangan regulasi, pengadaan dan peningkatan tenaga kearsipan, pengadaan dan penataan sarana kearsipan, serta lomba pengelolaan arsip serta penyelamatan arsip lokal yang memiliki nilai sejarah.

Berdasarkan LHPK (Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan) dari Lembaga Kearsipan Provinsi Banten, keberadaan tenaga kearsipan baik tenaga fungsional Arsiparis maupun tenaga administratif arsip di seluruh kabupaten/kota masih sangat kurang. Kebutuhan ideal tahun 2018 Kabupaten Lebak terhadap tenaga arsiparis/tenaga administratif pengolah arsip adalah sebagai berikut :

Tabel 2.69
Tenaga fungsional Arsiparis maupun tenaga administratif arsip
Kabupaten Lebak Tahun 2018

KAB / KOTA	KONDISI EKSISTING	KEBUTUHAN TENAGA KEARSIPAN		
		TERAMPIL	MAHIR	AHLI
LEBAK	3 Arsiparis terampil	92	10	0

18) Perpustakaan

Perpustakaan adalah Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka (UU No.43/2007). Meningkatkan literasi masyarakat merupakan salah satu tujuan penyelenggaraan perpustakaan mulai dari tingkat pusat, daerah hingga pojok baca di ruang publik.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan melalui Bidang Perpustakaan /Perpustakaan Kabupaten Sadjah – Adinda mulai tahun 2017 menjadi pembina penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Lebak dengan tujuan meningkatkan literasi masyarakat melalui indikator PMBM (Prosentase Minat Baca Masyarakat). Sasaran binaan untuk indikator ini adalah Perpustakaan Kabupaten SAIDJAH-ADINDA, Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Sekolah/Madrasah/Ponpes, Perpustakaan Perguruan Tinggi, Perpustakaan/Taman Bacaan Masyarakat, dan perpustakaan khusus yang ada di OPD atau kecamatan.

Capaian dan target PMBM periode 2017 s.d 2023 Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut :

Tabel 2.70
Capaian dan target PMBM periode 2017 s.d 2023

URAIAN	CAPAIAN PMBM		TARGET 2019 – 2023				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pengunjung	**326.292**	**369.302**	422.856	447.018	503.636	561.003	619.128
Penduduk	**1.009.629**	**1.050.000**	1.057.140	1.064.329	1.071.566	1.078.853	1.086.189
PMBM (%)	**32,32**	**35,17**	40	42	47	52	57
Uraian Data Pengunjung	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Perpus Saijah Adinda	**24.009**	**56502**	-	68.392	77.055	85.832	94.725
Desa/Kel/TBM	**37.128**	**28564**	-	34.575	38.954	43.391	47.887
Sekolah/Madrasah	**265.155**	**283200**	-	342.797	386.214	430.207	474.779
Perguruan Tinggi	**-**	**812**	-	983	1.107	1.234	1.361
Perpustakaan Khusus	**-**	**224**	-	271	305	340	376
Jumlah	**326.292**	**369302**	**-**	**447.018**	**503.636**	**561.003**	**619.128**

Bahwa dalam rangka pembudayaan kegemaran membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat, perlu didukung dengan keberadaan perpustakaan yang merata dengan kualitas layanan yang memenuhi standar, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lebak menjalin kerjasama dengan Bagian Hukum Setda Lebak untuk memproses kelahiran peraturan daerah penyelenggaraan perpustakaan.

Melalui payung hukum tersebut diharapkan tahapan upaya pencapaian standar perpustakaan dapat dilakukan secara terarah, terkoordinasi dan tersinergikan. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam pengadaan sarana baca dan pembinaan perpustakaan dapat lebih ditingkatkan. Baik untuk Perustakaan Kabupaten Saidjah-Adinda, maupun perpustakaan desa, sekolah dan lainnya.

Keberadaan koleksi Perpustakaan Saidjah-Adinda periode 2014 s.d 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.71
Keberadaan koleksi Perpustakaan Saidjah-Adinda periode 2014 s.d 2018

NO	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Judul	4.808	6.183	6.834	14.562	16.062
2	Jumlah Koleksi	10.516	12.391	13.693	28.806	31.806

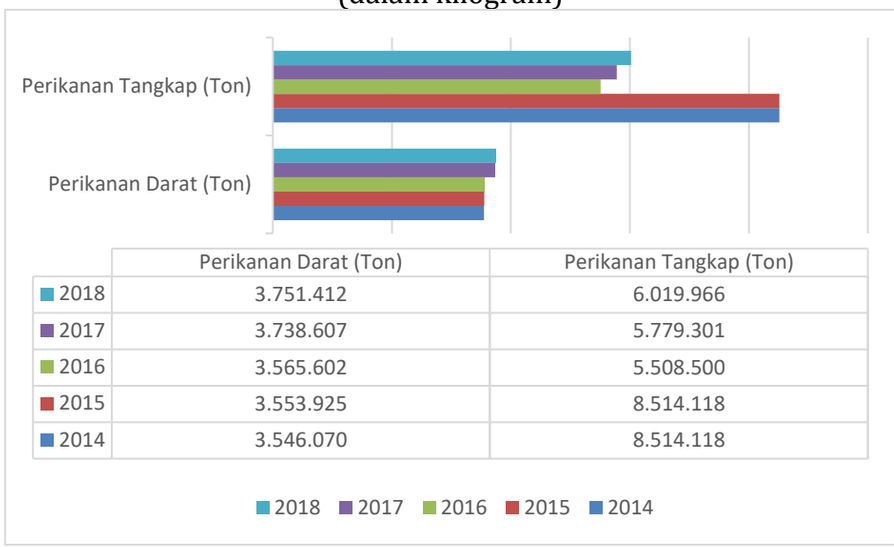
2.3.1.3 Urusan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan

Produksi ikan Laut pada tahun 2018 tercatat sebanyak 6.019.966 kg naik dibandingkan tahun 2017 dengan produksi ikan sebesar 5.779.301 sedangkan

untuk Ikan darat produksi mencapai 3.751.412 dengan tren naik setiap tahunnya. Gambaran produksi ikan selama kurun waktu 2014-2018 terlihat pada grafik 2.65.

Grafik 2.60
Produksi Ikan Kabupaten Lebak Tahun 2014-2018
(dalam kilogram)

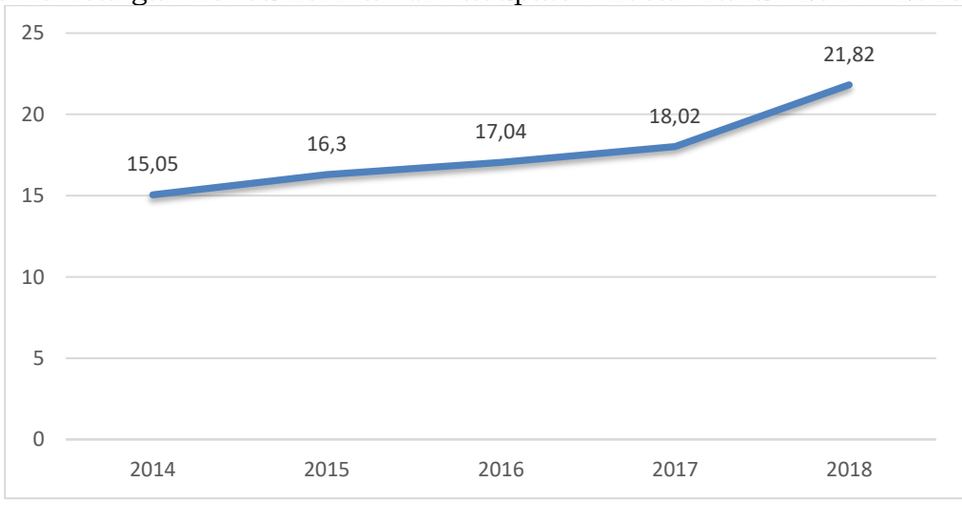


	Perikanan Darat (Ton)	Perikanan Tangkap (Ton)
2018	3.751.412	6.019.966
2017	3.738.607	5.779.301
2016	3.565.602	5.508.500
2015	3.553.925	8.514.118
2014	3.546.070	8.514.118

Sumber : Diskan Kabupaten Lebak 2018

Pemenuhan kebutuhan akan protein hewani dari ikan dapat dilihat dengan adanya peningkatan ketersediaan ikan per kapita untuk dikonsumsi dari tahun ke tahun. Konsumsi ikan pada tahun 2018 mencapai 21 kg/kapita/tahun. Selama kurun waktu 2014 – 2018 , ketersediaan ikan per kapita menunjukkan kecenderungan peningkatan. Hal ini disebabkan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk . Gambaran mengenai konsumsi ikan per kapita terlihat pada grafik 2.66.

Grafik 2.61
Perkembangan Konsumsi Ikan di Kabupaten Lebak Tahun 2014 - 2018

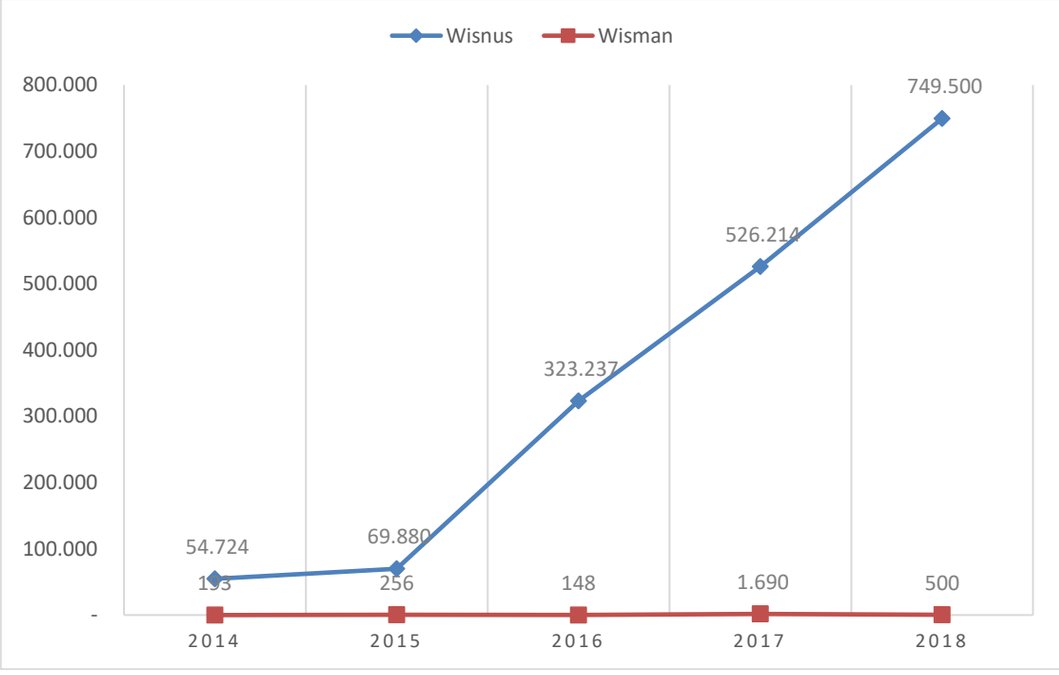


Dinas Perikanan Kabupaten Lebak Tahun 2018

2) Pariwisata

Perkembangan jumlah obyek wisata sampai dengan tahun 2013 yaitu 4 daerah wisata budaya, 23 wisata alam dan 3 wisata buatan. Sedangkan perkembangan jumlah wisatawan selama kurun waktu 2014-2018 dapat dilihat pada grafik 2.64.

Grafik 2.62
Perkembangan Jumlah Wisatawan
Nusantara & Wisatawan Mancanegara Tahun
2014-2018

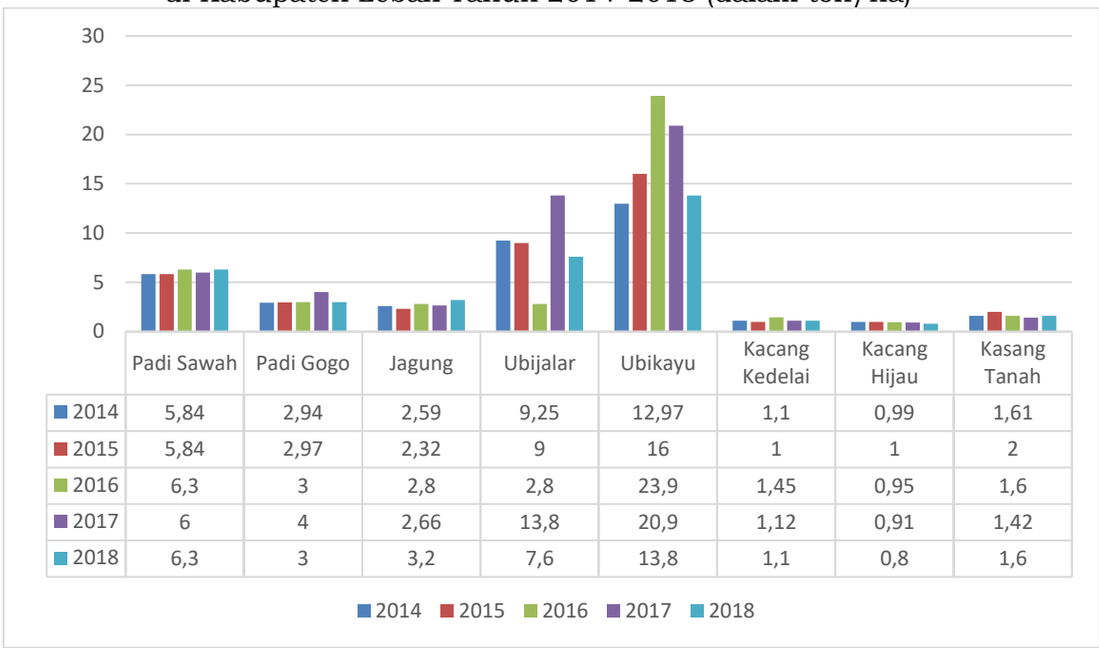


Sumber : Dinas Porapar Kab. Lebak 2014-2018

3) Pertanian

Sub sektor pertanian merupakan sektor andalan pemerintah Kabupaten Lebak dalam hal pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Komoditas unggulan dari sektor ini diantaranya adalah padi dan palawija. Perkembangan produktivitas tanaman padi dan paliwija selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir tersaji pada grafik 2.59.

Grafik 2.63
Perkembangan Produktivitas Tanaman Padi dan Palawija
di Kabupaten Lebak Tahun 2014-2018 (dalam ton/ha)



	Padi Sawah	Padi Gogo	Jagung	Ubijalar	Ubikayu	Kacang Kedelai	Kacang Hijau	Kasang Tanah
2014	5,84	2,94	2,59	9,25	12,97	1,1	0,99	1,61
2015	5,84	2,97	2,32	9	16	1	1	2
2016	6,3	3	2,8	2,8	23,9	1,45	0,95	1,6
2017	6	4	2,66	13,8	20,9	1,12	0,91	1,42
2018	6,3	3	3,2	7,6	13,8	1,1	0,8	1,6

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Lebak, 2014-2018
**) BPS Kab. Lebak,*

Dari grafik 2.59 terlihat bahwa pada tahun 2016 terjadi kenaikan produktivitas yang cukup signifikan pada komoditas Ubi Kayu . Kenaikan tersebut disebabkan selain cuaca yang lebih mendukung juga diterapkannya teknologi Budidaya Ubikayu, yaitu dengan penggunaan varietas unggul , bibit berkualitas serta populasi dan jarak tanam . Sedangkan komoditas padi sawah , selama lima tahun terakhir pengalami peningkatan produktivitas kecuali komoditas kacang tanah, dengan rata-rata produktivitas mencapai 2,6% untuk komoditas jagung, 13,8% untuk komoditas ubi jalar, 20,9% untuk komoditas ubi kayu, 1,12 untuk komoditas kacang kedelai, 0,91% untuk komoditas kacang hijau dan 1,42% untuk komoditas kacang tanah di tahun 2017.

Wilayah Kabupaten Lebak juga merupakan penghasil buah-buahan dengan komoditas unggulan pisang dan rambutan. Total komoditas buah-buahan yaitu sebanyak 22 komoditas. Perkembangan produksi komoditas buah-buahan dapat dilihat pada tabel 2.79.

Tabel 2.72
Perkembangan Produksi Komoditas Buah-buahan
di Kabupaten Lebak Tahun 2015-2018 (dalam kwintal)

No	Jenis	2015	2016	2017	2018
1.	Alpukat	1.025	4.013	12.243	13.589
2.	Mangga	45.412	26.112	50.134	62.639

3.	Rambutan	83.041	97.323	35.004	95.189
4.	Duku/Kokosan	76.532	32.574	7.701	40.070
5.	Jeruk Siam/Keprok	2.906	2.956	1.430	1212
6.	Durian	57.886	4.243	106.641	186.355
7.	Jambu Biji	6.264	26.832	17.061	6.292
8.	Sawo	2.153	2.434	2.276	4.361
9.	Pepaya	8.719	29.297	16.077	106.316
10.	Pisang	1.278.533	1.339.593	7.441.241	2.293.848
11.	Nanas	1.913	1.410	4.047	2.350
12.	Salak	1.977	60	5.592	2.827
13.	Sirsak	20.132	7.489	11.163	16.183
14.	Nangka	19.123	13.343	6.818	48.644
15.	Manggis	42.813	80.919	87.098	704.308
16.	Belimbing	2.301	1.310	6.403	4.081
17.	Jambu Air	7.014	17.252	6.866	6.024
18.	Sukun	6.776	13.882	9.221	11.297
19.	Jeruk Besar	166	260	34	345
20	Markisa	51	98	39	107
	Jumlah	**1.664.737**	**1.701.400**	**7.827.089**	**3.749.368**

Sumber : BPS Kabupaten Lebak

Kecamatan penghasil komoditas buah-buahan terbanyak adalah Kecamatan Cilograng, Kecamatan Malingping dan Kecamatan Bayah. Namun pada umumnya hampir seluruh kecamatan menghasilkan komoditi buah-buahan. Apabila dilihat dari tabel di atas pisang merupakan sektor unggul dalam produksi maupun populasinya.

Selain komoditi buah-buahan, Kabupaten Lebak juga menghasilkan komoditas sayuran dengan jenis komoditas sebanyak 15 komoditas. Untuk lebih jelasnya perkembangan produksi komoditi sayur-sayuran selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir tersaji pada tabel 2.80.

Tabel 2.73
Perkembangan Produksi Komoditas Sayuran
di Kabupaten Lebak Tahun 2013 – 2018 (dalam kwintal)

No.	Jenis Komoditas	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Kacang Panjang	44.377	34.528	18.011	30.564	29.489	41.122
2	Cabe Besar	3.786	5164	2.883	6.298	12.174	23.891
3	Tomat	3.796	3284	1.768	6.695	6.110	3660
4	Terung	13.128	7266	3.142	4848	8.552	11.168
5	Buncis	297	569	398	854	2.276	1136
6	Mentimun	78.117	55.454	35.343	33.496	32.952	47.678
7	Melinjo	39 412	23.922	26.636	44.499	47.330	91.122
8	Kangkung	9 172	5454	2.572	5161	3.678	5.366
9	Bayam	1 964	1401	567	1.149	1.696	3.522
10	Jamur	34 786	25.383	6.370	43.135	63.984	38.989
11	Petsai/Sawi	1 105	2794	1.212	1.120	313	1201
12	Cabe Rawit	5 058	5013	4.333	3.419	7.537	13.967
13	Petai	1 105	16.083	35.942	20.566	6.641	31.577
14	Jengkol	5 095	9060	1956	7.406	9.761	13.632
	Jumlah	**241.198**	**195.375**	**141.133**	**209.210**	**232.493**	**328.031**

Sumber : Distanbun 2018

Dari tabel 2.66 terlihat bahwa komoditas jamur menjadi komoditas unggulan disusul dengan komoditas melinjo dan kacang panjang. Namun ada 4 komoditas yang pada kurun waktu tiga tahun terakhir menurun produksinya. Apabila dilihat dari trend pertumbuhan produksi komoditas sayuran berfluktuasi setiap tahunnya

Selain komoditas padi dan palawija, buah-buahan dan sayuran, komoditas biofarmaka sudah mulai dilirik oleh masyarakat . Selama kurun waktu 2013-2018, produksi komoditas biofarmaka rata-rata tumbuh sebesar 162,91%. Perkembangan produksi komoditas biofarmaka dapat dilihat pada tabel 2.81.

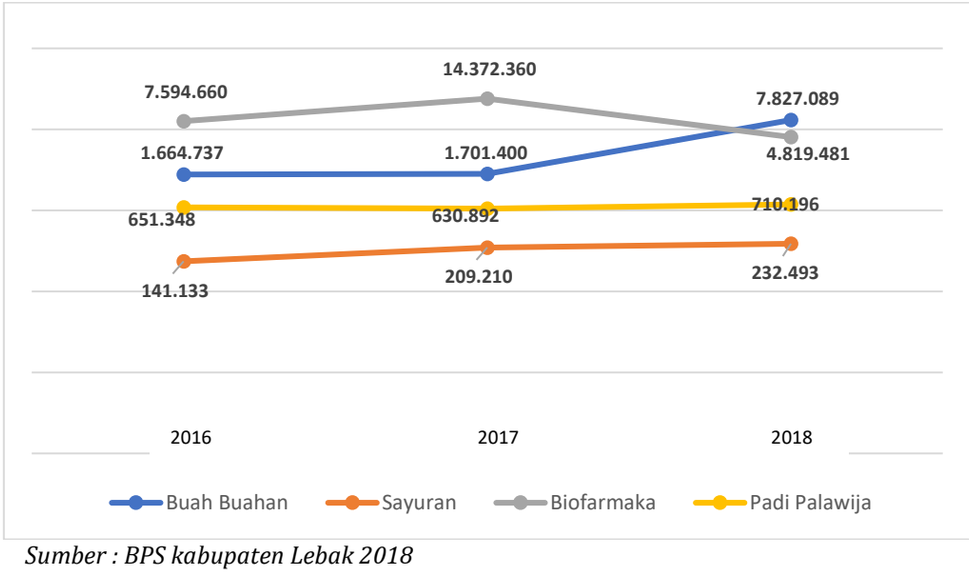
Tabel 2.74
Perkembangan Produksi Komoditas Biofarmaka
di Kabupaten Lebak Tahun 2013-2018 (dalam kilogram)

No.	Jenis Komoditas	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jahe	2.597.325	1628805	953.444	975.586	560.607	377.514
2.	Laos /Lengkuas	3.039.608	4381875	4.184.208	11.952.223	3.365.252	1.805.351
3.	Kencur	1.570.083	1609008	1.823.016	638.496	409.257	1.449.666
4.	Kunyit	645,847	713000	513.602	716.589	447.749	457.085
5.	Lempuyang	2.051	21263	19.769	15.536	1.028	2.085
6.	Temulawak	100	450	1.200	1.720	10.767	2.139
7.	Kapulaga	2049	9956	1.063	452	716	139
8.	Mengkudu	32487	150083	52.432	28.755	4.474	15.148
9.	Mahkota Dewa	1 620	29297	9.457	10.409	9.106	6.526
10.	Kejibeling	207	3952	8.828	8.881	7.699	181
11.	Temuireng	-	-	-	5.024	-	0
12.	Temukunci	205	15676	25.719	16.725	2.010	2.446
13.	Sambiloto	14	-	1.374	1.537	756	0
14.	Lidah Buaya	154	-	548	427	60	0
	Jumlah	**7.891.750**	**8.563.365**	**7.594.660**	**14.372.360**	**4.819.481**	**4.118.280**

Sumber : BPS KABUPATEN LEBAK , 2013-2018

Secara keseluruhan perkembangan sub sektor pertanian disajikan pada grafik 2.60.

Grafik 2.64
Perkembangan Produksi Sub Sektor Pertanian Kabupaten Lebak
Tahun 2016 - 2018

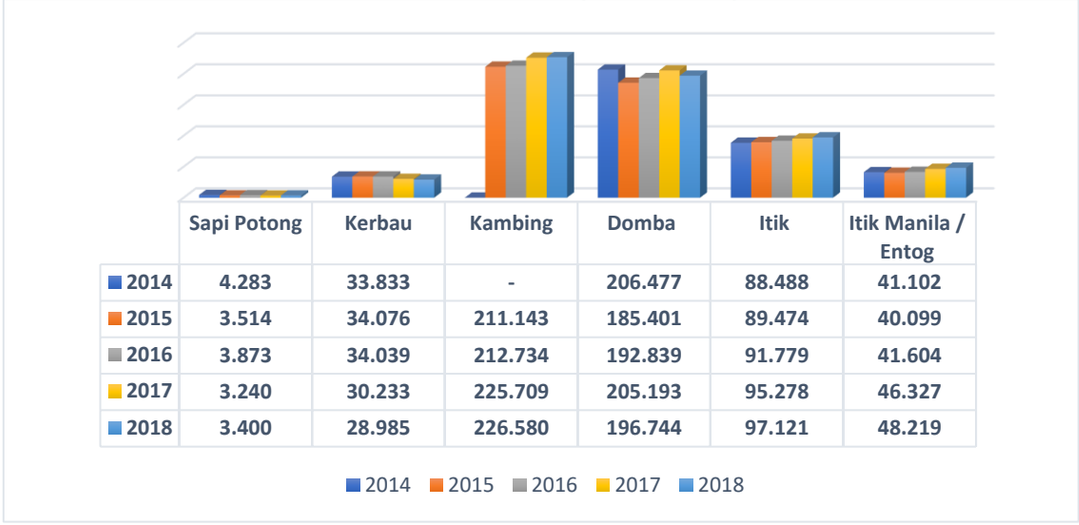


Sumber : BPS kabupaten Lebak 2018

Sementara itu, untuk sub sektor peternakan, Kabupaten Lebak juga merupakan wilayah penghasil ternak terbesar di Provinsi Banten. Ternak kerbau merupakan salah satu andalan komoditas peternakan di Kabupaten Lebak dengan jumlah populasi pada tahun 2018 sebanyak 28.985 ekor, juga mengalami penurunan populasi dibandingkan tahun 2017. Penurunan ini disebabkan banyaknya ternak terjual karena harga yang menggiurkan pada saat menjelang hari raya maupun untuk konsumsi. Selain itu berkurangmya populasi ternak yang mengakibatkan kematian dikarenakan memakan rumput yang telah terkena pestisida meskipun jumlahnya tidak terlalu signifikan.

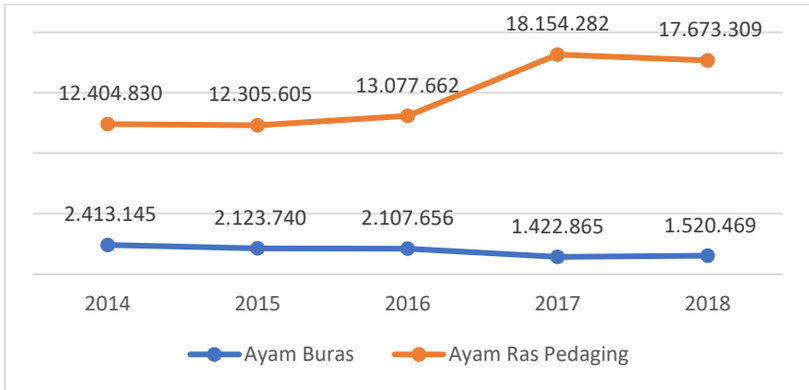
Perkembangan populasi ternak selama kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada Grafik 2.61.

Grafik 2.65
Populasi Sub Sektor Peternakan di Kabupaten Lebak
Tahun 2014-2018 (dalam ekor)



	Sapi Potong	Kerbau	Kambing	Domba	Itik	Itik Manila / Entog
2014	4.283	33.833	-	206.477	88.488	41.102
2015	3.514	34.076	211.143	185.401	89.474	40.099
2016	3.873	34.039	212.734	192.839	91.779	41.604
2017	3.240	30.233	225.709	205.193	95.278	46.327
2018	3.400	28.985	226.580	196.744	97.121	48.219

Grafik 2.66



Sumber : Dinas Peternakan Kab. Lebak

4) Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor basis di Kabupaten Lebak yang berkontribusi sekira 12,40% terhadap PDRB (adhb) tahun 2017, dengan nilai mencapai Rp. 3,069.61 trilyun. Ruang lingkup sektor ini mencakup perdagangan besar dan eceran, serta reparasi kendaraan bermotor roda empat dan roda 2, yang kini bertumbuh cukup pesat di Kabupaten Lebak, sekira 21,10% selama kurun waktu RPJMD Tahun 2014-2018. Sektor perdagangan, bersama-sama dengan sektor perhotelan dan penyediaan makan dan minum, menjadi lapangan penghidupan bagi sekira 17,21% penduduk usia produktif di Kabupaten Lebak, atau sebanyak kurang lebih 91.173 jiwa. Karenanya pengelolaan sektor perdagangan yang lebih baik mutlak diperlukan di masa depan, melalui ragam jenis intervensi kebijakan pembinaan yang tepat bagi pelaku usaha perdagangan di daerah.

Salah satu bentuk intervensi kebijakan di sektor perdagangan adalah melalui penataan pasar tradisional dalam rangka penyediaan infrastruktur perekonomian rakyat yang memadai. Hingga tahun 2017 kebijakan penataan pasar tradisional telah menjangkau sebanyak 11 pasar, dan diperkirakan akan menjadi 13 pasar hingga akhir periode RPJMD pada akhir tahun 2018. Intervensi ini tentu tidak serta merta mengubah dan meningkatkan produktifitas sektor perdagangan, sehingga beragam intervensi kebijakan lainnya masih diperlukan guna memastikan tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan pada sektor perdagangan, yang menurut UU No.23/2014 akan difokuskan pada:

1. Pengelolaan kewenangan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
2. Pengelolaan penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
3. Pengelolaan penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk: (a) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; (b) penerima waralaba lanjutan dari warlaba dalam negeri; dan (c) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
4. Pengelolaan kewenangan penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat.
5. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Kabupaten
6. Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau.

7. Penerbitan surat keterangan asal (bagi kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).
8. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.
9. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.
10. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten.
11. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten.
12. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah kabupaten.
13. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat kabupaten dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
14. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat di kabupaten.
15. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas kabupaten/kota).
16. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

Kegiatan perdagangan ditopang oleh sarana perdagangan. Kndisi sarana perdagangan sampai dengan tahun 2014 berupa :

- 79 buah pasar tradisional
- Pasar modern, terdiri dari 1 buah supermarket, dan 180 buah minimarket.

5) Perindustrian

Sektor industri di Kabupaten Lebak baru menyumbang sekira 9,02% terhadap pembentukan PDRB (adhb) dalam kurun waktu lima tahun terakhir, atau sebesar Rp.2,23 trilyun. Dengan kontribusi sebesar ini, sektor industri memang belum banyak berperan dalam struktur perekonomian daerah, meski sektor ini secara faktual telah menjadi sumber penghidupan bagi sekira 8,51% penduduk usia produktif (15 tahun ke atas) di Kabupaten Lebak, atau mencapai kurang lebih 45.098 jiwa. Data BPS (2018) mencatat bahwa kontribusi sebesar 9,02% tersebut disumbang oleh sebanyak 16.381 perusahaan industri yang beroperasi di Kabupaten Lebak, yang mayoritas didominasi oleh industri makanan dan minuman sebanyak 7.515 perusahaan atau sekira 45,88%; dan industri pengolahan kayu, barang dari

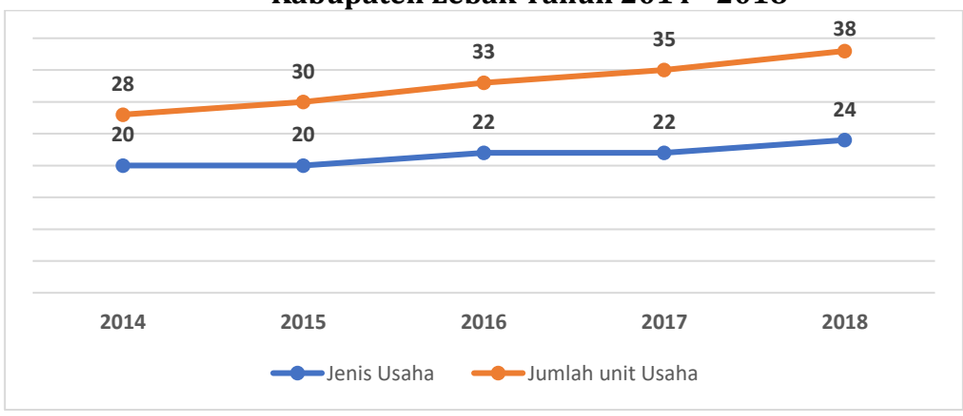
kayu, dan perabot rumah tangga sebanyak 6.015 perusahaan atau sekira 36,72%. Kedua jenis industri ini secara faktual menyerap sekira 75,74% dari total tenaga kerja yang bekerja di sektor industri di Kabupaten Lebak.

Pengembangan industri makanan dan minuman, serta industri sejenis yang menyerap dan/ mengolah komoditi sektor pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan di Kabupaten Lebak tampaknya perlu ditingkatkan di masa depan mengingat peran dan kontribusinya dalam menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Demikian pula dengan industri pengolahan hasil hutan (kayu, dll), yang perlu dikembangkan dengan melakukan pengendalian secara ketat terhadap legalitas bahan bakunya sehingga tidak menjadi faktor yang mempercepat terjadinya degradasi fungsi hutan atau bahkan deforestasi.

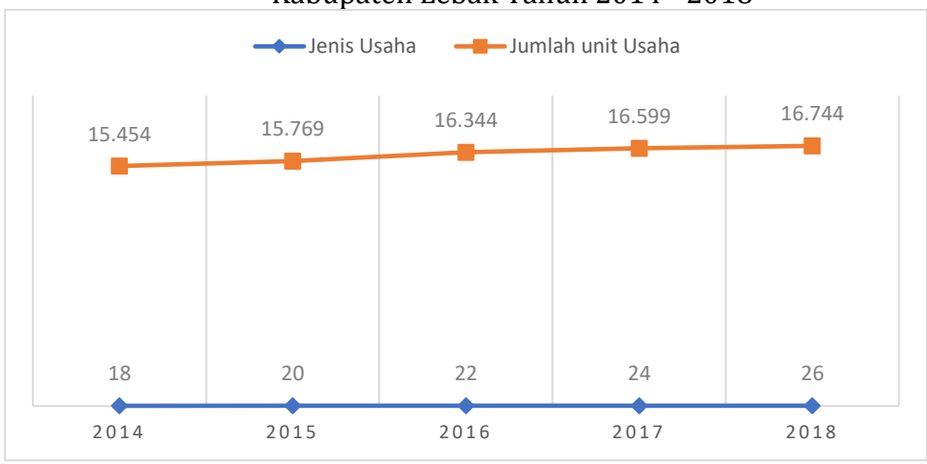
Meski kontribusinya terhadap PDRB belum cukup signifikan, namun sepanjang periode RPJMD Tahun 2014-2018, industri kecil dan menengah di Kabupaten Lebak tercatat meningkat cukup pesat. Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 16.559 industri kecil yang beroperasi pada sekira 24 jenis usaha industri. Sedangkan industri skala menengah tercatat sekira 35 perusahaan yang berusaha pada sekira 22 jenis usaha industri.

Upaya peningkatan kontribusi pada sektor industri pengolahan melalui pengembangan industri kecil dan menengah dirasa perlu di tingkatkan guna mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi industri. Sampai dengan tahun 2018, jenis dan jumlah industri menengah berjumlah 26 jenis industri dengan jumlah industri sebanyak 16.744 unit. Perkembangan jenis dan jumlah industri kecil & menengah selama kurun waktu 2014-2018 tersaji pada Grafik 2.67.

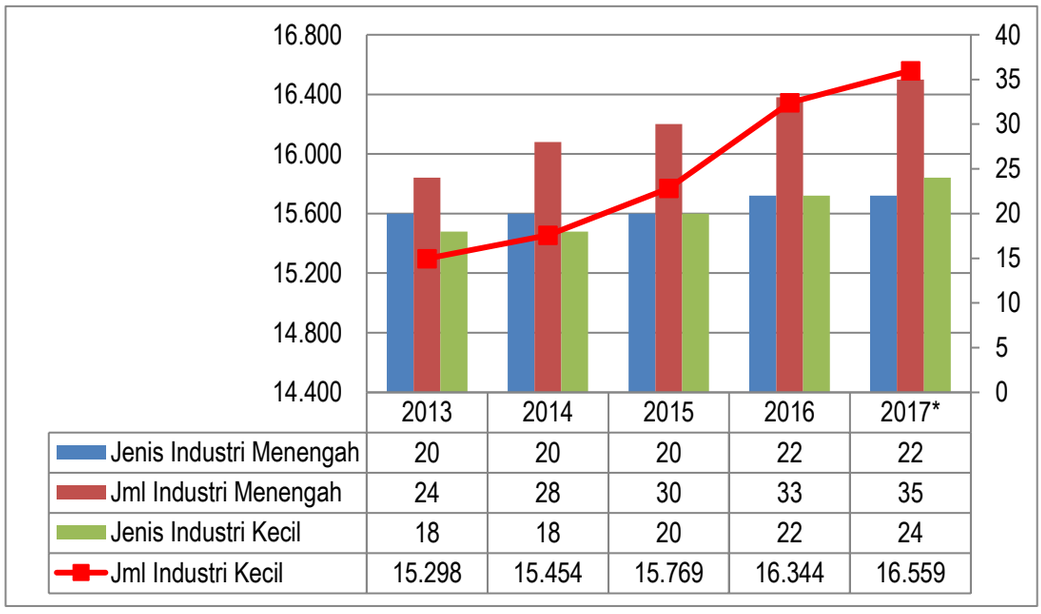
Grafik 2.67
Jumlah Jenis Usaha Dan Jumlah Unit Usaha Menengah Kabupaten Lebak Tahun 2014 - 2018



Grafik 2.68
Jumlah Jenis Usaha Dan Jumlah Unit Usaha Kecil
Kabupaten Lebak Tahun 2014 - 2018



Grafik 2.69
Perkembangan Jenis dan Jumlah Industri Kecil dan Menengah
Tahun 2013-2017



	2013	2014	2015	2016	2017*
Jenis Industri Menengah	20	20	20	22	22
Jml Industri Menengah	24	28	30	33	35
Jenis Industri Kecil	18	18	20	22	24
Jml Industri Kecil	15.298	15.454	15.769	16.344	16.559

Sumber: Diolah dari beberapa sumber, 2018

Dalam konteks kewenangan pemerintah kabupaten menurut UU Nomor 23/2014, tantangan yang dihadapi pada penyelengaraan urusan perindustrian di Kabupaten Lebak adalah pelaksanaan kewenangan pemerintah kabupaten yang menurut UU dimaksud terdiri dari:

1. Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten;
2. Penerbitan Ijin Usaha Industri (IUI) kecil dan IUI Menengah;
3. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah;
4. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di wilayah kabupaten;

5. Penyampaian laporan informasi industri untuk: IUI Kecil dan Izin Perluasannya; IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah kabupaten.

6) Ketransmigrasian

Dalam mendukung pengurangan pengangguran, membukan peluang dan kesempatan kerja sekaligus mengurangi kemiskinan, program Transmigrasi yang telah dilaksanakan juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah, namun dalam pelaksanaannya banyak menghadapi berbagai kendala, antara lain masyarakat masih rendah mempunyai jiwa merantau sehingga program ini hanya menjadi pilihan alternative tetapi animo bertransmigrasi masih tinggi.

Disamping itu proses pelaksanaan sering berjalan lambat karena sebelum pelaksanaan penempatan/pemberangkatan transmigran harus telah ada perjanjian kerjasama antar daerah yakni daerah pengirim dengan daerah penerima transmigran, sedangkaan dalam proses kerjasama (MOU) antar daerah tersebut harus melaui tahapan-tahapan yang harus ditempuh dan memerlukan pembiayaan yang cukup besar. Hal ini dilaksanakan agar transmigran yang ditempatkan bena-benar mendapatkan kepastian hukum, terpenuuhi hak-haknya serta mendapatkan keamanan dan kenyamanan berusaha di daerah Transmigrasi.

Penampatan/pemberangkatan transmigran asal Kabupaten Lebak yang telah dilaksanakan antara lain ke Provinsi Sumatra selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Riau dan Provinsi Maluku, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Tengah.

Untuk jumlah penempatan/pemberangkatan calon transmigran mengalami pasang surut, hal ini di sebabkan karena pembagian jumlah kuota sudah di tentukan Departemen dan Provinsi, sehingga sering tidak bisa memenuhi jumlah animo calon transmigran. Rekapitulasi dan komposisi penempatan/pemberangkatan transmigrasi lokal asal Kabupaten Lebak sampai dengan tahun 2018 sebanyak 14 transmigran umum dan tidak ada jumlah transmigran swakarsa.

2.3.1.4 Urusan Penunjang Pemerintahan

1) Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamya, guna pemanfaatan dan pengalokasiaan sumberdaya yang ada dalam meingkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Untuk menjamin terciptanya perencanaan pembangunan yang konsisten dan berkelanjutan serta dasar penyusunan dokumen pengganggaran, telah disusun dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah daerah. Dokumen perencanaan pembangunan tahunan ditetapkan dengan peraturan bupati. Untuk mengefektifkan pelaksanaan program-program pembangunan tersebut, maka dibangunlah sistem informasi yang nantinya akan berdampak pada keselarasan antar dokumen rencana pembangunan daerah, meningkatnya kualitas perencanaan, serta optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan perencanaan dan evaluasi pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2) Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tansparan mulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Selain itu akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiscal) menunjukkan kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangaunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantunagn daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mangandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuah pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejatraan masyarakat yang semakin tinggi.

Rasio kemandirian Kabupaten Lebak tahun 2015 sebesar 19,67 % lebih tinggi dari target yang ditentukan yaitu 17,99%.

Pengelolaan barang daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan membentuk Tim TP TGR (Tim pelaksana tuntutan ganti rugi) atas penggunaan barang milik daerah. Hal ini tidak terlepas dari keinginan untuk melakukan pembaharuan dan pengintegrasian sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah melalui suatu aplikasi yang dapat mengakomodir proses tersebut. Pada tahun 2016 dengan mengacu kepada prinsip money follow function melalui penelaahan SAKIP dengan predikat BB Pemerintah Daerah mulai melakukan perampingan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. Melalui kerjasama yang dilakukan dengan BPPT dimulailah penggunaan sistem aplikasi yang lebih terarah dalam hal perencanaan dan penganggaran yaitu SIMRAL (Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran, sistem ini memungkinkan BPK melakukan pengawasan secara langsung dari proses perencanaan sampai penganggaran. Pada tahun yang sama Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak juga telah memulai sistem cashless dengan memperbaharui peraturan pelaksanaan keuangan dengan sistem non tunai. Berdasarkan upaya-upaya tersebut, Kabupaten Lebak telah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 4 tahun berturut turut dari BPK yaitu pada tahun 2016 sampai dengan 2018

3) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Tata kelola pemerintahan yang baik memerlukan input sumber daya manusia aparatur yang memiliki kapasitas yang mumpuni. Untuk itu diperlukan Pendidikan dan pelatihan aparatur dalam rangka meningkatkan aparatur pemerintah yang berkualitas.

Tabel. 2.75
Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat Dan Terbina.

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat pengembangan	933	1.147	1084	505	794
Jumlah aparatur yang terbina	12.134	11.419	10.880	10.130	9.597

4) Penelitian dan Pengembangan

Selain hal tersebut diatas, pembaharuan dalam hal tata kelola pemerintahan, peningkatan pelayanan kepada publik serta pemberdayaan masyarakat ke arah yang lebih maju dilakukan melalui Inovasi. Inovasi merupakan kabaharuan yang merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing nasional dan meningkatkan kesejahateraan bangsa. Hal tersebut di dilandasi terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana dinyatakan, bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi yang mengacu kepada prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya untuk kepentingan masayarakat. Pada pelaksanaan Undang-undang tersebut dipertegas dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dimana inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam peningkatan daya saing daerah. Bupati Lebak melalui Pemerintah Kabupaten Lebak berkomitmen kuat terhadap Inovasi walaupun di tengah keterbatasan anggaran dan sumber daya anggaran agar tetap bisa melakukan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Guna menuju kepada hal tersebut, dan mendukung sepenuhnya upaya-upaya dalam menggairahkan budaya berinovasi maka Bupati Lebak mengeluarkan Surat Edaran Bupati nomor 060/106 ORG-Tahun 2017 tentang Kompetisi Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.

Mengacu kepada hal tersebut diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak telah melaksanakan kegiatan-kegiatan inovasi dalam hal peningkatan pelayanan kepada publik, peningkatan tata kelola pemeritahan serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan. Namun sayangnya pelaksanaan inovasi di Kabupaten Lebak tersebut tidak terdokumentasikan dengan baik. Mulai tahun 2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan kerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara yang dituangkan kedalam Perjanjian Kerjasama Mou Nomor : 102/Mou-04/Bag.KSD/Bapp/2017 dan Nomor : 9/K.1/HKM.03.1 tentang kerjasama penguatan kapasitas Pemerintahan Kabupaten Lebak melalui penyelenggaraan kegiatan kajian kebijakan, pendidikan dan pelatihan, Inovasi administrasi negara serta pendidikan tinggi. Hal tersebut dilaksanakan untuk mendorong pelaksanaan inovasi serta mendokumentasikan inovasi-inovasi yang telah berhasil membuat

pembaharuan dalam ketiga aspek diatas yaitu peningkatan pelayanan kepada publik, peningkatan tata kelola pemeritahan serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan yang dituangkan dalam sebuah dokumen direktori inovasi daerah guna mendukung upaya berkesinambungan kelanjutan pelaksanaan inovasi-inovasi tersebut, baik yang telah dilaksanakan maupun yang tercipta kemudian.

Pendokumentasian kegiatan inovasi tersebut dalam kurun waktu 2017 – 2018 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini

Tabel 2.76
Pendokumentasian kegiatan inovasi
Dalam kurun waktu 2017-2018

No	Nama Inovasi	Bidang Inovasi	Tahun
1.	UJAS (Undang Jemput Antar dan Selamat)	Peningkatan Pelayanan kepada Publik	2017
2.	Mantri Tani Desa (MTD)	Pemberdayaan Masyarakat	2017
3.	Nomor Registrasi Perangkat Desa (NRPDes)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa	2017
4.	SIM RS (Aplikasi Modul Rawat Jalan)	Peningkatan Pelayanan Kepada Publik	2017
5.	ATIKAN (Asal Ketik Arsip Nampak)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	2018
6.	KADE (Klinik Konsultasi Desa)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	2018
7.	JAMILAH (Jemput Antar Ibu Hamil Bermasalah)	Peningkatan Pelayanan Kepada Publik	2018
8.	Kartu AK.1 (Aplikasi Pembuatan Kartu AK.1)	Peningkatan Pelayanan Kepada Publik	2018
9.	SIE-LA Komplain dengan Hati	Peningkatan Pelayanan Kepada Publik	2018

Pelaksanaan pendokumentasian tersebut telah membuahkan hasil dengan diterimanya penghargaan Indonesia Goverment Award (IGA) sebagai 10 daerah inovatif tingkat nasional, penghargaan dari IIPG sebagai salah satu dari 30 daerah dengan tata kelola baik tingkat nasional, untuk tiga inovasi yang diusulkan yaitu UJAS (Undang Jemput Antar Selamat) yang merupakan inovasi dalam bidang peningkatan pelayanan kepada publik dalam bidang kesehatan, NRPDes (Nomor Register Perangkat Desa) yakni inovasi dalam bidang peningkatan tata kelola

pemerintahan serta MTD (Mantri Tani Desa) yang merupakan inovasi dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

Upaya sinergitas kebijakan Pemerintah Pusat, Daerah dan Desa menjadi langkah nyata dalam mengatasi kendala pelayanan publik yang berkualitas, peningkatan tata kelola pemerintahan serta pemberdayaan masyarakat. Melalui one civil servent one inovation dan berinovasi dengan hati diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas menuju Kabupaten Lebak yang berdaya saing.

5) Pengawasan

Salah satu fungsi manajemen yang harus berkontribusi dan memberikan masukan dalam mewujudkan Misi tata kelola pemerintahan yang baik adalah Pengawasan Internal Pemerintah. Peran pengawas internal sangat strategis karena harus mampu menjamin bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan.

Reformasi pengelolaan keuangan negara turut memperkuat eksistensi APIP, terutama terkait perannya dalam mendukung penguatan sistem pengendalian intern instansi pemerintah. Di dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah disebutkan bahwa untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian intern dilakukan pengawasan intern oleh APIP (pasal 47 dan 48). Dengan demikian pekerjaan utama APIP berdasarkan konsep PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah melakukan pengawasan intern

6) Administrasi Pemerintahan

Berkaitan dengan produk-produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD yang meliputi Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD, pada tahun 2016 jumlah raperda usulan/Inisiatif Dewan sebanyak 6 buah yang dibahas sidang DPRD dan telah ditetapkan menjadi perda sebanyak 4 Perda atau sekitar 66,66 %. Pada tahun 2017 jumlah raperda usulan/Inisiatif Dewan sebanyak 5 buah, dan ditetapkan menjadi perda sebanyak 1 buah, sedangkan pada tahun 2018 jumlah raperda usulan/Inisiatif dewan sebanyak 3 buah dan akan dibahas sidang DPRD pada tahun 2019.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah diharapkan mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Prinsip-prinsip tersebut diaplikasikan melalui proses demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai salah satu ujung tombak pembangunan.

Pada tahun 2010 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 yang mengamanatkan pemerintah daerah melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabiltas kinerja birokrasi.

Sejalan dengan upaya pembaharuan tersebut, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka salah satunya upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat. Hal tersebut Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017. Survey kepuasan masyarakat pada dasarnya merupakan pengukuran secara komperhensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari unit penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan hasil analisis data, capaian kepuasan masyarakat atas pelayanan publik di Kabupaten Lebak tahun 2018 melalui pelayanan kesehatan, pelayanan perijinan, pelayanan pajak daerah dan pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan kepada masyarakat secara umum telah terkategori sangat baik dengan capaian angka indeks sebesar 82,18 naik beberapa digit dari tahun 2017 sebesar 81,86. Hasil kontribusi tersebut dari 5 SKPD pemberi layanan yaitu bidang kesehatan sebesar 77.50 dari Puskesmas (Dinas Kesehatan) dan 81,97 dari RSUD dr. Adjidarmo, bidang kependudukan dan catatan sipil sebesar 83,92 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bidang perijinan sebesar 85,64 dari DPMPTSP dan Bapenda untuk pelayanan pajak daerah sebesar 81,87.

Tabel 2.77
Kinerja Pelayanan Publik per Unsur dan Unit Pelayanan
Tahun 2014 – 2018

No	Tahun	Rerata Penilaian Masyarakat						Mutu
		RSUD	PKM	DPM-PTSP	Disduk-capil	Ba-penda	Rerata	
1	2014	74,10	81,59	85,90	77,20	Belum di survey	79,70	Baik
2	2015	75,35	75,17	86,57	79,33	78,90	79,06	Baik

No	Tahun	Rerata Penilaian Masyarakat						Mutu
		RSUD	PKM	DPM-PTSP	Disduk-capil	Ba-penda	Rerata	
3	2016	77,29	76,57	87,14	83,48	82,83	81,46	Sangat Baik
4	2017	79,81	77.08	85,89	84,09	82,43	81,86	Sangat Baik
5	2018	**81.97**	**77.50**	**85.64**	**83.92**	**81.87**	**82.18**	Sangat Baik

Pada tahun 2017, kinerja pelayanan PATEN mulai dievaluasi meski masih terbatas pada 6 (enam) kecamatan, yaitu: Kecamatan Warunggunung, Bayah, Maja;, Cipanas, Malingping, dan Kecamatan Rangkasbitung. Keenam kecamatan tersebut dipilih mewakili 2 (dua) tipe wilayah kecamatan, yaitu tiga kecamatan yang berciri perkotaan, dan tiga kecamatan berciri perdesaan. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PATEN pada tahun 2017 lalu secara umum telah terkategori baik dengan capaian angka indeks sebesar 75,84. Tahun 2018 survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dilakukan di seluruh Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di 28 (duapuluh delapan) dengan capaian angka indeks sebesar 72,62 secara umum telah terkategori baik.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kabupaten Lebak merupakan sentra penghasil gula aren dengan jenis produk gula semut dan cetak yang telah memiliki sertifikat makanan organik internasional sehingga dapat menembus pasar Belanda, Italia, dan sejumlah negara Eropa lainnya. Kelebihan gula aren Lebak, selain organik yang menyehatkan juga cocok dijadikan pemanis berbagai jenis bahan makanan dan minuman. Produksi gula aren yang diekspor ke pasar mancanegara diperkirakan mencapai 50-70 ton per bulan, yang dikumpulkan dari Kecamatan Sobang, Panggarangan, Cigemblong, Cihara, Cibeber, dan Muncang.

Di sektor pertambangan, Kabupaten Lebak juga potensial dalam menghasilkan beragam produksi bahan-bahan tambang antara lain: emas, Fosfat, Obsidian, Tras, Batu Gamping, Batu Pasir Kuarsa, Opal, Kaolin, Zeolith, Batu Besi, Timah Hitam, Feldspar, Batu Apung, Lempung, Bentonit Ca, Batu Gunung (Andesit- Basalt), Perak, dan Fosil Kayu.Berlimpahnya bahan baku semen (batu gamping, tanah liat, dan batu kapur) di Kecamatan

Bayah, Cilograng, Panggarangan, Bojongmanik dan Muncang, memposisikan Lebak menjadi daerah yang menjanjikan bagi masuknya investor pabrik semen di masa depan. Industri batu sempur atau fosil kayu (Silicified wood) bahkan telah menembus pasar di sejumlah negara Eropa, Asia, dan Amerika Serikat. Sementara Zeolith yang merupakan bahan campuran pakan ternak, perikanan, atau tambak udang, bahan penurun kadar Ph tanah, bahan pengendali limbah insdustri, penjernih air minum, penghilang kesadahan air, dan penghilang bau/warna, belum banyak dieksploitasi meski potensinya sangat berlimpah di Kecamatan Bayah, yang mencapai lebih dari 123 juta ton. Kabupaten Lebak mewarisi sejumlah obyek wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan, baik wisata alam, wisata budaya, maupun wisata, spiritual. Dengan 13 obyek wisata marina, 27 wisata tirta, 16 obyek wisata sejarah, 1 suaka alam, serta 20 obyek wisata budaya dan lainnya, menjadikan pariwisata sangat potensial untuk dikembangkan di masa depan. Sebagai contoh: wisata alam pantai di Kecamatan Malingping, Panggarangan, dan Bayah; wisata alam lainnya Lebak Gedong (arung jeram) dan pemandian air panas di Cipanas. Demikian pula dengan potensi wisata budaya yang menjadi ikon Kabupaten Lebak, yang dapat ditemui pada Masyarakat Adat Cisungsang dan Citorek, Masyarakat Adat Kanekes, serta situs purbakala Kosala atau Lebak Sangka Kosala di Desa Lebak Gedong yang merupakan peninggalan tradisi megalitik berbentuk bangunan punden berundak dan menhir di tiap undakannya yang berjumlah lima; dan situs megalitik Cibedug yang terletak di Desa Citorek Barat Kecamatan Cibeber.

Kerajinan mebel dan perkakas berbahan baku bambu juga memiliki potensi ekspor yang tinggi, sebagaimana telah berkembang di daerah Pasir Ona Rangkasbitung Timur yang telah berhasil membuka pasar ekspor di Eropa dan Amerika Serikat.

B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Infrastruktur wilayah memiliki kontribusi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi infrastruktur wilayah bahkan secara langsung menjadi daya tarik bagi investor dalam mengembangkan rencana bisnisnya di suatu daerah. Terkait dengan hal ini, infrastruktur wilayah dimaksud adalah mencakup beberapa bidang, yaitu: jalan dan jembatan, sumber daya air dan irigasi, listrik dan energi, telekomunikasi, serta sarana dan prasarana permukiman. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah dalam konteks tata ruang bahkan tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah, serta pengikat wilayah.

1) Jalan dan Jembatan

Dibandingkan dengan daerah sekitar, Lebak memiliki keunggulan kompetitif dalam hal kualitas infrastruktur jalan yang kondisinya relatif lebih baik. Dari sekitar 772,13 km jalan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Lebak 50,39% dalam kondisi baik dan hanya 35,11% saja yang dalam kondisi rusak, terdiri dari rusak ringan sekitar 15,65%; rusak sedang sekitar 16,09%; dan rusak berat sekitar 17,88% saja. Tabel 2.82 menyajikan gambaran tentang kondisi jalan .

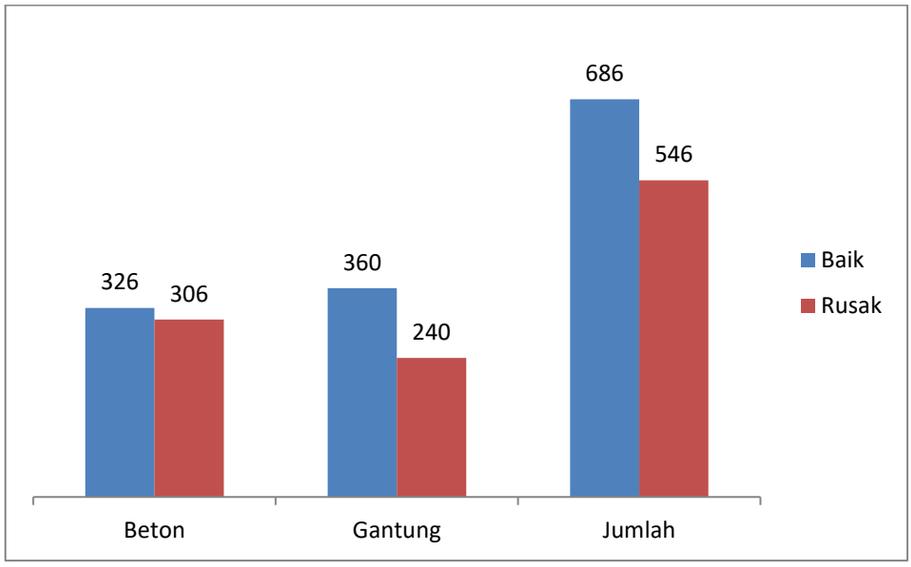
Tabel 2.78
Kondisi Jalan di Kabupaten Lebak
Tahun 2018

No	Kondisi	Panjang		Keterangan
1.	Total Jalan Kab/Kota	772.13	Km	Merupakan panjang jalan status kabupaten/kota berdasarkan SK Bupati/Walikota dilampirkan peta dan SK dimaksud
2.	Jumlah Jembatan Kabupaten	169.00	Unit	Merupakan jumlah dan panjang jembatan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota
3.	Panjang Jembatan Kabupaten	2,349.20	Meter	
4.	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	418,21	Km	Merupakan total panjang jalan dalam kondisi baik. Kriteria baik sesuai dengan juknis DAK yaitu nilai kerusakan jalan ≤ 11% (dilampirkan peta)
5.	Panjang Jalan dalam Kondisi Rusak Ringan	100.07	Km	Kriteria sedang sesuai dengan juknis DAK yaitu nilai kerusakan jalan 11 - < 16%
6.	Panjang Jalan dalam Kondisi Rusak Sedang	104,01	Km	Kriteria rusak sesuai dengan juknis DAK yaitu nilai kerusakan jalan 16 - < 23%
7.	Panjang Jalan dalam Kondisi Rusak Berat	149,84	Km	Kriteria rusak berat sesuai dengan juknis DAK yaitu nilai kerusakan jalan ≥ 23%
8.	Panjang Jalan Poros Desa	5,647.20	Km	Merupakan total panjang jalan poros desa berdasarkan SK Bupati/Walikota (dilampirkan peta dan data pendukung administrasinya/SK/Ketetapan lainnya)

Sumber : Dinas Bina Marga Kab. Lebak

Namun demikian harus diakui bahwa kondisi yang agak berbeda tampaknya nyata dihadapi pada insfrastruktur jembatan, dimana dari sebanyak 1.232 unit jembatan yang terdiri dari jembatan beton sebanyak 632 unit dan jembatan gantung sebanyak 600 unit, terdapat sekitar 48.42% jembatan beton dalam kondisi rusak dan 40 % jembatan gantung dalam kondisi rusak. Kondisi ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang harus menjadi prioritas untuk diselesaikan pada tahun mendatang.

Grafik 2.70
Kondisi Sarana Jembatan di Kabupaten Lebak
Tahun 2018



Sumber : Dinas PUPR Kab. Lebak

C. Fokus Iklim Berinvestasi

Pada periode tahun 2015-2017, angka kriminalitas di Kabupaten Lebak tercatat menurun, dari sebanyak 623 kasus pada tahun 2015, turun menjadi 568 kasus pada tahun 2016, dan turun kembali menjadi 499 kasus pada tahun 2017. Demikian pula dengan laporan gangguan kamtibmas yang sepanjang tahun 2017 hanya sebanyak 34 laporan dan seluruhnya telah dapat diatasi dengan baik. Dari kasus-kasus kriminalitas pada tiga tahun terakhir, rata-rata sekira 57%-nya telah selesai diproses secara hukum, yang menggambarkan tingkat efektifitas penegakan hukum di wilayah hukum Kabupaten Lebak.

Iklim investasi juga ditentukan oleh kualitas pelayanan publik yang terkait dengan pelayanan perijinan, dan penanaman modal yang diselenggarakan khususnya oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Berdasarkan identifikasi terhadap sejumlah produk hukum daerah, DPMPTSP Kabupaten Lebak menyelenggarakan sekira 40 jenis perijinan dengan proses perijinan yang sederhana serta waktu pelayanan yang berkisar 3 hari hingga paling lama 10 hari.

Tabel 2.79
Jenis Pelayanan Perijinan di DPMPTSP Kabupaten Lebak

NO	JENIS PERIJINAN	DASAR HUKUM	WAKTU PELAYANAN
1	Ijin Prinsip Penanaman Modal	Perka BKPM-RI No. 5 Tahun 2013	5 hari

NO	JENIS PERIJINAN	DASAR HUKUM	WAKTU PELAYANAN
2	Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	Perka BKPM-RI No. 5 Tahun 2013	5 hari
3	Ijin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	Perka BKPM-RI No. 5 Tahun 2013	5 hari
4	Ijin Prinsip Penggabungan Perusahaan Pananaman Modal	Perka BKPM-RI No. 5 Tahun 2013	5 hari
5	Ijin Usaha Untuk Berbagai Sektor Usaha	Perka BKPM-RI No. 5 Tahun 2013	5 hari
6	Ijin Usaha Perluasan Untuk Berbagai Sektor Usaha	Perka BKPM-RI No. 5 Tahun 2013	5 hari
7	Ijin Usaha Perubahan Untuk Berbagai Sektor Usaha	Perda No. 5 Tahun 2013	5 hari
8	Ijin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Untuk Berbagai Sektor Usaha	Perka BKPM-RI No. 5 Tahun 2013	5 hari
9	Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)	Perda No. 44 Tahun 2001	3 hari
10	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	Perda No. 9 Tahun 2010 Perubahannya Perda No. 9 Tahun 2012	3 hari
11	Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)	Perda No. 41 Tahun 2001 diubah dengan Perda No. 5 Tahun 2006	8 hari
12	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	Perda No. 16 Tahun 2008	3 hari
13	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Perda No. 4 Tahun 2009	3 hari
14	Tanda Daftar Gudang (TDG)	Perda No. 39 Tahun 2001	10 hari
15	Tanda Daftar Industri (TDI)	Perda No. 40 Tahun 2001	
16	Ijin Usaha Industri (IUI)	Perda No. 40 Tahun 2001	
17	Ijin Penyelenggaraan Reklame	Perda No.5 Tahun 1985/ Perda No. 4 Tahun 2008	
18	Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	Perda No. 34 Tahun 2001	10 hari
19	Ijin Pengusahaan Sarang Burung Walet	Perda No. 7 Tahun 2005	
20	Ijin Penebangan Kayu	Perda No.12 Tahun 2002	

NO	JENIS PERIJINAN	DASAR HUKUM	WAKTU PELAYANAN
21	Surat Ijin Usaha Kepariwisataan (SIUK)	Perda No. 32 Tahun 1996	
22	Ijin Pelayanan Kesehatan	Perda No. 7 Tahun 2003	
23	Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)	Perda No. 4 Tahun 2014	8 hari
24	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	SK Bupati Nomor 503/Kep.240-DPMPTSP/2017	9 hari
25	Surat Ijin Praktik	SK Bupati Nomor 503/Kep.240-DPMPTSP/2017	3 hari
26	Ijin Usaha Perkebunan (Budidaya, IUP-B) dan (Pengolahan, IUP-P)	Perka BPKM Nomor 14 Tahun 2015	5 hari
27	Ijin Usaha Simpan Pinjam (IUSP)	Permen Kop&UKM Nomor 02/PER/M/KUKM/ II/2017 Tahun 2017	3 hari
28	Ijin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR)	Peraturan Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2016	5 hari
29	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (IUMOT)	Permenkes No. 006 Tahun 2012	3 hari
30	Ijin Pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK)	Permenaker Nomor 39/2016 tentang penempatan tenaga kerja.	3 hari
31	Ijin Usaha Rumah Potong Hewan (IURPH)	UU Nomor 41/2014 tentang Peternakan & Kesehatan Hewan	3 hari
32	Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF)	Permendiknas 49 tahun 2007	5 hari
33	Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar (IPSPD)	Kepmendiknas No. 060/U /2002	5 hari
34	Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Pertama (IPSMP)	Kepmendiknas Nomor 060/U/2002	5 hari
35	Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C (RSKC)	Permenkes Nomor 411 Tahun 2010	3 hari
36	Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas D (RSKD)	Permenkes Nomor 411 Tahun 2010	8 hari

NO	JENIS PERIJINAN	DASAR HUKUM	WAKTU PELAYANAN
	Ijin Membuka Tanah (IMT)	Keputusan Kepala BPN Nomor 2/2003	3 hari
37	Ijin Pembuangan Air Limbah (IPAL)	Peraturan Menteri Negara LH Nomor 1/2010	3 hari
38	Tanda Daftar Peternakan Rakyat (TDPR)	UU Nomor 41/2014 tentang Peternakan & Kesehatan Hewan	5 hari
39	Izin Pengusaha Angkutan Kendaraan Bermotor (IPAKB)	Permenhub Nomor 35 Tahun 2003	3 hari
40	Ijin Usaha Toko Modern (IUTM)	Perpres Nomor 112 Tahun 2007	10 hari

Sumber: (http://simponie2.lebakkab.go.id/ [02/11/2018])

Iklim investasi yang kondusif juga berkaitan erat dengan sistem perpajakan dan retribusi di daerah yang efektif, akuntabel dan berkeadilan, sehingga lebih menjamin kepastian usaha di samping tidak bertendensi *high cost economy*. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2014, Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Bupati Lebak Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, serta Peraturan Bupati Nomor 38 tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur BPHTB, terdapat sebanyak 11 jenis pajak daerah serta 17 jenis retribusi daerah, sebagai berikut:

Tabel 2.80

Jenis Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Lebak

NO	PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
I	**HASIL PAJAK DAERAH**
1	Pajak Hotel
2	Pajak Restoran
3	Pajak Hiburan
4	Pajak Reklame
5	Pajak Penerangan Jalan
6	Pajak Parkir
7	Pajak Air Tanah
8	Pajak Sarang Burung Walet

NO	PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
9	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
10	Pajak Bumi dan Bangunan P2
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
II	**HASIL RETRIBUSI DAERAH**
A	**Retribusi Jasa Umum**
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4	Retribusi Pelayanan Pasar
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
B	**Retribusi Jasa Usaha**
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2	Retribusi Tempat Pelelangan
3	Retribusi Terminal
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir
5	Retribusi Rumah Potong Hewan
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
C	**Retribusi Perizinan Tertentu**
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian/Situ
3	Retribusi Izin Trayek
4	Retribusi Izin Usaha Perikanan

Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2018

D. Fokus Sumber Daya Manusia

Daya saing daerah juga berkaitan erat dengan beberapa dimensi dari fokus sumber daya manusia, seperti: rasio ketergantungan yang menggambarkan beban ketergantungan penduduk usia tidak produktif (jumlah penduduk usia < 15 tahun dan penduduk usia > 64 tahun) terhadap penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun). Demikian pula dengan analisis terhadap rasio lulusan S1/S2/S3, yaitu jumlah penduduk yang berpendidikan tinggi atau lulusan perguruan tinggi

setingkat S1, S2, dan S3 dibandingkan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan, yang secara makro dapat menggambarkan daya saing SDM di suatu wilayah.

Merujuk pada data BPS (2018), dengan jumlah penduduk usia kurang dari 15 tahun sebanyak 405.540 jiwa, dan penduduk usia lebih dari 65 tahun sebanyak 53.160 jiwa; maka *dependency ratio* di Kabupaten Lebak adalah berkisar pada angka 55,30 yang bermakna bahwa pada setiap 100 penduduk usia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 55 orang yang belum dan/ tidak lagi produktif. Rasio ketergantungan ini dikontribusi sebagian besar oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 48,90% persen, sedangkan kontribusi penduduk tua hanya sekira 6,41%.

Berdasarkan data BPS (2018) tentang tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Lebak, diperoleh informasi bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Lebak berpendidikan tamat SD/sederajat sekira 47,56%; 23,28% tidak tamat SD; 18,44% tamat SMP/sederajat; 8,25% berpendidikan setingkat SMA; dan hanya sekira 2,47% yang berpendidikan tinggi. Berdasarkan data tersebut maka rasio lulusan perguruan tinggi setingkat S1, S2, dan S3 terhadap jumlah penduduk adalah sebesar 247 yang bermakna bahwa dalam setiap 10.000 jiwa penduduk di Kabupaten Lebak terdapat sebanyak 247 orang lulusan perguruan tinggi, atau sekira 0,02% dari total penduduk usia 10 tahun ke atas.

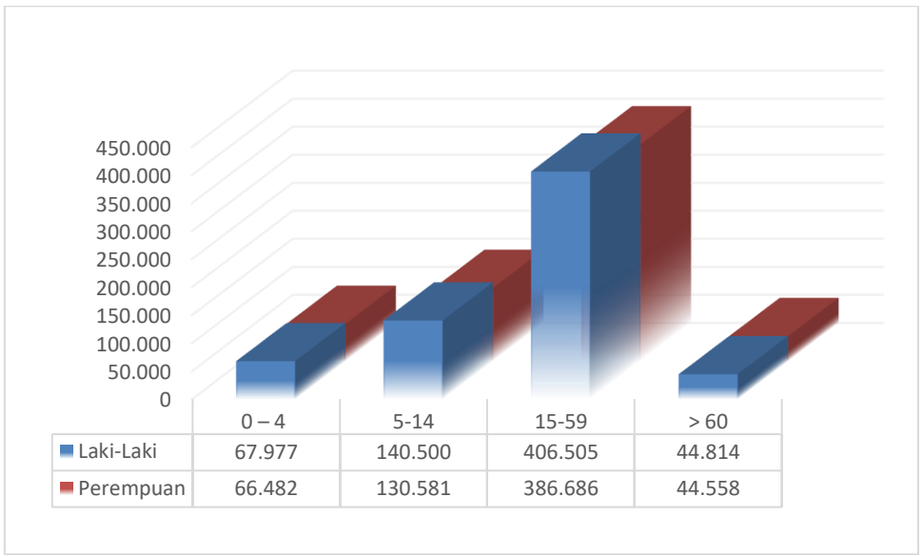
Meskipun demikian, Kabupaten Lebak memiliki modal sosial dan modal pembangunan yang menjadi daya saing daerah, yaitu jumlah aparatur sipil negara yang 62,86%-nya merupakan lulusan perguruan tinggi setingkat sarjana strata-1, magister, dan doktor; 19,08% merupakan lulusan perguruan tinggi setingkat program diploma, mulai dari diploma II hingga diploma IV. Hanya sekira 15,48% aparatur saja yagn berpendidikan SMA/sederajat; sisanya sekira 1,28% adalah tamatan SMP/sederajat; dan 1,29% lainnya adalah tamatan SD. Fakta ini dapat dimaknai sebagai daya saing faktual yang dimiliki oleh SDM Pemerintah Kabupaten Lebak, yang memiliki kualifikasi dan kesiapan untuk menyelenggarakan pelayanan publik, pemerintahan, dan pembangunan daerah secara profesional, guna mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lebak di masa depan.

Sumberdaya manusia merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan. Dengan sumberdaya manusia yang berkualitas menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengelola sumberdaya yang ada, memanfaatkan potensi yang ada di wilayahnya dan mampu menjawab permasalahan pembangunan yang ada.

Berdasarkan data sakernas periode Agustus 2012, jumlah angkatan kerja menurut pendidikan yang ditamatkan yaitu, 407.762 orang tidak pernah sekolah/tamat SD, 80.115 orang tamat SMP, 52.527 orang tamat SLTA dan 18.348 orang tamat perguruan tinggi.

Selain indikator di atas rasio ketergantungan merupakan salah satu aspek penentu dalam fokus sumberdaya manusia. Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Apabila dilihat dari jumlah penduduk Kabupaten Lebak menurut kelompok umur tahun 2017 seperti terlihat pada grafik 2.70, penduduk berdasarkan kelompok umur 0-4 tahun sebesar 405.540 jiwa, dan jumlah terbesar ada pada kelompok umur 15-59 tahun (usia produktif) yaitu mencapai 793.191 jiwa, ini menunjukkan bahwa untuk penduduk usia kerja/produktif sangat besar, setidaknya secara ekonomi beban yang ditanggung akan lebih kecil. Hal ini bisa tercapai apabila didukung dengan sumberdaya manusia yang lebih baik dan memadai.

Grafik 2.71
Jumlah Penduduk Kab. Lebak Menurut Kelompok Umur Tahun 2017



	0 – 4	5-14	15-59	> 60
Laki-Laki	67.977	140.500	406.505	44.814
Perempuan	66.482	130.581	386.686	44.558

Sumber : BPS Kab. Lebak

Berdasarkan kelompok umur tersebut dapat tergambar bahwa rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk sebesar 59,67 Ini berarti bahwa dari 100 orang usia produktif dapat menanggung beban sebanyak 60 orang yang termasuk bukan usia produktif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.88.

Tabel 2.81
Jumlah Penduduk & Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Lebak Tahun 2017

Kelompok Umur	L	P	Jumlah	Dependency Ratio
0 – 14	208.477	197.063	405.450	59,67
5 – 14	140.500	130.581	271.081	
15 – 59	406.505	386.686	793.191	
> 60	44.814	44.558	89.372	

Sumber : BPS Kab. Lebak

2.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM sebagaimana tabel 2.79.

Tabel 2.82
Kondisi Capaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Lebak Tahun 2018

NO	URUSAN	DASAR HUKUM	JENIS PELAYANAN	KONDISI 2018
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Pendidikan	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Dasar Dikabupaten/Kota		
			1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;	989 Sekolah

NO	URUSAN	DASAR HUKUM	JENIS PELAYANAN	KONDISI 2018
			2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;	15.429 Peserta Didik
			3. Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;	100 Sekolah
			4. Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.	20 Sekolah
			5. Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;	6.587 Guru
			6. Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;	2.488 Guru
			7. Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;	77,90%
			8. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35%dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik,	1.656 Guru

NO	URUSAN	DASAR HUKUM	JENIS PELAYANAN	KONDISI 2018
			untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;	
			9. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masingmasing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;	2.367 Guru
			10. Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	787 Sekolah
			11. Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	202 Sekolah
			12. Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	30 Pengawas
			13. Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan	989 Sekolah
			14. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.	202 Sekolah
2	Kesehatan	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan		
			a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;	88,81%

NO	URUSAN	DASAR HUKUM	JENIS PELAYANAN	KONDISI 2018
			b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;	74,14%
			c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;	82%
			d. Pelayanan kesehatan balita;	88,45%
			e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;	100%
			f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;	70%
			g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	43%
			h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;	70%
			i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;	70%
			j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	70%
			k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;	42%
			l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus). yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.	70%
3	Pekerjaan Umum	Peraturan Menteri Pekerjaan UmumNomor : 01/Prt/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		
			Jalan Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan indikator: 1. Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang	66,47%
			2. Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah kabupaten/kota.	100%

NO	URUSAN	DASAR HUKUM	JENIS PELAYANAN	KONDISI 2018
			Sumber Daya Air Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat dengan indikator : 1. Persentase tersedinya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari;dan	27,27%
			2. Persentase tersedinya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem pertanian	71,00%
			Cipta Karya 1. Penyediaan air minum dengan indikator persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman.	68,17%
			2. Penyediaan sanitasi dengan indikator :a) persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	70,82%
			b) persentase pengurangan sampah di perkotaan;	76,26%
			c) persentase pengangkutan sampah;	2,5%
			d) persentase pengoperasian Tempat Pembuangan Akhir (TPA);dan	90%
			e) persentase penduduk yang telayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun.	80,50%
			Penataan Ruang 1. Informasi Penataan Ruang dengan indikator persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100%
			2. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dengan indikator persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.	40%
			Jasa Konstruksi 1. Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi dengan indikator persentase tersedianya 7 (tujuh) jenis	75%

NO	URUSAN	DASAR HUKUM	JENIS PELAYANAN	KONDISI 2018
			informasi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI);dan	
			2. Perizinan Jasa Konstruksi dengan indikator persentase tersedianyalayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan	98%
4	Perumahan dan Kawasan permukiman	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/Prt/M/2014 Tentan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		
			1. Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan dengan indikator persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan;	1,6%
			2. Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan indikator persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan;	2.172 Unit
5	Sosial	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota		
			a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;	57,02%
			b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;	49,14%
			c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;	7,83%
			d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan	31,75%
			e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi	100%

NO	URUSAN	DASAR HUKUM	JENIS PELAYANAN	KONDISI 2018
			Korban Bencana daerah kabupaten/kota	
6	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimalsub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota		
			Jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana Daerah kabupaten/kota meliputi: a. pelayanan informasi rawan bencana;	1 kec
			b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan	28 kec
			c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	100%

2.6 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Berdasarkan pada kebijakan otonomi daerah, Pemerintah telah memberikan kesempatan yang luas bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan mengatur sendiri aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun budaya. Terkait hal tersebut, PEMDA memiliki kewenangan untuk membentuk suatu BUMD, yang memiliki peran strategis sebagai penyumbang pendapatan pada APBD.

BUMD menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Terdapat 2 (dua) bentuk BUMD yaitu : 1) Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham, dan 2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah.

Saat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak memiliki 4 (empat) unit BUMD yaitu :

1. PT. BPR Lebak Sejahtera, bergerak di bidang lembaga keuangan yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh PEMDA Lebak

2. PT. LKM Rangkasbitung, bergerak di bidang lembaga keuangan yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh PEMDA Lebak
3. PD. Lebak Niaga, bergerak di bidang *stone crusher*, sahamnya mayoritas dimiliki oleh PEMDA Lebak
4. PDAM Tirta Multatuli, bergerak di penyediaan air minum, sahamnya mayoritas dimiliki oleh PEMDA Lebak

Kebijakan peningkatan peran BUMD selanjutnya adalah antara lain pengembangan usaha diversifikasi PD. Lebak Niaga ke sektor pertanian dan Pembentukan BUMD Pasar.



BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan daerah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan merupakan unsur penting dalam mendukung terlaksananya good governance. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah, serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah, kapasitas fiskal daerah, serta tujuan pembangunan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, diperlukan analisis pelaksanaan APBD tahun sebelumnya untuk memperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Secara umum komponen APBD Kabupaten Lebak terdiri atas: (1) Komponen Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Komponen Belanja Daerah, yang di dalamnya terdapat Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung; dan (3) Komponen Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Oleh karenanya, untuk mengetahui kinerja pelaksanaan APBD tersebut dilihat dari capaian realisasi target pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dari yang direncanakan.

3.1.1.1 Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Upaya peningkatan, perluasan basis PAD dan mengupayakan optimalisasi Dana Perimbangan agar bagian daerah dapat diperoleh secara proporsional,ditempuh

melalui berbagai upaya seperti peningkatan pengawasan, koordinasi dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan.

Penetapan target Pendapatan Daerah dilaksanakan terutama pada penyusunan perencanaan penganggaran dengan memperhatikan potensi, dinamika, dan realisasi pendapatan tahun sebelumnya. Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak
Tahun Anggaran 2014 - 2018

No	Tahun Anggaran	Target Pendapatan Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Capaian Pendapatan Daerah (%)	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah (%)
1	2014	1.771.338.119.531,00	1.796.231.788.248,15	101,41	21,74
2	2015	2.211.644.380.758,00	2.237.617.202.823,24	101,17	24,57
3	2016	2.481.918.017.339,00	2.496.433.196.982,56	100,58	11,57
4	2017	2.444.880.177.995,00	2.421.101.201.524,28	99,03	2,70
5	2018*)	2.511.747.359.526,00	2.504.180.503.495,84	99,70	3,43

Sumber : BPKAD, 2018

Keterangan: *) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (*unaudited*) Tahun 2018

Secara umum, Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari target Pendapatan Daerah Tahun 2014 sebesar Rp1.771.338.119.531,-menjadi Rp2.511.747.359.526,- pada perubahan APBD tahun 2018 atau mengalami peningkatan sebesar Rp740.409.239.995,- atau sebesar 41,79%. Dari segi realisasi, pendapatan daerah mengalami peningkatan dari sebesar Rp. 1.796.231.788.248,15 pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp. 2.504.180.503.495,84 pada tahun 2018 atau meningkat sebesar Rp. 707.948.715.247,69 (39,41%). Peningkatan tersebut menunjukan adanya dampak dari upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang telah dilaksanakan serta gencarnya komunikasi yang dilaksanakan dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Meskipun demikian, apabila ditelaah lebih mendalam, fluktuasi target pendapatan dan capaian realisasi pendapatan masih terjadi pada kurun tahun 2014-2018.

Fluktuasi target dan realisasi pendapatan daerah dimaksud sangat terasa pada tahun 2017 dimana terjadi penurunan target pendapatan daerah. Kabupaten Lebak merupakan daerah yang memiliki indeks kapasitas fiskal dalam kategori tinggi (1,63) berdasarkan rasio kemadirian daerah Peraturan Menteri Keuangan RI No 119/PMK.07/2017 tentang Peta Kapasitas Fiskal daerah, namun memiliki rasio kemandirian daerah yang relatif rendah sebesar 19,63% berdasarkan rasio target Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer pada Perda P-APBD TA.2017. Hal ini menyebabkan masih tingginya ketergantungan daerah

pada dana transfer pemerintah pusat. Pada tahun 2017, terjadi penurunan Dana Alokasi Khusus Pemerintah Kabupaten Lebak yang dialokasikan pemerintah pusat. Hal inilah yang menyebabkan total pendapatan daerah mengalami penurunan.

Realisasi Pencapaian Target pendapatan daerah secara umum diatas 100%. Meski pada tahun 2017 realisasi pendapatan hanya mencapai 99,03%. Salah satu penyebab tidak tercapainya target realisasi pendapatan tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus yang tidak tersalur dan realisasi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak. Meskipun demikian, target indikator kinerja utama Kabupaten Lebak pada tahun 2017 tetap tercapai. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebak berupaya untuk selalu meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat agar target rencana pencairan dana transfer dapat terpenuhi tepat waktu.

Berkaca pada pengalaman di tahun 2017, peningkatan pendapatan daerah ditargetkan kembali meningkat pada tahun 2018 yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, pendapatan hibah, dan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi. Peningkatan tersebut secara definitif dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. Komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat yang terus dijaga pada akhirnya membawa dampak positif yang signifikan sehingga pada pelaksanaannya, seluruh dana transfer dari pusat terealisasi lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Total realisasi pendapatan daerah di tahun 2018 menjadi 99,70%, mengalami peningkatan dibanding tahun 2017 yang hanya sebesar 99,03%.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

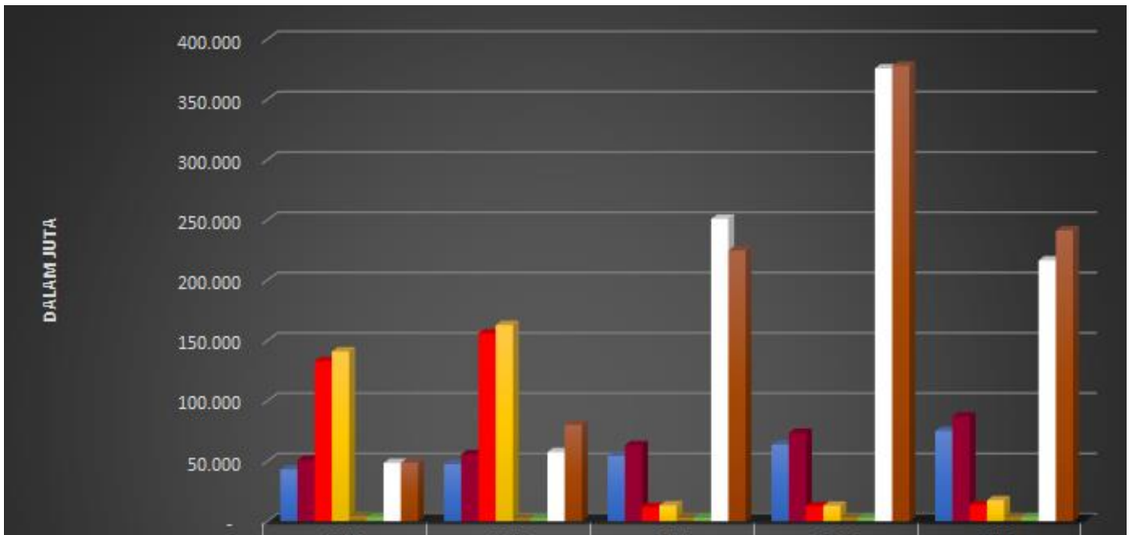
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber dana yang realisasi penerimaannya selalu diupayakan untuk terus meningkat guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta meningkatkan kemandirian daerah dalam melakukan pembiayaan pembangunannya. Oleh karena itu pemerintah daerah selalu berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya dalam rangka mendukung belanja daerah untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Lebak. Hal ini terlihat dari besaran target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diformulasikan dalam APBD Kabupaten Lebak selalu meningkat, meski besaran target PAD secara makro diproyeksi fluktuatif.

Sementara dari sisi realisasi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara umum selalu mengalami peningkatan. Hal ini merupakan hasil upaya-upaya intensifikasi pendapatan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak. Meskipun demikian, penurunan terjadi pada target PAD tahun 2018 dibandingkan target tahun 2017, yang diakibatkan oleh kebijakan pusat dimana Dana BOS diakui menjadi penerimaan Dana BOS pada Lain-lain PAD yang Sah sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017. Sementara pada tahun 2018, berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018, pendapatan

Dana BOS dicantumkan dalam pendapatan hibah Dana BOS pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dari segi realisasi, tercatat bahwa pada Tahun 2015 realisasi PAD sebesar Rp.301.542.032.432,24 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp.57.093.978.775,09 atau 23,36%. Peningkatan terbesar dari realisasi PAD Kabupaten Lebak diperoleh pada Tahun 2017 yaitu sebesar Rp.162.988.606.243,72 atau 53,53% dari realisasi Tahun sebelumnya. Sedangkan untuk Tahun 2018 telah terealisasi sebesar Rp.349.484.458.530,84 atau 113,13%. Rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak dapat dilihat pada infografis berikut.

Grafik 3.1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak
Tahun Anggaran 2014 – 2018



	2014	2015	2016	2017	2018
TARGET PAJAK	43.051.764.040	47.579.654.116	54.185.808.000	63.562.995.000	75.116.364.000
REALISASI PAJAK	51.035.621.198	55.820.656.720	63.133.114.649	73.390.964.885	86.985.737.190
TARGET RETRIBUSI	132.952.801.600	155.996.619.300	11.917.919.640	12.463.373.350	13.600.992.100
REALISASI RETRIBUSI	140.986.605.640	162.923.495.725	13.441.124.227	12.944.962.598	17.553.632.004
TARGET HASIL PKD	4.668.723.927	2.685.379.426	3.116.528.198	3.195.024.706	3.699.552.600
REALISASI HASIL PKD	3.715.635.556	2.671.126.989	3.134.789.318	3.195.024.706	3.699.552.637
TARGET LAIN-LAIN PAD	48.523.451.111	57.567.963.750	250.946.958.737	375.721.958.031	216.495.683.460
REALISASI LAIN-LAIN PAD	48.710.191.263	80.126.752.998	224.776.903.744	377.943.585.992	241.245.536.700

Sumber : BPKAD, 2018

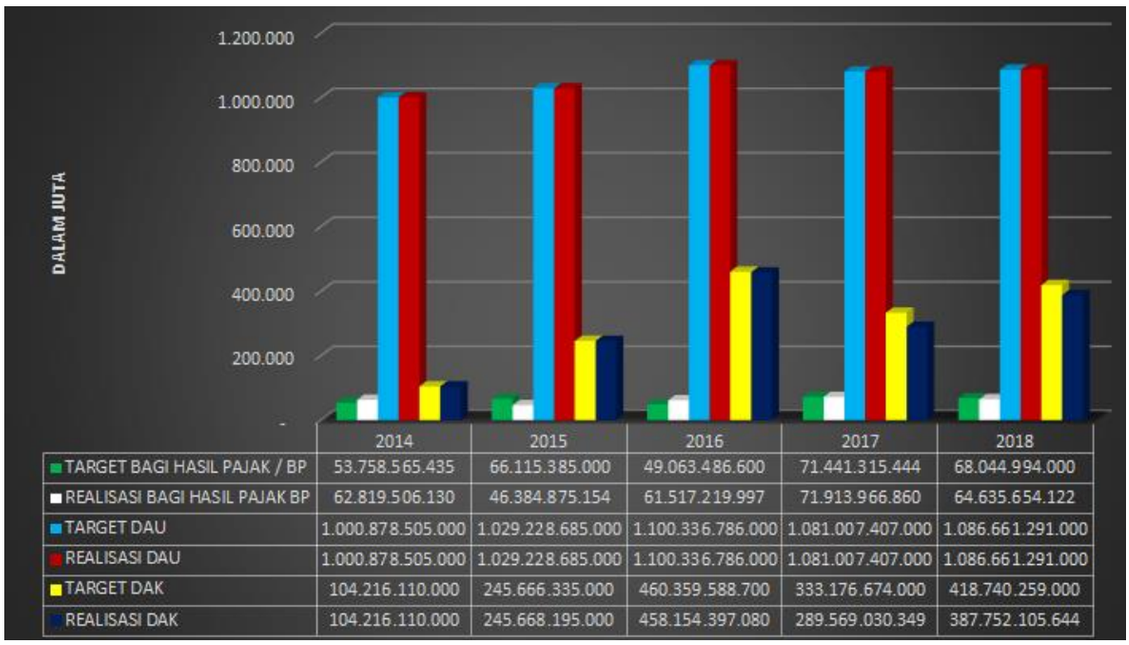
Keterangan: *) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (*unaudited*) Tahun 2018

b. Dana Perimbangan

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada dasarnya dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kebijakan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan agar kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggungjawab daerah dapat dibiayai

dari sumber-sumber penerimaan yang ada. Desentralisasi fiskal pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan dengan kebijakan ketahanan fiskal yang berkesinambungan dalam konteks kebijakan makro, memperkecil ketimpangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengkoreksi ketimpangan - ketimpangan antara daerah dalam kemampuan keuangan, meningkatkan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sektor publik. Rincian perbandingan antara target dan realisasi Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Lebak dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 dapat dilihat pada infografis berikut ini.

Grafik 3.2
Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Lebak
Tahun Anggaran 2014 – 2018



	2014	2015	2016	2017	2018
TARGET BAGI HASIL PAJAK / BP	53.758.565.435	66.115.385.000	49.063.486.600	71.441.315.444	68.044.994.000
REALISASI BAGI HASIL PAJAK BP	62.819.506.130	46.384.875.154	61.517.219.997	71.913.966.860	64.635.654.122
TARGET DAU	1.000.878.505.000	1.029.228.685.000	1.100.336.786.000	1.081.007.407.000	1.086.661.291.000
REALISASI DAU	1.000.878.505.000	1.029.228.685.000	1.100.336.786.000	1.081.007.407.000	1.086.661.291.000
TARGET DAK	104.216.110.000	245.666.335.000	460.359.588.700	333.176.674.000	418.740.259.000
REALISASI DAK	104.216.110.000	245.668.195.000	458.154.397.080	289.569.030.349	387.752.105.644

Sumber : BPKAD, 2018

Keterangan: *) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (*unaudited*) Tahun 2018

Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa target Dana Perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Lebak rata-rata mengalami peningkatan setiap tahunnya. Capaian realisasi dana perimbangan setiap tahun pun mengalami Pada tahun 2014, total realisasi dana perimbangan mencapai Rp.1.167.914.121.130,- dan meningkat 4,91% pada tahun 2015 menjadi Rp.1.225.309.630.154,-. Dengan dimasukannya dana alokasi non fisik pada pendapatan dana perimbangan, realisasi pendapatan dana perimbangan pun meningkat 32,21% pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp.1.620.008.430.077,-. Realisasi pada tahun 2017 dan 2018 lebih rendah dibandingkan tahun 2016. Hal ini selaras dengan target dana perimbangan tahun 2017 dan 2018 yang juga mengalami penurunan.

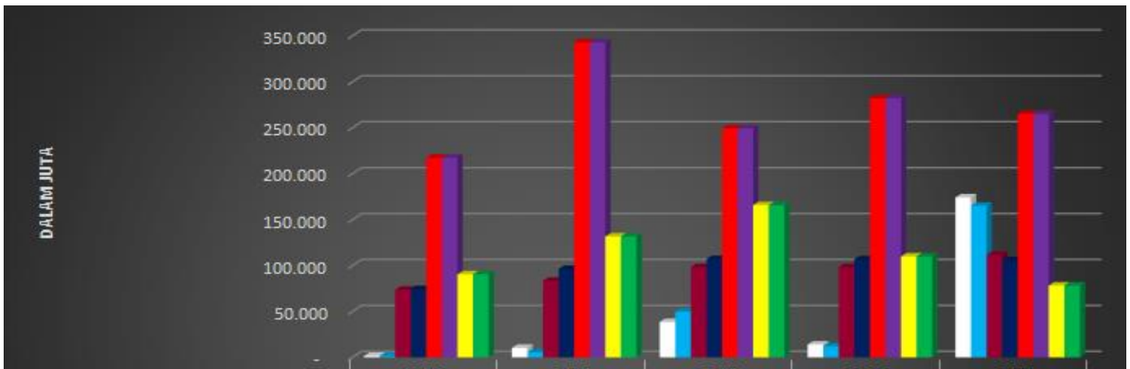
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain - lain pendapatan yang sah dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun pihak lainnya yang terdiri dari komponen Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, serta Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Besaran untuk setiap komponen lain–lain pendapatan yang sah ini telah diatur oleh peraturan perundang–undangan.

Berdasarkan data tahun 2014 hingga semester pertama tahun anggaran 2018 bahwa target penerimaan Lain - Lain Pendapatan yang Sah mengalami fluktuasi pada periode Tahun 2014 - 2018. Pada Tahun 2015 penerimaan dari Lain - Lain Pendapatan yang Sah meningkat sebesar Rp.223.516.160.748,00 atau 58,32% dari tahun sebelumnya dan pada Tahun 2016 menurun sebesar Rp.54.813.417.702,00 atau 9,03%. Hal yang sama juga terjadi pada Tahun 2017 dengan penurunan sebesar Rp.47.679.511.000,00atau 8,63% dibandingkan tahun 2016. Pada Perda P-APBD Tahun Anggaran 2018 terjadi peningkatan lagi sebesar Rp.125.076.792.902,00 atau 24,80% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Untuk realisasi Lain – Lain Pendapatan yang Sah dari Tahun 2014-2018 mengalami dinamika sesuai dengan targetnya. Pada Tahun 2015, realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah mengalami peningkatan sebesar Rp. 230.923.801.776,00 atau 60,16% dari tahun 2014. Sedangkan realisasi pada Tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan sebesar 6,97% dan 10,63% dari tahun sebelumnya. Adapun secara terinci perbandingan antara target dan realisasi dari Lain – Lain Pendapatan yang Sah dapat dilihat pada infografis berikut.

Grafik 3.3
Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
Tahun Anggaran 2014 – 2018



	2014	2015	2016	2017	2018
TARGET PENDAPATAN HIBAH	1.692.000.000	10.398.890.00	38.607.502.00	14.000.000.00	174.181.703.0
REALISASI PENDAPATAN HIBAH	1.690.400.000	5.507.360.000	49.917.500.55	12.226.000.00	165.174.461.2
TARGET BAGI HASIL PAJAK PROV	73.804.597.41	83.435.487.66	98.289.843.46	98.289.843.46	111.773.323.3
REALISASI BAGI HASIL PAJAK PROV	74.379.651.86	96.308.670.98	107.076.351.5	106.888.588.4	105.826.195.8
TARGET DP & OK	217.357.669.0	343.113.705.0	249.331.894.0	282.021.587.0	265.133.197.0
REALISASI DP & OK	217.357.669.0	343.113.705.0	249.331.894.0	282.021.585.7	265.128.424.4
TARGET BANEKU	90.433.932.00	131.726.276.5	165.761.702.0	110.000.000.0	78.300.000.00
REALISASI BANKEU	90.433.932.00	131.726.276.5	165.610.738.1	110.000.000.0	78.300.000.00

Sumber : BPKAD, 2018

Keterangan: *) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (*unaudited*) Tahun 2018

3.1.1.2 Realisasi Belanja Daerah

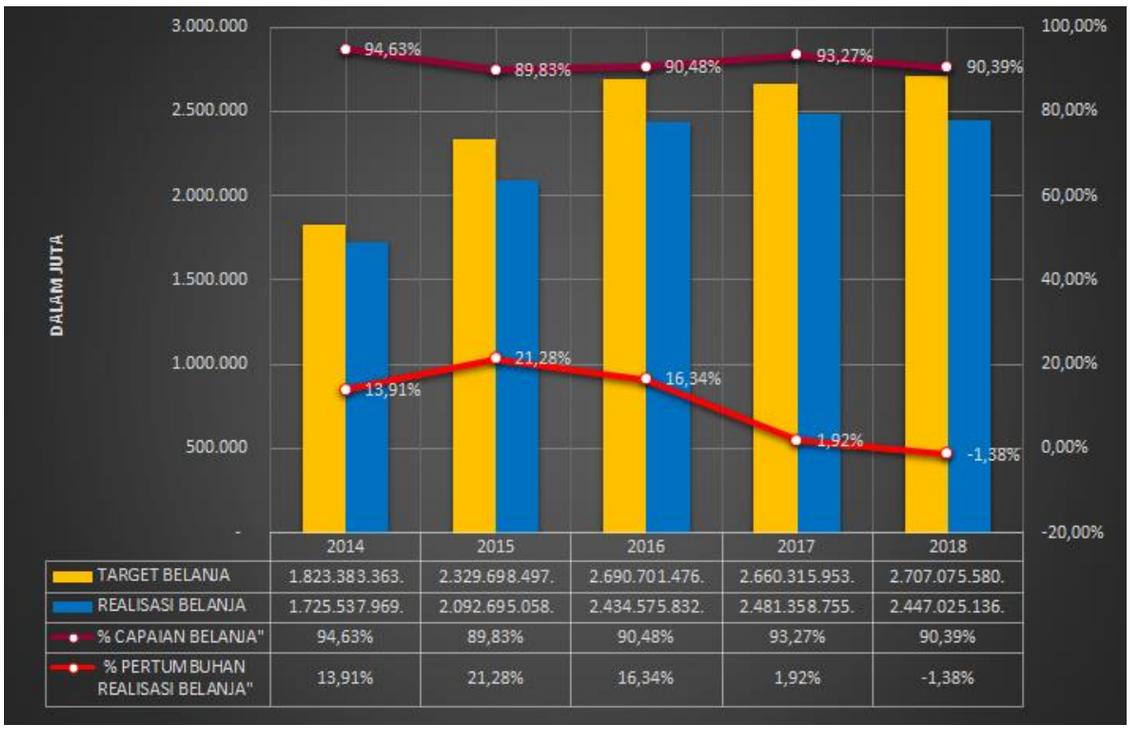
Belanja daerah merupakan semua pengeluaran yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja Daerah terdiri atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung digunakan untuk Belanja Pegawai, Belanja Subsidi, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, dan Belanja Tidak Terduga. Sedangkan Belanja Langsung digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas baik untuk urusan wajib/pilihan maupun urusan pendukung yang akan dilaksanakan oleh seluruh organisasi perangkat daerah.

Pada Tahun 2014 hingga 2018 Pemerintah Kabupaten Lebak berupaya untuk senantiasa meningkatkan sumber - sumber pendapatan sebagai sumber dana bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Target Belanja Daerah setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dari semula hanya berkisar pada angka 1,8 Triliun Rupiah pada Tahun 2014 menjadi 2,7 Triliun Rupiah pada Tahun 2018 atau mengalami pertumbuhan target sebesar 49,08%.

Jika dilihat dari realisasi belanja daerah, nampak bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak tergolong memuaskan mengingat tingkat serapan anggaran belanja rata-rata mencapai 90% yang mengindikasikan bahwa perencanaan anggaran belanja mampu memenuhi prinsip *value for money* (efektif dan efisien). Tercatat pada Tahun 2014, realisasi belanja daerah sebesar Rp.1,7 Triliun Rupiah atau 94,63% dari target yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2014, dan terakhir pada tahun 2017 realisasi belanja mencapai 93,27% dari yang ditargetkan sebesar Rp.2,6 Triliun Rupiah. Sementara realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2018 berada pada kisaran 90,39% dari yang ditargetkan sebesar Rp.2.707.075.580.543,81 sebagaimana Raperda P-APBD TA 2018.

Persentase realisasi belanja pada Tahun 2014 mengalami peningkatan capaian realisasi belanja daerah tertinggi yaitu sebesar 94,63% dan capaian terendah pada Tahun 2015 yaitu sebesar 89,83%. Sedangkan pertumbuhan realisasi belanja daerah tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 21,28% dan terendah terjadi pada Tahun 2017 yaitu sebesar 1,92%.

Grafik 3.4
Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
Tahun Anggaran 2014 – 2018



	2014	2015	2016	2017	2018
TARGET BELANJA	1.823.383.363.	2.329.698.497.	2.690.701.476.	2.660.315.953.	2.707.075.580.
REALISASI BELANJA	1.725.537.969.	2.092.695.058.	2.434.575.832.	2.481.358.755.	2.447.025.136.
% CAPAIAN BELANJA"	94,63%	89,83%	90,48%	93,27%	90,39%
% PERTUMBUHAN REALISASI BELANJA"	13,91%	21,28%	16,34%	1,92%	-1,38%

Sumber : BPKAD, 2018

Keterangan: *) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (*unaudited*) Tahun 2018

3.1.1.3 Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dengan tujuan untuk menutup defisit anggaran dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Pemerintah Kabupaten Lebak menerapkan kebijakan defisit anggaran dalam penganggaran semata-mata untuk memenuhi kebutuhan belanja dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan memperhitungkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada tahun anggaran sebelumnya sebagai sumber pembiayaan utama untuk menutupi defisit anggaran tersebut. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dimana masing – masing terdiri atas:

1. Untuk Penerimaan Pembiayaan, meliputi Jenis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, transfer/pencairan dari Dana Cadangan, Penerimaan kembali Pinjaman dan Obligasi maupun Hasil Penjualan Aset yang Dipisahkan;
2. Untuk Pengeluaran Pembiayaan, meliputi Jenis Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Utang Pokok yang telah Jatuh Tempo.

Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah penggunaan SiLPA tahun sebelumnya hasil audit BPK-RI terhadap LKPD yang kemudian digunakan/dicantumkan pada Perubahan APBD tahun anggaran berikutnya untuk membiayai hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat fisik dan telah dituangkan dalam kontrak untuk memenuhi biaya pada masa pemeliharaan (retensi);
2. Mengakomodir kembali kegiatan-kegiatan yang pendanaannya dari pusat dan telah tersalur ke Kas daerah pada program kegiatan berkenaan sesuai pedoman/petunjuk pelaksanaannya;
3. Kegiatan-kegiatan prioritas;

Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2014 - 2018 diarahkan untuk :

1. Pembentukan dana cadangan untuk pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2018 – 2023 sebesar Rp. 55.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tanggal 10 Oktober 2016.
2. Penambahan penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Jabar Banten, PD BPR Warunggunung dan PT LKM Rangkasbitung.

Pembiayaan daerah yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak selama kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan bahwa perencanaan penganggaran berjalan dengan baik. Hal ini terlihat melalui realisasi pembiayaan daerah yang mendekati perencanaan awal sehingga rasio capaian pembiayaan daerah selalu berada di kisaran 100%, terutama pada kelompok penerimaan pembiayaan daerah. Sumber penerimaan pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, terutama berasal dari anggaran pemeliharaan kontraktual (retensi), sisa anggaran belanja yang tidak terserap, pengembalian belanja, dan pelampauan pendapatan. Hal ini berimplikasi pada pola rencana penerimaan pembiayaan yang fluktuatif. Berdasarkan grafik rencana dan realisasi penerimaan pembiayaan, terlihat bahwa penerimaan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lebak telah sesuai dengan yang ditargetkan

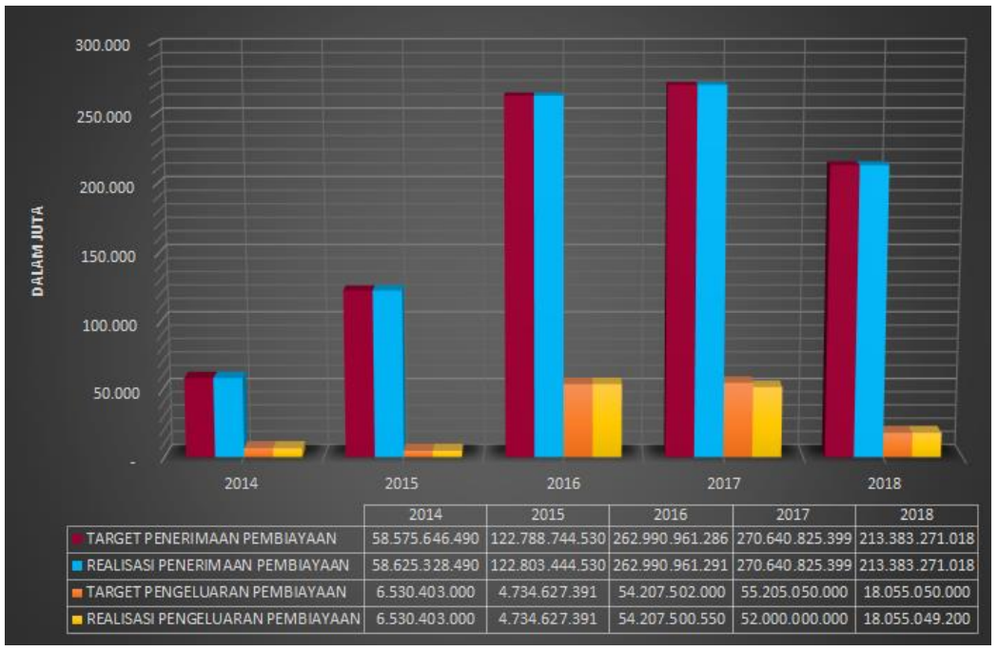
Dalam kurun waktu Tahun 2014 - 2018, realisasi penerimaan pembiayaan selalu di atas 100% bahkan pada Tahun 2014 dan Tahun 2015 terjadi surplus penerimaan pembiayaan daerah dari yang ditargetkan. Pada Tahun 2014 terjadi surplus sebesar Rp. 49.682.000,00 atau 0,08% dari yang ditargetkan, sedangkan pada Tahun 2015 tercatat surplus sebesar Rp. 14.700.000,00 atau 0,01% dari yang ditargetkan.Pertumbuhan realisasi penerimaan pembiayaan daerah ini menunjukkan trend pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2014, penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA lebih rendah Rp. 43.856.766.732,00 dibandingkan penerimaan pembiayaan pada tahun 2013. Perbedaan tersebut bersumber dari nilai SiLPA tahun 2014 yang lebih rendah dibandingkan tahun 2013. Hal inilah yang menyebabkan angka pertumbuhan realisasi ini menjadi negatif. Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016, realisasi penerimaan pembiayaan

daerah yang mengalami pertumbuhan signifikan yaitu sebesar 109,47% dan 114,16%. Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebagian besar berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang diluncurkan (retensi/masa pemeliharaan kegiatan kontraktual), sisa anggaran belanja yang tidak terserap, pengembalian belanja, dan pelampauan pendapatan.

Dalam pengeluaran pembiayaan daerah, Pemerintah Kabupaten Lebak senantiasa berupaya untuk mengarahkan pengeluaran pembiayaan kepada kegiatan-kegiatan produktif yang memberi *multiplier effect* terhadap perekonomian daerah, seperti penyertaan modal (investasi) kepada Perusahaan Daerah serta pembentukan dana cadangan untuk kegiatan yang membutuhkan pendanaan cukup besar yang tidak dapat dilakukan dalam satu tahun anggaran.

Selama tahun 2014-2018, pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Lebak selalu terealisasi sebesar 100 %, realisasi terendah hanya terjadi pada Tahun 2017 dengan realisasi sebesar 94,19 %. Hal ini akibat dari tidak terserapnya Rencana penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak kepada Bank Jabar Banten sebesar Rp. 3.205.050.000,00 dengan mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) mengingat sampai dengan tahun anggaran berakhir belum mendapatkan ijin dari Kementerian Dalam Negeri dan baru akan disalurkan pada Tahun 2018 setelah proses perijinan keluar sehingga dana tersebut dianggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2018. Tetapi jika dilihat dari pertumbuhannya, pada Tahun 2016 yang mengalami realisasi peningkatan signifikan yaitu sebesar1044,92% karena Pemerintah Daerah mulai melakukan pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sedangkan laju pertumbuhan yang mengalami penurunan terjadi pada Tahun 2015 dengan penurunan realisasi sebesar 27,50% dari tahun sebelumnya.

Grafik 3.5
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2014 – 2018



	2014	2015	2016	2017	2018
TARGET PENERIMAAN PEMBIAYAAN	58.575.646.490	122.788.744.530	262.990.961.286	270.640.825.399	213.383.271.018
REALISASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN	58.625.328.490	122.803.444.530	262.990.961.291	270.640.825.399	213.383.271.018
TARGET PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.530.403.000	4.734.627.391	54.207.502.000	55.205.050.000	18.055.050.000
REALISASI PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.530.403.000	4.734.627.391	54.207.500.550	52.000.000.000	18.055.049.200

Sumber : BPKAD, 2018

Keterangan: *) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (*unaudited*) Tahun 2018

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca Daerah akan memberikan informasi pentingkepada manajemen Pemerintahan Daerah, pihak Legislatif Daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau asetdaerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana masa manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Nilai Aset Pemerintah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.4.163.883.674.058,52 dengan rincian dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.2
Rincian Aset Kabupaten Lebak

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
1	Aset Lancar	453.382.525.197,96	281.716.952.694,97
2	Investasi Jangka Panjang	130.967.173.852,57	110.870.573.848,37
3	Aset Tetap	3.520.218.991.348,90	3.866.967.586.336,66
4	Dana Cadangan	0,00	55.000.000.000,00
5	Aset Lainnya	59.314.983.659,09	61.051.392.992,09
JUMLAH		**4.163.883.674.058,52**	**4.375.606.505.872,09**

Sumber : BPKAD, 2018

Keterangan: *) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (*unaudited*) Tahun 2018

a. Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2018 sebesar Rp.453.382.525.197,96 dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Rincian Aset Lancar Kabupaten Lebak

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
1	**Kas dan Setara Kas**	**252.483.588.550,45**	**158.388.634.716,81**
	a. Kas di Kas Daerah	179.537.734.903,00	118.748.551.228,00
	b. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	126.970.200,00
	c. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	5.050.574,00	5.363.699,00
	d. Kas di Bendahara Penerimaan	6.470.500,00	21.317.500,00
	e. Kas di Bendahara FKTP	10.644.706.283,45	6.236.464.601,81
	a. Kas di Bendahara BLUD	61.202.502.276,00	31.450.156.511,00
	b. Kas Lainnya	1.087.124.014,00	1.799.810.977,00
2	**Piutang**	**34.919.214.533,12**	**31.634.351.496,15**
	a. Piutang Pajak	16.684.435.772,00	23.382.560.534,00
	b. Piutang Retribusi	346.978.968,00	346.933.968,00
	c. Piutang Bagi Hasil Provinsi	10.417.989.356,00	5.373.712.290,00
	d. Beban di Bayar di Muka	402.500.553,60	401.346.821,50
	e. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	765.408.610,00	767.108.610,00
	f. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	192.520.000,00	319.103.600,00
	g. Piutang Lainnya	19.694.415.657,00	21.270.939.309,00
	h. Penyisihan Piutang	(13.585.034.383,48)	(20.227.353.636,35)
3	**Persediaan**	**165.979.722.114,39**	**91.693.966.482,00**
	J U M L A H	**453.382.525.197,96**	**281.716.952.694,97**

Sumber : BPKAD, 2018

Keterangan: *) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (*unaudited*) Tahun 2018

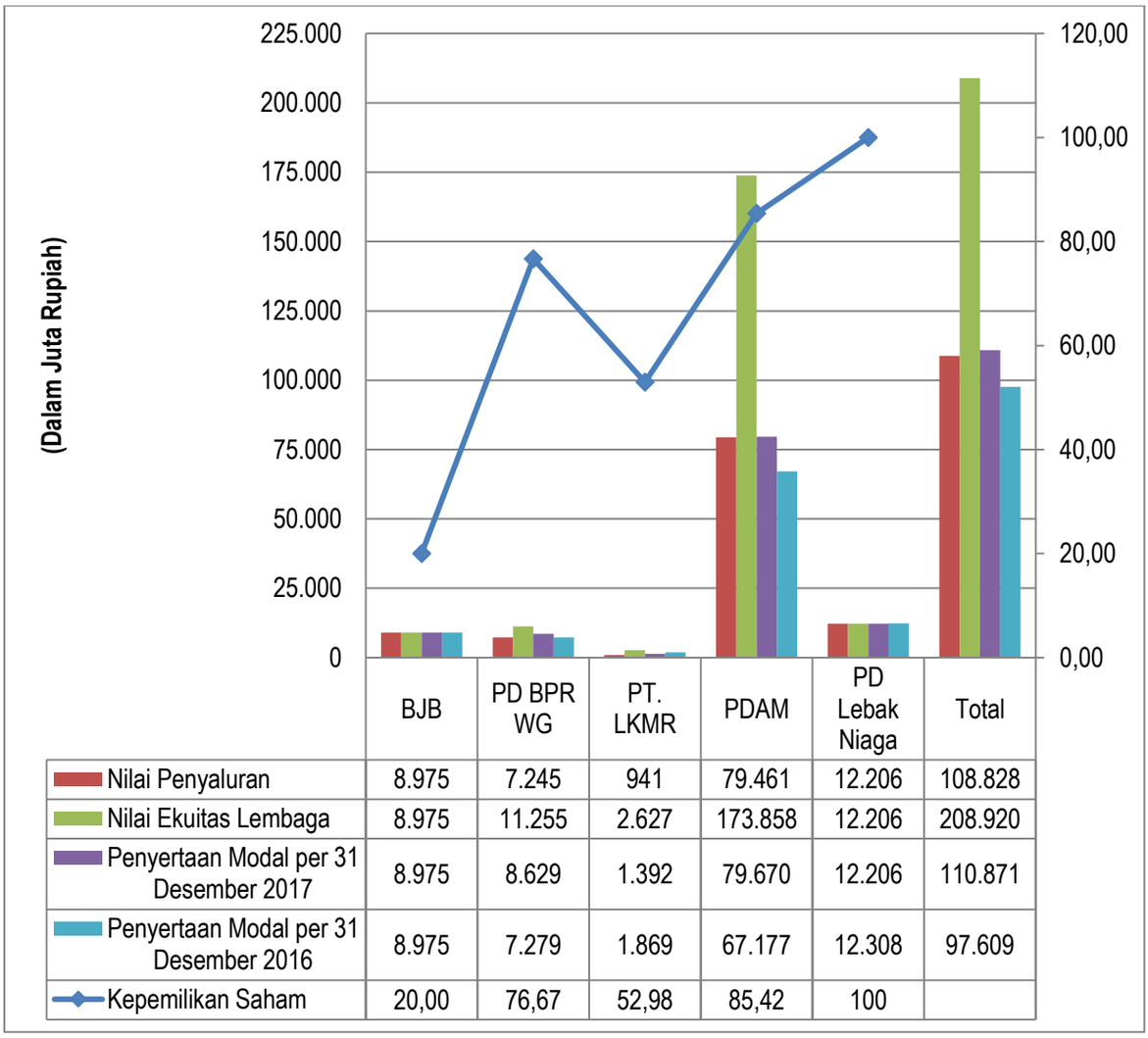
b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen. Penambahan investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak berdasarkan P-APBD Tahun 2018 kepada Perusahaan Daerah sebesar Rp.18.055.050.000,00 yang diperuntukkan bagi PDAM Tirta Multatuli, Bank Jabar Banten, PD. BPR Warunggunung, dan PT. LKM Rangkasbitung dengan rincian sebagai berikut :

1. PDAM Tirta Multatuli sebesar Rp. 12.000.000.000,00
2. Bank Jabar Banten sebesar Rp. 3.205.050.000,00
3. PD. BPR Warunggunung sebesar Rp. 1.350.000.000,00
4. PT. LKM Rangkasbitung sebesar Rp. 1.500.000.000,00

Nilai investasi per 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.130.967.173.852,57 yang dihitung berdasarkan metode ekuitas untuk nilai investasi lebih dari 20% dan metode biaya untuk nilai investasi kurang dari 20%. Rincian Investasi Kabupaten Lebak dapat dilihat pada infografis berikut.

Grafik 3.6
Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak



	BJB	PD BPR WG	PT. LKMR	PDAM	PD Lebak Niaga	Total
Nilai Penyaluran	8.975	7.245	941	79.461	12.206	108.828
Nilai Ekuitas Lembaga	8.975	11.255	2.627	173.858	12.206	208.920
Penyertaan Modal per 31 Desember 2017	8.975	8.629	1.392	79.670	12.206	110.871
Penyertaan Modal per 31 Desember 2016	8.975	7.279	1.869	67.177	12.308	97.609
Kepemilikan Saham	20,00	76,67	52,98	85,42	100	

Sumber : BPKAD, 2018

Keterangan: *) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (*unaudited*) Tahun 2018

c. Aset Tetap

Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.3.520.218.991.348,90 dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 5.73 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Nilai Buku Aset Tetap Per 31 Desember 2018

NO	URAIAN	PER 31 DESEMBER 2018		
		NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	Tanah	529.681.713.827,34	0,00	529.681.713.827,34
2	Peralatan dan Mesin	504.436.051.575,54	(347.956.611.492,77)	156.479.440.082,77
3	Gedung dan Bangunan	1.127.075.400.026,74	(367.457.968.339,44)	759.617.431.687,30
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.820.903.726.608,46	(2.904.006.485.150,67)	1.916.897.241.457,79
5	Aset Tetap Lainnya	148.833.466.863,75	0,00	148.833.466.863,75
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	8.709.697.430,00	0,00	8.709.697.430,00
Jumlah		**7.139.640.056.331,83**	**(3.619.421.064.982,93)**	**3.520.218.991.348,90**

Sumber : BPKAD, 2018

Keterangan: *) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (*unaudited*) Tahun 2018

d. Dana Cadangan

Dana Cadangan untuk membiayai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Lebak melaksanakan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati periode 2019-2023 sehingga dilakukan pencairan terhadap Dana Cadangan sebesar Rp. 55.000.000.000,00 yangtelah dialokasikan sebelumnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak , tanggal 10 Oktober 2016.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.59.314.983.659,09 Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.5
Rincian Aset Lainnya Per 31 Desember 2018

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	8.921.960.700,00	8.921.960.700,00
2	Aset Tak Berwujud	113.415.000,00	113.415.000,00
3	Amortisasi	(36.581.750,00)	(25.240.250,00)
4	Aset Lain-Lain	50.316.189.709,00	52.041.257.542,09
JUMLAH		**59.314.983.659,09**	**61.051.392.992,09**

Sumber : BPKAD, 2018

Keterangan: *) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (*unaudited*) Tahun 2018

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan Pengelolaan Keuangan kurun waktu tahun 2014 hingga tahun 2018, diuraikan dalam substansi Proporsi Penggunaan Anggaran untuk melihat proporsi belanja yangdigunakan dalam pemenuhan kebutuhan aparatur; serta Analisis Pembiayaan, yang diuraikan ke dalamanalisis Sumber Penutup Defisit Riil, analisis realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi belanja yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur berfluktuasi dari tahun 2014 hingga 2018, dan tertinggi dicapai pada tahun 2014. Pada tahun 2014,proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran mencapai 57,45 persen, menurun menjadi 40,24 persen pada tahun 2018. Dengan menurunnya penggunaan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, diharapkan proporsi penggunaan belanja untuk pembangunan cukup besar, sehingga dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan publik.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Untuk menyalurkan surplus atau menutup defisit, dalam penganggaran dikenal Pembiayaan Daerah.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akanditerima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

A. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis Pembiayaan Daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut. Surplus/defisit riil anggaran Kabupaten Lebak menunjukkan bahwa Kabupaten Lebak memiliki defisit anggaran pada tahun 2017. Sementara itu pada tahun 2014 - 2016 anggaran Kabupaten Lebak mengalami surplus.

Tabel 3.6
Tabel Defisit Riil Anggaran Tahun 2014-2018
(Dalam Milyar Rupiah)

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.796,23	2.237,62	2.496,43	2.421,10	2.504,18
	dikurangi realisasi					
2	Belanja Daerah	1.725,54	2.092,70	2.434,58	2.481,36	2.447,02
3	Pengeluaran Pembiayaan	6,53	4,73	54,21	52,00	18,05
	Surplus / Defisit Riil	64,16	140,19	7,65	-112,26	39,10

Sumber : BPKAD, 2018

Keterangan: *) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (*unaudited*) Tahun 2018

Surplus dan defisit anggaran sebagaimana tabel diatas selanjutnya dimanfaatkan dalam pembiayaan daerah. Analisis sumber penutup defisit riil pada tabel 3.9 di bawah ini:

Tabel 3.7
Tabel Analisis Sumber Penutup Defisit Riil Tahun 2014-2018
(Dalam Milyar Rupiah)

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.796,23	2.237,62	2.496,43	2.421,10	2.504,18
	dikurangi realisasi					
2	Belanja Daerah	1.725,54	2.092,70	2.434,58	2.481,36	2.447,02
3	Pengeluaran Pembiayaan	6,53	4,73	54,21	52,00	18,05
A	**Surplus / Defisit Riil**	**64,16**	**140,19**	**7,65**	**-112,26**	**39,10**
	Ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan					
4	SiLPA	58,58	122,79	262,99	270,64	158,38
5	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	55,00
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,05	0,01	-	-	-
B	**Total Realisasi Penerimaan Pembiayan**	**58,63**	**122,80**	**262,99**	**270,64**	**213,38**
A-B	**Sisa lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan**	**122,79**	**262,99**	**270,64**	**158,38**	**252,48**

Sumber : BPKAD, 2018

Keterangan: *) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (*unaudited*) Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa pada tahun 2014 hingga tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Lebak mempunyai SiLPA yang cukup besar sebagai akumulasi dari surplus/defisit, ditambah penerimaanpembiayaan yang relatif besar. Kondisi demikian menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak untuk membiayai Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

B. Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Analisis SiLPA dilakukan untuk mengetahui dari mana sumber perolehan SiLPA pada tahun anggaran tertentu, dan seberapa besar kontribusi yang diberikan. Gambaran perolehan SiLPA selama tahun 2014-2018 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.8
Tabel Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2014-2018
(Dalam Juta Rupiah)

No	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	Pelampauan penerimaan PAD	15.251,31	37.712,41	(15.681,28)	12.531,18	40.571,86
2	Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan	9.060,94	(19.728,64)	10.248,54	(43.134,99)	(34.397,49)
3	Pelampauan penerimaanLain-lain Pendapatan Daerahyang Sah	581,41	7.989,05	19.947,92	6.824,82	(13.741,22)
4	Sisa penghematan belanjaatau akibat lainnya	62.626,65	196.659,40	225.948,73	162.828,95	224.970,01
5	Kewajiban kepada pihakketiga sampai dengan akhirtahun belum terselesaikan	0	17.106,94	14.453,34	11.348,38	25.347,01
6	Kegiatan Lanjutan	35.268,42	23.251,79	15.723,55	7.984,90	9.733,41
7	Penerimaan Pembiayaan	0	0	0	0	0
	JUMLAH SiLPA	**122.788,74**	**262.990,96**	**270.640,82**	**158.383,27**	**252.483,58**

Sumber : BPKAD, 2018

Keterangan: *) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (*unaudited*) Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan daerah dari tahun 2014 – 2018 SiLPA Tahun Berjalan cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2014-2016, dan turun pada tahun 2017 namun meningkat kembali pada tahun 2018. Komponen utama penyumbang SiLPA terbesar berasal dari Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Pembiayaan daerah digunakan sebagai strategi untuk menggunakan surplus dan menutup defisit, meskipun demikian kepastian pengalokasian SiLPA dilaksanakan setelah audit BPK. Hal ini dikarenakan Kabupaten Lebak menghindari adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalanyangtidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

3.3 Kerangka Pendanaan

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

3.3.2 Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2019-2024

3.3.2.1 Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2019-2024

Dengan memperhatikan realisasi pendapatan daerah selama tahun 2014-2018 maka kebijakan dan proyeksi pendapatan daerah tahun 2019-2024 dapat disusun. Selain itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 22 ayat (1), ada 4 (empat) sumber Pendapatan Asli Daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3)

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (4) Lain-lain PAD yang sah.

Hal lain yang turut menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan proyeksi pendapatan daerah ini adalah kondisi perekonomian regional dan nasional yang akan mempengaruhi target dan realisasi pendapatan daerah setiap tahun. Namun, sejalan dengan perbaikan ekonomi regional dan nasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebak pun diperkirakan tumbuh membaik. Pertumbuhan didorong oleh perbaikan iklim investasi, pembiayaan dan pembangunan infrastruktur, peningkatan konsumsi Pemerintah dan rumah tangga, serta didukung oleh inflasi yang terjaga.

Guna meningkatkan pendapatan daerah, kebijakan pemerintah daerah yang akan ditempuh meliputi peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang salah satunya melalui optimalisasi peran pariwisata, serta peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi. Berdasarkan pertimbangan berbagai faktor baik kondisi ekonomi regional maupun nasional, serta berbagai kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah, proyeksi pertumbuhan perekonomian Kabupaten Lebak dan tingkat inflasi, maka pendapatan daerah pada tahun 2019 diproyeksikan akan mencapai sekira Rp.2,63 trilyun, dan terus meningkat hingga tahun 2024 diproyeksikan akan mencapai sekira Rp.3,14 trilyun rupiah. Dalam lima tahun ke depan struktur pendapatan daerah masih akan diwarnai sebagian besar dari sumber dana perimbangan yang diperkirakan akan mencapai sekira 65,04%, diikuti oleh lain-lain pendapatan yang sah sekira 23,63%, serta pendapatan asli daerah yang diperkirakan akan sebesar 11,31% dari total pendapatan daerah.

Sumbangsih Pariwisata terhadap upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selama ini dapat dikategorikan cukup signifikan (berpengaruh), hal tersebut dibuktikan dengan semakin meningkatnya target capaian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bersumber dari kegiatan Kepariwisataan. Namun demikian, terhadap palaksanaan Visi Pembangunan yang memberi perhatian kepada sektor Pariwisata perlu ditunjang dengan kegiatan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang serius.

Pelaksanaan Event-Event Daerah yang berskala Nasional dapat dijadikan salah satu bentuk usaha peningkatan PAD yang bersumber dari kegiatan keparawisataan.

Perlu juga menciptakan koordinasi dan komunikasi yang sinergis antara Pemerintah Daerah dengan ***stake holder*** di Bidang Kepariwisataan (seperti Asosiasi Pengusaha Hotel dan Restoran, dll)

Disamping hal tersebut, fungsi dasar/utama yang harus tetap dijalankan dalam rangka peningkatan PAD antara lain :

a. Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dalam rangka menjaring potensi-potensi Wajib Pajak Baru dan Peningkatan Ketetapan atas Wajib Pajak yang sudah terdaftar.

b. Pemutakhiran basis data atas kondisi Wajib Pajak sebagai bentuk kendali terhadap potensi real Pajak Daerah.
c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas ketaatan Wajib Pajak (Pemeriksaan dan Penagihan).
d. Pelibatan system Teknologi Informasi (IT) dalam pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Pembentukan Tim Koordinasi terpadu atas Pengelolaan dan Pengendalian Retribusi Daerah.

Tabel 3.9
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2019-2024 Kabupaten Lebak

KODE REKENING	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4	**PENDAPATAN**	**2.704.269.600.285,90**	**2.887.168.033.200,61**	**2.949.491.162.625,16**	**2.989.580.933.887,07**	**3.038.421.818.604,08**	**3.113.107.808.997,23**
4.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**313.606.834.101,00**	**341.233.814.276,71**	**344.269.457.059,83**	**355.171.847.757,90**	**366.942.921.996,65**	**379.062.718.081,23**
4.1.1.	Pajak Daerah	76.900.425.000	82.283.454.750,00	88.079.000.000,00	94.242.000.000,00	100.809.000.000,00	107.863.000.000,00
4.1.2.	Retribusi Daerah	19.296.397.101	20.647.144.898,07	22.092.445.040,93	23.638.916.193,80	25.293.640.327,37	27.064.195.150,28
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.457.800.000	4.816.326.885	4.823.297.788	6.376.673.255	6.383.854.854	6.652.144.177
4.1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	213.952.212.000	233.486.887.743,64	229.274.714.230,62	230.914.258.309,00	234.456.426.815,36	237.483.378.754,22
4.2.	**Dana Perimbangan**	**1.740.795.552.000,00**	**1.797.713.492.052,43**	**1.851.634.251.151,21**	**1.908.606.319.943,83**	**1.961.429.715.926,01**	**2.018.812.218.535,93**
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	67.081.301.000,00	71.761.229.112,43	76.745.556.046,71	79.829.014.948,23	79.652.238.500,49	82.730.912.668,93
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.127.187.626.000,00	1.166.932.096.990,00	1.211.687.791.529,50	1.257.736.270.795,98	1.305.142.174.025,77	1.353.973.372.417,06
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	546.526.625.000,00	559.020.165.950,00	563.200.903.575,00	571.041.034.199,63	576.635.303.399,74	582.107.933.449,93
4.3.	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**649.867.214.184,90**	**748.220.726.871,47**	**753.587.454.414,11**	**725.802.766.185,35**	**710.049.180.681,43**	**715.232.872.380,07**
4.3.1.	Pendapatan Hibah	191.768.870.000,00	248.379.810.992,00	224.460.066.008,00	192.612.066.000,00	180.265.247.000,00	175.019.268.000,00
	Dana Darurat						

KODE REKENING	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.3.3.	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	107.406.640.184,90	153.718.019.449,47	177.508.263.011,81	176.441.383.537,10	167.764.923.866,71	172.779.594.467,20
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	295.691.704.000,00	289.622.896.430,00	292.519.125.394,30	295.444.316.648,24	298.398.759.814,73	301.382.747.412,87
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi	55.000.000.000,00	56.500.000.000,00	59.100.000.000,00	61.305.000.000,00	63.620.250.000,00	66.051.262.500,00
4.3.6.	Penerimaan Lainnya						
5	**BELANJA**	**2.733.406.776.368,90**	**2.910.240.303.198,21**	**2.977.927.327.774,52**	**3.020.689.066.706,05**	**3.071.218.531.971,90**	**3.146.829.428.435,56**
5.1.	**Belanja Tidak Langsung**	**1.534.438.913.368,90**	**1.646.483.071.348,20**	**1.694.997.113.916,52**	**1.742.502.986.856,05**	**1.872.906.009.121,90**	**1.866.702.450.585,56**
5.1.1.	Belanja Pegawai	1.056.000.000.000,00	1.140.339.827.688,40	1.179.962.564.497,55	1.218.095.766.821,67	1.264.197.756.258,14	1.323.095.182.390,58
5.1.4.	Belanja Hibah	50.118.787.000	54.787.543.700,00	54.928.488.000,00	55.527.979.750,00	131.157.446.000,00	56.818.385.400,00
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	6.221.790.000	21.370.404.500,00	21.526.449.725,00	21.690.297.000,00	21.862.336.850,00	22.042.978.000,00
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa	9.619.682.210	10.293.060.000,01	11.017.145.341,74	11.788.092.265,65	12.610.264.974,31	13.492.720.582,50
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan	407.462.803.684	414.692.229.513,54	422.562.461.110,16	430.400.845.677,15	438.078.201.376,84	446.253.176.256,58
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	5.015.850.475	5.000.005.946,25	5.000.005.242,07	5.000.005.341,58	5.000.003.662,61	5.000.007.955,90
5.2.	**Belanja Langsung**	**1.198.967.863.000,00**	**1.263.757.231.850,00**	**1.282.930.213.858,00**	**1.278.186.079.850,00**	**1.198.312.522.850,00**	**1.280.126.977.850,00**
5.2.1.	Belanja Pegawai	32.521.662.262	34.279.055.464	34.799.117.148	34.670.433.862	32.503.886.347	34.723.080.168

KODE REKENING	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	751.442.676.786	792.048.850.027	804.065.349.691	801.092.004.977	751.031.948.049	802.308.445.912
5.2.3.	Belanja Modal	415.461.382.952	437.911.926.969	444.555.669.363	442.911.751.676	415.234.297.195	443.584.303.620
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(29.137.176.083,00)**	**(23.072.269.997,60)**	**(28.436.165.149,36)**	**(31.108.132.818,98)**	**(32.796.713.367,81)**	**(33.721.619.438,33)**
6	**PEMBIAYAAN**						
6.1.	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**						
6.1.1	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	47.137.176.083	41.072.269.997,60	46.436.165.149,36	49.108.132.818,98	50.796.713.367,81	51.721.619.438,33
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	-	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**47.137.176.083,00**	**41.072.269.997,60**	**46.436.165.149,36**	**49.108.132.818,98**	**50.796.713.367,81**	**51.721.619.438,33**
6.2.	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**						
	Pembentukan Dana Cadangan	-	0	-	-	0	0
6.2.1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00
	1. PDAM	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
	2. PD LEBAK NIAGA	1000.000.000	1000.000.000	1000.000.000	1000.000.000	1000.000.000	1000.000.000
	3. PT. LKM Rangkasbitung	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
	4. PT. BJB.	1000.000.000	1000.000.000	1000.000.000	1000.000.000	1000.000.000	1000.000.000
	5. BPR WARUNGGUNUNG	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
6.2.2.	**JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**18.000.000.000,00**	**18.000.000.000,00**	**18.000.000.000,00**	**18.000.000.000,00**	**18.000.000.000,00**	**18.000.000.000,00**
	PEMBIAYAAN NETO	**29,137,176,083.00**	**23.072.269.997,60**	**28.436.165.149,36**	**31.108.132.818,98**	**32.796.713.367,81**	**33.721.619.438,33**

KODE REKENING	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	-	(0.00)	8.00	0.00	0.00	-



Seiring dengan peningkatan pendapatan daerah, belanja daerah pada tahun 2019-2024 pun diproyeksikan mengalami peningkatan. Kebijakan Belanja Daerah tahun 2019 hingga 2024, yaitu sebagai berikut:

1. Pencapaian visi misi dan target-target RPJMD 2019-2024 dengan mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan;
2. Pemenuhan kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan;
3. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan nasional;
4. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dalam penyertaan penganggaran Daerah, Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yangbersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi. Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 meliputi kebijakan untuk Penerimaan PembiayaanDaerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Penerimaan Pembiayaan Daerah akan diproyeksikan terutama berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran namun dengan mengupayakan adanya pelampauan dari penerimaan PAD, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta dengan meningkatkan efisiensi pengeluaran belanja daerah. Sementara pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah akan penyertaan modal sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomor 9 tahun 2016 tentang penyertaan modal yang akan diberikan kepada PD. BPR LPK Warunggunung, PT. LKM Rangkasbitung, PD. Lebak Niaga, PDAM Tirta Multatuli, dan PT. BJB.

3.3.2.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan dilakukan untuk mengetahui kapasitas keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Kapasitas keuangan daerah merupakan total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangi Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun

belum terselesaikan dan Kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode tahun 2014-2018, maka dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2019-2024. Dalam melakukan proyeksi APBD 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah kabupaten Lebak menggunakan beberapa asumsi bahwa laju pertumbuhan ekonomi kabupaten lebak akan terjadi pada angka 5,0 – 6,5 persen, dan pertumbuhan ekonomi regional dan nasional pun relatif stabil. Selain itu, Proyeksi APBD tahun 2019 hingga tahun 2023 sebenarnya dihitung berdasarkan asumsi penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan riil yang akan diperoleh selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, setelah melalui berbagai upaya perbaikan yang akan dilakukan.

Demikian juga untuk pengeluaran dalam bentuk belanja dan pengeluaran pembiayaan, proyeksi telah memperhitungkan seluruhpengeluaran, termasuk pengeluaran untuk mendanai program-program strategis yang akan dilaksanakan 5 tahun yang akan datang. Khusus untuk tahun 2019, angka proyeksi APBD didasarkan pada RAPBD Kabupaten Lebak tahun 2019. Hal ini karena kondisi APBD tahun 2019 akan lebih mencerminkankondisi riil kapasitas fiskal daerah.

Berdasarkan proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah tersebut, maka dapat diproyeksikan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan untuk periode 2019–2023. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 3.10

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024 Kabupaten Lebak

KODE	URAIAN	PROYEKSI ANGGARAN (Rp)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	PENDAPATAN	2.704.269.600.285,90	2.887.168.033.200,61	2.949.491.162.625,16	2.989.580.933.887,07	3.038.421.818.604,08	3.113.107.808.997,23
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	47.137.176.083,00	41.072.269.997,60	46.436.165.149,36	49.108.132.818,98	50.796.713.367,81	51.721.619.438,33
	Total Penerimaan	**2.751.406.776.368,90**	**2.928.240.303.198,21**	**2.995.927.327.774,52**	**3.038.689.066.706,05**	**3.089.218.531.971,90**	**3.164.829.428.435,56**
4	Belanja Tidak Langsung	1.534.438.913.368,90	1.646.483.071.348,20	1.694.997.113.916,52	1.742.502.986.856,05	1.872.906.009.121,90	1.866.702.450.585,56
5	pengeluaran Pembiayaan	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	**1.198.967.863.000,00**	**1.263.757.231.850,00**	**1.282.930.213.858,00**	**1.278.186.079.850,00**	**1.198.312.522.850,00**	**1.280.126.977.850,00**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak yang positif atau surplus. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah mampu untuk mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah dengan optimal atau dengan kata lain adanya potensi surplus penerimaan daerah dimana memberikan dampak positif terhadap kemampuan pembiayaan pembangunan daerah.

Dari tabel di atas terlihat bahwa Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak relatif cukup besar. Meski demikian, proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Daerah disajikan secara indikatif, yaitu tidak kaku dan dapat disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.

kebijakan alokasi anggaran dikelompok 2 (dua) prioritas, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Prioritas I,** dialokasikan untuk belanja pada semua Urusan Wajib Pelayanan Dasar; beberapa urusan wajib non pelayanan dasar (Ketahanan pangan, Perhubungan, Lingkungan Hidup) dan Urusan Pilihan (Pariwisata, Pertanian, Koperasi dan UKM, Perindustrian, Perdagangan)
2. **Prioritas II**, dialokasikan untuk mendanai belanja urusan wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan lainnya serta Urusan Fungsi Penunjang.

Tabel 3.11
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan

URAIAN	PROYEKSI ANGGARAN (Rp)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.198.967.863.000	1.263.757.231.850	1.282.930.213.858	1.278.186.079.850	1.198.312.522.850	1.280.126.977.850
Prioritas I	859.999.140.300	913.151.247.100	913.907.424.458	902.334.057.000	833.078.064.300	892.647.505.600
Prioritas II	338.968.722.700	350.605.984.750	369.022.789.400	375.852.022.850	365.234.458.550	387.479.472.250



BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Permasalahan

Masalah atau permasalahan pada dasarnya merupakan "*A matter or situation regarded as unwelcome or harmful and needing to be dealt with and overcome.*"[1] Secara terminologis masalah dapat dipahami sebagai "*unrealized values, needs, or opportunities, which, however identified, may be attained through public action."*[2] Karenanya suatu permasalahan pasti menggambarkan adanya kesenjangan antara suatu kondisi yang diharapkan terjadi dengan realitasnya. Berangkat dari pemahaman konseptual ini maka permasalahan daerah, atau permasalahan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan situasi atau kondisi yang menggambarkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan, atau antara realisasi dengan target capaian. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan secara teknis permasalahan pembangunan sebagai penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Karenanya tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah dilakukan dalam rangka mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang terkait dengan kapasitas pemerintahan dalam mendayagunakan kewenangan yang dimilikinya.

Secara operasional, permasalahan pembangunan daerah dapat diklasifikasi dalam 3 (tiga) tipe permasalahan, yaitu: masalah pokok, masalah, dan akar masalah. Perumusan masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, yang akan dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Sedangkan perumusan masalah dilakukan dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik, sehingga dapat dipecahkan melalui perumusan strategi. Sementara identifikasi akar masalah dilakukan dengan cara mencari penyebab dari masalah secara lebih rinci, sehingga dapat dirumuskan solusi pemecahannya melalui formulasi arah kebijakan atau kebijakan umum.

Berdasarkan pengertian di atas, merujuk pada hasil dari evaluasi terhadap capaian RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 serta evaluasi terhadap sejumlah variabel eksternal sebagaimana digunakan dalam kerangka kerja logis penyusunan dokumen RPJMD ini, maka secara deskriptif permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Lebak dapat diidentifikasi berdasarkan obyeknya sebagai berikut:

1) Infrastruktur wilayah

[1]Lihat https://en.oxforddictionaries.com/definition/problem [20/09/2018]
[2]Lihat Dunn, 1981: 98



Merujuk pada data dan asumsi utama yang digunakan dalam RPJMN Tahun 2015-2019, penyediaan infrastruktur diperlukan dalam rangka mendukung peningkatan kemajuan ekonomi mengingat bahwa keterbatasan ketersediaan infrastruktur selama ini merupakan hambatan utama untuk memanfaatkan peluang dalam peningkatan investasi serta menyebabkan mahalnya biaya logistik. Persoalan keterbatasan infrastruktur juga menjadi penyebab terjadinya kesenjangan pembangunan antarkawasan di Indonesia, yaitu Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI); kesenjangan pada sekira 122 kabupaten yang masih berstatus daerah tertinggal; serta kesenjangan antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Karenanya dapat dipahami bila fokus utama pembangunan nasional pada tahun 2015-2019 lebih banyak diarahkan untuk pembangunan infrastruktur yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional dalam jangka menengah hingga jangka panjang.

Permasalahan serupa juga dihadapi dalam konteks lokal di Kabupaten Lebak, dimana dengan jumlah kecamatan yang mencapai 28 kecamatan, serta 340 desa dan 5 kelurahan yang tersebar di wilayah yang luasnya mencapai 3.044,72 km^2 atau sekira 304.472 hektar, maka masalah infrastruktur wilayah menjadi permasalahan penting dan strategis dalam jangka panjang yang mempengaruhi aksesibilitas masyarakat terhadap sejumlah pelayanan publik, khususnya pelayanan dasar. Dalam konteks regional, luas wilayah Kabupaten Lebak bahkan merupakan kabupaten terluas, yang mencapai ± 34% dari luas wilayah Provinsi Banten. Implikasi dari karakteristik geografisnya ini tentu berdampak pada efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, khususnya ragam jenis pelayanan publik yang dipengaruhi oleh jarak tempuh (*distance*) antardesa dengan kecamatan, serta antarkecamatan dengan ibukota kabupaten. Beberapa kecamatan bahkan memiliki jarak tempuh hingga lebih dari 90 km dari ibukota kabupaten, seperti: Kecamatan Wanasalam yang berjarak sekira 99 km dari ibukota kabupaten, Malingping (100 km), Cihara (105 km), Panggarangan (127 km), Bayah (135 km), Cibeber (152 km), dan Cilograng (160 km).

Prasarana jalan kabupaten yang menghubungkan antarwilayah kecamatan panjangnya mencapai sekira 856,21 km, yang terdiri dari ruas-ruas jalan dalam Kota Rangkasbitung sepanjang 57,87 km dan ruas-ruas jalan luar kota sepanjang 798,34 km. Dari total panjang jalan kabupaten tersebut, di akhir periode RPJMD Tahun 2014-2018 diperkirakan masih akan tersisa sekira 33% jalan yang masih dalam kondisi rusak, meski masih terkategori fungsional. Di samping itu, terdapat sekira 5.647,2 km jalan desa yang menjadi prasarana dasar aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat perdesaan. Pembangunan dan pemeliharaan jalan-jalan desa ini masih harus menjadi prioritas mengingat bahwa sepanjang periode RPJMD terakhir, Pemerintah Kabupaten Lebak baru dapat merealisasikan sekira 989,24 km pembangunan jalan desa.

Efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa mutlak perlu ditingkatkan agar persoalan penyediaan infrastruktur di perdesaan, khususnya jalan dan jembatan penghubung antarkampung atau antardesa, tidak lagi menjadi persoalan utama di pedesaan. Demikian pula dengan keberadaan sekira 588 jembatan gantung yang menjadi prasarana vital penghubung antardesa dan antarkampung, yang sekira lebih dari separuhnya dalam kondisi rusak bahkan

membahayakan untuk difungsikan.[3] Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi kisah jembatan "*Indiana Jones*" yang menyita perhatian dunia dan bahkan menjadi isu yang mudah didramatisasi untuk kepentingan politik tertentu.

Di samping itu, terdapat pula Jalan Provinsi di Kabupaten Lebak yang panjangnya mencapai 302,87 km dengan kondisi yang sangat tergantung pada perhatian dan keberpihakan Pemerintah Provinsi Banten, sehingga koordinasi dan sinergi perencanaan pembangunan mutlak perlu ditingkatkan guna menjamin terpeliharanya jaringan jalan provinsi di wilayah Kabupaten Lebak.

Dalam konteks penyediaan infrastruktur pertanian, penyediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak, harus menjadi prioritas mengingat di akhir periode RPJMD Tahun 2014-2018, persentase penyediaan air irigasi diperkirakan baru mencapai sekira 71% dari sekira 25.909 hektar lahan sawah beririgasi. Pun demikian halnya dengan keberadaan sekira 28.037 hektar lahan sawah non irigasi yang juga menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Lebak. Karenanya perhatian terhadap jaringan irigasi ini masih perlu diprioritaskan, apalagi mengingat peran Kabupaten Lebak sebagai salah satu daerah penyangga stok pangan padi sawah di Provinsi Banten. Demikian pula dengan pentingnya pemeliharaan sekira 32 situ, waduk, bendung, dan rawa yang berfungsi sebagai tandon air maupun irigasi.[4] Urgensi infrastruktur pertanian ini bahkan ke depan menjadi sangat strategis nilainya mengingat potensi Kabupaten Lebak yang diproyeksikan menjadi lumbung pangan regional.

Penyediaan sarana dan prasarana air bersih di Kabupaten Lebak juga masih harus mendapatkan perhatian mengingat cakupan layanannya yang rata-rata sekira 61%. Berdasarkan data Susenas 2016, 34,35% rumah tangga di Kabupaten Lebak menggunakan sumber air utama untuk air minum dari sumber tak terlindungi (sumur maupun mata air) dan air permukaan (sungai, danau, situ, waduk, irigasi, dll).[5] Demikian pula dengan penyediaan energi listrik yang masih harus menjadi prioritas daerah mengingat rasio elektrifikasi yang baru akan mencapai maksimum 78% pada akhir periode RPJMD 2014-2018.

2) Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Masalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berkaitan dengan bidang pendidikan dan kesehatan. Pada bidang pendidikan, tantangan lokal masih akan terkait dengan persoalan aksesibilitas dan mutu pendidikan. Demikian pula dengan bidang kesehatan yang masih akan berkaitan dengan masalah cakupan layanan kesehatan yang masih relatif terbatas maupun masalah aksesibilitas karena rendahnya daya beli masyarakat sebagaimana terrepresentasi dari nilai PDRB per kapita yang hanya sekira Rp.16,32 juta per tahun, terrendah di Provinsi Banten, juga pengeluaran per kapita yang hanya sekira Rp.8.372.000,- per tahun yang juga menjadi salah satu yang terrendah di

[3] https://www.kabar-banten.com/ratusan-jembatan-gantung-di-kabupaten-lebak-rusak/ [30/09/2018]
[4] Banten Dalam Angka, 2018
[5] Susenas, Maret 2016

Provinsi Banten. Kebijakan afirmatif bahkan mutlak diperlukan guna memastikan aksesibilitas bagi 111.080 jiwa penduduk miskin atau sekira 8,62% dari total penduduk Kabupaten Lebak.[6] Kebijakan afirmatif juga diperlukan guna memberikan layanan bagi sekira 995 anak telantar, 84 anak jalanan, dan sekira 1197 anak difabel.[7]

Tantangan dan permasalahan bidang pendidikan di Kabupaten Lebak masih akan difokuskan pada upaya meningkatkan rata-rata lama sekolah yang pada akhir periode RPJMD Tahun 2014-2018 akan berkisar pada angka 6,20 tahun, dengan ketimpangan gender yang cukup nyata antara laki-laki (6,60) dan perempuan (5,70). Artinya prioritas untuk mewujudkan tuntas wajib belajar 9 tahun akan menjadi tantangan yang nyata pada periode lima tahun mendatang. Upaya meningkatkan rata-rata lama sekolah ini dilakukan melalui peningkatan angka partisipasi kasar pada jenjang SD dan SLTP, melalui program-program Kejar Paket A dan B yang menyasar penduduk bukan usia SD dan SLTP. Demikian pula dengan peningkatan angka partisipasi murni pada jenjang SD dan SLTP yang pada akhir periode RPJMD akan mencapai sekira 98,98% dan 86%. Upaya peningkatan APM ini mutlak diperlukan guna menjamin ketuntasan akses penduduk usia sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan dalam mengakses layanan pendidikan. Koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Banten juga perlu diintensifkan, khususnya guna meningkatkan APM pada jenjang pendidikan SLTA, yang sejak tahun 2016 telah menjadi urusan pemerintah provinsi, yang terbilang masih rendah di Kabupaten Lebak yaitu sekira 44,27%.[8] Pada level regional, APM pada jenjang SLTA di Provinsi Banten baru berkisar pada angka 57,88% dan APK sekira 75,89%.[9]

Di bidang kesehatan, Kabupaten Lebak masih akan dihadapkan pada permasalahan dan tantangan untuk meningkatkan angka harapan hidup (AHH) yang baru mencapai sekira 66,59 tahun, jauh di bawah AHH regional sebesar 69,49 tahun; menurunkan angka kematian bayi yang pada akhir periode RPJMD 2014-2018 akan berkisar pada angka 20 per 1000 kelahiran hidup; penurunan angka kematian ibu yang masih akan berkisar pada angka 170 per 100 ribu kelahiran hidup; peningkatan usia harapan hidup yang masih akan berkisar pada angka 63,48 tahun; penurunan prevalensi balita gizi buruk yang pada akhir tahun 2018 diperkirakan berkisar 0,55%; peningkatan cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan yang pada akhir tahun 2018 diperkirakan baru berkisar 82%; peningkatan cakupan imunisasi, cakupan pemberantasan penyakit menular, peningkatan cakupan kunjungan ibu hamil K4, peningkatan cakupan pelayanan kesehatan balita, dan lain-lain.

Upaya mengatasi permasalahan dan tantangan di atas dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, penyediaan SDM, serta peningkatan kesadaran berperilaku hidup bersih dan sehat guna menekan angka kesakitan sebagai akibat dari faktor perilaku dan lingkungan.

---

6 Kabupaten Lebak Dalam Angka, 2018
7 Banten Dalam Angka, 2018
8 Statistik Daerah Kabupaten Lebak, 2017
9 Banten Dalam Angka, 2018

Permasalahan lainnya adalah masih terdapat sekira 26,16% kelahiran yang ditolong oleh non-tenaga kesehatan yang rentan terhadap beragam implikasi yang terkait dengan status kesehatan bayi pascakelahiran.

Dalam hal fasilitas layanan kesehatan di Kabupaten Lebak, berdasarkan data BPS (2018), Kabupaten Lebak memiliki 4 rumah sakit (termasuk RSUD Malingping yang dikelola Pemerintah Provinsi Banten), 42 Puskesmas, 72 Puskesmas Pembantu, 45 Puskesmas Keliling, 35 klinik/balai pengobatan (termasuk 10 rumah bersalin didalamnya), serta 1.569 Posyandu dengan dukungan sekira 9.660 kader posyandu. Keseluruhan prasarana kesehatan tersebut dilayani oleh sekira 103 tenaga medis (dokter umum, spesialis, dan dokter gigi), 794 perawat kesehatan, 837 bidan, 33 tenaga kefarmasian, dan 109 tenaga kesehatan lainnya, seperti: sarjana kesehatan masyarakat, teknisi, dan laboran.[10] Jumlah ini meski telah mengalami peningkatan signifikan dibandingkan pada periode awal RPJMD, namun masih belum cukup memadai jumlahnya terutama bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Lebak yang mencapai 1.288.103 jiwa pada tahun 2017.[11]

Secara umum permasalahan yang terkait dengan kualitas dan daya saing SDM adalah upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada tahun 2017 baru mencapai sekira 62,95 yang tercatat terrendah di Provinsi Banten dan jauh di bawah IPM regional yang mencapai 71,42.[12]

3) Pengentasan Kemiskinan

Kendati jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan, namun kemiskinan masih menjadi tema utama yang harus mendapatkan prioritas untuk dientaskan mengingat masih cukup tingginya jumlah penduduk miskin yang berdasarkan data BPS (2018) mencapai 111.080 jiwa atau sekira 8,64% dari total populasi Kabupaten Lebak.[13] Angka ini terbilang cukup tinggi karena masih di atas rata-rata Provinsi Banten sebesar 5,42% pada tahun 2017, meski secara umum masih lebih rendah dibandingkan dengan angka kemiskinan secara nasional yang mencapai 10,60% pada tahun yang sama.

Sebaran penduduk miskin dan kepadatan penduduk di Kabupaten Lebak yang cenderung bersifat mengelompok (*cluster*) secara spasial perlu dijawab dengan kebijakan pengentasan kemiskinan dengan pendekatan kelompok maupun kewilayahan. Di samping itu, perlu juga secara sistematis memperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab kemiskinan di Kabupaten Lebak, yaitu: faktor jarak, pasangan usia subur, kedekatan dengan konsentrasi penduduk, jumlah petani, jarak SMK, kedekatan dengan konsentrasi jarak pasar, kedekatan dengan konsentrasi jumlah industri, kedekatan dengan konsentrasi wilayah luas, serta faktor topografi. Kemiskinan yang terkonsentrasi di wilayah perdesaan berbasis pertanian perlu diatasi dengan melakukan optimalisasi potensi sektor pertanian serta pemberdayaan masyarakat setempat sehingga

[10] Banten Dalam Angka, 2018
[11] Kabupaten Lebak Dalam Angka, 2018
[12] Banten Dalam Angka, 2018

[13] Kabupaten Lebak Dalam Angka, 2018

berdampak luas dan berjangka panjang. Kearifan lokal dalam pemanfaatan lahan dan potensi alam / lingkungannya perlu terus dipertahankan dan dibudayakan agar masyarakat tidak "jatuh" dalam kemiskinan sebagai dampak dari transformasi ekonomi maupun kebijakan ekonomi yang berdampak pada kenaikan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat.

4) Peningkatan Kesempatan Bekerja dan Berusaha

Dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 8,88% atau sekira 51.626 jiwa angkatan kerja yang masih berstatus pengangguran dari sekira 581.370 jiwa angkatan kerja,[14] angka ini terbilang cukup tinggi kendati masih di lebih rendah dibandingkan dengan TPT Provinsi Banten yang mencapai 9,28%.[15] Tingginya tingkat pengangguran terbuka ini berkaitan erat dengan kualitas dan daya saing tenaga kerja yang secara umum didominasi oleh tenaga kerja berpendidikan rendah. Faktanya, lebih dari 73% pencari kerja di Kabupaten Lebak pada tahun 2017 didominasi oleh angkatan kerja yang berpendidikan SLTA (BPS, 2018). Sisanya sekira 10% berpendidikan SLTA, dan 14% berpendidikan tinggi, baik pada jenjang diploma maupun sarjana.

Sebagaimana struktur PDRB Kabupaten Lebak yang dikontribusi paling besar oleh sektor pertanian, sebagian besar penduduk Kabupaten Lebak memang bekerja di sektor pertanian yang jumlahnya mencapai 195.982 jiwa (2017) atau sekira 35,27% dari total penduduk yang bekerja di berbagai sektor. Analisis *Location Quotioent* terhadap sebaran tenaga kerja berdasarkan sektor-sektor utama di Kabupaten Lebak membuktikan fakta-fakta di atas. Artinya, bila dikaitkan dengan pola pengelompokkan kemiskinan berbasis kewilayahan maka karakteristik kemiskinan yang ada terkonsentrasi di wilayah perdesaan yang berciri agraris. Demikian pula dengan tingkat pengangguran terbuka yang terjadi karena karakteristik angkatan kerja yang berada pada transisi antara masyarakat agraris ke masyarakat industri yang tidak dibarengi dengan kesiapan angkatan kerja tersebut untuk beradaptasi dengan karakteristik kebutuhan sektor industri.

Peningkatan kapasitas dan daya serap tenaga kerja pada sektor primer perlu diagendakan sebagai prioritas, di samping pengembangan industri pengolahan komoditas pertanian, perkebunan, kelautan, dan kehutanan. Di samping itu pengembangan dan pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang meningkatkan nilai tambah komoditas sektor primer, perlu mendapat perhatian karena potensinya dalam menyerap tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang tidak terlalu tinggi. Demikian pula dengan pembinaan kewirausahaan di kalangan generasi muda milenial yang mampu mengembangkan ragam jenis usaha dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

5) Ketahanan Pangan

Persoalan ketahanan pangan merupakan isu pembangunan nasional. Di tingkat nasional, secara konseptual isu ini bahkan masuk pada wilayah "politik" yang sangat mendasar, yaitu isu kedaulatan pangan yang dimaknai bukan

[14] Ibid
[15] Banten Dalam Angka, 2018

sekedar tahan atau mampu mencukupi kebutuhan pangannya semata, namun berdaulat dalam arti berhak menentukan dan mendefinisikan sistem perpanganannya sendiri sesuai dengan karakteristik bangsanya sendiri tanpa campur tangan orang dan/ bangsa lain.

Secara nasional Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang masuk dalam prioritas 3 (dari 6 tingkat prioritas) daerah rawan pangan yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal, yang terletak di Kabupaten Lebak pada peringkat 245 dan Kabupaten Pandeglang pada peringkat 228.[16] Kebijakan yang berkaitan dengandaerah rawan pangan diatur dalam Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 TentangKetahanan Pangan. Daerah rawan pangan mempunyai karakteristiktertentu yang meliputi: topografi bergunung ataupun berbukit, berpotensi terjadi bencana, iklim tidak menentu, curah hujan rendah, kualitas SDM rendah, proporsi penduduk miskin tinggi, sebagian besar penduduk bergantung pada sektor pertanian, serta akses terhadap sarana-prasarana dan permodalan yang terbatas.

Di sisi lain, kerawanan pangan juga disebabkan oleh terjadinya transformasi ekonomi masyarakat yang mulai meninggalkan sektor agraris sebagai matapencaharian utamanya. Akibatnya terjadi laju alih fungsi lahan dan alih kepemilikan lahan yang cukup tinggi sebagai konsekuensi dari industrialisasi yang makin luas sebagai ekses dari posisi Provinsi Banten sebagai daerah penyangga ibukota Jakarta. Geliat pembangunan yang tinggi sebagai daerah otonom baru juga mendorong diterimanya industrialisasi tersebut secara cepat di tengah masyarakat, sehingga mendorong percepatan alih fungsi lahan dan kepemilikan lahan dimaksud.

Meski masuk dalam peta daerah rawan pangan dengan kategori prioritas 3, Kabupaten Lebak memiliki peran strategis dalam menopang ketahanan pangan di Provinsi Banten. Karenanya, perlu ada strategi dan kebijakan yang mampu memperkokoh eksistensi Kabupaten Lebak dalam skala regional tersebut. Strategi dan kebijakan yang sistematis dan terpadu dengan sektor yang lain, sehingga sustainabilitasnya dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Sektor-sektor dimaksud antara lain: pengembangan infrastruktur pertanian, pendidikan yang relevan dengan kebutuhan daerah, serta industri dan perdagangan yang mampu meningkatkan nilai tambah hasil-hasil pertanian sehingga kedaulatan petani dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Terkait dengan upaya ini, Pemerintah Kabupaten Lebak telah mengundangkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagai penjabaran operasional dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Didalamnya diatur perlindungan sekira 41.000 hektar lahan pertanian pangan berkelanjutan yang diharapkan dapat menjadi penopang ketahanan pangan dalam waktu 20 tahun mendatang.[17]

---

[16] Kementerian Desa. 2015. Daerah Rawan Pangan [21/06/2013]

[17] https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46458; https://banten.antaranews.com/berita/24140/lebak-pertahankan-41000-hektare-lahan-pertanian-sawah [01/05/2018]

6) Penataan Daerah dan Wilayah

Isu pemekaran daerah, wilayah, dan desa/kelurahan tampaknya masih akan menjadi isu strategis dalam lima tahun mendatang. Hal ini merupakan sebuah konsekuensi logis dari daerah yang luasnya mencapai 35,46% dari luas Provinsi Banten. Dengan luas mencapai 3.044,72 km^{2}atau sekira 304.472 hektar, persoalan koordinasi pemerintahan, efektivitas pemerintahan, rentang kendali, dan pemerataan pembangunan merupakan persoalan yang niscaya muncul dan melekat pada daerah yang luas tersebut.

Di samping faktor obyektif tersebut, faktor politik kerapkali menjadi pendorong motivasi pemekaran daerah, wilayah, dan atau desa/kelurahan. Pemekaran daerah yang marak terjadi di era otonomi daerah sejak tahun 2005 merupakan bukti nyata dari besarnya pengaruh politik tersebut, sehingga perlu adanya rumusan strategi dan kebijakan pemekaran daerah dalam skala lokal guna menjamin bahwa pemekaran daerah dan/ atau wilayah dilakukan sebagai kebutuhan guna meningkatkan efektivitas pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan percepatan pembangunan, bukan motif politik yang seringkali hanya didasarkan pada kepentingan politik elit yang sempit dan berjangka pendek.

Di sisi lain, dalam jangka menengah hingga jangka panjang, kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan adalah sebuah keniscayaan sehingga kajian yang mendalam diperlukan guna menemukan format ideal jumlah kecamatan, desa, dan kelurahan seiring dengan berubahnya variabel-variabel demografis, sosial, dan ekonomi di wilayah Kabupaten Lebak. Dengan jumlah kecamatan, desa, dan kelurahan yang sama sekali tidak mengalami perubahan paling tidak sejak tahun 2007 (28 kecamatan, 340 desa, dan 5 kelurahan), diperlukan kajian evaluatif guna mengukur efektivitasnya, di samping mempertimbangkan variabel-variabel dinamis sebagaimana dimaksud di atas. Di sisi lain, kebijakan yang antisipatif dalam memahami berkembangnya motivasi pemekaran daerah dan wilayah tersebut secara strategis dapat mengurangi potensi konflik sosial, sehingga ketertiban, keamanan, dan kohesifitas sosial dapat senantiasa dijaga.

Sejalan dengan hal tersebut, implikasi pembangunan daerah yang mendorong kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya juga menuntut adanya peningkatan kapasitas pelayanan publik bagi masyarakatnya. Seiring dengan kemajuan pembangunan Kota Baru Publik Maja yang menjadi kawasan pertumbuhan baru yang ditopang oleh sistem transportasi massal Kereta Rel Listrik (KRL) *double track* Jakarta-Rangkasbitung, membutuhkan desain kebijakan penataan wilayah guna mengantisipasi kemajuan yang sangat pesat di Kawasan Maja tersebut.

7) Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Isu Kelestarian Lingkungan Hidup dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam

Di masa depan Kabupaten Lebak akan dihadapkan pada dilema pengendalian pemanfaatan ruang yang kian kompleks, dilema antara kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kebutuhan untuk

mempertahankan kelestarian lingkungan hidup. Masalah ini telah banyak dialami di berbagai daerah di Indonesia, sehingga belajar dari pengalaman tersebut tampaknya menjadi keniscayaan guna mengantisipasi problem laten yang sama di masa depan.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten, Lebak diproyeksikan sebagai kawasan pertambangan potensial dalam rencana pengembangan pola ruang kawasan pertambangan[18] yang meliputi:

1. Pola ruang kawasan peruntukan pertambangan mineral bahan galian logam (emas) di Desa Cikotok, Desa Warung Banten, Desa Lebak Situ, Desa Sinargalih, Desa Cimancak, Desa Sukamulya, Desa Cidikit, Desa Citorek, Desa Cikate, Desa Kanekes, Desa Guradog, Desa Bojongmanik, Desa Caringin, Desa Gunung Kendang, dan Desa Bulakan;
2. Pola ruang kawasan peruntukan pertambangan batubara di Desa Cihara/Cimandiri, Desa Darmasara, dan Desa Bojongmanik;
3. Pola ruang kawasan peruntukan pertambangan panas bumi di Pamancalan dengan potensi *Speculative* 225 MW, Gunung Endut dengan potensi *Speculative* 100 MW *Possible* 40 MW, dan Ciseeng dengan potensi Hipotetik 100 MW; dan
4. Pola ruang kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi pada Blok Rangkas seluas 3.977,13 km2.

Potensi yang cukup besar sebagaimana digambarkan di atas tentu akan menarik minat investasi dari dalam maupun luar negeri sehingga perlu disikapi secara antisipatif guna mencegah berbagai masalah yang mungkin timbul, khususnya terkait isu kelestarian lingkungan hidup tersebut. Di samping itu, beberapa wilayah pertambangan potensial yang beririsan dengan kawasan adat juga patut mendapat perhatian sehingga eksplorasi dan eksploitasi yang akan dilakukan nanti tidak bertabrakan dengan kepentingan daerah untuk mempertahankan kepentingan dan eksistensi masyarakat adat setempat.

Potensi konflik yang sama juga potensial terjadi dalam konteks pemanfaatan sumber daya alam, baik oleh masyarakat maupun swasta. Karenanya, isu-isu lingkungan hidup tampaknya harus menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam mengantisipasi berbagai aktivitas ekonomi yang mendegradasi kualitas lingkungan hidup. Berbagai aktivitas pertambangan liar yang dilakukan secara mandiri oleh para "*gurandil*" maupun didalangi oleh para "cukong", *illegal logging* untuk kepentingan industri kayu, *illegal fishing* dan *over fishing*, alih fungsi lahan, dan lain-lain merupakan masalah potensial yang patut diantisipasi dalam rencana jangka menengah, sehingga berbagai dampak buruk yang mungkin terjadi dapat dikendalikan pada tingkat yang wajar, terutama potensi bencana yang dapat ditimbulkan akibat eksploitasi sumber daya alam secara*illegal* dan/ atau kurang memperhatikan sustainabilitas lingkungan.

[18] Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030, pasal 52-54

Dalam konteks lokal, pengendalian pemanfaatan ruang dalam kaitannya dengan isu lingkungan hidup tidak hanya berdimensi konservasi lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk kepentingan generasi mendatang, namun juga berdimensi moral spiritual dalam rangka menjaga dan mempertahankan kearifan lokal yang dimiliki dan diyakini oleh masyarakat setempat. Konservasi lingkungan hidup dan SDA di sekitar dan atau di wilayah yang menjadi kawasan adat masyarakat adat Kanekes merupakan sebuah keniscayaan mengingat kekhasan adat masyarakatnya yang inheren dengan bumi yang menjadi wilayah tempat tinggalnya. Karenanya proteksi terhadap kawasan adat dimaksud penting untuk menjadi kebijakan yang tidak hanya berdimensi jangka menengah, namun juga jangka panjang.

8) Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah

Seiring dengan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang, serta pembangunan infrastruktur jalan dan trnsportasi berupa: pembangunan akses jalan tol Serang-Panimbang yang melalui wilayah Kabupaten Lebak, serta rel kereta api *double track*, serta operasionalisasi Kereta Rel Listrik (KRL) Jakarta-Rangkasbitung, membuka peluang bagi Kabupaten Lebak untuk mengembangkan potensi ekonomi daerahnya, khususnya potensi pariwisata.

Potensi pariwisata di Kabupaten Lebak terbilang cukup beragam, antara lain potensi wisata sejarah melalui sejumlah situs cagar budaya eks peninggalan era kolonialisme Belanda, seperti:

1. Statiun Kereta Api Rangkasbitung;
2. Eks Rumah Kepala Personalia Perkebunan Cikadu di Desa Sindang Mulya;
3. Eks residen Mr. Soetadisastra di Jalan Hardiwinangun No.06, Kampung Pasir Taritis, Kelurahan Muara Ciujung Timur;
4. Bangunan Administratur Perkebunan Cisalak di area PTPN VIII Kebun Cisalak Baru;
5. Gedung Kodim 0603 Lebak di Kampung Sukarakyat, Kelurahan Muara Ciujung Timur;
6. Gedung Kantor PDAM Rangkasbitung di Jalan Sunan Giri Kelurahan Muara Ciujung Timur;
7. *Hoofd Planter* di Jalan Hardiwinangun dan Jalan Sunan Bonang, Kelurahan Muara Ciujung Barat;
8. Gedung DPRD Kabupaten Lebak di Kampung kaum Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung;
9. Gedung Pendopo Kabupaten Lebak di Kampung Kapugeran Kelurhan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung Lebak; dan
10. Menara Air Kota Rangkasbitung di Jalan Hardiwinangun Kampung Pasir Tariti, Kelurahan Ciujung Timur, Rangkasbitung.

Terdapat pula sejumlah situs peninggalan era pra sejarah yang banyak tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lebak, antara lain:

1. Situs Lebak Cibedug di Desa Citorek Kecamatan Cibeber;
2. Situs Lebak Kosala di Desa Lebak Gedong Kecamatan Cipanas;
3. Situs Batu Bedil di Desa Bayah Timur Kecamatan Bayah;
4. Situs Jean Louis Van Gogh berada di Kecamatan Bayah.

Di samping itu terdapat pula sejumlah destinasi wisata alam yang sangat potensial untuk dikembangkan, antara lain:

1. Curug Munding di Kecamatan Gunung Kencana;
2. Curug Ciporolak di Kecamatan Cibeber;
3. Curug Cihear di Kecamatan Lebak Gedong;
4. Curug Cimayang di Kecamatan Bojongmanik;
5. Curug Kumpay di Kecamatan Sajira;
6. Curug Cibangkit di Kecamatan Sobang;
7. Curug Halimun di Kecamatan Cipanas;
8. Curug Rame di Kecamatan Cijaku;
9. Curug Indihiyang di Kecamatan Warunggunung;
10. Curug Kanteh di Kecamatan Cilograng;
11. Kebun Teh Cikuya di Kecamatan Cibeber;
12. Arung Jeram Sungai Ciberang di Kecamatan Lebak Gedong;
13. Pemandian Air Panas di Kecamatan Cipanas;
14. Pantai Cihara berada di Kecamatan Cihara;
15. Pantai Talanca di Kecamatan Malingping;
16. Pantai Cimandiri di Kecamatan Panggarangan;
17. Pantai Cibobos di Kecamatan Panggarangan;
18. Pantai Tanjung Panto di Kecamatan Wanasalam;
19. Pantai Karang Seke di Kecamatan Wanasalam;
20. Pantai Binuangeun di Kecamatan Wanasalam;
21. Pantai Sawah Sikabayan di Kecamatan Wanasalam;
22. Pantai Karangmalang di Kecamatan Wanasalam;
23. Pantai Bagedur di Kecamatan Malingping;
24. Pantai Karangtaraje di Kecamatan Bayah;
25. Pantai Sawarna di Kecamatan Bayah;
26. Pantai Legon Pari di Kecamatan Bayah;
27. Pantai Pulau Manuk di Kecamatan Bayah;
28. Pantai Ciantir di Kecamatan Bayah;
29. Pantai Tanjung Layar di Kecamatan Bayah;
30. Pantai Karangmaling di Kecamatan Malingping;
31. Pantai Karangseupang di Kecamatan Bayah;
32. Pantai Cibareno di Kecamatan Cilograng;
33. Pantai Citarate di Kecamatan Cilograng;
34. Pantai Guha Gede di Kecamatan Cilograng;
35. Pantai Karang Bokor di Kecamatan Bayah.
36. Goa Sangkir di Kecamatan Bojongmanik;
37. Goa Lalay di Kecamatan Bayah;
38. Goa Wayang di Kecamatan Cilograng;
39. Goa Lauk di Kecamatan Cilograng
40. Goa Langit di Kecamatan Bayah;
41. Goa Sangko di Kecamatan Bayah;
42. Wisata Hutan Lindung Gunung Kembang di Kecamatan Bayah;
43. Kawah Cipanas di Kecamatan Sobang;
44. Situ Palayangan di Kecamatan Cimarga;
45. Situ Cijoro Bendungan di Kecamatan Rangkasbitung; dan
46. Pemandian air panas senanghati di Kecamatan Malingping.

Demikian pula dengan sejumlah kawasan yang sangat potensial menjadi destinasi pariwisata budaya, antara lain: Wisata budaya Desa Adat Suku Baduy di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar; dan Wisata budaya seren taun di Kecamatan Cibeber dan Sobang.

Pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Lebak dapat menjadi semacam "*a breaktrough*" bagi percepatan pembangunan ekonomi daerah yang diharapkan dapat menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat pengembangan sektor pariwisata akan menumbuhkan dan mengintegrasikan beragam sektor secara optimal - baik primer, sekunder, hingga tersier – dalam melayani kebutuhan wisatawan. Tantangannya terletak pada penyiapan obyek / destinasi wisata yang menarik, yang ditopang oleh sistem promosi pariwisata yang efektif; penyediaan infrastruktur yang memadai (jalan, jembatan, listrik, dan jaringan telekomunikasi), penyediaan layanan perbankan yang efektif dan efisien, hingga penyiapan SDM yang tidak hanya berkaitan dengan aspek *hardskill* namun juga *softskill* serta *mindset* masyarakatnya.

9) Pengembangan Perekonomian Daerah (Industri, Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah)

Isu perekonomian daerah terkait erat dengan kebijakan yang bersifat *pro-growth* dan *pro-job* dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan *pro-growth* ini penting untuk dilakukan mengingat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebak yang masih pada level rata-rata sekira 5,70% (2016), relatif sebanding dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten sebesar 5,51% (2016). Meski laju pertumbuhan ini terbilang tinggi, bahkan tertinggi ketiga di Provinsi Banten, namun dari sisi nilai maupun kontribusinya terhadap total PDRB kabupaten/kota se-Provinsi Banten terbilang rendah. Pada tahun 2016 tercatat PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Lebak mencapai Rp.17,620 trilyun dengan kontribusi sebesar 4,35%. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp.22,527 trilyun pada tahun yang sama.

Struktur perekonomian daerah secara makro didominasi kontribusinya oleh industri pengolahan yang rata-rata mencapai lebih dari 30%, diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang rata-rata mencapai 12%, transportasi dan pergudangan sekira 10%, konstruksi sekira 10%, real estate sekira 7%;serta pertanian, kehutanan, dan perikanan sekira 6%. Struktur perekonomian ini menggambarkan proses transformasi yang nyata dari sektor primer ke sektor sekunder, meski proses transformasinya belum diikuti sepenuhnya dalam konteks struktur mata pencaharian masyarakat yang masih menggambarkan ketergantungan yang besar pada sektor pertanian dimana sebanyak 195.982 jiwa (2017) atau sekira 35,27% penduduk Kabupaten Lebak bekerja di sektor pertanian.

Karenanya perlu adanya *blueprint* pengembangan perekonomian daerah guna mengoptimalkan segenap potensi sumber daya alam yang dimiliki, tanpa kehilangan identitas sebagai daerah pertanian yang menjadi penopang ketahanan pangan regional. Pengembangan industri berbasis pemanfaatan hasil-hasil

pertanian merupakan pilihan strategis guna dapat bersinergi dengan rencana mempertahankan karakter sebagai daerah pertanian dan perkebunan. Demikian pula dengan pengembangan industri pengolahan, perdagangan, serta UMKM dan Koperasi yang harus pula berbasis potensi lokal, sehingga terdapat integrasi yang nyata antara upaya meningkatkan kapasitas perekonomian daerah di satu sisi dengan upaya memberdayakan potensi ekonomi masyarakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pengembangan perekonomian daerah pun harus dilakukan dalam rangka pembinaan kewirausahaan di kalangan pemuda sebagai manifestasi kebijakan *pro-job*. Dengan demikian dapat secara sinergis memperluas kesempatan berusaha pada sektor ekonomi kreatif yang sangat terbuka luas peluangnya. Demikian pula dengan pengembangan seni dan budaya yang harus dikembangkan ke arah pemanfaatan seni dan budaya daerah tersebut agar memiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata.

10) Mitigasi Bencana

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 sebagaimaa diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014, Kabupaten Lebak memiliki sejumlah wilayah yang terkategori rawan bencana alam, baik kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan banjir, maupun kawasan rawan bencana alam geologi.

Kawasan rawan tanah longsor diidentifikasi seluas kurang lebih 5.582 (*lima ribu lima ratus delapan puluh dua*) hektar yang berada di: Kecamatan Bojongmanik; Kecamatan Cibeber; Kecamatan Cigemblong; Kecamatan Cilograng; Kecamatan Curugbitung; Kecamatan Lebakgedong; Kecamatan Leuwidamar; Kecamatan Panggarangan; dan Kecamatan Sobang.

Kawasan rawan banjir diidentifikasi seluas kurang lebih 2.133 (*dua ribu seratus tiga puluh tiga*) hektar yang terletak di: Kecamatan Banjarsari; Kecamatan Cibadak; Kecamatan Cikulur; Kecamatan Cileles; Kecamatan Cimarga; Kecamatan Curugbitung; Kecamatan Kalanganyar; Kecamatan Leuwidamar; Kecamatan Maja; Kecamatan Rangkasbitung; Kecamatan Sajira; Kecamatan Wanasalam; dan Kecamatan Warunggunung.

Sedangkan kawasan rawan bencana alam geologi diidentifikasi berupa berupa kawasan rawan tsunami dengan luas kurang lebih 2.871 (*dua ribu delapan ratus tujuh puluh satu*) hektar yang berada di sejumlah kecamatan di pesisir Pantai Selatan Samudera Indonesia, yaitu: Kecamatan Bayah; Kecamatan Cihara; Kecamatan Cilograng; Kecamatan Malingping; Kecamatan Panggarangan; dan Kecamatan Wanasalam.

Dengan potensi kerawanan yang terbilang tinggi ini maka diperlukan desain kebijakan dan program yang efektif guna mengantisipasi ragam bencana tersebut, antara lain melalui: penguatan kelembagaan penanganan bencana daerah, peningkatan kesiapsiagaan elemen-elemen penanganan bencana daerah, peningkatan pengetahuan kebencanaan di kalangan masyarakat, penyediaan infrastruktur penunjang mitigasi bencana, dan lain-lain.

11) Stabilitas Politik, Keamanan, dan Ketertiban Sosial

Stabilitas politik dan keamanan merupakan hasil dari bekerjanya faktor-faktor ekonomi, sosial, dan politik secara seimbang sehingga menciptakan ketenteraman dalam dimensi kehidupan pribadi dan keluarga yang berdampak pada terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat secara luas. Namun demikian, di luar konteks itu tetap diperlukan upaya terstruktur dan sistematis guna tetap menjaga kohesifitas sosial guna menghindari terjadinya konflik sosial yang dapat berdampak luas pada terusiknya kondusifitas dan stabilitas ekonomi, sosial dan politik daerah dalam jangka panjang.

Kemitraan yang sehat antarpemangku kepentingan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat perlu terus dibina sebagai upaya kanalisasi beragam dinamika, kepentingan dan aspirasi yang berkembang di tengah masyrakat. Di samping itu, peran dan potensi pondok pesantren yang mencapai lebih dari dari 500 pesantren perlu terus dibina sebagai basis pencegahan radikalisme yang akhir-akhir ini masih menjadi ancaman secara nasional. Pesantren bahkan harus didayagunakan sebagai modal sosial dalam menciptakan kehidupan yang relijius di tengah masyarakat, serta agen penggerak pembangunan daerah.

Penegakan hukum yang berkeadilan, khususnya penegakan hukum atas peraturan daerah, juga harus menjadi agenda prioritas guna menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Penegakan hukum juga diperlukan dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, serta melakukan edukasi sosial dalam rangka menciptakan ketertiban umum. Dengan demikian maka pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakatnya secara berwibawa. Dan dengan kewibawaan inilah maka pemerintah daerah dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien.

12) Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintahan Desa, dan Masyarakat Adat

Desa menjadi pusat perhatian selama proses formulasi undang-undang desa hingga diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memuat sejumlah perubahan yang dinilai cukup menggembirakan, antara lain: adanya pengakuan sebagai *local self community* dengan mengadopsi asas rekognisi, subsidiaritas, dan keberagaman, serta pengakuan terhadap eksistensi desa adat sebagai *local self community.* Perhatian terhadap eksistensi desa dan masyarakat desa juga diiringi dengan perubahan kebijakan nasional terhadap hak keuangan pemerintahan desa yang di dalam undang-undang tersebut diatur dengan sumber yang jelas dan beragam serta dengan jumlah yang sangat signifikan sebagai manifestasi dari perhatian dan komitmen keberpihakan terhadap pembangunan desa yang selama ini termarjinalisasi. Salah satunya adalah Dana Desa yang bersumber dari APBN yang jumlahnya sangat signifikan.[19]

[19] Transfer Dana Desa pada APBN Tahun 2018 mencapai Rp.60 Trilyun. Lihat http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5437 dan rinciannya di http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Rincian-Alokasi-TKDD-TA-2018-1.pdf [10/10/2018]

Dengan asas rekognisi, maka masyarakat desa memperoleh pengakuan terhadap hak asal usulnya. Sementara dengan asas subsidiaritas, pemerintahanan dan masyarakat desa diberi kewenangan berskala lokal dalam pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakatnya. Dan dengan asas keberagaman, maka pemerintahan dan masyarakat desa mendapatkan pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa.

Meski telah cukup menggembirakan, namun berbagai persoalan masih dihadapi dalam implementasinya di lapangan, terutama yang terkait dengan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan akuntabel bagi percepatan dan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat desa. Dalam konteks pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat, persoalan tanah ulayat menjadi persoalan yang masih akan mengemuka, yang pada banyak kasus di daerah belum mendapatkan tempat sebagaimana mestinya. Demikian pula dengan hukum adat yang belum mendapat tempat dalam sistem hukum nasional.[20] Akibatnya berbagai konflik agraria mewarnai dan masih akan mewarnai perjalanan implementasi undang-undang desa beberapa waktu yang akan datang.[21]

Dari sekira 365 (*tiga atus enam puluh lima*) Masyarakat Adat yang secara resmi diakui oleh Direktorat JenderalKomunitas Adat Terpencil Kementerian Sosial Republik Indonesia, baru 11 (*sebelas*) Masyarakat Adat yang ditetapkan dalam peraturan daerah terkait tanah adat/ulayat. Dari 11 tersebut, hanya 1 yang dapat dilanjutkan dengan proses penetapan di Badan Pertanahan Nasional (BPN), sisanya belum ada proses penetapan yang dilakukan. Prestasi Kabupaten Lebak yang berkaitan dengan pengakuan hak ulayat dapat terlihat dari Peraturan Daerah tentang pengakuan hak ulayat Masyarakat Adat Baduy, yang di daerah lain belum memperoleh pengakuan yang sama yaitu hak eksklusif yang dimiliki masyarakat adat untuk mengelola wilayahnya.

Meskipun demikian, masih terdapat "konflik" sebagaimana temuan Komnas HAM pada Oktober 2014, seperti *Kasepuhan*: Ciptagelar Sukabumi (meski sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sukabumi), Cirompong, Citorek, Cibedug, dan Cisitu (Kecamatan Cibeber), Karang Kecamatan Muncang (meski telah diundangkan Surat Keputusan Bupati Nomor 430/Kep.298/Disdikbud/2013 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat di Wilayah "SABAKI" namun dalam pelaksanaannya hak-hak masyarakat adat di wilayah tersebut direnggut oleh Kementerian kehutanan yang secara legal merasa lebih berwenang dalam pengelolaan hutan, meski di sisi lain Komnas HAM telah mengeluarkan rekomendasi tentang Hak pengelolaan tanah Ulayat yang mengikat dan sebagai kekuatan untuk melindungi tanah Ulayat milik Masyarakat Adat.[22]

---

[20] Baca Anotasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diterbitkan oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) bekerjasama dengan *The Asia Foundation*, 2015

[21] Baca "Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan", Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, tahun 2016.

[22] Baca "Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan", Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, tahun 2016.

13) Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Berwibawa

Upaya membangun pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa merupakan isu pembangunan daerah yang masih akan menjadi tantangan di masa yang akan datang, tidak hanya dalam konteks lokal namun juga secara nasional. Berbagai patologi yang masih terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik yang belum sepenuhnya memuaskan masyarakat, problem representasi lembaga perwakilan rakyat, struktur birokrasi yang belum efisien, kinerja aparatur yang belum optimal, dan lain-lain merupakan permasalahan yang masih akan menjadi tantangan lima tahun mendatang.

Karenanya agenda reformasi administrasi masih harus menjadi agenda prioritas sebagai prakondisi bagi terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa. Reformasi administrasi harus difokuskan pada upaya menciptakan kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien dengan mewujudkan struktur organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran secara nyata. Reformasi administrasi juga harus dialamatkan dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera. Karenanya upaya mewujudkan meritokrasi secara nyata menjadi tantangan lima tahun ke depan. Termasuk didalamnya adalah pemberian *reward and punishment* secara konsekuen sebagai instrumen efektif dalam mewujudkan kedisiplinan sekaligus motivasi untuk berprestasi di kalangan aparatur, serta menjadi aparatur dengan *mindset* sebagai pelayan publik, bukan *government* apalagi kaum *ambtenaar* seperti di era kolonialisme Belanda. Hal ini diperlukan mengingat bahwa upaya menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas masih akan menjadi tantangan besar di masa depan mengingat budaya birokrasi yang masih belum bertransformasi pada budaya mutu dan pelayanan.

Upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas juga masih akan menjadi tantangan ke depan, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga mampu menekan potensi penyimpangan (korupsi) pada satu sisi, serta meningkatkan kepercayaan publik (*public trust*) pada sisi lainnya. Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua kata kunci yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan daerah, mengingat instrumen keuangan daerah merupakan bagian penting yang paling menyita perhatian publik dewasa ini. Secara moral, pentingnya manajemen keuangan yang profesional menjadi keniscayaan mengingat bahwa keuangan daerah pada dasarnya bersumber dari pajak dan retribusi daerah yang dibayarkan oleh masyarakatnya sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga harusnya digunakan kembali oleh pemerintah selaku pemegang mandat untuk menggunakannya bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.Transparansi merujuk pada sejauhmana publik mengetahui dan dapat ikut mengakses informasi atas pengelolaan keuangan yang sesuai dengan pedoman dan rencana yang telah ditetapkan. Sementara akuntabilitas mengacu pada sejauhmana anggaran tersebut direncanakan, digunakan, dan menghasilkan luaran dan manfaat yang diharapkan masyarakatnya.

Guna mewujudkan hal tersebut, diperlukan kehadiran lembaga perwakilan rakyat yang responsif dan kredibel, yang mampu menjalankan fungsi legislasi, *budgeting*, sekaligus pengawasan secara efektif. Secara filosofis DPRD hadir sebagai representasi dari kehendak rakyat, sehingga harusnyasegala aktivitasnya

berkorelasi dengan kehendak dan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Namun demikian, dalam sistem dan tradisi partai politik yang belum matang, diiringi dengan kedewasaan politik masyarakat yang juga belum memadai, maka distorsi seringkali terjadi dalam pelaksanaan peran dan fungsi DPRD, yang disinyalir lebih banyak berperan sebagai wakil partai dibandingkan sebagai wakil rakyat yang harusnya memperjuangkan sepenuhnya aspirasi rakyatnya. Akibatnya DPRD mengalami ”disfungsi” dalam mengartikulasi dan mengagregasikan kehendak rakyat yang tampak dari rendahnya intensitas dan kualitas pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, maupun anggaran, serta gejala makin rendahnya kepercayaan publik terhadap eksistensi DPRD secara kelembagaan.

Pengawasan yang efektif secara khusus juga masih akan menjadi tantangan pemerintah daerah untuk diwujudkan, khususnya pengawasan internal pemerintah daerah. Pengawasan diperlukan guna memastikan bahwa sistem telah bekerja dengan baik dan benar serta mengarah pada tujuan yang dikehendaki bersama, serta secara responsif mencegah terjadinya distorsi secara dini, sekaligus memastikan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Optimalisasi peran dan fungsi pengawasan internal perlu dilakukan secara sistematis pada satu sisi, serta peningkatan keterpaduan pelaksanaan hasil pengawasan internal dan eksternal juga penting untuk dilakukan secara sistematis guna mencapai tujuan pengawasan tersebut.

Hadirnya pemerintahan daerah yang kredibel, bersih, dan berwibawa merupakan sebuah prakondisi yang dibutuhkan dalam mengatasi berbagai permasalahan daerah yang dihadapi masyarakat, sekaligus mewujudkan kehendak dan cita-cita bersama. Dengan kata lain, pemerintahan daerah yang kredibel, bersih, dan berwibawa pada dasarnya merupakan prasyarat yang harus dimiliki agar dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal dalam penyelenggaraan pemeritahan daerah, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Dengan demikian maka pemerintah daerah dapat diharapkan keberadaannya dalam mengatasi beragam permasalahan masyarakatnya, memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mengatasi berbagai tantangan di masa depan.

Berdasarkan paparan deskriptif permasalahan pembangunan daerah di atas, secara makro dan abstraktif permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Lebak dapat dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah
1	Rendahnya kualitas dan daya saing SDM	1. Aksesibilitas dan mutu pendidikan 2. Pelayanan kesehatan dan peningkatan derajat Kesehatan masyarakat 3. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak 4. Penanganan PMKS 5. Pembinaan Kepemudaan dan OR 6. Peningkatan literasi masyarakat 7. Peningkatan kualitas dan daya saing Naker
2	Kesejahteraan dan perekonomian daerah yang masih relatif terbatas	1. Eradikasi Kemiskinan 2. kesempatan kerja dan berusaha

No	Masalah Pokok	Masalah
		3. Produktifitas sektor pertanian dan ketahanan pangan 4. potensi pariwisata 5. Pengembangan Industri pengolahan komoditi pertanian, IKM 6. Pembinaan UMK dan Koperasi 7. Peningkatan iklim investasi
3	Infrastruktur wilayah yang relatif belum memadai	1. Infrastruktur jalan dan jembatan (Nasional, Provinsi, Kabupaten, Desa dan lingkungan), 2. Irigasi, DAS, Situ, Danau, dll 3. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman 4. Penyediaan Sarpra transportasi 5. Sarpra pengelolaan persampahan
4	Ancaman terhadap kelestarian LH sebagai dampak eksploitasi SDA secara illegal dan/ berlebihan	1. Pengendalian Pemanfaatan ruang 2. Perlindungan LH 3. Pemanfaatan SDA secara berkelanjutan
5	Ancaman terhadap ketertiban sosial dan lunturnya kebudayaan serta kearifan lokal	1. Pemeliharaan stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban sosial 2. Pembinaan , pelestarian, dan komodifikasi seni-budaya, dan kearifan lokal 3. Pembinaan Masyarakat Adat
6	Tantangan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	1. Reformasi birokrasi 2. Penataan daerah dan/ wilayah 3. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 4. Kualitas pengelolaan data, arsip, dan informasi publik 5. E-Government 6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7. Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8. Efektivitas peran APIP

Selanjutnya masalah pokok dan masalah sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas dapat dijabarkan dalam sejumlah akar permasalahan yang diidentifikasi berdasarkan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak, sebagai berikut:

Tabel 4.2
Identifikasi Akar Masalah Berdasar Urusan

No	Urusan	Akar Masalah
1.	Pendidikan	1. Terbatasnya akses dan mutu jenjang PAUD 2. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan SD dan SMP 3. Kurangnya kuantitas maupun kualitas tenaga pendidik 4. Kualitas pengelolaan data masih kurang.
2.	Kesehatan	1. Rendahnya validitas data sasaran kepesertaan JKN PBI 2. Rendahnya cakupan pelayanan KIA 3. Terbatasnya jumlah FKTP terakreditasi 4. Terbatasnya jumlah dan kompetensi tenaga medis
3.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Jumlah PLKB yang semakin berkurang; 2. Belum tertanganinya Kampung KB 3. Meningkatnya kasus perdagangan manusia 4. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
4.	Sosial	1. Rendahnya cakupan pelayanan terhadap PMKS 2. Rendahnya validitas dan reliabilitas data kemiskinan 3. Terbatasnya Fungsi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
5.	Kepemudaan dan Olahraga	1. Terbatasnya pembinaan pemuda dan olah raga 2. Terbatasnya sarana dan prasarana olah raga;

No	Urusan	Akar Masalah
		3. Terbatasnya kapasitas pembinaan dan penghargaan terhadap atlit berprestasi
6.	Kebudayaan	1. Terbatasnya jumlah event budaya 2. Terbatasnya kapasitas pemeliharaan dan pemanfaatan BCB 3. Terbatasnya kapasitas pembinaan terhadap masyarakat adat 4. Terbatasnya upaya pelestarian kekayaan seni dan budaya daerah
7.	Perpustakaan	1. Terbatasnya Jumlah perpustakaan dan/ taman baca di desa 2. Rendahnya literasi masyarakat 3. Terbatasnya jumlah tenaga pustakawan 4. Terbatasnya koleksi buku-buku / sumber bacaan
8.	Kearsipan	1. Terbatasnya jumlah tenaga arsiparis 2. Kurangnya sarana penyimpanan arsip yang memenuhi syarat
9.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Rendahnya ketersediaan dan kondisi infrastruktur wilayah. 2. Belum optimalnya pengendalian dan pemanfaatan ruang
10	Perumahan Rakyat dan Permukiman	1. Tingginya jumlah RTLH 2. Rendahnya ketersediaan dan kondisi PSU Perumahan dan Permukiman
11	Pertanahan	1. Kurangnya ketersediaan data pertanahan 2. Rendahnya sertifikasi lahan Pemda 3. Alih fungsi lahan, lahan kritis, dan lahan tidur
12	Perhubungan	1. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi 2. Belum optimalnya pengawasan serta pengendalian lalu lintas 3. Terbatasnya Interkoneksi antar moda transportasi 4. Masih kurangnya ketersediaan rambu-rambu keselamatan jalan 5. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam transportasi
13	Lingkungan Hidup	1. Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana persampahan 2. Meningkatnya kerusakan LH 3. Rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH
14	Komunikasi	1. Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan e-Govt 2. Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM pengelola e-Govt
15	Industri dan Perdagangan	1. Terbatasnya sarana perdagangan (pasar) dan keberadaannya belum merata 2. Tingginya pelanggaran– pelanggaran perdagangan 3. Rendahnya produktifitas dan mutu produk IKM
16	Koperasi dan UMK	1. Rendahnya jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang berijin 2. Rendahnya akses UMK terhadap Usaha Menengah dan Besar 3. Terbatasnya jumlah dan keberdayaan Koperasi
17	Pertanian	1. Berkurangnya fungsionalitas Infrastruktur jaringan irigasi 2. Rendahnya efektifitas dan efisiensi pengolahan lahan 3. Terbatasnya produksi Benih Berkualitas 4. Rendahnya efektifitas dan efisien proses panen 5. Terbatasnya jumlah penyuluh pertanian, peternakan dan perikanan 6. Tingginya resiko sebaran penyakit ternak 7. Rendahnya produktivitas pada wilayah basis 8. Rendahnya Kualitas dan kuantitas bibit ternak 9. Rendahnya rasio kepemilikan lahan petani yang rata-rata <0,19 ha/orang
18	Perikanan	1. Terbatasnya jumlah penyuluh perikanan 2. Rendahnya produksi benih berkualitas 3. Rendahnya produktifitas perikanan budidaya
19	Penanaman Modal	1. Rendahnya rasio antara rencana investasi dan realisasi investasi 2. Rendahnya jumlah investor yang berskala nasional 3. Prosedur Perijinan yang belum sederhana 4. Kapasitas Pelayanan Penanaman Modal yang belum memadai
20	Ketenagakerjaan	1. Rendahnya kualitas dan daya saing tenaga kerja 2. Rendahnya tingkat serapan tenaga kerja 3. Terbatasnya Jumlah lembaga/ Balai Latihan Kerja 4. Tingginya potensi perselisihan Hubungan Industrial
21	Pariwisata	1. Belum memadainya infrastruktur pendukung industri pariwisata 2. Rendahnya daya tarik dan daya saing obyek / destinasi wisata 3. Belum berkembangnya usaha jasa dan industri pariwisata

No	Urusan	Akar Masalah
		4. Rendahnya investasi dan efektifitas promosi 5. Belum suportifnya perilaku dan kesadaran masyarakat
22	Keuangan	1. Masih terbatasnya potensi obyek pajak 2. Efektivitas intensifikasi pajak dan retribusi daerah belum optimal 3. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional
23	Kepegawaian	1. Masih terbatasnya ASN mengikuti diklat teknis dan struktural 2. Belum optimalnya unsur perilaku yang berorientasi pelayanan 3. Terbatasnya jumlah dan mutu sarpra pelayanan 4. Cukup nyatanya kesenjangan mutu pelayanan antarunit dan antarwilayah
24	Pemberdayaan Masyarakat	1. Belum optimalnya sinergi pembangunan Kabupaten dan Desa 2. Terbatasnya kapasitas manajerial aparatur pemerintahan desa 3. Tingginya jumlah desa tertingal
25	Ketentraman dan Ketertiban	1. Rendahnya kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat 2. Belum optimalnya kemitraan masyarakat 3. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional penegakan Perda 4. Terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM 5. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional penanganan kebakaran
26	Pengawasan	1. Terbatasnya jumlah Auditor 2. Sistem pengawasan internal yang belum efektif
27	Urusan Kependudukan	1. Rendahnya kesadaran masyarakat akan tertib administrasi kependudukan 2. Terbatasnya cakupan layanan adminduk

Keterkaitan pemahaman deskripsi permasalahan pembangunan yang diidentifikasi berdasarkan obyeknya serta dijabarkan dalam sejumlah akar permasalahan yang diidentifikasi berdasarkan bidang urusan pemerintahan pada Bab 4, selanjutnya dilakukan perumusan visi, misi, tujuan sasaran pembangunan sebagai bagian dari solusi permasalahan dalam pembangunan pada Bab 5, dan ditetapkan strategi arah kebijakan serta program pembangunan daerah dan program perangkat daerah pada Bab 6, kemudian dilakukan penataan program pembangunannya pada setiap urusan pelayanan, indikator kinerja utamanya dan indikasi kegiatan yang mendukung pencapaian kinerjanya disertai indikasi pendanaannya pada Bab 7.

Rangkaian tersebut merupakan hubungan sebab akibat. Ketepatan dalam mengidentifikasi sebab permasalah akan menentukan ketepatan sasaran dalam menetukan kebijakan program dan kegiatannya serta yang mengemban indikator kinerja utamanya.

4.2 Isu Strategis

Istilah "isu" secara gramatikal dapat dipahami sebagai "*an important topic or problem for debate or discussion*" atau "*problems or difficulties, especially with a service or facility*." (OED, 2018). Sedangkan istilah strategis pada frasa "isu strategis) menunjukkan fungsinya sebagai adjektiva yang bermakna "*relating to the identification of long-term or overall aims and interests and the means of achieving them*." (OED, 2018). Karenanya berdasarkan pengertian di atas maka isu strategis pembangunan daerah dan permasalahan pembangunan daerah

berada pada domain dan/ dimensi berbeda. Sesuatu yang menjadi permasalahan pembangunan daerah sudah tentu merupakan isu strategis daerah. Namun sesuatu yang disebut sebagai isu strategis daerah sudah tentu bukanlah permasalahan daerah, karena sesuai definisinya permasalahan pembangunan daerah haruslah dirasakan sebagai masalah dan membutuhkan solusi dan/ atau penanganan segera karena terkait dengan kebutuhan publik pada masa sekarang.

Secara operasional, isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Fokus formulasi isu strategis adalah masa depan, yaitu segala hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah di masa depan. Termasuk dalam pengertian ini adalah potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan. Isu strategis dapat diidentifikasi berdasarkan skala permasalahannya: lokal, provinsial, nasional, atau internasional; dapat berkaitan obyeknya dengan masalah namun bukan masalah itu sendiri.

4.2.1. ISU STRATEGIS INTERNATIONAL

Isu-isu strategis di tingkat internasional (Global) yang relevan bagi perencanaan pembangunan selama lima tahun masa perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten lebak antara lain:

1. Gejolak perekonomian dunia yang potensial berdampak pada kapasitas ekspor, nilai tukar Rupiah, kenaikan harga, dll;
2. Ancaman terorisme global
3. Ancaman penetrasi ekonomi dan budaya asing, termasuk tenaga kerja asing
4. Ancaman peredaran narkoba
5. Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) dan arus deras informasi yang tak terbendung, disertai dengan rendahnya literasi
6. Ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang cenderung meningkat

Sebagai bentuk tindak lanjut dari agenda internasional yang disepakati secara internasional, perencanaan pembangunan wajib memperhatikan poin-poin Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's) sebagai bagian dari substansi perencanaan jangka panjang. terkait pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030, terdapat 17 (tujuh belas) tujuan yang wajib diselesaikan sebagai bagian dari penyelesaian 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu : lingkungan, sosial dan ekonomi. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Keseluruhan tujuan global tersebut adalah :

1. Tanpa kemiskinan, yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun.
2. Tanpa kelaparan, yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3. Kehidupan sehat dan sejahtera, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.

4. Pendidikan berkualitas, yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. Kesetaraan gender, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
6. Air bersih dan sanitasi layak, yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. Energi bersih dan terjangkau, yaitu menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Industri, inovasi dan infrastruktur, yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. Berkurangnya kesenjangan, yaitu mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.
11. Kota dan komunitas berkelanjutan, yaitu menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yaitu menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Penanganan perubahan iklim, yaitu mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Ekosistem laut, yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Ekosistem daratan, yaitu melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan, yaitu menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

4.2.2. ISU STRATEGIS NASIONAL

A. Pengembangan Wilayah Nasional

Isu utama pembangunan wilayah nasional adalah masih besarnya kesenjangan antarwilayah khususnya kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Berdasarkan RPJMN 2015 - 2019 dalam

konteks pembangunan wilayah arah kebijakan utama pengembangan wilayah nasional difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Dalam konteks Pengembangan Wilayah kabupaten Lebak, Provinsi Banten merupakan bagian dari Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan wilayah Jawa – bali. Hal yang perlu dicermati berkaitan dengan isu strategis wilayah Jawa khususnya Kabupaten Lebak yaitu :

1. **Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan** berupa pembangunan kota baru di Jawa-Bali dengan lokasi prioritas Kota **Maja (B1)** di Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak dengan fokus pengembangan sebagai pusat permukiman baru yang layak huni dan didukung oleh fasilitas ekonomi dan sosial budaya yang lengkap guna mencegah terjadinya permukiman tidak terkendali (urban sprawl) akibat urbanisasi di kota otonom terdekatnya.
2. **Pengembangan Daerah Tertinggal** dilakukan melalui strategi Penguatan Konektivitas dengan Penyediaan dan pembangunan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api, khususnya di Kabupaten Pandeglang dan Lebak.
3. **Prioritas Program Pembangunan** dengan kegiatan strategis berupa Percepatan pembangunan infrastruktur berupa :
    a. Revitalisasi Jaringan KA Rangkasbitung-Saketi-Malimping-Bayah
    b. Pembangunan jalur ganda KA dan elektrifikasi antara Maja - Rangkasbitung -Merak; dan
    c. Reaktivasi jalur KA antara Rangkasbitung – Labuan
    d. Pembangunan Jalan Cikande – Rangkasbitung
    e. Pembangunan Jalan Cipanas-Warung banten – Bayah
    f. Pembangunan Jalan Lintas Selatan Banten
    g. Pembangunan Waduk Karian Kab. Lebak
    h. Pembangunan Saluran Pembawa Air Baku Waduk Karian
    i. Pembangunan gedung untuk peningkatan akses pendidikan menengah SMA/SMK (lebak, pandeglang dan Kab.Serang);

B. Dampak ekonomi, sosial, dan politik sepanjang penyelenggaraan dan pascapemilu 2019

C. Perubahan orientasi kebijakan nasional yang berdampak pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (BPJS, e-KTP, dll)

D. Kebijakan ekonomi nasional (BBM, TDL, cukai rokok, dll) yang potensial berdampak pada gejolak harga, menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya pengangguran, dll

4.2.3 ISU STRATEGIS PROVINSI BANTEN

Sesuai RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 isu strategis Provinsi banten, bahwa Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya sangat signifikan bagi entitas daerah/ masyarakat dimasa mendatang, yang meliputi permasalahan yang berlarut sudah sampai pada titik tertentu, menimbulkan dampak amat luas, yang menyangkut permasalahan kewenangan

dan terkadang tidak mudah dijelaskan tetapi dirasakan kehadirannya. Isu strategis di provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. Isu strategis kesenjangan wilayah

a. Ketimpangan Aksesibilitas Pendidikan
b. Ketimpangan Aksesibilitas Kesehatan
c. Ketimpangan Daya Beli Masyarakat
d. Kurangnya Infrastruktur Ekonomi Masyarakat (Sesuai Potensi Ekonomi Wilayah)
e. Ketimpangan Kemandirian Fiskal Antar Daerah dan Wilayah
f. Kurangnya Konektivitas Infrastruktur Kewilayahan dan Antar Wilayah

2. Isu strategis daya saing daerah (Sumber daya alam dan sumber daya manusia)

a. Ketimpangan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Akibat Lemahnya Kualitas Sumber Daya Manusia
b. Ketimpangan Investasi Antar Wilayah
c. Kurangnya Daya Dukung Infrastruktur dalam Meningkatan Investasi
d. Kemiskinan dan pengangguran
e. Tata kelola pemerintahan

3. Isu strategis Kemiskinan dan pengangguran
4. Isu Strategis Tata Kelola Pemerintahan
5. Isu Strategis Kebencanaan.

4.2.4 ISU STRATEGIS KABUPATEN LEBAK PADA RPJMD PROVINSI BANTEN 2017-2022

Yang menjadi isu strategis dalam pembangunan di Kabupaten Lebak sebagaimana RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 adalah sebagai berikut,

1. Aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
2. Kemiskinan dan ketenagakerjaan
3. Iklim investasi dan daya saing daerah
4. Ketahanan pangan
5. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah
6. Pengendalian pemanfaatan ruang dan kelestarian lingkungan hidup.

4.2.5 ISU STRATEGIS DAERAH KABUPATEN TERDEKAT

KABUPATEN PANDEGLANG

Yang menjadi isu strategis dalam pembangunan di kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia masih rendah,
2. Penataan ruang dan kawasan/kewilayahan kabupaten Pandeglang masih belum optimal.
3. Sarana dan prasarana dasar belum memadai,
4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi unggulan daerah,
5. Pertumbuhan ekonomi daerah belum menunjukkan tingkat perkembangan yang signifikan,

6. Tata kelola dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah masih lemah,

KABUPATEN SERANG

Yang menjadi isu strategis dalam pembangunan di Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial
2. Ketersediaan dan Kualitas Pelayanan Infrastruktur
3. Penataan Ruang, Permukiman, Pengelolaan Bencana dan Lingkungan Hidup
4. Pemerataan dan Kualitas Perekonomian
5. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta Kualitas Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat

KABUPATEN TANGERANG

Adapun isu strategis dalam pembangunan di kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Angka laju pertumbuhan ekonomi (LPE) tahun 2015 yang sebesar 5,39 persen masih harus terus ditingkatkan dalam rangka penyerapan tenaga kerja (mengurangi pengangguran)
2. Angka indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2015 adalah 70,05 yang berarti menyamai IPM provinsi Banten yang sudah menembus batas angka 70, namun demikian hal itu masih perlu ditingkatkan lagi dalam rangka kualitas SDM yang lebih baik lagi.
3. Tingkat urbanisasi dan migrasi yang meningkat sementara angka laju pertumbuhan penduduk (LPP) adalah sebesar 3,24 persen yang berada di atas angka rata-rata nasional.
4. Angka tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) tahun 2015 adalah sebesar 62,46 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 9 persen. Kondisi kinerja ketenagakerjaan masih harus terus diperbaiki.
5. Seiring dengan pertumbuhan urbanisasi dan migrasi, dimana Kabupaten Tangerang adalah termasuk daerah penyangga ibukota DKI Jakarta maka pertumbuhan pemukiman dan kekumuhan di wilayah Kabupaten Tangerang adalah sesuatu yang sulit dihindari. Akibatnya keindahan dan keteraturan kabupaten Tangerang akan terganggu.
6. Daerah penyangga ibukota DKI Jakarta juga menjadikan Kabupaten Tangerang mengalami kemacetan lalu lintas. Hal ini terutama terjadi ketika jam berangkat kerja di pagi hari dan pulang kerja di sore-malam hari.
7. Angka kemiskinan masih harus terus ditekan dari posisi yang sekarang karena hal ini mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di wilayah kabupaten Tangerang.
8. Masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI-AKB) serta keberadaan penyakit menular yang mengganggu kinerja pembangunan kesehatan di wilayah Kabupaten Tangerang.

KABUPATEN SUKABUMI

Isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi pada periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan agribisnis, Minapolitan dan lembaga keuangan pertanian
2. Peningkatan Ketahanan Pangan
3. Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan
4. Terciptanya iklim investasi yang kondusif

5. Pengembangan pariwisata Daerah
6. Peningkatan peran pemuda dan Pembinaan prestrasi Olahraga
7. Pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan
8. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
9. Pemberdayaan serta perlindungan bagi perempuan dan anak
10. Reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
11. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pembangunan yang mendukung e-government
12. Masih Rendahnya Pendapatan Asli daerah
13. Membangun budaya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
14. Meningkatkan Akses Layanan Derajat Kesehatan Masyarakat
15. Peningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan
16. Penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan
17. Peningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah
18. Menurunkan degradasi kualitas lingkungan hidup

KABUPATEN BOGOR

Yang menjadi isu strategis dalam pembangunan di Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing;
2. Peningkatan pelayanan pendidikan
3. Peningkatan pelayanan kesehatan
4. Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat
5. Peningkatan daya saing dan produktivitas perekonomian daerah
6. Peningkatan investasi daerah
7. Peningkatan konektivitas infrastruktur wilayah
8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
9. Pengelolaan kebencanaan
10. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
11. pengelolaan dan pelestarian budaya daerah
12. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
13. Peningkatan pelayanan publik

4.2.6 ISU STRATEGIS DAERAH DALAM RPJPD KABUPATEN LEBAK 2005-2025

Yang menjadi isu strategis daerah dalam RPJPD Kabupaten Lebak tahun 2005 – 2025 adalah :

1. Pertumbuhan Ekonomi
   Adanya kesenjangan yang terjadi antara Kabupaten Lebak dengan wilayah sekitarnya terutama wilayah Jabotabek dan wilayah Banten bagian utara;
2. Pemerataan Pembangunan
   Belum fokusnya strategi pemerataan pada pemberdayaan dan penciptaan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah;
3. Kemandirian Ekonomi

Kemampuan daerah untuk secara dinamis tumbuh berdasarkan potensi sumberdaya yang dimiliki

4.2.7 ISU STRATEGIS TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LEBAK 2014 - 2034

Isu strategis terkait dengan pengembangan wilayah Kabupaten Lebak meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Posisi Kabupaten Lebak yang cukup strategis
   Posisi Kabupaten Lebak yang cukup strategis, karena merupakan salah satu wilayah perbatasan dengan Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi).
2. Arahan Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Lebak
   RTRW Provinsi Banten mengarahkan beberapa pusat pertumbuhan di Kabupaten Lebak untuk fungsi PKW, PKWp, dan PKL.
3. Pengembangan Kawasan Kekerabatan Maja
   Kota Kekerabatan Maja diproyeksikan menjadi salah satu penyangga di bagian barat Metropolitan Jakarta. Kedudukannya dalam konteks wilayah yang lebih luas, cukup strategis dan terletak di 2 propinsi (Jawa Barat dan Banten).
4. Perkembangan penduduk
   Proyeksi penduduk pada tahun 2032 adalah 1.703.991 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk mencapai 5,16 jiwa/ha.
5. Perekonomian
   Kabupaten Lebak memiliki beberapa potensi perekonomian yang dapat menunjang perkembangan wilayah yaitu: Pertambangan dan penggalian, Pertanian, Jasa-jasa, Bangunan dan konstruksi, Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, Perdagangan, hotel dan restoran
6. Kawasan Baduy yang dijaga kelestariannya
7. Kawasan rawan bencana
   Beberapa kawasan di Kabupaten Lebak memiliki potensi bencana, diantaranya rawan bencana longsor, rawan bencana banjir, dan rawan bencana tsunami.

4.2.8 ISU STRATEGIS KABUPATEN LEBAK

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan isu strategis serta sejumlah pengertian di atas maka isu strategis Kabupaten Lebak dalam hal ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Tabel 4.3
Identifikasi Isu Strategis Daerah

No	Isu Strategis	Faktor Penentu Keberhasilan
I	**Isu Tingkat Lokal**	
1	Luas wilayah yang mencapai 330.507,18 hektar atau sekira 34,20% dari luas Provinsi, berpotensi menghadapi problem aksesibilitas dan efektifitas rentang kendali	(1) Efektifitas koordinasi; (2) Sarana dan prasarana transportasi; (3) Penataan wilayah kecamatan dan desa; (4) Efektifitas Pemdes

No	Isu Strategis	Faktor Penentu Keberhasilan
2	Potensi perikanan dan pariwisata pada wilayah pesisir dengan panjang pantai mencapai 91,42 km	(1) Infrastruktur wilayah; (2) peningkatan usaha tani/ nelayan, (3) pengembangan pariwisata ; (4) pemberdayaan masy., UMK, IKM
3	Potensi wisata alam, sejarah, dan budaya yang beragam	(1) Infrastruktur wilayah; (2) Investasi; (3) pemberdayaan masy., UMK, IKM
4	Kawasan Kota Publik Maja sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat,	(1) Infrastruktur wilayah;(2) Perdagangan dan jasa; (3) Investasi
5	Potensi Waduk Karian pascaoperasi: perikanan, sumber air baku, irigasi, dan pariwisata	(1) Infrastruktur wilayah; (2) peningkatan usaha tani/ nelayan, (3) pengembangan pariwisata
6	Potensi Lebak sebagai daerah lumbung pangan regional/nasional	(1) Produktifitas sektor pertanian; (2) Penegakan tata ruang
7	Potensi sumber daya alam dan sebagai wilayah konservasi dalam konteks pembangunan berkelanjutan	(1) Infrastruktur wilayah; (2) Investasi; (3) pemberdayaan masy., UMK, IKM
8	Potensi bencana geologi di sejumlah daerah rawan bencana	(1) Kesiapsiagaan; (2) pengetahuan kebencanaan masyarakat; (3) efektifitas mitigasi
II	**Isu Tingkat Nasional**	
9	Dampak ekonomi, sosial, dan politik sepanjang penyelenggaraan dan pascapemilu 2019	(1) Efektifitas koordinasi; (2) ketaatan dan penegakan hukum
10	Perubahan orientasi kebijakan nasional yang berdampak pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (BPJS, e-KTP, dll)	(1) Kreatifitas dan inovasi daerah; (2) efektifitas koordinasi dan kerjasama
11	Kebijakan ekonomi nasional (BBM, TDL, cukai rokok, dll) yang potensial berdampak pada gejolak harga, menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya pengangguran, dll	(1) Kreatifitas dan inovasi daerah; (2) efektifitas koordinasi dan kerjasama
12	Pelaksanaan sejumlah proyek / agenda strategis nasional di daerah	(1) Kreatifitas dan inovasi daerah; (2) efektifitas koordinasi dan kerjasama
III	**Isi Tingkat Global**	
13	Gejolak perekonomian dunia yang potensial berdampak pada kapasitas ekspor, nilai tukar Rupiah, kenaikan harga, dll	(1) Kreatifitas dan inovasi daerah; (2) efektifitas koordinasi dan kerjasama
14	Ancaman terorisme global	(1) Efektifitas koordinasi dan kerjasama
15	Ancaman penetrasi ekonomi dan budaya asing, termasuk tenaga kerja asing	(1) Kreatifitas dan inovasi daerah; (2) efektifitas koordinasi dan kerjasama
16	Ancaman peredaran narkoba	(1) Efektifitas koordinasi dan kerjasama
17	Perkembangan TIK dan arus deras informasi yang tak terbendung, disertai dengan rendahnya literasi	(1) Kualitas SDM; (2) pemutakhiran Sarpra; (3) Literasi Masyarakat
18	Ancaman TPPO yang cenderung meningkat	(1) Efektifitas koordinasi dan kerjasama; (2) pemberdayaan masyarakat

Analisis terhadap urgensi dan dampak isu strategis di atas terhadap substansi dan implementasi RPJMD Kabupaten Lebak pada kurun waktu lima tahun mendatang dijustifikasi secara kuantitatif dengan menggunakan parameter sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah
3. Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan

Berdasarkan parameter di atas, diperoleh peringkat isu strategis daerah sebagai berikut:

1. Potensi pariwisata alam, sejarah, dan budaya yang beragam
2. Potensi Lebak sebagai daerah lumbung pangan regional/nasional
3. Kawasan Kota Publik Maja sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat
4. Potensi Waduk Karian pascaoperasi: perikanan, sumber air baku, irigasi, dan pariwisata
5. Potensi sumber daya alam dan sebagai wilayah konservasi dalam konteks pembangunan berkelanjutan
6. Potensi bencana geologi di sejumlah daerah rawan bencana
7. Potensi wilayah pesisir dengan panjang pantai mencapai 91,42 km
8. Kebijakan ekonomi nasional (BBM, TDL, cukai rokok, dll) yang potensial berdampak pada gejolak harga, menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya pengangguran, dll
9. Perubahan orientasi kebijakan nasional yang berdampak pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (BPJS, e-KTP, dll)
10. Pelaksanaan sejumlah proyek / agenda strategis nasional di daerah
11. Luas wilayah yang mencapai 330.507,16 hektar atau sekira 34,20% dari luas Provinsi, berpotensi menghadapi problem aksesibilitas dan efektifitas rentang kendali
12. Perkembangan TIK dan arus deras informasi yang tak terbendung, disertai dengan rendahnya literasi
13. Ancaman penetrasi ekonomi dan budaya asing, termasuk tenaga kerja asing
14. Gejolak perekonomian dunia yang potensial berdampak pada kapasitas ekspor, nilai tukar Rupiah, kenaikan harga, dll
15. Ancaman peredaran narkoba
16. Dampak ekonomi, sosial, dan politik sepanjang penyelenggaraan dan pascapemilu 2019
17. Ancaman terorisme global
18. Ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang cenderung meningkat

Berdasarkan hasil analisis isu strategis daerah di atas, maka orientasi dalam penyusunan tujuan dan sasaran, serta target kinerja pada urusan-urusan yang terkait / terdampak oleh isu strategis di atas, dapat disesuaikan dan/ dijustifikasi oleh tingkat urgensi dan skala dampak dari masing-masing isu strategis di atas, sebagaima tercermin dari peringkat dan/ atau skor isu strategis tersebut. Isu strategis tentang potensi pariwisata alam, sejarah, dan budaya

misalnya, yang diasesmen sebagai isu strategis dengan peringkat dan skor tertinggi, harusnya digunakan sebagai dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, serta target capaian bidang kepariwisataan, infrastruktur, serta keuangan / pendapatan daerah. Pada bidang kepariwisataan, upaya pengembangan destinasi wisata harus tergambarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan. Demikian pula dengan pembangunan infrastruktur yang relevan dan/ atau mendukung upaya pembangunan destinasi pariwisata tersebut, seperti halnya penyesuaian terhadap target pendapatan asli daerah dari sumber pajak hotel dan restoran, pajak dan retribusi parkir, pajak dan retribusi tempat hiburan/rekreasi, dan lain-lain.



BAB V
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1 Visi

Visi pada dasarnya adalah pandangan atau wawasan ke depan tentang suatu keadaan yang diharapkan dapat dicapai pada suatu waktu tertentu. Visi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 merupakan transformasi dari visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 yaitu "*Lebak Menjadi Daerah yang Maju dan Religius Berbasis Perdesaan*", yang dikontekstualisasi dengan tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi pada periode lima tahun mendatang. RPJMD Kabupaten Lebak 2019-2024 ini sendiri merupakan tahapan keempat dalam skenario RPJPD Kabupaten Lebak Tahun 2005-2025, yang difokuskan pada tema "*Pertumbuhan berkesinambungan dan kemandirian ekonomi*". Dengan fokus tersebut, RPJMD pada tahapan keempat RPJPD dimaksud diharapkan dapat mewujudkan beberapa karakteristik kondisi sebagai berikut: (1) pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6% per tahun; (2) kualitas SDM semakin meningkat; (3) semakin tumbuhnya wirausaha baru; (4) kontribusi sektor jasa pada struktur ekonomi daerah semakin besar; (5) meningkatnya penggunaan sistem informasi dan komunikasi yang tetap menjaga karakter masyarakat Lebak yang Iman, Aman, Uman dan Amin; serta (6) pemerintahan daerah menerapkan *e-Government* secara optimal untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD disusun salah satunya dengan pendekatan politis, yaitu penterjemahan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD (pasal 261 ayat 4). Karenanya substansi RPJMD pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN (pasal 263 ayat 3).

Visi kepala daerah terpilih yang akan difokuskan pada upaya mewujudkan "*Kabupaten Lebak sebagai Destinasi Wisata Unggulan Nasional Berbasis Potensi Lokal*" merupakan langkah terobosan yang dipilih bagi percepatan pembangunan ekonomi daerah yang sekaligus merupakan kontekstualisasi dari visi RPJPD yang bertujuan memajukan wilayah perdesaan, yang secara faktual memiliki potensi besar di sektor kepariwisataan. Dan dengan pilihan pada sektor kepariwisataan ini diyakini akan mampu menumbuhkan dan mengintegrasikan beragam sektor secara optimal, termasuk didalamnya adalah sektor pertanian yang saat ini menjadi sumber penghidupan utama masyarakat perdesaan. Untuk mencapai



Visi Kepala Daerah tersebut, tentunya diperlukan program prioritas yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penentuan program pembangunan pada tahun 2019-2024.

Adapun program prioritas Kepala Daerah sesuai dengan yang disampaikan pada saat masa kampanye yang dikelompokan berdasarkan Misi yaitu :

1. *Program kerja dalam mendukung **Misi Pertama** (Meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis pengembangan wisata) :*
    1) Mengembangkan wisata berbasis komunitas, perdesaan dan kearifan lokal;
    2) Perluasan Klaster Komoditas Unggulan;
    3) Pemantapan kawasan wisata terintegrasi;
    4) Revitalisasi Bangunan Bersejarah / Benda Cagar Budaya;
    5) Memadukan pengembangan promosi UMKM dengan Pariwisata;
    6) Meningkatkan Pemberdayaan dan enterpreunership kalangan usia produktif dalam peningkatan dan penguatan UMKM berbasis potensi lokal;
    7) Mengokohkan Kabupaten Lebak sebagai lumbung pangan nasional;
    8) Meningkatkan Standarisasi pelayanan Pasar Daerah;
    9) Festival Tahunan Wisata Unggulan (Festival Baduy, Seren Taun, Tour de Sawarna,dll);
    10) Menerapkan kebijakan “1 Desa 1 BUMDes produktif” dalam rangka fasilitasi kemandirian desa.
    11) Revitalisasi bangunan cagar Budaya untuk melestarikan keluhuran budaya dan kearifan local dalam rangka perluasan destinasi wisata daerah.
2. *Program kerja dalam mendukung **Misi Kedua** (Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Mandiri dan berkarakter):*
    1) Pembangunan Karakter dan Mentalitas Masyarakat Lebak;
    2) Optimalisasi BLK sebagai pusat peningkatan keterampilan dan informasi;
    3) Membangun kemitraan dengan Pihak Swasta dan Lembaga Sosial;
    4) Melanjutkan Program Beasiswa bagi Mahasiswa Kedokteran Negeri, MIPA dan Teknik;
    5) Pemberian beasiswa personal SMP;
    6) Tuntas Rehab SD dan SMP;
    7) Pelayanan Kesehatan Untuk Semua (Masyarakat Miskin, Pimpinan Ponpes, Kader Posyandu, Perangkat Desa, dan lain-lain);
    8) Melanjutkan Peningkatan Puskesmas Rawat Jalan menjadi Puskesmas DTP;
    9) Kunjungan Bidan dan jaminan persalinan Kampung Terpencil melalui perluasan Program Undang, Antar, Jemput dan Selamat (UJAS);
    10) Standarisasi pelayanan kesehatan;
    11) Pengembangan Taman Posyandu;

12) Penanganan Anak Jalanan dan Pengemis;
13) Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

3. *Program kerja dalam mendukung **Misi Ketiga** (Menjamin Ketersediaan Infrastruktur Strategis Wilayah dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan):*
   1) Peningkatan Aksesibilitas Pariwisata;
   2) Menjamin kualitas jalan strategis kabupaten;
   3) Perluasan penanganan rehab rumah tidak layak huni;
   4) Peningkatan Akses Sarana Air Bersih;
   5) Peningkatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air;
   6) Perluasan Cakupan Sanitasi;
   7) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik;
   8) Melanjutkan Intervensi untuk Konektifitas antar wilayah melalui Penanganan Jalan Poros Desa dan Peningkatan Jalan;
   9) Melanjutkan Penanganan Jembatan Gantung;
   10) Mewujudkan wilayah perkotaan yang tertata rapi, asri dan hijau melalui peningkatan fasilitas umum, sosial serta Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan RPTRA;
   11) Membangun gedung serbaguna, fasilitas umum dan fasilitas sosial di ibu kota kecamatan secara bertahap.
   12) Penguasaan lahan untuk penunjang penyediaan fasos fasum;
   13) Pendayagunaan lahan-lahan terlantar menjadi lahan produktif;
   14) Pengendalian AMDAL / Dokumen Lingkungan Lainnya yang tegas dan konsisten terhadap aktifitas investasi yang berdampak signifikan terhadap lingkungan;

4. *Program kerja dalam mendukung **Misi Keempat** (Meningkatkan Kinerja Birokrasi yang Produktif, Efektif, Inovatif dan Berdaya saing):*
   1) Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat dengan Nilai “4” (Sangat memuaskan);
   2) Peningkatan dan Pemantapan Tata Kelola Keuangan Daerah (WTP);
   3) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dengan Kategori “A” (Memuaskan)
   4) Dashboard Pelayanan Publik;
   5) Pemberlakuan mekanisme punishment dan reward terhadap ASN secara tegas;
   6) Peningkatan Kapasitas ASN;
   7) Melanjutkan *Goverment Mobile Services*;
   8) Membangun *Networking* dalam rangka alternatif skema penganggaran dan investasi;
   9) *Lebak Open Goverment* sampai tingkat desa;

Berdasarkan visi RPJPD Tahun 2005-2025, serta visi kepala daerah sebagaimana dijelaskan di atas, maka visi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 diarahkan guna mewujudkan :

“Lebak Sebagai Destinasi Wisata Unggulan Nasional
Berbasis Potensi Lokal”

Terdapat dua frasa kunci yang menjadi karakteristik kondisi yang ingin dicapai dalam visi di atas, yaitu: destinasi wisata unggulan nasional, dan berbasis potensi lokal. Destinasi wisata unggulan nasional, menggambarkan kondisi terwujudnya Kabupaten Lebak sebagai salah satu daerah tujuan wisata berskala nasional, memiliki *event* wisata yang terdaftar sebagai *event* wisata nasional dalam kalender pariwisata nasional, serta memiliki daya dukung yang memadai bagi pengembangan industri pariwisata di masa depan. Sedangkan frasa "berbasis potensi lokal" merupakan penegasan komitmen terhadap pengembangan beragam potensi lokal, baik potensi masyarakat (SDM), potensi sumber daya alam, potensi kebudayaan, serta beragam potensi sosial-ekonomi yang dimiliki Kabupaten Lebak. Beragam potensi lokal tersebut akan dikembangkan secara integratif melalui pengembangan sektor pariwisata sebagai *leading sector*-nya sehingga diharapkan mampu mengakselerasi pembangunan ekonomi daerah serta sekaligus mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Visi RPJMD Kabupaten Lebak tahun 2019 – 2024 diharmonisasikan dengan sejumlah regulasi terkait, seperti: RPJPN, RPJPD Provinsi, RPJMN, RPJMD Provinsi Banten, dan RPJPD Kabupaten Lebak. Adapun visi masing masing dokumen perencanaan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Keterkaitan Visi Antar Dokumen Perencanaan

DOKUMEN PERENCANAAN	VISI
RPJPN 2005-2025	*Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur*
RPJPD Provinsi Banten 2005-2025	*Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa*
RPJPD Kabupaten Lebak 2005-2025	*Lebak Menjadi Daerah yang Maju dan Religius Berbasis Perdesaan*
RPJMN 2015-2019	*Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong*
Teknokratik RPJMN 2020-2024	*Indonesia Berpenghasilan Menengah – Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan*
RPJMD Provinsi Banten 2017-2022	*Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlaqul Karimah*

5.2 Misi

Upaya mewujudkan visi di atas diterjemahkan dalam 5 (lima) misi operasional sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
2. Meningkatkan produktifitas perekonomian daerah melalui pengembangan pariwisata;

3. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah;
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi pertama, meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, dirumuskan dalam rangka menjawab tantangan dan permasalahan daerah sebagaimana dirumuskan pada poin (2) tentang peningkatan kualitas dan daya saing SDM; poin (4) tentang peningkatan kesempatan bekerja dan berusaha, khususnya yang terkait dengan pembinaan kewirausahaan di kalangan pemuda; seluruhnya terdapat dalam bab IV sub bab 4.1. Misi ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sehingga ruang lingkup misi ini mencakup beberapa urusan, yaitu: pendidikan, kesehatan, sosial, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan perpustakaan. Pada urusan pendidikan, misi ini memiliki sasaran meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata. Pada urusan kesehatan sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan. Pada urusan kepemudaan dan olahraga sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya peran kepemudaan dan olahraga. Pada urusan sosial, sasaran yang ingin dicapai adalah menurunnya penduduk miskin. Dengan misi ini pada akhirnya diharapkan dapat diwujudkan kondisi sumberdaya manusia yang berdaya saing dengan kompetensi yang mumpuni, kreatif, inovatif dan berkarakter yang didukung dengan moralitas yang berbasis nilai-nilai agama yang kokoh.

Misi kedua, meningkatkan produktifitas perekonomian daerah melalui pengembangan pariwisata, dirumuskan dalam rangka menjawab tantangan dan permasalahan daerah sebagaimana dituangkan pada poin (4) tentang peningkatan kesempatan bekerja dan berusaha; poin (5) tentang ketahanan pangan; poin (8) tentang pengembangan potensi pariwisata daerah; poin (9) tentang pengembangan perekonomian daerah khususnya sektor industri, perdagangan, UMKM dan koperasi, peningkatan iklim investasi serta daya saing Daerah; poin (12) tentang pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan desa, dan masyarakat adat; seluruhnya telah dijelaskan dalam bab IV sub bab 4.1. Misi ini bertujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, yang akan ditempuh melalui pencapaian sasaran strategis pada 11 (sebelas) urusan, yaitu: urusan ketenagakerjaan, urusan pariwisata, penanaman modal, ketahanan pangan; pertanian, perkebunan dan peternakan; perikanan dan kelautan; kehutanan; perdagangan, perindustrian; koperasi dan UMKM, serta kebudayaan.

Pada urusan ketenagakerjaan, sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas dan daya saing tenaga kerja. Dan sasaran yang hendak dicapai pada urusan kebudayaan adalah meningkatnya kualitas kebudayaan daerah sehinga mampu berkontribusi bagi penguatan identitas dan karakter masyarakat

Pada urusan kepariwisataan sasaran yang hendak dicapai adalah tumbuhnya industri pariwisata di daerah. Pada urusan penanaman modal sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya pertumbuhan investasi. Pada urusan ketahanan pangan sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya indeks

ketahanan pangan daerah. Pada urusan pertanian, perkebunan, dan peternakan, sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya produktifitas pertanian, perkebunan, dan peternakan. Pada urusan perdagangan dan industri, sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya produktifitas sektor perdagangan dan industri. Pada urusan koperasi dan UMKM, sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya produktifitas koperasi dan UMKM. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai pada urusan kebudayaan adalah meningkatnya kualitas kebudayaan daerah sehinga mampu berkontribusi bagi penguatan identitas dan karakter masyarakat.

Dengan menjadikan pariwisata sebagai *leading sector* pembangunan ekonomi, diyakini akan mengubah wajah perekonomian daerah sehingga Kabupaten Lebak tidak lagi hanya menjadi penyedia bahan baku yang dihasilkan dari sektor pertanian, perikanan, perkebunan; namun juga semakin berkembang beragam jenis aktifitas ekonomi dan ekonomi kreatif yang mampu menggerakan usaha/industri kecil dan menengah serta meningkatnya keberdayaan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Misi ketiga, meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah, diformulasi dalam menjawab tantangan dan permasalahan daerah sebagaimana tertuang dalam bab IV, sub bab 4.1, khususnya pada poin (1) tentang infrastruktur wilayah; poin (7) khususnya yang terkait dengan penataan pemanfaatan ruang; (8) tentang pengembangan pariwisata, khususnya yang terkait dengan dukungan infrastruktur penunjang tumbuhnya industri pariwisata daerah; (9) khususnya yang terkait dengan penyediaan infrastruktur yang memadai bagi meningkatnya iklim investasi dan perekonomian daerah, serta peningkatan adaptabilitas pelaku ekonomi terhadap revolusi industri 4.0; (10) tentang mitigasi bencana, yaitu penyediaan sarana dan prasarana yang sensitif terhadap isu kebencanaan; dan poin (13) tentang pemerintahan yang bersih dan berwibawa, khususnya yang terkait dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dalam mengoptimalkan penerapan *e-government.* Karenanya ruang lingkup misi ini mencakup 8 (delapan) urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak, yaitu: urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; urusan kepariwisataan; penanaman modal termasuk didalamnya adalah pelayanan terpadu satu pintu; urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, khususnya yang terkait dengan isu kebencanaan; urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman; urusan perhubungan; urusan komunikasi dan informatika; serta urusan energi dan sumber daya mineral, khususnya yang terkait dengan masalah elektrifikasi.

Misi keempat, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dipromosikan dalam rangka menjawab sejumlah permasalahan dan isu strategis sebagaimana dijelaskan dalam bab IV, khususnya pada poin (5) tentang ketahanan pangan, khususnya yang terkait dengan upaya mewujudkan dan mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan; poin (7) tentang pengendalian pemanfaatan ruang dan isu kelestarian lingkungan hidup dalam eksploitasi sumber daya alam; poin (8) tentang pengembangan potensi pariwisata daerah, khususnya yang terkait dengan pengembangan obyek dan destinasi wisata yang ramah lingkungan; poin (9) tentang pengembangan perekonomian daerah, khususnya yang terkait dengan pengembangan sektor industri yang ramah lingkungan; poin (12) pemberdayaan masyarakat dan desa, serta masyarakat adat, khususnya tentang pengelolaan

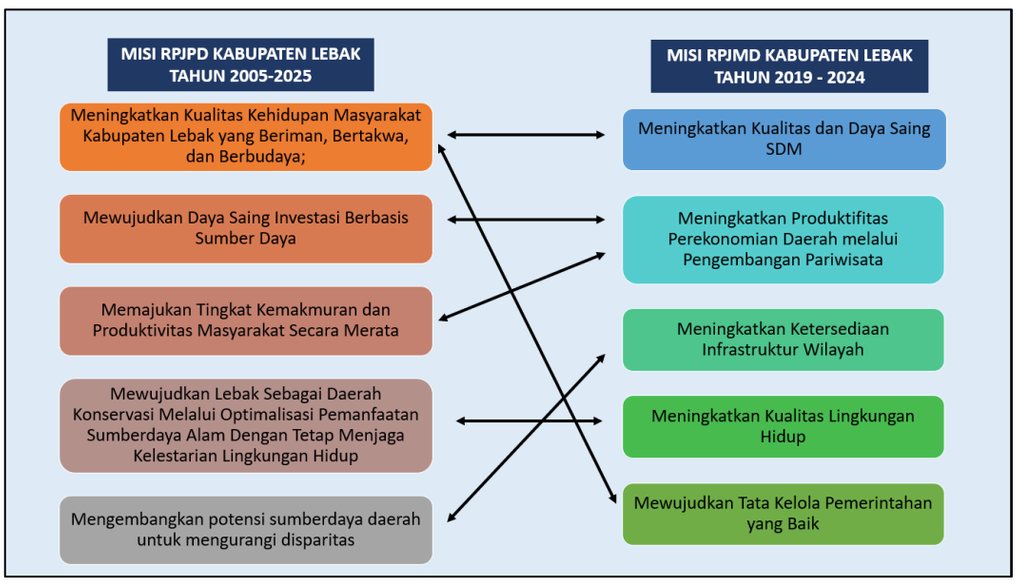
leuweung titipan sebagai daerah konservasi absolut, dan *leuweung tutupan* sebagai hutan produksi yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, yang keseluruhannya menjadi bagian dari hak / tanah ulayat. Karenanya cakupan dari misi ini adalah mencapai sejumlah sasaran yang terdapat pada paling tidak 7 (tujuh) urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yaitu: urusan lingkungan hidup, ketahanan pangan, penataan ruang, kehutanan, kepariwisataan, perindustrian, serta pemberdayaan masyarakat dan desa.

Misi kelima, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, merupakan misi yang bertujuan menjawab sejumlah permasalahan dan isu strategis yang telah diuraikan pada bab IV, khususnya yang terkait dengan poin (13) yaitu tentang upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa; poin (12) tentang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta masyarakat adat, khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa; poin (11) tentang upaya mewujudkan stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban sosial; serta poin (6) tentang penataan daerah dan wilayah sebagai upaya mewujudkan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien, serta pemerataan pembangunan. Karenanya ruang lingkup dari misi ini beririsan dengan sejumlah bidang yang menjadi urusan pemerintah daerah, yaitu: urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; urusan pemberdayaan masyarakat dan desa; urusan komunikasi dan informatika; urusan statistik; persandian; kearsipan; serta beragam urusan penunjang yang terkait dengan pelaksanaan beragam urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah, seperti: keuangan, aset, perencanaan, dan kepegawaian. Dan sasaran yang hendak dicapai pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah meningkatnya indeks desa membangun.

Adapun keterkaitan misi masing masing dokumen perencanaan dari Misi RPJMN, RPJMD Provinsi Banten dan RPJPD Kabupaten Lebak dengan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

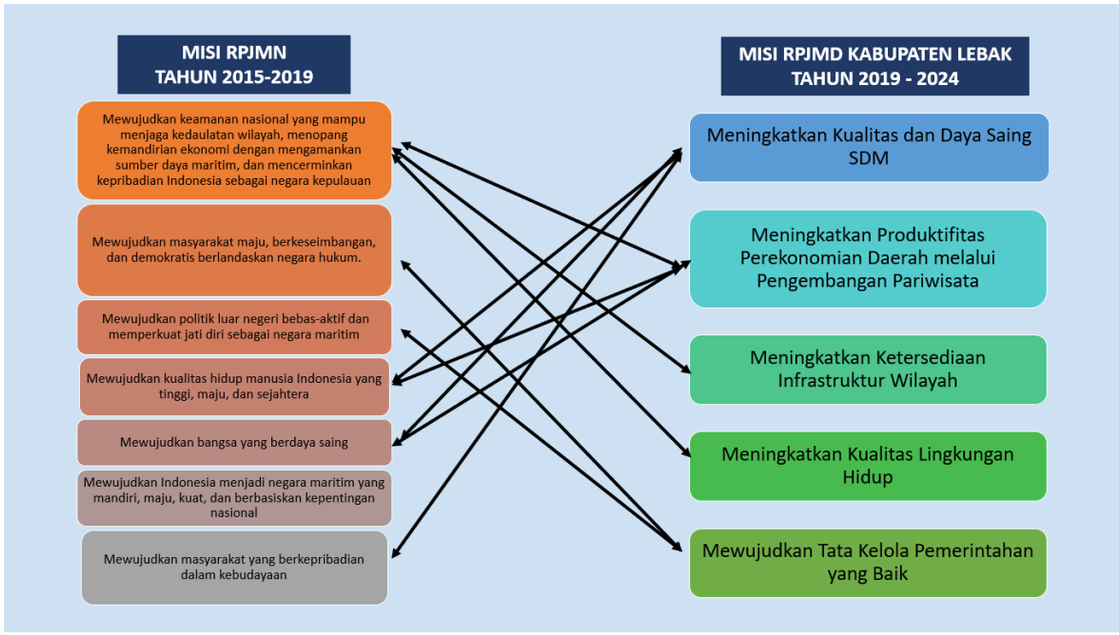
Gambar 5.1

Keterkaitan Misi RPJPD Kabupaten Lebak Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024



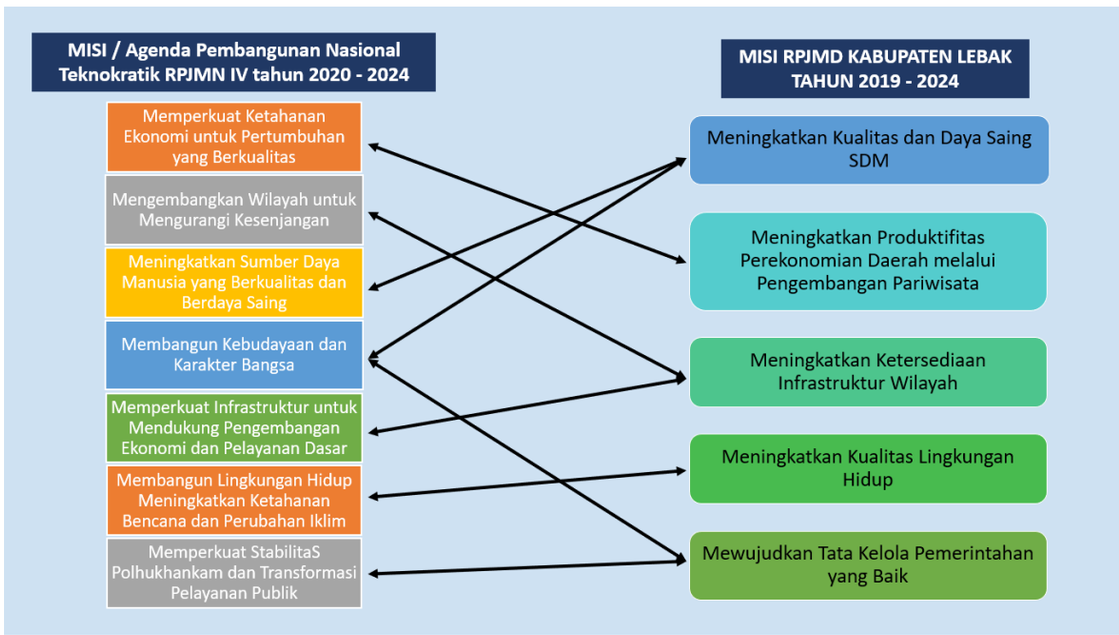
Gambar 5.2

Keterkaitan Misi RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024



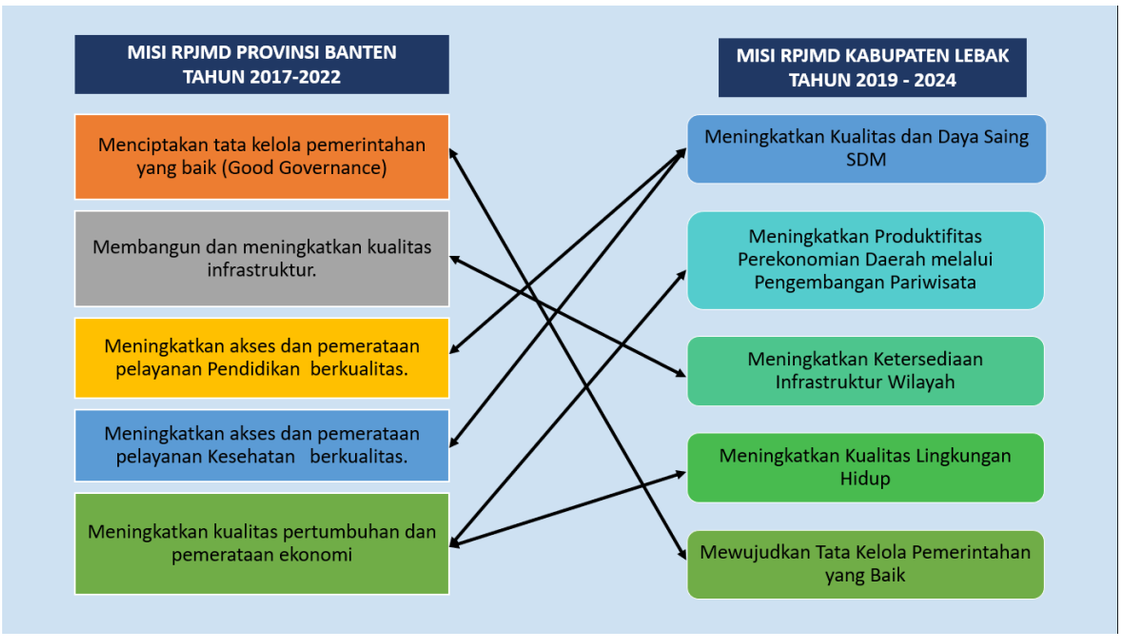
Gambar 5.3

Keterkaitan Misi Agenda Pembangunan Nasional Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024



Gambar 5.4

Keterkaitan Misi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 dan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024



Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lebak harus selaras dengan pembangunan Provinsi Banten, Kabupaten Lebak perlu melakukan perecepatan pelaksanaan pembangunan sebagai upaya terbebas dari status dari tertinggal. Implementasi dukungan Pemerintah Provinsi Banten sebagai terhadap pembangunan di Kabupaten Lebak antara lain melakukan intervensi program dan pendanaan dalam rangka mendukung visi dan misi pemerintah Kabupaten Lebak. Adapun dukungan program dan pendanaan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten, diantaranya :

1. Pengembangan Sarana Perhubungan diantaranya yaitu :
   1). Terminal Kaduagung Mandala;
   2). Terminal Malingping;
   3). Terminal Bayah.
2. Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air melalui :
   1). Pembangunan Bendungan Karian di Kabupaten Lebak;
   2). Rencana pemeliharaan cekungan air tanah di Malingping Kabupaten Lebak;
   3). Pengendalian dan pemanfaatan ruang situ, waduk, danau, dan rawa yang terdapat di Kabupaten Lebak;
   4). Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi Eks Teluk Lada di Kabupaten Lebak;

5). Rehabilitasi daerah irigasi yang dilintasi sungai ciujung, cisadane, dan cidurian.

3. Pengendalian kawasan hutan dan konservasi di Kabupaten Lebak.
4. Bantuan keuangan yang difokuskan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
5. Penyediaan biaya anggaran operasional sekolah (BOSDA) SMA dan SMK.
6. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sebagai upaya peningkatan konektivitas antar wilayah diantaranya peningkatan kualitas jalan Cipanas-Warunggbanten.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan kelima misi di atas dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, yang pada dasarnya berfungsi sebagai indikasi dari efektifitas pelaksanaan misi dan/ atau pencapaian visi yang telah dicanangkan. Karenanya formulasi tujuan dan sasaran pada kelima misi di atas menjadi kebutuhan agar pencapaian visi dan misi dimaksud dapat diukur dan dievaluasi secara obyektif. Tabel berikut ini menjelaskan formulasi tujuan dan sasaran, serta korelasinya dengan misi, serta urusan yang terkait dengan misi dimaksud.

Tabel 5.2
Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Target dalam Pencapaian Misi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024

Visi : Lebak Sebagai Destinasi Wisata Unggulan Nasional Berbasis Potensi Lokal.

MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/INDIKATOR SASARAN	BASELINE 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
MISI 1 : Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM								
Tujuan 1. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	63,53	64,03	64,51	64,99	65,43	65,99	66,46
Sasaran 1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Layanan pendidikan yang terjangkau dan merata	Indeks Pendidikan	0,538	0,542	0,546	0,550	0,554	0,558	0,562
sasaran 2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Layanan kesehatan yang terjangkau dan merata	Indeks Kesehatan	0,697	0,701	0,705	0,709	0,713	0,717	0,721

MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/INDIKATOR SASARAN	BASELINE 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
sasaran 3. Menurunnya Penduduk Miskin	Tingkat Kemiskinan	8.41	8.23	8.071	7.74	7.58	7.41	7.24
Sasaran 4. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,60%	0,52%	0,45%	0,38%	0,33%	0,30%	0,28%
sasaran 5. Meningkatnya peran Kepemudaan dan olahraga	Indeks Pembangunan Kepemudaan	45,15	45,65	46,15	46,65	47,15	47,65	48,15
sasaran 6. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender	78,56	78,67	78,78	78,89	79	79,11	79,22
MISI 2 : Meningkatkan Produktifitas perekonomian daerah melalui pengembangan pariwisata								

MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/INDIKATOR SASARAN	BASELINE 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tujuan 2. Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Gini Ratio	0,34	< 0,34	< 0,34	< 0,34	< 0,34	< 0,34	< 0,34
sasaran 7. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	PDRB Perkapita	21,120,000	22,387,056	23,985,666	25,575,618	27,190,303	28,729,861	30,236,317
	LPE	5.17	5.36	5.55	5.74	5.92	6.11	6.30
	Daya Beli	8,503,787.00	8,638,045.03	8,783,356.77	8,910,357.88	9,031,930.06	9,182,985.40	9,322,021.09
	Indeks Williamson	<0,40	<0,40	<0,40	<0,40	<0,40	<0,40	<0,40
	Tingkat Pengangguran Terbuka	7.7	7.6	7.5	7.4	7.3	7.2	7.1
	Kontribusi Sektor Pariwisata pada PDRB	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%
MISI 3 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Wilayah								

MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/INDIKATOR SASARAN	BASELINE 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tujuan 3. Meningkatnya Infrastruktur yang berkualitas	Indeks Infrastruktur Daerah	68.03	69.24	70.26	70.99	71.73	72.43	73.15
sasaran 8. Meningkatnya Infrastruktur Publik untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan orang serta menjamin ketersediaan air untuk irigasi	indeks infrastruktur publik	67.66	68.86	69.88	70.61	71.34	72.04	72.76
sasaran 9. Meningkatnya Infrastruktur Dasar untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang layak	indeks infrastruktur dasar	74.86%	75.35%	75.92%	76.48%	77.05%	77.62%	78.18%
sasaran 10. Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	-24,17%	4,03%	4,20%	4,38%	4,58%	4,80%	5,04%

MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/INDIKATOR SASARAN	BASELINE 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
MISI 4: Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup								
Tujuan 4. Meningkatnya pelestarian fungsi lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66.01	66.5	66.83	67.16	67.49	67.98	68.31
sasaran 11. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66.01	66.5	66.83	67.16	67.49	67.98	68.31
MISI 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik								
Tujuan 5. Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	60	65	67	70	72	75	78

MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/INDIKATOR SASARAN	BASELINE 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
sasaran 12. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Pelayanan Publik	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	70	75	80	82	85	90	92
	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	1,86	1,96	2,06	2,16	2,26	2,36	2,46
	OPINI BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	IKM	82,18	83	85	86	87	88,5	88,5



BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1 Strategi

Strategi pada dasarnya merupakan "*a plan of action designed to achieve a long-term or overall aim*" (OED, 2018) atau dalam terjemahannya yaitu : *rencana aksi yang dirancang untuk mencapai tujuan jangka panjang atau keseluruhan* "(OED, 2018). Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, strategi didefinisikan sebagai langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/ perangkat daerah untuk mencapai sasaran (pasal 1 ayat 51). Karenanya, strategi dibutuhkan dalam rangka memastikan tercapainya suatu misi, yang substansinya memuat cara atau sejumlah cara yang direncanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dari misi yang telah ditetapkan.

Formulasi strategi dalam RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap capaian RPJMD Tahun 2014-2019; kondisi eksisting yang menjadi permasalahan dan isu strategis daerah; analisis terhadap lingkungan internal dan eksteral pemerintah daerah, sekaligus identifikasi terhadap faktor-faktor pendorong (*driving factors*) yang menentukan keberhasilan pencapaian misi; serta analisis terhadap beragam alternatif strategi yang mungkin diadopsi guna menjawab beragam permasalahan dalam penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Berdasarkan pemahaman tersebut maka strategi dikembangkan sesuai dengan ruang lingkup dan karakteristik dari misi yang telah ditetapkan. yang akan dilaksanakan guna mencapai visi yang ditetapkan. Formulasi strategi juga didasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang kompleks dan beragam. Karenanya formulasi strategi secara spesifik berkaitan dengan satu atau sejumlah sasaran yang hendak dicapai pada satu periode tertentu. Tabel berikut ini menjelaskan keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024.

Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Kabupaten Lebak

Visi : Lebak sebagai Destinasi Wisata Unggulan Nasional Berbasis Potensi Lokal

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	
MISI 1 : Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM				
Tujuan 1. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	1.1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Layanan pendidikan yang terjangkau dan merata	1	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan
			2	Peningkatan pemenuhan hak anak
			3	Peningkatan budaya literasi masyarakat
	1.2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Layanan kesehatan yang terjangkau dan merata	1	Peningkatan efektifitas upaya kesehatan masyaraka, dan upaya kesehatan perorangan
	1.3	Menurunnya Penduduk miskin	1	Fasilitasi kebijakan afirmasi bagi masyarakat miskin
			2	Peningkatan efektifitas penanganan PMKS
	1.4	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	1	Peningkatan aksesibilitas dan efektifitas pelayanan KB
	1.5	Meningkatnya peran Kepemudaan dan olahraga	1	Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga
			2	Pembinaan kewirausahaan pemuda
	1.6	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	1	Pemberdayaan perempuan dan organisasi perempuan
MISI 2 : Meningkatkan Produktifitas perekonomian daerah melalui pengembangan pariwisata				
Tujuan 2. Mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat	2.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	1	Peningkatan cakupan layanan pelatihan dan penempatan tenaga kerja
			2	Peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja
			3	Peningkatan produktifitas sector pertanian
			4	Fasilitasi kebijakan dan inkubasi usaha/industri pariwisata
			5	Fasilitasi kebijakan dan insentif pengembangan objek dan destinasi pariwisata daerah

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	
			6	Pengembangan Industri pengolahan komoditi pertanian
			7	Pengendalian inflasi
			8	Pembinaan UMKM dan Koperasi
			9	Peningkatan kualitas pelayanan dan kemudahan investasi
			10	Peningkatan produktivitas sektor industri
			11	Peningkatan produktivitas sektor perdagangan
			12	Pembinaan , pelestarian, dan komodifikasi seni-budaya, dan kearifan lokal
			13	Pembinaan Masyarakat Adat
			14	Peningkatan efektifitas pembangunan desa
MISI 3 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Wilayah				
Tujuan 3. Meningkatnya Infrastruktur yang berkualitas	3.1	Meningkatnya Infrastruktur Publik untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan orang serta menjamin ketersediaan air untuk irigasi	1	Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan
			2	Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi, DAS, Situ, dan Danau
	3.2	Meningkatnya Infrastruktur Dasar untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang layak	1	Peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar yang berkualitas
			2	Penataan kawasan permukiman
	3.3	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	1	Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perhubungan
MISI 4: Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup				
Tujuna 4. Meningkatnya pelestarian fungsi lingkungan hidup	4.1	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan	1	Peningkatan efektifitas pengendalian atas pemanfaatan ruang
			2	Perlindungan dan pelestarian LH
			3	Pengendalian pemanfaatan SDA
				Peningkatan pengelolaan sampah perkotaan
MISI 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik				

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	
5. Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas	5.1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	1	Implementasi reformasi birokrasi secara terencana
			2	Penataan daerah dan/ wilayah secara terencana
			3	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
			4	Peningkatan efektifitas fungsi statistik, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan
			5	Peningkatan efektifitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
			6	Peningkatan kinerja pemerintahan daerah dan desa
			7	Peningkatan kualitas data Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			8	Peningkatan peran dan fungsi pengawasan internal
			9	Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinergi antar pimpinan daerah dan antar stakeholder pemerintahan daerah
			10	Peningkatan efektifitas sistem mitigasi bencana

6.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan pada dasarnya merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan beragam permasalahan pembangunan daerah serta mengantisipasi isu strategis daerah sebagaimana telah diidentifikasi pada bab IV. Arah kebijakan memuat pilihan orientasi pembangunanyang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi, yang diformulasi sebagai tema-tema utama kebijakan pembangunan daerah pada setiap tahapan pembangunan dalam periode lima tahun berlakunya RPJMD Tahun 2019-2024.

Berdasarkan pemahaman di atas, upaya mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagaimana dimaksud pada bab V, serta penjabaran masing-masing strategi, maka arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 dilaksanakan secara bertahap dengan fokus dan tema yang berbeda pada setiap tahapannya sebagai berikut:

1. **Tahap I, Tahun 2019**

Arah kebijakan pada tahun pertama RPJMD Kabupaten Lebak periode 2019-2024 diarahkan dalam rangka memperkuat komitmen seluruh *stakeholders* pembangunan daerah untuk secara bersama-sama berkontribusi dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tahun 2019-2024. Pada tahapan ini diharapkan telah dapat dicapai penyelesaian atas beragam kebijakan dasar, serta perencanaan teknis dalam pengembangan sektor pariwisata yang bersifat lintas sektor, lintas urusan, dan lintas perangkat daerah sehingga diharapkan terjalin fundamen yang kokoh bagi pelaksanaan tahapan pembangunan berikutnya pada tahun 2020. Karenanya tema dan/ fokus pembangunan daerah pada tahun 2019 diarahkan pada "**Perkuatan komitmen bersama dalam pembangunan sektor pariwisata**".

2. **Tahap II, Tahun 2020**

Arah kebijakan pada tahun kedua RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan suprastruktur yang mendukung terwujudnya destinasi wisata yang memiliki daya tarik tinggi, terutama yang termasuk dalam wilayah potensi Geopark Bayah Dome. Infrastruktur tersebut difokuskan pada infrastruktur transportasi, komunikasi dan informasi, dan sumber daya energi. Sedangkan suprastruktur difokuskan pada beragam fasilitas utama yang memungkinkan meningkatnya daya tarik obyek dan destinasi wisata bagi para wisatawan, seperti: kualitas obyek/destinasi wisata, fasilitas pelayanan pariwisata, sarana transportasi, pasar pariwisata termasuk didalamnya adalah pengembangan pusat-pusat suvenir, kuliner, dan lain-lain; beragam fasilitas pendukung seperti: fasiltias parkir, musholla, toilet, dan lain-lain; serta beragam kebijakan yang diharapkan dapat menjadi insentif besar bagi pengembangan sektor pariwisata sebagai industri di Kabupaten Lebak. Karenanya fokus dan/ tema pembangunan pada tahapan kedua pada tahun 2020 adalah **"Penataan dan Pembangunan Infra dan Suprastruktur Pariwisata"**

3. **Tahap III, Tahun 2021**

Arah kebijakan pembangunan pada tahun ketiga RPJPMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 difokuskan pada upaya peningkatan iklim usaha dan investasi khususnya di sektor kepariwisataan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan daya tarik obyek dan destinasi pariwisata yang telah berkembang. Peningkatan iklim usaha dan investasi ini dilakukan ke dalam maupun keluar. Upaya ke dalam dilakukan melalui fasilitasi kebijakan yang makin mendukung kemudahan berinvestasi, termasuk didalamnya adalah beragam program intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan sektor swasta dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya tarik obyek dan destinasi pariwisata. Karenanya fokus dan/ tema pembangunan pada tahapan ketiga ini adalah **"Peningkatan iklim usaha, investasi sektor kepariwisataan, serta daya tarik obyek dan destinasi pariwisata"**

4. Tahap IV, Tahun 2022

Arah kebijakan pada tahun keempat RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 diorientasikan pada upaya memperkuat citra Kabupaten Lebak sebagai destinasi wisata yang cukup beragam dari segi atraksi dan amenitasnya. Pada tahun ini diharapkan Geopark Bayah Dome sudah berstatus sebagai Geopark Nasional. Upaya perkuatan citra ini dilakukan melalui diversifikasi dan intensifikasi promosi pariwisata. Secara internal, upaya ini juga didukung dengan peningkatan kualitas dan daya tarik beragam produk pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Lebak sehingga memiliki keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif yang mampu menarik minat pada wisatawan nusantara maupun mancanegara. Karenanya fokus dan/ tema pembangunan pada tahun 2022 adalah **"Diverfisikasi dan Intensifikasi promosi, serta peningkatan kualitas dan daya tarik produk pariwisata"**

5. Tahap V, Tahun 2023

Sebagai tahapan pamungkas RPJMD Tahun 2019-2024, arah kebijakan pada tahun kelima difokuskan pada upaya mempertegas, memelihara, dan mempertahankan capaian pada tahapan-tahapan sebelumnya dengan memfasilitasi tumbuhnya kreatifitas dan inovasi para pelaku usaha pariwisata daerah guna melipatgandakan minat dan kunjungan wisatawan. Evaluasi dalam rangka meningkatkan efektifitas kebijakan dilakukan secara komprehensif, demikian pula dengan upaya mengoptimalkan dukungan dan kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan, khususnya di sektor pariwisata. Demikian pula upaya intensifikasi fasilitasi beragam program dan kegiatan serta insentif dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat guna melegitimasi eksistensi Kabupaten Lebak sebagai destinasi pariwisata berskala nasional. Karenanya fokus dan/ tema pembangunan pada tahapan pamungkas RPJMD Tahun 2019-2024 adalah **"Terwujudnya Lebak sebagai destinasi pariwisata unggulan berskala nasional"**.



Gambar 6.1
Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab V, visi kepala daerah dalam lima tahun mendatang difokuskan pada upaya mewujudkan "*Kabupaten Lebak sebagai Destinasi Wisata Unggulan Nasional Berbasis Potensi Lokal*" seperti telah dijelaskan tahapan implementasinya pada arah kebijakan di atas. Visi ini harus dipahami sebagai sebuah langkah terobosan yang dipilih karena diyakini akan mampu mewujudkan akselerasi pembangunan ekonomi daerah serta pembangunan sektor-sektor lainnya, mengingat kapasitas sektor kepariwisataan yang secara empiris diyakini akan mampu menumbuhkan dan mengintegrasikan beragam sektor pembangunan daerah secara optimal. Visi ini pun harus dilihat sebagai kontekstualisasi dari visi RPJPD yang bertujuan memajukan wilayah perdesaan, yang secara faktual memiliki potensi besar di sektor kepariwisataan, di samping sektor pertanian. Dengan pilihan strategis pada sektor pariwisata ini, maka upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6% per tahun diyakini akan dapat dicapai melalui peningkatan kontribusi sektor jasa pada struktur ekonomi daerah serta melalui tumbuhnya usaha-usaha baru di sektor pariwisata.

Meskipun fokus kebijakan pembangunan daerah diarahkan pada visi kepariwisataan sebagaimana telah dijelaskan di atas, tidak berarti bahwa urusan lainnya akan termarginalkan, mengingat bahwa secara yuridis terdapat sejumlah urusan wajib yang secara absolut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, baik urusan yang terkait dengan pelayanan dasar maupun non pelayanan dasar. Demikian pula dengan sejumlah urusan pilihan yang menjadi kekhasan dan terkait dengan pengembangan potensi dan kesejahteraan masyarakat. Karena mandat yuridis inilah maka implementasi visi tersebut dijabarkan dalam sejumlah misi,

tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan daerah yang memuat keseluruhan urusan pemerintahan daerah dimaksud.

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2019-2024 di atas selanjutnya dijabarkan dalam sejumlah program pembangunan daerah dan program perangkat daerah dengan pendekatan holistik, tematik, integratif, dan spasial sehingga pencapaian visi dan misi pembangunan daerah akan dapat diwujudkan secara lebih efektif dan efisien. Pendekatan yang holistik dimaksudkan sebagai cara pandang terhadap permasalahan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga dapat dirumuskan formula pengentasan permasalahan yang menyeluruh, tidak parsial. Sedangkan pendekatan tematik dimaksudkan sebagai upaya memfokuskan penyelesaian permasalahan pembangunan pada tema-tema tertentu yang mampu menyatukan berbagai unsur yang terkait dengannya sehingga terjalin satu keterpaduan antarunsur yang terkait tersebut. Dengan pendekatan holistik-tematik ini maka penjabaran dan implementasinya menekankan pada pentingnya keseluruhan dengan terdapat keterkaitan antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan utama. Dengan pendekatan ini, seluruh program dirumuskan dalam rangka mendukung prioritas nasional, yang selaraskan dengan prioritas pembangunan level provinsi dan kabupaten, sehingga terjalin sinergi antara visi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

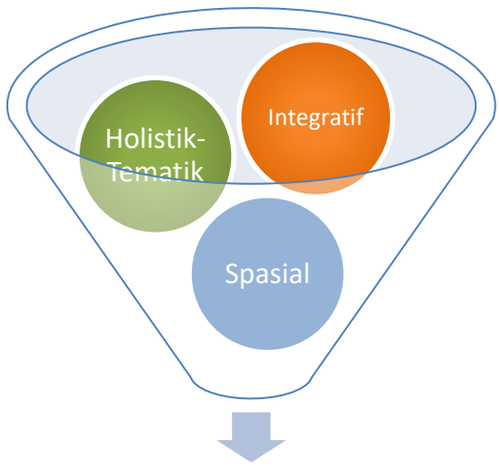
Pendekatan integratif dimaksudkan sebagai upaya mengintegrasikan keseluruhan *business process* pemerintahan daerah dalam satu proses yang satu, utuh, dan padu sehingga dapat secara sinergis menghasilkan luaran dan *outcome* yang tinggi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional, dan daerah. Dengan pendekatan integratif ini pula pendekatan *collaborative governance* tidak hanya diadopsi namun juga dikedepankan guna membangun kemitraan dan yang sinergis dengan seluruh *stakeholders* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sedangkan pendekatan spasial dimaksudkan sebagai upaya sistematis dan terukur dalam memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah secara spesifik pada lokus-lokus sasaran pembangunan yang tepat, sehingga alokasi sumber daya yang terbatas menjadi lebih efektif dan efisien.

Pendekatan holistik – tematik, dan integratif - spasial yang diadopsi dalam RPJMD Kabupaten Lebak tahun 2019-2024 dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Tematik tersebut merupakan agenda pembagunan nasional dan provinsi yang selaras dengan solusi yang ingin diselesaikan terhadap persoalan yang ada di Kabupaten Lebak;
2. Tematik tersebut merupakan isu strategis pembangunan daerah yang selaras dengan solusi yang ingin diselesaikan terhadap persoalan yang ada di Kabupaten Lebak;
3. Tematik tersebut merupakan bagian dari prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan solusi yang ingin diselesaikan terhadap persoalan yang ada di Kabupaten Lebak;
4. Tematik tersebut merupakan pilihan tema pembangunan daerah yang selaras dengan sasaran strategis dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah yang ingin dikembangkan di Kabupaten Lebak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara tematik, arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2019-2024 difokuskan pada tema-tema berikut:

1. Arah Kebijakan Pariwisata Unggulan Nasional
2. Arah Kebijakan Ketahanan Pangan
3. Arah Kebijakan Daya Saing Daerah
4. Arah Kebijakan Kota Publik Maja



Gambar 6.2 Tematik-Holistik, Integratif, Spasial

Penataan dari masing masing tematik- holistik integrasi spasial sebagai barikut :

LEVEL 1 : ARAH KEBIJAKAN PARIWISATA UNGGULAN NASIONAL



LEVEL 2 :

1.1 PROMOSI WISATA UNGGULAN



LEVEL 2:

1.2 PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA UNGGULAN



LEVEL 2 :

1.3 PENINGKATAN SDM DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA



LEVEL 2 :

1.4 PENINGKATAN EKONOMI LOKAL



LEVEL 2 :

1.5 JAMINAN KEBERSIHAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN DESTINASI



Tabel 6.2

Indikasi Kegiatan pada Arah Kebijakan Pariwisata Unggulan Nasional

No	INTEGRASI TEMA PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	INDIKASI KEGIATAN	
1.	Promosi Wisata Unggulan	Sekertariat Daerah	1.	Koordinasi kerjasama dengan dunia usaha/perusahaan, dan fasilitasi forum TSLP
			2.	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah dan antar lembaga
			3.	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
		Dinas Komunikasi	1.	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
			2.	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
			3.	Penunjang Sarana dan Prasarana Komunikasi
		Dinas Penanaman Modal	1.	Peningkatan Fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan UMKM
			2.	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
			3.	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

No	INTEGRASI TEMA PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	INDIKASI KEGIATAN	
			4.	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal
			5.	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
			6.	Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
			7.	Peningkatan Pelayanan, pemrosesan dan penerbitan perizinan
		Dinas Pariwisata	1.	Promosi pariwisata
			2.	Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Pengelolaan Pariwisata
2.	Pengembangan Destinasi wisata Unggulan	Dinas Pariwisata	1.	Pengembangan objek wisata unggulan
			2.	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
			3.	Koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha
			4.	Pengembangan objek wisata unggulan
			5.	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata
		Dinas Pendidikan	1.	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
			2.	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya
			3.	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
		Dinas PUPR	1.	Pembangunan Jalan
			2.	Pembangunan Jembatan
			3.	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
		Dinas Perhubungan	1.	Peningkatan Pelayanan Angkutan
			2.	Peningkatan Pelayanan Perparkiran
			3.	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
			4.	Pengadaan dan Pemiliharaan PJU
3.	Peningkatan SDM dan kelembagaan Pariwisata	Dinas Pariwisata	1.	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata
			2.	Peningkatan Koordinasi dan KerjasamaPengelolaan Pariwisata
		Dinas Pendidikan	1.	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya
4.	Peningkatan Ekonomi Lokal	Dinas Koperasi dan UKM	1	Koordinasi dan pengembangan UMKM
			2.	Peningkatan Kapasitas Pelaku UMKM
			3.	Promosi produk UMKM
		Dinas Perindustrian	1.	Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perdagangan
			2.	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah dalam memperkuat terhadap pemanfaatan sumber daya

No	INTEGRASI TEMA PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	INDIKASI KEGIATAN	
			3.	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat Daya Saing Produk
		Dinas PMD	1.	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa
			2.	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
5.	Jaminan Kebersihan Keamanan dan Ketertiban Destinasi	Dinas Lingkungan Hidup	1.	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
			2.	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
			3.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
		Pembangunan infrastruktur kawasan Perkim	1.	Pembangunan infrastruktur kawasan permukiman
		Satuan Polisi Pamong Praja	1.	Peningkatan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
			2.	Peningkatan Pelaksanaan Penegakan Perda
			3.	Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
			4.	Pembinaan dan Peningkatan Stabilitas Keamanan
			5.	Pengawasan dan Pengendalian Penegakan Perda
		BPBD	1.	Gladi dan Simulasi Pengurangan Risiko Bencana
			2.	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana

LEVEL 1 : ARAH KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN



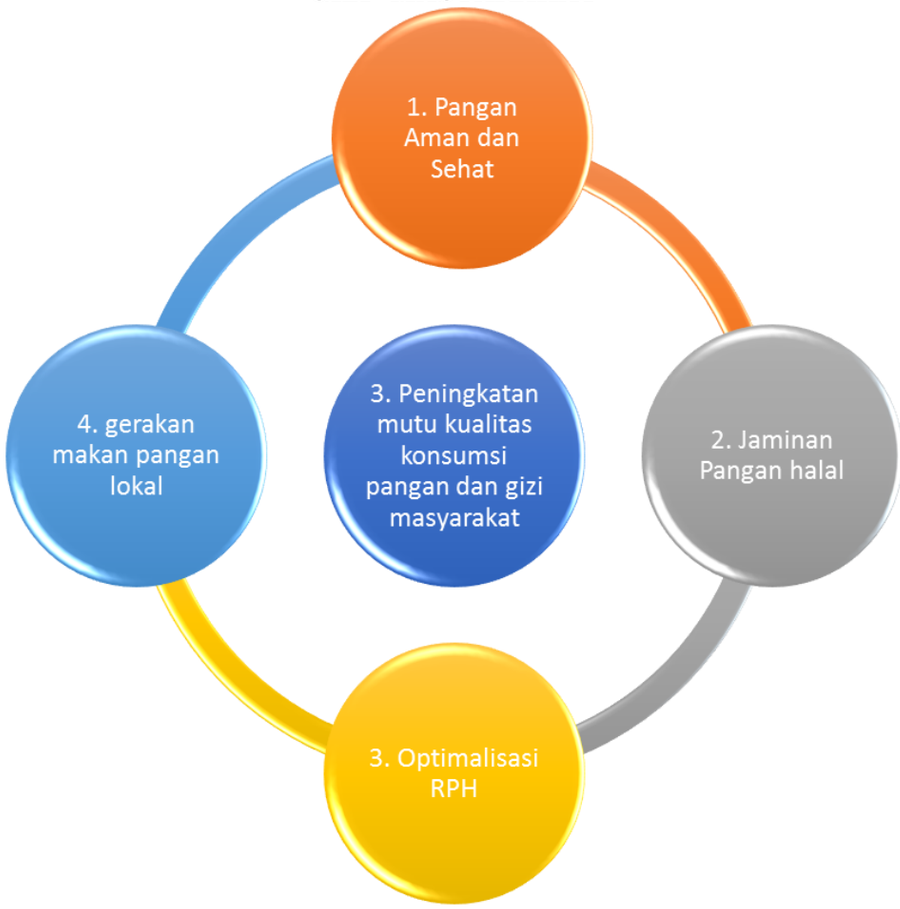
LEVEL 2 : 2.1. KETERSEDIAAN PADI DAN PANGAN LAINNYA



LEVEL 2 : 2.2. KELANCARAN DISTRIBUSI PANGAN DAN AKSES PANGAN MASYARAKAT



LEVEL 2 : 2.3. PENINGKATAN MUTU KUALITAS KONSUMSI PANGAN DAN GIZI MASYARAKAT



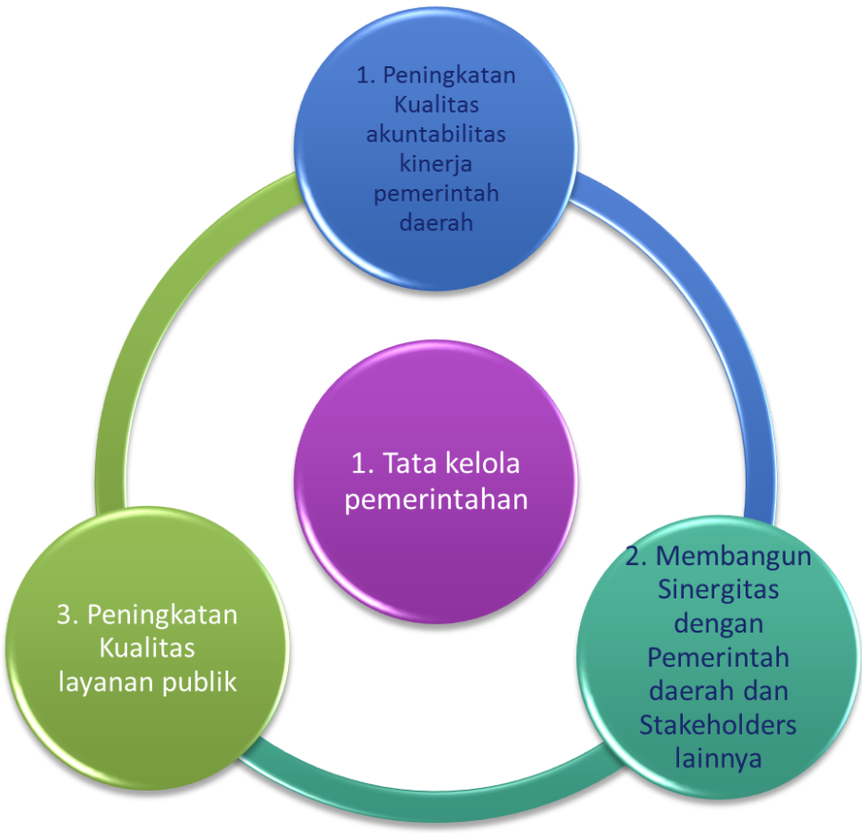
Tabel 6.3
Indikasi Kegiatan pada Arah Kebijakan Ketahanan Pangan

No	INTEGRASI TEMA PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH		INDIKASI KEGIATAN
1	Ketersediaan Padi dan Pangan Lainnya	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1	Pengembangan Intensifikasi padi, palawija
			2	Penilaian dan Pembinaan Usaha Perkebunan
			3	Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung pengembangan agribisnis
			4	Pengembangan Komoditas Unggulan Tanaman Perkebunan
			5	Penyediaan Sarana Prasarana Produksi Pertanian/Perkebunan
			6	Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung pengembangan agribisnis (FMSRB)
			7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pasca Panen
		Dinas Ketahanan Pangan	1	Koordinsi kebijakan perberasan
			2	Penanganan daerah rawan pangan
			3	Penyusunan Data base potensi produksi pangan
			4	Pengembangan desa mandiri pangan
			5	Pengembangan Upaya Pangan Masyarakat (PUPM)
		Dinas Perikanan	1	Pengembangan bibit/benih ikan unggul
			2	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
2	Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pangan Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Rehabilitasi/pemeliharaan berkala dan peningkatan jalan kabupaten
			2	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
		Dinas Pertanian	1	Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung pengembangan agribisnis
		Dinas Perhubungan	1	Peningkatan Pelayanan Angkutan
			2	Pengadaan tanda bukti lulus uji dan kelengkapan pengujian kendaraan bermotor
			3	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
3	Peningkatan Mutu Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
		Dinas Ketahanan Pangan	1	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
			2	Penganekaragaman pangan dan perbaikan gizi masyarakat
		Dinas Peternakan	1	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

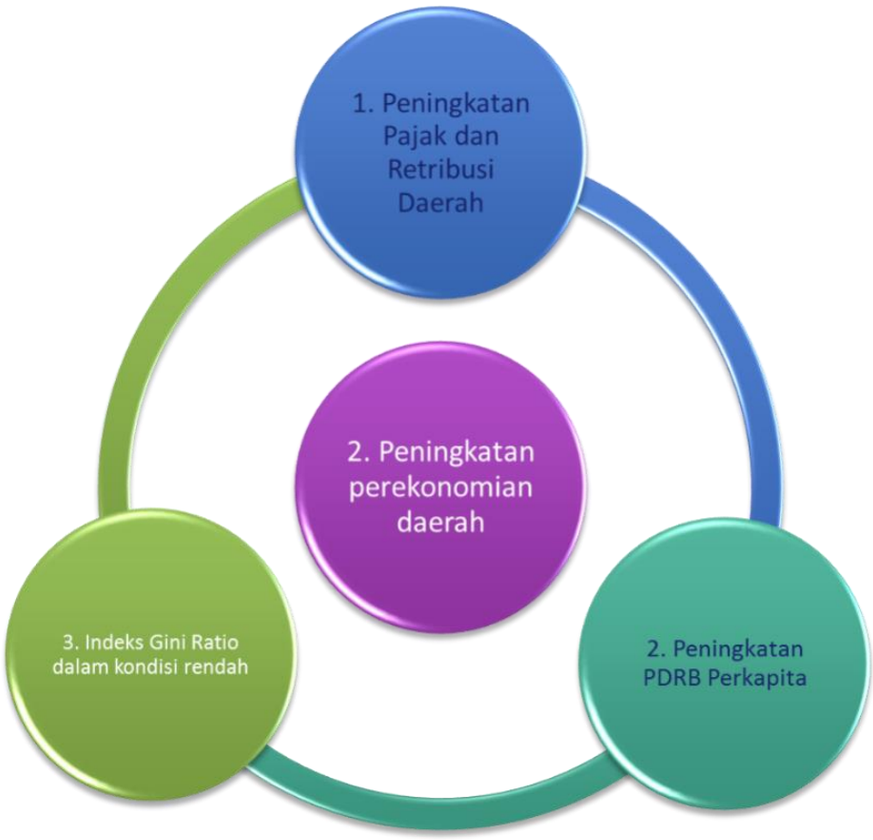
LEVEL 1 : ARAH KEBIJAKAN DAYA SAING DAERAH



LEVEL 2 : 1.1 TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH



LEVEL 2 : 1.2 PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAERAH



LEVEL 2 : 1.3. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KETENAGAKERJAAN



LEVEL 2 : 1.4 MEMBANGUN KONEKTIVITAS YANG TERINTEGRASI



LEVEL 2 : 1.5 MENINGKATKAN AKTIVITAS PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN



Tabel 6.4
Indikasi Kegiatan pada Arah Kebijakan Daya Saing Daerah

No	INTEGRASI TEMA PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH		INDIKASI KEGIATAN
1	Tata Kelola Pemerintah	Sekretariat Daerah	1	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah dan antar lembaga
			2	Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
			3	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
			4	Penyusunan SHH
			5	Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal
			6	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
			7	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
			9	Legislasi Rancangan Produk Hukum Daerah
			10	Publikasi Produk Hukum Daerah
			11	Penanganan Perkara Hukum
			12	Rancangan Produk Hukum Daerah dalam Pelaksanaan RANHAM
			13	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Produk Hukum Daerah
			14	Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah
			15	Fasilitasi percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah pemekaran
			16	Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru
			17	Pembentukan, Penataan, dan Perubahan Nama-Nama Kecamatan
			18	Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Kelurahan
			19	Pembakuan Nama-nama Rupa bumi
			20	Pelacakan dan penataan daerah
			21	Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal
			22	Peningkatan Kapasitas Ketatalaksanaan
			23	Pembentukan dan restrukturisasi OPD
			24	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
			25	Perencanaan Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan SDM Pengadaan Barang Jasa
			26	Optimalisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP)
		Dinas Komunikasi	1	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
			2	Penunjang Sarana dan Prasarana Komunikasi
			3	Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi dan Penyiaran
			4	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
			5	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
			6	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
		Inspektorat Daerah	1	Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan publik
			2	Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala
			3	Koordinasi Pengawasan Komprehensif
			4	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
			5	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
			6	Review dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah
			7	Penanganan Kasus Pengaduan masyarakat
			8	Peningkatan Kapabilitas APIP
		BKPP	1	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
			2	Monitoring dan Pengendalian Disiplin Aparatur

No	INTEGRASI TEMA PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH		INDIKASI KEGIATAN
			3	Pembinaan Aparatur Kecamatan
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	1	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
			2	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
			3	Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah
			4	Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah
			5	Penyusunan Rancangan Perda APBD, Perbup Penjabaran APBD dan Perubahannya
			6	Penunjang Pelaksanaan APBD
			7	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD
			8	Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja SKPD
			9	Penyusunan Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
			10	Penyusunan Laporan Neraca Aset
			11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
			12	Peningkatan Kapasitas ASN
			13	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			14	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
		Badan Pendapatan Daerah	1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
			2	Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan PBB-P2
			3	Pendatan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah
			4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Piutang Pajak daerah
			5	Peningkatan Kapabilitas APIP
		Kecamatan	1	Penunjang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
			2	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan
			3	Penyelenggaraan Musrenbangcam
			4	Peningkatan Pelayanan Kepada Organisasi Kemasyarakatan
			5	Penyelenggaraan Event Nasional dan Daerah
		Seluruh SKPD	1	Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah
			2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Bappeda	1	Penelitian dan Pengkajian Kebijakan-kebijakan Pembangunan Daerah
			2	Inventarisasi Masalah Pelayanan Publik
		Sekretariat DPRD	1	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
			2	Rapat-Rapat Paripurna
			3	Kegiatan Reses
			4	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah dan Luar Daerah
			5	Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD
			6	Penyediaan Jasa Staf Ahli DPRD
			7	Perhitungan dan Penetapan LPP APBD
			8	Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA
			9	Fasilitasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga
			10	Penunjang Kegiatan Keprotokolan
			11	Publikasi Peraturan Perundang-undangan
2	Peningkatan Perekonomian daerah	Bapenda	1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
			2	Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan PBB-P2
			3	Pendatan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah
			4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Piutang Pajak daerah
		Dinas PPKBP3A	1	Perencanaan Pengendalian Penduduk

No	INTEGRASI TEMA PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH		INDIKASI KEGIATAN
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah dalam memperkuat terhadap pemanfaatan sumber daya
			2	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat Daya Saing Produk
			3	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
			4	Operasialisasi dan Pengembangan UTTP
			5	Pengembangan Pasar, Pemantauan Distribusi Barang / Produk
			6	Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perdagangan
			7	Peningkatan Layanan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perdagangan
			8	Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perdagangan (DAK)
		Dinas Koperasi dan UMKM	1	Promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah
			2	Koordinasi dan pengembangan UMKM
			3	Peningkatan Kapasitas Pelaku UMKM
			4	Promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah
			5	Pembinaan,Pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
			6	Pembinaan Manajemen Kelembagaan Koperasi
		Dinas Pertanian	1	Peningkatan Mutu Hasil Produksi Pertanian
			2	Pengembangan Intensifikasi padi, palawija
			3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pasca Panen
			4	Peningkatan Mutu Hasil Produksi Pertanian
			5	Informasi dan Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggul daerah
			6	Peningkatan Mutu Hasil Produksi Pertanian
			7	Pengembangan Agribisnis Peternakan
			8	Penilaian dan Pembinaan Usaha Perkebunan
			9	Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung pengembangan agribisnis
			10	Pengembangan Intensifikasi padi, palawija
			11	Pengembangan Komoditas Unggulan Tanaman Perkebunan
			12	Penyediaan Sarana Prasarana Produksi Pertanian/Perkebunan
			13	Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung pengembangan agribisnis (FMSRB)
		Dinas Perikanan	1	Penguatan kelembagaan dan peningkatan daya saing produk perikanan
			2	Pengembangan usaha hasil perikanan
			3	Pengembangan bibit/benih ikan unggul
			4	Pendampingan kelompok pembudidaya ikan
			5	Pembangunan dan rehabilitasi prasarana perikanan
			6	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan
		Dinas Peternakan	1	Pengembangan Agribisnis Peternakan
			2	Pengembangan Pembibitan, Perawatan Ternak
			3	Pengembangan Teknologi Tepat Guna
			4	Penyuluhan dan Pendampingan Peternak
		Sekretariat Daerah	1	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
		DPMPTSP	1	Peningkatan Fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan UMKM
			2	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
			3	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

No	INTEGRASI TEMA PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH		INDIKASI KEGIATAN
			4	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal
			5	Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi
		Dinas PPKBP3A	1	Perencanaan Pengendalian Penduduk
3	Meningkatkan Kualitas SDM dan Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja
			2	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja
			3	Peningkatan Kualitas Hubungan Industrial dan Optimalisasi Kerjasama Tripartit
			4	Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja
		Dinas Kesehatan	1	Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya
			2	Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan
			3	Peningkatan sumber daya manusia dan sistem informasi kesehatan
		Dinas Pendidikan	1	Pengembangan Pendidikan Jenjang SD/MI, SMP/MTS
			2	Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Formal
			3	Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4	Membangun Konektivitas yang Terintegrasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan
			2	Rehabilitasi/pemeliharaan berkala dan peningkatan jalan kabupaten
			3	Penataan jalan dalam kota
		Dinas Komunikasi	1	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
			2	Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi dan Penyiaran
		Sekretariat Daerah	1	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
5	Meningkatkan Akses ke Lembaga Perbankan dan Keuangan lain	Sekretariat Daerah	1	Percepatan Akses Keuangan Daerah
		Dinas Koperasi dan UKM	1	Koordinasi dan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah

LEVEL 1 : ARAH KEBIJAKAN KOTA PUBLIK MAJA



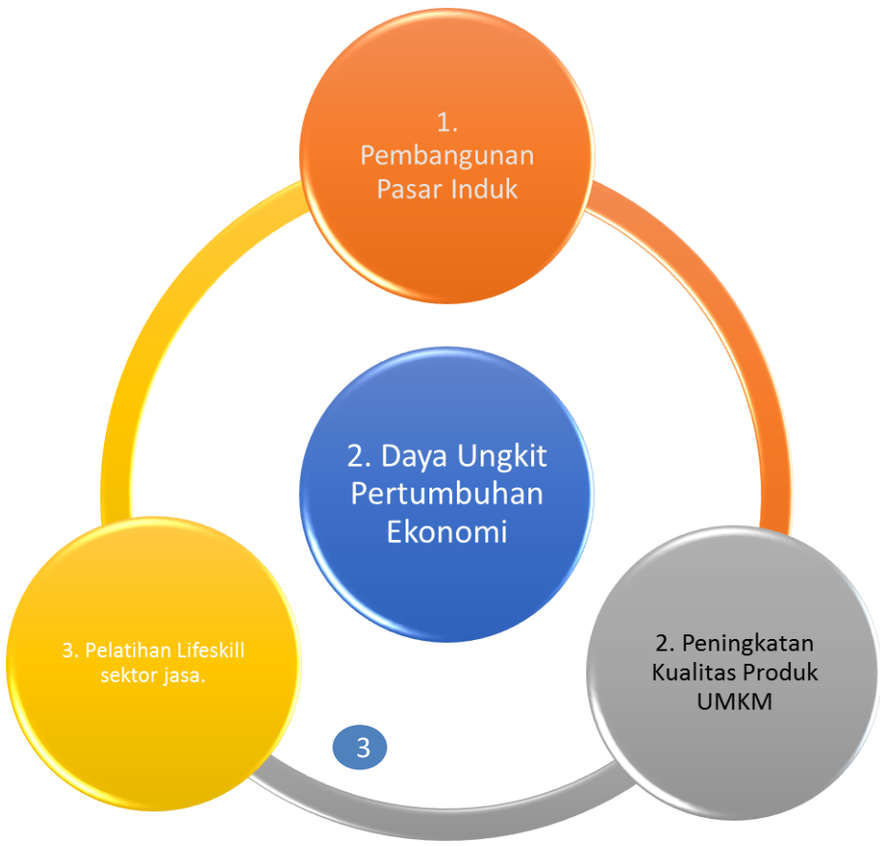
LEVEL 2 : 1.1 TATA KELOLA PEMERINTAH



LEVEL 2 : 1.2 PENGELOLAAN LINGKUNGAN



LEVEL 2 : 1.3 DAYA UNGKIT PERTUMBUHAN EKONOMI



Tabel 6.5
Indikasi Kegiatan pada Arah Kebijakan Kota Publik Maja

No	INTEGRASI TEMA PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH		INDIKASI KEGIATAN
1	Tata Kelola Pemerintah	Dinas Dukcapil	1	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
			2	Pengembangan Database Kependudukan
			3	Penyusunan Informasi Kependudukan
			4	Pelayanan Pembuatan Akta-akta Catatan Sipil
			5	Pengembangan Database kependudukan dan SIAK secara terpadu
		Satuan Polisi Pamong Praja	1	Pengawasan dan Pengendalian Penegakan Perda
		Dinas PUPR	1	Pengawasan pemanfaatan ruang
			2	Pembangunan/peningkatan infrastruktur
2	Pengelolaan Lingkungan	Dinas LH	1	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
			2	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
			3	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
			4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana TPA
			5	Penataan dan Pemeliharaan RTH
			6	Koordinasi penilaian Kota Sehat/ Adipura
			7	Pemantauan Kualitas Lingkungan
			8	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
			9	Pengkajian dampak lingkungan
			10	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
			11	Pembinaan Sekolah Adiwiyata
			12	Peningkatan Laboratorium Lingkungan
			13	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
			14	Rehabilitasi Hutan dan Lahan
			15	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
			16	Pengembangan data dan informasi LH
			17	Penataan dan Pemeliharaan RTH
		Dinas PU dan Penataan Ruang	1	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
			2	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
			3	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
			4	PAP Santasi berbasis Masyarakat (SLBM)
			5	PAP Program PAMSIMAS
			6	PAP Program SANIMAS
3	Daya Ungkit Pertumbuhan Ekonomi	Dinas Industri dan Perdagangan	1	Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perdagangan
		Dinas Koperasi dan UKM	2	Promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah
			3	Koordinasi dan pengembangan UMKM
			4	Peningkatan Kapasitas Pelaku UMKM
			5	Promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah
		Dinas Tenaga Kerja	1	Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi Pencari Kerja
			2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja
			3	Peningkatan Kualitas Hubungan Industrial dan Optimalisasi Kerjasama Tripartit

Adapun arah kebijakan untuk mengarahkan rumusan strategi yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran pada Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 6.6
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lebak

ARAH KEBIJAKAN				
Perkuatan komitmen bersama dalam pembangunan Daerah	**Penataan dan Pembangunan Infra dan Suprastruktur Penunjang pembangunan**	**Peningkatan iklim usaha dan investasi**	**Diverfisikasi dan Intensifikasi serta peningkatan kualitas Pembangunan**	**Pencapaian visi Daerah**
2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Layanan pendidikan yang terjangkau dan merata	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Layanan pendidikan yang terjangkau dan merata	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Layanan pendidikan yang terjangkau dan merata serta meningkatkan Partisipasi Pendidikan	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, meningkatkan Partisipasi Pendidikan dan Menurunkan angka Putus Sekolah	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, meningkatkan Partisipasi Pendidikan dan Menurunkan angka Putus Sekolah
Meningkatkan Minat dan Budaya Baca Masyarakat	Meningkatkan Minat dan Budaya Baca Masyarakat	Meningkatkan Minat dan Budaya Baca Masyarakat	Meningkatkan Minat dan Budaya Baca Masyarakat	Meningkatkan Minat dan Budaya Baca Masyarakat

ARAH KEBIJAKAN				
Perkuatan komitmen bersama dalam pembangunan Daerah	**Penataan dan Pembangunan Infra dan Suprastruktur Penunjang pembangunan**	**Peningkatan iklim usaha dan investasi**	**Diverfisikasi dan Intensifikasi serta peningkatan kualitas Pembangunan**	**Pencapaian visi Daerah**
2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Layanan kesehatan yang terjangkau dan merata	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Layanan kesehatan yang terjangkau dan merata, serta meningkatkan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Layanan kesehatan yang terjangkau dan merata, serta meningkatkan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Layanan kesehatan yang terjangkau dan merata, meningkatkan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesehatan keluarga serta pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Layanan kesehatan yang terjangkau dan merata peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesehatan
optimalisasi Penanganan PMKS	optimalisasi Penanganan PMKS	optimalisasi Penanganan PMKS serta perlindungan dan jaminan sosial masyarakat	optimalisasi Penanganan PMKS serta perlindungan dan jaminan sosial masyarakat	optimalisasi Penanganan PMKS, perlindungan dan jaminan sosial masyarakat serta Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
Pengendalian Kelahiran	Pengendalian Kelahiran	Pengendalian Kelahiran, Menurunkan TFR	Pengendalian Kelahiran, Menurunkan TFR dan pelayanan Kesehatan Reproduksi	Pengendalian Kelahiran, Menurunkan TFR dan pelayanan Kesehatan Reproduksi

ARAH KEBIJAKAN				
Perkuatan komitmen bersama dalam pembangunan Daerah	**Penataan dan Pembangunan Infra dan Suprastruktur Penunjang pembangunan**	**Peningkatan iklim usaha dan investasi**	**Diverfisikasi dan Intensifikasi serta peningkatan kualitas Pembangunan**	**Pencapaian visi Daerah**
2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Meningkatkan ketahanan keluarga	Meningkatkan ketahanan keluarga	Meningkatkan ketahanan keluarga	Meningkatkan ketahanan keluarga dan peningkatan Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Meningkatkan ketahanan keluarga dan peningkatan Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
Meningkatkan Kemandirian, partisipasi dan Prestasi Pemuda	Meningkatkan Kemandirian, partisipasi dan Prestasi Pemuda, peran serta Kepemudaan, kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Meningkatkan Kemandirian, partisipasi dan Prestasi Pemuda, peran serta Kepemudaan, kewirausahaan dan kecakapan hidup, prestasi pemuda	Meningkatkan Kemandirian, partisipasi dan Prestasi Pemuda, peran serta Kepemudaan, kewirausahaan dan kecakapan hidup, prestasi pemuda	Meningkatkan Kemandirian, partisipasi dan Prestasi Pemuda, peran serta Kepemudaan, kewirausahaan dan kecakapan hidup, prestasi pemuda
Meningkatkan prestasi keolahragaan kabupaten Lebak	Meningkatkan prestasi keolahragaan kabupaten Lebak	Meningkatkan prestasi keolahragaan kabupaten Lebak	Meningkatkan prestasi keolahragaan, jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik kabupaten Lebak	Meningkatkan prestasi keolahragaan, jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik kabupaten Lebak
Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan, Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan anak	Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan, Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan anak	Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan, Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan anak
Pemenuhan hak anak	Pemenuhan hak anak	Pemenuhan hak anak	Pemenuhan hak anak	Pemenuhan hak anak

ARAH KEBIJAKAN				
Perkuatan komitmen bersama dalam pembangunan Daerah	**Penataan dan Pembangunan Infra dan Suprastruktur Penunjang pembangunan**	**Peningkatan iklim usaha dan investasi**	**Diverfisikasi dan Intensifikasi serta peningkatan kualitas Pembangunan**	**Pencapaian visi Daerah**
2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Investasi	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Investasi	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Investasi, peningkatan Jumlah Investor PMA dan PMDN berskala nasional	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Investasi, peningkatan Jumlah Investor PMA dan PMDN berskala nasional	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Investasi, peningkatan Jumlah Investor PMA dan PMDN berskala nasional
Tumbuhnya Industri Pariwisata unggulan Daerah	Tumbuhnya Industri Pariwisata unggulan Daerah	Tumbuhnya Industri Pariwisata unggulan Daerah, peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung	Tumbuhnya Industri Pariwisata unggulan Daerah, peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung dan Daya Tarik Wisata	Tumbuhnya Industri Pariwisata unggulan Daerah, peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung dan Daya Tarik Wisata
Peningkatan Pembangunan Ketenagakerjaan	Peningkatan Pembangunan Ketenagakerjaan	Peningkatan Pembangunan Ketenagakerjaan	Peningkatan Pembangunan Ketenagakerjaan,peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Tripartit dalam Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Peningkatan Pembangunan Ketenagakerjaan,peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Tripartit dalam Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja
Terjaminnya Ketersediaan, Distribusi dan Pemanfaatan Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman	Terjaminnya Ketersediaan, Distribusi dan Pemanfaatan Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman	Terjaminnya Ketersediaan, Distribusi dan Pemanfaatan Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta meningkatkan Ketersedian dan kualitas Konsumsi Pangan	Terjaminnya Ketersediaan, Distribusi dan Pemanfaatan Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta meningkatkan Ketersedian dan kualitas Konsumsi Pangan	Terjaminnya Ketersediaan, Distribusi dan Pemanfaatan Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta meningkatkan Ketersedian dan kualitas Konsumsi Pangan

ARAH KEBIJAKAN				
Perkuatan komitmen bersama dalam pembangunan Daerah	**Penataan dan Pembangunan Infra dan Suprastruktur Penunjang pembangunan**	**Peningkatan iklim usaha dan investasi**	**Diverfisikasi dan Intensifikasi serta peningkatan kualitas Pembangunan**	**Pencapaian visi Daerah**
2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Daerah subsektor Pertanian dan Perkebunan	Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Daerah subsektor Pertanian dan Perkebunan	Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Daerah subsektor Pertanian dan Perkebunan serta Kualitas Pengelolaan Hasil Produksi	Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Daerah subsektor Pertanian dan Perkebunan serta Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pengelolaan Hasil Produksi	Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Daerah subsektor Pertanian dan Perkebunan serta Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pengelolaan Hasil Produksi
Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Daerah subsektor Peternakan	Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Daerah subsektor Peternakan	Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Daerah subsektor Peternakan	Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Daerah subsektor Peternakan serta Cakupan Penanganan Penanganan Penyakit ternak	Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Daerah subsektor Peternakan
Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Daerah sub sektor perikanan	Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Daerah sub sektor perikanan	Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Daerah sub sektor perikanan,produksi usaha Perikanan yang mandiri dan berdaya saing	Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Daerah sub sektor perikanan,produksi usaha Perikanan yang mandiri dan berdaya saing	Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Daerah sub sektor perikanan,produksi usaha Perikanan yang mandiri dan berdaya saing
Meningkatkan Produktivitas Sektor Perdagangan	Meningkatkan Produktivitas Sektor Perdagangan	Meningkatkan Produktivitas Sektor Perdagangan	Meningkatkan Produktivitas Sektor Perdagangan dan peningkatanKualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan	Meningkatkan Produktivitas Sektor Perdagangan dan peningkatanKualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan

ARAH KEBIJAKAN				
Perkuatan komitmen bersama dalam pembangunan Daerah	**Penataan dan Pembangunan Infra dan Suprastruktur Penunjang pembangunan**	**Peningkatan iklim usaha dan investasi**	**Diverfisikasi dan Intensifikasi serta peningkatan kualitas Pembangunan**	**Pencapaian visi Daerah**
2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Meningkatkan Produktivitas sektor UMKM	Meningkatkan Produktivitas sektor UMKM, Daya Saing Usaha Mikro dan Kecil peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatkan Produktivitas sektor UMKM, Daya Saing Usaha Mikro dan Kecil peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatkan Produktivitas sektor UMKM, Daya Saing Usaha Mikro dan Kecil peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatkan Produktivitas sektor UMKM, Daya Saing Usaha Mikro dan Kecil peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Pariwisata dan Kebudayaan Bagi Masyarakat	Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Pariwisata dan Kebudayaan Bagi Masyarakat	Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Pariwisata dan Kebudayaan Bagi Masyarakat	Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Pariwisata dan Kebudayaan Bagi Masyarakat, pemeliharaan desa adat	Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Pariwisata dan Kebudayaan Bagi Masyarakat, pemeliharaan desa adat
meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, sumber daya air, sanitasi, gedung pemerintah dan penataan ruang	meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, sumber daya air, sanitasi, gedung pemerintah dan penataan ruang	meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, sumber daya air, sanitasi, gedung pemerintah dan penataan ruang, peningkatan konektivitas antar wilayah	meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, sumber daya air, sanitasi, gedung pemerintah dan penataan ruang, peningkatan konektivitas antar wilayah dan pembangunan jalan perdesaan, pengurangan kawasan yang terkena dampak banjir	meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, sumber daya air, sanitasi, gedung pemerintah dan penataan ruang, peningkatan konektivitas antar wilayah dan pembangunan jalan perdesaan, pengurangan kawasan yang terkena dampak banjir

ARAH KEBIJAKAN				
Perkuatan komitmen bersama dalam pembangunan Daerah	**Penataan dan Pembangunan Infra dan Suprastruktur Penunjang pembangunan**	**Peningkatan iklim usaha dan investasi**	**Diverfisikasi dan Intensifikasi serta peningkatan kualitas Pembangunan**	**Pencapaian visi Daerah**
2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hunian	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hunian	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hunian, rumah tidak layak huni, kawasan kumuh	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hunian, rumah tidak layak huni, kawasan kumuh	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hunian, rumah tidak layak huni, kawasan kumuh serta penanganan fungsi PSU lingkungan perumahan
Meningkatkan ketaatan pengguna jalan	Meningkatkan ketaatan pengguna jalan, pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan	Meningkatkan ketaatan pengguna jalan, pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan	Meningkatkan ketaatan pengguna jalan, pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan	Meningkatkan ketaatan pengguna jalan, pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan
meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum	meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum	meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Terlaksananya pengendalian dan pengamanan lalu lintas	meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Terlaksananya pengendalian dan pengamanan lalu lintas	meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Terlaksananya pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Terjagakan Kualitas Lingkungan Hidup	Terjagakan Kualitas Lingkungan Hidup	Terjagakan Kualitas Lingkungan Hidup	Terjagakan Kualitas Lingkungan Hidup	Terjagakan Kualitas Lingkungan Hidup
Persentase Penggunaan lahan berdasarkan RTRW	Persentase Penggunaan lahan berdasarkan RTRW	Persentase Penggunaan lahan berdasarkan RTRW, pengendalian pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya	Persentase Penggunaan lahan berdasarkan RTRW, pengendalian pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya	Persentase Penggunaan lahan berdasarkan RTRW, pengendalian pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya

ARAH KEBIJAKAN				
Perkuatan komitmen bersama dalam pembangunan Daerah	**Penataan dan Pembangunan Infra dan Suprastruktur Penunjang pembangunan**	**Peningkatan iklim usaha dan investasi**	**Diverfisikasi dan Intensifikasi serta peningkatan kualitas Pembangunan**	**Pencapaian visi Daerah**
2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Meningkatkan pengguna teknologi Informasi Pemerintah Daerah	Meningkatkan pengguna teknologi Informasi Pemerintah Daerah	Meningkatkan pengguna teknologi Informasi Pemerintah Daerah, komunikasi informasi pemerintah daerah	Meningkatkan pengguna teknologi Informasi Pemerintah Daerah, komunikasi informasi pemerintah daerah serta pemanfaatan teknologi informasi yang dapat diakses dalam rangka optimalisasi pelayanan publik	Meningkatkan pengguna teknologi Informasi Pemerintah Daerah, komunikasi informasi pemerintah daerah serta pemanfaatan teknologi informasi yang dapat diakses dalam rangka optimalisasi pelayanan publik
Peningkatan Rasio Kemandirian Daerah	Peningkatan Rasio Kemandirian Daerah	Peningkatan Rasio Kemandirian Daerah	Peningkatan Rasio Kemandirian Daerah	Peningkatan Rasio Kemandirian Daerah
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Peningkatan tanah pemda yang bersertifikat	Peningkatan tanah pemda yang bersertifikat, Fasilitasi Konflik Sengketa Pertanahan	Peningkatan tanah pemda yang bersertifikat, Fasilitasi Konflik Sengketa Pertanahan	Peningkatan tanah pemda yang bersertifikat, Fasilitasi Konflik Sengketa Pertanahan	Peningkatan tanah pemda yang bersertifikat, Fasilitasi Konflik Sengketa Pertanahan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur

ARAH KEBIJAKAN				
Perkuatan komitmen bersama dalam pembangunan Daerah	**Penataan dan Pembangunan Infra dan Suprastruktur Penunjang pembangunan**	**Peningkatan iklim usaha dan investasi**	**Diverfisikasi dan Intensifikasi serta peningkatan kualitas Pembangunan**	**Pencapaian visi Daerah**
2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	Meningkatkan Kapasitas Aparatur Sipil Negara
Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan pelayanan publik secara prima	Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan pelayanan publik secara prima	Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan pelayanan publik secara prima	Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan pelayanan publik secara prima	Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan pelayanan publik secara prima
Mewujudkan Sistem Pengawasan Internal yang handal	Mewujudkan Sistem Pengawasan Internal yang handal	Mewujudkan Sistem Pengawasan Internal yang handal	Mewujudkan Sistem Pengawasan Internal yang handal	Mewujudkan Sistem Pengawasan Internal yang handal
Mewujudkan sistem pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Mewujudkan sistem pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Mewujudkan sistem pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Mewujudkan sistem pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Mewujudkan sistem pengendalian Internal Pemerintah Daerah
Mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang akuntabel dan pemerinthan yang berkinerja Tinggi	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang akuntabel dan pemerinthan yang berkinerja Tinggi	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang akuntabel dan pemerinthan yang berkinerja Tinggi	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang akuntabel dan pemerinthan yang berkinerja Tinggi	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang akuntabel dan pemerinthan yang berkinerja Tinggi
Tertibnya Pengelolaan Kearsipan Pemerintah Daerah	Tertibnya Pengelolaan Kearsipan Pemerintah Daerah	Tertibnya Pengelolaan Kearsipan Pemerintah Daerah	Tertibnya Pengelolaan Kearsipan Pemerintah Daerah	Tertibnya Pengelolaan Kearsipan Pemerintah Daerah
Meningkatkan Mutu Pelayanan dalam bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Meningkatkan Mutu Pelayanan dalam bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Meningkatkan Mutu Pelayanan dalam bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Meningkatkan Mutu Pelayanan dalam bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Meningkatkan Mutu Pelayanan dalam bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

ARAH KEBIJAKAN				
Perkuatan komitmen bersama dalam pembangunan Daerah	**Penataan dan Pembangunan Infra dan Suprastruktur Penunjang pembangunan**	**Peningkatan iklim usaha dan investasi**	**Diverfisikasi dan Intensifikasi serta peningkatan kualitas Pembangunan**	**Pencapaian visi Daerah**
2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran
Meningkatkan Keberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Desa	Meningkatkan Keberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Desa	Meningkatkan Keberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Desa	Meningkatkan Keberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Desa	Meningkatkan Keberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Desa
Mewujudkan pemerintahan desa yang berkinerja baik	Mewujudkan pemerintahan desa yang berkinerja baik	Mewujudkan pemerintahan desa yang berkinerja baik	Mewujudkan pemerintahan desa yang berkinerja baik	Mewujudkan pemerintahan desa yang berkinerja baik
Mewujudkan kerukunan dan keamanan bermasyarakat	Mewujudkan kerukunan dan keamanan bermasyarakat	Mewujudkan kerukunan dan keamanan bermasyarakat	Mewujudkan kerukunan dan keamanan bermasyarakat	Mewujudkan kerukunan dan keamanan bermasyarakat
Meningkatkan Kualitas Penanggulangan Bencana	Meningkatkan Kualitas Penanggulangan Bencana	Meningkatkan Kualitas Penanggulangan Bencana	Meningkatkan Kualitas Penanggulangan Bencana	Meningkatkan Kualitas Penanggulangan Bencana
Mewujudkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Mewujudkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Mewujudkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Mewujudkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Mewujudkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah

ARAH KEBIJAKAN				
Perkuatan komitmen bersama dalam pembangunan Daerah	**Penataan dan Pembangunan Infra dan Suprastruktur Penunjang pembangunan**	**Peningkatan iklim usaha dan investasi**	**Diverfisikasi dan Intensifikasi serta peningkatan kualitas Pembangunan**	**Pencapaian visi Daerah**
2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah
Meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Kecamatan
Meningkatkan Akutabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatkan Akutabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatkan Akutabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatkan Akutabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatkan Akutabilitas Kinerja Kecamatan

1.1 Program Pembangunan Daerah

Program pada dasarnya merupakan "*a set of related measures or activities with a particular long-term aim*", atau "*a planned series of future events or performances*" (OED, 2018) dalam terjemahannya yaitu "Seperangkat tindakan atau kegiatan terkait dengan tujuan jangka panjang tertentu", atau "serangkaian acara atau pertunjukan yang akan datang" (OED, 2018). Karenanya eksistensi program berada pada level operasional, yang memuat rencana kegiatan, beserta ukuran-ukuran yang relevan untuk mengukur keberhasilannya. Dalam perspektif Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, program merupakan penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah dimaknai sebagai program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

Berdasarkan definisi dan ruang lingkup di atas, program pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD ini diformulasikan sebagai program strategis guna mengoperasionalisakan strategi agar mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dapat dilihat pada matriks berikut ini

Tabel 6.7
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Lebak

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
			MISI 1. **MENINGKATKAN KUALITAS DAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA**				**629.933.249.550**		**653.028.153.600**		**651.170.385.850**		**659.306.008.250**		**653.788.976.400**		**3.247.226.773.650**	
			Tujuan 1. **Meningkatnya kualitas hidup masyarakat**	**Indeks Pembangunan Manusia**														
			Sasaran 1.1 **Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Layanan pendidikan yang terjangkau dan merata**	**Indeks Pendidikan**														
11	01	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (Satuan: %)	29,90	34,90	1.155.131.000	35,40	1.155.131.000	35,90	1.212.887.550	36,40	1.212.887.550	36,90	1.220.392.750	36,90	5.956.429.850	DISPENDIKBUD
11	01	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP (Satuan: %)	99,00	99,02	108.123.342.100	99,07	107.154.586.100	99,12	108.202.018.800	99,17	112.202.018.800	99,22	112.202.018.800	99,22	547.883.984.600	DISPENDIKBUD
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP (Satuan: %)	86,00	86,05		86,10		86,15		86,20		86,25		86,25		
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD (Satuan: %)	98,98	99,03		99,08		99,13		99,18		99,23		99,23		
11	01	18	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf (AMH) (Satuan: %)	98,48	98,52	1.591.733.000	98,56	1.591.733.000	98,60	1.656.889.300	98,64	1.661.300.600	98,68	2.009.650.000	98,68	8.511.305.900	SETDA, DISPENDIKBUD
				Jumlah bantuan Sarana dan Prasarana MDTA/Mebelair (Satuan: Ruang Kelas)	26,00	26,00		30,00		30,00		30,00		30,00		30,00		
11	01	20	Program Pendidikan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru bersertifikat pendidik (Satuan: %)	77,90	78,00	3.154.796.500	78,10	3.154.796.500	78,20	3.154.796.500	78,30	3.154.796.500	78,40	3.154.796.500	78,40	15.773.982.500	DISPENDIKBUD
				Angka Kelulusan SD (Satuan: %)	98,13	98,18		98,23		98,28		98,33		98,38		98,38		
				Angka Kelulusan SMP (Satuan: %)	94,78	94,83		94,88		94,93		94,98		95,03		95,03		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
11	01	22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah SD berakreditasi A (Satuan: %)	4,20	7,70	629.468.000	11,20	629.468.000	14,70	650.352.000	18,20	670.802.500	21,70	728.680.000	21,70	3.308.770.500	DISPENDIKBUD
				Persentase sekolah SMP berakreditasi A (Satuan: %)	10,40	13,90		17,40		20,90		24,40		27,90		27,90		
11	01	23	Program BOS	Angka Putus sekolah SD (Satuan: %)	0,22	0,20	154.497.720.000	0,19	154.497.720.000	0,18	154.497.720.000	0,17	154.497.720.000	0,16	154.497.720.000	0,16	772.488.600.000	DISPENDIKBUD
				Angka Putus sekolah SMP (Satuan: %)	0,10	0,08		0,07		0,06		0,05		0,04		0,04		
				Angka Melanjutkan SD ke SMP (Satuan: %)	94,77	94,84		94,89		94,94		94,99		95,04		95,04		
				Angka melanjutkan SMP ke SMA (Satuan: %)	86,79	86,80		86,81		86,82		86,83		86,84		86,84		
12	17	21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan (Satuan: Orang)	56.502,00	68.502,00	986.463.800	80.502,00	1.570.273.000	92.502,00	2.196.913.900	104.502,00	2.086.899.500	116.502,00	998.430.200	128.502,00	7.838.980.400	DISPENDIKBUD
				Jumlah Perpustakaan yang dibina (Satuan: Unit)	157,00	185,00		213,00		241,00		269,00		297,00		325,00		DISKERPUS, DISPENDIKBUD
				Cakupan TBM yang sesuai standar (Satuan: Lembaga)	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		
			Sasaran 1.2 **Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Layanan kesehatan yang terjangkau dan merata**	**Indeks Kesehatan**														
11	02	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Puskesmas Terpenuhi Kebutuhan Obat Secara Tepat dan Rasional (Satuan: %)	50,00	100,00	7.164.767.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	100,00	7.164.767.000	DINKES
11	02	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase keluarga sehat (Satuan: %)	11,00	35,00	19.403.855.150	42,00	95.311.725.150	44,00	95.275.222.800	47,00	95.420.997.800	49,00	92.877.433.150	49,00	398.289.234.050	DINKES
				Persentase puskesmas terakreditasi minimal madya (Satuan: %)	11,90	23,81		35,71		47,62		59,52		71,42		71,42		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
				Rasio Rujukan kasus Non Spesialitik (RRNS)dari Puskesmas ke Rumah Sakit (Satuan: %)	4,76	4,75		4,74		4,73		4,72		4,71		4,71		
11	02	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan pembinaan PHBS di tatanan kesehatan (Satuan: %)	65,00	70,00	283.250.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	70,00	283.250.000	DINKES
11	02	21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah Desa ODF (Satuan: Desa)	33,00	42,00	5.074.975.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	42,00	5.074.975.000	DINKES
1	02	22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular (Satuan: %)	70,00	100,00	3.974.656.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	100,00	3.974.656.000	DINKES
11	02	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Ketersediaan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar minimal ketenagaan di setiap puskesmas (Satuan: %)	10,00	10,00	9.782.270.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	10,00	9.782.270.000	DINKES
11	02	25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (Satuan: %)	67,00	70,00	25.077.678.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	70,00	25.077.678.000	DINKES
11	02	26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (Satuan: %)	80,00	80,00	18.967.828.000	82,00	25.500.000.000	85,00	27.500.000.000	87,00	27.500.000.000	90,00	27.500.000.000	90,00	126.967.828.000	RSUD
11	02	32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase pelayanan kesehatan keluarga (Satuan: %)	70,00	100,00	8.924.330.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	100,00	8.924.330.000	DINKES
11	02	33	Program Peningkatan dan Pengembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap layanan RSUD (Satuan: %)	80,00	82,00	145.000.000.000	84,00	148.000.000.000	86,00	152.000.000.000	88,00	152.000.000.000	90,00	155.000.000.000	90,00	752.000.000.000	RSUD
11	02	34	Program jaminan Kesehatan Nasional	Cakupan Angka Kontak (Satuan: 0/00 (permil))	11,90	75,00	57.971.478.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	75,00	57.971.478.000	DINKES
11	02	35	Program Bantuan Operasional Kesehatan	Persentase Puskesmas yang melaksanakan manajemen sesuai standar (Satuan: %)	100,00	100,00	35.550.125.000	100,00	35.550.125.000	100,00	35.550.125.000	100,00	35.550.125.000	100,00	35.550.125.000	100,00	177.750.625.000	DINKES

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
11	02	36	Program Pengembangan Kesehatan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa ODF (Satuan: %)	9,57	21,74	-	33,91	1.545.000.000	46,09	475.000.000	58,26	550.000.000	70,43	550.000.000	70,43	3.120.000.000	DINKES
				Cakupan pembinaan PHBS di tatanan kesehatan (Satuan: %)	65,00	70,00		75,00		80,00		85,00		90,00		90,00		
11	02	37	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai standar (Satuan: %)	67,00	70,00	-	100,00	1.319.160.000	100,00	1.255.000.000	100,00	1.305.000.000	100,00	1.200.000.000	100,00	5.079.160.000	DINKES
11	02	38	Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan keluarga sesuai standar (Satuan: %)	75,28	0,00	-	100,00	8.924.330.000	100,00	8.988.097.000	100,00	8.988.097.000	100,00	8.988.097.000	100,00	35.888.621.000	DINKES
				Persentase balita kurang Gizi mendapat perawatan (Satuan: %)	80,00	0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
11	02	39	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan, Farmasi serta Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Puskesmas dengan sarana dan prasarana sesuai standar (Satuan: %)	48,00	0,00	-	60,00	41.543.587.250	67,00	32.800.000.000	69,00	32.900.000.000	71,00	33.255.270.000	71,00	140.498.857.250	DINKES
				Persentase Puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar (Satuan: %)	20,00	0,00		50,00		60,00		70,00		80,00		80,00		
				Persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai Formularium Nasional (Fornas) (Satuan: %)	91,00	0,00		93,00		94,00		95,00		96,00		96,00		
				Persentase puskesmas yang melaksanakan SIKDA (Satuan: %)	82,92	0,00		88,09		90,47		95,24		100,00		100,00		
			***Sasaran 1.3* Menurunnya Penduduk Miskin**															
11	02	24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Jumlah pelaksanaan sosialisasi jamsos (Satuan: kecamatan)	28,00	28,00	180.870.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	28,00	180.870.000	SETDA
			Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang masalah	Terpenuhinya sarana prasarana usaha bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), PRSE, KAT (Satuan: Klp)	10,00	10,00	290.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	290.000.000	DINSOS

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
			Kesejahteraan Sosial Lainnya.															
				Terpenuhinya sarana prasarana usaha bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), PRSE, KAT (Satuan: Orang)	20,00	20,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
				Terpenuhinya sarana prasarana usaha bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), PRSE, KAT (Satuan: Desa)	20,00	20,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
11	06	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan PMKS memperoleh Penanganan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial (Satuan: %)	100,00	100,00	1.635.400.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	100,00	1.635.400.000	DINSOS
11	06	17	Program Pembinaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar memperoleh pendidikan formal/non formal (Satuan: Orang)	20,00	20,00	80.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	80.000.000	DINSOS
11	06	18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Jumlah penyandang disabilitas dan eks trauma yang tertangani (Satuan: Orang)	20,00	0,00	115.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	115.000.000	DINSOS
				Jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan orang terlantar (OT) tertangani (Satuan: Orang)	45,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
11	06	20	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Jumlah eks penyandang penyakit sosial (eks Napi, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) memiliki usaha (Satuan: Orang)	20,00	0,00	75.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	75.000.000	DINSOS
11	06	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Satuan: %)	50,00	50,00	240.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	240.000.000	DINSOS

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
11	06	22	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Terpeliharanya Areal Pemakaman (Satuan: Lokasi)	2,00	2,00	70.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	70.000.000	DINSOS
				Jumlah Jenazah yang diurus (Satuan: orang Non PNS)	10,00	10,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
11	06	23	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan PMKS memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial (Satuan: %)	100,00	0,00	-	100,00	1.765.000.000	100,00	1.800.000.000	100,00	2.200.000.000	100,00	2.200.000.000	100,00	7.965.000.000	DINSOS
11	06	24	Program Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial	Cakupan PMKS memperoleh Penanganan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial (Satuan: %)	100,00	100,00	-	100,00	1.128.685.000	100,00	1.295.000.000	100,00	1.485.000.000	100,00	1.485.000.000	100,00	5.393.685.000	DINSOS
			Sasaran 1.4 **Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk**	**Laju Pertumbuhan Penduduk**														
12	08	15	Program Keluarga Berencana	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (Satuan: %)	100,00	100,00	12.450.413.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	100,00	12.450.413.000	DPPKBP3A
				Persentase pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (Satuan: %)	67,57	67,55		0,00		0,00		0,00		0,00		67,55		
12	08	16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa (Satuan: %)	1,36	1,36	75.800.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,36	75.800.000	DPPKBP3A
12	08	17	Program Pelayanan Kontrasepsi	Ratio Akseptor KB (Satuan: %)	7,13	7,25	442.800.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	7,25	442.800.000	DPPKBP3A
				Presentase Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (Satuan: %)	70,17	70,25		0,00		0,00		0,00		0,00		70,25		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
12	08	18	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ratio Akseptor KB (Satuan: %)	7,13	7,25	-	7,50	13.039.213.000	8,75	13.285.363.000	9,00	13.495.363.000	9,25	13.285.363.000	9,25	53.105.302.000	DPPKBP3A
				Persentase pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (Satuan: %)	67,57	67,55		67,53		67,50		67,48		67,47		67,47		
				Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa (Satuan: %)	1,36	1,36		1,46		1,55		1,65		1,80		1,80		
				Persentase Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun (Satuan: %)	70,17	70,25		70,50		70,70		70,90		80,10		80,10		
				Cakupan Anggota Bina Keluarga berKB (Satuan: Orang)	40.177,00	40.300,00		40.650,00		41.200,00		41.725,00		51.250,00		51.250,00		
				Jumlah Pusat Pelayanan KKBPK yang terbina & aktif (BKB, BKR, BKL) (Satuan: Kelompok)	847,00	853,00		858,00		864,00		870,00		876,00		876,00		
				Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
12	08	19	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Jumlah Pusat Pelayanan KKBPK yang terbina & aktif (BKB) (Satuan: Kelompok)	379,00	381,00	85.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	381,00	85.000.000	DPPKBP3A
				Jumlah Pusat Pelayanan KKBPK yang terbina & aktif (BKR) (Satuan: Kelompok)	209,00	211,00		0,00		0,00		0,00		0,00		211,00		
				Jumlah Pusat Pelayanan KKBPK yang terbina & aktif (BKL) (Satuan: Kelompok)	259,00	261,00		0,00		0,00		0,00		0,00		261,00		
			Sasaran 1.5 **Meningkatnya peran**	**Indeks Pembangunan Kepemudaan**														

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
			Kepemudaan dan olahraga															
12	13	16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Prosentase lembaga pemuda yang terbina (Satuan: %)	50,00	60,00	1.361.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	60,00	1.361.000.000	DISPORA
				jumlah pemuda yang berprestasi di Tk. Provinsi dan nasional (Satuan: Orang)	13,00	15,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15,00		
12	13	17	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Prosentase wirausaha muda baru yang memperoleh akses modal (Satuan: %)	10,00	10,00	350.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	350.000.000	DISPORA
12	13	18	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Prosentase lembaga pemuda yang aktif (Satuan: %)	50,00	0,00	-	60,00	1.711.000.000	60,00	2.000.000.000	60,00	2.050.000.000	60,00	1.711.000.000	60,00	7.472.000.000	DISPORA
				jumlah pemuda yang berprestasi di Tk. Provinsi dan nasional (Satuan: Orang)	15,00	0,00		15,00		15,00		15,00		15,00		15,00		
				Persentase wirausaha muda baru yang memperoleh akses modal (Satuan: %)	10,00	0,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		
12	13	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Prosentase Atlet yang berprestasi (Satuan: %)	72,00	73,00	3.900.000.000	75,00	6.665.000.000	76,00	4.700.000.000	77,00	7.700.000.000	78,00	3.900.000.000	78,00	26.865.000.000	DISPORA
				Prosentase Cabor yang berprestasi (Satuan: %)	58,00	60,00		61,00		62,00		63,00		64,00		64,00		
12	13	21	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Prosentase Sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik (Satuan: %)	100,00	100,00	600.000.000	100,00	600.000.000	100,00	1.800.000.000	100,00	1.800.000.000	100,00	600.000.000	100,00	5.400.000.000	DISPORA
				Jumlah Sarana dan Prasarana olahraga yang terbangun (Satuan: Unit)	2,00	0,00		4,00		2,00		2,00		2,00		2,00		
			Sasaran 1.6 **Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan**	**Indeks Pembangunan Gender**														

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
12	02	15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Presentase Lembaga Pemenuhan hak Anak yang terbentuk dan aktif (Satuan: %)	75,00	80,00	216.800.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	100,00	216.800.000	DPPKBP3A
				Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (Satuan: %)	100,00	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		
12	02	16	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak	Presentase perempuan dalam pelaksanaan pembangunan (Satuan: %)	100,00	100,00	-	100,00	671.620.600	100,00	875.000.000	100,00	875.000.000	100,00	875.000.000	100,00	3.296.620.600	DPPKBP3A
				Cakupan Stakeholder yang mampu menyusun perencanaan & penganggaran yang responsif gender (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Presentase Lembaga Pemenuhan hak Anak yang terbentuk dan aktif (Satuan: %)	75,00	80,00		85,00		90,00		95,00		100,00		100,00		
				Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
12	02	17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Presentase perempuan dalam pelaksanaan pembangunan (Satuan: %)	100,00	100,00	451.300.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	451.300.000	DPPKBP3A
				Cakupan Stakeholder yang mampu menyusun perencanaan & penganggaran yang responsif gender (Satuan: %)	100,00	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
			Misi 2. **Meningkatkan Produktifitas perekonomian daerah melalui pengembangan pariwisata**				**53.745.510.500**		**109.072.830.200**		**95.469.654.850**		**85.730.867.550**		**56.143.587.200**		**400.162.450.300**	
			Tujuan 2. **Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat**	**Gini Ratio**														
			Sasaran 2.1. **Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas**	**PDRB Perkapita**														
				LPE														
				Daya Beli														
				Indeks Williamson														
				Tingkat Pengangguran Terbuka														
				Kontribusi Sektor Pariwisata pada PDRB														
12	01	18	Program Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Satuan: %)	13,00	15,00	2.247.600.000	17,00	2.650.000.000	19,00	2.247.600.000	21,00	2.247.600.000	23,00	2.247.600.000	23,00	11.640.400.000	NAKERTRANS
				Standarisasi BLK (Satuan: Kelas)	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
				Persentase Perusahaan yang tertib hukum ketenagakerjaan (Satuan: %)	38,20	43,20		48,20		53,20		58,20		63,20		63,20		
12	03	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Satuan: %)	73,70	79,60	3.134.800.000	83,00	3.831.500.000	86,32	5.514.112.000	89,77	6.266.934.400	93,96	4.500.000.000	96,95	23.247.346.400	KETAPANG
				Porsentase Pangan Aman (Satuan: %)	86,00	85,00		86,00		87,00		88,00		89,00		90,00		
12	11	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Prosentase UMK yang berdaya saing (Satuan: %)	10,87	12,86	998.010.000	14,85	963.010.100	16,83	998.010.000	18,82	998.010.000	20,81	998.010.000	20,81	4.955.050.100	DISKOP
12	11	18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Prosentase Koperasi Aktif (Satuan: %)	19,67	23,24	817.000.000	26,82	817.000.000	30,39	817.000.000	33,97	817.000.000	37,54	817.000.000	41,12	4.085.000.000	DISKOP

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
12	12	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor PMA dan PMDN berskala nasional (Satuan: investor)	18,00	4,00	847.500.000	4,00	1.049.200.000	5,00	953.500.000	5,00	956.700.000	5,00	953.500.000	5,00	4.760.400.000	SETDA, DPMPTSP
				Jumlah pameran tingkat regional dan nasional yang termonitoring dan terevaluasi (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
12	12	16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah nilai investasi berskala nasional(PMDN/PMA) (Satuan: Rupiah)	20,95	1.000.000.000.000	1.566.158.000	1.070.000.000.000	1.686.523.700	1.144.900.000.000	1.975.158.000	1.225.043.000.000	1.997.158.000	1.310.796.010.000	1.975.158.000	1.310.796.010.000	9.200.155.700	SETDA, DPMPTSP
				Jumlah termonitoring dan terevaluasi Akses Keuangan Daerah (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Jumlah termonitoring dan terevaluasi penerima Kredit Usaha Rakyat (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Jumlah penyelesaian Kredit Peduli Lebak (Satuan: %)	100,00	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
12	16	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	persentase pelestarian adat budaya daerah (Satuan: %)	11,76	35,29	265.222.000	17,64	265.222.000	17,64	365.222.000	17,64	383.483.100	11,76	383.483.100	11,76	1.662.632.200	DISPENDIKBUD
12	16	16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan (Satuan: %)	21,95	22,00	1.286.908.200	22,05	1.286.908.200	22,10	1.350.908.200	22,15	1.418.453.600	22,20	1.418.453.600	22,20	6.761.631.800	DISPENDIKBUD
12	16	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase terpenuhinya kebutuhan event seni dan budaya daerah (Satuan: %)	100,00	100,00	583.451.000	100,00	583.451.000	100,00	583.451.000	100,00	612.623.550	100,00	612.623.550	100,00	2.975.600.100	DISPENDIKBUD
20	01	25	Program Peningkatan Produksi Perikanan	Produksi Ikan Budidaya (Satuan: ton)	3.751,41	3.600,00	2.108.049.950	3.780,00	2.270.319.000	3.745,44	3.508.504.000	4.167,45	3.728.504.000	3.896,76	2.108.049.950	3.974,69	13.723.426.900	PERIKANAN
				Produksi Ikan Tangkap (Satuan: ton)	6.019,97	6.313,66		6.376,80		6.440,56		6.504,97		6.570,02		6.635,72		
20	01	26	Program Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Hasil Produksi Perikanan	Persentase peningkatan kelas kelompok perikanan (Satuan: %)	1,98	1,98	182.000.000	1,98	-	1,98	233.750.000	1,98	257.125.000	1,98	182.000.000	1,98	854.875.000	PERIKANAN
20	02	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	500,00	500,00	2.650.781.000	500,00	3.000.000.000	750,00	3.000.000.000	1.000,00	6.601.698.150	1.250,00	2.500.000.000	1.250,00	17.752.479.150	PARIWISATA

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
				mancanegara (Satuan: Orang)														
				Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (Satuan: Orang)	749.500,00	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
20	02	16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Cakupan peningkatan sarana prasarana objek wisata dalam kondisi baik (Satuan: %)	23,00	1,00	3.707.739.000	43,48	5.809.858.800	21,74	10.125.554.150	21,74	7.805.450.000	21,74	3.707.739.000	21,74	31.156.340.950	PARIWISATA
				Jumlah Desa Wisata yang dikembangkan (Satuan: Desa)	7,00	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		
20	02	17	Program Peningkatan Daya Dukung Kelembagaan Kepariwisataan	Persentase kelembagaan di 23 ODTW (Satuan: %)	40,00	57,00	-	74,00	1.848.766.000	83,00	3.416.663.000	91,00	3.830.781.000	100,00	1.830.781.000	100,00	10.926.991.000	PARIWISATA
				Persentase sektor ekonomi kreatif yang berkembang (Satuan: %)	18,00	18,00		37,00		50,00		63,00		75,00		75,00		
20	03	21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan (Satuan: %)	2,00	1,00	770.000.000	2,00	885.000.000	2,00	900.000.000	2,00	925.000.000	2,00	935.000.000	2,00	4.415.000.000	DISNAK
20	03	22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah Produksi Daging (Satuan: ton)	8.847,00	9.680,00	1.848.506.500	10.164,00	2.259.389.600	10.672,00	3.000.000.000	11.205,00	3.000.000.000	11.765,00	2.000.000.000	12.353,00	12.107.896.100	DISNAK
20	03	25	Program Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian	Pertumbuhan Nilai Produksi yang terjual (Satuan: %)	2,00	2,00	2.120.350.000	2,00	4.341.269.000	2,00	15.000.000.000	2,00	18.870.000.000	2,00	9.370.000.000	2,00	49.701.619.000	DISNAK, DSTANBUN
				Pertumbuhan Nilai Produksi (Satuan: %)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
20	03	26	Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Pertanian	Jumlah Peningkatan Kelas Kelompok : Pemula (Satuan: Kelompok)	1.628,00	1.608,00	2.738.335.600	1.588,00	2.509.385.800	1.570,00	2.476.349.500	1.152,00	2.600.166.000	1.534,00	2.476.349.500	1.535,00	12.800.586.400	DISNAK, DSTANBUN
				Lanjut (Satuan: Kelompok)	838,00	858,00		878,00		896,00		914,00		932,00		931,00		
				Madya (Satuan: Kelompok)	38,00	38,00		38,00		40,00		42,00		44,00		46,00		
				Utama (Satuan: Kelompok)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		2,00		
20	03	27	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Produksi : Padi (Satuan: ton)	595.485,00	595.484,88	15.772.836.000	607.394,58	61.186.205.000	619.542,47	24.502.296.000	631.933,32	6.807.070.300	644.571,98	6.890.480.500	657.463,20	115.158.887.800	DSTANBUN
				Palawija (Satuan: ton)	34.256,00	34.225,51		35.930,02		36.648,62		37.381,59		38.192,22		38.289,82		
				Hortikultura (Satuan: ton)	184.059,00	184.059,00		187.740,18		191.494,98		195.324,88		199.231,38		203.116,01		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
				Perkebunan (Satuan: ton)	32.543,00	32.543,00		33.193,86		33.857,74		34.534,89		35.225,59		35.930,00		
20	04	15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Prosentase Jumlah Penanganan Terhadap Pelanggaran Perdagangan (Satuan: %)	70,00	75,00	1.725.831.400	80,00	1.477.401.000	85,00	2.450.000.000	90,00	2.450.000.000	95,00	1.477.401.000	97,00	9.580.633.400	DISPERINDAG
				Prosentase alat UTTP yang bertanda tera sah ulang (Satuan: %)	75,00	90,00		92,00		94,00		96,00		98,00		99,00		
20	04	18	Program Peningkatan Efesien Perdagangan Dalam Negeri	Persentase sarana perdagangan yang refresentatif (Satuan: %)	15,00	20,00	7.035.980.850	25,00	9.013.970.000	30,00	9.826.577.000	35,00	10.895.360.450	40,00	7.119.958.000	40,00	43.891.846.300	DISPERINDAG
20	07	16	Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah	Prosentase Industri Kecil dan Menengah yang Memiliki Standar Mutu (Satuan: %)	1,70	2,00	1.198.451.000	10,00	1.198.451.000	30,00	2.085.000.000	50,00	2.121.750.000	75,00	1.500.000.000	77,00	8.103.652.000	DISPERINDAG
20	08	15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Prosentase Keluarga Transmigran yang berhasil (Satuan: %)	60,00	64,00	140.000.000	68,00	140.000.000	72,00	140.000.000	76,00	140.000.000	80,00	140.000.000	80,00	700.000.000	NAKERTRANS
			Misi 3. **Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Wilayah**				**316.795.334.700**		**334.493.147.300**		**322.400.812.800**		**342.758.166.000**		**311.440.351.600**		**1.627.887.812.400**	
			Tujuan 3. **Meningkatkan Infrastruktur yang berkualitas**	**Indeks Infrastruktur Daerah**														
			Sasaran 3.1 **Meningkatnya Infrastruktur Publik untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan orang serta menjamin ketersediaan air untuk irigasi**	**indeks infrastruktur publik**														
11	03	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan terbangun (Satuan: %)	68,33	74,66	17.001.089.905	81,00	11.300.000.000	87,33	11.300.000.000	93,67	11.300.000.000	100,00	11.300.000.000	100,00	62.201.089.905	PUPR
11	03	18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan kabupaten terpelihara / ditingkatkan (Satuan: %)	32,39	32,51	159.491.859.563	32,63	160.000.000.000	32,75	160.000.000.000	32,87	167.644.306.900	32,99	160.000.000.000	32,99	807.136.166.463	PUPR
				persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik (Satuan: %)	50,88	52,47		54,07		55,66		57,26		58,85		58,85		



Kode			Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
				persentase jalan dalam kota kabupaten yang memiliki trotoar dan drainase/saluran (Satuan: %)	14,82	16,93		19,03		21,13		23,23		25,34		25,34		
			Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan															PUPR
11	03	23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase alat berat dalam kondisi baik (Satuan: %)	78,79	80,00	2.670.200.000	81,08	2.345.150.000	82,05	2.345.150.000	82,93	2.345.150.000	83,72	2.345.150.000	83,72	12.050.800.000	PUPR
11	03	24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (Satuan: %)	69,85	70,25	10.428.170.510	70,64	10.126.390.000	71,04	12.526.390.000	71,43	12.926.390.000	71,83	13.126.390.000	71,83	59.133.730.510	PUPR
11	03	26	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Persentase pembangunan penampung air (embung) (Satuan: %)	92,96	94,37	1.155.966.900	95,77	1.089.350.000	97,18	1.089.350.000	98,59	1.089.350.000	100,00	1.089.350.000	100,00	5.513.366.900	PUPR
11	03	28	Program Pengendalian Banjir	persentase berkurangnya kawasan yang terkena dampak banjir (Satuan: %)	80,50	81,54	13.275.437.900	82,58	13.440.000.000	83,62	13.195.000.000	84,68	4.955.000.000	85,70	5.330.000.000	85,70	50.195.437.900	BPBD, BAPPEDA, DSTANBUN , PUPR
11	03	29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase ketersediaan Fasum di kecamatan (Satuan: %)	51,22	60,98	2.329.931.750	70,73	13.307.757.400	80,49	2.500.000.000	90,24	20.754.146.250	100,00	3.399.800.000	100,00	42.291.635.400	PUPR
11	03	30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	persentase panjang Jalan perdesaan yang terbangun (Satuan: %)	76,50	81,20	74.080.649.255	85,90	82.000.000.000	90,60	80.000.000.000	95,30	80.000.000.000	100,00	80.000.000.000	100,00	396.080.649.255	PUPR
				Persentase jembatan pedesaan yang terbangun (Satuan: %)	53,13	62,50		71,88		81,25		90,63		100,00		100,00		
11	03	33	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase layanan informasi jasa konstruksi (Satuan: %)	75,00	100,00	495.000.000	100,00	495.000.000	100,00	495.000.000	100,00	495.000.000	100,00	495.000.000	100,00	2.475.000.000	PUPR
				Persentase tenaga kerja bersertifikat (Satuan: %)	16,67	33,33		50,00		66,67		83,33		100,00		100,00		
30	01	24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya alam	persentase ketersediaan dokumen perencanaan teknis (Satuan: Dokumen)	100,00	100,00	2.602.028.167	100,00	1.702.856.000	100,00	1.771.356.000	100,00	1.773.856.000	100,00	1.773.856.000	100,00	9.623.952.167	PERKIM, PUPR

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
			Sasaran 3.2 **Meningkatnya Infrastruktur Dasar untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang layak**	**indeks infrastruktur dasar**														
11	04	15	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (Satuan: %)	13,67	13,58	780.000.000	13,29	1.925.000.000	13,00	1.725.000.000	12,71	1.750.000.000	12,42	780.000.000	12,42	6.960.000.000	PERKIM
11	04	16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Peningkatan Penanganan Perumahan dengan PSU Layak (Satuan: %)	16,00	12,50	2.823.009.850	25,00	2.658.000.000	37,50	2.100.000.000	50,00	2.200.000.000	62,50	2.200.000.000	62,50	11.981.009.850	PERKIM
11	04	21	Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh di Perkotaan (Satuan: %)	149,99	8,41	3.175.388.200	31,30	4.640.000.000	54,20	4.900.000.000	77,10	4.900.000.000	100,00	4.900.000.000	100,00	22.515.388.200	PERKIM
11	03	27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase akses air minum (Satuan: %)	64,40	64,70	19.226.339.700	65,00	18.252.410.600	65,30	18.252.410.600	65,60	18.252.410.600	65,90	18.252.410.600	65,90	92.235.982.100	DLH
				Persentase akses sanitasi (air limbah) (Satuan: %)	70,82	71,57		72,32		73,07		73,82		74,57		74,57		
			Sasaran 3.3 **Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas**	**Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas**														
12	09	16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase prasarana perhubungan dalam kondisi baik (Satuan: %)	83,00	83,00	203.186.000	83,00	392.448.500	100,00	1.132.000.000	100,00	4.079.200.000	100,00	233.186.000	100,00	6.040.020.500	DISHUB
				Persentase alat uji kendaraan bermotor dalam kondisi baik (Satuan: %)	28,57	28,57		57,14		71,43		85,71		100,00		100,00		
12	09	17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase pelayanan terminal (Satuan: %)	83,33	83,33	2.196.094.000	83,33	2.526.732.300	100,00	2.078.836.200	100,00	2.109.224.450	100,00	2.129.031.750	100,00	11.039.918.700	DISHUB
12	09	18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	persentase pembangunan prasarana perhubungan (Satuan: %)	75,00	0,00	-	100,00	3.250.000.000	100,00	600.000.000	100,00	200.000.000	100,00	200.000.000	75,00	4.250.000.000	DISHUB
12	09	19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas (Satuan: %)	100,00	100,00	3.016.162.000	100,00	4.703.556.500	100,00	5.880.740.000	100,00	5.533.593.800	100,00	3.435.639.250	100,00	22.569.691.550	DISHUB

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
				Persentase rambu - rambu terpasang (Satuan: %)	63,29	68,35		74,64		81,01		87,34		93,67		100,00		
12	09	20	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (Satuan: %)	34,89	37,21	1.844.821.000	39,54	338.496.000	84,16	509.580.000	44,19	450.538.000	46,52	450.538.000	49,00	3.593.973.000	DISHUB
			Misi 4. **Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup**				**7.643.517.800**		**14.991.546.400**		**14.132.206.700**		**16.893.065.100**		**12.329.542.800**		**65.989.878.800**	
			Tujuan 4. **Meningkatnya pelestarian fungsi lingkungan Hidup**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**														
			Sasaran 4.1 **Terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**														
11	03	31	Program Perencanaan Tata Ruang	persentase dokumen rencana tata ruang di susun (Satuan: %)	0,00	25,00	200.000.000	0,00	-	0,00	-	50,00	500.000.000	0,00	-	50,00	700.000.000	PUPR
11	03	32	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang (Satuan: %)	70,00	71,00	160.000.000	72,00	160.000.000	73,00	160.000.000	74,00	160.000.000	75,00	160.000.000	75,00	800.000.000	PUPR
12	05	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah (Satuan: %)	0,00	10,00	3.585.742.800	20,00	9.383.146.400	30,00	8.001.806.700	35,00	9.763.065.100	40,00	6.190.742.800	40,00	36.924.503.800	DLH
				Persentase Penanganan Sampah (Satuan: %)	0,00	13,40		15,50		17,00		18,00		19,00		19,50		
12	05	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan (Satuan: %)	197,00	20,00	1.987.375.000	20,00	3.800.000.000	20,00	4.300.000.000	20,00	4.525.000.000	20,00	4.300.000.000	20,00	18.912.375.000	DLH
				Persentase pengaduan lingkungan yang tertangani (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
12	05	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase lahan kritis yang tertangani (Satuan: %)	0,00	5,03	302.000.000	10,29	370.000.000	10,29	392.000.000	10,29	416.200.000	10,29	400.000.000	10,29	1.880.200.000	DLH
12	05	19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen informasi Lingkungan Hidup (Satuan: %)	100,00	100,00	580.000.000	100,00	400.000.000	100,00	400.000.000	100,00	650.000.000	100,00	400.000.000	100,00	2.430.000.000	DLH

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
12	05	24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	persentase ruang terbuka hijau terkelola (Satuan: %)	3,30	3,30	828.400.000	3,30	878.400.000	3,30	878.400.000	3,30	878.800.000	3,30	878.800.000	3,30	4.342.800.000	DLH
			***Misi 5.* Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik**				**106.041.876.650**		**100.692.058.853**		**111.376.352.350**		**114.145.934.050**		**110.426.932.600**		**542.683.154.503**	
			***Tujuan 5.* Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas**	**Indeks Reformasi Birokrasi**														
			***Sasaran 5.1* Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Pelayanan Publik**	**Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)**														
				Indeks Kapasitas Fiskal Daerah														
				OPINI BPK														
				IKM														
11	05	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pelaksanaan koordinasi pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan (Satuan: %)	100,00	100,00	4.536.408.000	100,00	885.299.000	100,00	925.000.000	100,00	950.000.000	100,00	975.000.000	100,00	8.271.707.000	KESBANGPOL, SATPOL PP
				Persentase penegakan Perda (Satuan: %)	90,00	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		
				Tercapainya tingkat respontime pengaduan kebakaran (10 - 15 Menit setelah pengaduan) (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
11	05	16	Program Pembinaan, Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Presentase Penegakkan Perda (Satuan: %)	90,00	90,00	-	90,00	3.477.609.000	92,00	5.500.000.000	92,00	5.520.000.000	94,00	5.520.000.000	94,00	20.017.609.000	SATPOL PP
11	05	17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Prosentase Terlaksananya Peningkatan toleransi dan pembinaan keagamaan (Satuan: %)	100,00	100,00	5.224.789.000	100,00	5.224.789.000	100,00	5.224.789.000	100,00	5.224.789.000	100,00	5.224.789.000	100,00	26.123.945.000	KESBANGPOL, SETDA

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
11	05	18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Parpol yang terbina (Satuan: %)	100,00	100,00	107.724.000	100,00	107.724.000	100,00	114.300.000	100,00	117.700.000	100,00	121.240.000	100,00	568.688.000	KESBANGPOL
				Cakupan Pembinaan terhadap Ormas/LSM (Satuan: %)	44,44	44,44		46,00		48,00		50,00		52,00		54,00		
11	05	19	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response time) pengaduan kebakaran (<15 Menit Setelah Pengaduan) (Satuan: %)	80,00	100,00	-	100,00	223.500.000	100,00	240.000.000	100,00	245.000.000	100,00	250.000.000	100,00	958.500.000	SATPOL PP
11	05	20	Program Peningkatan Pemerantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Persentase penurunan penyalahgunaan miras dan prostitusi (Satuan: %)	10,00	10,00	189.425.000	0,00	89.425.000	0,00	100.000.000	0,00	110.000.000	0,00	120.000.000	10,00	608.850.000	KESBANGPOL, SATPOL PP
				persentase penurunan PEKAT (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
12	04	16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase penguasaan Tanah bagi Kepentingan Umum (Satuan: %)	0,00	15,15	5.001.300.000	24,24	3.160.000.000	33,33	4.200.000.000	42,42	4.200.000.000	51,52	2.100.000.000	51,52	18.661.300.000	PERKIM
12	04	17	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase Penyelesaian Konflik Sengketa Pertanahan (Satuan: %)	0,00	20,00	125.000.000	40,00	125.000.000	60,00	135.000.000	80,00	140.000.000	100,00	140.000.000	100,00	665.000.000	PERKIM
12	06	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Prosentase Kepemilikan dokumen kependudukan (Satuan: %)	93,96	94,00	2.152.486.000	94,50	2.521.324.000	95,00	3.114.695.000	95,50	3.426.090.000	96,00	3.768.780.000	96,00	14.983.375.000	DUKCAPIL
				Prosentase kepemilikan akta-akta catatan sipil (Satuan: %)	72,37	75,00		77,00		79,00		81,00		83,00		83,00		
				Prosentase Kesesuaian database dokumen kependudukan (Satuan: %)	88,24	89,00		90,00		91,00		92,00		93,00		93,00		
12	07	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Lembaga masyarakat yang Aktif dan Produktif (Satuan: %)	100,00	20,00	191.576.000	20,00	-	20,00	-	20,00	-	20,00	-	20,00	191.576.000	PMD
12	07	16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Persentase Terbentuk BUMDes yang Aktif (Satuan: persen)	13,00	15,00	150.000.000	17,00	295.576.000	20,00	271.576.000	23,00	291.576.000	25,00	300.576.000	100,00	1.309.304.000	PMD
				Persentase sarana usaha masyarakat	13,00	15,00		17,00		20,00		23,00		25,00		100,00		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
				yang berkembang (Satuan: persen)														
				Tersedianya informasi pembangunan melalui gelar TTG (Satuan: alat TTG)	3,00	10,00		10,00		13,00		16,00		19,00		22,00		
12	07	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	persentase pembangunan sapras perdesaan yang melibatkan masayarakat (Satuan: persen)	70,00	70,00	643.100.000	70,00	240.000.000	70,00	250.000.000	70,00	260.000.000	70,00	270.000.000	70,00	1.663.100.000	PMD
				Persentase Keswadyaan Masyarakat dalam Kegiatan pembangunan Desa (Satuan: persen)	70,00	70,00		70,00		70,00		70,00		70,00		70,00		
12	07	18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Perangkat Desa Baru yang mengikuti Pelatihan Dasar (Satuan: %)	100,00	0,00	301.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	301.000.000	PMD
12	07	19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase perempuan yang aktif dalam TP PKK (Satuan: %)	100,00	100,00	425.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	425.000.000	PMD
				Jumlah KK Pra sejahtera yang dibina (Satuan: %)	100,00	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
12	07	20	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan pengelolaan keuangan desa dengan kategori baik (Satuan: %)	100,00	100,00	467.938.750	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	467.938.750	PMD
12	07	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa	Persentase LKD yang produktif (Satuan: persen)	100,00	20,00	-	20,00	535.000.000	20,00	510.000.000	20,00	515.000.000	20,00	520.000.000	100,00	2.080.000.000	PMD
				Persentase Lembaga Perempuan yang Aktif dan Produktif (Satuan: persen)	100,00	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		100,00		
				Pengurus LKD yang terlatih di bidang kewirausahaan (Satuan: orang)	60,00	142,00		340,00		340,00		340,00		340,00		340,00		
				Jumlah Perempuan yang mendapatkan pembinaan (Satuan: TP PKK)	345,00	373,00		373,00		373,00		373,00		373,00		373,00		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
12	07	22	Program Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan pengelolaan administrasi Pemerintahan Desa, dan Administrasi Keuangan yang baik dan Pengelolaan Asetnya Tertib (Satuan: persen)	100,00	100,00	-	100,00	1.172.038.750	100,00	1.164.355.000	100,00	1.264.355.000	100,00	1.087.038.750	100,00	4.687.787.500	PMD
				Jumlah desa yang mengikuti penilaian kinerja peyelenggaraan pembangunan desa/kelurahan dan pembinaan desa percontohan (Satuan: desa)	340,00	340,00		340,00		340,00		340,00		340,00		340,00		
				Jumlah Aparatur Pemerintahan desa yang terlatih dalam pengelolaan aset desa (Satuan: orang)	340,00	340,00		340,00		340,00		340,00		340,00		340,00		
				Jumlah perangkat desa baru yang mengikuti pelatihan dasar manajemen pemerintahan desa (Satuan: orang)	100,00	170,00		170,00		170,00		170,00		170,00		170,00		
				Jumlah desa yang terfasilitasi penyaluran bantuan keuangan kepada desa (Satuan: desa)	340,00	340,00		340,00		340,00		340,00		340,00		340,00		
				Jumlah rancangan perdes yang terevaluasi (Satuan: perdes)	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
				Jumlah anggota BPD yang mendapatkan pelatihan (Satuan: orang)	0,00	0,00		255,00		255,00		255,00		255,00		255,00		
12	10	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase terlayaninya informasi publik (Satuan: %)	100,00	100,00	1.136.000.000	100,00	536.000.000	100,00	585.700.000	100,00	600.000.000	100,00	621.000.000	100,00	3.478.700.000	SETDA, DISKOMINFO
				Persentase terlayaninya informasi publik (Satuan: %)	100,00	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
12	10	16	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah (Satuan: %)	0,00	0,00	-	100,00	700.000.000	100,00	770.000.000	100,00	866.230.000	100,00	847.000.000	100,00	3.183.230.000	DISKOMINFO
12	10	17	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase pengelolaan aplikasi informatika pemerintah daerah (Satuan: %)	0,00	0,00	-	100,00	2.252.770.000	100,00	3.010.500.000	100,00	3.344.280.000	100,00	2.845.486.000	100,00	11.453.036.000	DISKOMINFO
12	10	18	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	Persentase tersebarluaskannya informasi penyelenggaraan pemerintah daerah (Satuan: %)	100,00	100,00	1.125.000.000	0,00	885.000.000	0,00	890.000.000	0,00	900.000.000	0,00	900.000.000	0,00	4.700.000.000	SETDA, DISKOMINFO
				Cakupan informasi tentang kegiatan SKPD dan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Lebak (Satuan: Kali)	22,00	22,00		22,00		22,00		22,00		22,00		22,00		
12	10	23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Pengelolaan sistem Aplikasi berbasis Teknologi Informatika (Satuan: %)	100,00	100,00	5.092.791.000	0,00	153.452.090	0,00	152.182.090	0,00	152.182.090	0,00	152.182.090	0,00	5.702.789.360	INSPEKTORAT, DISKOMINFO, PMD
				Persentase pemanfaatan Teknologi Informatika untuk layanan publik (Satuan: %)	100,00	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
				Persentase pemanfaatan persandian dalam pengamanan informasi pemerintah daerah (Satuan: %)	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
12	14	15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	cakupan ketersediaan data dan informasi kinerja pembangunan daerah (Satuan: %)	100,00	100,00	529.000.000	100,00	189.000.000	100,00	189.000.000	100,00	189.000.000	100,00	189.000.000	100,00	1.285.000.000	DSTANBUN , DISKOMINFO
12	14	16	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang lengkap (Satuan: %)	0,00	0,00	-	100,00	374.000.000	100,00	400.000.000	100,00	452.540.000	100,00	447.794.000	100,00	1.674.334.000	DISKOMINFO
12	15	16	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase pengamanan informasi pemerintah daerah (Satuan: %)	0,00	0,00	-	100,00	75.000.000	100,00	82.500.000	100,00	90.750.000	100,00	80.750.000	100,00	329.000.000	DISKOMINFO

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
12	18	15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan				398.669.600		-		-		-		-		398.669.600	DISKERPUS
12	18	16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen /Arsip Daerah	Jumlah OPD yang mengelola arsip sesuai Perbup (Satuan: Buah)	55,00	56,00	174.417.500	57,00	695.198.550	58,00	1.697.059.700	59,00	1.746.411.100	60,00	174.417.500	60,00	4.487.504.350	DISKERPUS
				Persentase Sarana dan Prasaranan Kearsipan dalam kondisi baik (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
12	18	17	Program Pemeliharan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Jumlah Dokumen Keuangan Setda yang terpelihara (Satuan: dokumen)	8,00	11,00	53.776.000	11,00	-	11,00	32.800.000	11,00	33.800.000	11,00	34.800.000	11,00	155.176.000	SETDA, DISKERPUS
18	18		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang terintegrasi dalam sistem layanan kearsipan (Satuan: %)	25,00	35,00	260.668.500	45,00	380.000.000	60,00	684.299.200	70,00	691.142.200	80,00	260.668.500	100,00	2.276.778.400	DISKERPUS
				Persentase pengelolaan kearsipan (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
30	01	15	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan daerah (Satuan: persen)	70,00	72,00	983.658.000	74,00	842.658.000	76,00	949.558.000	78,00	959.558.000	80,00	947.158.000	80,00	4.682.590.000	BAPPEDA, DISPERINDAG, PERIKANAN, DISKOP, DPPKBP3A, NAKERTRANS, DINSOS, PERKIM, PUPR
30	01	16	Program Kerjasama Pembangunan	jumlah kerjasama antar pemerintah daerah (Satuan: %)	100,00	100,00	602.000.000	100,00	602.000.000	100,00	602.000.000	100,00	602.000.000	100,00	602.000.000	100,00	3.010.000.000	SETDA
	01	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan sinergisitas Program pembangunan Pusat dan Daerah baik jangka pendek maupun jangka menengah (Satuan: %)	100,00	100,00	7.893.334.200	100,00	7.855.493.700	100,00	7.781.410.200	100,00	7.916.729.200	100,00	7.959.707.600	100,00	39.406.674.900	SELURUH KECAMATAN, SELURUH OPD
30	02	15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pertumbuhan pajak daerah (Satuan: %)	7,00	7,00	9.717.269.000	7,00	8.428.579.000	7,00	8.538.079.000	7,00	8.642.579.000	7,00	8.748.579.000	7,00	44.075.085.000	SETDA, BAPENDA, BPKAD
				Persentase terpenuhinya kebutuhan Tenaga	20,00	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
				Ahli Perpajakan (Satuan: %)														
				Persentase ketaatan wajib pajak daerah (Satuan: %)	81,00	80,05		80,10		80,30		80,50		80,70		80,90		
				Persentase Dokumen Penganggaran yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Satuan: %)	67,50	80,00		80,00		82,00		86,00		86,00		90,00		
				Persentase realisasi pendapatan dan belanja daerah (Satuan: %)	93,00	93,00		93,50		94,00		94,50		94,50		95,00		
				Persentase Laporan Keuangan yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Satuan: %)	94,00	94,00		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		
				Prosentase Jumlah Aset Yang terinventarisasi, terindentifikasi dan terdokumentasi Dengan Total Seluruh Aset Yang Dimiliki Pemerintah Kabupaten Lebak (Satuan: %)	40,00	40,00		43,00		45,00		45,00		48,00		51,00		
				jumlah dokumen standar satuan harga yang di susun (Satuan: dok)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
30	03	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat manajerial (Satuan: %)	39,61	65,36	6.783.858.300	69,81	4.857.000.000	74,63	5.632.125.700	79,45	5.860.956.700	84,27	6.165.470.800	88,95	29.299.411.500	SETWAN, BKPP, BPKAD, BAPPEDA, DISKERPUS, DISKOMINFO, DISHUB, DLH, SATPOL PP
				Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis (Satuan: %)	13,83	16,20		16,86		17,52		18,17		18,83		19,49		
30	03	17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase pejabat struktural yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial (Satuan: %)	100,00	100,00	2.122.483.400	0,00	1.595.000.000	0,00	2.426.834.000	0,00	2.419.483.400	0,00	2.469.483.400	100,00	11.033.284.200	SETDA, BKPP

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
				Persentase pegawai yang memiiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis (Satuan: %)	100,00	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		
				persentase aparatur kecamatan yang mendapatkan pembinaan (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
30	03	18	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian, Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	persentase jabatan yang terisi berdasarkan peraturan perundang-undangan (Satuan: %)	100,00	0,00	-	100,00	1.477.483.400	100,00	3.095.627.000	100,00	3.295.627.000	100,00	3.295.627.000	100,00	11.164.364.400	BKPP
				persentase ASN yang mendapat pelayanan kepegawaian tepat waktu (Satuan: %)	100,00	0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Persentase tertanganinya pelanggaran disiplin aparatur (Satuan: persen)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
30	04	15	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kajian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (Satuan: persen)	100,00	100,00	146.000.000	100,00	146.000.000	100,00	165.000.000	100,00	175.000.000	100,00	185.000.000	100,00	817.000.000	BAPPEDA
30	05	15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Audit, Revieu dan Evaluasi yang dilaksanakan sesuai PKPT dan Standar AAIPI (Satuan: persen)	100,00	100,00	4.127.662.050	100,00	4.262.875.763	100,00	4.562.554.310	100,00	5.172.236.710	100,00	5.434.207.610	100,00	23.559.536.443	INSPEKTORAT
30	05	16	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase SDM dan Sarana Pengawasan yang tersedia (Satuan: persen)	70,00	75,00	231.960.000	80,00	306.097.200	85,00	265.571.000	90,00	360.697.200	95,00	398.197.200	95,00	1.562.522.600	INSPEKTORAT
30	05	17	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase OPD yang menerapkan SPIP hasil pendampingan (Satuan: persen)	28,00	54,00	298.434.000	65,00	171.900.000	82,00	334.000.000	100,00	334.000.000	100,00	400.343.000	100,00	1.538.677.000	INSPEKTORAT
30	06	15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga	Persentase indek kepuasan pelayanan kepada Anggota DPRD	85,00	90,00	21.765.076.700	100,00	22.087.130.800	95,00	21.805.076.700	100,00	21.825.076.700	100,00	21.845.076.700	100,00	109.327.437.600	SETWAN

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
			Perwakilan Rakyat Daerah	Kab. Lebak (Satuan: %)														
				Rara-rata waktu fasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat kepada Anggota DPRD melalui Komisi-Komisi (Satuan: %)	87,00	90,00		100,00		95,00		100,00		100,00		100,00		
30	06	16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Terpenuhinya layanan kedinasan KDH/WKDH (Satuan: %)	100,00	100,00	655.662.000	100,00	655.662.000	100,00	716.500.000	100,00	735.000.000	100,00	735.000.000	100,00	3.497.824.000	SETDA
30	06	19	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah rencana kerja dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Satuan: Perda)	7,00	7,00	2.382.402.000	7,00	2.215.887.000	7,00	2.280.000.000	7,00	2.385.000.000	7,00	2.248.800.000	7,00	11.512.089.000	SETWAN, SETDA
				cakupan Penetapan Perda dan Perbup (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
30	06	20	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	jumlah dokumen persiapan daerah otonomi baru (Satuan: dokumen)	10,00	2,00	425.000.000	4,00	280.000.000	4,00	887.000.000	4,00	907.000.000	4,00	907.000.000	18,00	3.406.000.000	SETDA
30	06	21	Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah	Jumlah jenis administrasi daerah yang berjalan dengan baik (Satuan: dokumen)	7,00	7,00	847.000.000	7,00	947.000.000	7,00	887.000.000	7,00	907.000.000	7,00	927.000.000	7,00	4.515.000.000	SETDA
30	06	22	Program Peningkatan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase penggunaan E-Procurenment terhadap Belanja Pengadaan Barang dan jasa (Satuan: %)	100,00	100,00	3.889.397.500	100,00	3.889.397.500	100,00	4.126.000.000	100,00	4.250.000.000	100,00	4.377.500.000	100,00	20.532.295.000	SETDA
30	07	16	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Cakupan Penanggulangan Bencana (Satuan: %)	100,00	100,00	2.728.271.000	100,00	3.428.468.750	100,00	3.157.000.000	100,00	3.144.000.000	100,00	2.929.000.000	100,00	15.386.739.750	BPBD

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
30	07	17	Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan (Satuan: %)	100,00	100,00	12.156.339.150	100,00	12.345.720.350	100,00	12.921.260.450	100,00	12.923.144.750	100,00	12.901.260.450	100,00	63.247.725.150	CILOGRANG, CIBEBER, BAYAH, CIHARA, PANGGARANGAN, WANASALAM, MALINGPING, CIGEMBLONG, CIJAKU, BANJARSARI, CILELES, GUNUNGKENCANA, LEBAKGEDONG, CIPANAS, CIRINTEN, BOJONGMANIK, SOBANG, MUNCANG, CURUGBITUNG, MAJA, SAJIRA, LEUWIDAMAR, CIKULUR, CIMARGA, WARUNGGUNUNG, CIBADAK, KALANGANYAR, RANGKASBITUNG, SETDA
				persentase peningkatan pelayanan jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat (Satuan: %)	100,00	0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
JUMLAH							**1.114.159.489.200**		**1.212.277.736.353**		**1.194.549.412.550**		**1.218.834.040.950**		**1.144.129.390.600**		**5.883.950.069.653**	

6.3 ARAH KEBIJAKAN TATA RUANG

Penataan ruang Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan berbasis pertanian, perkebunan, pariwisata, dan pertambangan
Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud ditetapkanlah kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi :

a. peningkatan ketahanan pangan dan agribisnis berbasis kewilayahan;
b. pengoptimalan kawasan wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan;
c. pengembangan potensi pertambangan yang berwawasan lingkungan;
d. peningkatan kualitas dan pemerataan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana wilayah;
e. peningkatan fungsi pelestarian kawasan lindung;
f. peningkatan dan pemantapan fungsi dan peran kawasan strategis; dan
g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Peningkatan ketahanan pangan dan agribisnis berbasis kewilayahan dilaksanakan dengan strategi:

a. mengembangkan dan meningkatkan kawasan pusat pengembangan agropolitan;
b. mengembangkan kawasan minapolitan; dan
c. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.

Pengoptimalan kawasan wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan dilaksanakan dengan strategi :

a. mengembangkan kawasan wisata alam;
b. mengembangkan kawasan wisata budaya;
c. mengembangkan kawasan wisata buatan;
d. mengembangkan kawasan wisata terpadu di bagian timur;
e. mengembangkan kawasan obyek wisata dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, budaya dan agama; dan
f. mengembangkan dan menguatkan prasarana, sarana dan utilitas pendukung kawasan wisata.

Pengembangan potensi pertambangan yang berwawasan lingkungan dilaksanakan dengan strategi:

a. mengembangkan kemitraan dalam rangka meningkatkan produksi dan kemampuan usaha pertambangan;
b. meningkatkan kualitas pengelolaan bahan tambang secara efisien dan efektif yang ramah lingkungan;
c. meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan; dan

d. meningkatkan potensi hasil pertambangan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Peningkatan kualitas dan pemerataan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana wilayah dilaksanakan dengan strategi :

a. menetapkan pusat-pusat kegiatan secara berhirarki;
b. mengembangkan dan meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana sesuai dengan fungsi dan hierarki pusat-pusat pelayanan;
c. mengembangkan fungsi atau kegiatan baru pada pusat-pusat pelayanan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan;
d. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan pada kawasan perdesaan sebagai penunjang kawasan agropolitan;
e. menciptakan pemerataan pembangunan wilayah;
f. mengembangkan dan meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tidak terbarukan; dan
g. mengembangkan sistem jaringan prasarana dan sarana antar pusat kegiatan yang memungkinkan terjaganya akses antar pusat kegiatan/pelayanan.

Peningkatan fungsi pelestarian kawasan lindung sebagaimana dilaksanakan dengan strategi :

a. menetapkan kawasan di luar kawasan hutan yang mempunyai fungsi lindung menjadi kawasan lindung;
b. mempertahankan kawasan lindung yang telah ada agar sesuai dengan fungsi perlindungannya;
c. meningkatkan kualitas kawasan hutan yang berfungsi sebagai kawasan lindung, yaitu kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi; dan
d. mengendalikan bentuk-bentuk kegiatan yang berada di dalam kawasan lindung yang tidak sesuai dengan fungsi perlindungan dan/atau dapat merusak fungsi perlindungan kawasan lindung.

Peningkatan dan pemantapan fungsi dan peran kawasan strategis dilaksanakan dengan strategi:

a. mengoptimalkan pengembangan kawasan melalui peningkatan nilai ekonomi kawasan;
b. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung perkotaan;
c. membatasi dan mencegah pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi fungsi perlindungan kawasan;
d. membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan yang ditetapkan untuk fungsi lindung yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya;
e. mengoptimalkan pengembangan kawasan melalui peningkatan nilai ekonomis kawasan lindung melalui pemanfaatan untuk daya tarik wisata, pendidikan, dan penelitian berbasis lingkungan hidup; dan
f. mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.

Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan strategi:

a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan Negara sebagai zona penyangga; dan
d. memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

Berdasarkan Penggunaan lahan, pola pemanfaatan ruangnya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lebak yaitu meliputi

a. Kondisi Klimatologi

Berdasarkan penggunaan lahan, pola pemanfaatan ruangnya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lebak yaitu memiliki Kawasan budidaya sebesar 229,478,05 Ha atau 69,43% dan kawasan lindung sebesar 100.938,13 Hektar atau 30,54%. Secara lengkap, rencana pola ruang pada tahun 2034 dapat dilihat pada tabel 2.8 dan grafik 2.1 dan grafik 2.2 berikut ini.

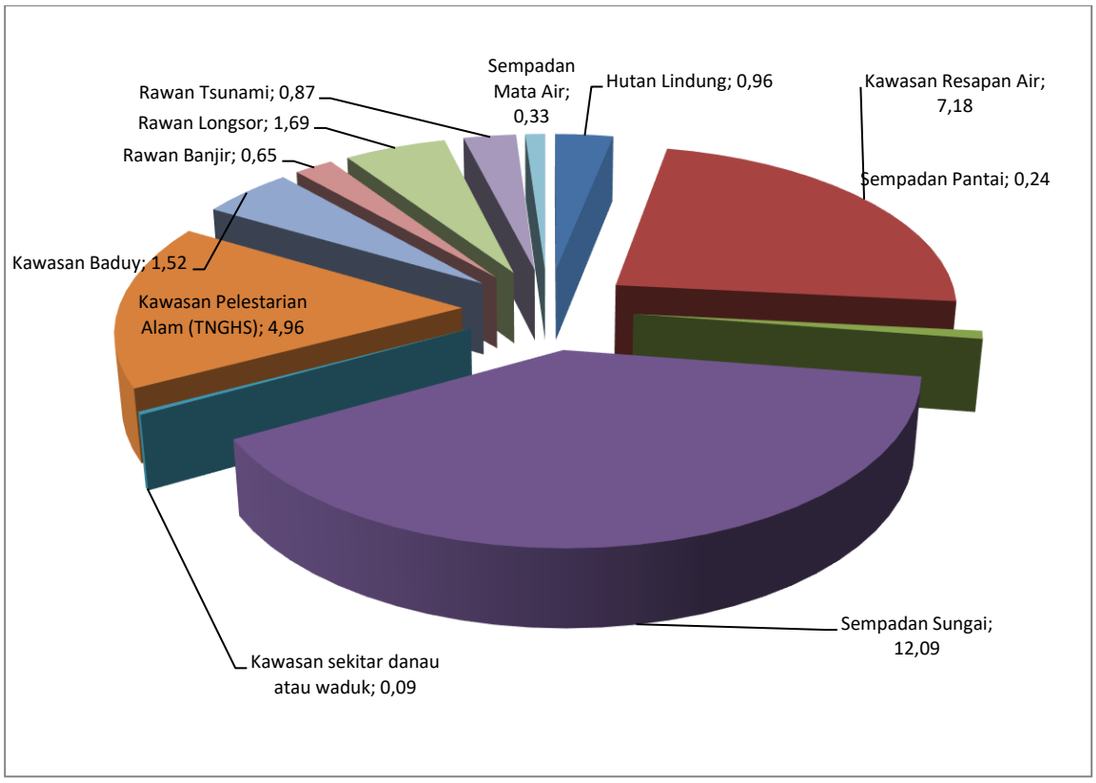
Tabel 6.8
Rencana Pola Ruang Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034

No.	Rencana Pola Ruang		Luas (ha)	%
1	Kawasan Lindung	Hutan Lindung	3.179,46	0,96
		Kawasan Resapan Air	23.731,13	7,18
		Sempadan Pantai	801,20	0,24
		Sempadan Sungai	39.965,17	12,09
		Kawasan sekitar danau atau waduk	304,14	0,09
		Kawasan Pelestarian Alam (TNGHS)	16.380,00	4,96
		Kawasan Baduy	5.101,00	1,52
		Rawan Banjir	2.133,35	0,65
		Rawan Longsor	5.581,81	1,69
		Rawan Tsunami	2.871,03	0,87
		Sempadan Mata Air	1.076,84	0,33
	Luas Kawasan Lindung		**101.029,13**	**30,57**
2.	Kawasan Budidaya	Hutan Produksi Terbatas	40.220,07	12,17
		Hutan Produksi Tetap	12.650,37	3,83
		Perkebunan	56.586,00	17,12
		Pertanian Pangan Lahan Basah	40.170,11	12,15
		Pertanian Pangan Lahan Kering	44.083,23	13,34
		Peternakan	644,21	0,20
		Pertambangan	2.732,97	0,83
		Industri	1.395,18	0,42

No.	Rencana Pola Ruang		Luas (ha)	%
		Permukiman Perdesaan	16.269,59	4,92
		Minopolitan	288,41	0,09
		Permukiman Perkotaan	14.436,81	4,40
	Luas Kawasan Budidaya		**229.478,05**	**69,43**
	Luas Total		**330.507,2**	**100,00**

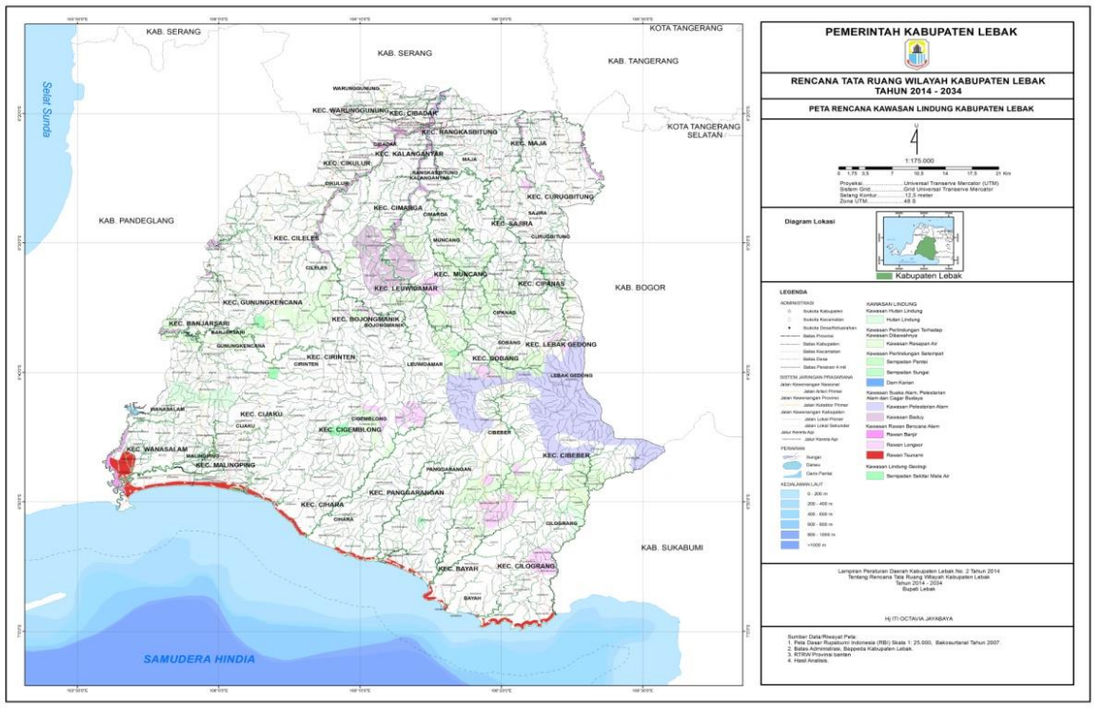
Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

Grafik 6.1
Persentase Rencana Pola Ruang Kabupaten LebakTahun 2014-2034 untuk Kawasan Lindung



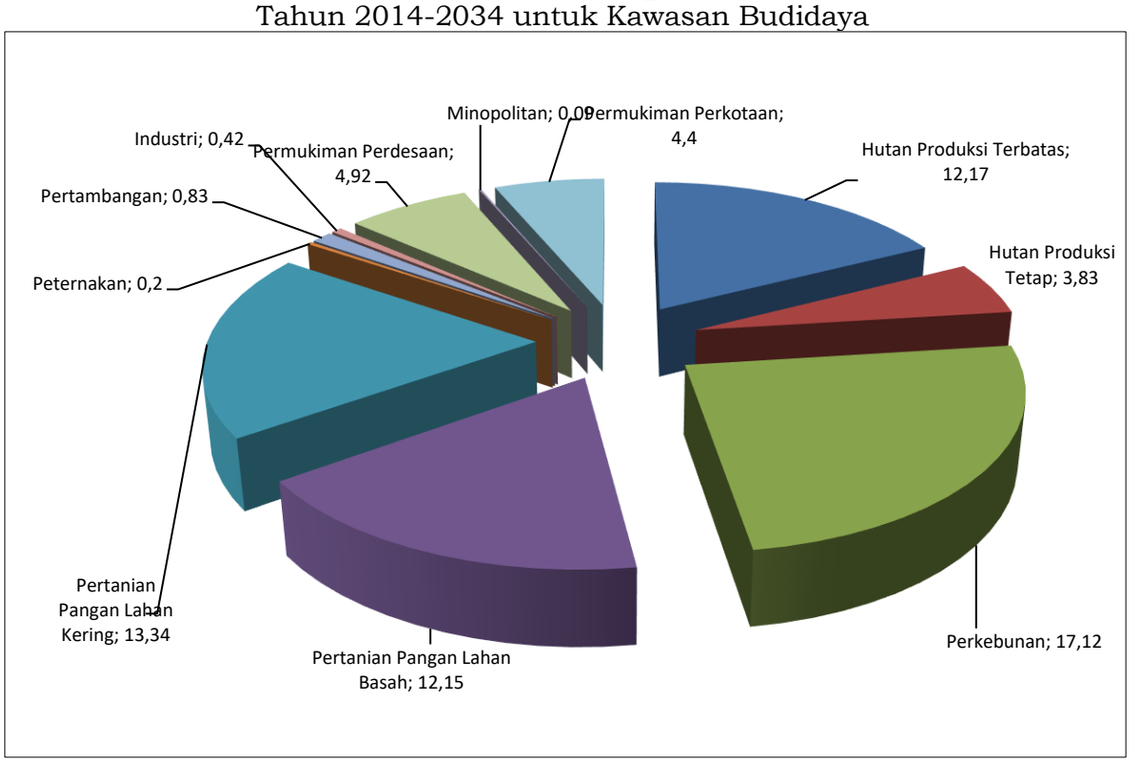
Sumber : Diolah dari RTRW Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034

Gambar 6.3
Peta Rencana Kawasan Lindung Kabupaten Lebak
Tahun 2014-2034



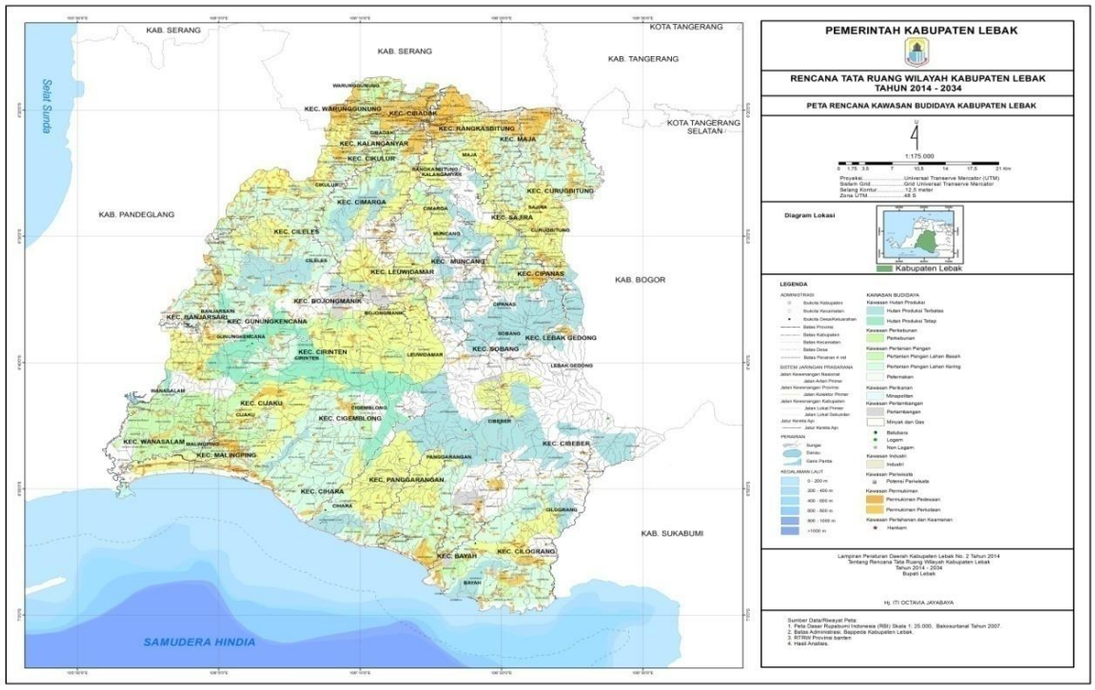
Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

Grafik 6.2
Persentase Rencana Pola Ruang Kabupaten Lebak
Tahun 2014-2034 untuk Kawasan Budidaya



Sumber : Diolah dari RTRW Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034

Gambar 6.4
Peta Rencana Kawasan Budidaya Kabupaten Lebak
Tahun 2014-2034



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

Rincian Kawasan Budidaya di Kabupaten Lebak, sebagaimana pada tabel 6.9 berikut.

Tabel 2.9
Penggunaan Kawasan Budidaya di Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Kawasan Budidaya											Total (Ha)	%
		Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Perkebunan	Pertanian Pangan Lahan Basah	Pertanian Pangan Lahan Kering	Peternakan	Pertambangan	Minapolitan	Industri	Permukiman Perdesaan	Permukiman Perkotaan		
1	Banjarsari	-	927.01	3,771.96	1,705.81	3,256.72	124.59	-	-	-	1,614.75	338.60	11,739.44	5.11
2	Bayah	1,563.91	-	488.68	835.12	7,131.54	-	289.67	-	66.59	1,237.96	528.12	12,141.59	5.29
3	Bojongmanik	831.86	-	3,402.05	984.83	64.23	-	1,174.85	-	-	384.39	28.89	6,871.10	2.99
4	Cibadak	-	-	-	415.51	339.96	45.50	-	-	-	169.80	1,909.77	2,880.54	1.25
5	Cibeber	11,820.56	-	1,748.75	1,628.04	1,966.98	-	859.82	-	-	324.88	235.65	18,584.68	8.10
6	Cigemblong	1,330.84	2,867.70	480.03	1,933.50	3,798.53	78.70	73.03	-	-	190.49	350.45	11,103.27	4.84
7	Cihara	1,910.46	-	1,914.81	1,170.74	4,862.25	-	47.80	-	-	645.25	165.46	10,716.77	4.67
8	Cijaku	110.32	1,273.11	4,484.95	1,426.68	1,960.77	-	-	-	-	487.29	393.66	10,136.78	4.42
9	Cikulur	45.70	-	1,634.08	1,956.76	290.28	57.69	-	-	-	883.74	500.84	5,369.09	2.34
10	Cileles	1,910.59	-	3,299.65	1,547.26	5,706.45	-	-	-	-	1,028.02	151.87	13,643.84	5.94
11	Cilograng	1,027.48	-	2,233.35	690.50	1,686.17	-	-	-	43.79	542.58	702.96	6,926.83	3.02
12	Cimarga	3,940.09	-	4,173.49	1,945.21	1,695.80	85.60	-	-	-	766.47	81.18	12,687.84	5.53
13	Cipanas	1,544.56	-	695.75	1,393.55	80.27	-	-	65.38	-	271.23	731.05	4,781.79	2.08
14	Cirinten	-	3,641.05	4,262.74	1,415.44	323.02	-	5.17	-	-	359.45	93.51	10,100.38	4.40
15	Curugbitung	-	-	2,381.55	1,032.96	3,389.41	-	-	-	23.99	864.57	326.06	8,018.54	3.49
16	Gunungkencana	1,742.49	3,478.23	1,120.00	1,295.72	2,234.02	-	-	-	-	515.67	138.32	10,524.45	4.58
17	Kalanganyar	-	-	143.69	717.52	386.31	-	-	-	-	127.59	798.18	2,173.29	0.95
18	Lebakgedong	3,567.02	-	-	525.45	-	-	-	-	-	41.37	146.20	4,280.04	1.86
19	Leuwidamar	276.17	150.83	2,694.94	1,173.89	748.85	-	62.98	-	-	741.67	212.11	6,061.44	2.64
20	Maja	-	-	1,223.16	1,225.79	1,129.73	-	-	-	473.36	948.74	1,544.27	6,545.05	2.85
21	Malingping	304.12	-	2,113.20	2,340.25	858.61	78.40	-	-	-	945.80	689.86	7,330.24	3.19
22	Muncang	1,706.15	-	357.62	1,087.35	115.79	-	-	-	-	171.07	29.60	3,467.58	1.51
23	Panggarangan	2,629.96	136.88	7,607.36	2,577.55	974.76	-	142.83	-	-	430.85	257.03	14,757.22	6.43
24	Rangkasbitung	-	-	1,117.87	981.77	439.33	-	-	-	787.45	458.29	2,236.11	6,020.82	2.62
25	Sajira	1,651.31	-	3,146.80	2,159.64	99.09	95.87	-	-	-	691.67	34.26	7,878.64	3.43
26	Sobang	2,306.48	-	1.24	581.76	-	-	76.82	-	-	110.76	110.94	3,188.00	1.39
27	Wanasalam	-	175.56	1,997.28	3,768.86	311.13	-	-	196.63	-	672.77	180.58	7,302.81	3.18
28	Warunggunung	-	-		1,652.65	233.24	77.86	-	26.40	-	641.88	1,613.96	4,245.99	1.85
	Luas Total	40,220.07	12,650.37	56,495.00	40,170.11	44,083.24	644.21	2,732.97	288.41	1,395.18	16,269.00	14,519.49	229,478.05	100.00

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

a. Kawasan Lindung

Sesuai dengan RTRW rencana kawasan lindung tahun 2014-2034 seluas 101.029,13 Ha (30,57% dari luas wilayah). Pemanfaatan ruang paling besar

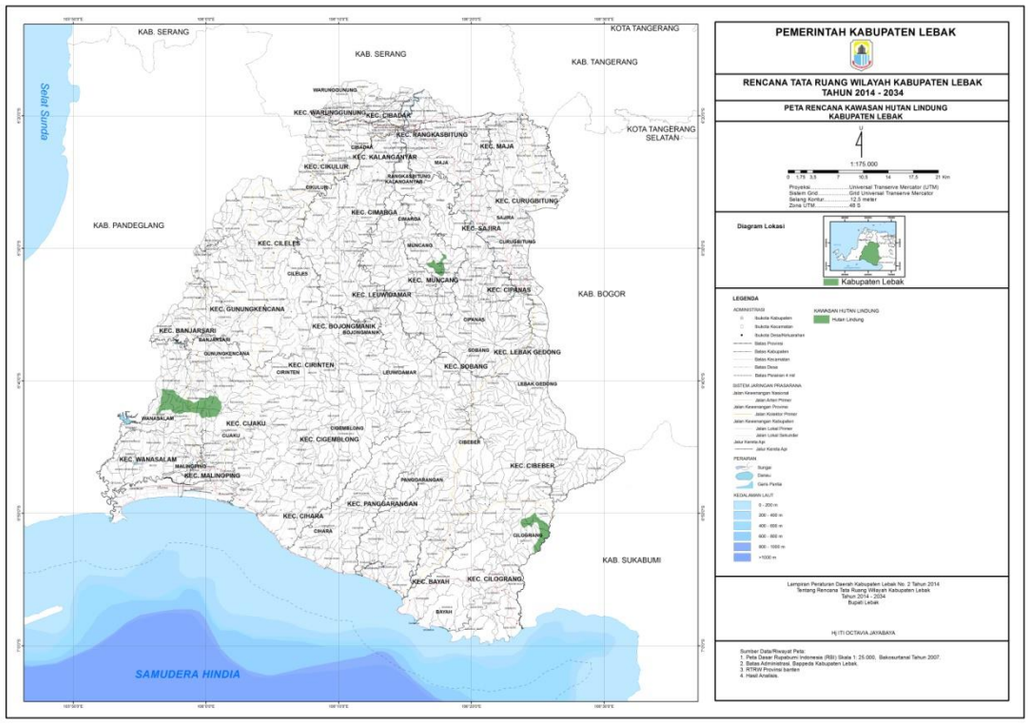
diperuntukkan untuk kawasan sempadan sungai dan pemanfaatan ruang paling kecil untuk kawasan sekitar danau atau waduk.

1) Kawasan Hutan Lindung

Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang karena keadaan sifat alamnya diperuntukkan guna pengaturan tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. Kondisi kualitas dan kuantitas air semakin berkurang. Hal ini akan berdampak pada degradasi lingkungan, dimana merupakan ancaman bagi mahluk hidup dan lingkungannya. Salah satu penyebab penurunan kualitas dan kuantitas air adalah terjadinya pengurangan luas hutan lindung.

Luas kawasan hutan lindung seluas 3.179,46 Ha (0,96% dari luas). Kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung tersebar di Kecamatan Banjarsari (638,88 Ha atau 21,51%), Cibeber (396,43 Ha atau 12,47%), Cijaku (402,26 Ha atau 12,65%), Cilograng (387,71 Ha atau 12,19%), Cimarga (17,01 Ha atau 0,53%), Gunungkencana (86,74 Ha atau 2,73%), Malingping (479,47 Ha atau 15,08%), Muncang (340,95 Ha atau 10,72%), dan Wanasalam (385,01 Ha atau 12,11%).

Gambar 6.5
Peta Rencana Kawasan Hutan Lindung

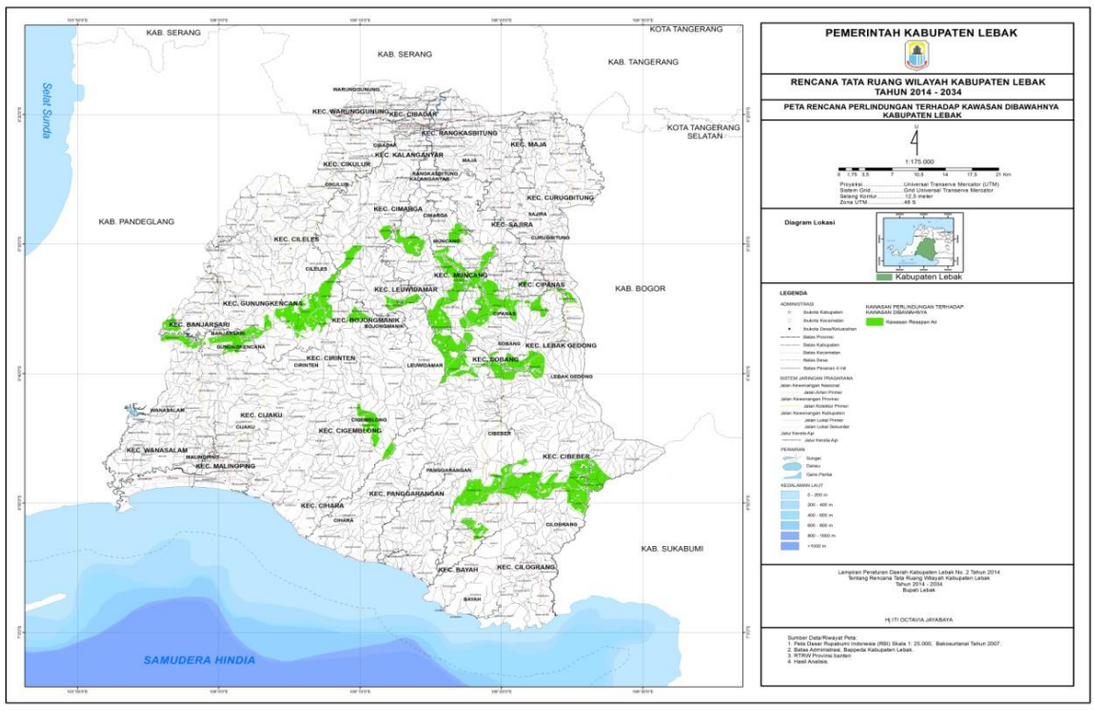


Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

2) Kawasan yang Memberikan Perlindungan bagi Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya berbentuk kawasan resapan air. Kawasan resapan air tersebar di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarsari (920,44 Ha atau 3,88%), Bojongmanik (1.301,60 Ha atau 5,48%), Cibeber (5.767,47 Ha atau 24,30%), Cigemblong (868,45 Ha atau 3,66%), Cileles (4,92 Ha atau 0,02%), Cimarga (2.662,85 Ha atau 11,22%), Cipanas (574,70 Ha atau 2,42%), Cirinten (1.201,54 Ha atau 5,06%), Gunungkencana (1.548,57 Ha atau 6,53%), Lebakgedong (294,15 Ha atau 1,24%), Leuwidamar (590,38 Ha atau 2,49%), Muncang (3.611,88 Ha atau 15,22%), Sajira (1.096,31 Ha atau 4,62%) dan Sobang (3.041,60 Ha atau 12,82%) dengan luas 21.529,85 Ha atau sekitar 6,51 % dari luas Kabupaten Lebak.

Gambar 6.6
Peta Rencana Perlindungan Terhadap Kawasan Dibawahnya



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

3) Kawasan Perlindungan Setempat

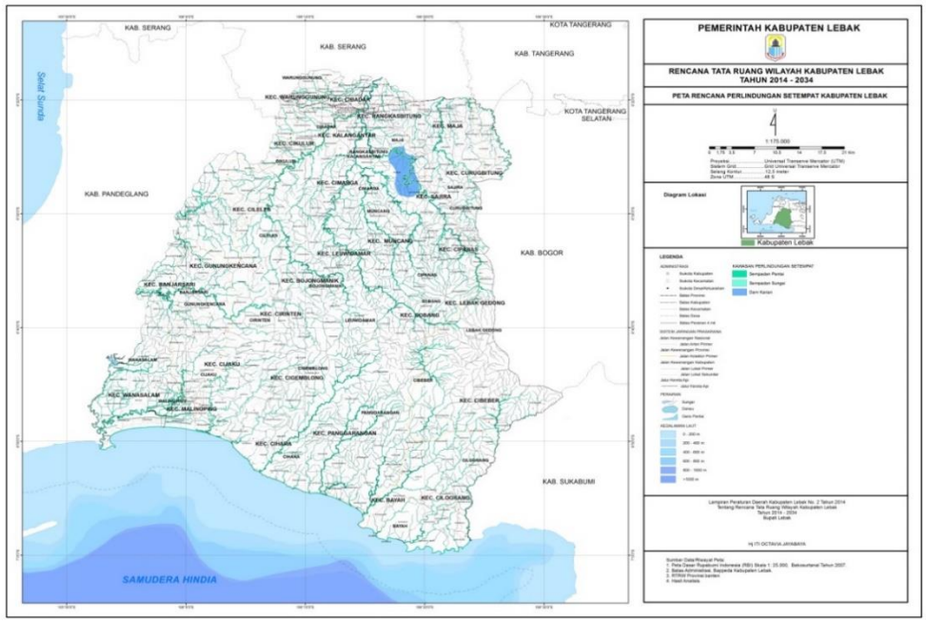
Kawasan perlindungan setempat terdiri dari kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan pantai dan kawasan sekitar danau atau waduk. Luas rencana kawasan perlindungan setempat adalah 40.974,51 Ha atau 12,40% dari luas.

Adapun luas kawasan sempadan sungai kurang lebih 39.869,17 Ha atau 12,06 % dari luas Kabupaten Lebak. Kawasan sempadan sungai ini tersebar

di seluruh kecamatan yang ada. Kawasan sempadan sungai terbesar terdapat di Kecamatan Cibeber, yaitu mencapai 3.585,38 Ha atau 1,08 % dari luas Kabupaten Lebak.

Sempadan pantai yaitu kawasan sempadan pantai dengan lebar 100 meter sepanjang garis pantai di sepanjang pantai, dengan luas 801,20 Ha atau 0,24 % dari luas Wilayah. Sebaran kawasan sempadan pantai terluas terdapat di Kecamatan Bayah dan Kecamatan Cihara. Luas kawasan sekitar danau atau waduk sebesar kurang lebih 304,14 Ha atau 0,09 % dari luas Wilayah. Kawasan sekitar danau atau waduk ini tersebar di seluruh Kecamatan.

Gambar 6.7
Peta Rencana Perlindungan Setempat

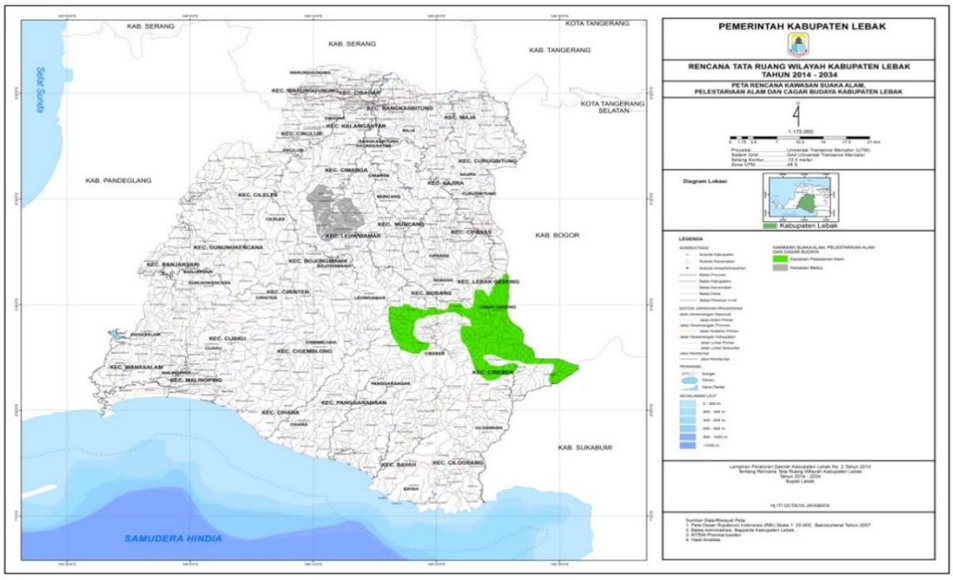


Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

4) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya ini meliputi kawasan taman suaka alam berupa Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan berupa Kawasan Baduy. Luas wilayah kawasan TNGHS adalah 16.380 Ha atau 4,96 % dari luas wilayah. Sedangkan luas kawasan Baduy adalah 5.101 Ha atau 1,54 % dari luas Kabupaten Lebak.

Gambar 6.8
Peta Rencana Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

5) Kawasan Rawan Bencana Alam

Berdasarkan tabel di bawah dapat diidentifikasi bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Lebak atau sekira 58,33% dari luas wilayah Kabupaten Lebak adalah wilayah rawan bencana tanah longsor, baik yang disebabkan oleh faktor eksogen maupun endogen. Wilayah rawan tanah longsor ini tersebar di hampir seluruh kecamatan (89,29%). Sisanya sekira 5,68% dari total luas wilayah Kabupaten Lebak adalah daerah rawan banjir yang tersebar di Kecamatan Malingping, Wanasalam, Cijaku, Banjar Sari, Cimarga, Cikulur, Warung Gunung, Cibadak, Rangkasbitung, Maja, dan Kalanganyar; serta sekira 3,69% merupakan wilayah rawan gempa bumi dan tsunami yang tersebar di pesisir Selatan di Kecamatan Malingping, Wanasalam, Panggarangan, Bayah, Cilograng, dan Cihara. Dari total luas wilayah Kabupaten Lebak, hanya terdapat sekira 32,30% wilayah yang diidentifikasi sebagai wilayah aman dalam arti tidak termasuk wilayah rawan bencana alam maupun geologi. Kondisi geologi wilayah rawan gempa bumi yang secara umum tersusun oleh batuan sedimen, batuan gunung api, serta endapan *alluvium* berumur tersier hingga kuarter yang bersifat urai, lepas, dan tidak kompak karena proses pelapukan yang terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama, menjadikan efek kegempaan yang akan terasa lebih besar dan kuat di wilayah ini. Karenanya, isu kebencanaan menjadi isu strategis yang patut diidentifikasi sifat latennya dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Dengan variabilitas karakteristik alamiah wilayah Kabupaten Lebak di atas, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lebak memetakan penggunaan lahan dan pola pemanfaatan ruang dalam dua rencana pola ruang, yaitu meliputi kawasan budidaya sekira 229,478,05 hektar atau sekira 69,43%; dan kawasan lindung seluas 100.938,13 hektar atau sekira 30,54%. Luasnya kawasan lindung yang hampir mencapai sepertiga wilayah Kabupaten Lebak, merupakan konsekuensi logis dari fungsi alamiah sebagian besar wilayah Kabupaten Lebak yang menjadi daerah konservasi, dan mempengaruhi dan memberikan perlindungan bagi ekosistem wilayah dan kehidupan masyarakat Banten dan sekitarnya. Sedangkan pada kawasan budidaya, sebagian besar dimanfaatkan/ diperuntukkan guna pengembangan perkebunan, pertanian pangan lahan kering, pertanian pangan lahan basah, dan kehutanan berupa hutan produksi terbatas. Selebihnya dimanfaatkan untuk aktifitas peternakan, pertambangan, industri, minapolitan, termasuk didalamnya adalah kawasan permukiman baik di perdesaan maupun perkotaan.

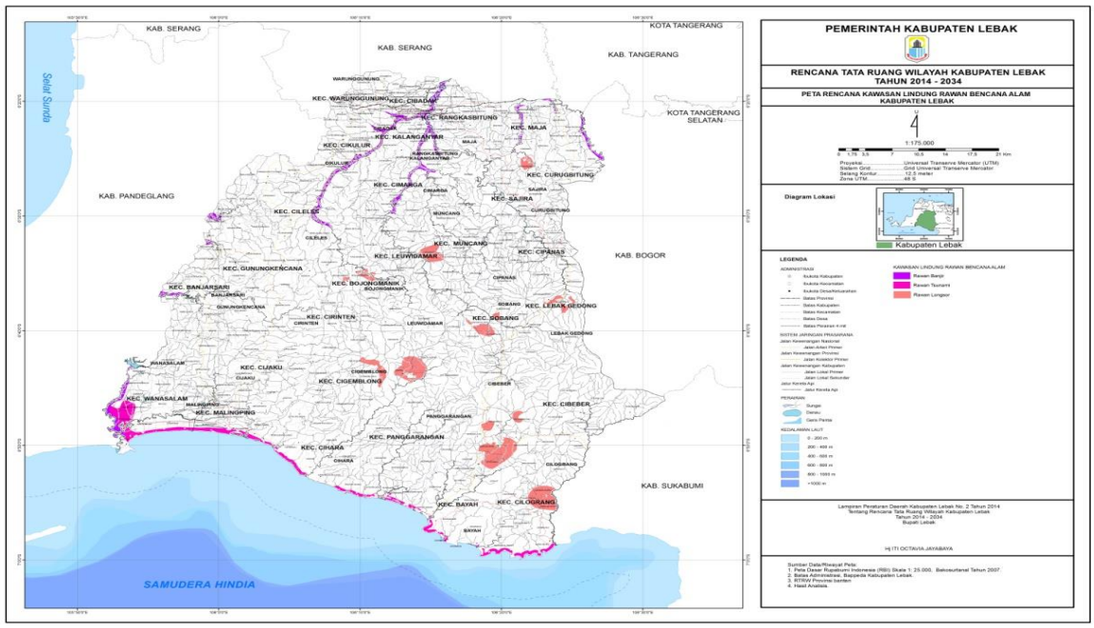
Tabel 6.10
Wilayah Rawan Bencana Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Tipe dan Luas Wilayah				Total
		Wilayah Aman	Rawan Longsor	Rawan Banjir	Rawan Tsunami	
1	Malingping	42,41	4.521,89	3.089,22	2.547,95	10.201,47
2	Wanasalam		156,93	6.590,98	4.671,10	11.419,02
3	Panggarangan		16.663,91		1.051,61	17.715,51
4	Bayah		13.004,72		1.372,49	14,.377,21
5	Cilograng		9.570,30		31,41	9.601,71
6	Cibeber	1.444,67	38.651,74			40.096,41
7	Cijaku	6.044,74	5.257,37	166,31		11.468,42
8	Banjarsari	3.126,51	12.023,09	805,90		15.955,50
9	Cileles	14.197,27	1.141,49			15.338,76
10	Gunungkencana	11.189,12	2.612,38			13.801,50
11	Bojongmanik	6.874,68	2.717,16			9.591,83

12	Leuwidamar	7.301,23	7.003,86			14.305,09
13	Muncang	2.711,83	5.983,54			8.695,38
14	Sobang	1.533,06	9.616,28			11.149,34
15	Cipanas	3.609,16	2.916,14			6.525,30
16	Sajira	4.228,34	6.238,29			10.466,64
17	Cimarga	5.208,41	13.183,32	360,92		18.752,65
18	Cikulur	5.852,11		330,87		6.182,97
19	Warunggunung	4.667,18		69,35		4.736,53
20	Cibadak	958,00		2.674,72		3.632,71
21	Rangkasbitung	2.573,16	1.497,29	3.239,25		7.309,70
22	Maja	5.951,07	1.862,60	3,46		7.817,14
23	Curugbitung	3.317,93	5.999,40			9.317,33
24	Cihara	3.861,49	6.102,64		2.505,72	12.469,86
25	Cigemblong	5.806,94	9.497,99			15.304,93
26	Cirinten	5.235,19	7.019,77			12.254,95
27	Lebakgedong	122,86	9.037,11			9.159,98
28	Kalanganyar	907,47	504,10	1.447,78		2.859,34
	Jumlah	**106.764,83**	**192.783,31**	**18.778,74**	**12.180,28**	**330.507,2**

Sumber: RTRW Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034

Gambar 6.9
Peta Rencana Kawasan Lindung Rawan Bencana Alam



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

Tabel 6.11
Pola Ruang Kabupaten Lebak

No.	Pola Ruang	Luas (ha)	%
I	**Kawasan Lindung**	**101.029,13**	**30,57**
1	Hutan Lindung	3.179,46	0,96
2	Kawasan Resapan Air	23.731,13	7,18
3	Sempadan Pantai	801,20	0,24
4	Sempadan Sungai	39.965,17	12,09
5	Kawasan sekitar danau atau waduk	304,14	0,09
6	Kawasan Pelestarian Alam (TNGHS)	16.380,00	4,96
7	Kawasan Cagar Budaya Baduy	5.101,00	1,52
8	Rawan Banjir	2.133,35	0,65
9	Rawan Longsor	5.581,81	1,69
10	Rawan Tsunami	2.871,03	0,87
11	Sempadan Mata Air	1.076,84	0,33
II	**Kawasan Budidaya**	**229.478,05**	**69,43**
1	Hutan Produksi Terbatas	40.220,07	12,17
2	Hutan Produksi Tetap	12.650,37	3,83
3	Perkebunan	56.586,00	17,12

No.	Pola Ruang	Luas (ha)	%
4	Pertanian Pangan Lahan Basah	40.170,11	12,15
5	Pertanian Pangan Lahan Kering	44.083,83	13,34
6	Peternakan	644,71	0,20
7	Pertambangan	2.732,97	0,83
8	Industri	1.395,18	0,42
9	Permukiman Perdesaan	16.269,59	4,92
10	Minapolitan	288,41	0,09
11	Permukiman Perkotaan	14.436,81	4,40
	Luas Total	**330.507,2**	**100,00**

Sumber : RTRW Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034

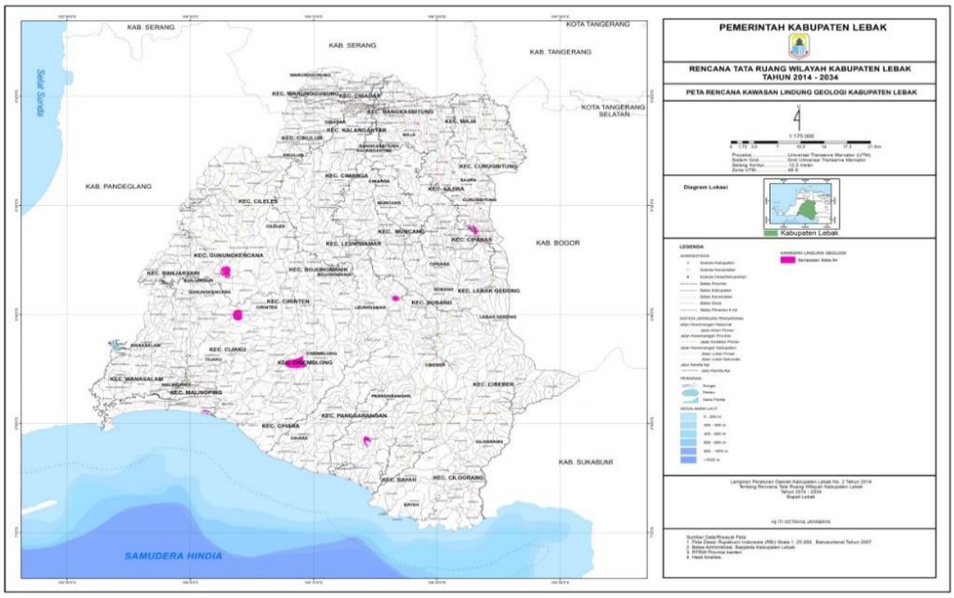
Pada kawasan perkebunan, terdapat sekira 22 komoditas yang sangat potensial dikembangkan di Kabupaten Lebak, sebagian besar bahkan telah banyak dibudidayakan oleh masyarakat setempat, antara lain: karet, kelapa sawit, kakao, kopi, aren, melinjo, cengkeh, dan kelapa dalam. Pengembangan potensi perkebunan ini mencakup kawasan seluas 56.586,00 hektar yang tersebar di beberapa kecamatan, yaitu: Kecamatan Banjarsari, Bayah, Bojongmanik, Cibeber, Cigemblong, Cihara, Cijaku, Cileles, Cilograng, Cimarga, Cipanas, Cirinten, Kalanganyar, Leuwidamar, Malingping, Muncang, Panggarangan, dan Sobang.

Kawasan tanaman pangan seluas 40.170 hektar berupa pertanian pangan lahan basah, diarahkan untuk dipertahankan sebagai kawasan lahan pertanian berkelanjutan, yang secara merata tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Lebak. Demikian pula dengan pertanian pangan lahan kering, yang juga tersebar merata kecuali di Kecamatan Lebakgedong. Di samping itu beberapa kecamatan diproyeksikan sebagai kawasan pengembangan peternakan seluas 644,21 hektar yang tersebar di Kecamatan Banjarsari, Cibadak, Cigemblong, Cikulur, Cimarga, dan Malingping.

6) Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi terdiri dari kawasan sekitar mata air. Kawasan sekitar mata air memiliki luas 1076,84 Ha atau 0,33 % dari luas Kabupaten Lebak. Sebaran sempadan mata air terbesar terdapat di Kecamatan Gunungkencana dan Cigemblong, sisanya menyebar di Kecamatan CIjaku, Cipanas, Maja, Malingping, Panggarangan dan Sobang.

Gambar 6.10
Peta Rencana Lindung Geologi



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

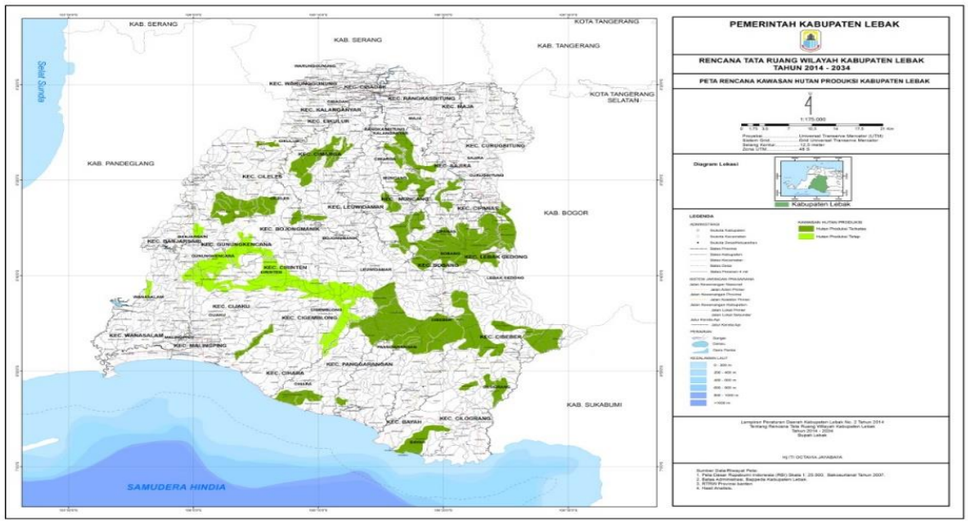
b. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, perkebunan, pertanian pangan, peternakan, pertambangan, industri, permukiman dan minapolitan.

1) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi seluas 52.870,44 Ha dengan fungsi sebagai hutan produksi terbatas seluas 40.220,07 Ha dan hutan produksi tetap seluas 12.650,37 Ha. Hutan produksi terbatas berada di 18 kecamatan dan hutan produksi tetap berada di 8 kecamatan.

Gambar 6.11
Peta Kawasan Hutan Produksi



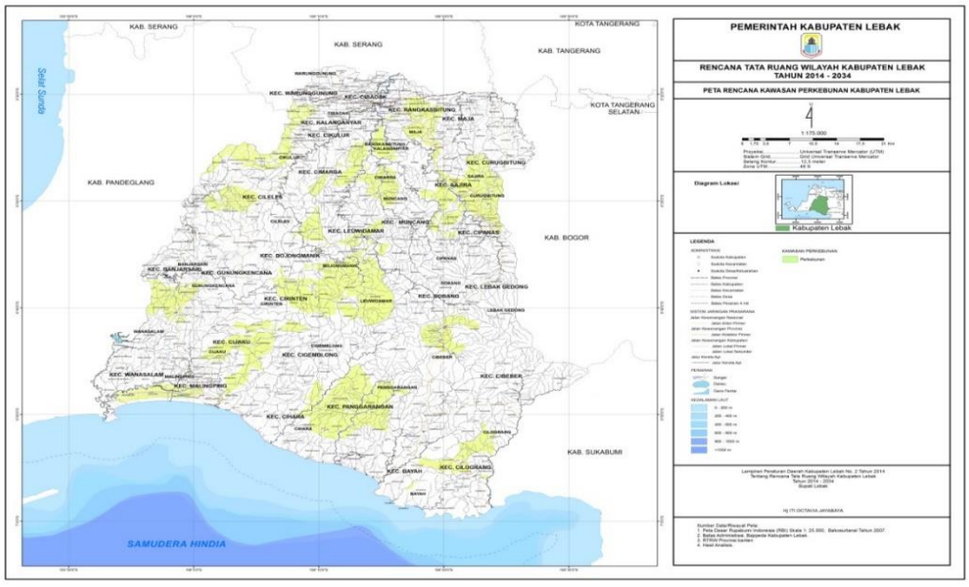
Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

2) Kawasan Peruntukan Perkebunan

Komoditas perkebunan yang dikembangkan sejumlah 22 jenis, dimana dari 22 jenis komoditas tersebut terdapat beberapa komoditas yang memenuhi potensi cukup baik dan banyak dibudidayakan oleh masyarakat Kabupaten Lebak yaitu karet, kelapa sawit, kakao, kopi, aren, melinjo, cengkeh, dan kelapa dalam.

Rencana luas kawasan peruntukan perkebunan adalah 56.586,00 Ha (17,12 %) dari luas Kabupaten Lebak yang terdistribusi di Kecamatan Banjarsari, Bayah, Bojongmanik, Cibeber, Cigemblong, Cihara, Cijaku, Cileles, Cilograng, Cimarga, Cipanas, Cirinten, Kalanganyar, Leuwidamar, Malingping, Muncang, Panggarangan, dan Sobang.

Gambar 6.12
Peta Kawasan Perkebunan



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

3) Kawasan Peruntukan Pertanian Pangan

Kawasan tanaman pangan diarahkan untuk dipertahankan sebagai kawasan lahan pertanian berkelanjutan dengan luas sebesar 40.170 Ha berupa pertanian pangan lahan basah.

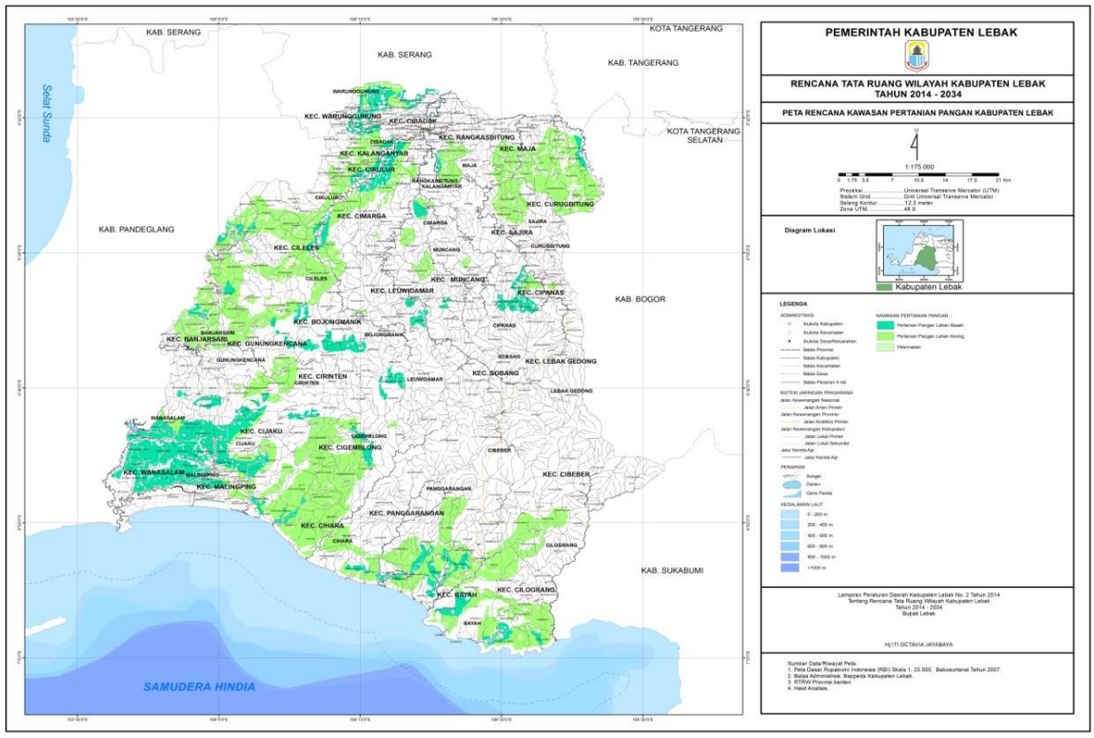
Berdasarkan rencana pola ruang kawasan budidaya yang diperuntukan pertanian pangan meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering dan kawasan peternakan dengan rincian pada tabel 2.12 berikut.

Tabel 6.12
Rencana Kawasan Peruntukan Pertanian Pangan di Kabupaten Lebak
Tahun 2014-2034

No.	Kecamatan	Kawasan Pertanian Pangan			Total (Ha)	%
		Pertanian Pangan Lahan Basah	Pertanian Pangan Lahan Kering	Peternakan		
1	Banjarsari	1,705.81	3,256.72	124.59	5,087.12	5.99
2	Bayah	835.12	7,131.54	-	7,966.66	9,38
3	Bojongmanik	984.83	64.23	-	1,049.06	1.24
4	Cibadak	415.51	339.96	45.50	800.97	0.94
5	Cibeber	1,628.04	1,966.98	-	3,595.02	4.23
6	Cigemlong	1,933.50	3,798.53	78.70	5,810.73	6.84
7	Cihara	1,170.74	4,862.25	-	6,032.99	7.11
8	Cijaku	1,426.68	1,960.77	-	3,387.45	3.99
9	Cikulur	1,956.76	290.28	57.69	2,304.73	2.71
10	Cileles	1,547.26	5,706.45	-	7,253.71	8.54
11	Cilograng	690.50	1,686.17	-	2,376.67	2.80
12	Cimarga	1,945.21	1,695.80	85.60	3,726.61	4.39
13	Cipanas	1,393.55	80.27	-	1,473.82	1.74
14	Cirinten	1,415.44	323.02	-	1,738.46	2.05
15	Curugbitung	1,032.96	3,389.41	-	4,422.37	5.21
16	Gunungkencana	1,295.72	2,234.02	-	3,529.74	4.16
17	Kalanganyar	717.52	386.31	-	1,103.83	1.30
18	Lebakgedong	525.45	-	-	525.45	0.62
19	Leuwidamar	1,173.89	748.85	-	1,922.74	2.26
20	Maja	1,225.79	1,129.73	-	2,355.52	2.77
21	Malingping	2,340.25	858.61	78.40	3,277.26	3.86
22	Muncang	1,087.35	115.79	-	1,203.14	1.42
23	Panggarangan	2,577.55	974.76	-	3,552.31	4.18
24	Rangkasbitung	981.77	439.33	-	1,421.10	1.67
25	Sajira	2,159.64	99.09	95.87	2,354.60	2.77
26	Sobang	581..76	-	-	581.76	0.69
27	Wanasalam	3,768.86	311.13	-	4,079.99	4.81
28	Warunggunung	1,652.65	233.24	77.86	1,963.75	2.31
	Luas Total	**40,170.11**	**44,083.24**	**644.21**	**84.897,56**	**100.00**

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

Gambar 6.13
Peta Rencana Kawasan Pertanian Pangan



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

4) Kawasan peruntukan Peternakan

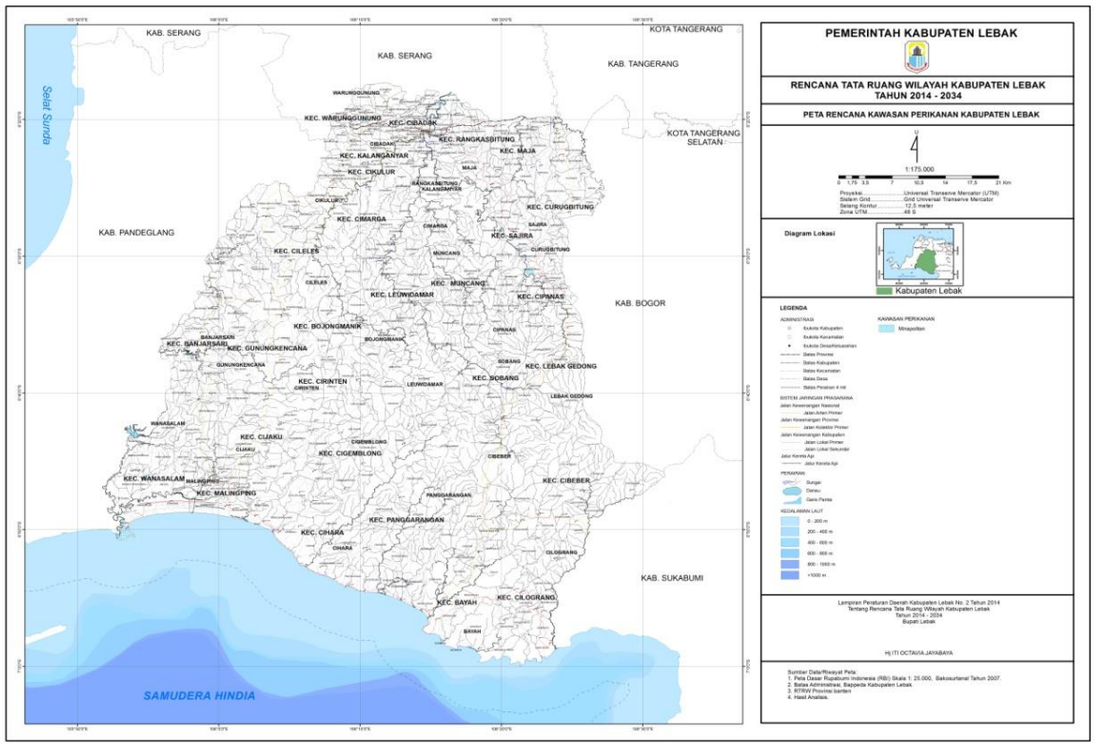
Luas kawasan peruntukan peternakan adalah 644,21Ha (0,19 %) dari luas Kabupaten Lebak yang terdistribusi di Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Cigemblong, Kecamatan Cikulur, Kecamatan Malingping, Kecamatan Sajira, Kecamatan Cimarga dan Kecamatan Curugbitung.

5) Kawasan Peruntukan Perikanan

Potensi sumber daya ikan laut cukup besar, mengingat Kabupaten Lebak mempunyai panjang pantai sekitar 91,42 km dengan potensi lestari untuk perairan pantai dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebesar 10.557,24 ton/tahun yang terdiri dari potensi lestari perairan pantai sebesar 3.712,40 ton/tahun dan potensi ZEE sebesar 6.844,84 ton/tahun.

Terkait dengan pengembangan sektor perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten telah menentukan 5 (lima) wilayah yang akan ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan. Kawasan Minapolitasn tersebut merupakan konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan yang berbasis kawasan. Untuk di Kabupaten Lebak telah ditetapkan kawasan Minapolitan di Kecamatan Wanassalam dengan luas sekitar 196,63 Ha. Pengembangan Kecamatan Wanassalam sebagai kawasan Minapolitan dilakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan di wilayah tersebut secara khusus dan di Kabupaten Lebak secara umum. Selain itu juga di rencanakan kawasan minapolitan seluas 65,38 Ha di Cipanas dan seluas 26,40 Ha di Warunggunung.

Gambar 6.14
Peta Rencana Kawasan Perikanan



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-203

6) Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas :

a) Pertambangan mineral dan batubara

Pertambangan mineral logam berupa emas, pasir besi, titanium, galena, mangan dan batubara seluas kurang lebih 144.474 Ha dan tersebar di 16 Kecamatan.

Pertambangan mineral bukan logam dan batuan berupa batu gunung, pasir, kalsit, lempung, batu gamping, tras, kaolin, zeolite, bentonit, feldspar, batu kuarsa seluas kurang lebih 146.498,3 ha dan tersebar di 25 Kecamatan.

Pertambangan batu bara di Kabupaten Lebak seluas 18.729 Ha yang tersebar di 6 kecamatan.

b) Pertambangan panas bumi

Kawasan pertambangan panas bumi seluas 25.770 Ha, meliputi :

1. Pertambangan Gunung Endut (speculative 100 MW possible 40 MW), yaitu kecamatan Sobang, Leuwidamar, Muncang, Sajira, Cipanas dan Lebakgedong.
2. Wilayah Pamancalan (speculative 255 MW) di Kecamatan Cibeber.

c) Pertambangan minyak dan gas bumi, meliputi Bok Rangkasbitung (11 Kecamatan) dan Blok Wanasalam-Cilograng (8 Kecamatan).

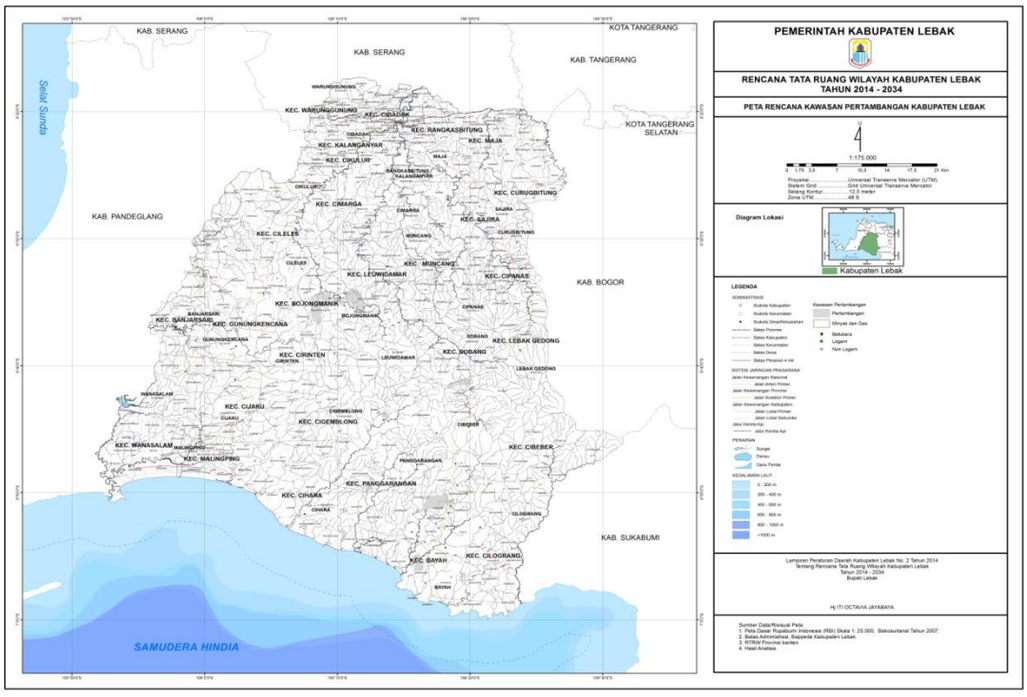
Berdasarkan potensi pertambangan diatas, maka rencana kawasan pertambangan dirinci sebagai berikut.

Tabel 6.13
Rencana Kawasan Pertambangan di Kabupaten Lebak
Tahun 2014-2034

No.	Kecamatan	Potensi luas Pertambangan (Ha)	%
1.	Bayah	289,67	10,60
2.	Bojongmanik	1.174,85	42,99
3.	Cibeber	859,82	31,46
4.	Cigemblong	73,03	2,67
5.	Cihara	47,80	1,75
6.	Cirinten	5,17	0,19
7.	Leuwidamar	62,98	2,30
8.	Panggarangan	142,83	5,23
9.	Sobang	76,82	2,81
	Jumlah	2.732,97	

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

Gambar 6.15
Peta Rencana Kawasan Pertambangan



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

7) Kawasan Peruntukan Industri

Kabupaten Lebak merupakan wilayah yang memiliki potensi agroindustri yang cukup tinggi, dengan dukungan penyediaan bahan baku yang memadai. Dalam rangka menciptakan kondisi yang sinergis antara ketersediaan bahan baku dengan industri, maka perlu dikembangkan lahan dengan peruntukan industri . Industri yang sesuai dikembangkan adalah industri sedang dan industri kecil/rumah tangga yang memanfaatkan bahan bakunya dari kegiatan pertanian wilayah sendiri.

Pertumbuhan sektor industri pengolahan pada tahun 2010 mencapai 2,16 %. Pertumbuhan sektor industri tersebut merupakan pertumbuhan sektor terendah dari laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Lebak.

Dalam rangka menunjang perekonomian wilayah dan kaitannya dengan potensi pertanian, maka prioritas pengembangan industri adalah industri pengolahan (dan atau agroindustri) pada komoditas bukan konsumsi langsung (perlu pengolahan terlebih dahulu untuk dikonsumsi). Lokasi industri pengolahan (dan atau agroindustri) tersebut memperhatikan jarak bahan baku dan pasar, minimasi biaya tansportasi.

Pengembangan industri kecil meliputi :

1. Industri gula merah aren, tersebar di Kecamatan Muncang, Sobang, Leuwidamar, Bojongmanik, Sajira, Cijaku, Panggarangan, Malingping, Cibeber, Gunung Kencana, Bayah dan Cipanas.
2. Industri bata, tersebar di Kecamatan Cimarga, Rangkasbitung, Sajira, Malingping dan Warunggunung.
3. Industri tenun Baduy, tersebar di Kecamatan Leuwidamar.
4. Industri tempurung kelapa, tersebar di Kecamatan Leuwidamar.
5. Industri pandai besi, tersebar di Kecamatan Bojongmanik, Cibeber dan Rangkasbitung.
6. Industri konveksi, tersebar di Kecamatan Rangkasbitung dan Cimarga.
7. Industri anyaman pandan, tersebar di Kecamatan Cikulur, Cileles, Banjarsari, Cijaku, Malingping dan Bojongmanik.
8. Industri anyaman bambu, tersebar di Kecamatan Sajira, Cibeber, Rangkasbitung dan Cibadak.
9. Industri emping melinjo, tersebar di Kecamatan Warunggunung, Cikulur dan Gunungkencana.
10. Industri sale/keripik pisang, tersebar di Kecamatan Bayah.

Adanya rencana pengembangan Kota Publik Maja merupakan salah satu terobosan dan menjadi alternative counter magnet bagi Kota Metropolitan Jabodetabek. Beberapa rencana besar telah dialokasi di Kawasan Maja, diantaranya adalah jalan tol Serpong – Balaraja, pembangunan jalan Pamulang – Maja, serta peningkatan beberapa ruas jalan eksisting, pembangunan terminal tipe A, pembangunan double track. Disamping itu tidak jauh dari Maja, tepatnya sebelah utara terdapat kawasan atau Zona Industri Banten (Tangerang), dengan pusat kota di daerah Balaraja dan zona industri Serang Timur (Kabupaten Serang). Berdasarkan hal tersebut, maka

pengembangan industri besar Kabupaten Lebak diarahkan untuk dikembangkan di sekitar Kecamatan Rangkasbitung dan Maja. Serta rencana pengembangan industri di wilayah selatan di sekitar Kecamatan Bayah dan Cilograng.

Tabel 6.14
Rencana Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Lebak
Tahun 2014-2034

No.	Kecamatan	Industri (Ha)	Persen
1.	Bayah	66,59	4,77
2.	Cilograng	43,79	3,14
3.	Curugbitung	23,99	1,72
4.	Maja	473,36	33,93
5.	Rangkasbitung	787,45	56,44
	Jumlah	1.395,18	

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

8) Kawasan Peruntukan Pariwisata

Obyek-obyek wisata yang ada memiliki potensi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara karenakeragaman jenis obyek wisatanya, antara lain wisata budaya, wisata alam, dan wisata buatan.

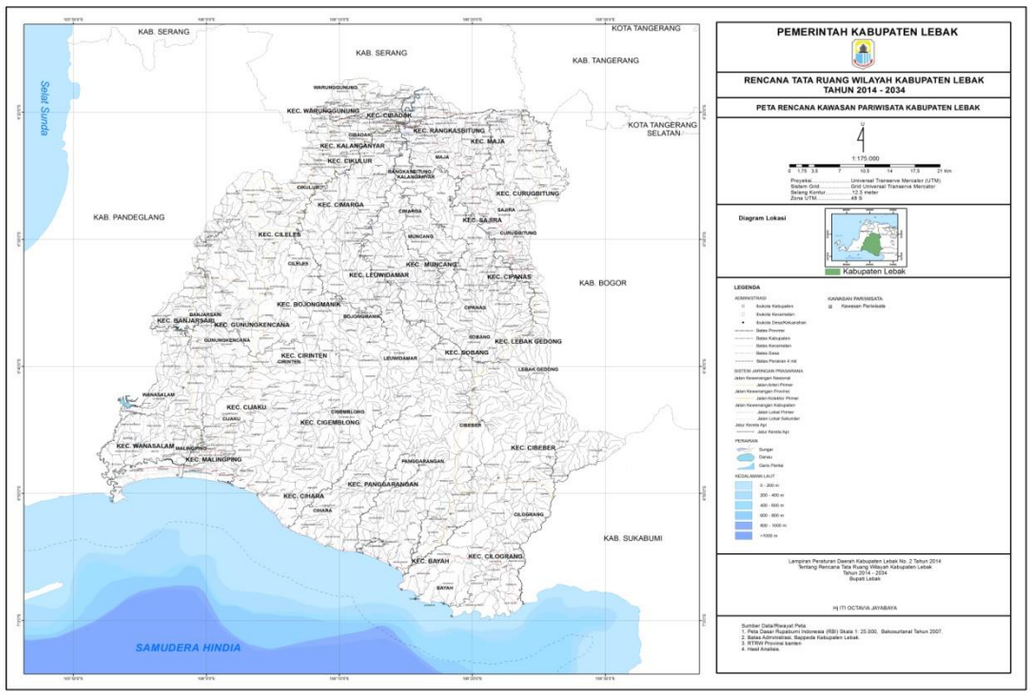
Tabel 6.15
Sebaran Obyek Wisata di Kabupaten Lebak

No.	Obyek Wisata	Lokasi
1.	**Pariwisata Budaya**	
	Budaya Kaolotan Baduy	Leuwidamar
	Budaya Kaolotan/Seren Taun	Cibeber
	Situs Cibedug	Cikotok
	Situs Kosala	Cipanas
2.	**Pariwisata Alam**	
	Pantai Cihara	Cihara
	Pantai Talanca	Malingping
	Pantai Cimandiri	Panggarangan
	Pantai Cibobos	Panggarangan

No.	Obyek Wisata	Lokasi
	Pantai Tanjung Panto	Wanasalam
	Pantai Karangseke	Wanasalam
	Pantai Binuangeun	Wanasalam
	Pantai Sawah Sikabayan	Wanasalam
	Pantai Karangmalang	Wanasalam
	Pantai Bagedur	Malingping
	Pantai Sawarna	Bayah
	Pantai Laguna	Bayah
	Pantai Pulau Manuk	Bayah
	Pantai Ciantir	Bayah
	Pantai Tanjung Layar	Bayah
	Pantai Tanjung Karang	Bayah
	Goa Sangkir	Bojongmanik
	Goa Lalay	Bayah
	Air Terjun Curug Halimun	Cipanas
	Air Terjun Curugrame	Cijaku
	Curug Indihiyang	Warunggunung
	Curug Ciporolak	Cibeber
	Curug Kanteh	Cilograng
	Curug Aksian	Cipanas
	Kawah Cipanas	Sobang
	Arung Jeram	Lebakgedong
3.	**Pariwisata Buatan**	
	Museum Multatuli	Rangkasbitung
	Permandian Air Panas	Cipanas
	Air Panas Senanghati	Malingping

Sumber : Profil Investasi, BPMPPT Kab. Lebak

Gambar 6.16
Peta Rencana Kawasan Pariwisata



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

9) Kawasan Peruntukan Permukiman

Rencana pola ruang kawasan peruntukan permukiman adalah 30.798,49Ha (9,32% dari luas Kabupaten Lebak) yang terdistribusi di seluruh kecamatan. Rencana pengembangan kawasan peruntukan permukiman perkotaan untuk penampung kebutuhan perkembangan wilayah adalah 14.529,49 Ha (4,40% dari luas Kabupaten Lebak), sedangkan rencana pengembangan kawasan peruntukan permukiman perdesaan adalah 16.269 Ha (4,92 %) dari luas Kabupaten Lebak.

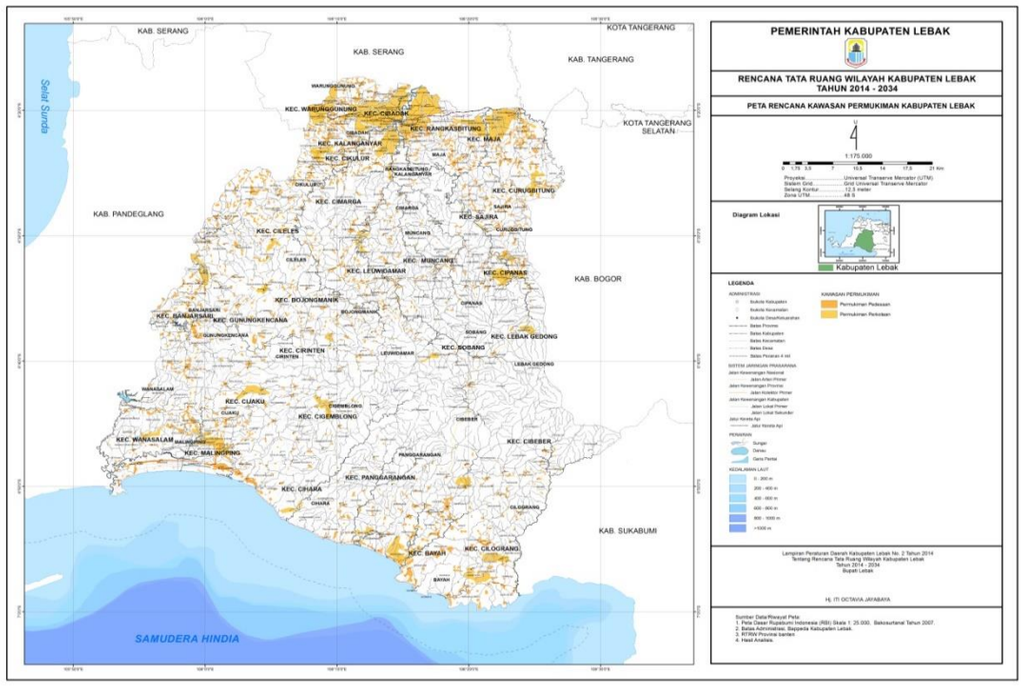
Tabel 6.16
Rencana Peruntukan Permukiman di Kabupaten Lebak
Tahun 2014-2034

No.	Kecamatan	Kawasan Permukiman		Total (Ha)	%
		Permukiman Perdesaan	Permukiman Perkotaan		
1.	Banjarsari	1.614,75	338,60	1.953,35	6,34
2.	Bayah	1.237,96	528,12	1.766,08	5,73
3.	Bojongmanik	384,39	28,89	413,28	1,34
4.	Cibadak	169,80	1.909,77	2.079,57	6,75
5.	Cibeber	324,88	235,65	560,53	1,82
6.	Cigemblong	190,49	350,45	540,94	1,76
7.	Cihara	645,25	165,46	810,71	2,63
8.	Cijaku	487,29	350,45	540,94	1,76
9.	Cikulur	883,74	500,84	1.384,58	4,50
10.	Cileles	1.028,02	151,87	1.179,89	3,83
11.	Cilograng	542,58	702,96	1.245,54	4,04

No.	Kecamatan	Kawasan Permukiman		Total (Ha)	%
		Permukiman Perdesaan	Permukiman Perkotaan		
12.	Cimarga	766,47	81,18	847,65	2,75
13.	Cipanas	271,23	731,05	1.002,28	3,25
14.	Cirinten	359,45	93,51	452,96	1,47
15.	Curugbitung	864,57	326,06	1.190,63	3,87
16.	Gunungkencana	515,67	138,32	653,99	2,12
17.	Kalanganyar	127,59	798,18	925,77	3,01
18.	Lebakgedong	41,37	146,20	187,57	0,61
19.	Leuwidamar	741,67	212,11	953,78	3,10
20.	Maja	948,74	1.544,27	2.493,01	8,09
21.	Malingping	945,80	689,86	1.635,66	5,31
22.	Muncang	171,07	29,60	200,67	0,65
23.	Panggaraangan	430,85	257,03	687,88	2,23
24.	Rangkasbitung	458,29	2.236,11	2.694,40	8,75
25.	Sajira	691,67	34,26	725,93	2,36
26.	Sobang	110,76	110,94	221,70	0,72
27.	Wanasalam	672,77	180,58	853,35	2,77
28.	Warunggunung	641,88	1.613,96	2.255,84	7,32
	Luas Total	**16.269,00**	**14.529,49**	**30.798,49**	

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

Gambar 6.17
Peta Rencana Kawasan Permukiman



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

Untuk lebih ringkasnya, struktur ruang dan pola ruang dapat Kabupaten Lebak tahun 2014-2034 dilih at pada tabel 2.14 berikut.

Tabel 6.17

Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Lebak
Tahun 2014-2034

No	Program Utama			Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
								PJM-2					PJM-3	PJM-4
								2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028	2029-2033
A	**PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG**													
	Perwujudan Pengembangan Pusat Kegiatan													
	1	1.1	Pengembangan dan Penataan PKW	Penyusunan/Revisi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Rangkasbitung dan Maja	APBD Kab	Pemkab (Dinas PUPR)							
				Peningkatan sarana Rumah Sakit Umum Daerah		APBD Kab , APBD Prov & APBN	Pemkab (RSUD Adjidarmo)							
				Peningkatan sarana Pasar Lokal Utama		APBD Kab & Prov / Swasta	Pemkab (Dinas Perindag)							
				Relokasi kawasan perdagangan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya		APBD Kab	Pemkab (Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Perindag)							
				Pengembangan prasarana perdagangan regional		APBD Kab & Prov / Swasta	Pemkab & Pemprov (Dinas Perindag)							
				Pembangunan/relokasi terminal tipe B dan		APBD Kab & Prov	Pemkab & Pemprov (Dinas							

No	Program Utama			Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
								PJM-2					PJM-3	PJM-4
								2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028	2029-2033
				peningkatan terminal tipe C ke tipe B			Perhubungan)							
				Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di perkotaan		APBD Kab & Prov	Pemkab & Pemprov (PDAM, Dinas PUPR)							
				Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT)		APBD Kab & Prov	Pemkab & Pemprov (Dinas Kebersihan, Dinas PUPR)							
				Pengembangan prasarana dan sarana permukiman		APBD Kab & Prov	Pemkab & Pemprov (Dinas PUPR)							
				Pengembangan prasarana dan sarana pendidikan		APBD Kab & Prov	Pemkab & Pemprov (Dinas PUPR, Dinas Pendidikan)							
		1.2	Pengembangan dan Penataan PKL	Penyusunan / Revisi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Malingping, Bayah, Cipanas, Cileles	APBD Kab	Pemkab (Dinas PUPR)							
				Peningkatan Rumah Sakit kelas C		APBD Kab	Pemkab (Dinas Kesehatan)							
				Peningkatan sarana Pasar Lokal Utama		APBD Kab/Swasta	Pemkab (Dinas Perindag)							
				Relokasi kawasan perdagangan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya		APBD Kab	Pemkab (Dinas Perindag)							
				Peningkatan terminal tipe C		APBD Kab & Prov	Pemkab & Pemprov (Dinas Perhubungan)							
				Peningkatan kapasitas		APBD Kab &	Pemkab &							

No	Program Utama		Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
							PJM-2					PJM-3	PJM-4
							2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028	2029-2033
			pelayanan air minum di perkotaan		Prov	Pemprov (PDAM, Dinas PUPR)							
			Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT)		APBD Kab & Prov	Pemkab & Pemprov (Dinas Kebersihan, Dinas PUPR)							
			Pengembangan prasarana dan sarana permukiman (air bersih, drainase, sanitasi)		APBD Kab & Prov	Pemkab & Pemprov (Dinas Kebersihan, Dinas PUPR)							
		1.3	Pengembangan dan Penataan PPK	Peningkatan sarana Puskesmas	Panggarangan, Wanasalam, Cihara, Cilograng, Cibeber, Cijaku, Cigemblong, Banjarsari, Gunungkencana, Bojongmanik, Cirinten, Muncang, Sobang, Leuwidamar, Lebakgedong, Sajira, Cimarga, Cikulur, Warunggunung, Cibadak, Kalanganyar, dan Curugbitung	APBD Kab	Pemkab (Dinas Kesehatan)							
				Peningkatan sarana pasar lingkungan		APBD Kab	Pemkab (Dinas Perindag)						
				Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di perkotaan (Ibukota Kecamatan/IKK)		APBD Kab	Pemkab (PDAM, Dinas PUPR)						
				Pengembangan prasarana dan sarana permukiman (air bersih, drainase, sanitasi)		APBD Kab	Pemkab (Dinas Kebersihan, Dinas PUPR)						
				Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT)		APBD Kab	Pemkab (Dinas Kebersihan, Dinas PUPR)						
				Pengembangan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS)		APBD Kab	Pemkab (Dinas Kebersihan, DINAS LH)						
				Peningkatan dan pengembangan prasarana pendidikan		APBD Kab	Pemkab & Pemprov (Dinas Pendidikan, Dinas						

No	Program Utama			Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
								PJM-2					PJM-3	PJM-4
								2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028	2029-2033
							PUPR)							
		1.4	Pengembangan dan Penataan PPL pada masing-masing pusat Desa/Kelurahan	Peningkatan pelayanan puskesdes	Seluruh PPL	APBD Kab	Pemkab (Dinas Kesehatan)							
				Peningkatan sarana pasar lingkungan	Seluruh PPL	APBD Kab/Swasta	Pemkab (Dinas Perindag)							
				Peningkatan dan pengembangan prasarana pendidikan	Seluruh PPL	APBD Kab	Pemkab (Dinas Pendidikan, Dinas PUPR)							
				Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di Perdesaan	Seluruh PPL	APBD Kab	Pemkab (PDAM, Dinas PUPR)							
				Pengembangan prasarana dan sarana dasar permukiman (air bersih, drainase, sanitasi)	Seluruh PPL	APBD Kab	Pemkab (Dinas Kebersihan & Dinas PUPR)							
				Pengembangan prasarana untuk mendukung pengembangan agro industri	Seluruh PPL	APBD Kab	Pemkab (Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Perindag)							
				Pengembangan sentra produksi dan pusat pemasaran pada pusat kegiatan ekonomi	Seluruh PPL	APBD Kab	Pemkab (Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Perindag)							
	2	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana												
		2.1	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi	**Transportasi Darat**										
				Program Pengembangan Jaringan Jalan										

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
						PJM-2					PJM-3	PJM-4
						2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028	2029-2033
		A. Dukungan Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Bersyarat										
		Ruas Jalan Tol Serang – Panimbang	Tol Serang-Panimbang	APBN, APBD Prov & Kab	Kemen PU, Dinas PUPR Prov/Kab							
		B. Dukungan Peningkatan Jaringan Jalan Arteri										
		Ruas Jalan Nasional Pamulang – Maja	Ruas Jalan Pamulang- Maja	APBD Kab & APBD Prov	Pemprov & Pemkab (Dinas PUPR)							
		Ruas Jalan Batas Pendeglang-Kota Rangkasbitung	Batas Pandeglang-Kota Rangkasbitung	APBD Kab & APBD Prov	Pemprov & Pemkab (Dinas PUPR)							
		Ruas Jalan Raya Cipanas-Batas Kabupaten Bogor	Ruas-ruas jalan Cipanas- Batas Kabupaten Bogor	APBD Kab & APBD Prov	Pemprov & Pemkab (Dinas PUPR)							
		Ruas Jalan Muara Binuangeun-Bayah	Ruas-ruas jalan Muara Binuangeun-Bayah	APBD Kab & APBD Prov	Pemprov & Pemkab (Dinas PUPR)							
		C. Dukungan Peningkatan Jaringan Jalan Kolektor										
		Ruas Jalan Pendamping Toll Serang- Panimbang	Samping ruas jalan Toll Serang-Panimbang	APBD Kab	Pemkab (Dinas PUPR)							
		Ruas Jalan Cipanas – Muncang – Leuwidamar – Bojongmanik – Cirinten - Gunung Kencana – Banjarsari	Ruas jalan Cipanas – Banjarsari	APBD Kab	Pemkab (Dinas PUPR)							
		Ruas Jalan Simpang-Batas Kabupaten Pandeglang	Ruas jalan Simpang-Batas Kabupaten Pandeglang	APBD Kab	Pemkab (Dinas PUPR)							

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
						PJM-2					PJM-3	PJM-4
						2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028	2029-2033
		Ruas Jalan Simpang-Kota Rangkasbitung	Ruas-ruas jalan Simpang- Kota Rangkasbitung	APBD Kab	Pemkab (Dinas PUPR)							
		Ruas Jalan Bayah-Cipanas	Ruas-ruas jalan Bayah- Cipanas	APBD Kab	Pemkab (Dinas PUPR)							
		Ruas Jalan Bayah-Batas Sukabumi	Ruas-ruas jalan Bayah-Batas Sukabumi	APBD Kab	Pemkab (Dinas PUPR)							
		D. Dukungan Peningkatan Jaringan Jalan Lokal	Ruas-ruas jalan lokal	APBD Kab	Pemkab (Dinas PUPR)							
		Program Pengembangan Prasarana Terminal Penumpang										
		Peningkatan Kelas Terminal Penumpang Tipe B menjadi Tipe A	Cibadak	APBD Kab, APBD Prov, APBN & Swasta	Pemda Kab (Dinas Perhubungan)							
		Peningkatan Terminal Penumpang Tipe C menjadi Tipe B	Malingping, Bayah, Cipanas, Maja	APBD Kab, APBD Prov, APBN & Swasta	Pemda Kab (Dinas Perhubungan)							
		Pembangunan dan Peningkatan Sub Terminal menjadi Tipe C	Leuwidamar, Panggarangan, Wanassalam	APBD Kab, APBD Prov, APBN & Swasta	Pemda Kab (Dinas Perhubungan)							
		Program Pengembangan Prasarana Terminal Barang										
		Pengembangan terminal barang	Maja, Curugbitung,	APBD Kab, APBD Prov,	Pemda Kab (Dinas Perhubungan)							

No	Program Utama			Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
								PJM-2					PJM-3	PJM-4
								2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028	2029-2033
					dan Warunggunung	APBN & Swasta								
				Program Pengembangan Jaringan Pelayanan Lalu Lintas										
				Pengembangan pelayanan lalu lintas angkutan barang	Seluruh wilayah Kabupaten Lebak	APBD Kab, APBD Prov, APBN & Swasta	Pemda Kab (Dinas Perhubungan)							
				Pengembangan jaringan trayek angkutan penumpang		APBD Kab, APBD Prov, APBN & Swasta	Pemda Kab (Dinas Perhubungan)							
				Perkeretaapian										
				Pengembangan jaringan prasarana kereta api regional yang menghubungkan pada kawasan wisata di wilayah Banten Selatan	Bayah, Panggarangan, Cihara, Malingping, Banjarsari	APBD Kab, APBD Prov, APBN & Swasta	Pemda Kab & Prov (Dinas Perhubungan, PT. KAI)							
				Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan prasarana kereta api yang padat melayani transportasi perkotaan antara lain pada lintas Rangkasbitung – Serpong – Tanah Abang	Rangkasbitung	APBD Kab, APBD Prov, APBN & Swasta	Pemda Kab & Prov (Dinas Perhubungan, PT. KAI)							
		2.2	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Energi	Peningkatan pasokan daya listrik yang bersumber dari PLN Ranting Rangkasbitung secara bertahap hingga menjangkau seluruh wilayah	PLN Ranting Rangkasbitung	APBD Kab, APBD Prov & APBN	Pemkab & PLN							

No	Program Utama		Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
							PJM-2					PJM-3	PJM-4
							2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028	2029-2033
			Kabupaten Lebak										
			Peningkatan kapasitas pembangkit listrik eksisiting	Seluruh wilayah di Kabupaten Lebak	APBD Kab, APBD Prov & APBN	Pemkab & PLN							
			Pengembangan prasarana pembangkit baru dengan alternatif sumber energi yang belum dimanfaatkan secara optimal (mikrohidro, panasbumi)	Seluruh wilayah di Kabupaten Lebak	APBD Kab, APBD Prov & APBN	Pemkab, PLN, Swasta							
			Peningkatan kapasitas dan pelayanan Gardu Induk	Seluruh wilayah di Kabupaten Lebak	APBD Kab, APBD Prov & APBN	Pemkab & PLN							
			Pengembangan dan pemeliharaan jaringan listrik berupa Saluran Udara Tegangan TINGGI (SUTT)	Seluruh wilayah di Kabupaten Lebak	APBD Kab, APBD Prov & APBN	Pemkab & PLN							
			Pengembangan dan pemeliharaan jaringan listrik berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Seluruh wilayah di Kabupaten Lebak	APBD Kab, APBD Prov & APBN	Pemkab & PLN							
			Pengembangan dan pemeliharaan jaringan listrik berupa Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Seluruh wilayah di Kabupaten Lebak	APBD Kab, APBD Prov & APBN	Pemkab & PLN							
		2.3	Perwujudan Sistem Jaringan	Pembangunan Tower BTS Bersama di PKW, PKL, dan PPK	PKW, PKL, dan PPK	Swasta	Swasta						

No	Program Utama			Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
								PJM-2					PJM-3	PJM-4
								2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028	2029-2033
			Telekomunikasi	Pengembangan fasilitas internet gratis pada fasilitas publik	PKW, PKL, dan PPK	APBD Kab & Swasta	Pemda Kab (Dinas Perhubungan)							
				Pengembangan jaringan serat optik	Seluruh wilayah di Kabupaten Lebak	APBD Kab & Swasta	Pemda Kab (Dinas Perhubungan)							
				Penyusunan kajian tata letak menara	Seluruh wilayah di Kabupaten Lebak	APBD Kab	Pemda Kab (Bappeda, Dinas Perhubungan)							
				Penyusunan regulasi tentang tata letak menara	Seluruh wilayah di Kabupaten Lebak	APBD Kab	Pemda Kab (Bappeda, Dinas Perhubungan)							
				Pengembangan/peningkatan jaringan telekomunikasi kabel terutama untuk layanan kegiatan industri pada Pusat Kegiatan Utama Kabupaten	PKW, PKL, dan PPK	APBD Kab & Swasta	Pemda Kab (Dinas Perhubungan)							
		2.4	Perwujudan Sismtem Prasaran Sumber Daya Air	Normalisasi sungai	Seluruh Daerah Irigasi di Kabupaten Lebak	APBD Kab & Swasta	Pemkab (Dinas PUPR)							
				Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan kapasitas jaringan irigasi	Wilayah yang terdapat Danau di Kabupaten Lebak	APBD Kab & Swasta	Pemkab (Dinas PUPR)							
				Rencana pemeliharaan dan pengelolaan jaringan beririgasi pada daerah irigasi (di) yang ada di kabupaten	Wilayah daerah irigasi di Kabupaten Lebak	APBD Kab & Swasta	Pemkab (Dinas PUPR)							
				Rencana peningkatan dan pengelolaan irigasi desa yang	Wilayah daerah irigasi di	APBD Kab &	Pemkab (Dinas							

No	Program Utama			Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
								PJM-2					PJM-3	PJM-4
								2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028	2029-2033
				ada di kabupaten pendayagunaan potensi mata air dan air tanah	Kabupaten Lebak	Swasta	PUPR)							
		2.5	Perwujudan Pengembangan Prasarana Wilayah Lainnya	**Sistem Penyediaan Air Minum**										
				Peningkatan akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih	Seluruh wilayah di Kabupaten Lebak	APBD Kab	Pemkab (Dinas PUPR)							
				Peningkatan kapasitas pelayanan/cakupan layanan		APBD Kab	Pemkab (Dinas PUPR)							
				Pembangunan prasarana air bersih bagi masyarakat di pedesaan		APBD Kab	Pemkab (Dinas PUPR)							
				Optimalisasi sumber air dengan memanfaatkan kapasitas yang belum terpakai		APBD Kab	Pemkab (Dinas PUPR)							
				Prasarana Pengelolaan Air Limbah										
				Pembangunan pengolahan limbah khusus untuk RSUD Rangkasbitung	Rangkasbitung	APBD Kab	Pemkab (Dinas LH)							
				Pembangunan IPAL untuk wilayah ibukota, wilayah utara dan selatan Kabupaten Lebak	PKW dan PKL	APBD Kab	Pemkab (Dinas Kebersihan)							
				Peningkatan sarana pengolahan air limbah setempat bagi masyarakat di pedesaan dan pengolahan air limbah secara komunal untuk daerah perkotaan	Seluruh wilayah di Kabupaten Lebak	APBD Kab	Pemkab (Dinas Kebersihan)							

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
						PJM-2					PJM-3	PJM-4
						2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028	2029-2033
		Sosialisasi tentang sanitasi lingkungan yang sehat kepada masyarakat	Seluruh wilayah di Kabupaten Lebak	APBD Kab	Pemkab (Dinas Kebersihan, Dinas LH, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan)							
		Pengelolaan Persampahan										
		Penambahan jumlah truck sampah	PKW dan PKL	APBD Kab	Pemkab (Dinas Kebersihan)							
		Peningkatan pengelolaan TPA	Maja & Cihara	APBD Kab	Pemkab (Dinas Kebersihan)							
		Pembangunan TPA baru	Leuwidamar & Panggarangan	APBD Kab	Pemkab (Dinas Kebersihan)							
		Penambahan jumlah truck tinja	PKW dan PKL	APBD Kab	Pemkab (Dinas Kebersihan)							
		Pembangunan TPS terutama pada daerah pemukiman	PKW dan PKL	APBD Kab	Pemkab (Dinas Kebersihan)							
		Pembangunan pabrik pengolahan sampah kompos	PKW dan PKL	APBD Kab	Pemkab (Dinas Kebersihan)							
		Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana										
		Penetapan jalur evakuasi bencana dengan mengoptimalkan jaringan jalan yang ada	Seluruh wilayah di Kabupaten Lebak	APBD Kab	Pemkab (BPBD, Dinas PUPR, Dinas PUPR)							
		Pengembangan ruang evakuasi bencana	Seluruh wilayah di Kabupaten Lebak	APBD Kab	Pemkab (BPBD, Dinas PUPR, Dinas PUPR)							
		Sistem Jaringan Drainase										
		Pembangunan saluran drainase permukiman perkotaan dan	Seluruh wilayah di Kabupaten	APBD Kab	Pemkab (Dinas PUPR)							

No	Program Utama			Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
								PJM-2					PJM-3	PJM-4
								2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028	2029-2033
				perdesaan	Lebak									
				Penyediaan dan perbaikan bak kontrol		APBD Kab	Pemkab (Dinas PUPR)							
				Operasional dan Pemeliharaan jaringan drainase	PKW, PKL, dan PPK	APBD Kab	Pemkab (Dinas Dinas Kebersihan)							
				Penyusunan Rencana Induk Drainase	PKW, PKL, dan PPK	APBD Kab	Pemkab (Dinas PUPR)							
				Pemeliharaan dan pembangunan prasarana drainase kawasan permukiman	Seluruh wilayah di Kabupaten Lebak	APBD Kab	Pemkab (Dinas PUPR, Dinas Kebersihan)							
B	**PERWUJUDAN POLA RUANG**													
		Perwujudan Kawasan Lindung												
	1	1.1	Pemantapan kawasan hutan lindung	Sosialisasi kawasan hutan lindung bagi masyarakat, khususnya perambah liar dan pemukim yang ada untuk secara berangsur-angsur direlokasi keluar kawasan	Kawasan hutan lindung di Kabupaten Lebak	APBD Kab	Pemkab & Pemprov (Dinas Kehutanan & Perkebunan)							
				Mempertahankan kawasan hutan lindung yang telah ada		APBD Kab	Pemkab & Pemprov (Dinas Kehutanan & Perkebunan)							
				Rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan hutan Lindung		APBD Kab	Pemkab & Pemprov (Dinas Kehutanan & Perkebunan)							

No	Program Utama		Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
							PJM-2					PJM-3	PJM-4
							2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028	2029-2033
			Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan lindung secara terbatas		APBD Kab	Pemkab & Pemprov (Dinas Kehutanan & Perkebunan)							
		1.2 Pemantapan kawasan yang memberikan perlindungan dibawahnya	Evaluasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung	Kawasan lindung di wilayah Kabupaten Lebak	APBD Prov & Kab	Pemkab & Pemprov (Dinas Kehutanan & Perkebunan)							
			Rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan lindung		APBD Prov & Kab	Pemkab & Pemprov (Dinas Kehutanan & Perkebunan)							
			Pencegahan timbulnya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah di kawasan hutan lindung		APBD Prov & Kab	Pemkab & Pemprov (Dinas Kehutanan & Perkebunan)							
			Sosialisasi kawasan hutan lindung bagi masyarakat, khususnya perambah liar dan pemukim yang ada untuk secara berangsur-angsur direlokasi keluar kawasan		APBD Prov & Kab	Pemkab & Pemprov (Dinas Kehutanan & Perkebunan)							
			Pencegahan timbulnya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah di kawasan hutan lindung	Seluruh wilayah di Kabupaten Lebak	APBD Prov & Kab	Pemkab (Dinas LH, Dinas PUPR, Dinas Kehutanan & Perkebunan)							
			Menetapkan dan mempertahankan kawasan		APBD Prov & Kab	Pemkab (Dinas Pertanian dan							

No	Program Utama			Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
								PJM-2					PJM-3	PJM-4
								2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028	2029-2033
				resapan air			Perkebunan dan Perkebunan, Dinas LH)							
		1.3	Pemantapan kawasan perlindungan setempat	Perlindungan dan pemeliharaan kawasan sempadan sungai	Seluruh wilayah di Kabupaten Lebak	APBD Kab	Pemkab (Dinas LH, Dinas PUPR)							
				Perlindungan kawasan sekitar waduk/danau		APBD Kab	Pemkab (Dinas LH, Dinas PUPR)							
				Perlindungan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan		APBD Kab	Pemkab (Bappeda, Dinas Kebersihan)							
				Pemanfaatan sumber air pemenuhan air minum		APBD Kab	Pemkab (PDAM, Dinas PUPR)							
				Perlindungan kawasan terhadap kegiatan alih fungsi		APBD Kab	Pemkab (Bappeda, Dinas PUPR, Dinas LH)							
		1.4	Pemantapan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya	Pelarangan kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi	TNGHS, Desa Baduy	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Pemkab (Bappeda, Dinas Pariwisata)							
				Pengembangan pendidikan, rekreasi dan pariwisata		APBN, APBD Prov, APBD Kab	Pemkab (Bappeda, Dinas Pariwisata)							
				Pembatasan terhadap fungsi lindung		APBN, APBD Prov, APBD Kab	Pemkab (Bappeda, Dinas Pariwisata)							
				Pemantapan kawasan cagar budaya dan ilmu	TNGHS, Desa Baduy	APBD Kab	Pemkab (Bappeda, Dinas Pariwisata)							

No	Program Utama		Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
							PJM-2					PJM-3	PJM-4
							2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028	2029-2033
			pengetahuan										
			Pelarangan kegiatan yang menggangu kelestarian situs purbakala dan lingkungannya		APBD Kab	Pemkab (Bappeda, Dinas Pariwisata)							
	1.5	Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana	Identifikasi dan inventarisasi kawasan rawan bencana alam di seluruh wilayah Kab. Lebak	Kawasan rawan bencana di Kabupaten Lebak	APBD Kab	Pemkab (Bappeda, BPBD, Dinas LH)							
			Pembangunan barak-barak pengungsi dan penampungan sementara		APBD Kab	Pemkab (BPBD, Dinas Sosial, Dinas PUPR)							
			Penyusunan aturan zonasi pembangunan di kawasan rawan longsor dan rawan banjir		APBD Kab	Pemkab (Bappeda, BPBD, Dinas PUPR)							
2	Perwujudan Kawasan Budidaya												
	2.1	Pengembangan kawasan hutan produksi	Inventarisasi perijinan yang ada di kawasan hutan produksi	Kawasan hutan produksi di Kabupaten Lebak	APBD Kab	Pemkab (Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Perkebunan)							
			Evaluasi pengelolaan hutan produksi dengan studi kelayakan dan studi amdal oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang		APBD Kab	Pemkab (Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Perkebunan)							
			Pengembangan hutan tanaman rakyat	Kawasan hutan tanaman rakyat di Kabupaten Lebak	APBD Kab	Pemkab (Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Perkebunan)							

No	Program Utama		Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
							PJM-2					PJM-3	PJM-4
							2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028	2029-2033
			Pengembangan budidaya agroforestry sebagai lumbung ketahanan pangan dan rehabilitasi lahan	Wilayah Kabupaten Lebak	APBD Kab	Pemkab (Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Perkebunan)							
			Pengamanan dan perlindungan kawasan hutan Produksi	Kawasan hutan produksi di Kabupaten Lebak	APBD Kab	Pemkab (Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Perkebunan)							
			Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan produksi yang optimal		APBD Kab	Pemkab (Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Perkebunan)							
	2.2	Pengembangan kawasan hutan rakyat	Inventarisasi dan penyusunan rencana strategis penanganan lahan kritis pada kawasan budidaya	Seluruh wilayah di Kabupaten Lebak	APBD Kab	Pemkab (Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Perkebunan)							
			Penanganan, pemantauan dan evaluasi penanganan lahan kritis		APBD Kab	Pemkab (Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Perkebunan)							
			Pengembangan hutan rakyat melalui pola perhutanan sosial		APBD Kab	Pemkab (Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Perkebunan)							
	2.3	Pengembangan kawasan pertanian	Pengembangan kawasan pertanian Tanaman Pangan di Kab Lebak	Kawasan tanaman pangan di Kabupaten Lebak	APBD Kab & Swasta	Pemkab (Dinas Pertanian dan Perkebunan)							
			Peningkatan produktivitas lahan padi sawah di Kab		APBD Kab & Swasta	Pemkab (Dinas Pertanian dan							

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
						PJM-2					PJM-3	PJM-4
						2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028	2029-2033
		Lebak			Perkebunan)							
		Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian Tanaman Pangan		APBD Kab & Swasta	Pemkab (Dinas Pertanian dan Perkebunan)							
		Pengembangan pengelolaan kegiatan pertanian Tanaman Pangan yang lebih terorganisir		APBD Kab	Pemkab (Dinas Pertanian dan Perkebunan)							
		Pengembangan dan perluasan kawasan hortikultura	Kawasan holtikulturaa di Kabupaten Lebak	APBD Kab & Swasta	Pemkab (Dinas Pertanian dan Perkebunan)							
		Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan holtikultura		APBD Kab & Swasta	Pemkab (Dinas Pertanian dan Perkebunan)							
		Pengembangan manajemen pengelolaan kegiatan holtikultura yang lebih terorganisir		APBD Kab	Pemkab (Dinas Pertanian dan Perkebunan)							
		Intensifikasi lahan kawasan perkebunan	Kawasan perkebunan di Kabupaten Lebak	APBD Kab & Swasta	Pemkab (Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Perkebunan)							
		Pengembangan komoditi unggulan perkebunan kelapa sawit, karet, kemiri, kelapa, coklat, aren		APBD Kab & Swasta	Pemkab (Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Perkebunan)							
		Pengembangan sarana, prasarana dan sumber daya		APBD Kab & Swasta	Pemkab (Dinas Pertanian dan							

No	Program Utama			Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
								PJM-2					PJM-3	PJM-4
								2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028	2029-2033
				pendukung kegiatan perkebunan			Perkebunan dan Perkebunan)							
				Pengembangan pusat pakan ternak	Kawasan ternak di Kabupaten Lebak	APBD Kab & Swasta	Pemkab (Dinas Peternakan)							
				Optimalisai budidaya peternakan		APBD Kab & Swasta	Pemkab (Dinas Peternakan)							
				Penetapan dan pengembangan LP2B	Kawasan pertanian di Kabupaten Lebak	APBD Kab & Swasta	Pemkab (Dinas Pertanian dan Perkebunan)							
				Penetapan kawasan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan		APBD Kab	Pemkab (Dinas Pertanian dan Perkebunan)							
		2.4	Pengembangan kawasan perikanan	Ekstensifikasi & intensifikasi penangkapan di perairan umum (rawa dan sungai) serta melalui budidaya keramba, kolam dan tambak	Seluruh wilayah Kabupaten Lebak	APBD Kab	Pemkab (Dinas Kelautan dan Perikanan , Dinas Peternakan)							
				Pengembangan sentra budidaya perikanan air tawar		APBD Kab	Pemkab (Dinas Kelautan dan Perikanan , Dinas Peternakan)							
				Pengembangan perikanan tangkap di perairan danau dan sungai	Seluruh wilayah di Kabupaten Lebak	APBD Kab	Pemkab (Dinas Kelautan dan Perikanan , Dinas Peternakan)							
				Pengembangan pengelolaan Balai Benih Ikan	Seluruh wilayah di Kabupaten Lebak	APBD Kab	Pemkab (Dinas Kelautan dan Perikanan , Dinas Peternakan)							

No	Program Utama		Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
							PJM-2					PJM-3	PJM-4
							2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028	2029-2033
	2.5	Pengembangan kawasan pariwisata	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA)	Kawasan Wisata di Kabupaten Lebak	APBD Kab	Pemkab (Dinas Pemuda Olaha Raga dan Pariwisata, Bappeda)							
			Penataan dan pengendalian pembangunan kawasan obyek wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya		APBD Kab	Pemkab (Dinas Pemuda Olaha Raga dan Pariwisata, Bappeda)							
			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RIPPDA		APBD Kab	Pemkab (Dinas Pemuda Olaha Raga dan Pariwisata, Bappeda)							
	2.6	Pengembangan kawasan industri	Penyusunan dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Industri	Kawasan industri di Kabupaten Lebak	APBD Kab	Pemkab (Dinas Perindag)							
			Penyiapan masyarakat dan kebijakan		APBD Kab	Pemkab (Dinas Perindag)							
			Penyusunan rencana penataan kawasan industri besar dan industri menengah	Kawasan industri di Kabupaten Lebak	APBD Kab	Pemkab (Dinas Perindag)							
			Pengembangan, penataan dan pemantauan kawasan sentra industri kecil	Kawasan industri di Kabupaten Lebak	APBD Kab	Pemkab (Dinas Perindag)							
			Peningkatan sarana dan prasarana kawasan industri	Kawasan industri di Kabupaten Lebak	APBD Kab	Pemkab (Dinas Perindag)							
	2.7	Pengembangan	Pengembangan kawasan	Kawasan	APBD Kab	Pemkab (Dinas							

No	Program Utama		Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
							PJM-2					PJM-3	PJM-4
							2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028	2029-2033
		kawasan pertambangan	pertambangan	pertambangan di Kabupaten Lebak		Pertambangan dan Energi)							
			Pemantauan dan pengendalian kawasan usaha pertambangan	Kawasan pertambangan di Kabupaten Lebak	APBD Kab	Pemkab (Dinas Pertambangan dan Energi)							
			Promosi dan perintisan kerjasama hasil tambang	Wilayah Kabupaten Lebak	APBD Kab	Pemkab (Dinas Pertambangan dan Energi)							
			Peningkatan sarana & prasarana kawasan pertambangan	Kawasan pertambangan di Kabupaten Lebak	APBD Kab	Pemkab (Dinas Pertambangan dan Energi)							
	2.8	Pengembangan kawasan permukiman	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Permukiman	Kawasan permukiman di Kabupaten Lebak	APBD Kab	Pemkab (Bappeda, Dinas PUPR)							
			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Permukiman	Seluruh wilayah Kabupaten Lebak	APBD Kab	Pemkab (Bappeda, Dinas PUPR)							
			Pengendalian pertumbuhan pembangunan perumahan baru		APBD Kab	Pemkab (Bappeda, Dinas PUPR)							
			Pencadangan lahan untuk permukiman		APBD Kab	Pemkab (Bappeda, Dinas PUPR)							
			Pengembangan prasarana dan sarana lingkungan pendukung perumahan		APBD Kab	Pemkab (Dinas PUPR, Dinas Perhubungan)							
			Perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan, khususnya untuk perumahan dan kawasan kumuh		APBD Kab	Pemkab (Dinas PUPR, Dinas Kebersihan)							

No	Program Utama			Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
								PJM-2					PJM-3	PJM-4
								2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028	2029-2033
				Penataan kawasan perumahan sepanjang aliran sungai disesuaikan dengan ketentuan sempadan		APBD Kab	Pemkab (Dinas PUPR, Dinas Sumber Daya Air)							
		2.9	Pengembangan kawasan lainnya	Pengembangan budidaya secara selektif di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan	Wilayah Kabupaten Lebak	APBD Kab	Pemkab (Bappeda, Dinas PUPR)							
				Penyusunan master plan dan detail engineering design kawasan perdagangan dan jasa		APBD Kab	Pemkab (Dinas PUPR)							
				Pengendalian pemanfaatan ruang di dalam kawasan perdagangan dan jasa		APBD Kab	Pemkab (Dinas PUPR)							
				Pembangunan infrastruktur kawasan perdagangan dan jasa	Wilayah Kabupaten Lebak	APBD Kab	Pemkab (Dinas PUPR, Dinas Koperindag)							
				Relokasi kawasan perdagangan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya		APBD Kab	Pemkab (Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan)							
				Pengembangan prasarana perdagangan regional pada pusat kegiatan PKW, PKL dan PPK		APBD Kab	Pemkab (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)							
				Pengembangan prasarana perdagangan lingkungan lokal pada pusat kegiatan PPL		APBD Kab	Pemkab (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)							

No	Program Utama			Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
								PJM-2					PJM-3	PJM-4
								2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028	2029-2033
				Pengembangan sarana dan prasarana pendukung		APBD Kab	Pemkab (Dinas PUPR, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan)							
C	**PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN**													
	1	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Ekonomi		Penetapan batas atau deliniasi kawasan	Kawasan Agrowisata sekitar Bendungan Karian, Kawasan koridor Rangkasbitung-Cibadak- Citeras-Warunggunung-Cikulur- Cileles, dan Kawasan Kota Baru Maja	APBD Kab	Pemkab (Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Perindag)							
				Penyusunan Rencana Rinci (RTR Kawasan Strategis)		APBD Kab	Pemkab (Bappeda, Dinas PUPR)							
				Pembangunan sarana dan prasarana perkotaan		APBD Kab	Pemkab (Dinas PUPR, Dinas PUPR, Dinas Perindag)							
	2	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya		Penetapan/penataan batas (delineasi) kawasan	Kawasan Masyarakat Adat Baduy dan Kawasan Kaolotan Banten Kidul	APBD Kab	Pemkab (Dinas PUPR)							
				Penyusunan Rencana Rinci (RTR Kawasan Strategis)		APBD Kab	Pemkab (Bappeda, Dinas PUPR)							
				Penetapan status kawasan dan bentuk pengelolaannya melalui Perda atau SK Bupati		APBD Kab	Pemkab (Bappeda, Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata, Dinas PUPR)							
				Pemugaran obyek wisata/tempat pelestarian		APBD Kab	Pemkab (Bappeda, Dinas Pemuda							

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
						PJM-2					PJM-3	PJM-4
						2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028	2029-2033
		sosial budaya yang kondisi bangunannya sudah tidak layak			Olah Raga dan Pariwisata, Dinas PUPR)							
		Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan wisata//tempat pelestarian sosial budaya		APBD Kab	Pemkab (Dinas PUPR, Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata, Dinas PUPR)							
		Pembangunan sarana dan prasarana penunjang lain yang belum ada di kawasan wisata/tempat pelestarian sosial budaya ini.		APBD Kab	Pemkab (Dinas PUPR, Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata, Dinas PUPR)							
		Pengembangan manajemen pengelolaan wisata/tempat pelestarian sosial budaya seperti pengadaan tour travel, paket wisata, dll.		APBD Kab & Swasta	Pemkab (Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata)							
	3	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber daya Alam dan Teknologi Tinggi	Penyusunan Rencana Rinci (RTR Kawasan Strategis)	Kawasan pembangkit listrik tenaga panas bumi Gunung Endut	APBD Kab	Pemkab (Bappeda, Dinas PUPR)						
			Pengembangan Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi		APBD Kab	Pemkab (Dinas Pertambangan dan Energi), PT. PLN						
	4	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya	Penyusunan Rencana Rinci (RTR Kawasan Strategis)	Taman Nasional Gunung Halimun Salak	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen LHK, Pemkab (Bappeda, Dinas PUPR)						

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
						PJM-2					PJM-3	PJM-4
						2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028	2029-2033
	Dukung Lingkungan	Rehabilitasi dan konservasi lahan untuk mengembalikan fungsi lindung dan daya dukung lingkungan		APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen LHK, Pemkab (Bappeda, Dinas LH, Dinas Kehutanan & Perkebunan)							
		Perlindungan sekitar kawasan untuk melindungi dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian ekosistem		APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen LHK, Pemkab (Bappeda, Dinas LH, Dinas Kehutanan & Perkebunan)							
		Pembentukan dan penguatan lembaga pengelola hutan lindung		APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen LHK, Pemkab (Bappeda, Dinas LH, Dinas Kehutanan & Perkebunan)							
	5 Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan	Penetapan batas atau deliniasi kawasan militer	Kawasan TNI AD Sajira dan Markas Komando Brimob	APBN, APBD Prov, APBD Kab	TNI, Pemkab							
		Penyusunan Rencana Rinci (RTR Kawasan Strategis)			TNI, Pemkab (Bappeda, Dinas PUPR)							

Tabel. 6.18 Sinkronisasi Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten dengan pemerintah Kabupaten Lebak

MISI PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022	MISI TUJUAN DAERAH (T) INDIKATOR TUJUAN SASARAN DAERAH (S) INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	PRORAM			
				URAIAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
MISI 3 : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas.	**MISI 1 : Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM**					
	T1 Meningkatnya kualitas hidup masyarakat					
	1. Indeks Pembangunan Manusia					
MISI 4 : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas.	**S1 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Layanan pendidikan yang terjangkau dan merata**					
	1 Indeks Pendidikan					
		Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan	1	Program Pendidikan Non Formal	Meningkatnya angka melek huruf (AMH)	Angka Melek Huruf (AMH)

MISI PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022	MISI			STRATEGI	PROGRAM			
	TUJUAN DAERAH (T)				URAIAN		SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
	INDIKATOR TUJUAN							
		SASARAN DAERAH (S)						
			INDIKATOR SASARAN					
				Peningkatan pemenuhan hak anak			bantuan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan tepat sasaran	Persentase bantuan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan tepat sasaran
				Peningkatan budaya literasi masyarakat	2	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya Partisipasi Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
				Peningkatan kualitas dan daya saing Naker	3	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Meningkatnya Partisipasi Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP
								Angka Partisipasi Murni (APM) SMP
								Angka Partisipasi Murni (APM) SD
					4	Program BOS	Menurunnya angka Putus Sekolah SD, SMP	Angka Putus sekolah SD
								Angka Putus sekolah SMP
							Meningkatkannya Angka Melanjutkan SD ke SMP dan SMP ke SMA	Angka Melanjutkan SD ke SMP
								Angka melanjutkan SMP ke SMA
					5	Program Pendidikan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Persentase Guru bersertifikat pendidik	Persentase guru bersertifikat pendidik
							Meningkatnya Angka kelulusan SD dan SMP	Angka Kelulusan SD
								Angka Kelulusan SMP
					6	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya sekolah SD berakreditasi A	Persentase sekolah SD berakreditasi A
							Meningkatnya sekolah SMP berakreditasi A	Persentase sekolah SMP berakreditasi A

MISI PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022	MISI TUJUAN DAERAH (T) INDIKATOR TUJUAN SASARAN DAERAH (S) INDIKATOR SASARAN			STRATEGI	PROGRAM			
						URAIAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
					7	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Minat dan Budaya Baca Masyarakat	Jumlah pengunjung perpustakaan
								Jumlah perpustakaan yang dibina
								Cakupan TBM yang sesuai standar
		S2	**Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Layanan kesehatan yang terjangkau dan merata**					
			2 Indeks Kesehatan					
				Peningkatan efektifitas upaya kesehatan masyaraka, dan upaya kesehatan perorangan	8	Program pengembangan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Desa ODF
								Cakupan pembinaan PHBS ditatanan kesehatan (Satuan: %)
					9	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatanya pelayanan kesehatan keluarga	Cakupan pembinaan PHBS ditatanan kesehatan (Satuan: %)
					10	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah Desa ODF (Satuan: Desa)
					11	Program Jaminan Kesehatan Nasional	Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat	Cakupan Angka Kontak
					12	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Cakupan Pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase keluarga sehat (Satuan: %)
								Persentase puskesmas terakreditasi minimal madya (Satuan: %)

MISI PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022	MISI TUJUAN DAERAH (T) INDIKATOR TUJUAN SASARAN DAERAH (S) INDIKATOR SASARAN			STRATEGI	PROGRAM			
						URAIAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
								Rasio Rujukan kasus Non Spesialitik (RRNS)dari Puskesmas ke Rumah Sakit (Satuan: %)
					13	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit	Persentase pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai standar
					13	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular
					14	Program Peningkatan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan keluarga	Persentase pelayanan kesehatan keluarga sesuai standar
								Persentase balita kurang Gizi mendapat perawatan (Satuan: %)
					15	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Meningkatnya keselamatan Ibu melahirkan dan Anak	Persentase Cakupan pelayanan kesehatan keluarga
					16	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan, Farmasi serta Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatnya kondisi sumberdaya kesehatan farmasi dan perbekalan kesehatan di puskesmas sesuai standar	Persentase Puskesmas dengan sarana dan prasarana sesuai standar
								Persentase Puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar
								Persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai Formularium Nasional (Fornas)

MISI PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022	MISI			STRATEGI	PROGRAM			
	TUJUAN DAERAH (T)				URAIAN		SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
	INDIKATOR TUJUAN							
	SASARAN DAERAH (S)							
	INDIKATOR SASARAN							
							Terintegrasinya Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas	Persentase puskesmas yang melaksanakan SIKDA
					17	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Meningkatnya sarana dan prasarana puskesmas	Persentase Puskesmas Terpenuhi Kebutuhan Obat Secara Tepat dan Rasional
					18	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
					19	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Sistem Informasi Kesehatan	Ketersediaan sumberdaya Daya Manusia kesehatan sesuai dengan standar minimal ketenagaan disetiap puskesmas (Satuan: %)
					20	Program Bantuan Operasional Kesehatan	Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan kesehatan di Puskesmas	Persentase Puskesmas yang melaksanakan manajemen sesuai standar (Satuan: %)
					21	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Cakupan Pelayanan Kesehatan yang komprehensif	Persentase terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
					22	Program Peningkatan dan Pengembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Terselenggaranya Peningkatan dan Pemeliharaan RSUD Dr. Adjidarmo	Indek Kerpuasan Masyarakat terhadap layanan RSUD
		S3	**Menurunnya Penduduk Miskin**					

MISI PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022	MISI TUJUAN DAERAH (T) INDIKATOR TUJUAN SASARAN DAERAH (S) INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	PRORAM			
				URAIAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
	3 Tingkat Kemiskinan					
		Fasilitasi kebijakan afirmasi bagi masyarakat miskin **Peningkatan efektifitas penanganan PMKS**	23	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terselenggaranya perlindungan dan jaminan sosial masyarakat	Cakupan PMKS memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial Sosial
			24	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN	meningkatnya pelayanan jaminan sosial di Kabupaten Lebak	Jumlah pelaksanaan sosialisasi jamsos (Satuan: kecamatan)
			25	Program Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial	Terselenggaranya Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan PMKS memperoleh Penanganan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial
			26	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA	MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA	Terpenuhinya sarana prasarana usaha bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), PRSE, KAT (Satuan: Klp)
						Terpenuhinya sarana prasarana usaha bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), PRSE, KAT (Satuan: Orang)
						Terpenuhinya sarana prasarana usaha bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), PRSE, KAT (Satuan: Desa)
			27	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	MENINGKATNYA PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Cakupan PMKS memperoleh Penanganan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial



MISI PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022	MISI TUJUAN DAERAH (T) INDIKATOR TUJUAN SASARAN DAERAH (S) INDIKATOR SASARAN		STRATEGI	PROGRAM			
					URAIAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
				28	PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR	MENINGKATNYA PEMBINAAN ANAK TERLANTAR	Jumlah anak terlantar memperoleh pendidikan formal/non formal (Satuan: Orang
				29	PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA	MENINGKATNYA PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA	Jumlah penyandang disabilitas dan eks trauma yang tertangani
							Jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan orang terlantar (OT) tertangani
				30	PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)	MENINGKATNYA PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)	Jumlah eks penyandang penyakit sosial (eks Napi, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) memiliki usaha
				31	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Persentase Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat
				32	PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN	MENINGKATNYA PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN	Terpeliharanya Areal Pemakaman
							Jumlah Jenazah yang diurus
		S4	**Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk**				
		4	**Laju Pertumbuhan Penduduk**				
			Peningkatan aksesibilitas dan efektifitas pelayanan KB	33	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Ratio Akseptor KB (Satuan: %)

MISI PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022	MISI TUJUAN DAERAH (T) INDIKATOR TUJUAN SASARAN DAERAH (S) INDIKATOR SASARAN			STRATEGI	PROGRAM			
						URAIAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
								Persentase pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (Satuan: %)
								Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa (Satuan: %)
								Persentase Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun (Satuan: %)
								Cakupan Anggota Bina Keluarga berKB (Satuan: Orang)
								Jumlah Pusat Pelayanan KKBPK yang terbina & aktif (BKB, BKR, BKL) (Satuan: Kelompok)
								Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (Satuan: %)
					34	Program Keluarga Berencana	Menurunkan TFR	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (Satuan: %)

MISI PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022	MISI			STRATEGI	PROGRAM			
	TUJUAN DAERAH (T)				URAIAN		SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
	INDIKATOR TUJUAN							
		SASARAN DAERAH (S)						
			INDIKATOR SASARAN					
								Persentase pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (Satuan: %)
					35	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Meningkatnya pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa (Satuan: %)
					36	Program Pelayanan Kontrasepsi	Meningkatnya Pelayanan Kontrasepsi	Ratio Akseptor KB (Satuan: %)
								Presentase Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (Satuan: %)
					37	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Meningktnya Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Jumlah Pusat Pelayanan KKBPK yang terbina & aktif (BKB) (Satuan: Kelompok)
								Jumlah Pusat Pelayanan KKBPK yang terbina & aktif (BKR) (Satuan: Kelompok)
								Jumlah Pusat Pelayanan KKBPK yang terbina & aktif (BKL) (Satuan: Kelompok)
		S5	**Meningkatnya peran Kepemudaan dan olahraga**					
			5 Indeks Pembangunan Kepemudaan					
				Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga	38	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Meningkatnya peran serta Kepemudaan, kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Prosentase lembaga pemuda yang terbina (Satuan: %)

MISI PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022	MISI			STRATEGI	PROGRAM			
	TUJUAN DAERAH (T)				URAIAN		SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
	INDIKATOR TUJUAN							
		SASARAN DAERAH (S)						
			INDIKATOR SASARAN					
				Pembinaan kewirausahaan pemuda				jumlah pemuda yang berprestasi di Tk. Provinsi dan nasional (Satuan: Pemuda)
								Persentase wirausaha muda baru yang memperoleh akses modal (Satuan: %)
					39	Program Peningkatan peran serta kepemudaan	Meningkatnya partisipasi organisasi pemuda	Prosentase lembaga pemuda yang terbina
							Meningkatnya prestasi pemuda di Tk.Provinsi dan Nasional	jumlah pemuda yang berprestasi di Tk. Provinsi dan nasional
					40	Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Meningkatnya wirausaha muda baru	Prosentase wirausaha muda baru yang memperoleh akses modal
					41	Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Meningkatnya Prestasi Olah Raga	Prosentase Atlet yang berprestasi
								Prosentase Cabor yang berprestasi
					42	Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Meningkatnya sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Prosentase Sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik
							Meningkatnya jumlah sarana dan prasaranan olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana olahraga yang terbangun
		S6	**Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan**					
			6 Indeks Pembangunan Gender					
				Pemberdayaan perempuan dan organisasi perempuan	43	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya keterlibatan perempuan terhadap Pembangunan	Presentase perempuan dalam pelaksanaan pembangunan



MISI PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022	MISI TUJUAN DAERAH (T) INDIKATOR TUJUAN SASARAN DAERAH (S) INDIKATOR SASARAN			STRATEGI	PROGRAM			
						URAIAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
								Cakupan Stakeholder yang mampu menyusun perencanaan & penganggaran yang responsif gender
							Meningkatnya upaya perlindungan anak	Presentase Lembaga Pemenuhan hak Anak yang terbentuk dan aktif (Satuan: %)
								Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu
					44	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan		Presentase Lembaga Pemenuhan hak Anak yang terbentuk dan aktif (Satuan: %)
								Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu
					45	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Meningktnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Presentase perempuan dalam pelaksanaan pembangunan (Satuan: %)
								Cakupan Stakeholder yang mampu menyusun perencanaan & penganggaran yang responsif gender (Satuan: %)

MISI PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022	MISI TUJUAN DAERAH (T) INDIKATOR TUJUAN SASARAN DAERAH (S) INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	PRORAM			
				URAIAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
MISI 5 : Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	**MISI 2 : Meningkatkan Produktifitas perekonomian daerah melalui pengembangan pariwisata**					
	T2 Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat					
	1. Gini Ratio					
	S7 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas					
	7 PDRB Perkapita					
	8 LPE					
	9 Daya Beli					
	10 Indeks Williamson					
	11 Tingkat Pengangguran Terbuka					
	12 Kontribusi Sektor Pariwisata pada PDRB					
		Peningkatan cakupan layanan pelatihan dan penempatan tenaga kerja	**46**	**Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**	**Meningkatnya Jumlah Investor PMA dan PMDN berskala nasional**	**Jumlah Investor PMA dan PMDN berskala nasional**
		Peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja				Jumlah pameran tingkat regional dan nasional yang termonitoring dan terevaluasi (Satuan: %)
		Peningkatan produktifitas sector pertanian	**47**	**Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**	**Meningkatnya nilai investasi berskala nasional(PMDN/PMA)**	Jumlah nilai investasi berskala nasional(PMDN/PMA) (Satuan: Rupiah)
		Fasilitasi kebijakan dan inkubasi usaha/industri pariwisata				Jumlah termonitoring dan terevaluasi Akses Keuangan Daerah (Satuan: %)



MISI PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022	MISI TUJUAN DAERAH (T) INDIKATOR TUJUAN SASARAN DAERAH (S) INDIKATOR SASARAN			STRATEGI	PROGRAM			
						URAIAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
				Fasilitasi kebijakan dan insentif pengembangan objek dan destinasi pariwisata daerah **Pengembangan Industri pengolahan komoditi pertanian** **Pengendalian inflasi** **Pembinaan UMKM dan Koperasi** **Peningkatan kualitas pelayanan dan kemudahan investasi** **Peningkatan produktivitas sektor industri** **Peningkatan produktivitas sektor perdagangan** **Pembinaan , pelestarian, dan komodifikasi seni-budaya, dan kearifan lokal** **Pembinaan Masyarakat Adat** **Peningkatan efektifitas pembangunan desa**				Jumlah termonitoring dan terevaluasi penerima Kredit Usaha Rakyat (Satuan: %)
								Jumlah penyelesaian Kredit Peduli Lebak (Satuan: %)
					48	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara
								Jumlah kunjungan wisatawan nusantara
					49	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya Daya Tarik Wisata	Jumlah dan Jenis Obyek Wisata yang dikembangkan
								Jumlah Desa Wisata yang dikembangkan
					50	Program Peningkatan Daya Dukung Kelembagaan Kepariwisataan		Persentase kelembagaan di 23 ODTW (Satuan: %)
								Persentase sektor ekonomi kreatif yang berkembang (Satuan: %)
					51	Program Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Tenaga Kerja		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Satuan: %)
							Meningkatnya Peran Lembaga Kerjasama Tripartit dalam Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Standarisasi BLK (Satuan: Kelas)
								Persentase Perusahaan yang tertib hukum

MISI PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022	MISI TUJUAN DAERAH (T) INDIKATOR TUJUAN SASARAN DAERAH (S) INDIKATOR SASARAN			STRATEGI	PROGRAM			
						URAIAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
								ketenagakerjaan (Satuan: %)
					52	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Meningkatnya Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Prosentase Keluarga Transmigran yang berhasil (Satuan: %)
					53	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Meningkatnya Ketersedian dan kualitas Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan
								Persentase Pangan Aman
					54	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya Produksi Sektor Pertanian	Jumlah produksi padi (Satuan: ton)
								Palawija (Satuan: ton)
								Holtikultura (Satuan: ton)
								Perkebunan (Satuan; ton)
					55	Program Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian	Pertumbuhan Nilai Produksi yang terjual
								Pertumbuhan Nilai Produksi
					56	Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Pertanian	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia Pertanian	Jumlah peningkatan Kelas kelompok : Pemula (Satuan: Kelompok)
								Lanjut (Satuan: Kelompok)
								Madya (Satuan: Kelompok)
								Utama (Satuan: Kelompok)
					57	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	Meningkatnya Cakupan Penanganan Penanganan Penyakit ternak	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan (Satuan: %)
					58	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya Produksi Sektor Peternakan	Jumlah Produksi Daging

MISI PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022	MISI TUJUAN DAERAH (T) INDIKATOR TUJUAN SASARAN DAERAH (S) INDIKATOR SASARAN			STRATEGI	PROGRAM			
						URAIAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
					59	Program Peningkatan Produksi Perikanan	Meningkatnya Produksi Sektor Perikanan	Produksi Ikan Budidaya (ton)
								Produksi Ikan Tangkap (ton)
					60	Program Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Hasil Produksi Perikanan	Meningkatnya Usaha Perikanan yang mandiri dan berdaya saing	Persentase peningkatan kelas kelompok perikanan
					61	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Meningkatnya Cakupan Penanganan Pelanggaran Perdagangan	Prosentase Jumlah Penanganan Terhadap Pelanggaran Perdagangan
							Meningkatnya pelayanan meterologi legal	Prosentase alat UTTP yang bertanda tera sah ulang
					62	Program Peningkatan Efesien Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan	Prosentase Sarana Perdagangan yang memenuhi standar SNI
					63	Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah	Meningkatnya Daya Saing Industri Kecil dan Menengah	Prosentase Industri Kecil dan Menengah yang Memiliki Standar Mutu
					64	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya Daya Saing Usaha Mikro dan Kecil	Prosentase UMK yang berdaya saing
					65	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperas	Prosentase Koperasi Aktif
					66	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan
					67	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Meningkatnya pengembangan tradisi di masyarakat adat	Persentase terpenuhinya kebutuhan event seni dan budaya daerah
					68	Program Pengembangan Nilai Budaya	meningkatnya pemeliharaan desa adat	persentase pelestarian adat budaya daerah (Satuan: %)
	MISI 3 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Wilayah							

MISI PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022	MISI			STRATEGI	PROGRAM			
	TUJUAN DAERAH (T)				URAIAN		SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
	INDIKATOR TUJUAN							
	SASARAN DAERAH (S)							
	INDIKATOR SASARAN							
MISI 2 : Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur	**T3**	**Meningkatkan Infrastruktur yang berkualitas**						
	3	**Indeks Infrastruktur Daerah**						
		S8	**Meningkatnya Infrastruktur Publik untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan orang serta menjamin ketersediaan air untuk irigasi**					
			13 indeks infrastruktur publik					
				Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan **Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi, DAS, Situ, dan Danau**	70	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat produksi
					71	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	meningkatnya kualitas layanan jalan dan jembatan kabupaten	Persentase jalan kabupaten terpelihara / ditingkatkan (Satuan: %)
								persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik (Satuan: %)
								persentase jalan dalam kota kabupaten yang memiliki trotoar dan drainase/saluran (Satuan: %)
					72	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Tersedianya alat berat siap pakai	Persentase alat berat dalam kondisi baik
					73	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Terbangunnya jalan perdesaan	persentase panjang Jalan perdesaan yang terbangun (Satuan: %)
								Persentase jembatan pedesaan yang terbangun (Satuan: %)

MISI PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022	MISI TUJUAN DAERAH (T) INDIKATOR TUJUAN SASARAN DAERAH (S) INDIKATOR SASARAN			STRATEGI	PROGRAM			
						URAIAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
					74	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	meningkatnya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persentase irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik
					75	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	meningkatnya ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari	Persentase pembangunan penampung air (embung)
					76	Program Pengendalian Banjir	berkurangnya kawasan yang terkena dampak banjir	persentase berkurangnya kawasan yang terkena dampak banjir
					77	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tersedianya gedung pemerintah dalam kondisi layak	persentase gedung pemerintah dalam kondisi layak
					78	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	tersedianya fasum di kecamatan	Persentase ketersediaan Fasum di kecamatan
					79	Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya alam	terciptanya keselarasan pembangunan dengan perencanaan	Jumlah dokumen Perencanaan Teknis PUPR
					80	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi dan sertifikasi tenaga trampil	Persentase layanan informasi jasa konstruksi (Satuan: %)
								Persentase tenaga kerja bersertifikat (Satuan: %)
		S9	**Meningkatnya Infrastruktur Dasar untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang layak**					
			14 indeks infrastruktur dasar					
				Peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar yang berkualitas	81	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	meningkatnya layanan air minum dan air limbah	Prosentase Penanganan Limbah dan Limbah B3 (Satuan: %)

MISI PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022	MISI TUJUAN DAERAH (T) INDIKATOR TUJUAN SASARAN DAERAH (S) INDIKATOR SASARAN			STRATEGI	PROGRAM			
						URAIAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
				Penataan kawasan permukiman	82	Program Pengembangan Perumahan	tertanganinya rumah tidak layak huni	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
					83	Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman	berkurangnya permukiman kumuh di perkotaan	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh di Perkotaan
					84	Program Lingkungan Sehat Perumahan	miningkatnya fungsi PSU lingkungan perumahan	Persentase Peningkatan Penanganan Perumahan dengan PSU Layak
		S10	**Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas**					
			15 Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas					
				Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perhubungan	85	**Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ**	**Tersedianya prasarana perhubungan dan alat uji kendaraan bermotor dalam kondisi baik**	**Persentase prasarana perhubungan dalam kondisi baik**
								Presentase alat uji kendaraaan bermotor dengan kondisi baik
					86	**Program Peningkatan Pelayanan Angkutan**	**Meningkatnya layanan angkutan**	**Persentase pengelolaan terminal**
					87	**Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas**	**Terlaksananya pengendalian dan pengamanan lalu lintas**	**Persentase Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas**
							Terpenuhinya fasilitas perlengkapan jalan	**Persentase rambu - rambu terpasang**
					88	**Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor**	**Meningkatnya KIR angkutan umum**	**Persentase kepemilikan KIR angkutan umum**
					89	**Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan**		**persentase pembangunan prasarana perhubungan (Satuan: %)**



MISI PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022	MISI			STRATEGI	PROGRAM			
	TUJUAN DAERAH (T)				URAIAN		SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
	INDIKATOR TUJUAN							
	SASARAN DAERAH (S)							
	INDIKATOR SASARAN							
MISI 5 : Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	**MISI 4: Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup**							
	T4 Meningkatnya pelestarian fungsi lingkungan Hidup							
	4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)							
		S11 Terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan						
			16 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)					
				Peningkatan efektifitas pengendalian atas pemanfaatan ruang Perlindungan dan pelestarian LH	90	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Persentase lahan kritis yang tertangani
					91	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tersedianya informasi lingkungan hidup	Persentase dokumen informasi Lingkungan Hidup (Satuan: %)
				Pengendalian pemanfaatan SDA	92	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan Hidup	Menurunnya pencemaran dan perusakan lingkungan	Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan
				Peningkatan pengelolaan sampah perkotaan				Persentase pengaduan lingkungan yang tertangani
					93	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terciptanya Estetika Ruang Terbuka Hijau	persentase ruang terbuka hijau terkelola
					94	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	terlaksananya pengurangan sampah dan penanganan sampah	Persentase Pengurangan Sampah
								Persentase Penanganan Sampah
					96	Program Perencanaan Tata Ruang	tersedianya dokumen rencana tata ruang	persentase dokumen rencana tata ruang di susun

MISI PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022	MISI TUJUAN DAERAH (T) INDIKATOR TUJUAN SASARAN DAERAH (S) INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	PRORAM URAIAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
			97 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	terkendalinya pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya	Persentase ketidaksesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang
MISI 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	**MISI 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik**				
	T5 Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas				
	5 Indeks Reformasi Birokrasi				
	S12 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Pelayanan Publik				
	17 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)				
	18 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah				
	19 OPINI BPK				
	20 IKM				
		Implementasi reformasi birokrasi secara terencana	98 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Termanfaatkannya teknologi informasi yang dapat diakses dalam rangka optimalisasi pelayanan publik	Persentase Pengelolaan sistem Aplikasi berbasis Teknologi Informatika
		Penataan daerah dan/ wilayah secara terencana			Persentase pemanfaatan Teknologi Informatika untuk layanan publik
		Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah			Persentase pemanfaatan persandian dalam pengamanan informasi pemerintah daerah



MISI PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022	MISI TUJUAN DAERAH (T) INDIKATOR TUJUAN SASARAN DAERAH (S) INDIKATOR SASARAN			STRATEGI	PROGRAM			
						URAIAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
				Peningkatan efektifitas fungsi statistik, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan	**99**	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Terlayaninya informasi untuk layanan publik**	**Persentase terlayaninya informasi publik (Satuan: %)**
				Peningkatan efektifitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				**Persentase terlayaninya informasi publik (Satuan: %)**
				Peningkatan kinerja pemerintahan daerah dan desa	100	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	Tersebarluaskannya komunikasi informasi pemerintah daerah	Persentase tersebarluaskannya informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
				Peningkatan kualitas data Kependudukan dan Pencatatan Sipil				Cakupan informasi tentang kegiatan SKPD dan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Lebak (Satuan: Kali)
				Peningkatan peran dan fungsi pengawasan internal	101	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Tersedianya data dan informasi pembangunan daerah baik fisik maupun elektronik	cakupan ketersediaan data dan informasi kinerja pembangunan daerah (Satuan: %)
				Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinergi antar pimpinan	102	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah (Satuan: %)

MISI PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022	MISI TUJUAN DAERAH (T) INDIKATOR TUJUAN SASARAN DAERAH (S) INDIKATOR SASARAN			STRATEGI	PROGRAM			
						URAIAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
				daerah dan antar stakeholder pemerintahan daerah **Peningkatan efektifitas sistem mitigasi bencana**				
					103	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		Persentase pengelolaan aplikasi informatika pemerintah daerah (Satuan: %)
					104	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Pesentase penyelenggaraan statistik sektoral pemerintah daerah (Satuan: %)
					105	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah		Persentase penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah (Satuan: %)
								Opini BPK atas audit laporan keuangan
					106	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pajak daerah	Persentase pertumbuhan pajak daerah (Satuan: %)
							Meningkatnya Kompetensi SDM Pengelola Perpajakan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Tenaga Ahli Perpajakan (Satuan: %)
							Meningkatnya kualitas pelayanan Pajak Daerah	Persentase ketaatan wajib pajak daerah (Satuan: %)
							Meningkatnya kualita penyusunan anggaran	Persentase Dokumen Penganggaran yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Satuan: %)

MISI PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022	MISI TUJUAN DAERAH (T) INDIKATOR TUJUAN SASARAN DAERAH (S) INDIKATOR SASARAN			STRATEGI	PROGRAM			
						URAIAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
							Meningkatnya kualitaS Penatausahaan keuangan daerah	Persentase realisasi pendapatan dan belanja daerah (Satuan: %)
							Terlaksananya penyajian laporan keuangan yang sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Laporan Keuangan yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Satuan: %)
							Meningkatnya kualitas pengelolaan BMD	Prosentase Jumlah Aset Yang terinventarisasi, terindentifikasi dan terdokumentasi Dengan Total Seluruh Aset Yang Dimiliki Pemerintah Kabupaten Lebak (Satuan: %)
							Tersedianya dokumen SSH	jumlah dokumen standar satuan harga yang di susun (Satuan: dok)
					107	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase penguasaan Tanah bagi Kepentingan Umum (Satuan: %)	Persentase Kebutuhan Tanah bagi Kepentingan Umum
					108	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Terfasilitasinya Konflik Sengketa Pertanahan	Persentase Penyelesaian Konflik Sengketa Pertanahan
					109	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian, Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Tercapainya administrasi kepegawaian yang tepat waktu	persentase aparatur yang menduduki jabatan sesuai kompetensi (Satuan: %)
								persentase ASN yang mendapat pelayanan kepegawaian tepat waktu (Satuan: %)

MISI PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022	MISI TUJUAN DAERAH (T) INDIKATOR TUJUAN SASARAN DAERAH (S) INDIKATOR SASARAN			STRATEGI	PROGRAM			
						URAIAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
					110	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Tercapainya administrasi kepegawaian yang tepat waktu	Persentase pejabat struktural yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial (Satuan: %)
								Persentase pegawai yang memiiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis (Satuan: %)
								persentase aparatur kecamatan yang mendapatkan pembinaan (Satuan: %)
					111	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Menurunya Persentase ASN yang melakukan peanggaran Disiplin	Persentase ASN yang melakukan peanggaran Disiplin
					112	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Aparatur yang memiliki kompetensi (Satuan: org)
								Jumlah sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi (Satuan: Orang PNS)
								terlaksananya peningkatan kapasitas Sumber daya yang berkompenten (Satuan: Orang)
								Jumlah sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi (Satuan: orang Non PNS)
								Jumlah aparatur yang mengikuti diklat (Satuan: Orang)
					113			

MISI PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022	MISI TUJUAN DAERAH (T) INDIKATOR TUJUAN SASARAN DAERAH (S) INDIKATOR SASARAN			STRATEGI	PROGRAM			
						URAIAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
						Program penataan administrasi kependudukan	Meningkatnya mutu pelayanan adminduk yang cepat, tepat dan akurat	Prosentase Kepemilikan dokumen kependudukan (Satuan: %)
								Prosentase kepemilikan akta-akta catatan sipil (Satuan: %)
								Prosentase Kesesuaian database dokumen kependudukan (Satuan: %)
					114	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH	MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS AUDIT, REVIU DAN EVALUASI	Persentase Audit, Revieu dan Evaluasi yang dilaksanakan sesuai PKPT dan Standar AAIPI
					115	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	MENINGKATNYA KUALITAS PENGENDALIAN INTERNAL PADA OPD	Persentase OPD yang menerapkan SPIP hasil pendampingan
					116	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	MENINGKATNYA KUALITAS LAPORAN KEUANGAN OPD	Persentase capaian kinerja dan Keuangan Daerah (Satuan: %)
					117	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya kapasitas SDM dan sarana pengawasan	Persentase Audit, Revieu dan Evaluasi yang dilaksanakan sesuai PKPT dan Standar AAIPI (Satuan: persen)
					118	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Tertibnya Pengelolaan Kearsipan Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang mengelola arsip sesuai Perbup
							Meningkatnya Pemeliharan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Persentase Sarana dan Prasaranan Kearsipan dalam kondisi baik
					119	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Meningkatnya Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase pengelolaan kearsipan

MISI PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022	MISI TUJUAN DAERAH (T) INDIKATOR TUJUAN SASARAN DAERAH (S) INDIKATOR SASARAN			STRATEGI	PROGRAM			
						URAIAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
					120	Program Pemeliharan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Meningkatnya Pemeliharan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Persentase Sarana dan Prasaranan Kearsipan dalam kondisi baik
					121	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Terintegrasinya sistem pengelolaan kearsipan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang terintegrasi dalam sistem layanan kearsipan (Satuan: %)
							Meningkatnya Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase pengelolaan kearsipan (Satuan: %)
					122	Program Pembinaan, Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Presentase Penegakkan Perda (%)
					123	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response time) pengaduan kebakaran (<15 Menit Setelah Pengaduan) (%)
					124	Program pemberdayaan kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat desa	Meningkatnya Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif dan Produktif (Satuan: persen)
							Meningkatnya Peran Perempuan di Pedesaan	Persentase Lembaga Perempuan yang Aktif dan Produktif (Satuan: persen)
								Jumlah Informasi TTG dan Pembanguanan (Satuan: alat)
								Jumlah Perempuan yang mendapatkan pembinaan (Satuan: TP PKK)

MISI PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022	MISI TUJUAN DAERAH (T) INDIKATOR TUJUAN SASARAN DAERAH (S) INDIKATOR SASARAN			STRATEGI	PROGRAM			
						URAIAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
					125	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan	persentase pembangunan sapras perdesaan yang melibatkan masayarakat
							meningkatnya Keswadayaan masyarakat dalam pembangunan sarpras perdesaan	Persentase Keswadyaan Masyarakat dalam Kegiatan pembangunan Desa
					126	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Miningkatnya Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang aktif -
					127	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Meningktanya Prosentase Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase perempuan yang aktif dalam TP PKK (Satuan: %)
					128	Program Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Meningkatnya Tata Kelola, Aministrasi Pemerintahan, andm. Keuangan dan Aset Desa	Persentase Desa dengan pengelolaan administrasi Pemerintahan Desa, dan Administrasi Keuangan yang baik dan Pengelolaan Asetnya Tertib
					129	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningktnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Prosentase aparatur pemerintahan desa yang memiliki kompetensi.
					130	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Meningktnya cakupan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan pengelolaan keuangan desa dengan kategori baik
					131	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Meningkatnya Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif	Persentase Terbentuk BUMDes yang Aktif
							Meningkatnya Daya Dukung kemampuan Wira usaha masyarakat	Persentase sarana usaha masyarakat yang berkembang

MISI PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022	MISI TUJUAN DAERAH (T) INDIKATOR TUJUAN SASARAN DAERAH (S) INDIKATOR SASARAN			STRATEGI	PROGRAM			
						URAIAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
					132	Program Peningkatan Pemerantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Meningkatnya koordinasi untuk Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) serta menciptakan rasa aman dan nyaman	Persentase penurunan penyalahgunaan miras dan prostitusi (Satuan: %)
					133	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		Cakupan pelaksanaan koordinasi pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan (Satuan: %)
					134	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terbangunnya koordinasi dan kerukunan antar berbagai kelompok masyarakat	Persentase Parpol yang terbina
								Cakupan Pembinaan terhadap Ormas/LSM
					135	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningktnya pengembangan wawasan kebangsaan	Prosentase Terlaksananya Peningkatan toleransi dan pembinaan keagamaan
					136	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Meningkatnya mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Cakupan Penanggulangan Bencana
					137	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan	Cakupan sinergisitas Program pembangunan Pusat dan Daerah baik jangka pendek maupun jangka menengah (Satuan: %)
					138	Pengembangan Data / Informasi	Tersedianya data dan informasi perencanaan	Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan daerah

MISI PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022	MISI TUJUAN DAERAH (T) INDIKATOR TUJUAN SASARAN DAERAH (S) INDIKATOR SASARAN			STRATEGI	PROGRAM			
						URAIAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
					139	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase hasil kajian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah
					140	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya penetapan dan pengundangan peraturan perundang-undangan dan rencana kerja peraturan perundang-undangan tahunan	Jumlah rencana kerja dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Satuan: Perda)
								cakupan Penetapan Perda dan Perbup (Satuan: %)
					141	Program Pemantapan Otonomi Daerah Dan Sistem Administrasi Daerah	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah jenis administrasi daerah yang berjalan dengan baik.
					142	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah persiapan penataan daerah otonomi baru
					144	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi perkantoran
					146	Program Kerjasama Pembangunan	Meningkatnya kualitas kerjasama antar daerah dan lembaga lainnya	jumlah kerjasama antar pemerintah daerah
					145	Program Peningkatan Dan Pengembangan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Meningkatnya pelayanan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Lebak secara efektif, efisien dan akuntabel	Persentase penggunaan E-Procurenment terhadap Belanja Pengadaan Barang dan jasa

MISI PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022	MISI TUJUAN DAERAH (T) INDIKATOR TUJUAN SASARAN DAERAH (S) INDIKATOR SASARAN			STRATEGI	PROGRAM			
						URAIAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
					143	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya pelayanan kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Terpenuhinya layanan kedinasan KDH/WKDH
					147	Program Peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada Dewan	Persentase indek kepuasan pelayanan kepada Anggota DPRD Kab. Lebak (Satuan: %)
								Rara-rata waktu fasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat kepada Anggota DPRD melalui Komisi-Komisi (Satuan: %)
					148	Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan



PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2019 - 2024

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
			MISI 1. **MENINGKATKAN KUALITAS DAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA**				**629.933.249.550**		**653.028.153.600**		**651.170.385.850**		**659.306.008.250**		**653.788.976.400**		**3.247.226.773.650**	
			Tujuan 1. **Meningkatnya kualitas hidup masyarakat**	**Indeks Pembangunan Manusia**														
			Sasaran 1.1 **Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Layanan pendidikan yang terjangkau dan merata**	**Indeks Pendidikan**														
11	01	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (Satuan: %)	29,90	34,90	1.155.131.000	35,40	1.155.131.000	35,90	1.212.887.550	36,40	1.212.887.550	36,90	1.220.392.750	36,90	5.956.429.850	DISPENDIKBUD
11	01	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP (Satuan: %)	99,00	99,02	108.123.342.100	99,07	107.154.586.100	99,12	108.202.018.800	99,17	112.202.018.800	99,22	112.202.018.800	99,22	547.883.984.600	DISPENDIKBUD
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP (Satuan: %)	86,00	86,05		86,10		86,15		86,20		86,25		86,25		
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD (Satuan: %)	98,98	99,03		99,08		99,13		99,18		99,23		99,23		
11	01	18	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf (AMH) (Satuan: %)	98,48	98,52	1.591.733.000	98,56	1.591.733.000	98,60	1.656.889.300	98,64	1.661.300.600	98,68	2.009.650.000	98,68	8.511.305.900	SETDA, DISPENDIKBUD
				Jumlah bantuan Sarana dan Prasarana MDTA/Mebelair (Satuan: Ruang Kelas)	26,00	26,00		30,00		30,00		30,00		30,00		30,00		
11	01	20	Program Pendidikan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru bersertifikat pendidik (Satuan: %)	77,90	78,00	3.154.796.500	78,10	3.154.796.500	78,20	3.154.796.500	78,30	3.154.796.500	78,40	3.154.796.500	78,40	15.773.982.500	DISPENDIKBUD
				Angka Kelulusan SD (Satuan: %)	98,13	98,18		98,23		98,28		98,33		98,38		98,38		
				Angka Kelulusan SMP (Satuan: %)	94,78	94,83		94,88		94,93		94,98		95,03		95,03		
11	01	22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah SD berakreditasi A (Satuan: %)	4,20	7,70	629.468.000	11,20	629.468.000	14,70	650.352.000	18,20	670.802.500	21,70	728.680.000	21,70	3.308.770.500	DISPENDIKBUD
				Persentase sekolah SMP berakreditasi A (Satuan: %)	10,40	13,90		17,40		20,90		24,40		27,90		27,90		
11	01	23	Program BOS	Angka Putus sekolah SD (Satuan: %)	0,22	0,20	154.497.720.000	0,19	154.497.720.000	0,18	154.497.720.000	0,17	154.497.720.000	0,16	154.497.720.000	0,16	772.488.600.000	DISPENDIKBUD
				Angka Putus sekolah SMP (Satuan: %)	0,10	0,08		0,07		0,06		0,05		0,04		0,04		
				Angka Melanjutkan SD ke SMP (Satuan: %)	94,77	94,84		94,89		94,94		94,99		95,04		95,04		
				Angka melanjutkan SMP ke SMA (Satuan: %)	86,79	86,80		86,81		86,82		86,83		86,84		86,84		
12	17	21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan (Satuan: Orang)	56.502,00	68.502,00	986.463.800	80.502,00	1.570.273.000	92.502,00	2.196.913.900	104.502,00	2.086.899.500	116.502,00	998.430.200	128.502,00	7.838.980.400	DISPENDIKBUD
				Jumlah Perpustakaan yang dibina (Satuan: Unit)	157,00	185,00		213,00		241,00		269,00		297,00		325,00		DISKERPUS, DISPENDIKBUD
				Cakupan TBM yang sesuai standar (Satuan: Lembaga)	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		
			Sasaran 1.2 **Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Layanan kesehatan yang terjangkau dan merata**	**Indeks Kesehatan**														
11	02	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Puskesmas Terpenuhi Kebutuhan Obat Secara Tepat dan Rasional (Satuan: %)	50,00	100,00	7.164.767.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	100,00	7.164.767.000	DINKES
11	02	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase keluarga sehat (Satuan: %)	11,00	35,00	19.403.855.150	42,00	95.311.725.150	44,00	95.275.222.800	47,00	95.420.997.800	49,00	92.877.433.150	49,00	398.289.234.050	DINKES
				Persentase puskesmas terakreditasi minimal madya (Satuan: %)	11,90	23,81		35,71		47,62		59,52		71,42		71,42		
				Rasio Rujukan kasus Non Spesialitik (RRNS)dari Puskesmas ke Rumah Sakit (Satuan: %)	4,76	4,75		4,74		4,73		4,72		4,71		4,71		
11	02	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan pembinaan PHBS di tatanan kesehatan (Satuan: %)	65,00	70,00	283.250.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	70,00	283.250.000	DINKES
11	02	21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah Desa ODF (Satuan: Desa)	33,00	42,00	5.074.975.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	42,00	5.074.975.000	DINKES
11	02	22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular (Satuan: %)	70,00	100,00	3.974.656.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	100,00	3.974.656.000	DINKES
11	02	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Ketersediaan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar minimal ketenagaan di setiap puskesmas (Satuan: %)	10,00	10,00	9.782.270.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	10,00	9.782.270.000	DINKES
11	02	25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (Satuan: %)	67,00	70,00	25.077.678.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	70,00	25.077.678.000	DINKES
11	02	26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (Satuan: %)	80,00	80,00	18.967.828.000	82,00	25.500.000.000	85,00	27.500.000.000	87,00	27.500.000.000	90,00	27.500.000.000	90,00	126.967.828.000	RSUD
11	02	32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase pelayanan kesehatan keluarga (Satuan: %)	70,00	100,00	8.924.330.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	100,00	8.924.330.000	DINKES
11	02	33	Program Peningkatan dan Pengembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap layanan RSUD (Satuan: %)	80,00	82,00	145.000.000.000	84,00	148.000.000.000	86,00	152.000.000.000	88,00	152.000.000.000	90,00	155.000.000.000	90,00	752.000.000.000	RSUD
11	02	34	Program jaminan Kesehatan Nasional	Cakupan Angka Kontak (Satuan: 0/00 (permil))	11,90	75,00	57.971.478.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	75,00	57.971.478.000	DINKES
11	02	35	Program Bantuan Operasional Kesehatan	Persentase Puskesmas yang melaksanakan manajemen sesuai standar (Satuan: %)	100,00	100,00	35.550.125.000	100,00	35.550.125.000	100,00	35.550.125.000	100,00	35.550.125.000	100,00	35.550.125.000	100,00	177.750.625.000	DINKES
11	02	36	Program Pengembangan Kesehatan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa ODF (Satuan: %)	9,57	21,74	-	33,91	1.545.000.000	46,09	475.000.000	58,26	550.000.000	70,43	550.000.000	70,43	3.120.000.000	DINKES
				Cakupan pembinaan PHBS di tatanan kesehatan (Satuan: %)	65,00	70,00		75,00		80,00		85,00		90,00		90,00		
11	02	37	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai standar (Satuan: %)	67,00	70,00	-	100,00	1.319.160.000	100,00	1.255.000.000	100,00	1.305.000.000	100,00	1.200.000.000	100,00	5.079.160.000	DINKES
11	02	38	Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan keluarga sesuai standar (Satuan: %)	75,28	0,00	-	100,00	8.924.330.000	100,00	8.988.097.000	100,00	8.988.097.000	100,00	8.988.097.000	100,00	35.888.621.000	DINKES
				Persentase balita kurang Gizi mendapat perawatan (Satuan: %)	80,00	0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
11	02	39	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan, Farmasi serta Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Puskesmas dengan sarana dan prasarana sesuai standar (Satuan: %)	48,00	0,00	-	60,00	41.543.587.250	67,00	32.800.000.000	69,00	32.900.000.000	71,00	33.255.270.000	71,00	140.498.857.250	DINKES
				Persentase Puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar (Satuan: %)	20,00	0,00		50,00		60,00		70,00		80,00		80,00		
				Persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai Formularium Nasional (Fornas) (Satuan: %)	91,00	0,00		93,00		94,00		95,00		96,00		96,00		
				Persentase puskesmas yang melaksanakan SIKDA (Satuan: %)	82,92	0,00		88,09		90,47		95,24		100,00		100,00		
			Sasaran 1.3 **Menurunnya Penduduk Miskin**															
11	02	24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Jumlah pelaksanaan sosialisasi jamsos (Satuan: kecamatan)	28,00	28,00	180.870.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	28,00	180.870.000	SETDA
			Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya.	Terpenuhinya sarana prasarana usaha bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), PRSE, KAT (Satuan: Klp)	10,00	10,00	290.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	290.000.000	DINSOS
				Terpenuhinya sarana prasarana usaha bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), PRSE, KAT (Satuan: Orang)	20,00	20,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
				Terpenuhinya sarana prasarana usaha bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), PRSE, KAT (Satuan: Desa)	20,00	20,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
11	06	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan PMKS memperoleh Penanganan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial (Satuan: %)	100,00	100,00	1.635.400.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	100,00	1.635.400.000	DINSOS
11	06	17	Program Pembinaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar memperoleh pendidikan formal/non formal (Satuan: Orang)	20,00	20,00	80.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	80.000.000	DINSOS

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
11	06	18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Jumlah penyandang disabilitas dan eks trauma yang tertangani (Satuan: Orang)	20,00	0,00	115.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	115.000.000	DINSOS
				Jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan orang terlantar (OT) tertangani (Satuan: Orang)	45,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
11	06	20	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Jumlah eks penyandang penyakit sosial (eks Napi, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) memiliki usaha (Satuan: Orang)	20,00	0,00	75.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	75.000.000	DINSOS
11	06	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Satuan: %)	50,00	50,00	240.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	240.000.000	DINSOS
11	06	22	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Terpeliharanya Areal Pemakaman (Satuan: Lokasi)	2,00	2,00	70.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	70.000.000	DINSOS
				Jumlah Jenazah yang diurus (Satuan: orang Non PNS)	10,00	10,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
11	06	23	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan PMKS memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial (Satuan: %)	100,00	0,00	-	100,00	1.765.000.000	100,00	1.800.000.000	100,00	2.200.000.000	100,00	2.200.000.000	100,00	7.965.000.000	DINSOS
11	06	24	Program Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial	Cakupan PMKS memperoleh Penanganan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial (Satuan: %)	100,00	100,00	-	100,00	1.128.685.000	100,00	1.295.000.000	100,00	1.485.000.000	100,00	1.485.000.000	100,00	5.393.685.000	DINSOS
			Sasaran 1.4 **Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk**	**Laju Pertumbuhan Penduduk**														
12	08	15	Program Keluarga Berencana	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (Satuan: %)	100,00	100,00	12.450.413.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	100,00	12.450.413.000	DPPKBP3A
				Persentase pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (Satuan: %)	67,57	67,55		0,00		0,00		0,00		0,00		67,55		
12	08	16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa (Satuan: %)	1,36	1,36	75.800.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,36	75.800.000	DPPKBP3A
12	08	17	Program Pelayanan Kontrasepsi	Ratio Akseptor KB (Satuan: %)	7,13	7,25	442.800.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	7,25	442.800.000	DPPKBP3A
				Presentase Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (Satuan: %)	70,17	70,25		0,00		0,00		0,00		0,00		70,25		
12	08	18	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ratio Akseptor KB (Satuan: %)	7,13	7,25	-	7,50	13.039.213.000	8,75	13.285.363.000	9,00	13.495.363.000	9,25	13.285.363.000	9,25	53.105.302.000	DPPKBP3A
				Persentase pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (Satuan: %)	67,57	67,55		67,53		67,50		67,48		67,47		67,47		
				Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa (Satuan: %)	1,36	1,36		1,46		1,55		1,65		1,80		1,80		
				Persentase Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun (Satuan: %)	70,17	70,25		70,50		70,70		70,90		80,10		80,10		
				Cakupan Anggota Bina Keluarga berKB (Satuan: Orang)	40.177,00	40.300,00		40.650,00		41.200,00		41.725,00		51.250,00		51.250,00		
				Jumlah Pusat Pelayanan KKBPK yang terbina & aktif (BKB, BKR, BKL) (Satuan: Kelompok)	847,00	853,00		858,00		864,00		870,00		876,00		876,00		
				Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
12	08	19	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Jumlah Pusat Pelayanan KKBPK yang terbina & aktif (BKB) (Satuan: Kelompok)	379,00	381,00	85.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	381,00	85.000.000	DPPKBP3A
				Jumlah Pusat Pelayanan KKBPK yang terbina & aktif (BKR) (Satuan: Kelompok)	209,00	211,00		0,00		0,00		0,00		0,00		211,00		
				Jumlah Pusat Pelayanan KKBPK yang terbina & aktif (BKL) (Satuan: Kelompok)	259,00	261,00		0,00		0,00		0,00		0,00		261,00		
			Sasaran 1.5 **Meningkatnya peran Kepemudaan dan olahraga**	**Indeks Pembangunan Kepemudaan**														
12	13	16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Prosentase lembaga pemuda yang terbina (Satuan: %)	50,00	60,00	1.361.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	60,00	1.361.000.000	DISPORA
				jumlah pemuda yang berprestasi di Tk. Provinsi dan nasional (Satuan: Orang)	13,00	15,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15,00		
12	13	17	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Prosentase wirausaha muda baru yang memperoleh akses modal (Satuan: %)	10,00	10,00	350.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	350.000.000	DISPORA
12	13	18	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, Kewirausahaan dan Kecakapan	Prosentase lembaga pemuda yang aktif (Satuan: %)	50,00	0,00	-	60,00	1.711.000.000	60,00	2.000.000.000	60,00	2.050.000.000	60,00	1.711.000.000	60,00	7.472.000.000	DISPORA
				jumlah pemuda yang berprestasi di Tk. Provinsi dan nasional (Satuan: Orang)	15,00	0,00		15,00		15,00		15,00		15,00		15,00		
				Persentase wirausaha muda baru yang memperoleh akses modal (Satuan: %)	10,00	0,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		
12	13	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Prosentase Atlet yang berprestasi (Satuan: %)	72,00	73,00	3.900.000.000	75,00	6.665.000.000	76,00	4.700.000.000	77,00	7.700.000.000	78,00	3.900.000.000	78,00	26.865.000.000	DISPORA
				Prosentase Cabor yang berprestasi (Satuan: %)	58,00	60,00		61,00		62,00		63,00		64,00		64,00		
12	13	21	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Prosentase Sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik (Satuan: %)	100,00	100,00	600.000.000	100,00	600.000.000	100,00	1.800.000.000	100,00	1.800.000.000	100,00	600.000.000	100,00	5.400.000.000	DISPORA
				Jumlah Sarana dan Prasarana olahraga yang terbangun (Satuan: Unit)	2,00	0,00		4,00		2,00		2,00		2,00		2,00		
			Sasaran 1.6 **Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan**	**Indeks Pembangunan Gender**														
12	02	15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Presentase Lembaga Pemenuhan hak Anak yang terbentuk dan aktif (Satuan: %)	75,00	80,00	216.800.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	100,00	216.800.000	DPPKBP3A
				Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (Satuan: %)	100,00	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		
12	02	16	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak	Presentase perempuan dalam pelaksanaan pembangunan (Satuan: %)	100,00	100,00	-	100,00	671.620.600	100,00	875.000.000	100,00	875.000.000	100,00	875.000.000	100,00	3.296.620.600	DPPKBP3A
				Cakupan Stakeholder yang mampu menyusun perencanaan & penganggaran yang responsif gender (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Presentase Lembaga Pemenuhan hak Anak yang terbentuk dan aktif (Satuan: %)	75,00	80,00		85,00		90,00		95,00		100,00		100,00		
				Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
12	02	17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Presentase perempuan dalam pelaksanaan pembangunan (Satuan: %)	100,00	100,00	451.300.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	451.300.000	DPPKBP3A
				Cakupan Stakeholder yang mampu menyusun perencanaan & penganggaran yang responsif gender (Satuan: %)	100,00	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Misi 2. **Meningkatkan Produktifitas perekonomian daerah melalui pengembangan pariwisata**				**53.745.510.500**		**109.072.830.200**		**95.469.654.850**		**85.730.867.550**		**56.143.587.200**		**400.162.450.300**	
			Tujuan 2. **Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat**	**Gini Ratio**														
			Sasaran 2.1. **Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas**	**PDRB Perkapita**														
				LPE														
				Daya Beli														
				Indeks Williamson														
				Tingkat Pengangguran Terbuka														
				Kontribusi Sektor Pariwisata pada PDRB														
12	01	18	Program Peningkatan Kualitas dan Keselahteraan Tenaga Kerja	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Satuan: %)	13,00	15,00	2.247.600.000	17,00	2.650.000.000	19,00	2.247.600.000	21,00	2.247.600.000	23,00	2.247.600.000	23,00	11.640.400.000	NAKERTRANS
				Standarisasi BLK (Satuan: Kelas)	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
				Persentase Perusahaan yang tertib hukum ketenagakerjaan (Satuan: %)	38,20	43,20		48,20		53,20		58,20		63,20		63,20		
12	03	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Satuan: %)	73,70	79,60	3.134.800.000	83,00	3.831.500.000	86,32	5.514.112.000	89,77	6.266.934.400	93,96	4.500.000.000	96,95	23.247.346.400	KETAPANG
				Porsentase Pangan Aman (Satuan: %)	86,00	85,00		86,00		87,00		88,00		89,00		90,00		
12	11	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Prosentase UMK yang berdaya saing (Satuan: %)	10,87	12,86	998.010.000	14,85	963.010.100	16,83	998.010.000	18,82	998.010.000	20,81	998.010.000	20,81	4.955.050.100	DISKOP
12	11	18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Prosentase Koperasi Aktif (Satuan: %)	19,67	23,24	817.000.000	26,82	817.000.000	30,39	817.000.000	33,97	817.000.000	37,54	817.000.000	41,12	4.085.000.000	DISKOP
12	12	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor PMA dan PMDN berskala nasional (Satuan: investor)	18,00	4,00	847.500.000	4,00	1.049.200.000	5,00	953.500.000	5,00	956.700.000	5,00	953.500.000	5,00	4.760.400.000	SETDA, DPMPTSP
				Jumlah pameran tingkat regional dan nasional yang termonitoring dan terevaluasi (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
12	12	16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah nilai investasi berskala nasional(PMDN/PMA) (Satuan: Rupiah)	20,95	1.000.000.000.000	1.566.158.000	1.070.000.000.000	1.686.523.700	1.144.900.000.000	1.975.158.000	1.225.043.000.000	1.997.158.000	1.310.796.010.000	1.975.158.000	1.310.796.010.000	9.200.155.700	SETDA, DPMPTSP
				Jumlah termonitoring dan terevaluasi Akses Keuangan Daerah (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Jumlah termonitoring dan terevaluasi penerima Kredit Usaha Rakyat (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Jumlah penyelesaian Kredit Peduli Lebak (Satuan: %)	100,00	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
12	16	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	persentase pelestarian adat budaya daerah (Satuan: %)	11,76	35,29	265.222.000	17,64	265.222.000	17,64	365.222.000	17,64	383.483.100	11,76	383.483.100	11,76	1.662.632.200	DISPENDIKBUD
12	16	16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan (Satuan: %)	21,95	22,00	1.286.908.200	22,05	1.286.908.200	22,10	1.350.908.200	22,15	1.418.453.600	22,20	1.418.453.600	22,20	6.761.631.800	DISPENDIKBUD
12	16	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase terpenuhinya kebutuhan event seni dan budaya daerah (Satuan: %)	100,00	100,00	583.451.000	100,00	583.451.000	100,00	583.451.000	100,00	612.623.550	100,00	612.623.550	100,00	2.975.600.100	DISPENDIKBUD
20	01	25	Program Peningkatan Produksi Perikanan	Produksi Ikan Budidaya (Satuan: ton)	3.751,41	3.600,00	2.108.049.950	3.780,00	2.270.319.000	3.745,44	3.508.504.000	4.167,45	3.728.504.000	3.896,76	2.108.049.950	3.974,69	13.723.426.900	PERIKANAN
				Produksi Ikan Tangkap (Satuan: ton)	6.019,97	6.313,66		6.376,80		6.440,56		6.504,97		6.570,02		6.635,72		
20	01	26	Program Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Hasil Produksi Perikanan	Persentase peningkatan kelas kelompok perikanan (Satuan: %)	1,98	1,98	182.000.000	1,98	-	1,98	233.750.000	1,98	257.125.000	1,98	182.000.000	1,98	854.875.000	PERIKANAN
20	02	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (Satuan: Orang)	500,00	500,00	2.650.781.000	500,00	3.000.000.000	750,00	3.000.000.000	1.000,00	6.601.698.150	1.250,00	2.500.000.000	1.250,00	17.752.479.150	PARIWISATA
				Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (Satuan: Orang)	749.500,00	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
20	02	16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Cakupan peningkatan sarana prasarana objek wisata dalam kondisi baik (Satuan: %)	23,00	1,00	3.707.739.000	43,48	5.809.858.800	21,74	10.125.554.150	21,74	7.805.450.000	21,74	3.707.739.000	21,74	31.156.340.950	PARIWISATA
				Jumlah Desa Wisata yang dikembangkan (Satuan: Desa)	7,00	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		
20	02	17	Program Peningkatan Daya Dukung Kelembagaan Kepariwisataan	Persentase kelembagaan di 23 ODTW (Satuan: %)	40,00	57,00		74,00	1.848.766.000	83,00	3.416.663.000	91,00	3.830.781.000	100,00	1.830.781.000	100,00	10.926.991.000	PARIWISATA
				Persentase sektor ekonomi kreatif yang berkembang (Satuan: %)	18,00	18,00		37,00		50,00		63,00		75,00		75,00		
20	03	21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan (Satuan: %)	2,00	1,00	770.000.000	2,00	885.000.000	2,00	900.000.000	2,00	925.000.000	2,00	935.000.000	2,00	4.415.000.000	DISNAK
20	03	22	Program Peningkatan Produksi Hasil	Jumlah Produksi Daging (Satuan: ton)	8.847,00	9.680,00	1.848.506.500	10.164,00	2.259.389.600	10.672,00	3.000.000.000	11.205,00	3.000.000.000	11.765,00	2.000.000.000	12.353,00	12.107.896.100	DISNAK
20	03	25	Program Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian	Pertumbuhan Nilai Produksi yang terjual (Satuan: %)	2,00	2,00	2.120.350.000	2,00	4.341.269.000	2,00	15.000.000.000	2,00	18.870.000.000	2,00	9.370.000.000	2,00	49.701.619.000	DISNAK, DSTANBUN
				Pertumbuhan Nilai Produksi (Satuan: %)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
20	03	26	Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Pertanian	Jumlah Peningkatan Kelas Kelompok : Pemula (Satuan: Kelompok)	1.628,00	1.608,00	2.738.335.600	1.588,00	2.509.385.800	1.570,00	2.476.349.500	1.152,00	2.600.166.000	1.534,00	2.476.349.500	1.535,00	12.800.586.400	DISNAK, DSTANBUN
				Lanjut (Satuan: Kelompok)	838,00	858,00		878,00		896,00		914,00		932,00		931,00		
				Madya (Satuan: Kelompok)	38,00	38,00		38,00		40,00		42,00		44,00		46,00		
				Utama (Satuan: Kelompok)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		2,00		
20	03	27	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Produksi : Padi (Satuan: ton)	595.485,00	595.484,88	15.772.836.000	607.394,58	61.186.205.000	619.542,47	24.502.296.000	631.933,32	6.807.070.300	644.571,98	6.890.480.500	657.463,20	115.158.887.800	DSTANBUN
				Palawija (Satuan: ton)	34.256,00	34.225,51		35.930,02		36.648,62		37.381,59		38.192,22		38.280,82		
				Hortikultura (Satuan: ton)	184.059,00	184.059,00		187.740,18		191.494,98		195.324,88		199.231,38		203.116,01		
				Perkebunan (Satuan: ton)	32.543,00	32.543,00		33.193,86		33.857,74		34.534,89		35.225,59		35.930,00		
20	04	15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Prosentase Jumlah Penanganan Terhadap Pelanggaran Perdagangan (Satuan: %)	70,00	75,00	1.725.831.400	80,00	1.477.401.000	85,00	2.450.000.000	90,00	2.450.000.000	95,00	1.477.401.000	97,00	9.580.633.400	DISPERINDAG
				Prosentase alat UTTP yang bertanda tera sah ulang (Satuan: %)	75,00	90,00		92,00		94,00		96,00		98,00		99,00		
20	04	18	Program Peningkatan Efesien Perdagangan Dalam Negeri	Persentase sarana perdagangan yang refresentatif (Satuan: %)	15,00	20,00	7.035.980.850	25,00	9.013.970.000	30,00	9.826.577.000	35,00	10.895.360.450	40,00	7.119.958.000	40,00	43.891.846.300	DISPERINDAG
20	07	16	Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah	Prosentase Industri Kecil dan Menengah yang Memiliki Standar Mutu (Satuan: %)	1,70	2,00	1.198.451.000	10,00	1.198.451.000	30,00	2.085.000.000	50,00	2.121.750.000	75,00	1.500.000.000	77,00	8.103.652.000	DISPERINDAG
20	08	15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Prosentase Keluarga Transmigran yang berhasil (Satuan: %)	60,00	64,00	140.000.000	68,00	140.000.000	72,00	140.000.000	76,00	140.000.000	80,00	140.000.000	80,00	700.000.000	NAKERTRANS
			Misi 3. **Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Wilayah**				**316.795.334.700**		**334.493.147.300**		**322.400.812.800**		**342.758.166.000**		**311.440.351.600**		**1.627.887.812.400**	
			Tujuan 3. **Meningkatkan Infrastruktur yang berkualitas**	**Indeks Infrastruktur Daerah**														
			Sasaran 3.1 **Meningkatnya Infrastruktur Publik untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan orang serta menjamin ketersediaan air untuk irigasi**	**indeks infrastruktur publik**														
11	03	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan terbangun (Satuan: %)	68,33	74,66	17.001.089.905	81,00	11.300.000.000	87,33	11.300.000.000	93,67	11.300.000.000	100,00	11.300.000.000	100,00	62.201.089.905	PUPR
11	03	18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan kabupaten terpelihara / ditingkatkan (Satuan: %)	32,39	32,51	159.491.859.563	32,63	160.000.000.000	32,75	160.000.000.000	32,87	167.644.306.900	32,99	160.000.000.000	32,99	807.136.166.463	PUPR
				persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik (Satuan: %)	50,89	52,47		54,07		55,66		57,26		58,85		58,85		
				persentase jalan dalam kota kabupaten yang memiliki trotoar dan drainase/saluran (Satuan: %)	14,82	16,93		19,03		21,13		23,23		25,34		25,34		
			Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan															PUPR
11	03	23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase alat berat dalam kondisi baik (Satuan: %)	78,79	80,00	2.670.200.000	81,08	2.345.150.000	82,05	2.345.150.000	82,93	2.345.150.000	83,72	2.345.150.000	83,72	12.050.800.000	PUPR
11	03	24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan	Persentase irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (Satuan: %)	69,85	70,25	10.428.170.510	70,64	10.126.390.000	71,04	12.526.390.000	71,43	12.926.390.000	71,83	13.126.390.000	71,83	59.133.730.510	PUPR
11	03	26	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Persentase pembangunan penampung air (embung) (Satuan: %)	92,96	94,37	1.155.966.900	95,77	1.089.350.000	97,18	1.089.350.000	98,59	1.089.350.000	100,00	1.089.350.000	100,00	5.513.366.900	PUPR
11	03	28	Program Pengendalian Banjir	persentase berkurangnya kawasan yang terkena dampak banjir (Satuan: %)	80,50	81,54	13.275.437.900	82,58	13.440.000.000	83,62	13.195.000.000	84,68	4.955.000.000	85,70	5.330.000.000	85,70	50.195.437.900	BPBD, BAPPEDA, DSTANBUN , PUPR
11	03	29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase ketersediaan Fasum di kecamatan (Satuan: %)	51,22	60,98	2.329.931.750	70,73	13.307.757.400	80,49	2.500.000.000	90,24	20.754.146.250	100,00	3.399.800.000	100,00	42.291.635.400	PUPR
11	03	30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	persentase panjang Jalan perdesaan yang terbangun (Satuan: %)	76,50	81,20	74.080.649.255	85,90	82.000.000.000	90,60	80.000.000.000	95,30	80.000.000.000	100,00	80.000.000.000	100,00	396.080.649.255	PUPR
				Persentase jembatan pedesaan yang terbangun (Satuan: %)	53,13	62,50		71,88		81,25		90,63		100,00		100,00		
11	03	33	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase layanan informasi jasa konstruksi (Satuan: %)	75,00	100,00	495.000.000	100,00	495.000.000	100,00	495.000.000	100,00	495.000.000	100,00	495.000.000	100,00	2.475.000.000	PUPR
				Persentase tenaga kerja bersertifikat (Satuan: %)	16,67	33,33		50,00		66,67		83,33		100,00		100,00		
30	01	24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya alam	persentase ketersediaan dokumen perencanaan teknis (Satuan: Dokumen)	100,00	100,00	2.602.028.167	100,00	1.702.856.000	100,00	1.771.356.000	100,00	1.773.856.000	100,00	1.773.856.000	100,00	9.623.952.167	PERKIM, PUPR
			Sasaran 3.2 **Meningkatnya Infrastruktur Dasar untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang layak**	**indeks infrastruktur dasar**														
11	04	15	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (Satuan: %)	13,67	13,58	780.000.000	13,29	1.925.000.000	13,00	1.725.000.000	12,71	1.750.000.000	12,42	780.000.000	12,42	6.960.000.000	PERKIM
11	04	16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Peningkatan Penanganan Perumahan dengan PSU Layak (Satuan: %)	16,00	12,50	2.823.009.850	25,00	2.658.000.000	37,50	2.100.000.000	50,00	2.200.000.000	62,50	2.200.000.000	62,50	11.981.009.850	PERKIM

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
11	04	21	Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh di Perkotaan (Satuan: %)	149,99	8,41	3.175.388.200	31,30	4.640.000.000	54,20	4.900.000.000	77,10	4.900.000.000	100,00	4.900.000.000	100,00	22.515.388.200	PERKIM
11	03	27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase akses air minum (Satuan: %)	64,40	64,70	19.226.339.700	65,00	18.252.410.600	65,30	18.252.410.600	65,60	18.252.410.600	65,90	18.252.410.600	65,90	92.235.982.100	DLH
				Persentase akses sanitasi (air limbah) (Satuan: %)	70,82	71,57		72,32		73,07		73,82		74,57		74,57		
			Sasaran 3.3 **Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas**	**Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas**														
12	09	16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase prasarana perhubungan dalam kondisi baik (Satuan: %)	83,00	83,00	203.186.000	83,00	392.448.500	100,00	1.132.000.000	100,00	4.079.200.000	100,00	233.186.000	100,00	6.040.020.500	DISHUB
				Persentase alat uji kendaraan bermotor dalam kondisi baik (Satuan: %)	28,57	28,57		57,14		71,43		85,71		100,00		100,00		
12	09	17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase pelayanan terminal (Satuan: %)	83,33	83,33	2.196.094.000	83,33	2.526.732.300	100,00	2.078.836.200	100,00	2.109.224.450	100,00	2.129.031.750	100,00	11.039.918.700	DISHUB
12	09	18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	persentase pembangunan prasarana perhubungan (Satuan: %)	75,00	0,00	-	100,00	3.250.000.000	100,00	600.000.000	100,00	200.000.000	100,00	200.000.000	75,00	4.250.000.000	DISHUB
12	09	19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas (Satuan: %)	100,00	100,00	3.016.162.000	100,00	4.703.556.500	100,00	5.880.740.000	100,00	5.533.593.800	100,00	3.435.639.250	100,00	22.569.691.550	DISHUB
				Persentase rambu - rambu terpasang (Satuan: %)	63,29	68,35		74,64		81,01		87,34		93,67		100,00		
12	09	20	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (Satuan: %)	34,89	37,21	1.844.821.000	39,54	338.496.000	84,16	509.580.000	44,19	450.538.000	46,52	450.538.000	49,00	3.593.973.000	DISHUB
			Misi 4. **Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup**				**7.643.517.800**		**14.991.546.400**		**14.132.206.700**		**16.893.065.100**		**12.329.542.800**		**65.989.878.800**	
			Tujuan 4. **Meningkatnya pelestarian fungsi lingkungan Hidup**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**														
			Sasaran 4.1 **Terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**														
11	03	31	Program Perencanaan Tata Ruang	persentase dokumen rencana tata ruang di susun (Satuan: %)	0,00	25,00	200.000.000	0,00	-	0,00	-	50,00	500.000.000	0,00	-	50,00	700.000.000	PUPR
11	03	32	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang (Satuan: %)	70,00	71,00	160.000.000	72,00	160.000.000	73,00	160.000.000	74,00	160.000.000	75,00	160.000.000	75,00	800.000.000	PUPR
12	05	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah (Satuan: %)	0,00	10,00	3.585.742.800	20,00	9.383.146.400	30,00	8.001.806.700	35,00	9.763.065.100	40,00	6.190.742.800	40,00	36.924.503.800	DLH
				Persentase Penanganan Sampah (Satuan: %)	0,00	13,40		15,50		17,00		18,00		19,00		19,50		
12	05	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan (Satuan: %)	197,00	20,00	1.987.375.000	20,00	3.800.000.000	20,00	4.300.000.000	20,00	4.525.000.000	20,00	4.300.000.000	20,00	18.912.375.000	DLH
				Persentase pengaduan lingkungan yang tertangani (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
12	05	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase lahan kritis yang tertangani (Satuan: %)	0,00	5,03	302.000.000	10,29	370.000.000	10,29	392.000.000	10,29	416.200.000	10,29	400.000.000	10,29	1.880.200.000	DLH
12	05	19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Persentase dokumen informasi Lingkungan Hidup (Satuan: %)	100,00	100,00	580.000.000	100,00	400.000.000	100,00	400.000.000	100,00	650.000.000	100,00	400.000.000	100,00	2.430.000.000	DLH
12	05	24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	persentase ruang terbuka hijau terkelola (Satuan: %)	3,30	3,30	828.400.000	3,30	878.400.000	3,30	878.400.000	3,30	878.800.000	3,30	878.800.000	3,30	4.342.800.000	DLH
			Misi 5. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik**				**106.041.876.650**		**100.692.058.853**		**111.376.352.350**		**114.145.934.050**		**110.426.932.600**		**542.683.154.503**	
			Tujuan 5. **Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas**	**Indeks Reformasi Birokrasi**														
			Sasaran 5.1 **Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Pelayanan Publik**	**Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)**														
				Indeks Kapasitas Fiskal Daerah														
				OPINI BPK														
				IKM														
11	05	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pelaksanaan koordinasi pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan (Satuan: %)	100,00	100,00	4.536.408.000	100,00	885.299.000	100,00	925.000.000	100,00	950.000.000	100,00	975.000.000	100,00	8.271.707.000	KESBANGPOL, SATPOL PP
				Persentase penegakan Perda (Satuan: %)	90,00	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		
				Tercapainya tingkat respontime pengaduan kebakaran (10 - 15 Menit setelah pengaduan) (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
11	05	16	Program Pembinaan, Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Presentase Penegakkan Perda (Satuan: %)	90,00	90,00	-	90,00	3.477.609.000	92,00	5.500.000.000	92,00	5.520.000.000	94,00	5.520.000.000	94,00	20.017.609.000	SATPOL PP
11	05	17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Prosentase Terlaksananya Peningkatan toleransi dan pembinaan keagamaan (Satuan: %)	100,00	100,00	5.224.789.000	100,00	5.224.789.000	100,00	5.224.789.000	100,00	5.224.789.000	100,00	5.224.789.000	100,00	26.123.945.000	KESBANGPOL, SETDA
11	05	18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Parpol yang terbina (Satuan: %)	100,00	100,00	107.724.000	100,00	107.724.000	100,00	114.300.000	100,00	117.700.000	100,00	121.240.000	100,00	568.688.000	KESBANGPOL
				Cakupan Pembinaan terhadap Ormas/LSM (Satuan: %)	44,44	44,44		46,00		48,00		50,00		52,00		54,00		
11	05	19	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response time) pengaduan kebakaran (<15 Menit Setelah Pengaduan) (Satuan: %)	80,00	100,00	-	100,00	223.500.000	100,00	240.000.000	100,00	245.000.000	100,00	250.000.000	100,00	958.500.000	SATPOL PP
11	05	20	Program Peningkatan Pemerantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Persentase penurunan penyalahgunaan miras dan prostitusi (Satuan: %)	10,00	10,00	189.425.000	0,00	89.425.000	0,00	100.000.000	0,00	110.000.000	0,00	120.000.000	10,00	608.850.000	KESBANGPOL, SATPOL PP
				persentase penurunan PEKAT (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
12	04	16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase penguasaan Tanah bagi Kepentingan Umum (Satuan: %)	0,00	15,15	5.001.300.000	24,24	3.160.000.000	33,33	4.200.000.000	42,42	4.200.000.000	51,52	2.100.000.000	51,52	18.661.300.000	PERKIM
12	04	17	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase Penyelesaian Konflik Sengketa Pertanahan (Satuan: %)	0,00	20,00	125.000.000	40,00	125.000.000	60,00	135.000.000	80,00	140.000.000	100,00	140.000.000	100,00	665.000.000	PERKIM
12	06	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Prosentase Kepemilikan dokumen kependudukan (Satuan: %)	93,96	94,00	2.152.486.000	94,50	2.521.324.000	95,00	3.114.695.000	95,50	3.426.090.000	96,00	3.768.780.000	96,00	14.983.375.000	DUKCAPIL
				Prosentase kepemilikan akta-akta catatan sipil (Satuan: %)	72,37	75,00		77,00		79,00		81,00		83,00		83,00		
				Prosentase Kesesuaian database dokumen kependudukan (Satuan: %)	88,24	89,00		90,00		91,00		92,00		93,00		93,00		
12	07	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Lembaga masyarakat yang Aktif dan Produktif (Satuan: %)	100,00	20,00	191.576.000	20,00	-	20,00	-	20,00	-	20,00	-	20,00	191.576.000	PMD
12	07	16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Persentase Terbentuk BUMDes yang Aktif (Satuan: persen)	13,00	15,00	150.000.000	17,00	295.576.000	20,00	271.576.000	23,00	291.576.000	25,00	300.576.000	100,00	1.309.304.000	PMD
				Persentase sarana usaha masyarakat yang berkembang (Satuan: persen)	13,00	15,00		17,00		20,00		23,00		25,00		100,00		
				Tersedianya informasi pembangunan melalui pelar TTG (Satuan: alat TTG)	3,00	10,00		10,00		13,00		16,00		19,00		22,00		
12	07	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	persentase pembangunan sapras perdesaan yang melibatkan masayarakat (Satuan: persen)	70,00	70,00	643.100.000	70,00	240.000.000	70,00	250.000.000	70,00	260.000.000	70,00	270.000.000	70,00	1.663.100.000	PMD
				Persentase Keswadyaan Masyarakat dalam Kegiatan pembangunan Desa (Satuan: persen)	70,00	70,00		70,00		70,00		70,00		70,00		70,00		
12	07	18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Perangkat Desa Baru yang mengikuti Pelatihan Dasar (Satuan: %)	100,00	0,00	301.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	301.000.000	PMD
12	07	19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase perempuan yang aktif dalam TP PKK (Satuan: %)	100,00	100,00	425.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	425.000.000	PMD
				Jumlah KK Pra sejahtera yang dibina (Satuan: %)	100,00	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
12	07	20	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan pengelolaan keuangan desa dengan kategori baik (Satuan: %)	100,00	100,00	467.938.750	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	467.938.750	PMD
12	07	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa	Persentase LKD yang produktif (Satuan: persen)	100,00	20,00	-	20,00	535.000.000	20,00	510.000.000	20,00	515.000.000	20,00	520.000.000	100,00	2.080.000.000	PMD
				Persentase Lembaga Perempuan yang Aktif dan Produktif (Satuan: persen)	100,00	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		100,00		
				Pengurus LKD yang terlatih di bidang kewirausahaan (Satuan: orang)	60,00	142,00		340,00		340,00		340,00		340,00		340,00		
				Jumlah Perempuan yang mendapatkan pembinaan (Satuan: TP PKK)	345,00	373,00		373,00		373,00		373,00		373,00		373,00		
12	07	22	Program Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan pengelolaan administrasi Pemerintahan Desa, dan Administrasi Keuangan yang baik dan Pengelolaan Asetnya Tertib (Satuan: persen)	100,00	100,00	-	100,00	1.172.038.750	100,00	1.164.355.000	100,00	1.264.355.000	100,00	1.087.038.750	100,00	4.687.787.500	PMD
				Jumlah desa yang mengikuti penilaian kinerja peyelenggaraan pembangunan desa/kelurahan dan pembinaan desa percontohan (Satuan: desa)	340,00	340,00		340,00		340,00		340,00		340,00		340,00		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah Aparatur Pemerintahan desa yang terlatih dalam pengelolaan aset desa (Satuan: orang)	340,00	340,00		340,00		340,00		340,00		340,00		340,00		
				Jumlah perangkat desa baru yang mengikuti pelatihan dasar manajemen pemerintahan desa (Satuan: orang)	100,00	170,00		170,00		170,00		170,00		170,00		170,00		
				Jumlah desa yang terfasilitasi penyaluran bantuan keuangan kepada desa (Satuan: desa)	340,00	340,00		340,00		340,00		340,00		340,00		340,00		
				Jumlah rancangan perdes yang terevaluasi (Satuan: perdes)	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
				Jumlah anggota BPD yang mendapatkan pelatihan (Satuan: orang)	0,00	0,00		255,00		255,00		255,00		255,00		255,00		
12	10	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase terlayaninya informasi publik (Satuan: %)	100,00	100,00	1.136.000.000	100,00	536.000.000	100,00	585.700.000	100,00	600.000.000	100,00	621.000.000	100,00	3.478.700.000	SETDA, DISKOMINFO
				Persentase terlayaninya informasi publik (Satuan: %)	100,00	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
12	10	16	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah (Satuan: %)	0,00	0,00	-	100,00	700.000.000	100,00	770.000.000	100,00	866.230.000	100,00	847.000.000	100,00	3.183.230.000	DISKOMINFO
12	10	17	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase pengelolaan aplikasi informatika pemerintah daerah (Satuan: %)	0,00	0,00	-	100,00	2.252.770.000	100,00	3.010.500.000	100,00	3.344.280.000	100,00	2.845.486.000	100,00	11.453.036.000	DISKOMINFO
12	10	18	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	Persentase tersebarluaskannya informasi penyelenggaraan pemerintah daerah (Satuan: %)	100,00	100,00	1.125.000.000	0,00	885.000.000	0,00	890.000.000	0,00	900.000.000	0,00	900.000.000	0,00	4.700.000.000	SETDA, DISKOMINFO
				Cakupan informasi tentang kegiatan SKPD dan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Lebak (Satuan: Kali)	22,00	22,00		22,00		22,00		22,00		22,00		22,00		
12	10	23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Pengelolaan sistem Aplikasi berbasis Teknologi Informatika (Satuan: %)	100,00	100,00	5.092.791.000	0,00	153.452.090	0,00	152.182.090	0,00	152.182.090	0,00	152.182.090	0,00	5.702.789.360	INSPEKTORAT, DISKOMINFO, PMD
				Persentase pemanfaatan Teknologi Informatika untuk layanan publik (Satuan: %)	100,00	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
				Persentase pemanfaatan persandian dalam pengamanan informasi pemerintah daerah (Satuan: %)	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
12	14	15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	cakupan ketersediaan data dan informasi kinerja pembangunan daerah (Satuan: %)	100,00	100,00	529.000.000	100,00	189.000.000	100,00	189.000.000	100,00	189.000.000	100,00	189.000.000	100,00	1.285.000.000	DSTANBUN , DISKOMINFO
12	14	16	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang lengkap (Satuan: %)	0,00	0,00	-	100,00	374.000.000	100,00	400.000.000	100,00	452.540.000	100,00	447.794.000	100,00	1.674.334.000	DISKOMINFO
12	15	16	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase pengamanan informasi pemerintah daerah (Satuan: %)	0,00	0,00	-	100,00	75.000.000	100,00	82.500.000	100,00	90.750.000	100,00	80.750.000	100,00	329.000.000	DISKOMINFO
12	18	15	Program Perbaikan Sistem Administrasi				398.669.600		-		-		-		-		398.669.600	DISKERPUS
12	18	16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen /Arsip Daerah	Jumlah OPD yang mengelola arsip sesuai Perbup (Satuan: Buah)	55,00	56,00	174.417.500	57,00	695.198.550	58,00	1.697.059.700	59,00	1.746.411.100	60,00	174.417.500	60,00	4.487.504.350	DISKERPUS
				Persentase Sarana dan Prasaranan Kearsipan dalam kondisi baik (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
12	18	17	Program Pemeliharan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Jumlah Dokumen Keuangan Setda yang terpelihara (Satuan: dokumen)	8,00	11,00	53.776.000	11,00	-	11,00	32.800.000	11,00	33.800.000	11,00	34.800.000	11,00	155.176.000	SETDA, DISKERPUS
18	18		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang terintegrasi dalam sistem layanan kearsipan (Satuan: %)	25,00	35,00	260.668.500	45,00	380.000.000	60,00	684.299.200	70,00	691.142.200	80,00	260.668.500	100,00	2.276.778.400	DISKERPUS
				Persentase pengelolaan kearsipan (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
30	01	15	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan daerah (Satuan: persen)	70,00	72,00	983.658.000	74,00	842.658.000	76,00	949.558.000	78,00	959.558.000	80,00	947.158.000	80,00	4.682.590.000	BAPPEDA, DISPERINDAG, PERIKANAN, DISKOP, DPPKBP3A, NAKERTRANS, DINSOS, PERKIM, PUPR

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	01	16	Program Kerjasama Pembangunan	jumlah kerjasama antar pemerintah daerah (Satuan: %)	100,00	100,00	602.000.000	100,00	602.000.000	100,00	602.000.000	100,00	602.000.000	100,00	602.000.000	100,00	3.010.000.000	SETDA
30	01	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan sinergisitas Program pembangunan Pusat dan Daerah baik jangka pendek maupun jangka menengah (Satuan: %)	100,00	100,00	7.893.334.200	100,00	7.855.493.700	100,00	7.781.410.200	100,00	7.916.729.200	100,00	7.959.707.600	100,00	39.406.674.900	CILOGRANG, CIBEBER, BAYAH, CIHARA, PANGGARANGAN, WANASALAM, MALINGPING, CIGEMBLONG, CIJAKU, BANJARSARI, CILELES, GUNUNGKENCANA, LEBAKGEDONG, CIPANAS, CIRINTEN, BOJONGMANIK, SOBANG, MUNCANG, CURUGBITUNG, MAJA, SAJIRA, LEUWIDAMAR, CIKULUR, CIMARGA, WARUNGGUNUNG, CIBADAK, KALANGANYAR, RANGKASBITUNG, BPBD, KESBANGPOL, SETWAN, SETDA, INSPEKTORAT, BKPP, BAPENDA, BPKAD, BAPPEDA, DISPERINDAG, DISNAK, DSTANBUN , PARIWISATA, PERIKANAN, DISKERPUS, DISPORA, DPMPTSP, DISKOP, DISKOMINFO, DISHUB, DPPKBP3A, PMD, DUKCAPIL, DLH, KETAPANG, NAKERTRANS, DINSOS, SATPOL PP
30	02	15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pertumbuhan pajak daerah (Satuan: %)	7,00	7,00	9.717.269.000	7,00	8.428.579.000	7,00	8.538.079.000	7,00	8.642.579.000	7,00	8.748.579.000	7,00	44.075.085.000	SETDA, BAPENDA, BPKAD
				Persentase terpenuhinya kebutuhan Tenaga Ahli Perpajakan (Satuan: %)	20,00	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		
				Persentase ketaatan wajib pajak daerah (Satuan: %)	81,00	80,05		80,10		80,30		80,50		80,70		80,90		
				Persentase Dokumen Penganggaran yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Satuan: %)	67,50	80,00		80,00		82,00		86,00		86,00		90,00		
				Persentase realisasi pendapatan dan belanja daerah (Satuan: %)	93,00	93,00		93,50		94,00		94,50		94,50		95,00		
				Persentase Laporan Keuangan yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Satuan: %)	94,00	94,00		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		
				Prosentase Jumlah Aset Yang terinventarisasi, terindentifikasi dan terdokumentasi Dengan Total Seluruh Aset Yang Dimiliki Pemerintah Kabupaten Lebak (Satuan: %)	40,00	40,00		43,00		45,00		45,00		48,00		51,00		
				jumlah dokumen standar satuan harga yang di susun (Satuan: dok)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
30	03	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat manajerial (Satuan: %)	39,61	65,36	6.783.858.300	69,81	4.857.000.000	74,63	5.632.125.700	79,45	5.860.956.700	84,27	6.165.470.800	88,95	29.299.411.500	SETWAN, BKPP, BPKAD, BAPPEDA, DISKERPUS, DISKOMINFO, DISHUB, DLH, SATPOL PP
				Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis (Satuan: %)	13,83	16,20		16,86		17,52		18,17		18,83		19,49		
30	03	17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase pejabat struktural yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial (Satuan: %)	100,00	100,00	2.122.483.400	0,00	1.595.000.000	0,00	2.426.834.000	0,00	2.419.483.400	0,00	2.469.483.400	100,00	11.033.284.200	SETDA, BKPP
				Persentase pegawai yang memiliiki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis (Satuan: %)	100,00	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		
				persentase aparatur kecamatan yang mendapatkan pembinaan (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
30	03	18	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian, Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	persentase jabatan yang terisi berdasarkan peraturan perundang-undangan (Satuan: %)	100,00	0,00	-	100,00	1.477.483.400	100,00	3.095.627.000	100,00	3.295.627.000	100,00	3.295.627.000	100,00	11.164.364.400	BKPP
				persentase ASN yang mendapat pelayanan kepegawaian tepat waktu (Satuan: %)	100,00	0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Persentase tertanganinya pelanggaran disiplin aparatur (Satuan: persen)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
30	04	15	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kajian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (Satuan: persen)	100,00	100,00	146.000.000	100,00	146.000.000	100,00	165.000.000	100,00	175.000.000	100,00	185.000.000	100,00	817.000.000	BAPPEDA
30	05	15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Audit, Reviu dan Evaluasi yang dilaksanakan sesuai PKPT dan Standar AAIPI (Satuan: persen)	100,00	100,00	4.127.662.050	100,00	4.262.875.763	100,00	4.562.554.310	100,00	5.172.236.710	100,00	5.434.207.610	100,00	23.559.536.443	INSPEKTORAT
30	05	16	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase SDM dan Sarana Pengawasan yang tersedia (Satuan: persen)	70,00	75,00	231.960.000	80,00	306.097.200	85,00	265.571.000	90,00	360.697.200	95,00	398.197.200	95,00	1.562.522.600	INSPEKTORAT
30	05	17	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase OPD yang menerapkan SPIP hasil pendampingan (Satuan: persen)	28,00	54,00	298.434.000	65,00	171.900.000	82,00	334.000.000	100,00	334.000.000	100,00	400.343.000	100,00	1.538.677.000	INSPEKTORAT
30	06	15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase indek kepuasan pelayanan kepada Anggota DPRD Kab. Lebak (Satuan: %)	85,00	90,00	21.765.076.700	100,00	22.087.130.800	95,00	21.805.076.700	100,00	21.825.076.700	100,00	21.845.076.700	100,00	109.327.437.600	SETWAN
				Rara-rata waktu fasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat kepada Anggota DPRD melalui Komisi-Komisi (Satuan: %)	87,00	90,00		100,00		95,00		100,00		100,00		100,00		
30	06	16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Terpenuhinya layanan kedinasan KDH/WKDH (Satuan: %)	100,00	100,00	655.662.000	100,00	655.662.000	100,00	716.500.000	100,00	735.000.000	100,00	735.000.000	100,00	3.497.824.000	SETDA
30	06	19	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah rencana kerja dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Satuan: Perda)	7,00	7,00	2.382.402.000	7,00	2.215.887.000	7,00	2.280.000.000	7,00	2.385.000.000	7,00	2.248.800.000	7,00	11.512.089.000	SETWAN, SETDA
				cakupan Penetapan Perda dan Perbup (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
30	06	20	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	jumlah dokumen persiapan daerah otonomi baru (Satuan: dokumen)	10,00	2,00	425.000.000	4,00	280.000.000	4,00	887.000.000	4,00	907.000.000	4,00	907.000.000	18,00	3.406.000.000	SETDA
30	06	21	Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah	Jumlah jenis administrasi daerah yang berjalan dengan baik (Satuan: dokumen)	7,00	7,00	847.000.000	7,00	947.000.000	7,00	887.000.000	7,00	907.000.000	7,00	927.000.000	7,00	4.515.000.000	SETDA
30	06	22	Program Peningkatan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase penggunaan E-Procurenment terhadap Belanja Pengadaan Barang dan jasa (Satuan: %)	100,00	100,00	3.889.397.500	100,00	3.889.397.500	100,00	4.126.000.000	100,00	4.250.000.000	100,00	4.377.500.000	100,00	20.532.295.000	SETDA
30	07	16	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Cakupan Penanggulangan Bencana (Satuan: %)	100,00	100,00	2.728.271.000	100,00	3.428.468.750	100,00	3.157.000.000	100,00	3.144.000.000	100,00	2.929.000.000	100,00	15.386.739.750	BPBD
30	07	17	Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan (Satuan: %)	100,00	100,00	12.156.339.150	100,00	12.345.720.350	100,00	12.921.260.450	100,00	12.923.144.750	100,00	12.901.260.450	100,00	63.247.725.150	CILOGRANG, CIBEBER, BAYAH, CIHARA, PANGGARANGAN, WANASALAM, MALINGPING, CIGEMBLONG, CIJAKU, BANJARSARI, CILELES, GUNUNGKENCANA, LEBAKGEDONG, CIPANAS, CIRINTEN, BOJONGMANIK, SOBANG, MUNCANG, CURUGBITUNG, MAJA, SAJIRA, LEUWIDAMAR, CIKULUR, CIMARGA, WARUNGGUNUNG, CIBADAK, KALANGANYAR, RANGKASBITUNG, SETDA
				persentase peningkatan pelayanan jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat (Satuan: %)	100,00	0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
JUMLAH							1.114.159.489.200		1.212.277.736.353		1.194.549.412.550		1.218.834.040.950		1.144.129.390.600		5.883.950.069.653	



BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kapasitas riil keuangan daerah sebagaimana telah diproyeksikan pada bab 3, yang secara lebih lengkap tersaji pada tabel 7.1 berikut.

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PERIODE : 2019-2024

KABUPATEN LEBAK

KODE	KAPASITAS RIIL / BELANJA	PROYEKSI ANGGARAN (Rp)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	KAPASITAS RIIL KEUANGAN	**1.198.967.863.000,00**	**1.263.757.231.850,00**	**1.282.930.213.858,00**	**1.278.186.079.850,00**	**1.198.312.522.850,00**	**1.280.126.977.850,00**
	BELANJA	**2.733.406.776.368,90**	**2.910.240.303.198,21**	**2.977.927.327.774,52**	**3.020.689.066.706,05**	**3.071.218.531.971,90**	**3.146.829.428.435,56**
	Belanja Tidak Langsung	**1.534.438.913.368,90**	**1.646.483.071.348,20**	**1.694.997.113.916,52**	**1.742.502.986.856,05**	**1.872.906.009.121,90**	**1.866.702.450.585,56**
	Belanja Pegawai	1.056.000.000.000,00	1.140.339.827.688,40	1.179.962.564.497,55	1.218.095.766.821,67	1.264.197.756.258,14	1.323.095.182.390,58
	Belanja Hibah	50.118.787.000	54.787.543.700,00	54.928.488.000,00	55.527.979.750,00	131.157.446.000,00	56.818.385.400,00
	Belanja Bantuan Sosial	6.221.790.000	21.370.404.500,00	21.526.449.725,00	21.690.297.000,00	21.862.336.850,00	22.042.978.000,00
	Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa	9.619.682.210	10.293.060.000,01	11.017.145.341,74	11.788.092.265,65	12.610.264.974,31	13.492.720.582,50
	Belanja Bantuan Keuangan	407.462.803.684	414.692.229.513,54	422.562.461.110,16	430.400.845.677,15	438.078.201.376,84	446.253.176.256,58
	Belanja Tidak Terduga	5.015.850.475	5.000.005.946,25	5.000.005.242,07	5.000.005.341,58	5.000.003.662,61	5.000.007.955,90
	Belanja Langsung	**1.198.967.863.000,00**	**1.263.757.231.850,00**	**1.282.930.213.858,00**	**1.278.186.079.850,00**	**1.198.312.522.850,00**	**1.280.126.977.850,00**
	Belanja Pegawai	32.521.662.262	34.279.055.464	34.799.117.148	34.670.433.862	32.503.886.347	34.723.080.168
	Belanja Barang dan Jasa	751.442.676.786	792.048.850.027	804.065.349.691	801.092.004.977	751.031.948.049	802.308.445.912
	Belanja Modal	415.461.382.952	437.911.926.969	444.555.669.363	442.911.751.676	415.234.297.195	443.584.303.620

Berdasarkan kapasitas riil keuangan daerah tersebut, Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi pembangunan Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 berjumlah 127 program yang terbagi kedalam 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar dan 8 urusan pilihan. Secara lebih lengkap program pembangunan akan diuraikan pada tabel 7.2 berikut.

Tabel 7.2
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
PERIODE : 2019-2024

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11			**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**																
11	01		**PENDIDIKAN**					269.152.190.600		268.183.434.600		269.374.664.150		273.399.525.950		273.813.258.050		1.353.923.073.350	
11	01	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini					1.155.131.000		1.155.131.000		1.212.887.550		1.212.887.550		1.220.392.750		5.956.429.850	DISPENDIKBUD
				1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (Satuan: %)	29,90	34,90		35,40		35,90		36,40		36,90		36,90		
11	01	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun					108.123.342.100		107.154.586.100		108.202.018.800		112.202.018.800		112.202.018.800		547.883.984.600	DISPENDIKBUD
				1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP (Satuan: %)	99,00	99,02		99,07		99,12		99,17		99,22		99,22		
				2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP (Satuan: %)	86,00	86,05		86,10		86,15		86,20		86,25		86,25		
				3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD (Satuan: %)	98,98	99,03		99,08		99,13		99,18		99,23		99,23		
11	01	18	Program Pendidikan Non Formal					1.591.733.000		1.591.733.000		1.656.889.300		1.661.300.600		2.009.650.000		8.511.305.900	SETDA, DISPENDIKBUD
				1	Angka Melek Huruf (AMH) (Satuan: %)	98,48	98,52		98,56		98,60		98,64		98,68		98,68		
				2	Jumlah bantuan Sarana dan Prasarana MDTA/Mebelair (Satuan: Ruang Kelas)	26,00	26,00		30,00		30,00		30,00		30,00		30,00		
11	01	20	Program Pendidikan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan					3.154.796.500		3.154.796.500		3.154.796.500		3.154.796.500		3.154.796.500		15.773.982.500	DISPENDIKBUD
				1	Persentase guru bersertifikat pendidik (Satuan: %)	77,90	78,00		78,10		78,20		78,30		78,40		78,40		
				2	Angka Kelulusan SD (Satuan: %)	98,13	98,18		98,23		98,28		98,33		98,38		98,38		
				3	Angka Kelulusan SMP (Satuan: %)	94,78	94,83		94,88		94,93		94,98		95,03		95,03		
11	01	22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan					629.468.000		629.468.000		650.352.000		670.802.500		728.680.000		3.308.770.500	DISPENDIKBUD
				1	Persentase sekolah SD berakreditasi A (Satuan: %)	4,20	7,70		11,20		14,70		18,20		21,70		21,70		
				2	Persentase sekolah SMP berakreditasi A (Satuan: %)	10,40	13,90		17,40		20,90		24,40		27,90		27,90		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	01	23	Program BOS					154.497.720.000		154.497.720.000		154.497.720.000		154.497.720.000		154.497.720.000		772.488.600.000	DISPENDIKBUD
				1	Angka Putus sekolah SD (Satuan: %)	0,22	0,20		0,19		0,18		0,17		0,16		0,16		
				2	Angka Putus sekolah SMP (Satuan: %)	0,10	0,08		0,07		0,06		0,05		0,04		0,04		
				3	Angka Melanjutkan SD ke SMP (Satuan: %)	94,77	94,84		94,89		94,94		94,99		95,04		95,04		
				4	Angka melanjutkan SMP ke SMA (Satuan: %)	86,79	86,80		86,81		86,82		86,83		86,84		86,84		
11	02		**KESEHATAN**					337.356.082.150		357.693.927.400		353.843.444.800		354.214.219.800		354.920.925.150		1.758.028.599.300	
11	02	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan					7.164.767.000		0		0		0		0		7.164.767.000	DINKES
				1	Persentase Puskesmas Terpenuhi Kebutuhan Obat Secara Tepat dan Rasional (Satuan: %)	50,00	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		
11	02	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat					19.403.855.150		95.311.725.150		95.275.222.800		95.420.997.800		92.877.433.150		398.289.234.050	DINKES
				1	Persentase keluarga sehat (Satuan: %)	11,00	35,00		42,00		44,00		47,00		49,00		49,00		
				2	Persentase puskesmas terakreditasi minimal madya (Satuan: %)	11,90	23,81		35,71		47,62		59,52		71,42		71,42		
				3	Rasio Rujukan kasus Non Spesialitik (RRNS)dari Puskesmas ke Rumah Sakit (Satuan: %)	4,76	4,75		4,74		4,73		4,72		4,71		4,71		
11	02	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat					283.250.000		0		0		0		0		283.250.000	DINKES
				1	Cakupan pembinaan PHBS di tatanan kesehatan (Satuan: %)	65,00	70,00		0,00		0,00		0,00		0,00		70,00		
11	02	21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat					5.074.975.000		0		0		0		0		5.074.975.000	DINKES
				1	Jumlah Desa ODF (Satuan: Desa)	33,00	42,00		0,00		0,00		0,00		0,00		42,00		
11	02	22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular					3.974.656.000		0		0		0		0		3.974.656.000	DINKES
				1	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular (Satuan: %)	70,00	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		
11	02	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan					9.782.270.000		0		0		0		0		9.782.270.000	DINKES
				1	Ketersediaan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar minimal ketenagaan di setiap puskesmas (Satuan: %)	10,00	10,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10,00		
11	02	24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin					180.870.000		0		0		0		0		180.870.000	SETDA
				1	Jumlah pelaksanaan sosialisasi jamsos (Satuan: kecamatan)	28,00	28,00		0,00		0,00		0,00		0,00		28,00		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	02	25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas					25.077.678.000		0		0		0		0		25.077.678.000	DINKES
				1	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (Satuan: %)	67,00	70,00		0,00		0,00		0,00		0,00		70,00		
11	02	26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-					18.967.828.000		25.500.000.000		27.500.000.000		27.500.000.000		27.500.000.000		126.967.828.000	RSUD
				1	Persentase terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (Satuan: %)	80,00	80,00		82,00		85,00		87,00		90,00		90,00		
11	02	32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak					8.924.330.000		0		0		0		0		8.924.330.000	DINKES
				1	Persentase pelayanan kesehatan keluarga (Satuan: %)	70,00	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		
11	02	33	Program Peningkatan dan Pengembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)					145.000.000.000		148.000.000.000		152.000.000.000		152.000.000.000		155.000.000.000		752.000.000.000	RSUD
				1	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap layanan RSUD (Satuan: %)	80,00	82,00		84,00		86,00		88,00		90,00		90,00		
11	02	34	Program jaminan Kesehatan Nasional					57.971.478.000		0		0		0		0		57.971.478.000	DINKES
				1	Cakupan Angka Kontak (Satuan: 0/00 (permil))	11,90	75,00		0,00		0,00		0,00		0,00		75,00		
11	02	35	Program Bantuan Operasional Kesehatan					35.550.125.000		35.550.125.000		35.550.125.000		35.550.125.000		35.550.125.000		177.750.625.000	DINKES
				1	Persentase Puskesmas yang melaksanakan manajemen sesuai standar (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
11	02	36	Program Pengembangan Kesehatan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat					0		1.545.000.000		475.000.000		550.000.000		550.000.000		3.120.000.000	DINKES
				1	Persentase Desa ODF (Satuan: %)	9,57	21,74		33,91		46,09		58,26		70,43		70,43		
				2	Cakupan pembinaan PHBS di tatanan kesehatan (Satuan: %)	65,00	70,00		75,00		80,00		85,00		90,00		90,00		
11	02	37	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit					0		1.319.160.000		1.255.000.000		1.305.000.000		1.200.000.000		5.079.160.000	DINKES
				1	Persentase pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai standar (Satuan: %)	67,00	70,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
11	02	38	Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat					0		8.924.330.000		8.988.097.000		8.988.097.000		8.988.097.000		35.888.621.000	DINKES
				1	Persentase pelayanan kesehatan keluarga sesuai standar (Satuan: %)	75,28	0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				2	Persentase balita kurang Gizi mendapat perawatan (Satuan: %)	80,00	0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
11	02	39	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan, Farmasi serta Pengawasan Obat dan Makanan					0		41.543.587.250		32.800.000.000		32.900.000.000		33.255.270.000		140.498.857.250	DINKES
				1	Persentase Puskesmas dengan sarana dan prasarana sesuai standar (Satuan: %)	48,00	0,00		60,00		67,00		69,00		71,00		71,00		
				2	Persentase Puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar (Satuan: %)	20,00	0,00		50,00		60,00		70,00		80,00		80,00		
				3	Persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai Formularium Nasional (Fornas) (Satuan: %)	91,00	0,00		93,00		94,00		95,00		96,00		96,00		
				4	Persentase puskesmas yang melaksanakan SIKDA (Satuan: %)	82,92	0,00		88,09		90,47		95,24		100,00		100,00		
11	03		**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**					300.514.645.483		275.825.601.350		265.434.776.450		284.293.229.600		259.029.576.450		1.385.097.829.333	
11	03	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan					17.001.089.905		11.300.000.000		11.300.000.000		11.300.000.000		11.300.000.000		62.201.089.905	PUPR
				1	Persentase jalan terbangun (Satuan: %)	68,33	74,66		81,00		87,33		93,67		100,00		100,00		
11	03	18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan					159.491.859.563		125.942.619.850		123.742.619.850		138.754.044.400		129.127.927.700		677.059.071.363	PUPR
				1	Persentase jalan kabupaten terpelihara / ditingkatkan (Satuan: %)	32,39	32,51		32,63		32,75		32,87		32,99		32,99		
				2	persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik (Satuan: %)	50,88	52,47		54,07		55,66		57,26		58,85		58,85		
				3	persentase jalan dalam kota kabupaten yang memiliki trotoar dan drainase/saluran (Satuan: %)	14,82	16,93		19,03		21,13		23,23		25,34		25,34		
11	03	23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan					2.670.200.000		2.345.150.000		2.345.150.000		2.345.150.000		2.345.150.000		12.050.800.000	PUPR
				1	Persentase alat berat dalam kondisi baik (Satuan: %)	78,79	80,00		81,08		82,05		82,93		83,72		83,72		
11	03	24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya					10.428.170.510		10.126.390.000		12.526.390.000		12.926.390.000		13.126.390.000		59.133.730.510	PUPR
				1	Persentase irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (Satuan: %)	69,85	70,25		70,64		71,04		71,43		71,83		71,83		
11	03	26	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya					1.155.966.900		1.089.350.000		1.089.350.000		1.089.350.000		1.089.350.000		5.513.366.900	PUPR
				1	Persentase pembangunan penampung air (embung) (Satuan: %)	92,96	94,37		95,77		97,18		98,59		100,00		100,00		
11	03	27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah					19.226.339.700		18.252.410.600		18.315.957.200		19.117.681.450		20.659.491.250		95.571.880.200	PUPR

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				1	Persentase akses air minum (Satuan: %)	64,40	64,70		65,00		65,30		65,60		65,90		65,90		
				2	Persentase akses sanitasi (air limbah) (Satuan: %)	70,82	71,57		72,32		73,07		73,82		74,57		74,57		
11	03	28	Program Pengendalian Banjir					13.275.437.900		17.925.000.000		21.075.000.000		4.955.000.000		5.330.000.000		62.560.437.900	BPBD, BAPPEDA, DSTANBUN , PUPR
				1	persentase berkurangnya kawasan yang terkena dampak banjir (Satuan: %)	80,50	81,54		82,58		83,62		84,68		85,70		85,70		
11	03	29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh					2.329.931.750		13.307.757.400		2.500.000.000		20.754.146.250		3.399.800.000		42.291.635.400	PUPR
				1	Persentase ketersediaan Fasum di kecamatan (Satuan: %)	51,22	60,98		70,73		80,49		90,24		100,00		100,00		
11	03	30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan					74.080.649.255		74.781.923.500		71.785.309.400		71.896.467.500		71.896.467.500		364.440.817.155	PUPR
				1	persentase panjang Jalan perdesaan yang terbangun (Satuan: %)	76,50	81,20		85,90		90,60		95,30		100,00		100,00		
				2	Persentase jembatan pedesaan yang terbangun (Satuan: %)	53,13	62,50		71,88		81,25		90,63		100,00		100,00		
11	03	31	Program Perencanaan Tata Ruang					200.000.000		100.000.000		100.000.000		500.000.000		100.000.000		1.000.000.000	PUPR
				1	persentase dokumen rencana tata ruang di susun (Satuan: %)	0,00	25,00		0,00		0,00		50,00		0,00		50,00		
11	03	32	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang					160.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000		800.000.000	PUPR
				1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang (Satuan: %)	70,00	71,00		72,00		73,00		74,00		75,00		75,00		
11	03	33	Program Pembinaan Jasa Konstruksi					495.000.000		495.000.000		495.000.000		495.000.000		495.000.000		2.475.000.000	PUPR
				1	Persentase layanan informasi jasa konstruksi (Satuan: %)	75,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				2	Persentase tenaga kerja bersertifikat (Satuan: %)	16,67	33,33		50,00		66,67		83,33		100,00		100,00		
11	04		**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**					6.778.398.050		9.223.000.000		8.725.000.000		8.850.000.000		7.880.000.000		41.456.398.050	
11	04	15	Program Pengembangan Perumahan					780.000.000		1.925.000.000		1.725.000.000		1.750.000.000		780.000.000		6.960.000.000	PERKIM
				1	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (Satuan: %)	13,67	13,58		13,29		13,00		12,71		12,42		12,42		
11	04	16	Program Lingkungan Sehat Perumahan					2.823.009.850		2.658.000.000		2.100.000.000		2.200.000.000		2.200.000.000		11.981.009.850	PERKIM
				2	Persentase Peningkatan Penanganan Perumahan dengan PSU Layak (Satuan: %)	16,00	12,50		25,00		37,50		50,00		62,50		62,50		
11	04	21	Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman					3.175.388.200		4.640.000.000		4.900.000.000		4.900.000.000		4.900.000.000		22.515.388.200	PERKIM
				3	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh di Perkotaan (Satuan: %)	149,99	8,41		31,30		54,20		77,10		100,00		100,00		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	05		**KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**					10.058.346.000		10.008.346.000		12.104.089.000		12.167.489.000		12.211.029.000		56.549.299.000	
11	05	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan					4.536.408.000		885.299.000		925.000.000		950.000.000		975.000.000		8.271.707.000	KESBANGPOL, SATPOL PP
				1	Cakupan pelaksanaan koordinasi pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				2	Persentase penegakan Perda (Satuan: %)	90,00	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		
				3	Tercapainya tingkat respontime pengaduan kebakaran (10 - 15 Menit setelah pengaduan) (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
11	05	16	Program Pembinaan, Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal					0		3.477.609.000		5.500.000.000		5.520.000.000		5.520.000.000		20.017.609.000	SATPOL PP
				1	Presentase Penegakkan Perda (Satuan: %)	90,00	90,00		90,00		92,00		92,00		94,00		94,00		
11	05	17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan					5.224.789.000		5.224.789.000		5.224.789.000		5.224.789.000		5.224.789.000		26.123.945.000	KESBANGPOL, SETDA
				1	Prosentase Terlaksananya Peningkatan toleransi dan pembinaan keagamaan (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
11	05	18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan					107.724.000		107.724.000		114.300.000		117.700.000		121.240.000		568.688.000	KESBANGPOL
				1	Persentase Parpol yang terbina (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				2	Cakupan Pembinaan terhadap Ormas/LSM (Satuan: %)	44,44	44,44		46,00		48,00		50,00		52,00		54,00		
11	05	19	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran					0		223.500.000		240.000.000		245.000.000		250.000.000		958.500.000	SATPOL PP
				1	Tingkat Waktu Tanggap (Response time) pengaduan kebakaran (<15 Menit Setelah Pengaduan) (Satuan: %)	80,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
11	05	20	Program Peningkatan Pemerantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)					189.425.000		89.425.000		100.000.000		110.000.000		120.000.000		608.850.000	KESBANGPOL, SATPOL PP
				1	Persentase penurunan penyalahgunaan miras dan prostitusi (Satuan: %)	10,00	10,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10,00		
				2	persentase penurunan PEKAT (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
11	06		**SOSIAL**					2.505.400.000		2.893.685.000		3.095.000.000		3.685.000.000		3.685.000.000		15.864.085.000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	06	15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya.					290.000.000		0		0		0		0		290.000.000	DINSOS
				1	Terpenuhinya sarana prasarana usaha bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), PRSE, KAT (Satuan: Klp)	10,00	10,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
				2	Terpenuhinya sarana prasarana usaha bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), PRSE, KAT (Satuan: Orang)	20,00	20,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
				2	Terpenuhinya sarana prasarana usaha bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), PRSE, KAT (Satuan: Desa)	20,00	20,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
11	06	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial					1.635.400.000		0		0		0		0		1.635.400.000	DINSOS
				1	Cakupan PMKS memperoleh Penanganan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial (Satuan: %)	100,00	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		
11	06	17	Program Pembinaan Anak Terlantar					80.000.000		0		0		0		0		80.000.000	DINSOS
				1	Jumlah anak terlantar memperoleh pendidikan formal/non formal (Satuan: Orang)	20,00	20,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
11	06	18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma					115.000.000		0		0		0		0		115.000.000	DINSOS
				1	Jumlah penyandang disabilitas dan eks trauma yang tertangani (Satuan: Orang)	20,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
				1	Jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan orang terlantar (OT) tertangani (Satuan: Orang)	45,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
11	06	20	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)					75.000.000		0		0		0		0		75.000.000	DINSOS
				1	Jumlah eks penyandang penyakit sosial (eks Napi, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) memiliki usaha (Satuan: Orang)	20,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
11	06	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial					240.000.000		0		0		0		0		240.000.000	DINSOS
				1	Persentase Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Satuan: %)	50,00	50,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
11	06	22	Program Pengelolaan Areal Pemakaman					70.000.000		0		0		0		0		70.000.000	DINSOS

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				1	Terpeliharanya Areal Pemakaman (Satuan: Lokasi)	2,00	2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
				2	Jumlah Jenazah yang diurus (Satuan: orang Non PNS)	10,00	10,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
11	06	23	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial					0		1.765.000.000		1.800.000.000		2.200.000.000		2.200.000.000		7.965.000.000	DINSOS
				1	Cakupan PMKS memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial (Satuan: %)	100,00	0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
11	06	24	Program Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial					0		1.128.685.000		1.295.000.000		1.485.000.000		1.485.000.000		5.393.685.000	DINSOS
				1	Cakupan PMKS memperoleh Penanganan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
12			**URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**																
12	01		**TENAGA KERJA**					2.247.600.000		2.650.000.000		2.247.600.000		2.247.600.000		2.247.600.000		11.640.400.000	
12	01	18	Program Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Tenaga Kerja					2.247.600.000		2.650.000.000		2.247.600.000		2.247.600.000		2.247.600.000		11.640.400.000	NAKERTRANS
				1	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Satuan: %)	13,00	15,00		17,00		19,00		21,00		23,00		23,00		
				2	Standarisasi BLK (Satuan: Kelas)	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
				3	Persentase Perusahaan yang tertib hukum ketenagakerjaan (Satuan: %)	38,20	43,20		48,20		53,20		58,20		63,20		63,20		
12	02		**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**					668.100.000		671.620.600		875.000.000		875.000.000		875.000.000		3.964.720.600	
12	02	15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan					216.800.000		0		0		0		0		216.800.000	DPPKBP3A
				1	Presentase Lembaga Pemenuhan hak Anak yang terbentuk dan aktif (Satuan: %)	75,00	80,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		
				2	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100,00	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		
12	02	16	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak					0		671.620.600		875.000.000		875.000.000		875.000.000		3.296.620.600	DPPKBP3A
				1	Presentase perempuan dalam pelaksanaan pembangunan (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				2	Cakupan Stakeholder yang mampu menyusun perencanaan & penganggaran yang responsif gender (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				3	Presentase Lembaga Pemenuhan hak Anak yang terbentuk dan aktif (Satuan: %)	75,00	80,00		85,00		90,00		95,00		100,00		100,00		
				4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
12	02	17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan					451.300.000		0		0		0		0		451.300.000	DPPKBP3A
				1	Presentase perempuan dalam pelaksanaan pembangunan (Satuan: %)	100,00	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
				2	Cakupan Stakeholder yang mampu menyusun perencanaan & penganggaran yang responsif gender (Satuan: %)	100,00	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
12	03		**KETAHANAN PANGAN**					3.134.800.000		3.831.500.000		5.514.112.000		6.266.934.400		4.500.000.000		23.247.346.400	
12	03	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan					3.134.800.000		3.831.500.000		5.514.112.000		6.266.934.400		4.500.000.000		23.247.346.400	KETAPANG
				1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Satuan: %)	73,70	79,60		83,00		86,32		89,77		93,96		96,95		
				2	Porsentase Pangan Aman (Satuan: %)	86,00	85,00		86,00		87,00		88,00		89,00		90,00		
12	04		**PERTANAHAN**					5.126.300.000		3.285.000.000		4.335.000.000		4.340.000.000		2.240.000.000		19.326.300.000	
12	04	16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah					5.001.300.000		3.160.000.000		4.200.000.000		4.200.000.000		2.100.000.000		18.661.300.000	PERKIM
				1	Persentase penguasaan Tanah bagi Kepentingan Umum (Satuan: %)	0,00	15,15		24,24		33,33		42,42		51,52		51,52		
12	04	17	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan					125.000.000		125.000.000		135.000.000		140.000.000		140.000.000		665.000.000	PERKIM
				1	Persentase Penyelesaian Konflik Sengketa Pertanahan (Satuan: %)	0,00	20,00		40,00		60,00		80,00		100,00		100,00		
12	05		**LINGKUNGAN HIDUP**					7.283.517.800		14.831.546.400		13.972.206.700		16.233.065.100		12.169.542.800		64.489.878.800	
12	05	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan					3.585.742.800		9.383.146.400		8.001.806.700		9.763.065.100		6.190.742.800		36.924.503.800	DLH
				1	Persentase Pengurangan Sampah (Satuan: %)	0,00	10,00		20,00		30,00		35,00		40,00		40,00		
				2	Persentase Penanganan Sampah (Satuan: %)	0,00	13,40		15,50		17,00		18,00		19,00		19,50		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	05	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup					1.987.375.000		3.800.000.000		4.300.000.000		4.525.000.000		4.300.000.000		18.912.375.000	DLH
				1	Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan (Satuan: %)	197,00	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		
				2	Persentase pengaduan lingkungan yang tertangani (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
12	05	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam					302.000.000		370.000.000		392.000.000		416.200.000		400.000.000		1.880.200.000	DLH
				1	Persentase lahan kritis yang tertangani (Satuan: %)	0,00	5,03		10,29		10,29		10,29		10,29		10,29		
12	05	19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup					580.000.000		400.000.000		400.000.000		650.000.000		400.000.000		2.430.000.000	DLH
				1	Persentase dokumen informasi Lingkungan Hidup (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
12	05	24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)					828.400.000		878.400.000		878.400.000		878.800.000		878.800.000		4.342.800.000	DLH
				1	persentase ruang terbuka hijau terkelola (Satuan: %)	3,30	3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		3,30		
12	06		**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**					2.152.486.000		2.521.324.000		3.114.695.000		3.426.090.000		3.768.780.000		14.983.375.000	
12	06	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan					2.152.486.000		2.521.324.000		3.114.695.000		3.426.090.000		3.768.780.000		14.983.375.000	DUKCAPIL
				1	Prosentase Kepemilikan dokumen kependudukan (Satuan: %)	93,96	94,00		94,50		95,00		95,50		96,00		96,00		
				2	Prosentase kepemilikan akta-akta catatan sipil (Satuan: %)	72,37	75,00		77,00		79,00		81,00		83,00		83,00		
				3	Prosentase Kesesuaian database dokumen kependudukan (Satuan: %)	88,24	89,00		90,00		91,00		92,00		93,00		93,00		
12	07		**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**					2.178.614.750		2.242.614.750		2.195.931.000		2.330.931.000		2.177.614.750		11.125.706.250	
12	07	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan					191.576.000		0		0		0		0		191.576.000	PMD
				1	Persentase Lembaga masyarakat yang Aktif dan Produktif (Satuan: %)	100,00	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		
12	07	16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan					150.000.000		295.576.000		271.576.000		291.576.000		300.576.000		1.309.304.000	PMD
				1	Persentase Terbentuk BUMDes yang Aktif (Satuan: persen)	13,00	15,00		17,00		20,00		23,00		25,00		100,00		
				2	Persentase sarana usaha masyarakat yang berkembang (Satuan: persen)	13,00	15,00		17,00		20,00		23,00		25,00		100,00		
				3	Tersedianya informasi pembangunan melalui gelar TTG (Satuan: alat TTG)	3,00	10,00		10,00		13,00		16,00		19,00		22,00		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	07	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa					643.100.000		240.000.000		250.000.000		260.000.000		270.000.000		1.663.100.000	PMD
				1	persentase pembangunan sapras perdesaan yang melibatkan masayarakat (Satuan: persen)	70,00	70,00		70,00		70,00		70,00		70,00		70,00		
				2	Persentase Keswadyaan Masyarakat dalam Kegiatan pembangunan Desa (Satuan: persen)	70,00	70,00		70,00		70,00		70,00		70,00		70,00		
12	07	18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa					301.000.000		0		0		0		0		301.000.000	PMD
				1	Persentase Perangkat Desa Baru yang mengikuti Pelatihan Dasar (Satuan: %)	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
12	07	19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan					425.000.000		0		0		0		0		425.000.000	PMD
				1	Persentase perempuan yang aktif dalam TP PKK (Satuan: %)	100,00	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
				2	Jumlah KK Pra sejahtera yang dibina (Satuan: %)	100,00	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
12	07	20	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa					467.938.750		0		0		0		0		467.938.750	PMD
				1	Cakupan pengelolaan keuangan desa dengan kategori baik (Satuan: %)	100,00	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
12	07	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa					0		535.000.000		510.000.000		515.000.000		520.000.000		2.080.000.000	PMD
				1	Persentase LKD yang produktif (Satuan: persen)	100,00	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		100,00		
				2	Persentase Lembaga Perempuan yang Aktif dan Produktif (Satuan: persen)	100,00	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		100,00		
				3	Pengurus LKD yang terlatih di bidang kewirausahaan (Satuan: orang)	60,00	142,00		340,00		340,00		340,00		340,00		340,00		
				4	Jumlah Perempuan yang mendapatkan pembinaan (Satuan: TP PKK)	345,00	373,00		373,00		373,00		373,00		373,00		373,00		
12	07	22	Program Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa					0		1.172.038.750		1.164.355.000		1.264.355.000		1.087.038.750		4.687.787.500	PMD
				1	Persentase Desa dengan pengelolaan administrasi Pemerintahan Desa, dan Administrasi Keuangan yang baik dan Pengelolaan Asetnya Tertib	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				2	Jumlah desa yang mengikuti penilaian kinerja peyelenggaraan pembangunan desa/kelurahan dan pembinaan desa percontohan (Satuan: desa)	340,00	340,00		340,00		340,00		340,00		340,00		340,00		
				3	Jumlah Aparatur Pemerintahan desa yang terlatih dalam pengelolaan aset desa (Satuan: orang)	340,00	340,00		340,00		340,00		340,00		340,00		340,00		
				4	Jumlah perangkat desa baru yang mengikuti pelatihan dasar manajemen pemerintahan desa (Satuan: orang)	100,00	170,00		170,00		170,00		170,00		170,00		170,00		
				5	Jumlah desa yang terfasilitasi penyaluran bantuan keuangan kepada desa (Satuan: desa)	340,00	340,00		340,00		340,00		340,00		340,00		340,00		
				6	Jumlah rancangan perdes yang terevaluasi (Satuan: perdes)	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
				7	Jumlah anggota BPD yang mendapatkan pelatihan (Satuan: orang)	0,00	0,00		255,00		255,00		255,00		255,00		255,00		
12	08		**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**					13.054.013.000		13.039.213.000		13.285.363.000		13.495.363.000		13.285.363.000		66.159.315.000	
12	08	15	Program Keluarga Berencana					12.450.413.000		0		0		0		0		12.450.413.000	DPPKBP3A
				1	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100,00	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		
				2	Persentase pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (Satuan: %)	67,57	67,55		0,00		0,00		0,00		0,00		67,55		
12	08	16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja					75.800.000		0		0		0		0		75.800.000	DPPKBP3A
				1	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa (Satuan: %)	1,36	1,36		0,00		0,00		0,00		0,00		1,36		
12	08	17	Program Pelayanan Kontrasepsi					442.800.000		0		0		0		0		442.800.000	DPPKBP3A
				1	Ratio Akseptor KB (Satuan: %)	7,13	7,25		0,00		0,00		0,00		0,00		7,25		
				2	Presentase Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (Satuan: %)	70,17	70,25		0,00		0,00		0,00		0,00		70,25		
12	08	18	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					0		13.039.213.000		13.285.363.000		13.495.363.000		13.285.363.000		53.105.302.000	DPPKBP3A
				1	Ratio Akseptor KB (Satuan: %)	7,13	7,25		7,50		8,75		9,00		9,25		9,25		
				2	Persentase pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (Satuan: %)	67,57	67,55		67,53		67,50		67,48		67,47		67,47		
				3	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa (Satuan: %)	1,36	1,36		1,46		1,55		1,65		1,80		1,80		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				4	Persentase Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun (Satuan: %)	70,17	70,25		70,50		70,70		70,90		80,10		80,10		
				5	Cakupan Anggota Bina Keluarga berKB (Satuan: Orang)	40.177,00	40.300,00		40.650,00		41.200,00		41.725,00		51.250,00		51.250,00		
				6	Jumlah Pusat Pelayanan KKBPK yang terbina & aktif (BKB, BKR, BKL) (Satuan: Kelompok)	847,00	853,00		858,00		864,00		870,00		876,00		876,00		
				7	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
12	08	19	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat					85.000.000		0		0		0		0		85.000.000	DPPKBP3A
				1	Jumlah Pusat Pelayanan KKBPK yang terbina & aktif (BKB) (Satuan: Kelompok)	379,00	381,00		0,00		0,00		0,00		0,00		381,00		
				2	Jumlah Pusat Pelayanan KKBPK yang terbina & aktif (BKR) (Satuan: Kelompok)	209,00	211,00		0,00		0,00		0,00		0,00		211,00		
				3	Jumlah Pusat Pelayanan KKBPK yang terbina & aktif (BKL) (Satuan: Kelompok)	259,00	261,00		0,00		0,00		0,00		0,00		261,00		
12	09		**PERHUBUNGAN**					7.260.263.000		11.211.233.300		10.201.156.200		12.372.556.250		6.448.395.000		47.493.603.750	
12	09	16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ					203.186.000		392.448.500		1.132.000.000		4.079.200.000		233.186.000		6.040.020.500	DISHUB
				1	Persentase prasarana perhubungan dalam kondisi baik (Satuan: %)	83,00	83,00		83,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				2	Persentase alat uji kendaraan bermotor dalam kondisi baik (Satuan: %)	28,57	28,57		57,14		71,43		85,71		100,00		100,00		
12	09	17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan					2.196.094.000		2.526.732.300		2.078.836.200		2.109.224.450		2.129.031.750		11.039.918.700	DISHUB
				1	Persentase pelayanan terminal (Satuan: %)	83,33	83,33		83,33		100,00		100,00		100,00		100,00		
12	09	18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan					0		3.250.000.000		600.000.000		200.000.000		200.000.000		4.250.000.000	DISHUB
				1	persentase pembangunan prasarana perhubungan (Satuan: %)	75,00	0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		75,00		
12	09	19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas					3.016.162.000		4.703.556.500		5.880.740.000		5.533.593.800		3.435.639.250		22.569.691.550	DISHUB
				1	Persentase Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				2	Persentase rambu - rambu terpasang (Satuan: %)	63,29	68,35		74,64		81,01		87,34		93,67		100,00		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	09	20	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor					1.844.821.000		338.496.000		509.580.000		450.538.000		450.538.000		3.593.973.000	DISHUB
				1	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (Satuan: %)	34,89	37,21		39,54		84,16		44,19		46,52		49,00		
12	10		**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**					7.353.791.000		4.527.222.090		5.408.382.090		5.862.692.090		5.365.668.090		28.517.755.360	
12	10	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa					1.136.000.000		536.000.000		585.700.000		600.000.000		621.000.000		3.478.700.000	SETDA, DISKOMINFO
				1	Persentase terlayaninya informasi publik (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				2	Persentase terlayaninya informasi publik (Satuan: %)	100,00	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
12	10	16	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik					0		700.000.000		770.000.000		866.230.000		847.000.000		3.183.230.000	DISKOMINFO
				1	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
12	10	17	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika					0		2.252.770.000		3.010.500.000		3.344.280.000		2.845.486.000		11.453.036.000	DISKOMINFO
				1	Persentase pengelolaan aplikasi informatika pemerintah daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
12	10	18	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media					1.125.000.000		885.000.000		890.000.000		900.000.000		900.000.000		4.700.000.000	SETDA, DISKOMINFO
				1	Persentase tersebarluaskannya informasi penyelenggaraan pemerintah daerah (Satuan: %)	100,00	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
				2	Cakupan informasi tentang kegiatan SKPD dan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Lebak (Satuan: Kali)	22,00	22,00		22,00		22,00		22,00		22,00		22,00		
12	10	23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi					5.092.791.000		153.452.090		152.182.090		152.182.090		152.182.090		5.702.789.360	INSPEKTORAT, DISKOMINFO, PMD
				1	Persentase Pengelolaan sistem Aplikasi berbasis Teknologi Informatika (Satuan: %)	100,00	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
				2	Persentase pemanfaatan Teknologi Informatika untuk layanan publik (Satuan: %)	100,00	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
				3	Persentase pemanfaatan persandian dalam pengamanan informasi pemerintah daerah (Satuan: %)	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
12	11		**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**					1.815.010.000		1.780.010.100		1.815.010.000		1.815.010.000		1.815.010.000		9.040.050.100	
12	11	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah					998.010.000		963.010.100		998.010.000		998.010.000		998.010.000		4.955.050.100	DISKOP
				1	Prosentase UMK yang berdaya saing (Satuan: %)	10,87	12,86		14,85		16,83		18,82		20,81		20,81		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	11	18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi					817.000.000		817.000.000		817.000.000		817.000.000		817.000.000		4.085.000.000	DISKOP
				1	Prosentase Koperasi Aktif (Satuan: %)	19,67	23,24		26,82		30,39		33,97		37,54		41,12		
12	12		**PENANAMAN MODAL**					2.413.658.000		2.735.723.700		2.928.658.000		2.953.858.000		2.928.658.000		13.960.555.700	
12	12	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi					847.500.000		1.049.200.000		953.500.000		956.700.000		953.500.000		4.760.400.000	SETDA, DPMPTSP
				1	Jumlah Investor PMA dan PMDN berskala nasional (Satuan: investor)	18,00	4,00		4,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
				2	Jumlah pameran tingkat regional dan nasional yang termonitoring dan terevaluasi (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
12	12	16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi					1.566.158.000		1.686.523.700		1.975.158.000		1.997.158.000		1.975.158.000		9.200.155.700	SETDA, DPMPTSP
				1	Jumlah nilai investasi berskala nasional(PMDN/PMA) (Satuan: Rupiah)	20,95	############		############		############		############		############		############		
				2	Jumlah termonitoring dan terevaluasi Akses Keuangan Daerah (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				3	Jumlah termonitoring dan terevaluasi penerima Kredit Usaha Rakyat (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				4	Jumlah penyelesaian Kredit Peduli Lebak (Satuan: %)	100,00	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
12	13		**KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**					6.211.000.000		8.976.000.000		8.500.000.000		11.550.000.000		6.211.000.000		41.448.000.000	
12	13	16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan					1.361.000.000		0		0		0		0		1.361.000.000	DISPORA
				1	Prosentase lembaga pemuda yang terbina (Satuan: %)	50,00	60,00		0,00		0,00		0,00		0,00		60,00		
				2	jumlah pemuda yang berprestasi di Tk. Provinsi dan nasional (Satuan: Orang)	13,00	15,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15,00		
12	13	17	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda					350.000.000		0		0		0		0		350.000.000	DISPORA
				1	Prosentase wirausaha muda baru yang memperoleh akses modal (Satuan: %)	10,00	10,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
12	13	18	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda					0		1.711.000.000		2.000.000.000		2.050.000.000		1.711.000.000		7.472.000.000	DISPORA
				1	Prosentase lembaga pemuda yang aktif (Satuan: %)	50,00	0,00		60,00		60,00		60,00		60,00		60,00		
				2	jumlah pemuda yang berprestasi di Tk. Provinsi dan nasional (Satuan: Orang)	15,00	0,00		15,00		15,00		15,00		15,00		15,00		
				3	Persentase wirausaha muda baru yang memperoleh akses modal (Satuan: %)	10,00	0,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	13	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga					3.900.000.000		6.665.000.000		4.700.000.000		7.700.000.000		3.900.000.000		26.865.000.000	DISPORA
				1	Prosentase Atlet yang berprestasi (Satuan: %)	72,00	73,00		75,00		76,00		77,00		78,00		78,00		
				2	Prosentase Cabor yang berprestasi (Satuan: %)	58,00	60,00		61,00		62,00		63,00		64,00		64,00		
12	13	21	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga					600.000.000		600.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000		600.000.000		5.400.000.000	DISPORA
				1	Prosentase Sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				2	Jumlah Sarana dan Prasarana olahraga yang terbangun (Satuan: Unit)	2,00	0,00		4,00		2,00		2,00		2,00		2,00		
12	14		**STATISTIK**					529.000.000		563.000.000		589.000.000		641.540.000		636.794.000		2.959.334.000	
12	14	15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah					529.000.000		189.000.000		189.000.000		189.000.000		189.000.000		1.285.000.000	DSTANBUN , DISKOMINFO
				1	cakupan ketersediaan data dan informasi kinerja pembangunan daerah (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
12	14	16	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral					0		374.000.000		400.000.000		452.540.000		447.794.000		1.674.334.000	DISKOMINFO
				1	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang lengkap (Satuan: %)	0,00	0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
12	15		**PERSANDIAN**					0		75.000.000		82.500.000		90.750.000		80.750.000		329.000.000	
12	15	16	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah					0		75.000.000		82.500.000		90.750.000		80.750.000		329.000.000	DISKOMINFO
				1	Persentase pengamanan informasi pemerintah daerah (Satuan: %)	0,00	0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
12	16		**KEBUDAYAAN**					2.135.581.200		2.135.581.200		2.299.581.200		2.414.560.250		2.414.560.250		11.399.864.100	
12	16	15	Program Pengembangan Nilai Budaya					265.222.000		265.222.000		365.222.000		383.483.100		383.483.100		1.662.632.200	DISPENDIKBUD
				1	persentase pelestarian adat budaya daerah (Satuan: %)	11,76	35,29		17,64		17,64		17,64		11,76		11,76		
12	16	16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya					1.286.908.200		1.286.908.200		1.350.908.200		1.418.453.600		1.418.453.600		6.761.631.800	DISPENDIKBUD
				1	Persentase cagar budaya yang dilestarikan (Satuan: %)	21,95	22,00		22,05		22,10		22,15		22,20		22,20		
12	16	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya					583.451.000		583.451.000		583.451.000		612.623.550		612.623.550		2.975.600.100	DISPENDIKBUD
				1	Persentase terpenuhinya kebutuhan event seni dan budaya daerah (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
12	17		**PERPUSTAKAAN**					986.463.800		1.570.273.000		2.196.913.900		2.086.899.500		998.430.200		7.838.980.400	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	17	21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan					986.463.800		1.570.273.000		2.196.913.900		2.086.899.500		998.430.200		7.838.980.400	DISKERPUS, DISPENDIKBUD
				1	Jumlah pengunjung perpustakaan (Satuan: Orang)	56.502,00	68.502,00		80.502,00		92.502,00		104.502,00		116.502,00		128.502,00		
				2	Jumlah Perpustakaan yang dibina (Satuan: Unit)	157,00	185,00		213,00		241,00		269,00		297,00		325,00		
				3	Cakupan TBM yang sesuai standar (Satuan: Lembaga)	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		
12	18		**KEARSIPAN**					887.531.600		1.075.198.550		2.414.158.900		2.471.353.300		469.886.000		7.318.128.350	
12	18	15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan					398.669.600		0		0		0		0		398.669.600	DISKERPUS
12	18	16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen /Arsip Daerah					174.417.500		695.198.550		1.697.059.700		1.746.411.100		174.417.500		4.487.504.350	DISKERPUS
				1	Jumlah OPD yang mengelola arsip sesuai Perbup (Satuan: Buah)	55,00	56,00		57,00		58,00		59,00		60,00		60,00		
				1	Persentase Sarana dan Prasaranan Kearsipan dalam kondisi baik (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
12	18	17	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan					53.776.000		0		32.800.000		33.800.000		34.800.000		155.176.000	SETDA, DISKERPUS
				1	Jumlah Dokumen Keuangan Setda yang terpelihara (Satuan: dokumen)	8,00	11,00		11,00		11,00		11,00		11,00		11,00		
12	18	18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi					260.668.500		380.000.000		684.299.200		691.142.200		260.668.500		2.276.778.400	DISKERPUS
				1	Persentase Perangkat Daerah yang terintegrasi dalam sistem layanan kearsipan (Satuan: %)	25,00	35,00		45,00		60,00		70,00		80,00		100,00		
				2	Persentase pengelolaan kearsipan (Satuan: %)	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
20			**URUSAN PILIHAN**																
20	01		**KELAUTAN DAN PERIKANAN**					2.290.049.950		2.270.319.000		3.742.254.000		3.985.629.000		2.290.049.950		14.578.301.900	
20	01	25	Program Peningkatan Produksi Perikanan					2.108.049.950		2.270.319.000		3.508.504.000		3.728.504.000		2.108.049.950		13.723.426.900	PERIKANAN
				1	Produksi Ikan Budidaya (Satuan: ton)	3.751,41	3.600,00		3.780,00		3.745,44		4.167,45		3.896,76		3.974,69		
				2	Produksi Ikan Tangkap (Satuan: ton)	6.019,97	6.313,66		6.376,80		6.440,56		6.504,97		6.570,02		6.635,72		
20	01	26	Program Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Hasil Produksi Perikanan					182.000.000		0		233.750.000		257.125.000		182.000.000		854.875.000	PERIKANAN
				1	Persentase peningkatan kelas kelompok perikanan (Satuan: %)	1,98	1,98		1,98		1,98		1,98		1,98		1,98		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	02		**PARIWISATA**					6.358.520.000		10.658.624.800		16.542.217.150		18.237.929.150		8.038.520.000		59.835.811.100	
20	02	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata					2.650.781.000		3.000.000.000		3.000.000.000		6.601.698.150		2.500.000.000		17.752.479.150	PARIWISATA
				1	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (Satuan: Orang)	500,00	500,00		500,00		750,00		1.000,00		1.250,00		1.250,00		
				2	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (Satuan: Orang)	749.500,00	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
20	02	16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata					3.707.739.000		5.809.858.800		10.125.554.150		7.805.450.000		3.707.739.000		31.156.340.950	PARIWISATA
				1	Cakupan peningkatan sarana prasarana objek wisata dalam kondisi baik (Satuan: %)	23,00	1,00		43,48		21,74		21,74		21,74		21,74		
				2	Jumlah Desa Wisata yang dikembangkan (Satuan: Desa)	7,00	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		
20	02	17	Program Peningkatan Daya Dukung Kelembagaan Kepariwisataan					0		1.848.766.000		3.416.663.000		3.830.781.000		1.830.781.000		10.926.991.000	PARIWISATA
				1	Persentase kelembagaan di 23 ODTW (Satuan: %)	40,00	57,00		74,00		83,00		91,00		100,00		100,00		
				2	Persentase sektor ekonomi kreatif yang berkembang (Satuan: %)	18,00	18,00		37,00		50,00		63,00		75,00		75,00		
20	03		**PERTANIAN**					23.250.028.100		71.181.249.400		45.878.645.508		32.202.236.300		21.671.830.000		194.183.989.308	
20	03	21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak					770.000.000		885.000.000		900.000.000		925.000.000		935.000.000		4.415.000.000	DISNAK
				1	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan (Satuan: %)	2,00	1,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		
20	03	22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan					1.848.506.500		2.259.389.600		3.000.000.000		3.000.000.000		2.000.000.000		12.107.896.100	DISNAK
				1	Jumlah Produksi Daging (Satuan: ton)	8.847,00	9.680,00		10.164,00		10.672,00		11.205,00		11.765,00		12.353,00		
20	03	25	Program Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian					2.120.350.000		4.341.269.000		15.000.000.000		18.870.000.000		9.370.000.000		49.701.619.000	DISNAK, DSTANBUN
				1	Pertumbuhan Nilai Produksi yang terjual (Satuan: %)	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		
				2	Pertumbuhan Nilai Produksi (Satuan: %)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
20	03	26	Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Pertanian					2.738.335.600		2.509.385.800		2.476.349.500		2.600.166.000		2.476.349.500		12.800.586.400	DISNAK, DSTANBUN
				1	Jumlah Peningkatan Kelas Kelompok : Pemula (Satuan: Kelompok)	1.628,00	1.608,00		1.588,00		1.570,00		1.152,00		1.534,00		1.535,00		
				2	Lanjut (Satuan: Kelompok)	838,00	858,00		878,00		896,00		914,00		932,00		931,00		
				3	Madya (Satuan: Kelompok)	38,00	38,00		38,00		40,00		42,00		44,00		46,00		
				4	Utama (Satuan: Kelompok)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		2,00		
20	03	27	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan					15.772.836.000		61.186.205.000		24.502.296.008		6.807.070.300		6.890.480.500		115.158.887.808	DSTANBUN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				1	Jumlah Produksi : Padi (Satuan: ton)	595.485,00	595.484,88		607.394,58		619.542,47		631.933,32		644.571,98		657.463,20		
				2	Palawija (Satuan: ton)	34.256,00	34.225,51		35.930,02		36.648,62		37.381,59		38.192,22		38.289,82		
				3	Hortikultura (Satuan: ton)	184.059,00	184.059,00		187.740,18		191.494,98		195.324,88		199.231,38		203.116,01		
				4	Perkebunan (Satuan: ton)	32.543,00	32.543,00		33.193,86		33.857,74		34.534,89		35.225,59		35.930,00		
20	04		**PERDAGANGAN**					8.761.812.250		10.491.371.000		12.276.577.000		13.345.360.450		8.597.359.000		53.472.479.700	
20	04	15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan					1.725.831.400		1.477.401.000		2.450.000.000		2.450.000.000		1.477.401.000		9.580.633.400	DISPERINDAG
				1	Prosentase Jumlah Penanganan Terhadap Pelanggaran Perdagangan (Satuan: %)	70,00	75,00		80,00		85,00		90,00		95,00		97,00		
				2	Prosentase alat UTTP yang bertanda tera sah ulang (Satuan: %)	75,00	90,00		92,00		94,00		96,00		98,00		99,00		
20	04	18	Program Peningkatan Efesien Perdagangan Dalam Negeri					7.035.980.850		9.013.970.000		9.826.577.000		10.895.360.450		7.119.958.000		43.891.846.300	DISPERINDAG
				1	Persentase sarana perdagangan yang refresentatif (Satuan: %)	15,00	20,00		25,00		30,00		35,00		40,00		40,00		
20	07		**PERINDUSTRIAN**					1.198.451.000		1.198.451.000		2.085.000.000		2.121.750.000		1.500.000.000		8.103.652.000	
20	07	16	Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah					1.198.451.000		1.198.451.000		2.085.000.000		2.121.750.000		1.500.000.000		8.103.652.000	DISPERINDAG
				1	Prosentase Industri Kecil dan Menengah yang Memiliki Standar Mutu (Satuan: %)	1,70	2,00		10,00		30,00		50,00		75,00		77,00		
20	08		**TRANSMIGRASI**					140.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000		700.000.000	
20	08	15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi					140.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000		700.000.000	NAKERTRANS
				1	Prosentase Keluarga Transmigran yang berhasil (Satuan: %)	60,00	64,00		68,00		72,00		76,00		80,00		80,00		
30			**PENUNJANG URUSAN**																
30	01		**PERENCANAAN**					12.081.020.367		13.509.151.700		13.595.468.200		13.743.287.200		13.773.865.600		66.702.793.067	
30	01	15	Program Pengembangan Data/Informasi					983.658.000		842.658.000		949.558.000		959.558.000		947.158.000		4.682.590.000	BAPPEDA, DISPERINDAG, PERIKANAN, DISKOP, DPPKBP3A, NAKERTRANS, DINSOS, PERKIM,
				1	Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan daerah (Satuan: persen)	70,00	72,00		74,00		76,00		78,00		80,00		80,00		
30	01	16	Program Kerjasama Pembangunan					602.000.000		602.000.000		602.000.000		602.000.000		602.000.000		3.010.000.000	SETDA
				1	jumlah kerjasama antar pemerintah daerah (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	01	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah					7.893.334.200		7.855.493.700		7.781.410.200		7.916.729.200		7.959.707.600		39.406.674.900	CILOGRANG, CIBEBER, BAYAH, CIHARA, PANGGARANGAN, WANASALAM, MALINGPING, CIGEMBLONG, CIJAKU, BANJARSARI, CILELES, GUNUNGKENCANA, LEBAKGEDONG, CIPANAS, CIRINTEN, BOJONGMANIK, SOBANG, MUNCANG, CURUGBITUNG, MAJA, SAJIRA, LEUWIDAMAR, CIKULUR, CIMARGA, WARUNGGUNUNG, CIBADAK, KALANGANYAR, RANGKASBITUNG, BPBD, KESBANGPOL, SETWAN, SETDA, INSPEKTORAT, BKPP, BAPENDA, BPKAD, BAPPEDA, DISPERINDAG, DISNAK, DSTANBUN , PARIWISATA, PERIKANAN, DISKERPUS, DISPORA, DPMPTSP, DISKOP, DISKOMINFO, DISHUB, DPPKBP3A, PMD, DUKCAPIL, DLH,
				1	Cakupan sinergisitas Program pembangunan Pusat dan Daerah baik jangka pendek maupun jangka menengah (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
30	01	24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya alam					2.602.028.167		4.209.000.000		4.262.500.000		4.265.000.000		4.265.000.000		19.603.528.167	PERKIM, PUPR
				1	persentase ketersediaan dokumen perencanaan teknis (Satuan: Dokumen)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
30	02		**KEUANGAN**					9.717.269.000		8.428.579.000		8.538.079.000		8.642.579.000		8.748.579.000		44.075.085.000	
30	02	15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					9.717.269.000		8.428.579.000		8.538.079.000		8.642.579.000		8.748.579.000		44.075.085.000	SETDA, BAPENDA, BPKAD
				1	Persentase pertumbuhan pajak daerah (Satuan: %)	7,00	7,00		7,00		7,00		7,00		7,00		7,00			
				2	Persentase terpenuhinya kebutuhan Tenaga Ahli Perpajakan (Satuan: %)	20,00	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00			
				3	Persentase ketaatan wajib pajak daerah (Satuan: %)	81,00	80,05		80,10		80,30		80,50		80,70		80,90			
				4	Persentase Dokumen Penganggaran yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Satuan: %)	67,50	80,00		80,00		82,00		86,00		86,00		90,00			
				5	Persentase realisasi pendapatan dan belanja daerah (Satuan: %)	93,00	93,00		93,50		94,00		94,50		94,50		95,00			
				6	Persentase Laporan Keuangan yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Satuan: %)	94,00	94,00		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00			

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				7	Prosentase Jumlah Aset Yang terinventarisasi, terindentifikasi dan terdokumentasi Dengan Total Seluruh Aset Yang Dimiliki Pemerintah Kabupaten Lebak	40,00	40,00		43,00		45,00		45,00		48,00		51,00		
				8	jumlah dokumen standar satuan harga yang di susun (Satuan: dok)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
30	03		**KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**					8.906.341.700		7.929.483.400		11.154.586.700		11.576.067.100		11.930.581.200		51.497.060.100	
30	03	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					6.783.858.300		4.857.000.000		5.632.125.700		5.860.956.700		6.165.470.800		29.299.411.500	SETWAN, BKPP, BPKAD, BAPPEDA, DISKERPUS, DISKOMINFO, DISHUB, DLH, SATPOL PP
				1	Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat manajerial (Satuan: %)	39,61	65,36		69,81		74,63		79,45		84,27		88,95		
				2	Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis (Satuan: %)	13,83	16,20		16,86		17,52		18,17		18,83		19,49		
30	03	17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					2.122.483.400		1.595.000.000		2.426.834.000		2.419.483.400		2.469.483.400		11.033.284.200	SETDA, BKPP
				1	Persentase pejabat struktural yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial (Satuan: %)	100,00	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		
				2	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis (Satuan: %)	100,00	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		
				3	persentase aparatur kecamatan yang mendapatkan pembinaan (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
30	03	18	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian, Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					0		1.477.483.400		3.095.627.000		3.295.627.000		3.295.627.000		11.164.364.400	BKPP
				1	persentase jabatan yang terisi berdasarkan peraturan perundang-undangan (Satuan: %)	100,00	0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				2	persentase ASN yang mendapat pelayanan kepegawaian tepat waktu (Satuan: %)	100,00	0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				3	Persentase tertanganinya pelanggaran disiplin aparatur (Satuan: persen)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
30	04		**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**					146.000.000		146.000.000		165.000.000		175.000.000		185.000.000		817.000.000	
30	04	15	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah					146.000.000		146.000.000		165.000.000		175.000.000		185.000.000		817.000.000	BAPPEDA
				1	Persentase hasil kajian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (Satuan: persen)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
30	05		**PENGAWASAN**					4.658.056.050		4.740.872.963		5.162.125.310		5.866.933.910		6.232.747.810		26.660.736.043	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	05	15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH					4.127.662.050		4.262.875.763		4.562.554.310		5.172.236.710		5.434.207.610		23.559.536.443	INSPEKTORAT
				1	Persentase Audit, Revieu dan Evaluasi yang dilaksanakan sesuai PKPT dan Standar AAIPI (Satuan: persen)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
30	05	16	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan					231.960.000		306.097.200		265.571.000		360.697.200		398.197.200		1.562.522.600	INSPEKTORAT
				1	Persentase SDM dan Sarana Pengawasan yang tersedia (Satuan: persen)	70,00	75,00		80,00		85,00		90,00		95,00		95,00			
30	05	17	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan					298.434.000		171.900.000		334.000.000		334.000.000		400.343.000		1.538.677.000	INSPEKTORAT
				1	Persentase OPD yang menerapkan SPIP hasil pendampingan (Satuan: persen)	28,00	54,00		65,00		82,00		100,00		100,00		100,00			
30	06		**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**					29.964.538.200		30.075.077.300		30.701.576.700		31.009.076.700		31.040.376.700		152.790.645.600	
30	06	15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah					21.765.076.700		22.087.130.800		21.805.076.700		21.825.076.700		21.845.076.700		109.327.437.600	SETWAN
				1	Persentase indek kepuasan pelayanan kepada Anggota DPRD Kab. Lebak (Satuan: %)	85,00	90,00		100,00		95,00		100,00		100,00		100,00			
				2	Rara-rata waktu fasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat kepada Anggota DPRD melalui Komisi-Komisi (Satuan: %)	87,00	90,00		100,00		95,00		100,00		100,00		100,00			
30	06	16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah					655.662.000		655.662.000		716.500.000		735.000.000		735.000.000		3.497.824.000	SETDA
				1	Persentase Terpenuhinya layanan kedinasan KDH/WKDH (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
30	06	19	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan					2.382.402.000		2.215.887.000		2.280.000.000		2.385.000.000		2.248.800.000		11.512.089.000	SETWAN, SETDA
				1	Jumlah rencana kerja dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Satuan: Perda)	7,00	7,00		7,00		7,00		7,00		7,00		7,00			
				1	cakupan Penetapan Perda dan Perbup (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
30	06	20	Program Penataan Daerah Otonomi Baru					425.000.000		280.000.000		887.000.000		907.000.000		907.000.000		3.406.000.000	SETDA
				1	jumlah dokumen persiapan daerah otonomi baru (Satuan: dokumen)	10,00	2,00		4,00		4,00		4,00		4,00		18,00			

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	06	21	Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah					847.000.000		947.000.000		887.000.000		907.000.000		927.000.000		4.515.000.000	SETDA
				1	Jumlah jenis administrasi daerah yang berjalan dengan baik (Satuan: dokumen)	7,00	7,00		7,00		7,00		7,00		7,00		7,00		
30	06	22	Program Peningkatan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa					3.889.397.500		3.889.397.500		4.126.000.000		4.250.000.000		4.377.500.000		20.532.295.000	SETDA
				1	Persentase penggunaan E-Procurenment terhadap Belanja Pengadaan Barang dan jasa (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
30	07		**FUNGSI PENUNJANG LAINNYA**					99.692.983.950		101.437.997.247		138.396.441.900		109.056.563.800		103.990.772.850		552.574.759.747	
30	07	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					61.459.894.150		62.483.964.297		64.749.553.150		65.886.850.000		63.317.383.900		317.897.645.497	CILOGRANG, CIBEBER, BAYAH, CIHARA, PANGGARANGAN, WANASALAM, MALINGPING, CIGEMBLONG, CIJAKU, BANJARSARI, CILELES, GUNUNGKENCANA, LEBAKGEDONG, CIPANAS, CIRINTEN, BOJONGMANIK, SOBANG, MUNCANG, CURUGBITUNG, MAJA, SAJIRA, LEUWIDAMAR, CIKULUR, CIMARGA, WARUNGGUNUNG, CIBADAK, KALANGANYAR, RANGKASBITUNG, BPBD, KESBANGPOL, SETWAN, SETDA, INSPEKTORAT, BKPP, BAPENDA, BPKAD, BAPPEDA, DISPERINDAG, DISNAK, DSTANBUN , PARIWISATA, PERIKANAN, DISKERPUS, DISPORA, DPMPTSP, DISKOP, DISKOMINFO, DISHUB, DPPKBP3A, PMD, DUKCAPIL, DLH,
				1	Cakupan penyelenggaraan administrasi perkantoran (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
30	07	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					15.072.506.300		14.335.529.250		48.362.138.800		17.826.036.800		15.555.047.000		111.151.258.150	CILOGRANG, CIBEBER, BAYAH, CIHARA, PANGGARANGAN, WANASALAM, MALINGPING, CIGEMBLONG, CIJAKU, BANJARSARI, CILELES, GUNUNGKENCANA, LEBAKGEDONG, CIPANAS, CIRINTEN, BOJONGMANIK, SOBANG, MUNCANG, CURUGBITUNG, MAJA, SAJIRA, LEUWIDAMAR, CIKULUR, CIMARGA, WARUNGGUNUNG, CIBADAK, KALANGANYAR, RANGKASBITUNG, BPBD, KESBANGPOL, SETWAN, SETDA, INSPEKTORAT, BKPP, BAPENDA, BPKAD, BAPPEDA, DISPERINDAG, DISNAK, DSTANBUN , PARIWISATA, PERIKANAN, DISKERPUS, DISPORA, DPMPTSP, DISKOP, DISKOMINFO, DISHUB, DPPKBP3A, PMD, DUKCAPIL, DLH,

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				1	Persentase Terpenuhinya kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur dalam kondisi baik (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
30	07	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					941.290.000		952.500.000		1.017.500.000		1.059.500.000		1.101.500.000		5.072.290.000	SETWAN, SETDA, BAPENDA, SATPOL PP
				1	persentase pakaian dinas penunjang kebutuhan operasional POL-PP (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
30	07	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					7.334.683.350		7.891.814.600		8.188.989.500		8.217.032.250		8.186.581.500		39.819.101.200	CILOGRANG, CIBEBER, BAYAH, CIHARA, PANGGARANGAN, WANASALAM, MALINGPING, CIGEMBLONG, CIJAKU, BANJARSARI, CILELES, GUNUNGKENCANA, LEBAKGEDONG, CIPANAS, CIRINTEN, BOJONGMANIK, SOBANG, MUNCANG, CURUGBITUNG, MAJA, SAJIRA, LEUWIDAMAR, CIKULUR, CIMARGA, WARUNGGUNUNG, CIBADAK, KALANGANYAR, RANGKASBITUNG, BPBD, KESBANGPOL, SETWAN, SETDA, INSPEKTORAT, BKPP, BAPENDA, BPKAD, BAPPEDA, DISPERINDAG, DISNAK, DSTANBUN , PARIWISATA, PERIKANAN, DISKERPUS, DISPORA, DPMPTSP, DISKOP, DISKOMINFO, DISHUB, DPPKBP3A, PMD, DUKCAPIL, DLH,
				1	Persentase capaian kinerja dan Keuangan Daerah (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
30	07	16	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam					2.728.271.000		3.428.468.750		3.157.000.000		3.144.000.000		2.929.000.000		15.386.739.750	BPBD
				1	Cakupan Penanggulangan Bencana (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
30	07	17	Program Penyelenggaraan Pemerintahan					12.156.339.150		12.345.720.350		12.921.260.450		12.923.144.750		12.901.260.450		63.247.725.150	CILOGRANG, CIBEBER, BAYAH, CIHARA, PANGGARANGAN, WANASALAM, MALINGPING, CIGEMBLONG, CIJAKU, BANJARSARI, CILELES, GUNUNGKENCANA, LEBAKGEDONG, CIPANAS, CIRINTEN, BOJONGMANIK, SOBANG, MUNCANG, CURUGBITUNG, MAJA, SAJIRA, LEUWIDAMAR, CIKULUR, CIMARGA, WARUNGGUNUNG, CIBADAK,
				1	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan (Satuan: %)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				2	persentase peningkatan pelayanan jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat (Satuan: %)	100,00	0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
JUMLAH								1.198.967.863.000		1.263.757.231.850		1.282.930.213.858		1.278.186.079.850		1.198.312.522.850		6.222.153.911.408	



BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan

Penentuan Indikator Kinerja Daerah dibuat untuk menjadi panduan bagi kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam menjalankan program-programnya. Dengan demikian indikator kinerja daerah merupakan akumulasi kinerja dari Perangkat Daerah. Adapun indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 8.1

Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan

Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024

NO	INDIKATOR	Pemerintah Daerah	TARGET TAHUN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Kab.Lebak	64,03	64,51	64,99	65,43	65,99	66,46
		Prov.Banten	72.20	72.64	73.11	73.59	-	-
2.	Tingkat Kemiskinan	Kab.Lebak	8.23	8.071	7.74	7.58	7.41	7.24
		Prov.Banten	5.00	4.87	4.74	4.60	-	-
3.	Gini Ratio	Kab.Lebak	< 0,34	< 0,34	< 0,34	< 0,34	< 0,34	< 0,34
		Prov.Banten	0.39	0.38	0.37	0.37	-	-
4.	PDRB Perkapita	Kab.Lebak	22,387,056	23,985,666	25,575,618	27,190,303	28,729,861	30,236,317
		Prov.Banten	-	-	-	-	-	-
5.	LPE	Kab.Lebak	5.36	5.55	5.74	5.92	6.11	6.30
		Prov.Banten	6.20	6.40	6.70	7.00	-	-
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Kab.Lebak	7.6	7.5	7.4	7.3	7.2	7.1
		Prov.Banten	8.20	7.95	7.68	7.40	-	-

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Lebak

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	64,03	64,51	64,99	65,43	65,99	66,46
2	Indeks Pendidikan	0,542	0,546	0,550	0,554	0,558	0,562
3	Indeks Kesehatan	0,701	0,705	0,709	0,713	0,717	0,721
4	Tingkat Kemiskinan	8.23	8.071	7.74	7.58	7.41	7.24
5	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,52%	0,45%	0,38%	0,33%	0,30%	0,28%
6	Indeks Pembangunan Kepemudaan	45,65	46,15	46,65	47,15	47,65	48,15
7	Indeks Pembangunan Gender	78,67	78,78	78,89	79	79,11	79,22
8	Gini Ratio	< 0,34	< 0,34	< 0,34	< 0,34	< 0,34	< 0,34
9	PDRB Perkapita	22,387,056	23,985,666	25,575,618	27,190,303	28,729,861	30,236,317
10	LPE	5.36	5.55	5.74	5.92	6.11	6.30
11	Daya Beli	8,638,045.03	8,783,356.77	8,910,357.88	9,031,930.06	9,182,985.40	9,322,021.09
12	Indeks Williamson	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4
13	Tingkat Pengangguran Terbuka	7.6	7.5	7.4	7.3	7.2	7.1

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
14	Kontribusi Sektor Pariwisata pada PDRB	5%	6%	7%	8%	9%	10%
15	Indeks Infrastruktur Daerah	69.24	70.26	70.99	71.73	72.43	73.15
16	indeks infrastruktur public	68.86	69.88	70.61	71.34	72.04	72.76
17	indeks infrastruktur dasar	75.35%	75.92%	76.48%	77.05%	77.62%	78.18%
18	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	4,03%	4,20%	4,38%	4,58%	4,80%	5,04%
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66.5	66.83	67.16	67.49	67.98	68.31
20	Indeks Reformasi Birokrasi	65	67	70	72	75	78
21	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	75	80	82	85	90	92
22	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	1,86	1,96	2,06	2,16	2,26	2,36
23	OPINI BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
24	IKM	83	85	86	87	88,5	88,5

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

TABEL PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

PERIODE : 2019-2024

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**							
1	**Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**							
1101	**PENDIDIKAN**							
1	Indeks Pendidikan (Satuan: Poin)	0,538	0,542	0,546	0,550	0,554	0,558	0,558
1102	**KESEHATAN**							
1	Indeks Kesehatan (Satuan: Poin)	0,70	0,70	0,70	0,71	0,71	0,72	0,72
1103	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							
1	indeks infrastruktur dasar (Satuan: %)	74,86	75,35	75,92	76,48	77,05	77,62	77,62
1	Persentase akses air minum (Satuan: %)	64,40	64,70	65,00	65,30	65,60	65,90	65,90
1	Persentase akses sanitasi (air limbah) (Satuan: %)	70,82	71,57	72,32	73,07	73,82	74,57	74,57
1201	**TENAGA KERJA**							
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (Satuan: %)	7,70	7,60	7,50	7,40	7,30	7,20	7,20
1202	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							
1	Indeks Pembangunan Gender (Satuan: Poin)	78,56	78,67	78,78	78,89	79,00	79,11	79,11
1208	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (Satuan: %)	0,60	0,52	0,45	0,38	0,33	0,30	0,30
1211	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**							
1	Daya Beli (Satuan: Rupiah)	8.503.787,00	8.638.045,00	8.783.356,00	8.910.357,00	9.031.930,00	9.182.985,00	9.182.985,00
2002	**PARIWISATA**							
1	Kontribusi Sektor Pariwisata pada PDRB (Satuan: %)	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	9,00
3006	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**							
1	PDRB Perkapita (Satuan: Juta (Rupiah))	21,12	22,39	23,98	25,57	27,19	28,73	28,73
1	Indeks Williamson (Satuan: Indeks)	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	**Fokus Kesejahteraan Sosial**							
1101	**PENDIDIKAN**							
1	Angka Putus sekolah SD (Satuan: %)	0,22	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16	0,16
1	Angka Melek Huruf (AMH) (Satuan: %)	98,48	98,52	98,56	98,60	98,64	98,68	98,68
1	Jumlah bantuan Sarana dan Prasarana MDTA/Mebelair (Satuan: Ruang Kelas)	26,00	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
1	Angka Putus sekolah SMP (Satuan: %)	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	0,04
1	Angka Melanjutkan SD ke SMP (Satuan: %)	94,77	94,84	94,89	94,94	94,99	95,04	95,04
1	Angka Kelulusan SMP (Satuan: %)	94,78	94,83	94,88	94,93	94,98	95,03	95,03
1102	**KESEHATAN**							
1	Jumlah Desa ODF (Satuan: Desa)	33,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
1	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap layanan RSUD (Satuan: %)	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00	90,00
1	Persentase Desa ODF (Satuan: %)	9,57	21,74	33,91	46,09	58,26	70,43	70,43
1	Persentase keluarga sehat (Satuan: %)	11,00	35,00	42,00	44,00	47,00	49,00	49,00
1	Jumlah pelaksanaan sosialisasi jamsos (Satuan: kecamatan)	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
1	Cakupan Angka Kontak (Satuan: 0/00 (permil))	11,90	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1106	**SOSIAL**							
1	Tingkat Kemiskinan (Satuan: %)	8,41	8,23	8,07	7,74	7,58	7,41	7,41
1203	**KETAHANAN PANGAN**							
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Satuan: %)	73,70	79,60	83,00	86,32	89,77	93,96	96,95
3	**Fokus Seni Budaya dan Olahraga**							
1213	**KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**							
1	Indeks Pembangunan Kepemudaan (Satuan: Poin)	45,15	45,65	46,15	46,65	47,15	47,65	47,65
1	Prosentase wirausaha muda baru yang memperoleh akses modal (Satuan: %)	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**ASPEK PELAYANAN UMUM**							
1	**Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**							
1101	**PENDIDIKAN**							
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (Satuan: %)	29,90	34,90	35,40	35,90	36,40	36,90	36,90

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Persentase guru bersertifikat pendidik (Satuan: %)	77,90	78,00	78,10	78,20	78,30	78,40	78,40
2	Persentase sekolah SD berakreditasi A (Satuan: %)	4,20	7,70	11,20	14,70	18,20	21,70	21,70
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP (Satuan: %)	99,00	99,02	99,07	99,12	99,17	99,22	99,22
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP (Satuan: %)	86,00	86,05	86,10	86,15	86,20	86,25	86,25
2	Angka Kelulusan SD (Satuan: %)	98,13	98,18	98,23	98,28	98,33	98,38	98,38
2	Persentase sekolah SMP berakreditasi A (Satuan: %)	10,40	13,90	17,40	20,90	24,40	27,90	27,90
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD (Satuan: %)	98,98	99,03	99,08	99,13	99,18	99,23	99,23
2	Angka melanjutkan SMP ke SMA (Satuan: %)	86,79	86,80	86,81	86,82	86,83	86,84	86,84
1102	**KESEHATAN**							
2	Cakupan pembinaan PHBS di tatanan kesehatan (Satuan: %)	65,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2	Ketersediaan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar minimal ketenagaan di setiap puskesmas (Satuan: %)	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2	Persentase terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (Satuan: %)	80,00	80,00	82,00	85,00	87,00	90,00	90,00
2	Persentase Puskesmas yang melaksanakan manajemen sesuai standar (Satuan: %)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai standar (Satuan: %)	67,00	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Puskesmas Terpenuhi Kebutuhan Obat Secara Tepat dan Rasional (Satuan: %)	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular (Satuan: %)	70,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (Satuan: %)	67,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2	Persentase pelayanan kesehatan keluarga (Satuan: %)	70,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2	Persentase pelayanan kesehatan keluarga sesuai standar (Satuan: %)	75,28	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Puskesmas dengan sarana dan prasarana sesuai standar (Satuan: %)	48,00	0,00	60,00	67,00	69,00	71,00	71,00
2	Persentase puskesmas terakreditasi minimal madya (Satuan: %)	11,90	23,81	35,71	47,62	59,52	71,42	71,42
2	Persentase balita kurang Gizi mendapat perawatan (Satuan: %)	80,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar (Satuan: %)	20,00	0,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Cakupan pembinaan PHBS di tatanan kesehatan (Satuan: %)	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
2	Rasio Rujukan kasus Non Spesialitik (RRNS)dari Puskesmas ke Rumah Sakit (Satuan: %)	4,76	4,75	4,74	4,73	4,72	4,71	4,71
2	Persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai Formularium Nasional (Fornas) (Satuan: %)	91,00	0,00	93,00	94,00	95,00	96,00	96,00
2	Persentase puskesmas yang melaksanakan SIKDA (Satuan: %)	82,92	0,00	88,09	90,47	95,24	100,00	100,00
1103	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							
2	persentase dokumen rencana tata ruang di susun (Satuan: %)	0,00	25,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
2	Persentase alat berat dalam kondisi baik (Satuan: %)	78,79	80,00	81,08	82,05	82,93	83,72	83,72
2	Persentase pembangunan penampung air (embung) (Satuan: %)	92,96	94,37	95,77	97,18	98,59	100,00	100,00
2	Persentase ketersediaan Fasum di kecamatan (Satuan: %)	51,22	60,98	70,73	80,49	90,24	100,00	100,00
2	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang (Satuan: %)	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	75,00
2	Persentase jalan kabupaten terpelihara / ditingkatkan (Satuan: %)	32,39	32,51	32,63	32,75	32,87	32,99	32,99
2	Persentase irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (Satuan: %)	69,85	70,25	70,64	71,04	71,43	71,83	71,83
2	persentase berkurangnya kawasan yang terkena dampak banjir (Satuan: %)	80,50	81,54	82,58	83,62	84,68	85,70	85,70
1104	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							
2	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (Satuan: %)	13,67	13,58	13,29	13,00	12,71	12,42	12,42
2	Persentase Peningkatan Penanganan Perumahan dengan PSU Layak (Satuan: %)	16,00	12,50	25,00	37,50	50,00	62,50	62,50
2	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh di Perkotaan (Satuan: %)	149,99	8,41	31,30	54,20	77,10	100,00	100,00
1105	**KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							
2	Persentase Parpol yang terbina (Satuan: %)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Tingkat Waktu Tanggap (Response time) pengaduan kebakaran (<15 Menit Setelah Pengaduan) (Satuan: %)	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Prosentase Terlaksananya Peningkatan toleransi dan pembinaan keagamaan (Satuan: %)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Cakupan Pembinaan terhadap Ormas/LSM (Satuan: %)	44,44	44,44	46,00	48,00	50,00	52,00	54,00
1106	**SOSIAL**							
2	Jumlah eks penyandang penyakit sosial (eks Napi, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) memiliki usaha (Satuan: Orang)	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Terpeliharanya Areal Pemakaman (Satuan: Lokasi)	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cakupan PMKS memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial (Satuan: %)	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Cakupan PMKS memperoleh Penanganan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial (Satuan: %)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2	Jumlah penyandang disabilitas dan eks trauma yang tertangani (Satuan: Orang)	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan orang terlantar (OT) tertangani (Satuan: Orang)	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Persentase Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Satuan: %)	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cakupan PMKS memperoleh Penanganan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial (Satuan: %)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Terpenuhinya sarana prasarana usaha bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), PRSE, KAT (Satuan: Klp)	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Jumlah anak terlantar memperoleh pendidikan formal/non formal (Satuan: Orang)	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Terpenuhinya sarana prasarana usaha bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), PRSE, KAT (Satuan: Orang)	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Jumlah Jenazah yang diurus (Satuan: orang Non PNS)	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Terpenuhinya sarana prasarana usaha bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), PRSE, KAT (Satuan: Desa)	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**							
1201	**TENAGA KERJA**							
2	Standarisasi BLK (Satuan: Kelas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1202	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							
2	Cakupan Stakeholder yang mampu menyusun perencanaan & penganggaran yang responsif gender (Satuan: %)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (Satuan: %)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (Satuan: %)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1203	**KETAHANAN PANGAN**							
2	Porsentase Pangan Aman (Satuan: %)	86,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00
1204	**PERTANAHAN**							
2	Persentase Penyelesaian Konflik Sengketa Pertanahan (Satuan: %)	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00
1205	**LINGKUNGAN HIDUP**							
2	Persentase dokumen informasi Lingkungan Hidup (Satuan: %)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Pengurangan Sampah (Satuan: %)	0,00	10,00	20,00	30,00	35,00	40,00	40,00
2	Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan (Satuan: %)	197,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
2	Persentase lahan kritis yang tertangani (Satuan: %)	0,00	5,03	10,29	10,29	10,29	10,29	10,29
2	persentase ruang terbuka hijau terkelola (Satuan: %)	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
2	Persentase Penanganan Sampah (Satuan: %)	0,00	13,40	15,50	17,00	18,00	19,00	19,50
2	Persentase pengaduan lingkungan yang tertangani (Satuan: %)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1206	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							
2	Prosentase Kepemilikan dokumen kependudukan (Satuan: %)	93,96	94,00	94,50	95,00	95,50	96,00	96,00
2	Prosentase kepemilikan akta-akta catatan sipil (Satuan: %)	72,37	75,00	77,00	79,00	81,00	83,00	83,00
2	Prosentase Kesesuaian database dokumen kependudukan (Satuan: %)	88,24	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00	93,00
1207	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Persentase Desa dengan pengelolaan administrasi Pemerintahan Desa, dan Administrasi Keuangan yang baik dan Pengelolaan Asetnya Tertib (Satuan: persen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Terbentuk BUMDes yang Aktif (Satuan: persen)	13,00	15,00	17,00	20,00	23,00	25,00	100,00
2	persentase pembangunan sapras perdesaan yang melibatkan masayarakat (Satuan: persen)	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
2	Persentase LKD yang produktif (Satuan: persen)	100,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
2	Persentase sarana usaha masyarakat yang berkembang (Satuan: persen)	13,00	15,00	17,00	20,00	23,00	25,00	100,00
2	Persentase Keswadyaan Masyarakat dalam Kegiatan pembangunan Desa (Satuan: persen)	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
2	Persentase Lembaga Perempuan yang Aktif dan Produktif (Satuan: persen)	100,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
2	Jumlah Perempuan yang mendapatkan pembinaan (Satuan: TP PKK)	345,00	373,00	373,00	373,00	373,00	373,00	373,00
1208	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							
2	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (Satuan: %)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2	Persentase pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (Satuan: %)	67,57	67,55	0,00	0,00	0,00	0,00	67,55
2	Jumlah Pusat Pelayanan KKBPK yang terbina & aktif (BKR) (Satuan: Kelompok)	209,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00
2	Persentase pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (Satuan: %)	67,57	67,55	67,53	67,50	67,48	67,47	67,47
2	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa (Satuan: %)	1,36	1,36	1,46	1,55	1,65	1,80	1,80
2	Jumlah Pusat Pelayanan KKBPK yang terbina & aktif (BKL) (Satuan: Kelompok)	259,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
2	Persentase Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun (Satuan: %)	70,17	70,25	70,50	70,70	70,90	80,10	80,10
2	Cakupan Anggota Bina Keluarga berKB (Satuan: Orang)	40.177,00	40.300,00	40.650,00	41.200,00	41.725,00	51.250,00	51.250,00
2	Jumlah Pusat Pelayanan KKBPK yang terbina & aktif (BKB, BKR, BKL) (Satuan: Kelompok)	847,00	853,00	858,00	864,00	870,00	876,00	876,00
1209	**PERHUBUNGAN**							
2	Persentase prasarana perhubungan dalam kondisi baik (Satuan: %)	83,00	83,00	83,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	persentase pembangunan prasarana perhubungan (Satuan: %)	75,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	75,00
2	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (Satuan: %)	34,89	37,21	39,54	84,16	44,19	46,52	49,00
2	Persentase pelayanan terminal (Satuan: %)	83,33	83,33	83,33	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas (Satuan: %)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1211	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**							
2	Prosentase Koperasi Aktif (Satuan: %)	19,67	23,24	26,82	30,39	33,97	37,54	41,12
2	Prosentase UMK yang berdaya saing (Satuan: %)	10,87	12,86	14,85	16,83	18,82	20,81	20,81
1216	**KEBUDAYAAN**							
2	Persentase cagar budaya yang dilestarikan (Satuan: %)	21,95	22,00	22,05	22,10	22,15	22,20	22,20
2	persentase pelestarian adat budaya daerah (Satuan: %)	11,76	35,29	17,64	17,64	17,64	11,76	11,76
2	Persentase terpenuhinya kebutuhan event seni dan budaya daerah (Satuan: %)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1217	**PERPUSTAKAAN**							
2	Jumlah pengunjung perpustakaan (Satuan: Orang)	56.502,00	68.502,00	80.502,00	92.502,00	104.502,00	116.502,00	128.502,00
2	Jumlah Perpustakaan yang dibina (Satuan: Unit)	157,00	185,00	213,00	241,00	269,00	297,00	325,00
1218	**KEARSIPAN**							
2	Jumlah OPD yang mengelola arsip sesuai Perbup (Satuan: Buah)	55,00	56,00	57,00	58,00	59,00	60,00	60,00
2	Jumlah Dokumen Keuangan Setda yang terpelihara (Satuan: dokumen)	8,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
2	Persentase Sarana dan Prasaranan Kearsipan dalam kondisi baik (Satuan: %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Persentase Perangkat Daerah yang terintegrasi dalam sistem layanan kearsipan (Satuan: %)	25,00	35,00	45,00	60,00	70,00	80,00	100,00
2	Persentase pengelolaan kearsipan (Satuan: %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan**							
1205	**LINGKUNGAN HIDUP**							
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Satuan: Indeks)	66,01	66,50	66,83	67,16	67,49	67,98	67,98
1209	**PERHUBUNGAN**							

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas (Satuan: %)	-24,17	4,03	4,20	4,38	4,58	4,80	4,80
1213	**KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**							
2	Prosentase Atlet yang berprestasi (Satuan: %)	72,00	73,00	75,00	76,00	77,00	78,00	78,00
2	Prosentase Sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik (Satuan: %)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Prosentase lembaga pemuda yang terbina (Satuan: %)	50,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2	Prosentase lembaga pemuda yang aktif (Satuan: %)	50,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
2	jumlah pemuda yang berprestasi di Tk. Provinsi dan nasional (Satuan: Orang)	13,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
2	jumlah pemuda yang berprestasi di Tk. Provinsi dan nasional (Satuan: Orang)	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
2	Prosentase Cabor yang berprestasi (Satuan: %)	58,00	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00	64,00
2	Jumlah Sarana dan Prasarana olahraga yang terbangun (Satuan: Unit)	2,00	0,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2	Persentase wirausaha muda baru yang memperoleh akses modal (Satuan: %)	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2001	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**							
2	Persentase peningkatan kelas kelompok perikanan (Satuan: %)	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
2003	**PERTANIAN**							
2	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan (Satuan: %)	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2	Jumlah Peningkatan Kelas Kelompok : Pemula (Satuan: Kelompok)	1.628,00	1.608,00	1.588,00	1.570,00	1.152,00	1.534,00	1.535,00
2	Lanjut (Satuan: Kelompok)	838,00	858,00	878,00	896,00	914,00	932,00	931,00
2	Madya (Satuan: Kelompok)	38,00	38,00	38,00	40,00	42,00	44,00	46,00
2	Utama (Satuan: Kelompok)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
2004	**PERDAGANGAN**							
2	Prosentase Jumlah Penanganan Terhadap Pelanggaran Perdagangan (Satuan: %)	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	97,00
2	Prosentase alat UTTP yang bertanda tera sah ulang (Satuan: %)	75,00	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00	99,00
2007	**PERINDUSTRIAN**							

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Prosentase Industri Kecil dan Menengah yang Memiliki Standar Mutu (Satuan: %)	1,70	2,00	10,00	30,00	50,00	75,00	77,00
2008	**TRANSMIGRASI**							
2	Prosentase Keluarga Transmigran yang berhasil (Satuan: %)	60,00	64,00	68,00	72,00	76,00	80,00	80,00
4	**Fokus Layanan Unsur Penunjang Urusan Pemerintah**							
3001	**PERENCANAAN**							
2	Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan daerah (Satuan: persen)	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
2	Cakupan sinergisitas Program pembangunan Pusat dan Daerah baik jangka pendek maupun jangka menengah (Satuan: %)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	jumlah kerjasama antar pemerintah daerah (Satuan: %)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3002	**KEUANGAN**							
2	Persentase pertumbuhan pajak daerah (Satuan: %)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
2	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (Satuan: %)	1,86	1,96	2,06	2,16	2,26	2,36	2,36
2	Persentase terpenuhinya kebutuhan Tenaga Ahli Perpajakan (Satuan: %)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
2	OPINI BPK (Satuan: Predikat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Persentase ketaatan wajib pajak daerah (Satuan: %)	81,00	80,05	80,10	80,30	80,50	80,70	80,90
2	Persentase Dokumen Penganggaran yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Satuan: %)	67,50	80,00	80,00	82,00	86,00	86,00	90,00
2	Persentase realisasi pendapatan dan belanja daerah (Satuan: %)	93,00	93,00	93,50	94,00	94,50	94,50	95,00
2	Persentase Laporan Keuangan yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Satuan: %)	94,00	94,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
2	Prosentase Jumlah Aset Yang terinventarisasi, terindentifikasi dan terdokumentasi Dengan Total Seluruh Aset Yang Dimiliki Pemerintah Kabupaten Lebak (Satuan: %)	40,00	40,00	43,00	45,00	45,00	48,00	51,00
2	jumlah dokumen standar satuan harga yang di susun (Satuan: dok)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3003	**KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat manajerial (Satuan: %)	39,61	65,36	69,81	74,63	79,45	84,27	88,95
2	persentase jabatan yang terisi berdasarkan peraturan perundang-undangan (Satuan: %)	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis (Satuan: %)	13,83	16,20	16,86	17,52	18,17	18,83	19,49
3004	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							
2	Persentase hasil kajian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (Satuan: persen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3005	**PENGAWASAN**							
2	Persentase Audit, Revieu dan Evaluasi yang dilaksanakan sesuai PKPT dan Standar AAIPI (Satuan: persen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase OPD yang menerapkan SPIP hasil pendampingan (Satuan: persen)	28,00	54,00	65,00	82,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase SDM dan Sarana Pengawasan yang tersedia (Satuan: persen)	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00
2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) (Satuan: Predikat)	70,00	75,00	80,00	82,00	85,00	90,00	90,00
3006	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**							
2	Jumlah rencana kerja dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Satuan: Perda)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
2	Jumlah jenis administrasi daerah yang berjalan dengan baik (Satuan: dokumen)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
2	Persentase indek kepuasan pelayanan kepada Anggota DPRD Kab. Lebak (Satuan: %)	85,00	90,00	100,00	95,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Terpenuhinya layanan kedinasan KDH/WKDH (Satuan: %)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	cakupan Penetapan Perda dan Perbup (Satuan: %)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase penggunaan E-Procurenment terhadap Belanja Pengadaan Barang dan jasa (Satuan: %)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Rara-rata waktu fasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat kepada Anggota DPRD melalui Komisi-Komisi (Satuan: %)	87,00	90,00	100,00	95,00	100,00	100,00	100,00
3007	**FUNGSI PENUNJANG LAINNYA**							
2	Cakupan penyelenggaraan administrasi perkantoran	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Cakupan Penanggulangan Bencana (Satuan: %)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Terpenuhinya kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur dalam kondisi baik (Satuan: %)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase capaian kinerja dan Keuangan Daerah (Satuan: %)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	IKM (Satuan: Nilai Interval Konversi IKM)	82,18	83,00	84,00	85,00	86,00	88,50	88,50
3	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**							
1	**Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**							
1106	**SOSIAL**							
3	LPE (Satuan: %)	5,17	5,36	5,55	5,74	5,92	6,11	6,11
2001	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**							
3	Produksi Ikan Budidaya (Satuan: ton)	3.751,41	3.600,00	3.780,00	3.745,44	4.167,45	3.896,76	3.974,69
3	Produksi Ikan Tangkap (Satuan: ton)	6.019,97	6.313,66	6.376,80	6.440,56	6.504,97	6.570,02	6.635,72
2002	**PARIWISATA**							
3	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (Satuan: Orang)	500,00	500,00	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00
3	Cakupan peningkatan sarana prasarana objek wisata dalam kondisi baik (Satuan: %)	23,00	1,00	43,48	21,74	21,74	21,74	21,74
3	Persentase kelembagaan di 23 ODTW (Satuan: %)	40,00	57,00	74,00	83,00	91,00	100,00	100,00
3	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (Satuan: Orang)	749.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Jumlah Desa Wisata yang dikembangkan (Satuan: Desa)	7,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3	Persentase sektor ekonomi kreatif yang berkembang (Satuan: %)	18,00	18,00	37,00	50,00	63,00	75,00	75,00
2003	**PERTANIAN**							
3	Pertumbuhan Nilai Produksi yang terjual (Satuan: %)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3	Jumlah Produksi : Padi (Satuan: ton)	595.485,00	595.484,88	607.394,58	619.542,47	631.933,32	644.571,98	657.463,20
3	Jumlah Produksi Daging (Satuan: ton)	8.847,00	9.680,00	10.164,00	10.672,00	11.205,00	11.765,00	12.353,00
3	Pertumbuhan Nilai Produksi (Satuan: %)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Palawija (Satuan: ton)	34.256,00	34.225,51	35.930,02	36.648,62	37.381,59	38.192,22	38.289,82
3	Hortikultura (Satuan: ton)	184.059,00	184.059,00	187.740,18	191.494,98	195.324,88	199.231,38	203.116,01
3	Perkebunan (Satuan: ton)	32.543,00	32.543,00	33.193,86	33.857,74	34.534,89	35.225,59	35.930,00
2	**Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**							

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1103	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							
3	indeks infrastruktur publik (Satuan: %)	67,66	68,86	69,88	70,61	71,34	72,04	72,04
3	Persentase jalan terbangun (Satuan: %)	68,33	74,66	81,00	87,33	93,67	100,00	100,00
3	persentase panjang Jalan perdesaan yang terbangun (Satuan: %)	76,50	81,20	85,90	90,60	95,30	100,00	100,00
3	Persentase layanan informasi jasa konstruksi (Satuan: %)	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase tenaga kerja bersertifikat (Satuan: %)	16,67	33,33	50,00	66,67	83,33	100,00	100,00
3	Persentase jembatan pedesaan yang terbangun (Satuan: %)	53,13	62,50	71,88	81,25	90,63	100,00	100,00
3	persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik (Satuan: %)	50,88	52,47	54,07	55,66	57,26	58,85	58,85
3	persentase jalan dalam kota kabupaten yang memiliki trotoar dan drainase/saluran (Satuan: %)	14,82	16,93	19,03	21,13	23,23	25,34	25,34
2004	**PERDAGANGAN**							
3	Persentase sarana perdagangan yang refresentatif (Satuan: %)	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	40,00
3	**Fokus Iklim Berinvestasi**							
1212	**PENANAMAN MODAL**							
3	Jumlah nilai investasi berskala nasional(PMDN/PMA) (Satuan: Rupiah)	20,95	1.000.000.000.000	1.070.000.000.000	1.144.900.000.000	1.225.043.000.000	1.310.796.010.000	1.310.796.010.000
3	Jumlah Investor PMA dan PMDN berskala nasional (Satuan: investor)	18,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00



BAB IX
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 merupakan pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lebak, serta terpadu dan terarah dengan pembangunan Provinsi Banten dan pembangunan nasional selama kurun waktu lima tahun mendatang.

Sesuai dengan tujuan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 ini, diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut sebagai kaidah yang dipedomani bersama :

1. Seluruh Perangkat Daerah menjadikan dokumen ini sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.
2. Perubahan RKPD Tahun 2019 secara otomatis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam substansi dokumen RPJMD ini.
3. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Bappeda selaku koordinator, menyusun Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2024-2029 pada tahun terakhir sebelum dokumen ini berakhir dengan mengacu kepada hasil pencapaian kinerja pembangunan daerah. Rancangan Teknokratik RPJMD dimaksud menjadi landasan penyusunan serta bersinergi dengan penyusunan RKPD Tahun 2024 dan/atau Tahun Anggaran 2025.
4. Penyusunan RKPD Tahun 2024 dan/atau Tahun Anggaran 2025 juga merujuk pada permasalahan pokok dan isu strategis pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJPD 2025-2045.
5. Indikator program yang mengalami perubahan dapat ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lebak.

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA